

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
LPPD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia serta perkenan-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 yang merupakan amanat konstitusional dapat diselesaikan.

Di samping itu dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian gambaran kinerja tahun ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Sudah pasti dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja pada tahun 2020, akan kami jadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan kinerja pada tahun mendatang. Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat konstruktif, sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kami ke depan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya, seraya berharap, semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Kepulauan Selayar, senantiasa memperoleh petunjuk serta ridha Allah SWT.

Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr.

Kepulauan Selayar, 30 Maret 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR



H. MUH. BASLI ALI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR, BAGAN DAN GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.1.1. Penjelasan Umum	1
A. Dasar Hukum	1
B. Kondisi Geografis Daerah	6
C. Perkembangan Penduduk	16
D. Kecamatan, Desa dan Kelurahan	19
E. Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil	22
F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	29
I.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	38
A. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Pemerintah Daerah	38
1. Permasalahan Pembangunan Daerah	38
2. Isu-isu Strategis Daerah	73
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	75
1. Visi	76
2. Misi	79
3. Tujuan dan Sasaran	82
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah	102
1. Strategi dan Arah Kebijakan	101
2. Program Pembangunan Daerah	110
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2020	134
1. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	134
2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020	157
3. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2020	161
I.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	168

BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
II.1.	Capaian Kinerja Makro	175
A.	Pembangunan Manusia	175
B.	Angka Kemiskinan	176
C.	Angka Pengangguran	176
D.	Pertumbuhan Ekonomi	177
E.	Pendapatan Perkapita	178
F.	Ketimpangan Pendapatan	178
II.2.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	179
II.2.1.	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	179
II.2.2.	Indikator Kinerja Kunci Hasil	270
II.2.3.	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	303
II.3.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	309
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
1.	Dasar Hukum	504
2.	Gambaran Umum Tugas Pembantuan	505
3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	508
3.1.	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah	508
3.1.1.	Target Kinerja	508
3.1.2.	Realisasi Kinerja	511
3.2.	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah	521
3.2.1.	Target Kinerja	521
3.2.2.	Realisasi Kinerja	522
3.3.	Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan	528
3.4.	Saran dan Tindak Lanjut	529
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
4.1.	Urusan Pendidikan	530
4.2.	Urusan Kesehatan	539
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum	548
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat	555

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	586
4.6. Urusan Sosial	574
4.7. Program dan Kegiatan	579

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN A

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	8
Tabel 1.2 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Kepulauan Selayar	9
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	16
Tabel 1.4 Sebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	17
Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2020	19
Tabel 1.6 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	20
Tabel 1.7 Unit Kerja Perangkat Daerah dan Tipe Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	24
Tabel 1.8 Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan	27
Tabel 1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin	28
Tabel 1.10 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Kepangkatan	28
Tabel 1.11 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan	29
Tabel 1.12 Penjabaran APBD Pokok dan APBD Perubahan 2020	30
Tabel 1.13 Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2020	32
Tabel 1.14 Realisasi Dana Perimbangan Daerah 2020.....	32
Tabel 1.15 Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah.....	33
Tabel 1.16 Penjabaran Belanja APBD Pokok dan Perubahan Tahun 2020	35
Tabel 1.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja	36
Tabel 1.18 Penjabaran Pembiayaan APBD Pokok dan Perubahan Tahun 2020	37
Tabel 1.19 Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan.....	38
Tabel 1.20 Keterkaitan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar	78
Tabel 1.21 Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021	82
Tabel 1.22 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 – 2021	85

Tabel 1.23	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	102
Tabel 1.24	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kepulauan Selayar	114
Tabel 1.25	Konsistensi Evaluasi dan Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar	134
Tabel 1.26	Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	136
Tabel 1.27	Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 20 dengan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	137
Tabel 1.28	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulsel dan Prioritas Pembangunan Nasional	140
Tabel 1.29	Sinergitas dan Sinkronisasi Tujuan SDGs dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	149
Tabel 1.30	Penjabaran Program Pembangunan Daerah dari Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	151
Tabel 1.31	Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	158
Tabel 1.32	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar	162
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro	175
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	309
Tabel 2.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	317
Tabel 2.3	Pencapaian Indikator Sasaran	318
Tabel 2.4	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020	319
Tabel 2.5	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1	326
Tabel 2.6	Menciptakan kondisi stabilitas keamanan daerah yang kondusif.....	329
Tabel 2.7	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2	330
Tabel 2.8	Peningkatan Realisasi Kinerja dari 2017 s.d 2019.....	330
Tabel 2.9	Opini Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2016 s.d. 2019	331

Tabel 2.10	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3	333
Tabel 2.11	Perkembangan capaian Nilai SAKIP Kab. Kep. Selayar Tahun 2015 – 2020	335
Tabel 2.12	Perkembangan Capaian Nilai EKPPD.....	338
Tabel 2.12	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4	339
Tabel 2.13	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5	340
Tabel 2.14	Data Angka Kriminalitas Tahun 2014 – 2020	341
Tabel 2.15	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	342
Tabel 2.16	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6	346
Tabel 2.17	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7	347
Tabel 2.18	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8	355
Tabel 2.19	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9	361
Tabel 2.20	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10	363
Tabel 2.21	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2016 – 2020.....	364
Tabel 2.22	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020	365
Tabel 2.23	Data Jumlah siswa dan Jumlah penduduk	366
Tabel 2.24	Data Angka Partisipasi.....	367
Tabel 2.25	Capaian Angka Partisipasi Murni.....	369
Tabel 2.26	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11.....	371
Tabel 2.27	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 12.....	373
Tabel 2.28	Peserta KB Aktif menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	374
Tabel 2.29	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 13.....	381
Tabel 2.30	Responden pada pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi	382
Tabel 2.31	Jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Tahun 2020	383
Tabel 2.32	Capaian Indikator Pemuda Mandiri.....	385
Tabel 2.33	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 14.....	386
Tabel 2.34	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 15.....	387
Tabel 2.35	Data Transportasi Darat Kabupaten Kepulauan Selayar	388
Tabel 2.36	Data Kapal di Kabupaten Kepulauan Selayar	389

Tabel 2.37	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16.....	391
Tabel 2.38	Data kondisi jalan	393
Tabel 2.39	Daftar jalan menurut keadaan dan status jalan dalam kilometre Tahun 2020	394
Tabel 2.40	Data Pelabuhan Laut Kabupaten Kepulauan Selayar	398
Tabel 2.41	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16.....	401
Tabel 2.42	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16.....	404
Tabel 2.43	Capaian Rumah Layak Huni Tahun 2017 – 2020.....	407
Tabel 2.44	Kawasan Kumuh Tertangani 2016 – 2020	409
Tabel 2.45	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16.....	411
Tabel 2.46	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 17.....	413
Tabel 2.47	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 18.....	424
Tabel 2.48	Data Produktifitas Penumpang Dari dan Ke Wilayah Daratan Dengan Wilayah Kepulauan Melalui Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.....	425
Tabel 2.49	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 19.....	426
Tabel 2.50	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 20.....	430
Tabel 2.51	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 21.....	432
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Tahun 2020	433
Tabel 2.53	Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Tahun 2020.....	435
Tabel 2.54	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 22.....	436
Tabel 2.55	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23.....	438
Tabel 2.56	Pengukuran Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2020	440
Tabel 2.57	Situasi Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Konsumsi Energi dan Protein serta Besarnya Skor PPH	441
Tabel 2.58	Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas Padi 2016 – 2020	443

Tabel 2.59	Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas Jagung 2016 – 2020	444
Tabel 2.60	Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas Jeruk Keprok 2016 – 2019	445
Tabel 2.61	Capaian Produksi dan Produktivitas perkebunan (Kelapa, Pala, Cengkeh, Jambu Mete) 2016 – 2020	446
Tabel 2.62	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23.....	447
Tabel 2.63	Perbandingan Capaian Populasi Ternak (ekor) 2016 – 2020	450
Tabel 2.64	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23.....	451
Tabel 2.65	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23.....	452
Tabel 2.66	Pengukuran Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Tahun 2020	453
Tabel 2.67	Data Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	453
Tabel 2.68	Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	454
Tabel 2.69	Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Produksi Perikanan Tangkap	454
Tabel 2.70	Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	456
Tabel 2.71	Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	456
Tabel 2.72	Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Produksi Perikanan Budidaya	456
Tabel 2.72	Target dan Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2020	457
Tabel 2.73	Perbandingan Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan	458
Tabel 2.74	Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Konsumsi Ikan	459

Tabel 2.75	Capaian Indikator Kinerja pada Konsumsi Ikan Tahun 2019	
Tabel 2.76	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 24.....	459
Tabel 2.77	Data perbandingan IKLH dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2015 s.d Tahun 2020	460
Tabel 2.78	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air	461
Tabel 2.79	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara.....	462
Tabel 2.80	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan.....	463
Tabel: 2.81	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	464
Tabel : 2.82	Luas Kawasan Penggunaan Lainnya	465
Tabel: 2.83	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 201	466
Tabel 2.84	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 25.....	468
Tabel 2.85	Distribusi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kegiatan	468
Tabel 2.86	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 26.....	470
Tabel 2.87	Persentase Koperasi Tahun 2020	471
Tabel 2.89	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 – 2020 Kabupaten Kepulauan Selayar	471
Tabel 2.90	Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2013 – 2020 Kabupaten Kepulauan Selayar	472
Tabel 2.91	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 27.....	477
Tabel 2.92	Realisasi Anggaran Tahun 2020	479
Tabel 2.93	Tingkat Efektivitas sumber daya Tahun 2019.....	484
Tabel 2.94	Keterkaitan Sasaran Strategis, IKU dan Program.....	490
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	514
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	524
Tabel 4.1	Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada pendidikan anak usia dini.....	531
Tabel 4.2	Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada Sekolah Dasar.....	531
Tabel 4.3	Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama	532

Tabel 4.4	Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan kesetaraan	532
Tabel 4.5	Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada pendidikan anak usia dini.....	533
Tabel 4.6	Pencapaian pemebuhan SPM pendidikan pada Sekolah Dasar	534
Tabel 4.7	Pencapaian pemebuhan SPM pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama	535
Tabel 4.8	Pencapaian pemebuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	536
Tabel 4.9	Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2020 ...	536
Tabel 4.10	Jumlah personil pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar	537
Tabel 4.11	Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	541
Tabel 4.12	Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2020	542
Tabel 4.13	Alokasi Anggaran SPM Kesehatan.....	546
Tabel 4.14	Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Urusan PUPR.....	548
Tabel 4.15	Realisasi Pencapaian SPM Urusan PUPR Tahun 2020	549
Tabel 4.16	Pencapaian SPM Air Tahun 2016-2020	550
Tabel 4.17	Pencapaian SPM Air Limbah.....	551
Tabel 4.18	Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Urusan PUPR Tahun 2020..	552
Tabel 4.19	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar	553
Tabel 4.20	Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar	554
Tabel 4.21	Jumlah Tenaga Sukarela Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar	555
Tabel 4.22	Target Pencapaian SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020	556
Tabel 4.23	Realisasi Capaian SPM bidang Perumahan Tahun 2020	557
Tabel 4.24	Target Pencapaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	561
Tabel 4.25	Capaian Target SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2020	562

Tabel 4.26	Besaran Anggaran dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2020 ..	563
Tabel 4.27	Jumlah Personil Aktif Satpol.PP dan Damkar Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2020	567
Tabel 4.28	Personil Satpol.PP dan Damkar Kab. Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Pendidikan	569
Tabel 4.29	Target Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana	571
Tabel 4.30	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah	572
Tabel 4.31	Kualifikasi Pendidikan Personil SPM BPBD Tahun 2020	572
Tabel 4.32	Kualifikasi Pangkat dan Golongan Personil SPM BPBD Tahun 2020	575
Tabel 4.33	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	576
Tabel 4.34	Capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar	582
Tabel 4.35	Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Dinas Kesehatan	586
Tabel 4.36	Target Kinerja dan Anggaran Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Air Limbah	458

**DAFTAR
GAMBAR, BAGAN DAN GRAFIK**

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Administratif Kabupaten Kepulauan Selayar.....	6
Grafik 1.1 Luas dan Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	9
Grafik 1.2 Diagram Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
Grafik 1.3 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2020	19
Bagan. 1.1 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.....	26
Gambar 1.2 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	83
Gambar 1.3 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	83
Gambar 1.4. Arsitektur Kinerja RPJMD antara kinerja Strategis dengan Operasional	110
Gambar 2.1 Kondisi jalan di Kecamatan Bontosikuyu	393
Gambar 2.2 Area Parkir Pesawat (Apron) Bandara H. Aroepala	395
Gambar 2.3 Pelabuhan Penyeberangan Pamatata	397
Gambar 2.4 Area Parkir dan Peron Kedatangan/Keberangkatan Terminal Angkutan Darat Benteng	399
Gambar 2.5 Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang	401
Gambar 2.6 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Binanga Parra 3 (Kecamatan Pasimasunggu)	402
Gambar 2.6 Pembangunan Intake dan Tata Air Baku Bikoti	406

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

I.1.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu dokumen yang wajib disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah termaktub dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), serta pasal 71 ayat 2 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

A. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

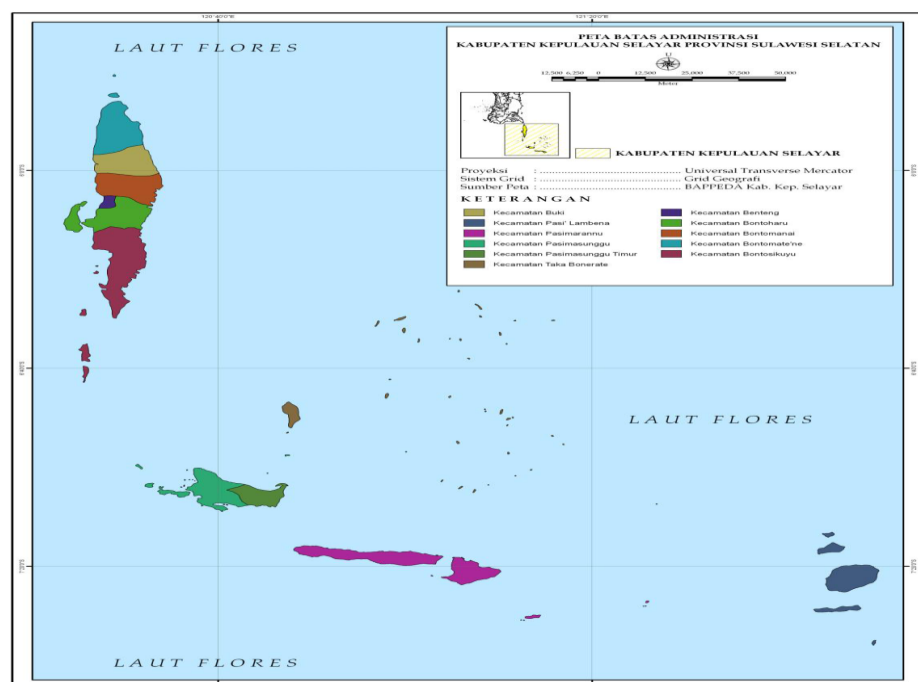
- Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 53);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 73);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 94);

30. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 418);
31. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 74);

B. Kondisi Geografis Daerah

Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 130 Pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Gugusan kepulauan tersebut sebagian dihuni penduduk, sebagian lagi adalah pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau berpenghuni tersebut antara lain Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi Gusung, Bahuluang, Tambolongang, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate, Pasi Tallu, Kakabia, Jinato, Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Ki'di, Kalaotoa, Latondu, Pulo Madu dan lain-lain. Jumlah keseluruhan pulau berpenghuni 34 buah. Gambaran umum wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar secara administratif, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar.1.1
Peta Administratif Kabupaten Kepulauan Selayar



a) Letak Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara $5^{\circ}42' \sim 7^{\circ}35'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}15' \sim 122^{\circ}30'$ Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gugusan pulau yang terletak di ujung selatan Jazirah Sulawesi yang secara administratif menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan sebagialah satu kabupaten dan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari Pulau Sulawesidengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar;
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur

b) Luas Wilayah

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km²dimana luas daratan 1.357,03 km², sedangkan luas laut 9.146,66 km², dengan panjang garis pantai 670 km. Secara administratif, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, 81(delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur ibukotanya Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate ibukotanya Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena ibukotanya Kalaotoa. Adapun 6 kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng ibukotanya Benteng, Kecamatan Bontoharu ibukotanya Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu ibukotanya Pariangan, Kecamatan Bontomanai ibukotanya Polebunging, Kecamatan Buki ibukotanya Buki dan Kecamatan Bontomatene ibukotanya Batangmata.

Berdasarkan luas wilayahnya, Kecamatan Bontosikuyu merupakan kecamatan yang paling luas yakni 248,22 km², disusul Kecamatan Pasimarannu yang meliputi pulau Bonerate dan Pulau Lambego (Kalao) dengan luas 195,33 km². Selanjutnya Kecamatan Bontomatene yang terletak di ujung utara Pulau Selayar seluas 193,05 km². Sementara Kecamatan Benteng yang juga melingkupi ibukota kabupaten tercatat sebagai kecamatan terkecil dengan luas 24,63 km². Berikut adalah rincian luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

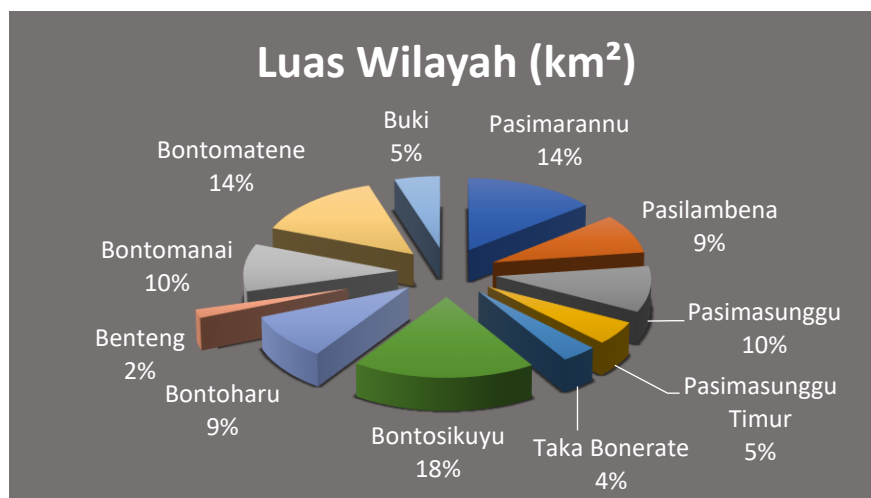
Tabel 1.1
 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Pasimarannu	195,33	14,39
2	Pasilambena	114,88	8,47
3	Pasimasunggu	131,80	9,71
4	Pasimasunggu Timur	67,14	4,95
5	Taka Bonerate	49,30	3,63
6	Bontosikuyu	248,22	18,29
7	Bontoharu	128,12	9,44
8	Benteng	24,63	1,82
9	Bontomanai	136,42	10,05
10	Bontomatene	193,05	14,23
11	Buki	68,14	5,02

Sumber Data: Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka 2020

Dalam gambar 1.1 ditampilkan persentase luas wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kecamatan Takabonerate merupakan kecamatan dengan persentase luas terbesar sebesar 16% disusul kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Pasimarannu, masing- masing sebesar 15% dan 13%.

Grafik 1.1
 Luas dan Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar



Sumber Data: Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka 2020

Ditinjau dari jarak ibukotanya ke ibukota kabupaten, jarak kecamatan-kecamatan yang ada sangat bervariasi, dari yang dekat, jauh dan sangat jauh. Kecamatan terdekat tentu saja adalah Kecamatan Benteng yang melingkupi ibukota kabupaten disusul Kecamatan Bontoharu yang berjarak 3 (tiga) kilometer sedangkan yang terjauh adalah Kecamatan Pasilambena yang berjarak kurang lebih 193 km dengan waktu tempuh terkadang sampai sehari penuh dengan menggunakan perahu motor. Berikut rincian jarak dari ibukota setiap kecamatan ke ibukota kabupaten:

Tabel 1.2
 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
 di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Pasimarannu	Bonerate	±140
2	Pasilambena	Latokdok	±193
3	Pasimasunggu	Benteng Jampea	±85
4	Pasimasunggu Timur	Ujung Jampea	±96
5	Taka Bonerate	Batang	±75
6	Bontosikuyu	Pariangan	±18
7	Bontoharu	Matalalang	±3
8	Benteng	Benteng	0
9	Bontomanai	Polebungin	±18

10	Bontomatene	Batangmata	±27
11	Buki	Buki	±19

Sumber Data: Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka2020

Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 (Sembilan) bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Lebih jauh, pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar didukung pula oleh potensi sumberdaya alam terutama sektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Takabonerate.

c) Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Selayar bervariasi, sebagian tanah datar dan sebagian agak miring. Fisiografi Pulau Selayar terbagi dalam beberapa morfologi bentuk lahan. Satuan-satuan morfologi bentuk lahan Pulau Selayar dapat dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi, yaitu:

- Satuan morfologi daratan alluvial pantai;
- Satuan morfologi perbukitan bergelombang;
- Satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal.

Satuan morfologi tersebut di atas dikontrol oleh batuan serta struktur dan formasi geologi yang ada di Pulau Selayar. Satuan morfologi daratan alluvial pantai menempati daratan sempit di pantai barat Pulau Selayar dan terbentuk oleh endapan pasir, pantai

lempungan, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan batuan morfologi perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal umumnya menempati bagian barat dengan ketinggian 356-657 meter di atas permukaan laut. Bentang alam yang tinggi di sini di antaranya puncak Gunung Bontoharu (435 mdpl), Gunung Bontokali (353 mdpl), serta Gunung Bontosikuyu (607 mdpl).

Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, lava, konglomerat, tufa dengan batuan dengan selingan batuan sedimen laut. Persentase kelas kelerengan Pulau Selayar umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15%), dan semakin ke Selatan kelerengan tersebut semakin besar. Kecamatan Bontosikuyu mempunyai kelas sangat terjal ($>40^\circ$) mencapai 43,97% terhadap luas wilayah kecamatan, sedangkan di Kecamatan Bontoharu lereng sangat terjal mencapai 33,12%, akan tetapi kebalikannya di Kecamatan Bontomatene dimana lereng sangat terjal hanya mencapai 4,21% dari luas wilayah kecamatan.

Adapun jenis tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat bervariasi berdasarkan hasil analisis iklim, geologi (bahan induk), topografi (kemiringan lereng) serta analisis vegetasi yang ada. Demikian pula penyebarannya sangat bervariasi. Berdasarkan penamaan jenis tanah sistem FAO (*Food and Agriculture Organization*), dikenal jenis tanah Alluvial Matime yang terdapat pada pesisir pantai sampai jenis tanah latosol yang berada di daerah bergunung. Sedangkan penamaan tanah berdasarkan sistem USDA (*United States Department of Agriculture*), dikenal jenis tanah Emtisol sampai Ultisol. Jenis tanah adalah turunan atau rincian dari jenis tanah berdasarkan sifat-sifat lapisan perinci atau horizon tanah.

Macam tanah yang terdapat di Pulau Selayar adalah sebagai berikut:

- a. Tanah Litosol. Tanah ini terbentuk pada batuan kapur pada ketinggian lebih dari 100 meter. Bentuk wilayahnya berbukit sampai

bergunung dengan lereng-lereng sangat terjal sampai vertikal. Penampang tanah sangat tipis dan terdapat di sela-sela batu gamping berwarna coklat tua, lempung berdebu, gumpal sampai pejal, agak keras.

- b. Tanah Regosol Kelabu. Tanah jenis ini terdapat di sepanjang pantai barat Pulau Selayar, dari utara sampai ke Kota Benteng pada ketinggian hingga 2 meter di atas permukaan laut. Bahan induknya endapan pasir dari tufa dan batuan alkali. Penampang tanah dalam, lapisan atas berwarna coklat tua sampai coklat, pasir granuler berbutir tunggal lepas lapisan bawah kelabu muda, pasir berbutir tunggal lepas.
- c. Kompleks Rensine dan Regosol. Tanah ini terdapat pada batuan tua dan batu gamping koral. Bentuk wilayah berbukit dengan lereng landai sampai curam dan tidak teratur. Rensine mempunyai lapisan tanah tipis berwarna coklat tua kekelabuan sampai coklat tua, lempung terlihat remah dan gembur. Lapisan tanah sedalam lebih kurang 25 cm terletak di atas kapur lunak. Regosol berwarna coklat sangat kekelabuan, berkerikil, gumpal, gembur. Lapisan bawah coklat tua kekelabuan sampai coklat pucat liat berdebu, pejal gembur terdapat banyak batu besar dan kerikil di permukaan dan di dalam penampang tanah.
- d. Mediteran Coklat Tua. Kelompok tanah ini terdapat memanjang dari utara-selatan, dari Bontomatene sampai Barang-barang dengan ketinggian antara 15-50 meter di permukaan. Bentuk wilayahnya berombak sampai bergelombang. Bahan induk serpih bercampur tufa. Penampang tanah cukup dalam dengan lapisan atas berwarna coklat, lempung berdebu sampai liat, gumpal sampai kubus, keras sampai sangat keras. Lapisan tanah bawah coklat tua kekuningan sampai coklat kekuningan, lempung berdebu, gumpal sampai pejal, sangat keras.
- e. Kompleks Mediteran Merah dan Litosol. Jenis tanah ini terdapat di bagian utara Pulau Selayar. Bentuk wilayahnya bergelombang dan

miring ke arah pantai. Bentuk induknya batu gamping setempat terdapat batu koral. Tanah mediteran berpenampang sedang, lapisan atas debu, remah sampai agak gembur. Tanah litosol mempunyai lapisan tanah sangat tipis dengan singkapan-singkapan batu kapur.

d) Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau kecil yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar . Geologi Pulau Selayar masih berhubungan dengan geologi Sulawesi Selatan bagian selatan. Sedang geologi pulau-pulau kecil di kabupaten ini, yang terletak di Laut Flores, kemungkinan berhubungan dengan geologi Pulau Buton.

Batuan tertua yang menyusun Pulau Selayar adalah batuan gunung api Formasi Camba yang berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir. Bagian bawah dari Formasi Camba tersusun oleh breksi, lava, konglomerat dan tufa. Di atasnya dijumpai batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan gunungapi. Batuan-batuan Formasi Camba dijumpai di bagian tengah pulau dengan arah penyebaran utara-selatan. Di atas Formasi Camba dijumpai Formasi Walanae yang menjemari dengan Batugamping Selayar. Formasi Walanae terdiri dari batupasir yang berselingan dengan batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan batu gamping. Formasi ini berumur dari Miosen Tengah hingga Pliosen. Penyebaran batuan Formasi Walanae memanjang di bagian barat Pulau Selayar dari utara ke selatan.

Batu Gamping Selayar penyebarannya terutama di bagian utara dan barat, dan terdiri dari batu gamping pejal, batu gamping koral, dan kalkarenit dengan sisipan napal dan batupasir gampingan. Umur dari Batu Gamping Selayar adalah Miosen Akhir sampai Pliosen Awal. Batuan termuda yang tersingkap di Pulau Selayar adalah endapan aluvial dan terumbu karang. Endapan aluvial yang merupakan sedimen pantai dan terdiri dari hasil rombakan batuan yang tersingkap di

daratan, dijumpai di sepanjang pantai barat bagian tengah dan utara pulau. Endapan aluvial terdiri dari kerikil, pasir, lempung, lumpur dan rombakan terumbu karang.

Pada umumnya pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar disusun oleh terumbu karang. Beberapa pulau menunjukkan kondisi geologi yang sangat berbeda dengan daratan Pulau Selayar. Beberapa pulau disusun oleh batuan beku yang berasal dari kerak kontinen seperti halnya Pulau Buton. Pulau-pulau ini adalah Pulau Jampea yang disusun oleh batuan beku granit, Pulau Kayuadi bagian utara disusun oleh batuan beku yang bersifat menengah. Keberadaan pulau-pulau ini sampai sekarang masih menjadi obyek penelitian yang menarik bagi pakar geologi. Batuan-batuan yang menyusun Pulau Selayar pada umumnya terlihat lemah sampai sedang dengan kemiringan batuan ke arah Barat dan jurus perlapisannya relatif Utara-Selatan.

e) Hidrologi

Kondisi hidrologi Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar, yang pada umumnya debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai dan sistem sungainya. Akibat sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan (*straight*) rendah, serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga besaran debit air sungai-sungai di Selayar sulit diukur.

Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka pada wilayah bagian tengah (yang merupakan sebaran endapan Formasi Walanae) merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat tertekan (*aresian aquifes*) dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari 1-3 liter/detik). Air tanah bebas (*watertable groundwater*) dijumpai pada endapan alluvial dan endapan pantai, endapan Formasi

Walanae serta pada lembah-lembah yang ditempati oleh endapan batuan Formasi Camba.

Tingkat kedalaman air tanah sangat bervariasi tergantung pada keadaan alam dan jenis lapisan batuan. Pada endapan alluvial dan endapan pantai, tingkat kedalaman muka air tanahnya berkisar antara 5 – 6 meter, dan sangat dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas ini dapat dijumpai pada daerah yang ditutupi oleh endapan batu gamping Selayar dari Formasi Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang akibat pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah.

Sumber air yang ada sangat terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Indikasi keberadaan mata air tersebut terdapat di beberapa wilayah antara lain: Batangmata Sapo, Lembang-lembang, Bonto dan sebelah timur Tile-tile, dengan besaran debit air relatif kecil sampai sedang (1 – 4 liter/detik).

Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan perairan laut. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk sungai-sungai bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya, Tamasongia dengan debit air yang bervariasi. Keterbatasan sumber air akibat cakupan luas DAS (Daerah Aliran Sungai) yang relatif sempit, struktur batuan permukaan dan *catchment area* sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali potensi air. Oleh karena itu arahan penggunaan lahan pada kawasan potensial resapan air dibatasi untuk kawasan budidaya dan penggalian sumber air tanah khususnya kawasan utara.

f) Wilayah Rawan Bencana

Sebagai Kabupaten Kepulauan yang secara geografis terletak di ujung selatan Jazirah Sulawesi dan memanjang dari utara ke selatan dan terdiri dari gugusan pulau-pulau (132 Pulau). Kabupaten Kepulauan

Selayar berpotensi terhadap bencana alam berupa tsunami, kecelakaan laut, angin kencang, abrasi pantai dan banjir. Hampir semua Desa dan Kelurahan sepanjang pantai barat dan pantai timur serta 26 Pulau berpenghuni pada 5 (lima) kecamatan yang berada di kepulauan, rawan terhadap bencana alam laut.

C. Perkembangan Penduduk

a. Kepadatan Penduduk Geografis

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah.

Tabel 1.3
 Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan
 di Kabupaten Kepulauan Selayar

KECAMATAN	TAHUN		
	2018	2019	2020
1	2	3	4
Pasimarannu	9.310	10.747	10.804
Pasilambena	7.700	8.204	8.268
Pasimasunggu	8.483	8.922	8.977
Taka Bonerate	13.804	13.949	13.880
Pasimasunggu Timur	7.546	8.016	8.037
Bontosikuyu	15.265	15.837	15.762
Bontoharu	13.566	14.802	14.794
Benteng	26.155	23.977	24.842
Bontomanai	12.829	14.199	14.078
Bontomatene	13.186	13.830	13.702
Buki	6.436	6.987	6.933
JUMLAH	134.280	139.470	140.077

Sumber : Disdukcapil Kep. Selayar 2021

b. Sebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk

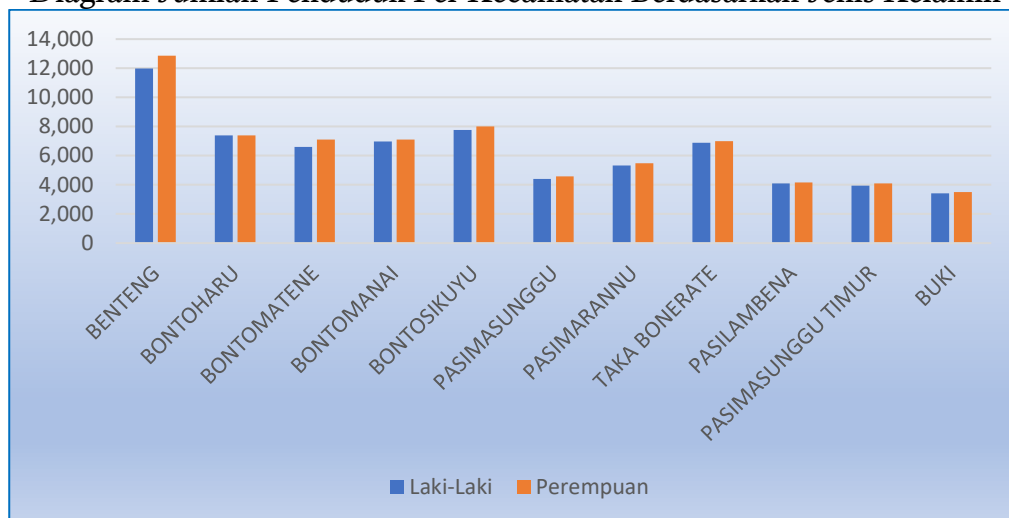
berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Adapun gambaran sebaran penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jenis kelamin diurai pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
 Sebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (JIWA)	%
		n (JIWA)	%	n (JIWA)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BENTENG	11.983	8,55	12.859	9,18	24.842	17,73
2	BONTOHARU	7.397	5,28	7.397	5,28	14.794	10,56
3	BONTOMATENE	6.597	4,71	7.105	5,07	13.702	9,78
4	BONTOMANAI	6.981	4,98	7.097	5,07	14.078	10,05
5	BONTOSIKUYU	7.759	5,54	8.003	5,71	15.762	11,25
6	PASIMASUNGGU	4.403	3,14	4.574	3,27	8.977	6,41
7	PASIMARANNU	5.318	3,80	5.486	3,92	10.804	7,71
8	TAKA BONERATE	6.892	4,92	6.988	4,99	13.880	9,91
9	PASILAMBENA	4.096	2,92	4.172	2,98	8.268	5,90
10	PASIMASUNGGU TIMUR	3.946	2,82	4.091	2,92	8.037	5,74
11	BUKI	3.412	2,45	3.504	2,50	6.933	4,95
JUMLAH TOTAL		68.801	49,12	71.276	50,8 8	140.077	100

Sumber : Disdukcapil Kep. Selayar 2021

Grafik 1.2
 Diagram Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Dukcapil Kep. Selayar 2021

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak merata. Daerah yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki terbanyak di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu di Kecamatan Benteng sebanyak 11.983 jiwa, Disusul Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 7.759 jiwa, dan Kecamatan Bontoharu sebanyak 7.397 jiwa. Demikian juga halnya, jumlah penduduk perempuan yang terbanyak di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar masih pada tiga kecamatan yang sama, yaitu di Kecamatan Benteng sebanyak 12.859 jiwa, kemudian Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 8.003 jiwa, dan Kecamatan Bontoharu sebanyak 7.397 jiwa. Sementara itu, wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki terendah adalah Kecamatan Buki sebanyak 3.412 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan terendah adalah Kecamatan Buki sebanyak 3,535 jiwa.

c. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar naik dari 0,76% pada tahun 2019 menjadi 0,43 pada tahun 2020, Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 sebanyak 140.077 jiwa dan tahun 2019 sebanyak 139.470 jiwa (Tabel 1.2), terdiri

dari laki-laki sebanyak 68.801 jiwa dan perempuan sebanyak 71.276 jiwa.

Tabel 1.5
 Laju Pertumbuhan Penduduk
 Tahun 2018-2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
		2019	2020
1. Jumlah Penduduk	Jiwa	139.470	140.077
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,76	0,43
3. Kepadatan Penduduk	jiwa per km ²	13	13

Sumber : Disdukcapil Kepulauan Selayar 2021

Grafik 1.3
 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2018-2020



Sumber : Disdukcapil Kepulauan Selayar 2021

D. KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jampea,

Kecamatan Taka Bonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan ibukota Pariangan, Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebungin, Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota Batangmata. Berikut adalah rincian kecamatan, desa dan kelurahan:

Tabel 1.6.
 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Bontomatene	DESAR BARAT LAMBONGAN DESA BONTONA SALUK DESA PAMATATA DESA ONTO DESA MAHARAYYA DESA TANETE DESA MENARA INDAH DESA BUNGAIYA DESA KAYU BAUK DESA TAMALANREA KELURAHAN BATANGMATA KELURAHAN BATANGMATA SAPO
2	Buki	DESAR BUKI DESA LALANG BATA DESA BALANG BUTUNG DESA KOHALA DESA BONTOLEMPANGAN DESA MEKAR INDAH DESA BUKI TIMUR
3	Bontomanai	DESAR POLEBUNGIN DESA MARE-MARE DESA BONEA MAKMUR DESA JAMBUIYA DESA BONTOMARANNU DESA BONEA TIMUR DESA BARUGAIYA DESA PARAK DESA BONTOKORAANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

		DESA KABURU
4	Benteng	KELURAHAN BENTENG KELURAHAN BENTENG SELATAN KELURAHAN BENTENG UTARA
5	Bontoharu	DESA BONTOLEBANG DESA BONTOSUNGGU DESA BOTOBORUSU DESA BONTOTANGNGA DESA KAHU-KAHU DESA KALEPADANG KELURAHAN BONTOBANGUNG KELURAHAN PUTABANGUNG
6	Bontosikuyu	DESA HARAPAN DESA LOWA DESA APPATANAH DESA LAIYOLO BARU DESA LANTIBONGAN DESA PATILERENG DESA PATIKARYA DESA BINANGA SOMBAIYA DESA LAIYOLO DESA TAMBOLONGAN DESA POLASSI DESA KHUSUS BAHULUANG
7	Takabonerate	DESA KAYUADI DESA JINATO DESA TARUPA DESA NYIUR INDAH DESA LATONDU DESA RAJUNI DESA BATANG DESA TAMBUNA DESA KHUSUS PASITALLU
8	Pasimasunggu	DESA KEMBANGRAGI DESA MAMINASA DESA TANAMALALA DESA LABUANG PAMAJANG DESA MASSUNGKE DESA BONTOSAILE DESA TELUK KAMPE
9	Pasimasunggu Timur	DESA BONTOBULAENG DESA BONTOBARU DESA BONTOMALLING DESA LEMBANG BAJI

		DESA BONTOJATI DESA UJUNG
10	Pasimarannu	DESA BONEA DESA BATU BINGKUNG DESA LAMBEGO DESA MAJAPAHIT DESA BONERATE DESA KOMBA-KOMBA DESA SAMBALI DESA LAMANTU
11	Pasilambena	DESA KALAO TOA DESA LEMBANG MATENE DESA GARAUPA DESA PULO MADU DESA KARUMPA DESA GARAUPA RAYA

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda 2021

E. Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil

1. Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan upaya pembangunan dengan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah juga memiliki otoritas yang besar dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan dalam kerangka pemberian pelayanan, yaitu menentukan pelayanan yang berkualitas dan merupakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Disamping itu, Pemerintah Daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan struktur organisasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah (lebih proporsional, responsif, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan nyata daerah). Dalam era desentralisasi, terdapat peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya, desentralisasi atau otonomi daerah menuntut adanya empat faktor pendukung yang harus diperhatikan (Josef Riwu Kaho, 1991). Empat faktor tersebut meliputi : pertama, manusia sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dan sistem pemerintahan. Kedua, keuangan sebagai sumber

pembiayaan kegiatan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Ketiga, peralatan sebagai alat atau bendayang dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Daerah. Keempat, organisasi dan manajemen yang baik. Dalam konteks di atas, dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, salah satunya sangat tergantung bagaimanamengelola atau memmanage sumber daya manusianya (aparatur daerah). Ini sejalan puladengan maksud diterbitkannya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraantugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal ini, manajemen PNS Daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan drajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajibankepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian PNS daerah. Disisi lain, organisasi yang baik juga menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berkualitas. Organisasi yang dimaksud dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah organisasi perangkat daerah, yang merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka terbentuklah Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

2. Unit Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Unit Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 36, yang terdiri dari 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 18 Dinas, 4 Badan, 11 Kecamatan, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.7.
 Unit Kerja Perangkat Daerah dan Tipe
 Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	NAMA UNIT KERJA	TIPE
	A. Sekretariat Daerah	A
	B. Sekretariat DPRD	C
	C. Inspektorat Daerah	A
	D. DINAS DAERAH	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A
2	Dinas Kesehatan	A
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A
6	Dinas Sosial	B
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	A
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	A
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	A
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A

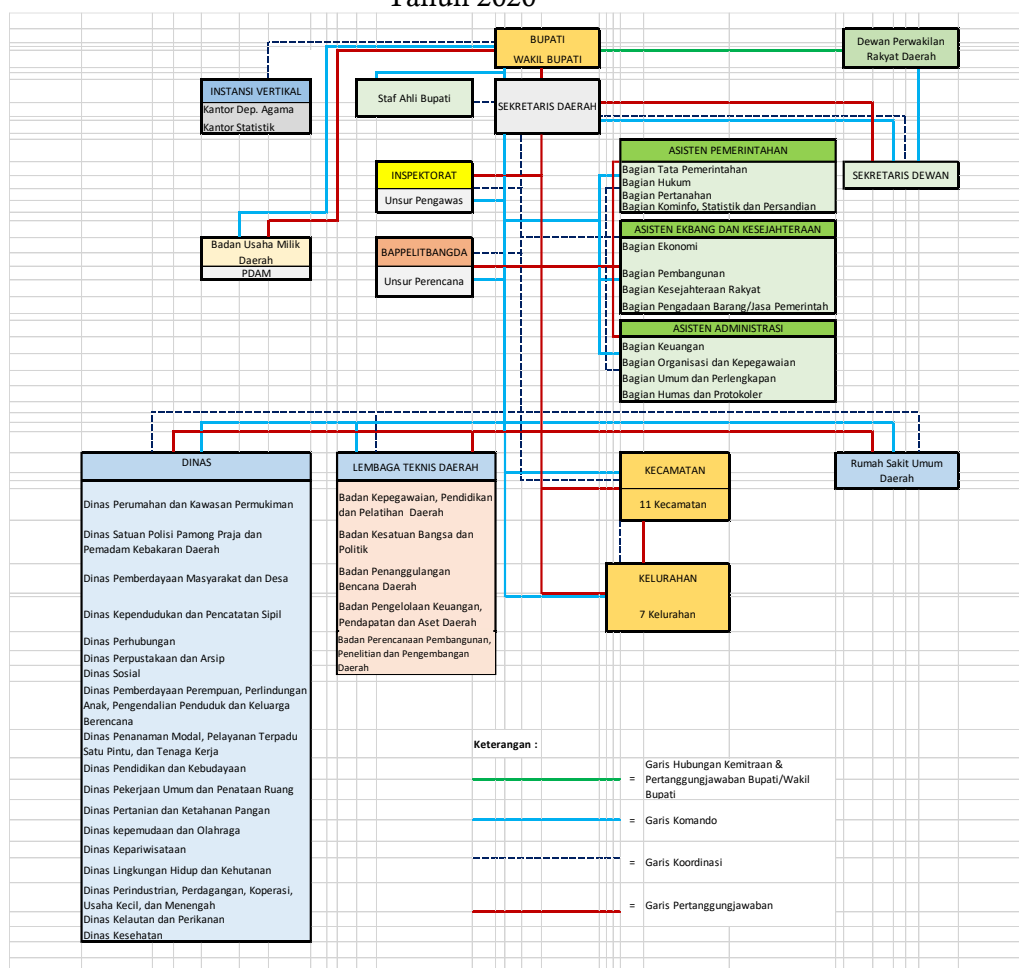
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	B
12	Dinas Perhubungan	A
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	A
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	B
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	B
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	A
18	Dinas Kepariwisata	A
E. BADAN DAERAH		
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	A
3	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	A
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A
F. KECAMATAN		
1	Pasilambena	A
2	Pasimarannu	A
3	Pasimasunggu Timur	A
4	Pasimasunggu	A
5	Taka Bonerate	A
6	Bontosikuyu	A
7	Bontoharu	A
8	Benteng	A
9	Bontomanai	A
10	Buki	A
11	Bontomatene	A

Sumber Data : Bagian organisasi dan Kepegawaian 2020

Susunan perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 dengan berpatokan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni sebagai berikut :

Bagan. 1.1.
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020



3. Pegawai Negeri Sipil

Terbitnya Undang-undang ASN Nomor 4 Tahun 2014 memberikan ketegasan bahwa PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur sipil negara yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa serta memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Selain tugas dan fungsinya tersebut PNS juga berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan data yang terhimpun dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk Data Tahun 2020, Sekitar 3.767 PNS dari instansi nonvertikal bekerja di Kepulauan Selayar. Berdasarkan pendidikan sebanyak 3.733 PNS memiliki pendidikan SMA keatas. Untuk persebaran Golongan Kepangkatan, 22 PNS berada di golongan I, sebanyak 637 PNS berada di golongan II, dan 2.304 PNS berada di golongan 3 serta 802 PNS berada di golongan 4.

Berikut jumlah PNS di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan kualifikasi pendidikan digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.8.
 Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan

NO	TINGKATAN PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Sekolah Dasar	7	2	9
2	SMP Sederajat	22	3	25
3	SMA Sederajat	346	305	651
4	D.I / D.II	64	165	229
5	D.III	86	325	411
6	D.IV / S1	942	1.388	2.330
7	S2	65	44	109
8	S3	2	1	3
JUMLAH		1.534	2.233	3.767

Sumber : BKPPD Tahun 2021

Adapun Jumlah PNS berdasarkan eselon digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.9.

Jumlah PNS Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin

NO	TINGKATAN ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Eselon V	2	7	9
2	Eselon IV	252	248	500
3	Eselon III	101	60	161
4	Eselon II	29	2	31
5	Eselon I	0	0	0
JUMLAH		384	317	701

Sumber : BKPPD Tahun 2021

Berdasarkan Tingkat Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Selayar tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.10.

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOL. / RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Juru Muda, I/A	0	0	0
2	Juru Muda Tingkat I, I/B	5	0	5
3	Juru, I/C	3	0	3
4	Juru Tk.I, I/D	11	3	14
JUMLAH		19	3	22
5	Pengatur Muda, II/A	36	15	51
6	Pengatur Muda Tk.I, II/B	76	62	138
7	Pengatur, II/C	80	157	237
8	Pengatur Tk.I, II/D	112	100	212
JUMLAH		304	334	638
9	Penata Muda, III/A	242	387	629
10	Penata Muda Tk.I, III/B	182	348	530
11	Penata, III/C	195	382	577
12	Penata Tk.I, III/D	224	344	568
JUMLAH		843	1.461	2.304
13	Pembina, IV/A	199	263	462
14	Pembina Tk.I, IV/B	138	167	305
15	Pembina Utama Muda, IV/C	29	4	33

16	Pembina Utama Madya, IV/D	1	0	1
17	Pembina Utama, IV/E	0	1	1
JUMLAH		367	435	802
TOTAL		1.533	2.233	3.7166

Sumber : BKPPD Tahun 2021

Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 686 PNS berada pada jabatan struktural, 794 PNS berada pada jabatan pelaksanan, 565 PNS berada pada jabatan Fungsional Kesehatan, 1.577 PNS berada pada jabatan fungsional guru dan 115 PNS berada pada jabatan fungsional lainnya. Adapun pengelompokannya berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 1.11.

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Struktural	376	310	686
2	Pelaksana	452	342	794
3	Fungsional Kesehatan	93	472	565
4	Fungsional Guru	528	1.049	1.577
5	Lainnya	67	48	115
JUMLAH		1.516	2.221	3.737

Sumber : BKPPD Tahun 2021

F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Dalam perjalanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, anggaran pendapatan daerah akan mengalami perubahan dari target yang telah ditetapkan. Anggaran Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

merupakan perkiraan terukur secara rasional dan dapat direalisasikan secara ideal untuk setiap sumber pendapatan dengan tetap memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini dan kinerja pendapatan tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka anggaran pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp1.162.580.092.942,00, dan target Pendapatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.020.833.476.665,00 atau mengalami penurunan dari target APBD Pokok sebesar 12,19%.

Anggaran Pendapatan terdiri dari tiga komponen sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp 84.684.347.742,00 bila dibandingkan dengan target pada Perubahan APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 84.684.347.742,00 atau tidak mengalami perubahan.
2. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 884.921.242.000,00 bila dibandingkan dengan target pada Perubahan APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 766.333.663.723,00 atau mengalami penurunan sekitar 13,40 %
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah direncanakan sebesar Rp 192.974.503.200,00 bila dibandingkan dengan target pada perubahan APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 169.815.465.200,00 atau mengalami penurunan sekitar 12,00 %

Tabel 1.12.
Penjabaran APBD Pokok dan APBD Perubahan 2020

URAIAN		POKOK	PERUBAHAN	SISA LEBIH / (KURANG)	%
PENDAPATAN		1.162.580.092.942,00	1.020.833.476.665,00	(141.746.616.277,00)	(12,19)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.684.347.742,00	84.684.347.742,00	(0,00)	(0,00)
1	PAJAK DAERAH	10.303.202.000,00	10.303.202.000,00	(0,00)	(0,00)
2	RETRIBUSI DAERAH	2.505.729.000,00	2.505.729.000,00	(0,00)	(0,00)
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.650.000.000,00	10.650.000.000,00	(0,00)	(0,00)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

	4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	61.225.416.742,00	61.225.416.742,00	(0,00)	(0,00)
2		DANA PERIMBANGAN	884.921.242.000,00	766.333.663.723,00	(118.587.578.277,00)	(13,40)
	1	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	13.993.085.000,00	13.812.345.000,00	(180.740.000,00)	(1,29)
	2	DANA ALOKASI UMUM	627.696.649.000,00	568.560.531.000,00	(59.136.118.000,00)	(9,42)
	3	DANA ALOKASI KHUSUS	243.231.508.000,00	183.960.787.723,00	(59.270.720.277,00)	(24,37)
3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	192.974.503.200,00	169.815.465.200,00	(23.159.038.000,00)	(12,00)
	3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	28.400.000.000,00	24.768.679.200,00	(3.631.320.800,00)	(12,79)
	4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	37.926.840.000,00	35.543.169.000,00	(2.383.671.000,00)	(6,28)
	5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	41.239.339.200,00	24.870.660.000,00	(16.368.679.200,00)	(39,69)
	6	DANA DESA	85.408.324.000,00	84.532.957.000,00	(875.367.000,00)	(1,02)

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

Adapun realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan kelompok pendapatan dan jenis-jenis pendapatan sebagai berikut :

- a. Target Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp84.684.347.742,00 dan terealisasi sebesar Rp 66.359.401.903,73 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 78,36 % . Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.13.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2020

URAIAN	TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.684.347.742,00	66.359.401.903,73	(18.324.945.838,27)	78,36
1 PAJAK DAERAH	10.303.202.000,00	7.971.545.893,50	(2.331.656.106,50)	77,37
2 RETRIBUSI DAERAH	2.505.729.000,00	1.735.588.105,00	(770.140.895,00)	69,26
3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.650.000.000,00	9.219.514.000,00	(1.430.486.000,00)	86,57
4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	61.225.416.742,00	47.432.753.905,23	(13.792.662.836,77)	77,47

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

- b. Dana Perimbangan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp763.414.176.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 760.762.689.963,00 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 99,27 % . Adapun realisasi Dana Perimbangan Daerah Tahun 2020 tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.14.
Realisasi Dana Perimbangan Daerah 2020

URAIAN	TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
DANA PERIMBANGAN	766.333.663.723,00	760.762.689.963,00	(5.570.973.760,0)	99,27
1 BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	13.812.345.000,00	15.606.065.342,00	1.793.720.342,00	112,99
2 DANA ALOKASI UMUM	568.560.531.000,00	566.415.101.000,00	(2.145.430.000,0)	99,62
3 DANA ALOKASI KHUSUS	181.041.300.000,00	178.741.523.621,00	(2.299.776.379,0)	98,73

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp169.715.465.200,00 dan

terrealisasi sebesar Rp157.792.275.466,07 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 92,92 % . Adapun realisasi Pendapatan Lain-lain Daerah yang sah untuk Tahun 2020 tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.15.
 Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		169.815.465.200,00	157.792.275.466,07	(12.023.189.733,93)	92,92
1	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	24.768.679.200,00	34.944.137.866,07	10.175.458.666,07	141,08
2	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	35.543.169.000,00	36.297.259.000,00	754.090.000,00	102,12
3	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	24.870.660.000,00	2.017.921.600,00	(22.852.738.400,00)	8,11
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN	84.532.957.000,00	84.532.957.000,00	(0,00)	100

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki

keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pada Tahun 2017 pemerintah telah merubah prinsip dari yang menggunakan prinsip money follow function, karena manfaatnya tidak jelas, diubah menjadi money follow program dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan Tahun 2021.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah).

Kebijakan belanja daerah Tahun 2020 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.113.374.734.102,00 bila dibandingkan dengan target APBD Pokok sebesar Rp1.194.611.893.770,00 mengalami penurunan sekitar 6,80%.

Adapun Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan kelompok belanja sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp589.320.046.503,00 bila dibandingkan dengan target APBD Pokok sebesar Rp582.127.421.378,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.192.625.125,00 atau naik sekitar 1,24%.

b. Belanja Langsung

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp524.054.687.599,00 bila dibandingkan dengan target APBD Pokok sebesar Rp612.484.472.392,00 mengalami penurunan sebesar Rp88.429.784.793,00 atau turun sekitar 14,44%.

Tabel 1.16.
Penjabaran Belanja APBD Pokok dan Perubahan Tahun 2020

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

URAIAN		POKOK	PERUBAHAN	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
Belanja Daerah		1.194.611.893.770,00	1.113.374.734.102,00	(81.237.159.668,00)	(6,80)
Belanja Tidak Langsung		582.127.421.378,00	589.320.046.503,00	7.192.625.125,00	1,24
1	Belanja Pegawai	376.554.098.378,00	365.555.795.291,00	(10.998.303.087,00)	(2,92)
2	Belanja Hibah	37.390.000.000,00	39.423.216.212,00	2.033.216.212,00	5,44
3	Belanja Bantuan Sosial	15.600.000.000,00	13.600.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(12,82)
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	150.283.323.000,00	143.424.245.000,00	(6.859.078.000,00)	(4,56)
6	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	26.016.790.000,00	25.016.790.000,00	2.501,68
Belanja Langsung		612.484.472.392,00	524.054.687.599,00	(88.429.784.793,00)	(14,44)
1	Belanja Pegawai	54.879.431.713,00	64.955.483.775,00	10.076.052.062,00	18,36
2	Belanja Barang dan Jasa	247.031.269.261,00	246.676.368.015,00	(354.901.246,00)	(0,14)
3	Belanja Modal	310.573.771.418,00	212.422.835.809,00	(98.150.935.609,00)	(31,60)

Selayar unaudit BPK RI.

Adapun realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudit disajikan pada tabel sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp589.320.046.503,00 dan terealisasi sebesar Rp. 565.199.066.706,00 dengan capaian realisasi sekitar 95,91%.

b. Belanja Langsung

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 524.054.687.599,00 dan terealisasi sebesar Rp. 444.836.304.947,70 dengan capaian realisasi sekitar 84,88%.

Tabel 1.17.
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
Belanja Daerah		1.113.374.734.102,00	1.010.035.371.653,70	(103.339.362.448,30)	90,72
Belanja Tidak Langsung		589.320.046.503,00	565.199.066.706,00	(24.120.979.797,00)	95,91
1	Belanja Pegawai	365.555.795.291,00	348.018.683.522,00	(17.537.111.769,00)	95,20
2	Belanja Hibah	39.423.216.212,00	38.637.800.000,00	(785.416.212,00)	98,01
3	Belanja Bantuan Sosial	13.600.000.000,00	9.144.800.000,00	(4.455.200.000,00)	67,24
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa	1.300.000.000,00	1.273.327.000,00	(26.673.000,00)	97,95
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	143.424.245.000,00	143.423.655.529,00	(589.471,00)	100,00
6	Belanja Tidak Terduga	26.016.790.000,00	24.700.800.655,00	(1.315.989.345,00)	94,94
Belanja Langsung		524.054.687.599,00	444.836.304.947,70	(79.218.382.651,30)	84,88
1	Belanja Pegawai	64.955.483.775,00	57.700.192.629,70	(7.255.291.145,30)	88,83
2	Belanja Barang dan Jasa	246.676.368.015,00	214.205.939.961,00	(32.470.428.054,00)	86,84
3	Belanja Modal	212.422.835.809,00	172.930.172.357,00	(39.492.663.452,00)	81,41

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

c. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah timbul karena terjadinya selisih lebih atau kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah yang menyebabkan surplus atau defisit, sehingga untuk menggunakan surplus atau menutupi defisit diperlukan pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 94.041.496.437,40 bila dibandingkan dengan target APBD Pokok sebesar Rp33.532.039.828,00 mengalami peningkatan sebesar Rp60.509.456.609,40 atau mengalami peningkatan 180,45 % dengan rincian :

1. Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp94.041.496.437,40 bila dibandingkan dengan target APBD Pokok Tahun 2020 sebesar Rp33.532.039.828,00 mengalami peningkatan sebesar Rp60.509.456.609,00 atau naik sekitar 180,45% yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp94.041.496.437,40
2. Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp1.500.239.000,00 bila dibandingkan dengan target APBD Pokok Tahun 2020 sebesar Rp1.500.239.000,00 tidak mengalami perubahan.

Tabel 1.18.
Penjabaran Pembiayaan APBD Pokok dan Perubahan Tahun 2020

URAIAN		POKOK	PERUBAHAN	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan		33.532.039.828,00	94.041.496.437,40	60.509.456.609,40	180,45
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33.532.039.828,00	94.041.496.437,40	60.509.456.609,40	180,45
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		1.500.239.000,00	1.500.239.000,00	0,00	0,00
1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	1.500.239.000,00	1.500.239.000,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

Adapun realisasi pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan kelompok pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 1.19.
 Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan		94.041.496.437,40	94.041.496.437,40	0,00	100
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	94.041.496.437,40	94.041.496.437,40	0,00	100
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	56.702.875,00	56.702.875,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		1.500.239.000,00	1.500.239.000,00	0,00	100
1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	1.500.239.000,00	1.500.239.000,00	0,00	100

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

I.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

a) Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pemahaman akan permasalahan yang terjadi didalam proses pembangunan daerah menjadi hal yang sangat penting, karena dengan pemahaman ini kita dapat mengidentifikasi faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis ini kemudian akan berkembang menjadi prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja daerah.

Secara deskriptif dan sistematis akan dijelaskan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014 sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar, atau sesuai dengan jenis permasalahan yang dianggap krusial.

1. Bidang Pendidikan

Data capaian Tahun 2014 menunjukkan bahwa kinerja di bidang pendidikan cenderung mengalami peningkatan, namun jika melihat data capaian kinerja masih terdapat permasalahan, berupa angka melek huruf 91,76 %, walaupun cenderung mengalami peningkatan dan melampaui target Provinsi Sul-Sel 90 %, tetapi terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan, yakni; Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis hanya penduduk yang berusia 45 tahun ke atas yang tidak mampu lagi untuk dibelajarkan; Persebaran penduduk dan kondisi wilayah yang terdiri dari kepulauan, sehingga membuat akses masyarakat terbatas dan bahkan sulit; Belum optimalnya Kegiatan Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) dan Kelompok Belajar Usaha (KBU). Faktor penentu keberhasilan antara lain Penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf dapat dibelajarkan karena adanya minat untuk belajar serta sarana yang disediakan di setiap warga belajar, penambahan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan sekolah jarak jauh satu atap, pendidikan luar sekolah serta optimalisasi penyelenggaraan kelompok belajar masyarakat (KBM) dan Kelompok Belajar Usaha (KBU).

Angka partisipasi di semua jenjang pendidikan terus mengalami peningkatan, namun masih terdapat masalah; misalnya, faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga sebahagian anak usia sekolah lebih memilih untuk berkecimpung membantu orang tua mencari nafkah. Adapun faktor penentu keberhasilan antara lain Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya pembangunan Sekolah Satu Atap, Unit Sekolah Baru (USB), pembentukan lembaga Paket A, Paket B dan Paket C.

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum optimal disebabkan antara lain Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga masih banyak orang tua yang kurang paham tentang pendidikan anak usia dini serta motivasi untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Sedangkan faktor penentu keberhasilan antara lain tersedianya sarana dan prasarana serta akses dan layanan pendidikan sudah ada di setiap desa dan kecamatan untuk menempuh pendidikan.

2. Bidang Kesehatan

Secara umum pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan; 2) pembiayaan kesehatan; 3) Sumber daya manusia kesehatan; 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; 5) Manajemen dan informasi kesehatan dan; 6) pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten dalam hal pelayanan dasar. Pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor demografi, keadaan dan *income* perkapita penduduk, tingkat pendidikan, serta keadaan dan perkembangan lingkungan baik fisik, maupun biologik. Sementara itu, mutu upaya dan manajemen kesehatan sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis tenaga kesehatan, alokasi anggaran, sarana kesehatan yang tersedia, obat-obatan serta sarana penunjang lainnya.

Dari keberhasilan yang dicapai selama kurun waktu satu periode pemerintahannya sebelumnya ternyata masih ada permasalahan yang paling menonjol antara lain Rasio Posyandu per satuan balita belum mencapai target yang diharapkan yaitu baru mencapai sekitar 2,88%. Ini disebabkan karena pembangunan Posyandu dilakukan secara bertahap. Faktor penentu keberhasilan diharapkan adanya upaya pemerintah untuk membangun posyandu

sehingga pada akhir periode sudah bisa mencapai sekitar 45 % disertai dengan peningkatan peran aktif kader, Aktif Desi (Desa Siaga).

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu persatuan penduduk sudah mencapai sekitar 66,99 dari target 100%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, SDM yang masih kurang terutama dokter dan tenaga teknis Kesehatan lainnya. Adapun faktor penentu keberhasilan diharapkan pada akhir periode semua Kecamatan sudah ada Puskesmas dan semua desa sdh ada Pustu/Poskesdes.

Rasio rumah sakit persatuan penduduk mencapai sekitar 0,74. Hal ini disebabkan faktor kondisi wilayah yang terdiri dari kepulauan, sehingga akses masyarakat untuk rujukan ke rumah sakit menjadi salah satu faktor rendahnya rasio rumah sakit per satuan penduduk. Adapun faktor pendukung keberhasilan diharapkan adanya penyediaan fasilitas pendukung untuk menjangkau rumah sakit khususnya bagi pasien rujukan.

Rasio dokter per satuan penduduk meningkat mencapai sekitar 22,33, namun masih belum mencukupi kebutuhan dokter khususnya pelayanan dokter pada Puskesmas kepulauan. Adapun faktor pendukung yang dianggap mampu memenuhi ketercukupan kebutuhan dokter adalah penyediaan dokter pada setiap puskesmas, baik yang ada di wilayah daratan maupun yang ada di wilayah kepulauan.

Pada sisi lain, faktor geografis sangat dominan menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terbatas. Oleh sebab itu, diharapkan ada upaya untuk mencapai keberhasilan melalui optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya serta peningkatan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Keliling.

3. Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur dasar khususnya bidang pekerjaan umum di antaranya infrastruktur jalan, jembatan, bangunan gedung, pengairan, air bersih, hampir semuanya telah dilaksanakan. Hanya saja, pada beberapa wilayah masih sangat perlu ditingkatkan, terutama di daerah pelosok kecamatan dan kepulauan serta pada sentra-sentra produksi dan potensial untuk produksi.

Data pada tahun terakhir periode RPJMD 2010-2015 menunjukkan bahwa proporsi panjang (m) jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik mencapai 398,76 Km, dari target 605,49 Km. Belum tercapainya target tersebut, lebih disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan daya dukung dan kapasitas jalan yang signifikan. Oleh sebab itu ke depan diharapkan adanya peningkatan dan penambahan kapasitas jalan untuk mengimbangi pertumbuhan kendaraan.

Selain itu, dalam rangka optimalisasi dan peningkatan produksi pertanian sangat dibutuhkan adanya dukungan pemerintah dalam hal pemanfaatan irigasi dan sumber – sumber air baku. Rasio jaringan irigasi masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat petani. Hal ini disebabkan masih rendahnya penyediaan biaya operasional jaringan irigasi serta belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber air baku untuk pembangunan irigasi. Dengan demikian diharapkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan diperlukan penyediaan biaya operasional yang memadai setiap tahunnya guna mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air baku.

4. Perumahan

Aspek kesehatan lingkungan dalam kaitannya dengan sektor perumahan, menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Data menunjukkan minimnya

rasio rumah tinggal yang bersanitasi. Kondisi rumah tinggal bersanitasi hingga akhir periode RPJMD 2010-2015 baru mencapai angka sebesar sekitar 60,06 % atau kurang dari target yang diharapkan yaitu 75%. Ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik bagi kesehatan, serta masyarakat terkendala soal biaya pembuatan sarana sanitasi karena penghasilan yang minim, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS. Dengan demikian, diharapkan adanya upaya untuk peningkatan cakupan sanitasi terhadap rumah tangga, menggalakan sosialisasi serta adanya intervensi program peningkatan sanitasi.

Selanjutnya, terdapat sekitar 74,77% Rumah Layak Huni dibanding dari target atau standar Tahun 2015 sebesar 95%. Dari data tersebut berarti masih terdapat rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni sebesar sekitar 20,23 %. Hal ini terjadi akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan. Oleh sebab itu, ke depan perlu adanya program peningkatan kualitas rumah yang layak huni bagi MBR.

Pemenuhan fasilitas dan infrastruktur dasar lainnya misalnya prasarana air bersih dan listrik merupakan hal yang paling utama untuk dipenuhi terkait dengan sektor perumahan. Cakupan rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat minim baik pada wilayah tertentu di daratan pulau Selayar, maupun yang berada di wilayah kepulauan. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya sumber mata air serta belum adanya regulasi tentang perlindungan terhadap sumber mata air dimaksud. Untuk itu, diharapkan adanya kebijakan berupa; Peningkatan manajemen pengelolaan, Peningkatan kualitas dan layanan PDAM, Penyediaan dan pengembangan teknologi tepat guna, Advokasi, Sosialisasi serta Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air.

Demikian halnya, minimnya akses rumah tangga terhadap listrik disebabkan karena keterbatasan daya dan kemampuan masyarakat. Oleh sebab itu, diharapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, kebijakan peningkatan elektrifikasi terus dilakukan, utamanya memfasilitasi rumah tangga miskin untuk dapat mengakses layanan listrik. Termasuk dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan listrik bagi pengembangan industri, baik industri perikanan, industri pariwisata maupun pengembangan kawasan masih perlu ditingkatkan.

5. Penataan Ruang

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032, khususnya pada lampiran 15 telah diatur Peraturan Umum Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mencakup tiga zonasi; Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Zona Sistem Prasarana Kabupaten.

Berdasarkan indikator capaian kinerja penataan ruang, terdapat sekitar 12,97% ruang terbuka hijau dibanding dari target atau standar tahun 2015 sebesar 20%. Rendahnya pencapaian target tersebut disebabkan masih terbatasnya lahan yang tersedia untuk peruntukan ruang terbuka hijau.

Dalam hal pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan data yang ada, khususnya rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, masih dijumpai permasalahan yang membutuhkan perhatian, karena baru sekitar 60,87% bangunan yang ber-IMB dibanding dari target atau standar Tahun 2015 sebesar 100%. Masih kurangnya bangunan yang memiliki IMB, disebabkan rendahnya minat masyarakat dalam hal pengurusan IMB karena mahal. Oleh sebab itu, dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan adanya evaluasi tarif IMB.

6. Perencanaan Pembangunan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di daerah secara efektif dan efisien, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah sangat dibutuhkan. Pada sisi lain tentunya diharapkan adanya sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dari setiap kebijakan sesuai dengan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas, serta yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dan konsistensi terhadap berbagai dokumen perencanaan pembangunan, berikut kerangka regulasi yang telah ada, harus menjadi perhatian utama bagi seluruh pemangku kepentingan.

Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman dan dalam rangka mewujudkan *transparansi* dan *akuntabilitas* penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, maka ketersediaan informasi dan akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian yang harus diperhatikan.

7. Perhubungan

Upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan baik pelabuhan laut, udara termasuk terminal bus, secara keseluruhan telah terlaksana. Hanya saja, masih perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan perhubungan, terutama di sektor pelayanan transportasi, serta mengupayakan pemerataan infrastruktur dengan pola keterpaduan moda transportasi wilayah antara darat, laut dan udara.

Dari data yang diperoleh, masih ada beberapa aspek yang menjadi masalah selama ini antara lain; Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2014 sebesar 126.085 dan meningkat menjadi 128.744 pada tahun 2015. Sementara itu, masih banyak ruas jalan di wilayah pedesaan yang belum layak dilalui oleh angkutan umum. Sementara pada sisi lain, keadaan sarana pendukung fasilitas pelabuhan laut/ferry/udara/ terminal bus belum lengkap. Oleh sebab itu, diharapkan adanya upaya peningkatan dan penambahan fasilitas pendukung pelabuhan laut, ferry, udara, dan terminal bus termasuk perbaikan jalan sebagai satu kesatuan moda transportasi yang tidak terpisahkan.

8. Lingkungan Hidup

Salah satu persoalan yang sering menjadi polemik di daerah adalah permasalahan pengelolaan lingkungan hidup. Hal yang paling riskan untuk memperoleh perhatian serius adalah salah satunya pengelolaan sampah. Sesuai dengan data yang ada dimana persentase penanganan sampah pada tahun 2014 sekitar 49,7% dan masih dibawah standar sekitar 82,40%. Ini disebabkan antara lain jumlah armada pengangkut yang terbatas, pemahaman masyarakat masih rendah tentang masalah pemilahan sampah termasuk daur ulang sampah. Bank sampah yang ada belum optimal penataannya sehingga masyarakat masih kurang yang menabung di bank sampah, serta sampah yang dihasilkan hanya sebagian kecil yang ditangani. Oleh sebab itu, diharapkan adanya upaya optimalisasi bank sampah melalui kegiatan sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Sampah serta Pengelolaan Sampah Terpadu (4R).

Indikator lain misalnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun 2015 masih sangat minim yaitu hanya sekitar 3,9%, jauh di bawah standar provinsi sebesar 100%. Ini disebabkan antara lain karena belum ada Pegawai Pengawas Lingkungan Hidup

(PPLH) dan Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPLH). Untuk itu diharapkan adanya intensitas sosialisasi tentang AMDAL.

Selain itu, persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2015 sekitar 81,50 %, dan masih di bawah target 100%. Hal ini disebabkan antara lain, kurangnya sumber mata air yang akan dikelola, akses ke sumber air sulit, kurangnya debit air pada sumber mata air tertentu, serta pengelolaan pada sumber air belum optimal. Oleh sebab itu, diharapkan adanya Survei Mata Air (RTA), peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pendampingan teknis penyehatan lingkungan, advokasi dan sosialisasi, penguatan kelembagaan instansi teknis terkait, melakukan penanaman pada daerah-daerah sumber air, proses destilasi dan melakukan penanaman sukun, serta peningkatan tata kelola air.

9. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persoalan kependudukan dan pencatatan sipil selama ini sudah mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang masih cenderung mendapatkan perhatian, antara lain: Kepemilikan KTP pada tahun 2015 sekitar 87% (target 100%). Ini disebabkan kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat, kondisi geografis wilayah kepulauan, sarana pelayanan keliling belum memadai. Oleh sebab itu, diharapkan adanya partisipasi aktif masyarakat, penyediaan sarana pelayanan keliling yang memadai.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2015 sebesar 393, disebabkan oleh kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat (kepemilikan akte kelahiran belum dianggap penting oleh sebagian orang tua). Untuk itu, diharapkan adanya partisipasi aktif masyarakat serta fasilitasi dukungan kebijakan terhadap peningkatan kepemilikan akta kelahiran.

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan yang antara lain disebabkan oleh terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya terutama di bidang politik, dan publik serta penguasaan di bidang ekonomi. Dari data yang ada partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami trend peningkatan dan pada tahun 2015 sekitar 12,85% dan masih dibawah target 45%. Ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman tentang konsep gender, untuk pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk itu dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan Pemerintah dan Stakeholders, mengawal kesepakatan Pemerintah Daerah dalam hal urgensi dan pentingnya melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan kualitas manusia terutama sumber daya manusia perempuan, serta adanya upaya fasilitasi penyusunan *grand design* pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Salah satu parameter keberhasilan program keluarga berencana adalah dua anak cukup. Data menunjukkan bahwa cakupan peserta KB baru pada tahun 2015 sekitar 78,22 % disebabkan, antara lain; Pemahaman masyarakat dalam ber-KB masih minim, Jumlah tenaga penyuluh KB masih kurang, serta Keterbatasan alat kontrasepsi tersedia. Oleh sebab itu, perlu diupayakan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi. Kegiatan lainnya adalah, memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB, revitalisasi program KB, pemenuhan jumlah ideal rasio penyuluh KB, serta penyediaan dan peningkatan akses alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB baru pada tahun 2015 sekitar 78,22 %.

Untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, data capaian kinerja tahun 2015 sekitar 28,50% dari target 38,22%. Ini disebabkan oleh kurangnya pemberdayaan keluarga, penyaluran bantuan ke desa-desa masih belum merata, dan mekanisme penyalurannya perlu dikaji ulang, sehingga upaya mengoptimalkan pemberdayaan keluarga melalui potensi wilayah, potensi alam, dan keahlian terlaksanakan secara berkesinambungan.

Intinya adalah kinerja pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Keluarga Berencana, masih perlu terus untuk ditingkatkan

12. Sosial

Pelayanan dan pembangunan bidang sosial khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial selama ini sudah tertangani, walaupun belum optimal disebabkan beberapa sarana dan prasarana sosial belum tersedia, antara lain: Panti asuhan, Panti jompo dan Panti rehabilitasi, disamping itu, masih kurangnya keberpihakan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, belum optimalnya kebijakan fasilitasi pemerintah dalam hal bantuan langsung bagi PMKS. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk tahun 2014 dan 2015 sangat meningkat dengan adanya program nasional yakni PKH (Program Keluarga Harapan) untuk tahun 2014 sebanyak 1.911. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan kebijakan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sosial dan kebijakan fasilitasi pemerintah melalui bantuan langsung bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS.

13. Ketenagakerjaan

Capaian kinerja bidang ketenagakerjaan selama lima tahun terakhir, antara lain: tersedianya data base tenaga kerja, tersedianya instruktur dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja, penyediaan sarana dan

prasarana BLK yang memadai, pengadaan bahan dan materi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, pelaksanaan kegiatan padat karya, perluasan kesempatan kerja, pemberian bantuan alat perbengkelan, fasilitasi dan bantuan keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja, melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum.

Meskipun demikian masih ada beberapa hal terkait dengan ketenagakerjaan yang penting untuk menjadi perhatian, antara lain: Angka partisipasi angkatan kerja tahun 2015 sekitar 7,22 % atau masih di bawah target 63,37 %. Ini disebabkan, kurangnya angkatan kerja/pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja, serta kurangnya pemahaman/pengetahuan pencari kerja mengenai aturan dan persyaratan dalam mendapatkan pekerjaan. Oleh sebab itu, diharapkan tersedianya; Akses pelayanan informasi pasar kerja yang optimal, pemberian penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat pencari kerja, serta penguatan SDM melalui sosialisasi tentang regulasi ketenagakerjaan, penyediaan tenaga kerja terdidik, bantuan permodalan, dan penguatan kelembagaan tenaga kerja.

Sementara itu dari pencari kerja yang ditempatkan sekitar 4,24 %, masih sangat jauh di bawah standar 15,50% disebabkan, antara lain; Kurangnya lapangan kerja yang tersedia, Kurangnya pencari kerja yang melapor kembali setelah mendapatkan pekerjaan, serta Kurangnya kemampuan, kecakapan dan keahlian yang dimiliki bagi pencari kerja. Faktor pendukung keberhasilan program pembangunan bidang ketenagakerjaan diharapkan, adanya upaya fasilitasi dan penyediaan lapangan kerja di sektor swasta sehingga pencari kerja tidak lagi berorientasi menjadi PNS, penempatan pegawai antar kerja lokal (KCL) untuk Kab/Kota yang tugasnya mengawasi, mengatur dan memfasilitasi, menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja, optimalisasi penyelenggaraan pemberian

bimbingan dan pelatihan, serta pengembangan latihan kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

14. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang seharusnya secara riil mampu menopang kehidupan masyarakat, belum terkelola secara optimal, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam permodalan dan manajemen untuk pengembangan skala usaha.

Capaian kinerja pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi dari sisi persentase koperasi aktif baru sekitar 76%, dan masih di bawah standar 90 %. Hal ini disebabkan, oleh rendahnya pelaksanaan ART, adanya tunggakan penerima bantuan, serta kegiatan usaha tidak berjalan. Sebagai faktor penentu keberhasilan perlu diupayakan agar menciptakan kelembagaan yang sehat melalui restrukturisasi, dan memfasilitasi agar setiap koperasi memiliki bisnis/usaha inti yang dilaksanakan.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM sebanyak 2.186, dan telah melampaui standar (1.105), walaupun demikian Pembentukan LKM dimaksud belum berbadan hukum. Oleh sebab itu, diharapkan ada upaya untuk mendukung keberhasilan program ini, antara lain; Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola/ anggota LKM, guna meningkatkan keterampilan dalam mengelola UKM.

Capaian kinerja untuk sub bidang Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 15.016, dan telah melampaui standar (90), namun masih terkendala rendahnya kualitas SDM pengelola UMKM. Oleh sebab itu, diharapkan adanya pendataan UMKM, peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan, sehingga terbuka peluang masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja (membuka usaha sendiri).

15. Penanaman Modal

Capain kinerja penanaman modal selama lima tahun terakhir sudah menunjukkan angka yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebesar 106, dan telah melampaui standar. Namun masih terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi penghambat antara lain ketersediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga calon investor membatalkan investasinya. Oleh sebab itu, diharapkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan bidang penanaman modal, antara lain; penyederhanaan mekanisme perizinan, peningkatan intensitas promosi dalam maupun luar negeri, membangun jaringan listrik yang memadai, ketersediaan sarana air bersih untuk industri, serta peningkatan sarana transportasi antar pulau yang memadai, yang kesemuanya merupakan faktor pendukung keberhasilan bidang penanaman modal.

16. Kebudayaan

Capaian kinerja pembangunan bidang kebudayaan khususnya penyelenggaraan festival / pertunjukan seni dan budaya masih di bawah standar (8) yaitu sebanyak 3 kali, disebabkan, antara lain; terbatasnya data seni dan budaya daerah yang perlu dikembangkan, minat berkesenian masyarakat yang kurang, kerjasama yang masih kurang dengan pihak luar/sponsor. Oleh sebab itu, dukungan kebijakan, koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder untuk pelaksanaan event seni dan budaya, pembinaan dan penumbuhan minat berkesenian, serta peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan festival/ pagelaran seni dan budaya.

Sarana Penyelenggaraan festival / pertunjukan seni dan budaya masih di bawah standar (8) yaitu sebanyak 2 kali disebabkan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya.

17. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Selayar selama ini telah dilaksanakan, namun dari capaian kinerja ternyata masih belum optimal. Jumlah organisasi pemuda yang ada sebanyak 35. Minat pemuda untuk mengikuti OKP yang ada di daerah masih kurang, sehingga dibutuhkan sosialisasi untuk peningkatan pemahan dan minat pemuda terhadap OKP.

Jumlah kegiatan olahraga 5 dan masih di bawah standar (10) disebabkan tidak terealisasinya kegiatan olahraga secara keseluruhan karena kurangnya dukungan untuk itu.

Jumlah lapangan olah raga tahun 2014 sebanyak 29, namun pemanfaatannya belum optimal disebabkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga masih minim. Namun di sisi lain dengan tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang lebih memadai kiranya mampu mendorong animo masyarakat untuk berolahraga.

18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Capaian kinerja pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada Tahun 2014 sebanyak 5 kali. Hal ini disebabkan, antara lain; belum optimalnya pembinaan terhadap ormas, LSM, dan OKP guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, kurangnya kesadaran pengurus organisasi masyarakat untuk mendaftarkan keberadaannya, serta masih kurangnya kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam membantu pelaksanaan pembangunan dalam memberdayakan masyarakat. Adapun faktor penentu keberhasilan ke depan, antara lain; tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara (parpol, Ormas/LSM dan Independent), koordinasi dengan

kecamatan/kelurahan untuk terus memantau dan mendata Ormas/LSM dalam melakukan kegiatan di wilayahnya serta Pemerintah terus mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis dan demokrasi yang senantiasa bekerja sama dengan pihak LSM/Ormas untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.

Demikian juga dengan kegiatan Pembinaan Politik Daerah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Beberapa permasalahan, antara lain; belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku demokrasi, masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serta masih rendahnya kader partai politik dari kalangan perempuan. Oleh karena itu, diharapkan terciptanya hubungan harmonis Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan, penciptaan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif serta mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis dan demokrasi.

19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Data capaian kinerja pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admunistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sudah menunjukkan angka yang cukup signifikan, antara lain dapat dilihat dari representatifnya jumlah pamong praja per 10.000 penduduk, namun terkendala oleh belum adanya formasi pengangkatan secara khusus dari Pemerintah untuk satuan polisi pamong praja, padahal sebagian besar anggota satuan polisi pamong praja hanya berstatus tenaga kontrak/PTT/Sukarela. Oleh sebab itu, diharapkan penambahan personil satuan polisi pamong praja sehingga total mencapai 350 orang sesuai Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.

Permasalahan lain misalnya kewenangan Satuan Perlindungan Masyarakat masih berada pada Instansi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mana Kewenangan Perlindungan Masyarakat berada di Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh sebab itu diharapkan adanya Pelimpahan Kewenangan Satuan Perlindungan masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ke struktur kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketertiban umum.

Sedangkan kinerja penegakan Peraturan Daerah menunjukkan kinerja yang signifikan, namun masih ada permasalahan dasar yaitu keterbatasan PPNS Penegak Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja, serta tidak adanya Standar Biaya Penyidikan. Untuk itu dibutuhkan pengikutsertaan Diklat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Penyidikan.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih minim disebabkan antara lain kurangnya armada pemadam kebakaran jika dibandingkan dengan cakupan area yang ada, tidak tersedianya cadangan air di lokasi (kecamatan) sehingga penanganan kebakaran tidak optimal, kurangnya tenaga pemadam kebakaran yang terlatih dan umumnya berstatus PTT/sukarela, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang faktor-faktor pemicu kebakaran. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketersediaan armada Damkar sesuai standar wilayah manajemen kebakaran, tersedianya hydrant, tersedianya pos wilayah manajemen kebakaran, serta tersedianya bak air di masing-masing kecamatan.

20. Ketahanan Pangan

Upaya pembangunan di bidang pangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerbitkan beberapa regulasi

dalam bentuk Peraturan Bupati. Namun demikian masih ada beberapa permasalahan, antara lain; Sanksi terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan belum optimal, pola konsumsi pangan yang belum beragam gizi, belum seimbang, masih dominan unsur karbohidrat, belum terpenuhinya cadangan pangan dan lumbung pangan masyarakat (sesuai SPM), distribusi pangan yang belum merata, penyediaan data antar SKPD terkait belum optimal (data kurang akurat dan sering terlambat), serta rendahnya kualitas dan kuantitas SDM bidang ketahanan pangan. Adapun faktor penentu keberhasilan yang menjadi prioritas ke depan adalah; koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan regulasi ketahanan pangan secara optimal, langkah terobosan berupa gerakan swasembada sayur mayur untuk memperbaiki kualitas konsumsi pangan penduduk, peningkatan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan kabupaten (sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan), terciptanya sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal data, dan perencanaan program/ kegiatan secara terpadu, serta perlunya pelatihan aparat tentang tatakelola Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten.

Ketersediaan pangan utama sekitar 40,57% di tahun 2014, namun produktivitas masih rendah, kualitas beras masih rendah serta distribusi belum merata. Untuk itu diharapkan adanya intensifikasi, penyediaan peralatan pengering gabah, gudang produksi, *Rice Milling Unit* (RMU), kemasan, serta ketersediaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain; jumlah kelompok binaan belum optimal disebabkan beberapa kelompok binaan LPM belum terdata. Oleh sebab itu diharapkan adanya optimalisasi melalui pendataan kembali secara tertib seluruh

kelompok binaan LPM. Dari sisi jumlah, LPM aktif dan berprestasi sebanyak 85 %, namun yang menjadi persoalan adalah masih adanya LPM yang belum mengetahui konsep kegiatan pemberdayaan. Untuk itu diharapkan perlunya peningkatan pengetahuan konsep kegiatan pemberdayaan.

Persentase PKK aktif sekitar 98% dan belum mencapai target (100%). Ini disebabkan, masih kurangnya kinerja kader PKK sehingga perlu peningkatan keterampilan dan pengetahuan kader PKK sebagai faktor penentu keberhasilan ke depan.

22. Statistik

Ketersediaan Buku Statistik di daerah sangat penting dalam rangka melihat indikator ekonomi makro daerah, dan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi makro ke depan. Mengingat bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan di daerah, data merupakan sumber utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan termasuk dalam pelaksanaan evaluasi.

23. Kearsipan

Penataan arsip daerah sudah menunjukkan kinerja yang cukup signifikan, namun permasalahan karena belum tersedianya sarana dan prasarana berupa Depo Arsip. Untuk itu, dibutuhkan Regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Kearsipan. Di sisi lain masih terbatasnya kualitas SDM pengelola kearsipan disebabkan kurangnya pelatihan/Bimtek. Oleh sebab itu, dibutuhkan pelatihan dan rekrutmen tenaga arsiparis sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan kearsipan.

24. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika selama lima tahun terakhir telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa permasalahan antara lain masih banyak daerah yang *Blank Area* sehingga menghambat komunikasi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan Pembangunan Tower BTS di setiap daerah/lokasi yang

masih *Blank Area*. Rasio Wartel/Warnet terhadap penduduk sebesar 0,140 %, ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi terutama jaringan *celuler* yang menyebabkan berkurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan Wartel. Untuk itu, diharapkan adanya pengadaan *Media Center* di setiap kecamatan dan ketersediaan jaringan *wifi* untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi.

Dari sisi penunjang lainnya misalnya terdapat 5 *Website* milik Pemerintah Daerah. Namun demikian kualitas dan kuantitas SDM Teknologi Informasi di setiap SKPD masih terbatas. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya penempatan dan peningkatan kualitas SDM Teknologi Informasi pada setiap SKPD.

25. Perpustakaan

Layanan perpustakaan merupakan salah satu jenis layanan publik yang sangat penting mengingat berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap kinerja layanan ini cukup besar, antara lain dengan penyediaan fasilitas dan sarana perpustakaan penunjang.

Data capaian kinerja bidang perpustakaan menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa persoalan misalnya tidak ada UPT Perpustakaan di setiap Kecamatan. Untuk itu diperlukan kebijakan pembentukan UPT Perpustakaan dimaksud.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah (Org) per tahunnya berfluktuasi dan pada tahun 2014 sebanyak 45.708 pengunjung. Sarana Pendukung Belum memadai (AC, Meja Kursi Baca), oleh sebab itu dibutuhkan adanya peningkatan sosialisasi Gemar Membaca di kalangan masyarakat. Demikian juga dengan koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (exp) sebanyak 5945 (tahun 2014) dan masih perlu ditingkatkan setiap tahun.

26. Pertanian

Capaian kinerja terhadap urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa kinerja bidang urusan pilihan cukup baik antara lain dibuktikan dengan terjadinya peningkatan produksi yang dominan pada dua bidang urusan yang menjadi urusan pilihan yaitu bidang pertanian, dan perikanan dari tahun ke tahun.

Produktivitas tanaman pangan utama lokal lainnya per hektar sudah melebihi target, namun masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain; Kurangnya infrastruktur pengairan, khusus pengairan dari luas sawah 3.572 Ha, dan baru 1.459 Ha (40,85 %) saja yang dapat diairi, yang berakibat pada upaya penerapan teknologi budidaya pertanian tidak optimal terutama pada waktu pemupukan akan dilakukan, Petakan sawah tidak berair sehingga pemupukan ditunda dan ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas, serta urangnya kemampuan finansial para petani untuk membiayai usaha taninya. Oleh sebab itu, sebagai faktor penentu keberhasilan perlu dilakukan beberapa hal, sebagai berikut; Pembangunan/ penambahan bendungan dan jaringan pengairan (ketersediaan air), penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengendalian OPT, serta penanganan pasca panen.

27. Kehutanan

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam bidang kehutanan adalah rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain; Sistem pengelolaan kehutanan kurang terpadu, sosialisai program/ kegiatan dan penyediaan bibit tanaman belum merata, serta kurangnya pemahaman

dan kesadaran masyarakat akan pelestarian alam dan lingkungan. Oleh karena itu, ke depan diharapkan pelaksanaan terhadap rehabilitasi hutan dan lahan kritis perlu digalakkan, meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), ketersediaan bibit tanaman secara mandiri, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

28. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengembangan ketenagalistrikan di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya di wilayah kepulauan dilakukan dengan meningkatkan jaringan dan peningkatan kapasitas terpasang energi listrik, mengingat masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Tingkat elektrifikasi saat ini masih sangat rendah yaitu baru mencapai sekitar 65,89 % (Jumlah KK yang dilayani oleh PT. PLN (Persero) Rayon Selayar per Maret 2014 sebanyak 19.231 RT dari 29.186 Jumlah RT di Kabupaten Kepulauan Selayar). Upaya lain ditempuh melalui pengembangan listrik masuk desa dengan tenaga energi terbarukan.

Perencanaan kebutuhan energi listrik harus disesuaikan dengan estimasi jumlah penduduk dan urgensi pemakaian yang ada, serta jaringan yang ada sekarang, yaitu dengan mensuplai daya listrik tegangan rendah hingga tegangan menengah. Pengembangan jaringan listrik khususnya kawasan perencanaan dapat berfungsi sebagai sarana untuk merangsang peningkatan intensitas kegiatan ekonomi kawasan dan memperkuat kemungkinan terciptanya struktur ruang kawasan yang seimbang. Lebih dari itu, layanan prasarana listrik ini dapat mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat setempat, yaitu dengan adanya pengembangan jaringan listrik untuk industri termasuk kawasan pemukiman nelayan.

29. Pariwisata

Sebagai kabupaten kepulauan yang memiliki potensi pariwisata bahari sudah seyogyanya kunjungan wisata mengalami

peningkatan yang signifikan. Data menunjukkan pada tahun 2015 ada 6199 kunjungan wisatawan. Namun selama ini masih ada beberapa permasalahan khususnya sektor pariwisata, antara lain; Kurangnya destinasi wisata, Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam promosi, Belum ada strategi promosi yang jelas serta Usaha pariwisata yang belum sesuai standar. Oleh sebab itu, perlu mengintensifkan koordinasi antara stakeholder, penggunaan teknologi internet, penyusunan strategi pasar yang jelas, pembinaan kelembagaan dan usaha pariwisata, pengembangan lokasi wisata, pemeliharaan lokasi wisata, pemasaran dan promosi pariwisata, serta bina partisipasi masyarakat dan memfasilitasi penanaman modal/ investasi.

30. Kelautan dan Perikanan

Data capaian kinerja bidang perikanan menunjukkan bahwa produksi perikanan tahun 2015 sebesar 24.960 ton, namun masih ada beberapa permasalahan terkait dengan perikanan, antara lain; Aktivitas penangkapan yang berlebihan, *Illegal fishing* (bom/bius), hasil tangkapan kapal-kapal besar (pursein/bagang terapung) tidak didaratkan di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar (transaksi di laut). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan peningkatan kerja sama pengawasan terhadap berbagai tindakan *illegal fishing* dan upaya penegakan hukum, survei/pendataan potensi perikanan, serta memfasilitasi dan atau mengadakan kerja sama dengan investor untuk membangun industri perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Konsumsi ikan sudah melampaui standar nasional yaitu 40 kg/orang/tahun tahun 2015, namun jika dibandingkan dengan negara berkembang yang memiliki konsumsi ikan tinggi dengan luas perairan yang lebih kecil misalnya malaysia mencapai 70 kg/orang/tahun, sedangkan Indonesia yang memiliki perairan lebih

luas dengan konsumsi ikan yang lebih rendah yaitu 38 kg/orang/tahun.

31. Perdagangan

Potensi perdagangan atau komoditas unggulan di daerah belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu diharapkan adanya Kebijakan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan letak geografis, serta potensi unggulan daerah. Sementara itu ekspor bersih perdagangan juga belum optimal, hasil yang diperoleh masih relatif kecil dan belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan sumber daya alam harus searah dan selaras dengan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang bidang perdagangan.

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal juga belum optimal disebabkan wilayah pesisir menghadapi pertumbuhan yang lamban dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti pasar, sarana transportasi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilalui kapal - kapal dagang besar dapat dijadikan bagian dari Poros Maritim Nusantara, dengan menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pusat distribusi barang dan jasa, serta pembangunan kapal.

32. Perindustrian

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal disebabkan keterbatasan SDM. Untuk itu diharapkan adanya perhatian pemerintah untuk melaksanakan berbagai pelatihan, pengadaan peralatan, serta sosialisasi.

33. Ketransmigrasian

Pembangunan bidang ketransmigrasian belum berjalan efektif, mengingat transmigrasi swakarsa di Kabupaten Kepulauan Selayar belum ada.

b) Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2019

1) Permasalahan Pembangunan terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan identifikasi persoalan yang berkaitan dengan pembangunan daerah tahun berjalan, beberapa permasalahan yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah:

1. Masih tingginya persentase angka kemiskinan pada tahun 2019 yaitu 12,83 persen dengan jumlah penduduk miskin 17.360 jiwa.
2. Masih rendahnya realisasi program strategis yaitu menjadikan Selayar sebagai KEK Pariwisata, Menjadi Selayar sebagai Pusat Perikanan Terpadu, serta menjadikan Selayar sebagai Pusat distribusi logistic barang dan jasa.
3. Menurunnya capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten, dari 8,77 persen pada tahun 2018 menjadi 7,66 pada tahun 2019.
4. Kurangnya UMKM yang mampu mengelola hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata yang merupakan sector unggulan daerah.
5. Masih rendahnya Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja dan pencari kerja yang ditempatkan.
7. Masih kurangnya jumlah desa dengan status desa berkembang dan desa mandiri.
8. Masih rendahnya tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat dan laut yaitu 24,67 persen untuk darat dan 12,09 persen untuk laut.

9. Masih rendahnya tingkat keterpenuhan infrastruktur perhubungan, perumahan pemukiman, irigasi, air bersih dan sanitasi layak.
10. Belum optimalnya system penataan ruang, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
11. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk peningkatan prestasi kepemudaan.
12. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 sebesar sebesar 12,40 tahun belum mencapai target daerah yaitu 12,47 tahun.
13. Angka usia harapan hidup pada tahun 2019 adalah 68,03 tahun sudah melampaui target daerah, namun masih dibawah AHH provinsi yaitu 70,43 tahun.
14. Indeks ketimpangan gender masih sangat jauh dari target daerah, dimana pada tahun 2019 ditargetkan 25 sementara capaiannya hanya 0,27.

2) Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dengan melihat kondisi daerah dan evaluasi RKPD tahun 2018, kita dapat melihat persoalan-persoalan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya pada tahun 2019. Persoalan-persoalan tersebut harus menjadi perhatian pemerintahan terutama dalam merencanakan program kerja Tahun 2020. Berikut ini merupakan persoalan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 berdasarkan urusan pemerintahan daerah:

1. Pendidikan
 - a. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang pendidikan
 - b. Kurangnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

2. Kesehatan
 - a. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang kesehatan
 - b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
 - c. Belum optimalnya sistem pelayanan dan pengaduan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Kualitas dan kuantitas SDM di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang masih terbatas
 - b. Kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum
 - c. Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang belum ditetapkan sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan dan penertiban tata ruang dan tata lingkungan
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan IMB sebagai penyelenggaraan tata bangunan
4. Perumahan Rakyat
 - a. Belum optimalnya pendanaan (hanya mengandalkan pendanaan dari Pemerintah Pusat) dalam upaya pengurangan luasan kawasan kumuh
 - b. Terbatasnya jangkauan pelayanan air bersih karena keterbatasan sumber air
 - c. Terbatasnya sumber air baku yang layak berdasarkan kualitas dan kuantitasnya khususnya di wilayah kepulauan
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan air bersih yang telah terbangun oleh para pengelola
 - e. Terbatasnya dana untuk pengembangan (mengandalkan pendanaan dari

pemerintah/Pemerintah Daerah), operasional dan pemeliharaan SPAM

- f. Belum optimalnya pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
 - g. Masih kurangnya sarana dan prasarana tanggap kebakaran dan tingginya tingkat response time
 - h. Masih rendahnya standar dan sarana evakuasi keadaan darurat
5. Perencanaan Pembangunan
- a. Belum tersedianya tenaga fungsional perencana
 - b. Belum optimalnya pemahaman tentang mekanisme perencanaan baik ditingkat OPD, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan
 - c. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan
 - d. Masih belum seragamnya pemahaman indikator kinerja
6. Perhubungan
- a. Terbatasnya anggaran untuk pemenuhan infrastruktur perhubungan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. Masih kurangnya ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor
 - c. Masih rendahnya ketersediaan PJU di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar
 - d. Belum terealisasinya bandara kayuadi karena terkendala Peraturan Menteri Perhubungan terkait penetapan lokasi yang merupakan salah satu persyaratan utama untuk menerbitkan Study Kelayakan pembangunan Bandara

7. Lingkungan Hidup
 - a. Kurangnya usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis (masih di bawah standar SPM Bidang Lingkungan Hidup)
 - b. Kurang optimalnya sistem penanganan sampah
 - c. Kurangnya industri/IKM yang mengembangkan produksi ramah lingkungan
8. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang kependudukan dan catatan sipil
 - b. Rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi waktu dalam proses pelayanan administrasi kependudukan akibat tidak stabilnya infrastruktur jaringan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
9. Pemberdayaan Perempuan
 - a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran dalam mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan, lansia, dan remaja
10. Keluarga Berencana
 - a. Masih rendahnya Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - b. Kurangnya kualitas, kuantitas, dan pemerataan SDM di lapangan
 - c. Kurangnya ketersediaan alkon Non-MKJP
 - d. Belum terkoordinasinya pelaksanaan program pembangunan keluarga
11. Sosial
 - a. Masih tingginya angka kemiskinan

- b. Belum tercapainya sasaran dalam mengurangi jumlah PMKS karena jumlahnya meningkat setiap tahunnya
 - c. Masih terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak
12. Ketenagakerjaan
- a. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja
 - b. Rendahnya tingkat keterampilan dan keahlian pencari kerja
13. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- a. Kurangnya antusiasme pelaku UMKM/IKM terhadap pelatihan,
 - b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kemajuan UMKM pasca pelatihan dan penyaluran bantuan
14. Penanaman Modal
- a. Kurangnya ketertarikan calon investor untuk berinvestasi karena faktor pendukung investasi yang belum memadai (objek investasi tidak sesuai, dokumen lingkungan belum ada dan dokumen penataan ruang belum ditetapkan)
 - b. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi
15. Kebudayaan
- a. Tidak tersedianya gedung kesenian/kebudayaan
 - b. Antusiasme Masyarakat yang masih kurang terkait pelaksanaan dan pelestarian kebudayaan khususnya budaya Kabupaten Kepulauan Selayar
16. Kepemudaan dan Olahraga
- a. Kurang optimalnya pendataan serta regenerasi dan pembinaan atlet di Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga

- c. Rendahnya keterlibatan pihak pengusaha dan masyarakat umum dalam pengembangan atlet
17. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
- a. Belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat
 - b. Kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat
 - c. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar
 - d. Masih terbatasnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas Satpol PP
18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- a. Ketidaksesuaian data kepegawaian akibat perubahan sistem
 - b. Belum optimalnya fungsi Sistem Pengendalian Internal (SPI) oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Terkendalanya proses pemeriksaan Organisasi Perangkat Daerah akibat belum lengkapnya data dari objek pemeriksaan terkait
 - d. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Terkendalanya kegiatan yang diakibatkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan

manajemen keuangan, pembagian tugas dan fungsi serta penjadwalan kegiatan yang tidak teratur

- f. Kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam kaitannya dengan fungsi legislasi (Setwan)

19. Ketahanan Pangan

- a. Belum terciptanya diversifikasi konsumsi pangan oleh penduduk
- b. Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan sarana pengolahan, pengemasan serta pemasaran produk pertanian dan peternakan
- c. Produk olahan pertanian dan peternakan yang dihasilkan belum memenuhi standar SSOP (*Sanitation Standard Operating Procedure*)

20. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- f. Belum meratanya kapasitas SDM dan Lembaga Desa, yang menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa serta tidak optimalnya pembagian tugas dan wewenang

21. Statistik

- a. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD dalam penyusunan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Kurangnya kapasitas OPD terkait peranannya dalam penyediaan data yang sesuai dengan indikator Permendagri No 86 tahun 2017 dan pemahaman akan Indikator Pembangunan Makro Ekonomi dan Sosial

22. Kearsipan

- a. Belum memadainya regulasi kearsipan

- b. Kurangnya kapasitas SDM aparatur dalam pemanfaatan dan pengelolaan kearsipan
 - c. Belum optimalnya koordinasi dalam pemanfaatan/pengelolaan kearsipan antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam kapasitasnya sebagai pembina kearsipan dengan OPD dan lembaga lainnya
23. Komunikasi dan Informasi
- a. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi oleh OPD
 - b. Masih kurangnya kapasitas SDM aparatur dalam pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tugas
 - c. Belum optimalnya koordinasi dalam pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi yang menyebabkan kurangnya sinergitas program/kegiatan
24. Perpustakaan
- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan daerah dan perpustakaan masyarakat
 - b. Kurangnya kapasitas SDM pengelola perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat
25. Pertanian
- a. Tingginya ancaman cuaca yang dapat menyebabkan berkurangnya produksi tanaman pertanian
 - b. Belum optimalnya Sistem Alih Teknologi pertanian
 - c. Masih rendahnya pemanfaatan limbah peternakan
26. Kepariwisata
- a. Terkendalanya proses pembangunan sarana dan prasarana di kawasan wisata akibat rendahnya aksesibilitas ke kawasan wisata

- b. Belum optimalnya manajemen pelaksanaan kegiatan yang mendukung kepariwisataan daerah
 - c. Belum terealisasinya program strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu KEK Pariwisata yang disebabkan oleh belum adanya konsorsium untuk menjadi pengusul KEK dimaksud
 - d. Belum optimalnya promosi dan pemasaran Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar
27. Kelautan dan Perikanan
- a. Belum optimalnya upaya pelestarian lingkungan perairan
 - b. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha budidaya perikanan
 - c. Belum optimalnya dukungan industri pengolahan hasil perikanan sehingga hasil produksi ikan tidak menambah penghasilan masyarakat
 - d. Kewenangan wilayah laut yang tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten
28. Perdagangan
- a. Diperlukan kebijakan yang konkret untuk mengendalikan keberadaan toko modern di tiap kecamatan
 - b. Peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku
 - c. Belum terbentuk Unit /UPTD Kemetrolagian yang bertugas untuk melakukan Tera/ Tera Ulang
 - d. Belum tersedianya peralatan UTTP dan tenaga ahli
29. Perindustrian
- a. Terkendalanya pemasaran produk, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar
 - b. Rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan IKM

- c. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional
 - d. Belum terealisasinya program strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu menjadikan selayar sebagai pusat distribusi logistik barang dan jasa kawasan timur indonesia
30. Ketrasmigrasian
- a. Tidak terealisasinya pemberangkatan calon transmigran yang sesuai dengan rencana

2. ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Beberapa isu strategis daerah yang perlu menjadi pertimbangan dalam akselerasi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 – 2021, adalah :

1. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dalam tahap awal kepemimpinan, pemerintahan yang lahir dari hasil penyelenggaraan PEMILUKADA tahun 2015, perlu melaksanakan penataan dan penguatan terhadap kelembagaan pemerintah daerah baik pada tataran organisasi, SDM aparat pemerintah daerah, manajemen dan tata laksana maupun kebutuhan penyediaan naskah kebijakan daerah dalam rangka akselerasi kebijakan dan program pembangunan daerah sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2016-2021.

Hal ini menjadi suatu keniscayaan dalam rangka meminimalisir segala kemungkinan yang dapat berpotensi menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan lima tahun ke depan.

2. Optimalisasi Posisi Geografis Daerah sebagai Keunggulan Komparatif Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten yang diapit oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI II

dan ALKI III, serta berada tepat di tengah-tengah bentang barat dan timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki peluang menjadi salah satu daerah cepat tumbuh di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya.

Beberapa peran yang dapat dimainkan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar dan dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja pembangunan regional dan nasional adalah :

- a. Pusat Distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia;
- b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
- c. Pembangunan Industri Perikanan Terpadu

Ketiga peran di atas, dapat terwujud di Kabupaten Kepulauan Selayar, apabila didukung oleh kebijakan di tingkat provinsi dan nasional. Oleh karena itu, di awal periode kepemimpinan Bupati – Wakil Bupati Terpilih Kepulauan Selayar 2016 – 2021, yang pertama dan utama yang akan dijalankan adalah konsolidasi kelembagaan dan advokasi ke pemerintah provinsi dan pusat dalam rangka memperoleh dukungan dan kebijakan alokasi anggaran yang memadai terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Pembangunan yang Berkeadilan dan Merata

Pembangunan yang berkeadilan dan merata menjadi salah satu isu strategis daerah dalam pembangunan lima tahun ke depan, mengingat selama satu dasawarsa berjalannya otonomi daerah, masih terdapat berbagai ketimpangan baik antar wilayah maupun antar tingkat pendapatan.

Oleh karena itu, sejumlah program akan dirancang dan dijalankan untuk mengurangi ketimpangan tersebut, antara lain, akselerasi pembangunan infrastruktur kewilayahan, dan penyelenggaraan Program Prioritas yang menekankan keberpihakan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perkembangan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Namun seiring dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang, diperlukan keberlanjutan dan perubahan kearah yang lebih baik (*sustain and change*) dari aktivitas pembangunan.

Berpijak pada upaya untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, baik dalam lingkup wilayah (keterpaduan pembangunan dalam konstelasi Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional) maupun lingkup waktu, maka diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Perencanaan pembangunan jangka menengah ini diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan.

Perubahan paradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional yang Dicanangkan melalui penetapan kebijakan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah) pada prinsipnya merupakan upaya untuk menata kembali dan mengedepankan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Terkait dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar 2012-2032 serta berbagai dokumen perencanaan lain yang terkait. Dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi pedoman dan landasan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati. Dengan dilantikannya Bapak Muh. Basli Ali sebagai Bupati Kepulauan Selayar dan Dr. H. Zainuddin, SH., MH., sebagai Wakil Bupati Kepulauan Selayar pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka pemerintah Kabupaen Kepulauan Selayar mulai menyusun RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan Kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar 2012-2032 serta memperhatikan RPJMN 2015-2019. RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016-2021 selanjutnya diacu oleh seluruh SKPD di Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai tugas Pokok dan Fungsinya dan diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya visi dan misi tersebut diimplementasikan untuk menentukan strategi arah dan kebijakan pembangunan serta prioritas daerah dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Visi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan, isu pembangunan daerah dan isu strategis nasional dan provinsi Sulawesi Selatan, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah

sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005 – 2025, visi pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, adalah :

***“ Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera
Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”***

Visi Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2016–2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Kepulauan Selayar yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya.

Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni: 1) Masyarakat maritim sejahtera; 2) Nilai keagamaan; dan 3) Nilai kultural. “Masyarakat Maritim yang Sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “Nilai Keagamaan” dan “Nilai Kultural” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

“Masyarakat Maritim yang Sejahtera”, mengandung dua pengertian kondisi, yakni masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai masyarakat maritim, dan masyarakat Kepulauan Selayar sebagai masyarakat yang sejahtera. Dalam pokok visi ini tercakup berbagai fokus terkait kesejahteraan masyarakat dilihat dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor serta kesejahteraan sosial, keterpenuhan berbagai infrastruktur wilayah, hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam yang unggul, serta produktivitas dan daya saing daerah.

<p>“Berbasis Nilai Keagamaan”, mengandung pengertian bahwa masyarakat Selayar dalam lima tahun ke depan akan semakin mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas dan rukun serta menempatkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan motivasi serta basis nilai utama dalam kehidupan.</p>	<p>“Berbasis Nilai Kultural” mengandung pengertian bahwa dalam lima tahun ke depan kebudayaan daerah akan semakin berkembang dalam merespon dinamika kebudayaan nasional dan global. Dalam pokok visi ini tradisi dan kearifan lokal ditempatkan sebagai unsur yang akan lestari secara dinamis.</p>
--	--

Tabel 1.20
 Keterkaitan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar

Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar	Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar	Analisis saling keterkaitan
Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural	Selayar sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan	Dalam pokok visi RPJMD ini tercakup berbagai fokus terkait kesejahteraan masyarakat dilihat dari; Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor serta kesejahteraan sosial, Keterpenuhan berbagai infrastruktur wilayah, Hasil-hasil pengelolaan sumberdaya alam yang unggul, serta Produktivitas dan daya

Tabel 1.20 Keterkaitan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar		
Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar	Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar	Analisis saling keterkaitan
		saing daerah. Hal tersebut, merupakan perwujudan dari visi RPJPD yang bermakna bahwa potensi kemaritiman akan dijadikan sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah yang menunjang peningkatan ekonomi provinsi dan nasional.

2. Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode lima tahun RPJMD 2016-2021, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi Dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh, dan Berkelanjutan.

Misi ini mencakup; Upaya-upaya dalam menciptakan situasi kondusif pada seluruh wilayah dan seluruh golongan masyarakat bagi kehidupan beragama; Membangun pusat kajian agama dan budaya; Mendorong pemenuhan sarana-prasarana dan fasilitas penyelenggaraan ibadah; Memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi, inspirasi dan nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan.

Misi ini mencakup upaya-upaya; Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bentuk menata struktur dan budaya organisasi serta sumber daya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif; Menerapkan *e-government* dalam peningkatan pelayanan publik; Meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta penerapan sistem *punishment and reward*; Meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat; Menjaga dan memelihara ketertiban serta ketenteraman dalam masyarakat; Melakukan upaya penegakan hukum secara terpadu; dan Membangun kesadaran politik; serta Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Misi ini berfokus pada upaya-upaya; Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya kualitas manusia. Tercakup didalamnya upaya-upaya pemberdayaan dan fasilitasi serta peningkatan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk keluarga berencana (KB) dan kesejahteraan keluarga; Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; dan Membina kegiatan kepemudaan, membudayakan, serta dan meningkatkan prestasi keolahragaan.

4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata.

Misi ini mencakup upaya-upaya; Pengembangan infrastruktur wilayah dan peningkatan aksesibilitas dari dan ke Selayar, serta meningkatkan prasarana dan sarana transportasi dan perhubungan yang terintegrasi wilayah daratan dan kepulauan; Mempercepat peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, listrik, air, dan energi; khusus pengembangan jalan pada wilayah daratan pulau Selayar, diarahkan agar terkoneksi dan searah dengan pengembangan sektor-sektor strategis lainnya; Berkembangnya sentra-sentra Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta Kawasan Industri Perikanan Terpadu, dan menjadikan

Selayar sebagai pusat budidaya ikan karang; Memberikan akses dan kemudahan berinvestasi; serta Mendorong kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Non Pemerintah dalam upaya mempercepat dan mengoptimalkan dukungan kebijakan untuk terealisasinya kebijakan dan program daerah yang telah ditetapkan.

5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah.

Misi ini berfokus pada; Peningkatan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman, dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tercakup didalamnya upaya membangun sentra pengembangan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan; Meningkatkan kesadaran dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

6. Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan.

Misi ini berfokus pada upaya-upaya; Peningkatan produktivitas dari bidang usaha ekonomi yang berkembang khususnya yang berbasis kerakyatan. Tercakup di dalamnya upaya pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis profesi berbasis teknologi pada masyarakat; Dukungan permodalan dan manajemen bagi usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan daya saing; serta Mencetak wirausahawan pada desa dan kelurahan.

7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan.

Misi ini berfokus pada; Strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar. Di dalamnya tercakup upaya pelestarian tradisi, pembinaan sejarah lokal dan penguatan lembaga adat; Pembinaan kesenian daerah; serta pengelolaan cagar

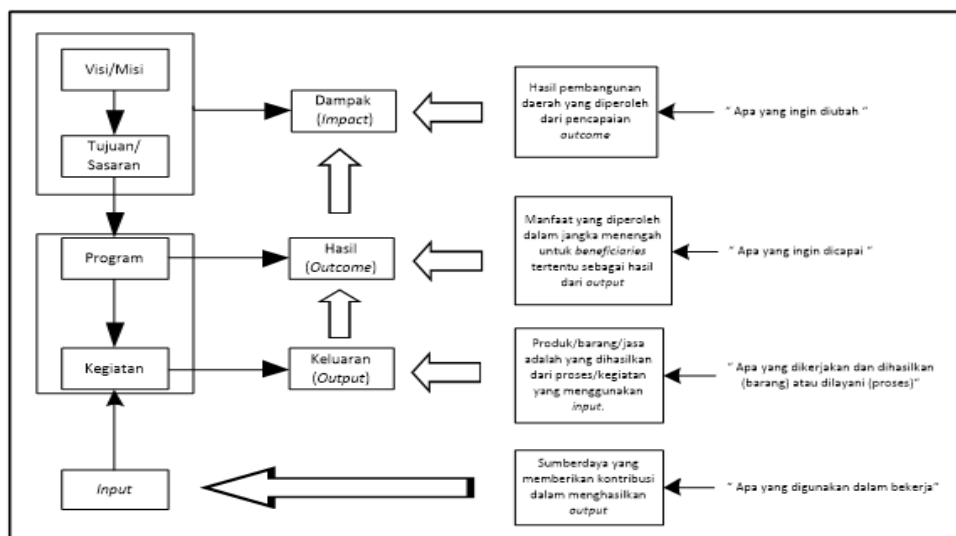
Pada dasarnya setiap misi memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang akan diupayakan perwujudannya. Dengan formulasi demikian maka dapat dijamin bahwa setiap pokok visi memiliki keterkaitan dengan rumusan misi tertentu untuk mencapainya. Keterkaitan dengan misi dengan pokok visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada, tabel 1.22.

Tabel 1.21
 Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2016-2021

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.	“Berbasis nilai keagamaan”
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif, dan transparan.	“Masyarakat maritim yang sejahtera”
3.	Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.	“Masyarakat maritim yang sejahtera”
4.	Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata	“Masyarakat maritim yang sejahtera”
5.	Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah	“Masyarakat maritim yang sejahtera”
6.	Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.	“Masyarakat maritim yang sejahtera”
7.	Mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui strategi kebudayaan.	“Berbasis nilai kultural”

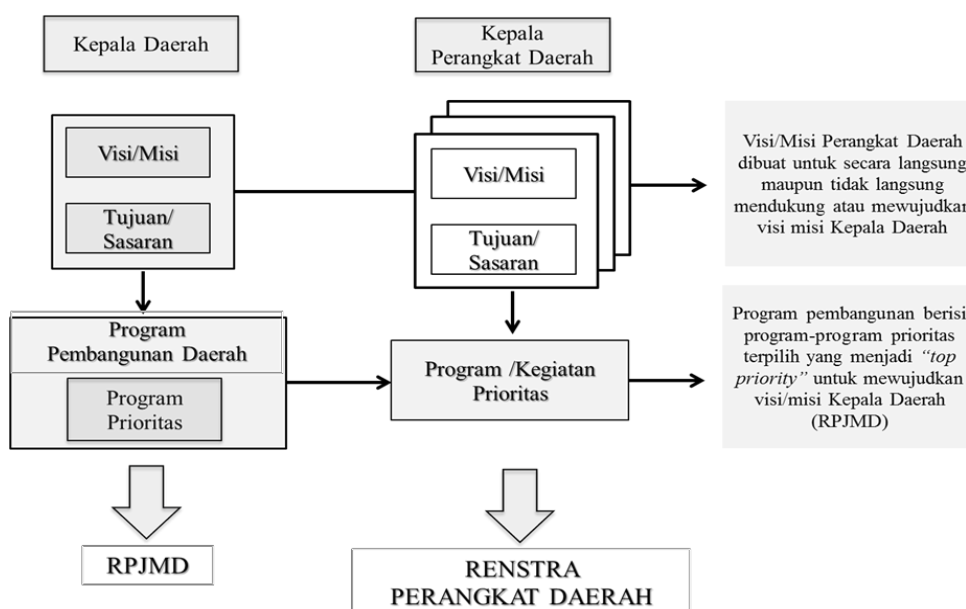
3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2.
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini.



Gambar 1.3
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana dikemukakan di atas, serta dengan merujuk pada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan (2016 – 2021), maka tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 – 2021, sebagai berikut :

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
 RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
Visi : Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural										
Misi 1: Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh, dan Berkelanjutan										
1.	Memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi serta nilai utama dalam penyelenggaraan pembangunan (T-1)	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama (S-1)	Pelaksanaan ibadah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik
			Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	n.a	0	0	0	0	0	0
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan.										
2.	Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel (S-2)	Opini atas laporan keuangan	Disclaimer	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
	dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	C	CC	B	BB	BB	BB	BB
			Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S-4)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	82,48%	85%	85%	90%	90%	95%	95%
3.	Memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kesadaran hukum (T-3)	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (S-5)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kabupaten	89,29	89,29	92,00	94,00	95,00	96,00	97,00
4.	Sinkronisasi dan integrasi kebijakan di bidang	Meningkatnya pelayanan penyelenggara	Transmigran lokal (KK)	n.a	20	20	20	20	20	20

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
	transmigrasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (T-4)	n transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah (S-6)								
5.	Meningkatkan kualitas pemerintahan desa (T-5)	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (S-7)	% Desa Mandiri	1 desa	3 desa (3,70)	1 desa (4,94)	5 desa (11,11)	1 desa (12,35)	3 Desa (16,05)	6 desa (24,69)
			% Desa Berkembang	72 desa	15 desa (18,52)	9 desa (29,63)	7 desa (38,27)	6 desa (45,68)	10 desa (58,01)	6 desa (65,43)
			% Desa Tertinggal	8 desa	3 desa (3,70)	1 desa (4,94)	4 desa (9,88)	0	0	0
Misi 3:										
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat										
6.	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat (T-6)	Berkurangnya penduduk miskin (S-8)	% Angka kemiskinan	7,15	6,69	6,23	5,76	5,29	4,79	4,24
			Jumlah Penduduk Miskin (KK)	9.215	8.615	8.015	7.415	6.815	6.165	5.415

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
 RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
		Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)	Income per kapita penduduk (Juta)	19	22,5	24	25,5	27	28,5	30
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S-10)	Angka Melek Huruf	93,98	95,15	96	97	98	98,5	100
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,98	12,00	12,32	12,40	12,47	12,54	12,62
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S-11)	Angka Usia Harapan Hidup	67,50	67,52	67,54	67,56	67,57	67,58	67,59
		Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	(KB) 110,00	(KB) 98,00	(KB) 99,00	(KB) 99,00	(KB) 99,98	(KB) 99,98	(KB) 99,98
				(KS) 85,22	(KS) 88,63	(KS) 92,04	(KS) 94,04	(KS) 94,31	(KS) 96,59	(KS) 96,59
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	n.a	15	20	22,5	25	27,5	30

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
		(S-12)	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,37	91,75	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00
			Indeks pemberdayaan gender (IDG)	59,67	59,75	59,90	60,15	60,40	60,75	61,00
7.	Meningkatkan peran pemuda dan membudayakan olahraga (T-7)	Meningkatnya kemandirian pemuda (S-13)	% pemuda mandiri	n.a	0	100	100	100	100	500
		Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat (S-14)	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	13	15	15	15	15	15	15
Misi 4:										
Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Investasi Swasta Di Sektor Perikanan, Kelautan dan pariwisata										
8.	Meningkatkan kemampuan membuka isolasi	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan	% Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda	18 %	23 %	29%	35%	41%	46%	52%
				124 Bh	160 Bh	200 Bh	240 Bh	280 Bh	320 Bh	360 Bh

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
	daerah (T-8)	Selayar (S-15)	transportasi darat							
			% Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut	6%	8%	10%	12 %	13 %	15 %	17 %
				30 Bh	40 Bh	50 Bh	60 Bh	70 Bh	80 Bh	90 Bh
			% Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara	36 %	40 %	46 %	50 %	56 %	65 %	70 %
				455 Bh	502 Bh	576 Bh	624 Bh	704 Bh	816 Bh	881 Bh
9.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar (T-9)	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar (S-16)	Jalan Lingkar Timur Utara Terbangun (%)	18,87	18,87	45,91	72,96	94,95	100,00	100,00
			Jalan Lingkar Timur Tengah Terbangun (%)	78,45	78,45	78,45	78,45	85,55	92,30	100,00
			Jalan Lingkar Timur Selatan Terbangun (%)	35,71	35,71	51,78	65,60	82,18	91,55	100,00
			Tingkat	46,04	50,00	60,50	70,00	75,00	80,00	85,00

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
 RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
			memenuhi jaringan jalan (%)							
			Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	33 %	67 %	67 %	67 %	100 %	100 %	100 %
				1 Bh	2 Bh	2 Bh	2 Bh	3 Bh	3 Bh	3 Bh
			Berfungsinya Bandara Kayuadi	2,5	2,5	5	7	8	9	10
				Study. Peny. Master Plan	RTT sisi Darat dan Udara	Pembebasan Lahan	Study KKOP dan amdal	Pemb. Fisik sisi darat dan Udara	Fungsional	Fungsional
			Jumlah Pelabuhan Laut (%)	35 %	45 %	55 %	65 %	75 %	85 %	100 %
				7 Bh	9 Bh	11 Bh	13 Bh	15 Bh	17 Bh	20 Bh
			Perluasan terminal angkutan darat (%)	40 %	48 %	56 %	65 %	73 %	81 %	89 %
				50	60	70	80	90	100	110
			Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (%)	33%	33%	67%	67%	83%	100%	100%
				2 Bh	2 Bh	4 Bh	4 Bh	5 Bh	6 Bh	6 Bh
			Rasio jaringan irigasi	41,35	63,22	65,00	70,00	75,00	80,00	90,00

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
 RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
			Rasio ketersediaan air baku	78,00	80,00	82,00	86,00	90,00	95,00	100,00
			Rasio Ketersediaan Air Bersih (%)							
			- <i>Rumah Tangga (%)</i>	60,47	85,00	89,72	95,05	96,77	98,80	100
			- <i>Industri (%)</i>	95,05	98,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Rumah layak Huni (%)	80,81	80,81	84,00	87,19	90,38	93,57	100
				n.a.	1250 unit	1250 unit	1250 unit	1250 unit	1250 unit	7.500 unit
			Cakupan Sanitasi Layak (%)	71,38	77,74	85,97	94,50	100,00	100,00	100,00
			Kawasan Pemukiman Kumuh tertangani (%)	n.a	n.a	20	40	60	80	100
				n.a	0 Ha	220 Ha	220 Ha	220 Ha	220 Ha	220 Ha
			Rasio Elektrifikasi (%)							
			- <i>Rumah Tangga</i>	46,15	47,85	49,85	52,35	55,45	59,15	65

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
			(%)							
			- Industri (%)	8,85	15,25	23,75	30,5	37,25	43,65	50
			PLTMG Terbangun dan Beroperasi	-	Proses	Terbangun	Beroperasi	Beroperasi	Beroperasi	Beroperasi
			Terminal Gas Terbangun dan Beroperasi	-	Proses	Proses	Terbangun	Beroperasi	Beroperasi	Beroperasi
10.	Merevitalisasi kawasan dan obyek wisata (T-10)	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (S-17)	Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik/Asing)	Domestik 5,946 Asing 253	(10%) 6.541 (50%)	(20%) 7.849 (55%)	(30%) 10,203 (60%)	(40%) 14,285 (70%)	(50%) 21,427 (80%)	(60%) 34,283 (85%)
11.	Meningkatkan keterintegrasian wilayah daratan dan pulau-pulau (T-11)	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan (S-18)	Tingkat kelancaran Barang dan Penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	22 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %
				55.135	63.000	76.000	89.000	103.000	115.000	127.000

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
 RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
12.	Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	Meningkatnya investasi (S-19)	Nilai PMDN (dalam Milyar Rupiah)	35.147.336.660	38.662.070.000	42.528.277.500	46.781.105.000	51.459.215.500	56.605.136.000	62.265.649.500
			Nilai PMA (\$)	1.417.562	1.450.000	2.000.000	3.000.000	5.250.000	10.500.000	21.000.000
Misi 5										
Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah										
13.	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis Wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Sumberdaya Kemaritiman (T-13)	Terbangun dan berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata (S-20)	Realisasi Pembangunan KEK Pariwisata	n.a.	Fasilitasi pembentukan badan usaha penyelenggara KEK	ditetapkan	ditetapkan	ditetapkan	ditetapkan	ditetapkan
		Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan	Realisasi Pembangunan Kawasan Industri Perikanan	n.a.	40	45	50	55	60	65

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
 RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
		terpadu dan pusat budi daya ikan karang (S-21)	Terpadu (%)							
		Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa) (S-22)	Realisasi Pembangunan Kawasan Distribusi Logistik (%)	n.a	n.a	5	10	15	20	25
		Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ton)	Padi 29,617	32.579 (10 %)	35.837 (10 %)	39.421 (10 %)	43.363 (10 %)	47.699 (10 %)	52.469 (10 %)
				Jagung 9,035	10.390 (15 %)	11.949 (15 %)	13.741 (15 %)	15.802 (15 %)	18.172 (15 %)	20.898 (15 %)
			Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman	J.Keprak 5,850.40	5,870.27 (0,30%)	5,890,14 (0,30%)	5,910.01 (0,30%)	5,929.88 (0,30 %)	5,949.75(0,3 0 %)	5.969,6 2(0,30 %)

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
		(S-23)	Hortikultura (Ton)							
			% Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton)	Kelapa 25,190.37	25,568.22 1,5%	25,951.741,5 %	26,341.011 ,5%	26,736.121 ,5%	27,137.161,5 %	27,544. 211,5%
				Pala 292,88	305,83 0,04%	336,35 0,09%	341,60 0,02%	375,38 0,08%	410,40 0,08%	422,40 0,02%
				Cengkeh 125,39	236,70 0,47%	283,15 0,01%	290,15 0,02%	341,60 0,15%	395,55 0,14%	409,05 0,03%
				Jambu Mete 1,400.00	1,576,80 1,12%	1,754.500,10 %	1,757.000, 001%	1.938.20 0,09%	2,120.40 0,09%	2.129.4 0 0,004%
			Tingkat Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan (kw/ha)	Padi 58,87	66,99	71,25	67,64	70,55	73,88	77,33
				Jagung 29,78	34,17	39,20	44,98	51,61	59,21	67,85
			Tingkat Produktivitas Pertanian Tanaman Holtikultura	J.Kepron 100,96	102,01	103,05	103,90	104,50	105,50	106,75

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
 RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
			(kw/ha)							
			Tingkat Produktivitas Perkebunan (Kg/ha)	Kelapa 1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502
				Pala 316	325	350	350	375	400	400
				Cengkeh 162	300	350	350	400	450	450
				Jambu Mete 400	450	500	500	550	600	600
			Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi Pusat Pemurnian Sapi Bali (%)	30	30	50	60	70	80	100
			Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi Pusat Pembiakan Sapi Unggul (%)	n.a	0	20	50	70	80	100

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
			% Peningkatan Produksi Ternak	Sapi ptg 16,756	17,621 5,16%	18,542 10,66%	19,946 19,04%	21.693 29,46%	23.715 41,53%	26.257 56,70%
				Sapi prh 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				Kerbau 4,588	4,633 1,64%	4,740 1,65%	4,818 1,65%	4,898 1,66%	4,980 1,66%	5,062 1,66%
				Kuda 3,766	3,856 2,39%	3,948 2,39%	4,043 2,39%	4,140 2,39%	4,239 2,39%	4,340 2,39%
				Kambing 80,831	81,511 0,84%	83.827 3,71%	86.628 7,17%	90.476 11,93%	95.400 18,024%	100.973 24,92%
				Domba 36	45 25%	56 24,44%	71 26,97%	89 25,35%	112 25,84%	141 25,89%
				Ay.Brs 272,372	273,521 0,42%	274,675 0,42%	275,833 0,42%	276,997 0,42%	278,166 0,42%	279,339 0,42%
				Ay. Ras pdg 8,732	9,234 5,75%	9,766 5,75%	10,328 5,75%	10,992 5,75%	11,550 5,75%	12,215 5,75%
				Ay.Ras	12,269	12,962	13,435	13,791	14,295	14,816

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
				Ptlr 11,613	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%
				Itik 5,691	6,099 7,16%	6,536 7,16%	7,004 7,16%	7,506 7,16%	8,044 7,16%	8,620 7,16%
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha)	375,45 Ha	394,22 Ha (5%)	413,93 Ha (10,25%)	434,62 Ha (15,76%)	456,35 Ha (21,55%)	479,16 Ha (27,62%)	503,11 Ha (34,00%)	
		Produksi Hasil Hutan (m3)	437,58 m3	525,09 M3 (20,00%)	630,10 M3 (44,00%)	756,12 M3 (72,80%)	907,34 M3 (107,35%)	1.088,80 M3 (148,82%)	1.306,56 m3 (198,59%)	
		Kerusakan Hutan dan Lahan (ha)	42.775,76 Ha	42.381,54 Ha (-0,92%)	41.967,6 Ha (-1,98%)	41.532,99 Ha (-2,91%)	42.076,64 Ha (-3,97%)	40.597,48 (-5,09%)	40.094,37 Ha (-6,27%)	
		Peningkatan Produksi Perikanan dan kelautan :								
		- Perikanan Tangkap (ton	24.155,80	26.598.77	28.992.66	31.312,07	33.503.92	35.179,12	36.938,08	

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
			dan %)		10,11%	20,02%	29,63%	36,69%	45,63%	53%
			- Perikanan Budidaya (ton dan %)	804,93	829,08	853,95	879,57	905,96	933,14	961,13
					3,0%	6,09%	9%	13%	16%	19%
			- Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton dan %)	117	120	123	126	130	132	135
					2,57%	5,13%	7,69%	11,11%	12,82%	15,39%
			- Konsumsi Ikan (kg/org/ Tahun)	49,45	50,5	51	51,5	52	52,5	53
					2,12%	3,14%	4,15%	5,16%	6,17%	7,18%
14.	Memelihara fungsi lingkungan hidup (T-14)	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam (S-24)	Indeks Lingkungan Hidup	78,08	78,1	78,3	78,7	78,9	79	79,05

Misi 6

Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan

15.	Meningkatkan keberdayaan	Meningkatnya daya saing dan	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	1,84	6,40	10,48	16,30	27,95	40,76	1.750
-----	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Tabel 1.22

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
 RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
	tenaga kerja (T-15)	produktivitas tenaga kerja (S-25)	Tenaga Kerja yang ditempatkan (orang)	79	275	540	700	1.200	1.750	2.250
16.	Meningkatkan keberdayaan usaha ekonomi kerakyatan (T-16)	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan (S-26)	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	15.016	16.087	17.210	18.242	19.270	20.304	21.516
Misi 7										
Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan										
17.	Memantapkan jati diri keselayaran (T-17)	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar (S-27)	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	1.300	1.357	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	30	40	50	60	70	80	90

**C.PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN
 PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan (2016 – 2021), maka tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 – 2021, sebagai berikut :

Tabel 1.23				
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI :				
Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural				
Misi 1				
Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi serta basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan				
1.	Memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi serta nilai utama dalam penyelenggaraan pembangunan (T-1)	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama (S-1)	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam segala aktivitas masyarakat	Internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas kehidupan
			Meningkatkan kerukunan kualitas kehidupan beragama	Penciptaan kondisi yang kondusif dan toleran bagi pelaksanaan kehidupan beragama
Misi 2				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan				
2.	Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel (S-2)	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan

Tabel 1.23				
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)			daerah
				Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran
				Peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah
				Peningkatan kualitas manajemen aset daerah
		Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)	Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor	Penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah
				Peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah
			Meningkatkan kualitas manajemen Aparatur Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya penerapan <i>punishment dan reward</i>	Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis <i>merit system</i>
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S-4)	Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas	Perbaikan dan penerapan Sistem dan Prosedur pelayanan publik	
Memelihara ketertiban umum dan ketenteraman	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman	Memelihara kondisi ketentraman dan ketertiban yang	Peningkatan kewaspadaan dan daya antisipatif	

Tabel 1.23				
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	masyarakat serta kesadaran hukum (T-3)	masya-rakat (S-5)	kondusif	terhadap kemungkinan munculnya tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
	Sinkronisasi dan integrasi kebijakan di bidang transmigrasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (T-4)	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi local berdasarkan kebutuhan daerah (S-6)	Membuka kawasan baru untuk pengembangan transmigrasi lokal	Pembangunan dan pengembangan kawasan untuk penempatan transmigran lokal
	Meningkatkan kualitas pemerintahan desa (T-5)	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (S-7)	Meningkatkan intergritas, kualitas, kapasitas, profesionalisme aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik	Penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa
Misi 3				
Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat				
	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat (T-6)	Berkurangnya penduduk Miskin (S-8)	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi	Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin
		Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)	Meningkatkan daya beli masyarakat	Perbaikan income perkapita
				Pengendalian harga
				Perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita

Tabel 1.23					
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan					
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S-10)	Menuntaskan penduduk buta aksara	Peningkatan pembinaan keaksaraan	
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan	Peningkatan , pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan	
			Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter	Internalisasi nilai-nilai moral terhadap peserta didik	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S-11)	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan tidak menular,serta kasus kekurangan gizi, pemberdayaan mesyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan
				Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan (S-12)	Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga
					Meningkatkan kualitas kesetaraan gender
		Meningkatkan peran pemuda dan membudayakan olahraga (T-7)	Meningkatnya kemandirian pemuda (S-13)	Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda	Peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda

Tabel 1.23				
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya prestasi olah raga bagi pemuda dan masyarakat (S-14)	Meningkatkan pembinaan keolahragaan bagi pemuda dan masyarakat	Pembudayaan dan peningkatan prestasi keolahragaan
Misi 4				
Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor perikanan, kelautan dan pariwisata				
	Meningkatkan kemampuan membuka isolasi daerah (T-8)	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Selayar (S-15)	Meningkatkan layanan jasa perhubungan dan transportasi	Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dan transportasi
	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar (T-9)	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar (S-16)	Meningkatkan kapasitas infrastruktur perhubungan dan transportasi	Penyediaan infrastruktur perhubungan baik darat, laut dan udara
			Meningkatkan kapasitas infrastruktur air dan irigasi	Pembangunan dan peningkatan bendungan dan jaringan irigasi
			Meningkatkan kapasitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Pembangunan dan peningkatan perumahan dan kawasan permukiman
			Meningkatkan kapasitas infrastruktur energi	Penyediaan energi listrik bagi rumah tangga dan industri
	Merevitalisasi kawasan dan obyek wisata (T-10)	Meningkatnya kunjungan wisatawan (S-17)	Meningkatkan minat dan daya tarik wisata	Pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah
				Peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata
				Peningkatan sadar

Tabel 1.23				
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				wisata bagi masyarakat
				Peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan
	Meningkatkan keterintegrasian wilayah daratan dan pulau-pulau (T-11)	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan (S-18)	Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau	Penyediaan infrastruktur kepelabuhanan
				Penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan
	Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	Meningkatnya investasi (S-19)	Meningkatkan minat dan daya tarik investasi	Peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi dan jaminan kepastian hukum bagi investor
Misi 5				
Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah				
	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis Wilayah dalam rangka optimisasi pemanfaatan Sumberdaya Kemaritiman (T-13)	Terbangun dan berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata (S-20)	Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian selatan Pulau Selayar sebagai KEK Pariwisata	Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian selatan Pulau Selayar)
		Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang (S-21)	Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan	Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industry

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu	perikanan terpadu
				Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara
				Pengembangan industri kapal rakyat
		Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa) (S-22)	Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan distribusi logistik	Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama pendukung kegiatan distribusi logistik pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian utara Pulau Selayar)
		Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan (S-23)	Melaksanakan revolusi tani	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
	Melaksanakan pemurnian dan pembiakan ternak sapi		Penetapan Pulau Tanamalala sebagai pusat pemurnian sapi bali	
			Penetapan Pulau Kalao sebagai pusat pembiakan sapi unggul	
				Lokalisasi pengembangan usaha peternakan pada setiap kecamatan dan pembinaan pola usaha ternak rakyat

Tabel 1.23				
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mengembangkan Kawasan Hutan Rakyat	Pemanfaatan lahan kritis sebagai kawasan konservasi hutan rakyat
			Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan	Penguatan kelembagaan nelayan
	Memelihara fungsi lingkungan hidup (T-14)	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam (S-24)	Melaksanakan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Pelaksanaan pembangunan kawasan dan atau wilayah berdasarkan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Misi 6				
Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agribisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan				
	Meningkatkan keberdayaan tenaga kerja (T-15)	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja (S-25)	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi terhadap layanan ketenagakerjaan
	Meningkatkan keberdayaan usaha ekonomi kerakyatan (T-16)	Meningkatnya daya saing dan produktivitas ekonomi kerakyatan (S-26)	Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan	Perluasan lapangan kerja
				Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan
Misi 7				
Mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui strategi kebudayaan				
	Memantapkan jati diri keselayaran (T-17)	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar (S-27)	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam segala aktivitas masyarakat	Pengintegrasian tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam setiap aktivitas masyarakat dan kegiatan kesiswaan

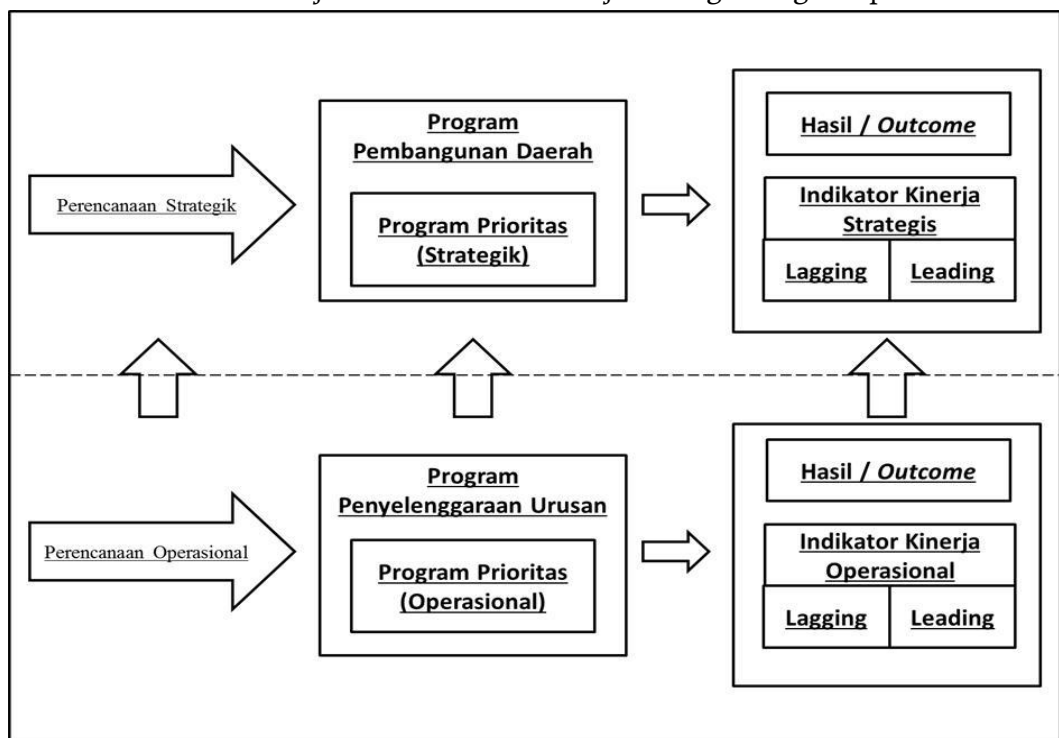
2. Program Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti arsitektur kinerja, sebagai berikut:

Gambar 1.4.

Arsitektur Kinerja RPJMD antara kinerja Strategis dengan Operasional



Berdasarkan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta program dan janji politik Bupati – Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2016 – 2021 yang telah disampaikan kepada masyarakat pada masa kampanye, Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan dalam tiga bagian, meliputi : Program – Program Bupati – Wakil Bupati yang disampaikan pada saat masa kampanye yang disebut PROGRAM SUCI; Program-Program yang merupakan Kontrak Politik Bupati Terpilih yang kemudian ditetapkan sebagai Program Prioritas; dan Program-Program yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Terpilih atau disebut juga Program RPJMD. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. Program SUCI

Program SUCI (Sehat, Unggul, Cerdas, dan Infrastruktur), meliputi :

- a. Penataan struktur dan budaya organisasi serta sumber daya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintah untuk bergerak secara sinergis dan produktif;
- b. Menerapkan E-Government dalam peningkatan pelayanan publik;
- c. Meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberlakukan sistem prestasi kerja dan karir;
- d. Meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat;
- e. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
- g. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- h. Mempercepat peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, listrik, dan air bersih/minum;
- i. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang terintergrasi di daratan dan kepulauan;
- j. Mengembangkan destinasi dan atraksi budaya serta meningkatkan promosi wisata;

- k. Memberikan akses dan kemudahan investasi wisata;
- l. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah dalam membangun sinergitas dalam pengelolaan sumber daya kemaritiman;
- m. Membangun sentra pengembangan komoditas di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
- n. Meningkatkan kesadaran dan upaya pelestarian fungsi lingkungan;
- o. Memberikan peluang dan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis profesi bagi masyarakat yang berbasis pada teknologi;
- p. Memberikan dukungan permodalan dan manajemen bagi UKM dalam meningkatkan daya saing serta mencetak 1.000 wirausahawan yang tersebar di masing-masing desa dan kelurahan;
- q. Menjaga dan memelihara ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat;
- r. Melakukan upaya penegakan hukum secara terpadu;
- s. Membangun kesadaran politik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi;
- t. Membangun pusat studi pengkajian agama dan budaya.

2. Program Prioritas

- a. Gratis pakaian sekolah, sepatu, tas, alat tulis, dan bantuan biaya bagi tamatan SMA yang memasuki Perguruan Tinggi;
- b. Gratis pengurusan KK, KTP, dan Akta Kelahiran;
- c. Gratis beras miskin dan bedah rumah 1000 unit/tahun;
- d. Gratis operasi, persalinan, dan pengangkutan pasien ke rumah sakit rujukan;
- e. Gratis jaminan kecelakaan 10 Juta/KK;
- f. Gratis uang muka pemasangan listrik PLN dan air bersih PDAM;
- g. Gratis alat perikanan, pertanian, dan bibit ternak sapi 4 ekor/KK dan kambing 10 ekor/KK;
- h. Bantuan modal usaha bagi UMKM 7,5 Juta/KK;

- i. Bantuan pertukangan, perbengkelan, dan jahit menjahit berdasarkan profesi;
- j. Bantuan makan minum bagi penumpang kapal ferry yang pelayarannya tertunda di pelabuhan Bira Bulukumba;
- k. Tunjangan hidup bagi anggota masyarakat yang cacat fisik, mental, orang tua jompo, dan yatim piatu;
- l. Tunjangan kematian dan takziah;
- m. Tunjangan haji/umroh bagi guru dan PNS lainnya yang berprestasi;
- n. Menyangga harga komoditas andalan (kopra, pala, cengkeh, jambu mete dan lain-lain)

Adapun program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target – target kinerja RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)			
				Misi Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan														
1	0	0		Memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi serta nilai utama dalam penyelenggaraan pembangunan (T-1)														
1	1	0		Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama (S-1)														
1	1	1	Program Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan	Pelaksanaan ibadah	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		SETDA Bappelitbangda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kesbangpol Satpol PP Damkar
				Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	
				Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan														
2	0	0		Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)														
2	1	0		Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel (S-2)														
2	1	1	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Keuangan dan Aset Daerah	Opini Atas LK Daerah	Disc	WDP	500	WDP	500	WTP	500	WTP	500	WTP	500	WTP	500	SETDA Bappelitbangda BPKPAD Inspektorat
2	2	0		Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)														

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact/ outcome</i>)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)			
2	2	1	Program Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	C	CC	950	B	950	BB	950	BB	950	BB	950	BB	950	Seluruh SKPD
				Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Sangat		Sangat		Sangat		Seluruh SKPD
2	3	0	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S-4)															
2	3	1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	82.48%	85%	500	85%	500	90%	500	90%	500	95%	500	95%	500	SETDA Bappelitbangda Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan BKPPD Disdukpenampil DPMPSTPTK Dinas Sosial Disperindagkum Inspektorat
3	0	0	Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kesadaran hukum (T-3)															
3	1	0	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (S-5)															

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)			
3	1	1	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten (%)	89.29	89.29	500	92	500	94	500	95	500	96	500	97	500	SETDA Bappelitbangda Satpol PP Damkar Kesbang Pol
3	2	0	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah (S-6)															
3	2	1	Program Pembangunan Ketransmigrasian	Transmigran Lokal (KK)	n.a.	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	SETDA Bappelitbangda Dinas Sosial
3	3	0	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (S-7)															
2	1	6	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	% Desa Mandiri	1 desa	3 desa (3,70)	500	1 desa (4,94)	500	5 desa (11,11)	500	1 desa (12,35)	500	3 desa (16,05)	500	6 desa (24,69)	500	SETDA Bappelitbangda Dinas PMD Inspektorat
				% Desa Berkembang	72 desa	15 desa (18,52)	500	9 desa (29,63)	500	7 desa (38,27)	500	6 desa (45,68)	500	10 desa (58,01)	500	6 desa (65,43)		
				% Desa Tertinggal	8 desa	3 desa (3,70)	500	1 desa (4,94)	500	4 desa (9,88)	500	0	500	0	500	0		
Misi Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat																		
3	0	0	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat (T-6)															
3	1	0	Berkurangnya penduduk miskin (S-8)															
			Program Pembangunan	% Angka Kemiskinan	7.15	6.69	2500	6.23	2500	5.76	2500	5.29	2500	4.79	2500	4.24	2500	SETDA Bappelitbangda

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impac</i> t/ <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
	Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Penduduk Miskin (KK)	9,215	8,615	8,015	7,415	6,815	6,165	5,415							Dinas PMD DP3AP2KB Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disperindagkum Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Sosial Disdukpencahil DPMPTSPTK
3	2	0	Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)													
	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyediaan Lapangan Kerja	Income per Kapita Penduduk (juta)	19	22.5	1500	24	1500	25.5	1500	27	1500	28.5	1500	30	1500	SETDA Bappelitbangda Disperindagkum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kepariwisatahan Dinas Sosial Disdukpencahil Dinas PMD DP3AP2KB
3	3	0	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S-10)													

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
	Program Peningkatan Keaksaraan	Angka Melek Huruf	93.98	95.15	200	96	200	97	200	98	200	98.5	200	100	200	SETDA Bappelitbangda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Program Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11.98	12	20000	12.32	20000	12.4	20000	12.47	20000	12.54	20000	12.62	20000	SETDA Bappelitbangda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S-11)															
	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	67.5	67.52	25000	67.54	25000	67.56	25000	67.57	25000	67.58	25000	67.59	25000	SETDA Bappelitbangda Dinas Kesehatan RSUD KH. Hayyung DP3AP2KB Dinas Sosial
	Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan (S-12)															

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact/ outcome</i>)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
	Program Pembangunan Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	(KB) 110 (KS) 85,22	(KB) 98 (KS) 88,63	750	(KB) 99 (KS) 92,04	750	(KB) 99 (KS) 94,04	750	(KB) 99,98 (KS) 94,31	750	(KB) 99,98 (KS) 96,59	750	(KB) 99,98 (KS) 96,59	750	SETDA Bappelitbangda DP3AP2KB Dinas Kesehatan RSUD KH. Hayyung
	Program Pengarusutamaan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	n.a.	15	300	20	300	22.5	300	25	300	27.5	300	30	300	SETDA Bappelitbangda DP3AP2KB
Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91.37	91.75	92		92.25		92.5		92.75		93				
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		59.67	59.75	59.9		60.15		60.4		60.75		61				
4	0	0	Meningkatkan peran pemuda dan membudayakan olahraga (T-7)													
4	1	0	Meningkatnya kemandirian pemuda (S-13)													
	Program Peningkatan Kemandirian Pemuda	% Pemuda Mandiri	n.a.	0		100		100		100		100		500		SETDA Bappelitbangda Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)			
4	2	0	Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat (S-14)															
			Program Pembinaan Keolahragaan	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	13	15	250	15	250	15	250	15	250	15	250	15	250	SETDA Bappelitbangda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
			Misi Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata															
5	0	0	Meningkatkan kemampuan membuka isolasi daerah (T-8)															
5	1	0	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar (S-15)															
			Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Jasa Perhubungan dan Transportasi	% Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat	18%	23%	500	29%	500	35%	500	41%	500	46%	500	52%	500	SETDA Bappelitbangda Dinas Perhubungan
					124 buah	160 buah		200 buah		240 buah		280 buah		320 buah		360 buah		
				% Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut	6%	8%	1000	10%	1000	12%	1000	13%	1000	15%	1000	17%	1000	
					30 buah	40 buah		50 buah		60 buah		70 buah		80 buah		90 buah		

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)			
		% Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara	36%	40%	300	46%	300	50%	300	56%	300	65%	300	70%	300	SETDA Bappelitbangda Dinas Perhubungan		
			455 buah	502 buah		576 buah		624 buah		704 buah		816 buah		881 buah				
6	0	0	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar (T-9)															
6	1	0	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar (S-16)															
6	1	1	Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Perhubungan dan Transportasi	Jalan Lingkar Timur Utara Terbangun(%)	18.87	18.87	2312	45.91	3313	72.96	3314	94.95	2694.00	100	2694.00	100	0	SETDA Bappelitbangda Dinas PUPR
				Jalan Lingkar Timur Tengah Terbangun(%)	78.45	78.45	725	78.45	725	78.45	725	85.55	1325	92.3	1750	100	2250	
				Jalan Lingkar Timur Selatan Terbangun(%)	35.71	35.71	725	51.78	2250	65.6	1750	82.18	2750	91.55	2150	100	1500	
				Tingkat Pemenuhan Jaringan Jalan (%)	46.04	50	1980	60.5	1350	70	1550	75	2000	80	2350	85	1000	
				Kapasitas Bandara Aroepala	33%	67%	350	67%	350	67%	350	100%	350	100%	350	100%	350	

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target		Rp (jt)	
		(%)	1 buah	2 buah		2 buah		2 buah		3 buah		3 buah		3 buah		Perhubungan	
		Berfungsinya Bandara Kayuadi	2.5	2.5	75	5	75	7	75	8	75	9	75	10	75		
		Studi Penyelesaian Master Plan		RTT Sisi Darat dan Udara	250	Pembebasan Lahan	35000	Studi KKOP dan Amdal	1250	Pembangunan Fisik Sisi Darat dan Udara	2500	Fungsional	0	Fungsional	0		
		Jumlah Pelabuhan Laut (%)	35%	45%	35000	55%	45000	65%	47500	75%	47500	85%	45000	100%	45000		
			7 buah	9 buah		11 buah		13 buah		15 buah		17 buah		20 buah			
		Perluasan terminal angkutan darat (%)	40%	48%	12500	56%	12500	65%	15000	73%	15000	81%	17500	89%	17500		
			50	60		70		80		90		100		110			
		Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)	33%	33%	0	67%	60000	67%	1500	83%	30000	100%	35000	100%	1500		
			2 buah	2 buah		4 buah		4 buah		5 buah		6 buah		6 buah			
		Program Pembangunan dan Peningkatan	Rasio jaringan irigasi	41.35	63.22	5000	65	5000	70	8500	75	5000	80	7500	90	7500	SETDA Bappelitbangda Dinas PUTR

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
	Kapasitas Infrastruktur Air dan Irigasi	Rasio ketersediaan air baku	78	80	35000	82	35000	86	35000	90	30000	95	30000	100	750	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rasio ketersediaan air bersih (%)														Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUTR Dinas Sosial
		- Rumah tangga (%)	60.47	85	7000	89.72	7000	95.05	7500	96.77	7500	98.8	7500	100	3500	
		- Industri (%)	95.05	98.8		100		100		100		100		100		
		Rumah layak huni (%)	80.81	80.81	5500	84	5500	87.19	7500	90.38	7500	93.57	7500	100	7500	
			n.a.	1.250 unit		1.250 unit		1.250 unit		1.250 unit		1.250 unit		7.500 unit		
		Cakupan sanitasi layak (%)	71.38	77.74	3500	85.97	3500	94.5	3500	100	3500	100	3500	100	3500	
		Kawasan permukiman kumuh tertangani (%)	n.a.	n.a.	12500	20	12500	40	12500	60	12500	80	12500	100	12500	
			n.a.	0 Ha		220 Ha		220 Ha		220 Ha		220 Ha		220 Ha		
	Program Pembangunan dan Peningkatan	Rasio elektrifikasi (%)														SETDA Bappelitbangda DPMPSTPTK

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
	Kapasitas Infrastruktur Energi	- Rumah tangga (%)	46.15	47.85	500	49.85	500	52.35	500	55.45	500	59.15	500	65	500	
		- Industri (%)	8.85	15.25	500	23.75	500	30.5	500	37.25	500	43.65	500	50	500	
		PLTMG terbangun dan beroperasi	0	Proses	150	Terbangun	150	Beroperasi	150	Beroperasi	150	Beroperasi	150	Beroperasi	150	
		Terminal gas terbangun dan beroperasi	0	Proses	150	Proses	150	Terbangun	150	Beroperasi	150	Beroperasi	150	Beroperasi	150	
7	0	0	Merevitalisasi kawasan dan obyek wisata (T-10)													
7	1	0	Meningkatnya kunjungan wisatawan (S-17)													
	Program Pembangunan Kepariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik/asing)	Domestik : 5.946	(10%) 6.541	2000	(20%) 7.849	2500	(30%) 10.203	2500	(40%) 14.285	2500	(50%) 21.427	2500	(60%) 34.283	2500	SETDA Bappelitbangda Dinas Kepariwisata dan Disperindagkum DLHK Dinas Perhubungan DPMPSTK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Asing : 253	(50%) 379		(55%) 588		(60%) 940		(70%) 1.598		(80%) 2.877		(85%) 5.322		
8	0	0	Meningkatkan keterintegrasian wilayah daratan dan pulau-pulau (T-11)													
8	1	0	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan (S-18)													

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact/ outcome</i>)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
	Program Peningkatan Layanan Jasa Perhubungan dan Transportasi	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	(22%) 55.135	25% (63.000)	1500	(30%) 76.000	1750	(35%) 89.000	1750	(40%) 103.000	1500	(45%) 115.000	1500	(50%) 127.000	1500	SETDA Bappelitbangda Dinas Perhubungan
9	0	0	Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)													
9	1	0	Meningkatnya investasi (S-19)													
	Program Peningkatan Investasi Daerah	Nilai PMDN (dalam Milyar Rupiah) Nilai PMA (\$)	35,147,336,660 1,417,562	38,662,070,000 1,450,000	42,528,277,500 2,000,000	46,781,105,000 3,000,000	51,459,215,500 5,250,000	56,605,136,000 10,500,000	62,265,649,500 21,000,000	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	1,500 1,500 1,500 1,500	1,500 1,500 1,500 1,500	1,500 1,500 1,500 1,500	SETDA Bappelitbangda Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUTR DPMPTSPK		
Misi Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah																

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)			
10	0	0	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)															
10	1	0	Terbangun dan berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata (S-20)															
			Program Peningkatan Dukungan Terhadap KEK Pariwisata	Realisasi Pembangunan KEK Pariwisata	n.a.	Fasilitas pembent ukan badan usaha penyele nggara KEK	300	Diteta pkan	500	Diteta pkan	750	Diteta pkan	1250	Diteta pkan	1750	Diteta pkan	2250	SETDA Bappelitbangda Dinas PUTR Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Kepariwisata DPMPSTPTK
10	2	0	Terbangun dan berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang (S-21)															
			Program Peningkatan Dukungan Terhadap Industri Perikanan Terpadu	Realissi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	n.a.	40	150	45	300	50	750	55	1250	60	1750	65	2500	SETDA Bappelitbangda Dinas PUTR Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DPMPSTPTK

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)			
10	3	0	Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa) (S-22)															
			Program Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	n.a.	n.a.	150	5	300	10	1250	15	15000	20	17500	25	22500	SETDA Bappelitbangda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUTR Disperindagkum Dinas Perhubungan DPMPPTSPTK
10	4	0	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)															
			Program Revolusi Tani	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (ton)	Padi : 29.617	(10%) 32.579	3500	(10%) 35.837	5000	(10%) 39.421	7500	(10%) 43.363	7500	(10%) 47.699	10000	(10%) 52.469	10000	SETDA Bappelitbangda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Jagung : 9.035	(15%) 10.390	150	(15%) 11.949	150	(15%) 13.741	150	(15%) 15.802	150	(15%) 18.172	150	(15%) 20.898	150		
				Peningkatan produksi pertanian tanaman hortikultura (ton)	Jeruk keprok : 5.850,40	(0,30%) 5.870,27		(0,30%) 5.890,14		(0,30%) 5.910,01		(0,30%) 5.929,88		(0,30%) 5.949,75		(0,30%) 5.969,62		

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
		% Peningkatan Produksi Perkebunan (ton)	Kelapa : 25.190,37	(1,5%) 25.568,22	750	(1,5%) 25.951,74	750	(1,5%) 26.341,01	750	(1,5%) 26.736,12	750	(1,5%) 27.137,16	750	(1,5%) 27.544,21	750	SETDA Bappelitbangda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Pala : 292,88	(0,04%) 305,83	750	(0,09%) 336,35	750	(0,02%) 341,60	750	(0,08%) 375,38	750	(0,08%) 410,40	750	(0,02%) 422,40	750	
			Cengkeh : 125,39	(0,47%) 236,70	750	(0,01%) 283,15	750	(0,02%) 290,15	750	(0,15%) 341,60	750	(0,14%) 395,55	750	(0,03%) 409,05	750	
			Jambu mete : 1.400,00	(1,12%) 1.576,80	750	(0,10%) 1.754,50	750	(0,001%) 1.757,00	750	(0,09%) 1.938,20	750	(0,09%) 2.120,40	750	(0,004%) 2.129,40	750	
		Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan (kw/ha)	Padi : 58,87	66.99		71.25		67.64		70.55	750	73.88		77.33		
			Jagung : 29,78	34.17		39.2		44.98		51.61		59.21		67.85		
		Tingkat produktivitas pertanian tanaman hortikultura (kw/ha)	Jeruk keprok : 100,96	102.01		103.05		103.9		104.5		105.5		106.75		
		Tingkat produktivitas perkebunan (kg/ha)	Kelapa : 1.502	1,502		1,502		1,502		1,502		1,502		1,502		
			Pala : 316	325		350		350		375		400		400		
			Cengkeh : 162	300		350		350		400		450		450		
			Jambu mete : 400	450		500		500		550		600		600		

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target		Rp (jt)
	Program Pembangunan dan Pengembangan Sentra Usaha Peternakan	Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi Pusat Pemurnian Sapi Bali (%)	30	30		50		60		70		80		100		SETDA Bappelitbangda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi Pusat Pembiakan Sapi Unggul (%)	n.a.	0		20		50		70		80		100		
		% Peningkatan Produksi Ternak	Sapi potong : 16.756	(5,16%) 17.621	1250	(10,66%) 18.542	1250	(19,04%) 19.946	1250	(29,46%) 21.693	1250	(41,53%) 23.715	1250	(56,70%) 26.257	1250	
			Sapi perah : 0			0		0		0		0		0		
			Kerbau : 4.588	(1,64%) 4.633	150	(1,65%) 4.740	150	(1,65%) 4.818	150	(1,66%) 4.898	350	(1,66%) 4.980	500	(1,66%) 5.062	500	
	Kuda : 3.766	(2,39%) 3.856		(2,39%) 3.948		(2,39%) 4.043		(2,39%) 4.140		(2,39%) 4.239		(2,39%) 4.340				
		Kambing : 80.831	(0,84%) 81.511	200	(3,71%) 83.827	200	(7,17%) 86.628	200	(11,93%) 90.476	200	(18,02%) 95.400	200	(24,92%) 100.973	200	SETDA Bappelitbangda	

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target		Rp (jt)
			Domba : 36	(25%) 45		(24,44 %) 56		(26,97 %) 71		(25,35 %) 89		(25,84 %) 112		(25,89 %) 141	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Ayam Buras : 272.372	(0,42%) 273.521	200	(0,42 %) 274.675	200	(0,42 %) 275.833	200	(0,42 %) 276.997	200	(0,42%) 278.166	200	(0,42 %) 279.339		
			Ayam Ras Pedaging : 8.732	(5,75%) 9.234		(5,75 %) 9.766		(5,75 %) 10.328		(5,75 %) 10.992		(5,75%) 11.550		(5,75 %) 12.215		
			Ayam Ras Petelur : 11.613	(5,65%) 12.269		(5,65 %) 12.962		(5,65 %) 13.435		(5,65 %) 13.791		(5,65%) 14.295		(5,65 %) 14.816		
			Itik : 5.691	(7,16%) 6.099		(7,16 %) 6.536		(7,16 %) 7.004		(7,16 %) 7.506		(7,16%) 8.044		(7,16 %) 8.620		
		Program Pengembangan Hutan Rakyat	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	375,45 Ha	(5%) 394,22 Ha	500	(10,25 %) 413,93 Ha	500	(15,76 %) 434,62 Ha	500	(21,55 %) 456,35 Ha	750	(27,62 %) 479,16 Ha	750	(34,00 %) 503,1 1 Ha	SETDA Bappelitbangda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DLHK
			Produksi hasil hutan (m3)	437.58	(20,00%) 525,09		(44,00 %) 630,10		(72,80 %) 756,12		(107,3 5%) 907,34		(148,8 2%) 1.088,8 0		(198,5 9%) 1.306, 56	
			Kerusakan hutan dan lahan (Ha)	42,775.76	(-0,92%) 42.381,54	500	(-1,98%) 41.967, 6	500	(-2,91%) 41.532, 99	500	(-3,97%) 42.076, 64	750	(-5,09%) 40.597, 48	750	(-6,27%) 40.094, 37	
		Program Peningkatan Produksi Perikanan	Peningkatan produksi perikanan dan kelautan												SETDA Bappelitbangda	

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target		Rp (jt)
	dan Kelautan	- Perikanan tangkap (ton dan %)	24,155.80	(10,11%) 26.598,77	1250	(20,02%) 28.992,66	1250	(29,63%) 31.312,07	1750	(36,69%) 33.503,92	2000	(45,63%) 35.179,12	2500	(53%) 36.938,08	2500	DKP
		- Perikanan budidaya (ton dan%)	804.93	(3%) 829,08	350	(6,09%) 853,95	350	(9%) 879,57	750	(13%) 905,96	750	(16%) 933,14	750	(19%) 961,13	750	
		- Produksi olahan hasil perikanan (ton dan%)	117	(2,57%) 120	150	(5,13%) 123	150	(7,69%) 126	150	(11,11%) 130	200	(12,82%) 132	250	(15,39%) 135	300	
		- Konsumsi ikan (kg/orang /tahun)	49.45	(2,12%) 50,5		(3,14%) 51		(4,15%) 51,5		(5,16%) 52		(6,17%) 52,5		(7,18%) 53		
11	0	0	Memelihara fungsi lingkungan hidup (T-14)													
11	1	0	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam (S-24)													
			Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup	78.08	78.1	78.3	78.7	78.9	79	79.05	SETDA Bappelitbangda DLHK Dinas PUTR Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman BPBD				
			Misi Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan													
12	0	0	Meningkatkan keberdayaan tenaga kerja (T-15)													
12	1	0	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja (S-25)													

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
	Program Peningkatan Layanan Ketenagakerjaan	Rasio daya serap tenaga kerja	1.84	6.4		10.48		16.3		27.95		40.76		50.41		SETDA Bappelitbangda Dinas Sosial
		Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	79	275	250	450	250	700	500	1,200	500	1,750	500	2,250	650	
13	0	0	Meningkatkan keberdayaan usaha ekonomi kerakyatan (T-16)													
13	1	0	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan (S-26)													
	Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	15,016	16,087	300	17,210	450	18,242	650	19,270	650	20,304	750	21,516	750	SETDA Bappelitbangda Dinas PMD Disperindagkum
			Misi Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal melalui Strategi Kebudayaan													
14	0	0	Memantapkan jati diri keselayaran (T-17)													
14	1	0	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar (S-27)													

Tabel 1.24
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impac</i> t/ <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
	Program Pembangunan Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangka n	1,300	1,357	500	1,400	500	1,500	500	1,600	700	1,700	700	1,700	750	SETDA Bappelitbangda Dinas Kepariwisataa n Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	30	40	50	50	60	50	70	70	80	700	80	90	750	

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN DAERAH

1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

Prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan berdasarkan persoalan yang terjadi di lapangan serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi dan kondisi eksisting di lapangan akan dikerucutkan menjadi isu strategis Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian isu strategis ini akan menjadi dasar dari prioritas pembangunan tahun 2020. Berikut ini merupakan hasil evaluasi yang dituangkan menjadi isu strategis.

Tabel 1.25

Konsistensi Evaluasi dan Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar

EVALUASI	ISU STRATEGIS
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang masih rendah	Belum optimalnya kinerja pelayanan Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2016 menjadi 13,11 dari sebelumnya yang hanya 12,94 pada tahun 2015	Masih perlunya penanggulangan kemiskinan
Potensi UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih rendah dalam mengelola hasil produksi pertanian dan perikanan serta pariwisata yang menjadi sektor unggulan	Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan
Realisasi program strategis “menjadikan Selayar sebagai KEK Pariwisata, Menjadi Selayar sebagai Pusat Perikanan Terpadu, serta menjadikan Selayar sebagai Pusat distribusi logistic barang dan jasa” yang masih belum ditetapkan	Masih perlunya peningkatan investasi untuk merealisasikan tiga agenda strategis ini
Rasio ketersediaan air baku yang masih mencapai 55 % dari target daerah yang ditetapkan sebesar 82 % pada tahun 2017	Belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat terutama di wilayah dataran tinggi dan wilayah kepulauan
Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga yang belum mencapai target sebanyak 883 Sambungan rumah	

dengan realisasi hanya mencapai 553 Sambungan Rumah	
Tingkat Kelancaran Barang dan Penumpang dari dan ke wilayah kepulauan yang masih berada pada angka 22 % dan belum mencapai target pada tahun 2017 yaitu sebesar 30 %	Masih perlunya peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat khususnya ke wilayah kepulauan
Pada Tahun 2017, Jumlah sarana transportasi darat yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada angka 173 unit dan belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 200 unit.	
Pada Tahun 2017, Jumlah sarana transportasi udara yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada angka 475 flight dan belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 576 flight.	
Pada Tahun 2017, jumlah pelabuhan laut terealisasi sebanyak 7 buah dan tidak mencapai target RPJMD sebanyak 11 buah	
Pada Tahun 2017, Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki sebesar 308 unit dan sangat jauh mencapai target RPJMD yaitu sebesar 1250 unit.	Masih terbatasnya pelayanan infrastruktur dasar terutama sektor perumahan dan kawasan permukiman
Pada Tahun 2017, cakupan sanitasi layak hanya sebesar 25 persen. Angka ini sangat jauh dari target RPJMD yaitu sebesar 85,97 persen	
Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2016 sebesar 10 masih jauh dari target dikdas yaitu 12 tahun	Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
Pada Tahun 2017, angka melek huruf sebesar 88,54 dan belum mencapai target daerah yaitu sebesar 96 persen	
Angka usia harapan hidup pada tahun 2017 berada pada angka 69,81, namun masih dibawah AHH Provinsi Sulsel yaitu 72,5	
Pada tahun 2017, persentase pembangunan jalan lingkak timur utara	Masih belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan yang dapat dinikmati oleh

sebesar 3,93 persen dan sangat jauh dari target RPJMD yaitu sebesar 18,87 persen	masyarakat di bagian timur Selayar serta belum optimalnya pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan
Pada tahun 2017, persentase pembangunan jalan lingkaran timur selatan sebesar 16,91 persen dan sangat jauh dari target RPJMD yaitu sebesar 51,78 persen	
Infrastruktur Jalan khususnya di wilayah Kepulauan masih belum memadai	
Pada tahun 2017, pembangunan bandara kayuadi tidak terealisasi	
Pada Tahun 2017, Indeks Ketimpangan Gender sebesar 1,1 dan sangat jauh dari target daerah sebesar 20	Masih rendahnya kesetaraan gender terutama keterwakilan perempuan dalam pembangunan
Masih banyaknya Desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar terutama di wilayah kepulauan	Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa

Selanjutnya, dari perumusan isu strategis kemudian ditetapkan menjadi prioritas pembangunan seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 1.26
Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

NO	ISU STRATEGIS	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Peningkatan akses pelayanan dan mutu di sektor pendidikan dan kesehatan	1	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
2	Kurangnya pemahaman masyarakat terutama generasi muda terhadap kebudayaan daerah	2	Pengurangan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah
3	Penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran		
4	Percepatan laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan beberapa sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi pertanian dan perkebunan, perikanan serta pariwisata		
5	Peningkatan konektivitas wilayah khususnya wilayah kepulauan	3	Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah yang

6	Pemerataan infrastruktur baik itu jalan, sumber daya air dan irigasi serta perumahan dan permukiman		berkelanjutan
7	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam		
8	Optimalisasi sistem penataan ruang dan lingkungan hidup dalam pembangunan		
9	Belum optimalnya realisasi tiga agenda strategis Kabupaten Kepulauan Selayar	4	Pembangunan dan pengembangan terhadap pelaksanaan program strategis Kabupaten Kepulauan Selayar
10	Peningkatan investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan realisasi agenda strategis Kabupaten Kepulauan Selayar		
11	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi	5	Pemantapan pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan
12	Pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan teknologi informasi (e-government)		
13	Penguatan kapasitas SDM serta peningkatan kinerja pemerintahan desa		

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah serta arah kebijakan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021, seperti yang terdapat pada table di bawah ini :

Tabel 1.27
Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 20 dengan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

NO	SASARAN DAERAH	NO	PRIORITAS PEMB. DAERAH	NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
3	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama				
4	Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan				
5	Meningkatnya kemandirian pemuda				

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

NO	SASARAN DAERAH	NO	PRIORITAS PEMB. DAERAH	NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
6	Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat				
7	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar				
8	Berkurangnya penduduk miskin	2	Pengurangan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah	2	Peningkatan peran sektor pariwisata
9	Meningkatnya daya beli masyarakat			3	Peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan
10	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan			4	Peningkatan peran sektor pertanian dan kehutanan
11	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan			5	Perluasan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja
12	Meningkatnya kunjungan wisatawan			6	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
13	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja			7	Penetapan Pulau Tanamalala sebagai pusat pemurnian sapi bali
				8	Penetapan Pulau Kalao sebagai pusat pembiakan sapi unggul
14	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar	3		Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	9
15	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar		10		Peningkatan Jaringan jalan dan Jembatan
16	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan		11		Pemantapan layanan sistem transportasi daerah yang terintegrasi dengan sistem transportasi regional dan nasional
17	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam				
18	Meningkatnya investasi	4	Pembangunan dan pengembangan terhadap pelaksanaan program strategis Kabupaten Kepulauan Selayar		12
19	Terbangun dan berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata			13	Pembangunan Infrastruktur meliputi: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata; kawasan

NO	SASARAN DAERAH	NO	PRIORITAS PEMB. DAERAH	NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
20	Terbangun dan berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang				pelabuhan Logistik; dan Kawasan Industri Perikanan Terpadu
21	Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistic				
22	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	5	Pemantapan pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan	14	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
23	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien				
24	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
25	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			15	Penguatan kelembagaan pemerintah desa
26	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah				
27	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa				

Prioritas pembangunan tersebut selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Kepulauan Selayar, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan nasional serta Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.28

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulsel dan Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULSEL	PRIORITAS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan angka kemiskinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
			Pengurangan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah
2	Penguatan konektivitas dan Pemerataan	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah	Pembangunan dan Peningkatan Layanan Infrastruktur yang berkelanjutan
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja	Akselerasi hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, peningkatan Pusat Pertumbuhan baru dan Pengembangan destinasi wisata	Pembangunan dan pengembangan terhadap pelaksanaan program strategis Kabupaten Kepulauan Selayar
			Pengurangan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah
4	Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Peningkatan ketahanan pangan, sumber daya air, dan pelestarian lingkungan hidup	Pengurangan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan ketertiban dan keamanan, Reformasi birokrasi dan Inovasi pelayanan publik	Pemantapan Pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan

Selain mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 pada RPJMN 2015-2019 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 juga dirancang untuk mendukung pencapaian **Tujuan**

Pembangunan Milenium atau dikenal juga dengan *Millennium Development Goals (MDGs)* dan Tahun 2016 dinamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs ini merupakan paradigma pembangunan global yang dideklarasikan pada konferensi tingkat tinggi dunia yang disepakati negara-negara peserta. Semua negara yang hadir sebagai peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya untuk menangani isu-isu mendasar terkait pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

SDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan mengartikulasi satu gugus tujuan yang berkaitan satu sama lain ke dalam agenda pembangunan dan kemitraan global. Sebagai upaya dalam pencapaian target-target SDGs, maka pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, telah mengintegrasikan prioritas SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Adapun tujuan dan target SDGs adalah sebagai berikut.

1. *End poverty in all its forms everywhere*; Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun.
 - a. Pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrim untuk semua orang di seluruh dunia.
 - b. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensinya.
 - c. Menerapkan sistem nasional yang tepat terhadap perlindungan sosial serta langkah-langkah tindak lanjutnya.
2. *End hunger, achieve food security and improve nutrition, and promote sustainable agriculture*; Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan.
 - a. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses oleh semua orang, khususnya orang miskin dan orang-orang dalam

- situasi rentan termasuk bayi dengan aman, bergizi dan mencukupi makanan sepanjang tahun.
- b. Pada tahun 2030, akhir segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai pada tahun 2025 target yang disepakati secara internasional pada stunting dan wasting pada anak di bawah usia lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, dan orang-orang yang lebih tua.
 - c. Pada tahun 2030, produktivitas pertanian dua kali lipat dan pendapatan produsen skala kecil makanan, terutama perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama dengan tanah, sumber daya produktif lainnya dan masukan, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian.
3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*; Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia.
- a. Pada tahun 2030, mengurangi rasio kematian ibu secara global kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
 - b. Pada tahun 2030, kematian dapat dicegah dari bayi yang baru lahir dan Balita
 - c. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya.
4. *Ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning opportunities for all*; Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
- a. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan secara bebas, adil dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang mengarah ke hasil pembelajaran yang relevan dan efektif.

- b. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses pengembangan kualitas anak usia dini, perawatan dan pendidikan pra dasar sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar.
 - c. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria untuk pendidikan teknis, kejuruan dan kualitas tersier terjangkau, termasuk universitas.
5. *Achieve gender equality and empower all women and girls*; Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
- a. Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan.
 - b. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan dan seksual dan jenis-jenis eksploitasi.
 - c. Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini, paksa dan mutilasi alat kelamin perempuan.
6. *Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all*; Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua.
- a. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua.
 - b. Pada tahun 2030, mencapai akses ke sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata untuk semua, dan mengakhiri buang air besar terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan dan orang-orang dalam situasi rentan.
 - c. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan berbahaya bahan kimia, mengurangi separuh proporsi air limbah tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang aman dan digunakan kembali oleh x % secara global.

7. *Ensure acces to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all;* Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
 - a. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern.
 - b. Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi.
 - c. Pada tahun 2030, dua kali lipat tingkat global perbaikan dalam efisiensi energi pada tahun 2030.
8. *Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all;* Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua.
 - a. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional, dan khususnya sekitar 7% per tahun pertumbuhan PDB di negara-negara tidak berkembang.
 - b. Mencapai tingkat yang lebih tinggi dari produktivitas ekonomi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus pada nilai tambah tinggi dan sektor padat karya.
 - c. Mempromosikan kebijakan pembangunan yang berorientasi yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk melalui akses ke layanan keuangan.
9. *Built resilience infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation;* membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi.
 - a. Mengembangkan kualitas infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan

- trans-perbatasan, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses terjangkau dan merata bagi semua.
- b. Mempromosikan inklusif dan industrialisasi berkelanjutan, dan pada tahun 2030 kenaikan signifikan pangsa industri pekerjaan, dan PDB sesuai dengan keadaan nasional, dan dua kali lipat sahamnya di LDCs.
 - c. Meningkatkan akses skala kecil perusahaan industri dan lainnya, terutama di negara-negara berkembang, jasa keuangan termasuk kredit terjangkau dan integrasi mereka ke dalam rantai nilai dan pasar.
10. *Reduce inequality within and among countries*; Pada tahun 2030 semakin mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari sekitar 40% terhadap populasi pada tingkat lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- a. Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan sosial, micro ekonomi dan inklusi politik terlepas dari usia, jenis kelamin, cacat, ras, etnis, asal, agama atau status ekonomi atau lainnya.
 - b. Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan, termasuk menghilangkan hukum yang diskriminatif, kebijakan dan praktik, serta mempromosikan undang-undang, kebijakan, dan tindakan yang tepat.
11. *Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable*; Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- a. Pada tahun 2030, memastikan adanya akses yang memadai bagi semua, perumahan yang terjangkau, layanan dasar, dan peningkatan kawasan kumuh.
 - b. Pada tahun 2030, memberikan akses yang aman, terjangkau, dapat diakses untuk sistem transportasi yang berkelanjutan, meningkatkan keamanan berkendara, terutama dengan

- memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan pada kondisi ini, wanita, anak-anak, penyandang cacat dan orang tua.
- c. Pada tahun 2030, meningkatkan yang inklusif dan urbanisasi berkesinambungan dan kapasitas untuk partisipatif, terpadu dan perencanaan pemukiman manusia yang berkelanjutan dan manajemen di semua negara.
12. *Ensure sustainable consumption and production patterns*; Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- a. Melaksanakan Kerangka 10 tahun program konsumsi berkelanjutan dan produksi (10YFP), semua negara mengambil tindakan, dengan negara-negara maju memimpin, dengan mempertimbangkan pengembangan dan kemampuan negara-negara berkembang.
 - b. Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam.
 - c. Pada tahun 2030, membagi dua kapita limbah pangan global, ritel dan konsumen, serta mengurangi kerugian makanan bersama rantai produksi dan pasokan termasuk kerugian pasca panen.
13. *Take urgent action to combat climate change and its impacts*; Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- a. Memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya iklim terkait dan bencana alam di semua negara.
 - b. Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan nasional, strategi, dan perencanaan.
 - c. Meningkatkan pendidikan, peningkatan kesadaran manusia, dan kapasitas kelembagaan pada mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini.
14. *Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development*; Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan.

- a. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi pencemaran laut dari semua jenis, terutama dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.
 - b. Pada tahun 2020, pengelolaan berkelanjutan dalam melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak secara signifikan, termasuk memperkuat ketahanan mereka, dan mengambil tindakan untuk memulihkan kondisinya, agar tetap sehat dan produktif.
 - c. Meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, dengan meningkatkan kerjasama ilmiah di semua tingkatan.
15. *Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss*; Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
- a. Pada tahun 2020, memastikan konservasi, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem air tawar dan darat sampai ke pedalaman, hutan-hutan tertentu, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
 - b. Pada tahun 2020, mempromosikan penerapan manajemen berkelanjutan terhadap semua jenis hutan, menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang rusak, dan meningkatkan penghijauan dan reboisasi oleh x % secara global.
 - c. Pada tahun 2020, mengembalikan lahan rusak dan tanah, termasuk tanah yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir.
16. *Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels*; Mendorong kehidupan masyarakat yang damai

dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

- a. Mengurangi secara signifikan, segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian.
 - b. Mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak.
 - c. Melakukan sosialisasi aturan hukum di tingkat nasional dan internasional, serta menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
17. *Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.* Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
- a. Memperkuat mobilisasi sumber daya dalam negeri, termasuk dukungan internasional bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas dalam negeri terhadap pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya.
 - b. Negara maju melaksanakan sepenuhnya komitmen ODA, termasuk menyediakan sekitar 0,7% dari GNI di ODA ke negara-negara berkembang.
 - c. Memobilisasi sumber daya keuangan tambahan untuk negara-negara berkembang dari berbagai sumber (International social science council, 2015)

Berdasarkan tujuan dan target SDGs tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk mensinergikan dan mengintegrasikannya dalam prioritas pembangunan daerah. Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung pencapaian SDGs dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.29
 Sinergitas dan Sinkronisasi Tujuan SDGs dan Prioritas Pembangunan
 Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Tujuan SDGs	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
1	Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun	Pengurangan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah
2	Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan	Pengurangan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah
3	Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
4	Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
6	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua	Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan
7	Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua	Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan
8	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua	Pengurangan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi	Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan
10	Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara-negara	Pengurangan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah Pemantapan pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan
11	Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman,	Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah

No	Tujuan SDGs	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
	tangguh dan berkelanjutan	yang berkelanjutan
12	Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	
13	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan
14	Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan	Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan
15	Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati	Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan
16	Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	Pemantapan pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan
17	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Pengurangan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah Pemantapan pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan

Dalam mewujudkan ke-11 prioritas tersebut, ditetapkan program-program yang akan menjadi alat pelaksanaan prioritas tersebut. Program-program ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Arah kebijakan dan program prioritas pembangunan tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.30
Penjabaran Program Pembangunan Daerah dari Prioritas Pembangunan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan Kab. Kep. Selayar Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2020
1	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Keaksaraan	Angka Melek Huruf	98,5
		Program Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	12.54
		Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	67.58
		Program Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan	Pelaksanaan ibadah	Baik
			Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	0
		Program Pembangunan Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	(KB) 99,98 (KS) 96,59
		Program Pengarusutamaan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	27.5
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.75
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60.75
		Program Peningkatan Kemandirian Pemuda	Pemuda Mandiri	100
		Program Pembinaan Keolahragaan	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	15
		Program Pembangunan Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	1,700

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No	Prioritas Pembangunan Kab. Kep. Selayar Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2020
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	80
2	Pengurangan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	% Angka Kemiskinan	4.790
			Jumlah Penduduk Miskin (KK)	6,165.000
		Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyediaan Lapangan Kerja	Income per Kapita Penduduk (juta)	28.500
		Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	20.304
		Program Revolusi Tani	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan padi (ton)	(10%) 47.699
			Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan jagung (ton)	(15%) 18.172
			Peningkatan produksi pertanian tanaman holtikultura jeruk keprok (ton)	(0,30%) 5.949,75
			% Peningkatan Produksi Perkebunan kelapa (ton)	(1,5%) 27.137,16
			% Peningkatan Produksi Perkebunan pala (ton)	(0,08%) 410,40
			% Peningkatan Produksi Perkebunan cengkeh (ton)	(0,14%) 395,55
			% Peningkatan Produksi Perkebunan jambu mete (ton)	(0,09%) 2.120,40
Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan padi (kw/ha)	73.88			

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No	Prioritas Pembangunan Kab. Kep. Selayar Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2020
			Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan jagung (kw/ha)	59.21
			Tingkat produktivitas pertanian tanaman hortikultura jeruk keprok (kw/ha)	105.5
			Tingkat produktivitas perkebunan kelapa (kg/ha)	1,502
			Tingkat produktivitas perkebunan pala (kg/ha)	400
			Tingkat produktivitas perkebunan cengkeh (kg/ha)	450
			Tingkat produktivitas perkebunan jambu mete (kg/ha)	600
		Program Pembangunan dan Pengembangan Sentra Usaha Peternakan	Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi Pusat Pemurnian Sapi Bali (%)	80
			Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi Pusat Pembiakan Sapi Unggul (%)	80
			% Peningkatan Produksi Ternak Sapi Potong	(41,53%) 23.715
			% Peningkatan Produksi Ternak Kerbau	(1,66%) 4.980
			% Peningkatan Produksi Ternak Kuda	(2,39%) 4.239
			% Peningkatan Produksi Ternak Kambing	(18,024%) 95.400
			% Peningkatan Produksi Ternak Domba	(25,84%) 112
			% Peningkatan Produksi Ternak Ayam Buras	(0,42%) 278.166
			% Peningkatan Produksi Ternak Ayam Ras Pedaging	(5,75%) 11.550

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No	Prioritas Pembangunan Kab. Kep. Selayar Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2020
			% Pening Ayam Ras Petelurkatan Produksi Ternak	(5,65%) 14.295
			% Peningkatan Produksi Ternak Itik	(7,16%) 8.044
		Program Pengembangan Hutan Rakyat	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	(27,62%) 479,16 Ha
			Produksi hasil hutan (m3)	(148,82%) 1.088,80
			Kerusakan hutan dan lahan (Ha)	(-5,09%) 40.597,48
		Program Peningkatan Produksi Perikanan dan Kelautan	Perikanan tangkap (ton dan %)	(45,63%) 35.179,12
			Perikanan budidaya (ton dan%)	(16%) 933,14
			Produksi olahan hasil perikanan (ton dan%)	(12,82%) 132
			Konsumsi ikan (kg/orang /tahun)	(6,17%) 52,5
		Program Pembangunan Kepariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik)	(50%) 21.427
			Jumlah kunjungan wisatawan (asing)	(80%) 2.877
		Program Peningkatan Layanan Ketenagakerjaan	Rasio daya serap tenaga kerja	40.76
			Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	1,750
		Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	19,270
		3	Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Program Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Air dan Irigasi
Rasio ketersediaan air baku	95			
Program Peningkatan Kapasitas	% Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat			46% (320 buah)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No	Prioritas Pembangunan Kab. Kep. Selayar Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2020
		Pelayanan Jasa Perhubungan dan Transportasi	% Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut	15% (80 buah)
			% Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara	65% (816 buah)
		Program Peningkatan Layanan Jasa Perhubungan dan Transportasi	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	(45%) 115.000
		Program Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	98.8
			Rasio ketersediaan air bersih industri (%)	100
			Rumah layak huni (%)	93.57% (1.250 unit)
			Cakupan sanitasi layak (%)	100
			Kawasan permukiman kumuh tertangani (%)	80% (220 Ha)
		Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Perhubungan dan Transportasi	Jalan Lingkar Timur Utara Terbangun(%)	100
			Jalan Lingkar Timur Tengah Terbangun(%)	92.3
			Jalan Lingkar Timur Selatan Terbangun(%)	91.55
			Tingkat Pemenuhan Jaringan Jalan (%)	80
			Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	100%
			Berfungsinya Bandara Kayuadi	Fungsional
			Jumlah Pelabuhan Laut (%)	85% (17 buah)
			Perluasan terminal	81%(100)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No	Prioritas Pembangunan Kab. Kep. Selayar Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2020
			angkutan darat (%)	
			Jumlah pelabukan penyeberangan (%)	100% (6 buah)
		Program Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Energi	Rasio elektrifikasi Rumah tangga (%)	59.15
			Rasio elektrifikasi Industri (%)	43.65
			PLTMG terbangun dan beroperasi	Beroperasi
			Terminal gas terbangun dan beroperasi	Beroperasi
		Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup	79
4	Pembangunan dan pengembangan terhadap pelaksanaan program strategis Kabupaten Kepulauan Selayar	Program Peningkatan Investasi Daerah	Nilai PMDN (dalam Milyar Rupiah)	56,605,136,000
			Nilai PMA (\$)	10,500,000
		Program Peningkatan Dukungan Terhadap KEK Pariwisata	Realisasi Pembangunan KEK Pariwisata	Ditetapkan
		Program Peningkatan Dukungan Terhadap Industri Perikanan Terpadu	Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	60
		Program Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	20
5	Pemantapan pelayanan publik dan peningkatan tata kelola	Program Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	BB

No	Prioritas Pembangunan Kab. Kep. Selayar Tahun 2020	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2020
	pemerintahan		Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Sangat Tinggi
		Program Peningkatan Kualitas Manajemen Keuangan dan Aset Daerah	Opini Atas LK Daerah	WTP
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	95%
		Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	% Desa Mandiri	3 desa (16,05)
			% Desa Berkembang	10 desa (58,01)
			% Desa Tertinggal	0
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten (%)	96
		Program Pembangunan Ketransmigrasian	Transmigran Lokal (KK)	20

2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

Rencana program merupakan rencana teknis dari prioritas pembangunan yang dijabarkan kedalam beberapa sasaran. Program ini kemudian dideskripsikan lagi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menjadi alat utama dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Rencana program beserta kegiatan-kegiatannya ini berasal dari mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang melibatkan pendekatan *top down* berupa usulan dari OPD terkait, *bottom up* berupa partisipasi masyarakat, serta pendekatan teknokratik. Pendekatan *bottom up* berasal dari aspirasi masing-masing wilayah dengan melihat kebutuhan dan persoalan

yang dihadapi. Pendekatan *top down* berasal dari SKPD dengan melihat pada persoalan sektoral yang ditanganinya. Sementara pendekatan teknokratik berasal dari pemikiran dan perumusan prioritas pembangunan. Perencanaan program dan kegiatan prioritas ini juga meliputi target pencapaian beserta indikatornya dan penganggaran yang akan dibebankan pada APBD kabupaten serta waktu dan lokasi pelaksanaannya.

Rencana Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.31
Rencana Program dan Kegiatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	RENCANA TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62,691,560,459	68,960,716,505
2	Dinas Kesehatan	55,470,443,540	61,017,487,894
2.a	Rumah Sakit Umum	56,522,945,389	61,075,239,928
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97,060,000,000	106,766,000,000
4	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman	17,941,701,181	19,588,371,299
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,416,638,162	2,655,801,978
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	9,190,196,433	10,098,216,076
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,742,401,734	5,216,641,907
8	Dinas Sosial	6,885,653,302	7,574,218,632
9	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	6,550,168,925	7,205,185,818
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	2,812,075,975	3,090,283,573

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	RENCANA TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021
1	2	3	4
11	Bagian Pertanahan Setda	6,195,601,416	6,815,161,558
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10,700,202,152	11,770,222,367
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,581,511,530	1,739,662,683
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,319,646,871	3,651,611,558
15	Dinas Perhubungan	5,074,538,830	5,581,992,713
16	Bagian Kominfo, Statistik dan Persandian Setda	936,446,802	1,030,091,482
17	Bagian Humas Protokoler Setda	2,664,455,000	2,930,900,500
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	7,418,723,166	8,160,595,483
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2,202,082,217	2,422,290,439
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1,872,252,663	1,817,477,929
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23,477,671,931	25,825,439,124
22	Dinas Kepariwisata	2,464,706,640	2,711,177,304
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	8,758,855,565	9,634,741,122
24	Sekretariat Daerah	12,517,000,000	13,768,700,000
25	Bagian Tata Pemerintahan Setda	439,483,116	483,431,428
26	Bagian Hukum Setda	1,024,633,731	1,127,097,104
27	Bagian Ekonomi Setda	1,115,228,089	1,226,750,898
28	Bagian Pembangunan	586,908,620	645,599,482
29	Bagian Kesra Setda	1,988,400,000	2,187,240,000
30	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda	595,918,332	655,510,165
31	Bagian Keuangan Setda	197,181,429	216,899,572
32	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda	376,875,820	414,563,402

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	RENCANA TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021
1	2	3	4
33	Bagian Umum dan Perlengkapan Setda	4,055,795,496	4,461,375,046
34	Kecamatan Benteng	700,533,521	770,586,873
35	Kelurahan Benteng	1,817,924,956	1,999,717,452
36	Kelurahan Benteng Selatan	1,752,143,043	1,927,357,347
37	Kelurahan Benteng Utara	1,653,332,052	1,818,665,257
38	Kecamatan Bontoharu	472,149,295	519,364,225
39	Kelurahan Bontobangun	1,662,394,841	1,828,634,325
40	Kelurahan Putabangun	1,609,163,805	1,770,080,186
41	Kecamatan Bontosikuyu	892,886,000	982,174,600
42	Kecamatan Bontomatene	553,566,418	608,923,060
43	Kelurahan Batangmata	1,703,006,089	1,873,306,698
44	Kelurahan Batangmata Sapo	1,750,070,911	1,925,078,002
45	Kecamatan Bontomanai	820,135,726	902,149,299
46	Kecamatan Buki	475,095,642	522,605,206
47	Kecamatan Pasimarannu	743,151,467	817,466,614
48	Kecamatan Pasimasunggu	630,101,877	693,112,065
49	Kecamatan Pasimasunggu Timur	908,994,526	999,893,979
50	Kecamatan Pasilambena	693,789,187	763,168,106
51	Kecamatan Takabonerate	790,570,941	869,628,035
52	Sekretariat DPRD	17,921,512,900	19,713,664,190
53	BAPPELITBANGDA	5,200,014,988	5,713,297,479
54	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	11,993,352,914	13,192,688,205

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	RENCANA TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021
1	2	3	4
55	Inspektorat	5,348,800,000	5,883,680,000
56	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	5,014,355,055	5,482,790,561
	T O T A L	486,954,950,670	534,104,726,729.50

Adapun Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 disertai Pagu Anggaran terlampir pada **LAMPIRAN A** dalam Laporan LPPD ini.

3. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2020

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolak ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2021.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan pada Tabel berikut :

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

Tabel 1.32

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek/focus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	
1	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.1	Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi					
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1.1.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	65,39	66,04			
1.1.1.2	Pertumbuhan Ekonomi	7,61	8,77	8.05	8,25	8.40
1.1.1.3	PDRB per kapita (juta)	39,67	43,57	32.5	35	22.5
1.1.1.4	Laju Inflasi	4,66	3,85			
1.1.1.5	Indeks Daya Beli					
1.1.1.6	Angka Kemiskinan	13,28	13,11	8.40	8.15	7.85
1.1.1.7	Angka kriminalitas	0	0	0.02	0.015	0
1.1.1.8	Angka Pengangguran	2,34	1,88	4.50	4.25	3.85
1.2	Kesejahteraan Sosial					
1.2.1	Pendidikan					
1.2.1.1	Angka melek huruf	88,543	87,88	98	98,5	100
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	12,40	12,32	12,47	12,54	12,62
1.2.1.3.1	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34%	59%	61	63	64
1.2.1.3.2	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	102	110,76	100	100	100
1.2.1.3.3	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	109	111,02	97,90	98,65	98,70
1.2.1.4	<i>Angka pendidikan yang ditamatkan</i>					
1.2.1.4.1	SD/MI	100%	98%	100	100	100
1.2.1.4.2	SMP/MTs	96,74%	97%	100	100	100
1.2.1.5	<i>Angka Partisipasi Murni</i>					
1.2.1.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89	93,75	98,56	99,02	99,05
1.2.1.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	86	87,86	87,38	89,64	89,70
1.2.2	Kesehatan					
1.2.2.1	Angka kelangsungan hidup bayi			1-25,00	1-25,00	1-25,00
1.2.2.2	Angka usia harapan hidup (tahun)	67,82	68,03	67,57	67,58	67,59
1.2.2.3	Persentase balita gizi buruk	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04
1.2.3	Pertanahan					
1.2.3.1	Persentase penduduk yang memiliki lahan					
1.2.4	Ketenagakerjaan					
1.2.4.1	Rasio daya serap tenaga kerja			27,95	40,76	50,41
1.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga					
1.3.1.1	Jumlah grup kesenian			6	6	6
1.3.1.2	Jumlah Gedung kesenian			0	0	0

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

Tabel 1.32

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek/focus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	
1.3.2.	<i>Pemuda dan Olahraga</i>					
1.3.2.1	a. Jumlah klub olahraga			207	207	207
1.3.2.2	b. Jumlah gedung olahraga			3	3	3
2.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
2.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib					
2.1.1	Pendidikan					
2.1.1.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34%	59%	61	63	64
2.1.1.2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	96%	97%	97%	97%	97%
2.1.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,75%	89%	98,56	99,02	99,05
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	87,86%	86%	87,38	89,64	89,70
2.1.1.5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,28%	0,08%	0,19	0,18	0,17
2.1.1.6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,03%	0,80%	0,18	0,17	0,16
2.1.1.7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	98%	100	100	100
2.1.1.8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96,74%	97%	100	100	100
2.1.1.8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	88,37%	91%	98,00	98,50	99,00
2.1.1.9	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	75,88%	79%	89,52	91,50	93,30
2.1.2.	Kesehatan					
2.1.2.1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	74.5%	72,57%	100	100	100
2.1.2.2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,15%	98,64%	95%	95%	100%
2.1.2.3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	92%	88,6%	90%	95%	100%
2.1.2.4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.2.5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	81%	63,21%	80%	90%	100%
2.1.2.6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0%	100%	100	100	100
2.1.2.7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	2,22%	100%	100%	100%
2.1.2.8	Cakupan kunjungan bayi	92,41%	93,35%	100%	100%	100%
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
2.1.3.1	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	36,38%	26,49%	54%	82,75	82,75
2.1.3.2	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	84,94%	84,94%	79,04	80	80

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

Tabel 1.32

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek/focus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	
2.1.3.3	Rumah Tangga ber Sanitasi	69,17%	69,17%	100,00	100,00	100,00
2.1.3.4	Kawasan Kumuh	1,78%	1,78%	1,25	1,25	1,25
2.1.3.5	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	1,37%	1,37%	12,97	12,97	12,97
2.1.4.	Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman					
2.1.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	16,36%	73,41%	96,77	98,80	100
2.1.4.2	Lingkungan permukiman kumuh	115,39	181,15	220 Ha	220 Ha	220 Ha
2.1.4.3	Rumah layak huni	81,59%	80,65%	87.19	90,38	93,57
2.1.5	Perhubungan					
2.1.5.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	103.000	103.000	103.000	115.000	127.000
2.1.5.2.	Rasio izin trayek	0,1091	0,1091	0,1091	0,1123	0,1155
2.1.5.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	180	180	180	185	190
2.1.5.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	15/2/1	15/2/1	15/2/1	17/2/1	20/2/1
2.1.5.5.	Kepemilikan KIR angkutan umum	280	280	280	320	360
2.1.5.6.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam
2.1.5.7.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2.1.6	Lingkungan Hidup					
2.1.6.1.	Penanganan sampah	97,62%	93,13%	98,00	99,00	99,00
2.1.6.2.	Kebersihan	37,5%	3,33%	25	22	20
2.1.6.3.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	13,52%	26,20%	0,8	0,9	0,9
2.1.6.4.	Penegakan hukum lingkungan	100%	0%	100	100	100
2.1.7	Pertanahan					
2.1.7.1.	Luas lahan bersertifikat	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%
2.1.7.2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	0%	0%	0	0	0
2.1.7.3.	Penyelesaian Ijin Lokasi	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.8	Kependudukan dan Catatan Sipil					
2.1.8.1.	Kepemilikan KTP	92%	95%	95	97	99
2.1.8.2.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	438%	359%	91	93	95
2.1.8.3.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2.1.9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1.9.1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8,64%	7,71%	13,35	13,48	13,61
2.1.9.2.	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	57,07%	87,88%	80	82	85

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

Tabel 1.32

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek/focus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	
2.1.9.3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	92%	39,48%	43,12	43,03	24,94
2.1.10	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2.1.10.1.	Prevalensi peserta KB aktif	77%	75,9%	75,04	74,68	74,32
2.1.10.2.	Rasio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/Kelurahan	100%	4,40%			
2.1.11	Sosial					
2.1.11.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	1 (Rmh Singgah)	0	0	0	0
2.1.11.2.	Persentase Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	19,58%	19,36%			
2.1.11.3.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	31,60%	26,92%	84,48	84,48	84,48
2.1.12	Ketenagakerjaan					
2.1.12.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	60,20	66,16	62	64	65
2.1.12.2.	Pencari kerja yang ditempatkan	33,94%	25%	1200	1750	2250
2.1.12.3.	Tingkat pengangguran terbuka	2,34	1,88			
2.1.12.4.	Pelayanan Kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja/buruh	33%	3,23%			
2.1.13	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
2.1.13.1	Persentase koperasi aktif	83,33%	81,37%	94,66	94,90	94,36
2.1.13.2.	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil	90,53%	90,53%	19.270	20.304	21.516
2.1.14	Penanaman Modal					
2.1.14.1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDM) (Rp)	78.332.850.485	78.332.850.485	46.781.105.000	51.459.215.500	56.605.136.000
2.1.14.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) (US\$)	2.455.000	2.455.000	5.250.000	10.500.000	21.000.000
2.1.14.3.	Rasio daya serap tenaga kerja			27,95	40,76	50,41
2.1.14.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%
2.1.15	Kebudayaan					
2.1.15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2 Kali	5 Kali	6	6	6
2.1.15.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	11 Buah	4 Buah	2	2	2
2.1.15.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar	2,269	2.269	1.600	1.700	1.700

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

Tabel 1.32

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek/focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	
	Budaya yang dilestarikan					
2.1.16	Kepemudaan dan Olahraga					
2.1.16.1.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	2	2	35	35	35
2.1.16.2.	Jumlah Lapangan olahraga .	61	61	26	26	26
2.1.16.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	2	2	2
2.1.16.4.	Jumlah kegiatan olahraga	6	6	6	6	6
2.1.16.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	6	6	6
2.1.17	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
2.1.17.1.	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat			19	19	18
2.1.17.2.	Jumlah konflik-konflik etnis, agama, ras dan adat			0	0	0
2.1.17.3.	Tingkat kesadaran berpolitik masyarakat			78	79	80
2.1.17.4.	Jumlah pengaduan mengenai kecurangan dalam pemilihan			3	5	5
2.1.17.5.	Kegiatan Pembinaan, pemantauan dan fasilitasi Ormas dan LSM			4	4	4
2.1.17.6.	Pembinaan, pemantauan dan fasilitasi Orsospol			7	7	7
2.1.18	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
2.1.18.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk			30,47	34,00	37,53
2.1.18.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk			46,83	46,83	46,83
2.1.18.3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan			0,03	0,03	0,03
2.1.18.4	Pertumbuhan ekonomi			7,35		
2.1.18.5	Kemiskinan			5,29	4,79	4,24
2.1.18.6	Sistem informasi Pelayanan Perizinan dan administrasi pemerintah			Ada	Ada	ada
2.1.18.7	Penegakan PERDA			100	100	100
2.1.18.8	Cakupan patrol petugas Satpol PP			1x dalamsehari	1x dalamsehari	1x dalamsehari

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

Tabel 1.32						
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar						
No.	Aspek/focus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	
2.1.18.9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten			96,08	96,08	96,08
2.1.18.10	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten			0,41	0,41	0,41
2.1.18.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten			40	40	40
2.1.18.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			90	90	90
2.1.18.13	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik			100	100	100
2.1.18.14	Sistim Informasi Manajemen Pemda			Ada	Ada	Ada
2.1.18.15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat			ada	ada	ada
2.1.19	Ketahanan Pangan					
2.1.19.1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.19.2	Ketersediaan pangan utama	4,67%	5291,192 %	50 ton	60 ton	60 ton
2.1.20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2.1.20.1	PKK aktif	0,89%	100%	99	99	99
2.1.20.2	Posyandu aktif	100%	100%	99	99	99
2.1.21	Statistik					
2.1.21.1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.21.2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.22	Kearsipan					
2.1.22.1	Pengelolaan arsip secara baku	5,7%	5,7%	100	100	100
2.1.22.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	20 Desa/Kel /OPD	20 Desa/Kel /OPD	1	1	1
2.1.23	Komunikasi dan Informatika					
2.1.23.1	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.23.2	Pameran/expo	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
2.1.24	Perpustakaan					
2.1.24.1	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1
2.1.24.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	132,11%	158,720	50.708	52.708	54.708
2.1.24.	Koleksi buku yang tersedia di	57,25%	0,48	3.200	3.400	3.600

Tabel 1.32
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek/focus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	
3	perpustakaan daerah					
2.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan					
2.2.1	Pertanian					
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	7,54	7,44	70,55	73,88	77,33
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017)	46,46%	46,14%			
2.2.1.3	Cakupan bina kelompok petani					
2.2.2	Pariwisata					
2.2.2.1	Kunjungan wisatawan (Domestik/Asing)	8.582 Orang	9.783 Orang	(40%) 14,285 1.598 (70%)	(50%) 21,427 2.877 (80%)	(60%) 34,283 5.322 (85%)
2.2.2.2	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	0,199%	0,197%			
2.2.3	Kelautan dan Perikanan					
2.2.3.1	Produksi perikanan	68,98%	68,95%	52	52,5	53
2.2.3.2	Konsumsi ikan	105,8%	103,8%	130	132	135
2.2.4	Perindustrian					
2.2.4.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2017)	2,59%	2,59%			
2.2.4.1	Pertumbuhan Industri	0,3%	0,3%			
2.2.5	Ketransmigrasian					
2.2.5.1	Transmigrasi swakarsa	0%	0%	0	0	0

I.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Konsep Otonomi Daerah memberikan perwujudan kepada Pemerintah Daerah untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara

menerus seiring dengan intensipnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Hubungan antara warga selaku konstituen dengan Kepala Daerah yang telah dipilih oleh warganya dalam era demokrasi otonomi dan desentralisasi ini menjadi hubungan yang lebih langsung baik dalam pelayanan maupun kebijakan lainnya. Terkait dengan pelayanan, pada hakekatnya ada pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh di bedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi, dilain sisi fungsi pelayanan pemerintah pusat hanya dapat diselenggarakan di daerah.

Dari dua pertimbangan di atas, selanjutnya diperintahkan kepada seluruh daerah untuk mewujudkan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah.

Sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan prioritas pembangunan yang ada, maka wujud pelayanan yang diwajibkan di atas merupakan pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga, pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang diorietasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. Sementara bila ada daerah yang lebih mampu memberikan pelayanan yang dapat lebih memuaskan masyarakat, berdasarkan pada kreativitas dan inovasi dari pemerintah daerah tersebut sehingga dikatakan sebagai pelayanan minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan Pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan dan menerapkan standar /indikator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang SPM bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. SPM harus mampu memberikan pelayanan kepada publik tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis, tingkat dan mutu pelayanan yang esensial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada masyarakat.
4. Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola dengan manajerial profesional sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
5. Bersifat dinamis

B. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk

mencapai sasaran adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

C. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan

merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendukung pencapaian SPM dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pemerintah daerah yaitu, Program Penyempurnaan Sistem manajemen pelayanan publik dan Program peningkatan kapasitas administrasi pelayanan publik.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

II.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
1	2		3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	66,91	67,38	0,70
2	Angka Kemiskinan	Persen	12,83	12,48	-2,73
3	Angka Pengangguran	Jiwa	742	1.702	129,38
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,68*	-1,78**	-123,18
5	Pendapatan Per kapita	Ribu rupiah	47.515,37*	46.706,32**	-1,70
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	-	0,301	0,357	18,60

Ket :

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber Data : BPS Nasional dan BPS Kepulauan Selayar 2021

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 66,91 pada tahun 2019, angka tersebut meningkat menjadi 67,38 pada tahun 2020. angka indeks pembangunan manusia telah mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 0,70 pada tahun 2020, ini dikarenakan meningkatnya sejumlah indikator pembentuk IPM seperti Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Pendidikan (Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) yang menunjukkan semakin membaiknya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat. Fakta ini

membuktikan bahwa kinerja pembangunan manusia Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat.

b. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Perhitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perbedaannya.

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yang dilaksanakan oleh BPS pada bulan Maret 2020 dimana pada saat itu pengeluaran masyarakat masih normal belum terdampak pandemi Covid-19.

Angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 sebesar 12,48 % mengalami penurunan sebesar -2,73% dibanding tahun 2019 yang sebesar 12,83 %.

c. Angka Pengangguran

Angka ketenagakerjaan tahun 2020 dihasilkan dari data Sakernas yang pendataannya dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 dimana pada saat itu masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar telah terdampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak penduduk yang berhenti/ tidak bekerja (kehilangan mata pencaharian) namun tetap berupaya untuk mencari pekerjaan lainnya selama pandemi untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga. Angka Pengangguran Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 sebesar 742 Jiwa dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 129% menjadi 1.702 Jiwa.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh potensinya baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi sektoral dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan yang memberikan informasi tentang komposisi per sektor yang memberi andil pada perekonomian daerah. Kontribusi suatu sektor dapat meningkat secara normal, namun menurun secara persentase. Oleh sebab itu, untuk keperluan analisis, angka persentase distribusi sektoral menjadi lebih penting.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 (angka sangat sementara) sebesar -1,78% atau mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2019 sebesar 7,68%. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi sejumlah sektor lapangan usaha mengalami kontraksi. Sektor Transportasi dan Pergudangan (-19%), Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (-11,85%), Sektor Jasa Perusahaan (-10,56%), Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (-7,12%), Sektor Jasa Lainnya (-4,95%), Sektor Industri Pengolahan (-0,20%), Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-0,42%).

Dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan produksi di sektor barang maupun jasa. Sejumlah kebijakan pemerintah seperti Lock Down, Rapid Test untuk penyeberangan (Udara maupun laut) menyebabkan turunnya aktifitas penumpang. Hotel, Rumah makan, Resto, Café dan sejenisnya yang tutup atau mengurangi aktifitas karena pandemi baik dalam Kabupaten maupun di luar Kabupaten sebagai tempat tujuan pemasaran menyebabkan turunnya permintaan barang yang berdampak pada berkurangnya produksi baik pertanian, perikanan, maupun industri pengolahan.

Menurunnya produksi barang ini, memberikan dampak berlanjut pada kegiatan perdagangan karena komoditi yang diperdagangkan berkurang sehingga pendapatan dari margin perdagangan mengalami

penurunan yang dirasakan oleh para pelaku/pedagang.

Pandemi juga berdampak pada kategori jasa perusahaan maupun jasa lainnya. Sejumlah pengusaha baik jenis persewaan tanpa hak opsi, travel dan tour wisata, jasa rumah tangga, rekreasi dan hiburan mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya pengguna jasa yang khawatir dengan penyebaran Covid-19

e. Pendapatan Per Kapita

PDRB Perkapita adalah Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Pendapatan Perkapitas pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2020 yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan tahun 2019, sebaliknya jumlah penduduk meningkat tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Pendapatan Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2020 sebesar 46.706,32**(ribu rupiah) dimana Total PDRB sebesar 6.392,7^{xx} (milyar rupiah), dengan jumlah penduduk sebanyak 137.071 (BPS, 2020)

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Perubahan gini ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami kenaikan menunjukkan ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk meningkat.

Berdasarkan data BPS tingkat ketimpangan pendapatan penduduk kepulauan selayar tahun 2020 yang diukur oleh Rasio Gini adalah 0,357 naik 0,056 poin dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,301

II.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

II.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	PENDIDIKAN						
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi			PAUD Akreditasi A = 5 Sekolah B = 71 Sekolah C = 11 Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan			4.897 Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD			140 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5	Jumlah pendidik pada PAUD			577 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6 Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini			279 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		7 Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang			84 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		8 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi			SD Akreditasi A= 2 Sekolah B=96 Sekolah C=40 Sekolah Belum Akreditasi = 1 Sekolah Jumlah Keseluruhan = 139 Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		9 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan		14.232 Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		1.504 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		1.540 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		17	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		142 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		18 jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		19 jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar			23 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		20 jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		21 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			Ijazah S1=134 Orang Sertifikat Pendidik = 624 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		22 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		23 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			S1 = 134 Orang Sertifikasi = 139 Orang STTP Cakep = 139 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		24 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		25 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			67 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		26 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		27 Jumlah SMP Negeri Terakreditasi			SMP Akreditasi A= 3 Sekolah B= 33 Sekolah C= 16 Sekolah Jumlah = 52 Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		28 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		29 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Pemerintah Daerah					
		30 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		31 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan			6.597 Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		32 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		33 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			792 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		34 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		35 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			786 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		36 jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		37 jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			104 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		38	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		39	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			57 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			S1 = 447 Orang Sertifikasi Pendidik =303 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		42	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		43	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			S1 = 52 Orang Sertifikasi=52 Orang STTP Cakep = 52 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		44 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		45 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			2 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		46 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi			Pendidikan Kesetaraan - Akreditasi B = 1 Lembaga/PKBM (Swasta) - Belum Akreditasi = • 2 SKB (Negeri) • 8 PKBM (Swasta) Jumlah Keseluruhan = 11 Satuan Pendidikan/Lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		47 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		48 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan			Negeri dan Swasta : Paket A = 79 Siswa Paket B = 295 Siswa Paket C = 813 Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		49	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan			Negeri dan Swasta : Paket A = 1 Orang Paket B = 7 Orang Paket C = 7 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		50	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan			<i>Satuan Pendidikan :</i> Negeri = 65 Pendidik Swasta = 121 Pendidik Jumlah Keseluruhan = 186 Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		51	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			<i>Satuan Pendidikan :</i> Negeri = 65 Pendidik Swasta = 121 Pendidik Jumlah Keseluruhan = 186 Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		52	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		53	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1			<i>Satuan Pendidikan :</i> Negeri = 2 Orang Swasta = 9 Orang Jumlah Keseluruhan = 11 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	KESEHATAN						
		54	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		1 RS	Rumah Sakit Umum Daerah	
		55	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Tidak Ada	Rumah Sakit Umum Daerah	Tidak ada RS yang dibina dipersiapkan akreditasinya (Surat Pernyataan)
		56	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		392	Dinas Kesehatan	
		57	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		579	Dinas Kesehatan	
		58	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		89	Dinas Kesehatan	
		59	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		579	Dinas Kesehatan	
		60	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		89	Dinas Kesehatan	
		61	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		614	Dinas Kesehatan	
		62	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		392	Dinas Kesehatan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		63	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar			965	Dinas Kesehatan	
		64	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			392	Dinas Kesehatan	
		65	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar			420	Dinas Kesehatan	
		66	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			392	Dinas Kesehatan	
		67	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1.000	Dinas Kesehatan	
		68	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			397	Dinas Kesehatan	
		69	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1.000	Dinas Kesehatan	
		70	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			397	Dinas Kesehatan	
		71	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1.000	Dinas Kesehatan	
		72	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			397	Dinas Kesehatan	
		73	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1.000	Dinas Kesehatan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		74	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			397	Dinas Kesehatan	
		75	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1.000	Dinas Kesehatan	
		76	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			397	Dinas Kesehatan	
		77	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1.000	Dinas Kesehatan	
		78	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			397	Dinas Kesehatan	
		79	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1.000	Dinas Kesehatan	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
		80	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			0.0199 ha + 0.0718 ha + 0.0623 ha + 0.0846 ha + 0.0543 ha = 0,2929 ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		81	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			5 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		82	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan			0,000169 ha + 0,0011 ha = 0,001269 ha	Dinas Pekerjaan Umum dan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)				Penataan ruang	
		83 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)			6,50 km +1 km+ 1,2 km = 8,7 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		84 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		85 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		86 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota			Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		87 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			0.0199 ha + 0.0718 ha + 0.0623 ha + 0.0846 ha + 0.0543 ha = 0,2929 ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		88 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			5 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		89 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)			0,0169 ha + 0,0011 ha = 0.018 ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		90 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)			6,50 km +1 km+ 1,2 km = 8,7 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		91 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		92 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		93 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota			Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		94 Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Primer dlm kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer}} \times 100 \%$	60.104,5 m 62.594.5 m	96 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		95	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi sekunder dlm kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100 \%$	8.703,5 m 9.200 m	95 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
		96	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100 \%$	1.032 1.032	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
		97	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)			Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
		98	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)			Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Belum Pernah dibuat
		99	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)			1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
		100	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Tidak/ Belum pernah ada kegiatan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		101 Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		102 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S			1.981 KK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		103 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tahun 2020 tidak ada kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T
		104 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T			SPALD S = 1.981 KK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		105 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		106	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		107	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik			1.981 KK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		108	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	<p><i>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik</i></p> <p>----- x 100 %</p> <p><i>Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha</i></p>	681 5.000	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		109	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Data tidak ada karena belum ada kegiatan pengolahan lumpur tinja

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		110	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Data tidak ada karena belum ada kegiatan pengolahan lumpur tinja
		111	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Data tidak ada karena belum ada kegiatan pengolahan lumpur tinja
		112	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Data tidak ada karena belum ada kegiatan pengolahan lumpur tinja
		113	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Data tidak ada karena belum ada kegiatan pengolahan lumpur tinja
		114	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	SPALD-T tidak ada
		115	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja				Dinas Pekerjaan Umum dan	Data tidak ada karena

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
						Penataan ruang	belum ada kegiatan pengolahan lumpur tinja
		116	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Data tidak ada, belum ada kegiatan pengambilan data mengenai bangunan gedung di kab. Kepulauan selayar
		117	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		161 IMB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Data IMB tahun 2010-2020
		118	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)		Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		119	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)		Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		120	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		121	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		122	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		84 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Data Tahun 2016-2020
		123	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		84 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		124	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota		824,8 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		125	Panjang jalan yang dibangun		17.240 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		126	Panjang jembatan yang dibangun			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tahun 2020 tidak ada jembatan dibangun
		127	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		17.240 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		128	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan			6 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		129	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi			8.503 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		130	Panjang jembatan yang direhabilitasi			12,5 m + 6 m = 18,5 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		131	Panjang jalan yang dipelihara			2.565 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		132	Panjang jembatan yang dipelihara			12,5 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		133	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		134	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		135	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota			194 Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		136 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir			Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		137 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		138 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		139 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		140 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala					
		141 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		142 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		143 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		144 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		145 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		146 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		147 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		148 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		149	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		150	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		130 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	
		151	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		152	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		153	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		154	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		155	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		156	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
		157	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Tidak/ Belum pernah ada kegiatan
4	PERUMAHAN RAKYAT							
		158	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya			101	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		159	Jumlah rumah yang terkena bencana alam				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
							terkena bencana (Surat Pernyataan)
		160	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang terkena bencana (Surat Pernyataan)
		161	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang terkena bencana (Surat Pernyataan)
		162	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang terkena bencana

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
							(Surat Pernyataan)
		163	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang terkena bencana (Surat Pernyataan)
		164	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang terkena bencana (Surat Pernyataan)
		165	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang terkena bencana

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
							(Surat Pernyataan)
		166	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang terkena bencana (Surat Pernyataan)
		167	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang terdampak relokasi program pemerintah (Surat Pernyataan)
		168	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		berdasarkan rencana pemenuhan SPM					terdampak relokasi program pemerintah (Surat Pernyataan)
		169 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang terdampak relokasi program pemerintah (Surat Pernyataan)
		170 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang terdampak relokasi program pemerintah (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		171 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang terdampak relokasi program pemerintah (Surat Pernyataan)
		172 Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang terdampak relokasi program pemerintah (Surat Pernyataan)
		173 Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha			148,40 ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		174 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH			1.837 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
						Permukiman	
		175	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		9,71 ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		176	Jumlah rumah di kab/kota		32.326 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		177	Jumlah unit PK RTLH		1.837 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		178	Jumlah rumah tidak layak huni		6.110 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		179	Jumlah rumah yang tidak dihuni			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terdata (Surat Pernyataan)
		180	Rasio rumah dan KK			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terdata (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		181	Jumlah rumah pembangunan baru				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terdata (Surat Pernyataan)
		182	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena kegiatan belum dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		183	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena kegiatan berkaitan belum dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		184	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena kegiatan berkaitan belum

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
							dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		185	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena kegiatan belum dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		186	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena kegiatan berkaitan belum dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		187	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena kegiatan berkaitan belum

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
								dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		188	Jumlah pengembang yang tersertifikasi				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena kegiatan berkaitan belum pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		189	Jumlah pengembang yang terregistrasi				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena kegiatan berkaitan belum dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		190	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terealisasi karena kegiatan berkaitan belum

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
							dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
		191	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		27	Satpol Damkar PP	
		192	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		343 orang	Satpol Damkar PP	
		193	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		1.937	Satpol Damkar PP	
		194	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		1 Orang	Satpol Damkar PP	
		195	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Ada	Satpol Damkar PP	
		196	Tersedianya sarana prasarana minimal		Ada	Satpol Damkar PP	
		197	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak dapat terlaksana karena tidak ada anggaran (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		198	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100 \%$	7.842 133.033	6 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		199	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak terlaksana karena anggaran di refocusing (Surat Pernyataan)
		200	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak terlaksana karena anggaran di refocusing (Surat Pernyataan)
		201	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak terlaksana karena anggaran di refocusing (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		202	Persentase warga negara yang ikut pelatihan				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak terlaksana karena anggaran di refocusing (Surat Pernyataan)
		203	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops ----- x 100 % Seluruh Penduduk dikawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman	65 6	11 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		204	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak terlaksana karena anggaran di refocusing (Surat Pernyataan)
		205	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak ada kejadian luar biasa pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		206	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak ada kejadian luar biasa pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		207	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak ada kejadian luar biasa pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		208	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak ada kejadian luar biasa pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		209	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Terlaksana karena kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		210	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana		3 Posko Kecamatan	Satpol PP Damkar	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan					
		211 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan			Ada	Satpol Damkar PP	
		212 Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa			Tidak	Satpol Damkar PP	Tidak Terlaksana karena kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		213 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi			Armada Pemadam = 4 Unit Penyuplai = 1 Unit Pompa Alcom = 6 Buah	Satpol Damkar PP	
		214 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			Tidak ada	Satpol Damkar PP	Tidak Terlaksana karena kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		215	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran			50 Orang	Satpol Damkar PP
		216	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran			Belum Ada	Satpol Damkar PP Tidak Terlaksana karena kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
6	SOSIAL						
		217	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki			1 (satu) rujukan/ loket (SLRT) Sistem layanan dan rujukan terpadu	Dinas Sosial
		218	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM			1. Disabilitas = 1.117 Orang 2. Lanjut Usia = 8.685 (Umur 60-90 Tahun) 3. Anak Terlantar = 20 Orang	Dinas Sosial Aplikasi SIKS-NG (DTKS)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		219	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		1 (satu) Tim / 5 Orang Anggota dari Dinas Sosial	Dinas Sosial	
		220	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		1. Disabilitas = 158 Orang 2. Lanjut Usia = 680 KK Orang 3. Anak Terlantar = 20 Orang	Dinas Sosial	
		221	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		1. Mobil Dapur = 1 Unit 2. Mobil Resque = 1 Unit	Dinas Sosial	
		222	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		1. Disabilitas = 10 Orang 2. Lanjut Usia = - 3. Anak Terlantar = 20 Orang	Dinas Sosial	
		223	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar			Dinas Sosial	
		224	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang			Dinas Sosial	
		225	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			Dinas Sosial	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		226	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter			Dinas Sosial	
		227	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia			Dinas Sosial	
		228	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			Dinas Sosial	
		229	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah			Dinas Sosial	
		230	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		39 Orang	Dinas Sosial	
		231	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			Dinas Sosial	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		232	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		6.597 KK	Dinas Sosial	Aplikasi Data Program Keluarga Harapan (PKH)
		233	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			Dinas Sosial	
		234	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar			Dinas Sosial	
		235	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Pengurusan KIP Kuliah dan PIP sebanyak 840 Orang	Dinas Sosial	
		236	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga			Dinas Sosial	
		237	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut			Dinas Sosial	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		usia terlantar dan gepeng yang dirujuk					
		238 Jumlah korban bencana yang mendapat makanan				Dinas Sosial	
		239 Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang				Dinas Sosial	
		240 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki				Dinas Sosial	
		241 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan				Dinas Sosial	
		242 Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial				Dinas Sosial	
		243 Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia				Dinas Sosial	

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	TENAGA KERJA						
		244	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	-		DPMPTSPTK
		245	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% Realisasi Indikator-Target Indikator Realisasi	-		DPMPTSPTK
		246	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	-		DPMPTSPTK
		247	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun 2020 ----- x 100% Kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2020	-		DPMPTSPTK
		248	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat tahun 2020 ----- x 100% Jumlah instruktur tahun 2020	4 10	40 %	DPMPTSPTK
		249	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah Instruktur tahun 2020 ----- x 100% Jumlah peserta pelatihan	10 256	3,9%	DPMPTSPTK

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		250	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2020}}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun 2020}} \times 100\%$	-		DPMPTSPTK	
		251	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2020}}{\text{Jumlah LPK yang terdata pada tahun 2020}} \times 100\%$	-		DPMPTSPTK	
		252	Jumlah penganggur yang dilatih			256 orang	DPMPTSPTK	
		253	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun 2020}}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun 2020}} \times 100\%$	256 256	100 %	DPMPTSPTK	
		254	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2020}}{\text{Jumlah lulusan pada tahun 2020}} \times 100\%$	-		DPMPTSPTK	
		255	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 2020}}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2020}} \times 100\%$	36 256	14,90 %	DPMPTSPTK	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		256	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	-		DPMPTSPTK
		257	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$	-		DPMPTSPTK
		258	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		-		DPMPTSPTK
		259	Data tingkat produktivitas total		-		DPMPTSPTK
		260	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		-		DPMPTSPTK
		261	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		-		DPMPTSPTK
		262	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan				DPMPTSPTK
		263	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.				DPMPTSPTK

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		264	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		100 %	DPMPTSPTK	
		265	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		1	DPMPTSPTK	
		266	Jumlah mogok kerja			DPMPTSPTK	
		267	Jumlah penutupan perusahaan		1	DPMPTSPTK	
		268	Jumlah perselisihan kepentingan			DPMPTSPTK	
		269	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan			DPMPTSPTK	
		270	Jumlah perselisihan PHK			DPMPTSPTK	
		271	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK			DPMPTSPTK	
		272	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite			DPMPTSPTK	
		273	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		Tidak ada	DPMPTSPTK	
		274	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah Kasus Perselisihan}} \times 100\%$	1 1	100 %	DPMPTSPTK
		275	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota			DPMPTSPTK	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		276	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		15 Orang	DPMPTSPTK	
		277	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		8 Orang	DPMPTSPTK	
		278	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota			DPMPTSPTK	
		279	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja			DPMPTSPTK	
		280	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			DPMPTSPTK	
		281	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.			DPMPTSPTK	
		282	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)			DPMPTSPTK	
		283	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi			DPMPTSPTK	
		284	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata			DPMPTSPTK	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		285	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan			DPMPTSPTK	
		286	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja			DPMPTSPTK	
		287	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya			DPMPTSPTK	
		288	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk			DPMPTSPTK	
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
		289	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		29 OPD	DP3AP2KB	
		290	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		Tidak Ada	DP3AP2KB	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		291	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			1. Berita Kota Makassar 2. Ujungpandang Express	DP3AP2KB
		292	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal			1. Peksos 2. Bupas 3. UPPA Polres 4. Kejaksaan 5. Pengadilan 6. RSUD 7. Polsek	DP3AP2KB
		293	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah Korban kekerasan anak ditingkat provinsi}} \times 100\%$	15 15	100 %	DP3AP2KB
		294	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan			1. Peksos 2. PPA DP3AP2KB 3. UPPA Polres	DP3AP2KB
		295	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Tidak Ada			DP3AP2KB
		296	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat			1 Organisasi Perempuan	DP3AP2KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan				
		297	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		Tidak Ada	DP3AP2KB	
		298	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		Tidak Ada	DP3AP2KB	
		299	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		Tidak Ada	DP3AP2KB	
		300	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Tidak Ada	DP3AP2KB	
		301	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi		Tidak Ada	DP3AP2KB	
		302	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100 \%$	<p>4</p> <p>4</p>	100 %	DP3AP2KB
3	PANGAN						
		303	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan		Ada Infrastruktur Pergudangan	Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pangan					
		304 Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya			Terdapat Penyaluran pangan pokok	Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan	
		305 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal			Tidak Ada regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal yang disusun oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan	
		306 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang			Terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang sebanyak 8 KWT	Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan	
		307 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan			Tersedia peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan	
		308 Tertanganinya kerawanan pangan			Terdapat penanganan kerawanan pangan	Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		309	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		Penyaluran cadangan pangan	Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan	
		310	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		Terdapat pengawasan keamanan pangan segar namun tidak sampai pada uji laboratorium	Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan	
4	PERTANAHAN						
		311	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota				
		312	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek				
		313	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee.				
		314	Dokumen Izin membuka tanah				
		315	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota				

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
5	LINGKUNGAN HIDUP						
		316	Hasil perhitungan provinsi terhadap:				
			a. Indeks kualitas air (IKA)	$IKA = 100 - (P_{ij} / 10\%)$ $IKA = 100 - (500 / 10\%)$		50 %	Dinas Lingkungan Hidup
			b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - (50 / 0,9 \times (IEU - 0,1))$ $IKU = 100 - (50 / 0,9 \times ((0,44 + 0,17) / 2 - 0,1))$		88,80 %	Dinas Lingkungan Hidup
			c. Indeks tutupan hutan (ITH)	$TH = 0,7973$ $IKTH = 100 - ((84,3(TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$ $IKTH = (100 - ((84,3 - (0,7973 \times 100)) \times 50 / 54,3))$		89,12 %	Dinas Lingkungan Hidup
		317	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota			1 Data	Dinas Lingkungan Hidup
		318	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan pemerintah kab/kota ----- x 100% Jumlah Usulan Permohonan yang terintegrasi	11 173	6,356 %	Dinas Lingkungan Hidup
		319	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota				Dinas Lingkungan Hidup Keterbatasan anggaran OPD serta adanya pemotongan anggaran dalam rangka penanganan Covid 19 (Surat pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		320	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota			Dinas Lingkungan Hidup	Keterbatasan anggaran OPD serta adanya pemotongan anggaran dalam rangka penangan Covid 19 (Surat pernyataan)
		321	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat			Dinas Lingkungan Hidup	Keterbatasan anggaran OPD serta adanya pemotongan anggaran dalam rangka penangan Covid 19 (Surat pernyataan)
		322	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat				
		323	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total Jumlah Pengaduan Masyarakat}} \times 100 \%$	8 10	80 % Dinas Lingkungan Hidup	
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
		324	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan}} \times 100 = 100 \%$	1 1	100 % Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		325	Penerbitan akta perceraian $\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100 \%$	0 0	0 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		326	Penerbitan akta kematian $\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan}} \times 100 \%$	214 354	60 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		327	Penyajian data kependudukan $\frac{\text{Jumlah Penyajian Data Kependudukan Kabupaten}}{\text{2 tahun}} \times 100\%$	2 kali	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
		328	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		0	DIS. PMD	
		329	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		3 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		330	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		331	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		3 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		332	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		333	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		334	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		335	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
		336	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Ada	DP3AP2KB	
		337	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			DP3AP2KB	Tidak ada pendataan tahun 2020 (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		338	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			DP3AP2KB	Tidak ada pendataan tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		339	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi \& KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi KIE)}} \times 100\%$	89.376 125.832	0,72 %	DP3AP2KB
		340	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			1. Lembang TV 2. Centra Kreatif 3. CV. Kuning Violet 4. Masyarakat	DP3AP2KB
		341	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah Faskes}} \times 100\%$	15 15	100 %	DP3AP2KB
		342	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah MKJP}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	3.658 19.584	0,1868 %	DP3AP2KB
		343	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif			27 Kelompok Pokja Kampung KB	DP3AP2KB
		344	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Persalinan menurut metode kontrasepsi cara moderen}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$	201 478	0,42 %	DP3AP2KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		345	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Tidak ada			DP3AP2KB
		346	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB pada keluarga penerima PBI}}{\text{Jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$	6.167 9.848	0,62 %	DP3AP2KB
9	PERHUBUNGAN						
		347	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang Tersedia}}{\text{Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sesuai Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan}} \times 100\%$	7 9	77 %	Dinas Perhubungan
		348	Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang di Uji Per Tahun}}{\text{Jumlah Kendaraan Wajib Uji}} \times 100\%$	97 202	48 %	Dinas Perhubungan
		349	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Tarif Lintas Penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas Penyeberangan dalam Kabupaten / kota}} \times 100\%$	2 5	40 %	Dinas Perhubungan
		350	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{\text{Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten / Kota}}{\text{Target Kebutuhan Perlengkapan Jaan Kabupaten / Kota}} \times 100\%$	6 7	86 %	Dinas Perhubungan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		351	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{\text{Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten / Kota}}{\text{Target Kebutuhan Perlengkapan Jalan Kabupaten / Kota}} \times 100\%$	6 7	86 %	Dinas Perhubungan	
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
		352	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo				Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		353	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo				Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		354	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah				Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		355	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring				Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015					19 (Surat Pernyataan)
		356 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		2 41	4,87 %	Dinskominfo SP	
		357 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		2 41	4,87 %	Dinskominfo SP	
		358 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik				Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		359 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik				Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		360 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
							penangan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		361	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah			Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penangan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		362	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	3 41	7,31 %	Dinskominfo SP
		363	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	2 41	4,88 %	Dinskominfo SP
		364	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui data sesuai siklus jenis data}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	2 41	4,88 %	Dinskominfo SP
		365	Persentase data yang dapat berbagi pakai			Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penangan Covid 19 (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		366 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city				Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		367 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo				Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		368 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government				Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		369 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi					
		370 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)					

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		371	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan				
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
		372	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			Disperindagkop UKM	
		373	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			Disperindagkop UKM	
		374	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$	165 165	100 %	Disperindagkop UKM

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		375	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$	25 165	15,15 %	Disperindagkop UKM
		376	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$	22 165	13,33 %	Disperindagkop UKM
		377	Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Koperasi yang ada}} \times 100\%$	60 165	36,36 %	Disperindagkop UKM
		378	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				Disperindagkop UKM
		379	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan				Disperindagkop UKM
		380	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diterbitkan sertifikat Nomor Induk NIK}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$	8 65	4,8 %	Disperindagkop UKM

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		381	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				Disperindagkop UKM
		382	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				Disperindagkop UKM
		383	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan ----- x 100% Jumlah Koperasi yang ada	16 165	9,6 %	Disperindagkop UKM
		384	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				Disperindagkop UKM
		385	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- x 100% Jumlah wirausaha yang ada	504 2.015	25 %	Disperindagkop UKM
		386	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah Usaha Mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang ada	3.033 2.015	150,5 %	Disperindagkop UKM

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		387	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra				Disperindagkop UKM
		388	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha				Disperindagkop UKM
		389	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$	23 2.015	1,14 %	Disperindagkop UKM
		390	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	110 2.015	5,45 %	Disperindagkop UKM
		391	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	25 2.015	1,24 %	Disperindagkop UKM

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
12	PENANAMAN MODAL						
		392	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		1 Perda	DPMPTSPTK	
		393	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal		1 SOP	DPMPTSPTK	
		394	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun		DPMPTSPTK	Masih dalam tahap sosialisasi
		395	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, <i>one on one meeting</i>		DPMPTSPTK	
		396	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal		DPMPTSPTK	
		397	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal		DPMPTSPTK	
		398	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	12 Kali	DPMPTSPTK	
		399	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	2.321 Izin Terbit	DPMPTSPTK	
		400	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	PMDN = Rp. 28.418.800.000 PMA = \$ 7.487.000	DPMPTSPTK	
		401	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	5 Orang	DPMPTSPTK	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		402	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal		16 Perusahaan	DPMPTSPK	
		403	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	2.321 2.321	2.321	DPMPTSPK	
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
		404	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Revocusing anggaran untuk Covid 19 (Surat Pernyataan)
		405	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		406	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda			7	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		407	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Revocusing anggaran untuk Covid 19 (Surat Pernyataan)
		408	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Revocusing anggaran untuk Covid 19 (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		409	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Revocusing anggaran untuk Covid 19 (Surat Pernyataan)
14	STATISTIK						
		410	Tersedianya buku profil daerah		Ada	Dinskominfo SP	
		411	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan			Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		412	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan			Dinskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		413	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS		1 Kompilasi	Dinskominfo SP	Masih dalam tahap pendataan
		414	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS			Dinskominfo SP	Masih dalam tahap pendataan
		415	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik			Dinskominfo SP	Masih dalam tahap pendataan
		416	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik			Dinskominfo SP	Masih dalam tahap pendataan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
15	PERSANDIAN						
		417	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan			Diskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		418	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah			Diskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		419	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah			Diskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)
		420	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan			Diskominfo SP	Tidak ada kegiatan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
16	KEBUDAYAAN						
	Terlestarikannya Cagar Budaya	421	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)		3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		422	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya) = 0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		423	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, m dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan = 1		1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		424	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		425	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan		63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		426	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		427	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar provinsi			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		428	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		429	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		430	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (Dikembangkan) = 9.750 buah yang terdiri dari etnografika 45 buah, numismatika dan heraldika 7.501 buah, filologika 2 buah, keramologika 2.173 buah dan lain – lain terdiri dari 29 buah.			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		431	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Jumlah pengunjung museum		2.751 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		432	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		433	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		434	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		435	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		436	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		437	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		438	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		439	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	PERPUSTAKAAN						
		440	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam exemplar) = ----- x 100 % Jumlah penduduk	93.379 exp 140,077 Jiwa	0,006	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		441	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite ----- x 100 % Jumlah penduduk di wilayahnya	7.190 orang 140.077 Jiwa	5,13 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		442	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ----- x 100 % jumlah penduduk di wilayahnya	88 140,077 Jiwa	0,06	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		443	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan yang dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya}} \times 100 \%$	0 302		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		444	Jumlah pasyarakatangemar membaca di masyarakat	Jumlah pasyarakatangemar membaca di masyarakat		4 Kegiatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		445	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Belum pernah dilaksanakan atau belum pernah dianggarkan karena merupakan kegiatan baru yang terdapat dalam Permendagri 90 Tahun 2019 (Surat Pernyataan)
		446	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Belum pernah dilaksanakan atau belum pernah dianggarkan karena merupakan kegiatan baru yang terdapat dalam Permendagri 90 Tahun 2019 (Surat Pernyataan)
		447	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Belum pernah dilaksanakan atau belum pernah dianggarkan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
								karena merupakan kegiatan baru yang terdapat dalam Permendagri 90 Tahun 2019 (Surat Pernyataan)
18	KERSIPAN							
		448	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$T = (a + i + s + j)/4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	<p>a=0 l=743 s=2.000 j=0</p>	685,75 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		449	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		450	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		451	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		452	<p>Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK</p>	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	<p>m=0 b== g=2 a=366 c=2 i=0</p>	61,6 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		453	<p>Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK</p>			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belum pernah dilaksanakan atau belum pernah dianggarkan karena merupakan kegiatan baru yang terdapat dalam Permendagri 90 Tahun 2019 (Surat Pernyataan)	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		454	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		455	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		456	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		457	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belum pernah dilaksanakan atau belum pernah dianggarkan karena merupakan kegiatan baru yang terdapat dalam Permendagri 90 Tahun 2019 (Surat Pernyataan)

B. URUSAN PILIHAN

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
		458	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		7.707	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		459	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional (1)}}{\text{Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (2)}} \times 100\%$	50%	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		460	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan		58 Izin Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		461	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan/ tahun 20 Kelompok - Pendampingan 50 org, 11 Kelompok - Kelembagaan 6 Kelompok 	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		462	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		647.500 ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	PARIWISATA						
		463	Jumlah entitas pengelolaan destinasi			Dinas Kepariwisataan	Tidak Pernah dilakukan Pendataan Langsung dikarenakan adanya refocusin anggaran (Surat Pernyataan)
		464	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			Dinas Kepariwisataan	Tidak Pernah dilakukan Pendataan Langsung dikarenakan adanya refocusin anggaran (Surat Pernyataan)
		465	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Jasa Makanan dan Minuman = 18 Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi = 9 Usaha	17 Usaha	Dinas Kepariwisataan	
		466	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Malaysia 14 orang Argentina 2 orang Finlandia 2 orang	155 Orang	Dinas Kepariwisataan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Amerika Serikat 1 orang Australia 44 orang Jerman 23 orang Rusia 11 orang Cina 11 orang Thailand 3 orang Swiss 5 orang Prancis 15 orang Bulgaria 2 orang Belgia 5 orang India 7 orang Philipina 1 orang Afganistan 7 orang Kanada 1 orang Swiss 1 orang			
		467	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri			Dinas Kepariwisata	Tidak dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		468	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi			Dinas Kepariwisataaan	Tidak dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		469	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri			Dinas Kepariwisataaan	Tidak dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		470	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi			Dinas Kepariwisataaan	Tidak dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		471	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan			Dinas Kepariwisataaan	Tidak dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
		472	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			Dinas Kepariwisataaan	Tidak dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	PERTANIAN						
		473	Sarana pertanian yang diberikan	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bibit tanaman = 78.208 pohon - Benih padi = 6.050 Kg - Benih sayuran = 1.358 Kg - Kompos = 17.250 Kg - Pupuk cair = 730 botol - NPK = 2.500 Kg - Herbisida = 895 Liter - Insektisida = 38 Liter - Fungisida = 30 Kg - Handspayer = 141 buah - Kawat duri = 1.170 roll - Jaring pengaman kebun = 540 roll - Bak fiber = 46 unit 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		474	Prasarana pertanian yang digunakan		42 Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		475	Penerbitan izin usaha pertanian		1 Rekomendasi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		476	Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	42 42	100 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		477	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	1 1	100 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		478	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	<p><i>Peternakan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 11 - Luas area terkena bencana penyakit menular ternak = 188 <p><i>Pertanian :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 314 Ha - Luas area terkena bencana pertanian = 1.356,5 Ha 		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase fasilitasi penanggulangan bencana penyakit menular ternak = 5,85% - Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian = 23,15% 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
4	KEHUTANAN							
		479	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura			1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	
		480	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga				Dinas Lingkungan Hidup	Keterbatasan anggaran OPD serta adanya pemotongan anggaran dalam

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
							rangka penangan Covid 19 (Surat pernyataan)
		481	Pemulihan ekosistem pada Tahura			Dinas Lingkungan Hidup	Keterbatasan anggaran OPD serta adanya pemotongan anggaran dalam rangka penangan Covid 19 (Surat pernyataan)
		482	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			Dinas Lingkungan Hidup	Keterbatasan anggaran OPD serta adanya pemotongan anggaran dalam rangka penangan Covid 19 (Surat pernyataan)
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
		483	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota			Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Kegiatan tidak terlaksana disebabkan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki Sumber Geothermal

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
6	PERDAGANGAN						
		484	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :			Disperindagkop UKM	
		485	a. Pusat perbelanjaan			Disperindagkop UKM	
		486	b. Toko swalayan			Disperindagkop UKM	
		487	Persentase penerbitan TDG			Disperindagkop UKM	
		488	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG			Disperindagkop UKM	
		489	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :			Disperindagkop UKM	
		490	a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri				
		491	b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri				
		492	c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri				
		493	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota			Disperindagkop UKM	
		494	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu			Disperindagkop UKM	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		484	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				Disperindagkop UKM	
		485	Persentase koefisien variasi harga antar waktu				Disperindagkop UKM	
		486	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan				Disperindagkop UKM	
		487	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	<p>Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun 2020 ----- x 100 %</p> <p>Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di Kabupaten Kepulauan Selayar</p>	<p>266</p> <p>2.231</p>	12 %	Disperindagkop UKM	
		488	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	<p>Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ----- x 100%</p> <p>total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan</p>	<p>30</p> <p>30</p>	100 %	Disperindagkop UKM	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
7	PERINDUSTRIAN						
		495	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota			Disperindagkop UKM	
		496	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik(30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK		Disperindagkop UKM	Perda RPIK Kabupaten Kepulauan Selayar telah ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Selayar Tanggal 6 Agustus 2019
		497	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah izin yang}} \times 100\%$		Disperindagkop UKM	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			dikeluarkan				
		498	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan			Disperindagkop UKM	
		499	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota			Disperindagkop UKM	Belum ada IKM Kabupaten Kepulauan Selayar yang datanya masuk di SIINAS (Belum ada operator maupun pelatihan untuk operator data SIINAS)
8	TRANSMIGRASI						
		500	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya				
		501	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya				
		502	Jumlah satuan pemukiman yang dibina				

II.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan						
		1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	5.553 Anak 13.441 Anak	41,313 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	14.205 Anak 14.610 Anak	97,22 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	<p>Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan</p>	<p>6.617 Anak</p> <p>12.130 Anak</p>	54,55 %	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	<p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun pada kabupaten yang bersangkutan</p>	<p>21.815 Anak</p> <p>36.326 Anak</p>	60,05 %	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>
2	Kesehatan						
		5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	<p>Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah Penduduk di kabupaten/kota</p>	<p>124</p> <p>140.077</p>	0,08 %	<p>Rumah Sakit Umum Daerah</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kabupaten/kota}} \times 100 \%$	<p>1</p> <p>1</p>	100 %	Rumah Sakit Umum Daerah
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}} \times 100 \%$	<p>2.411</p> <p>2.984</p>	80,79 %	Dinas Kesehatan
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota}} \times 100 \%$	<p>2.139</p> <p>2.848</p>	75,1 %	Dinas Kesehatan
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota}} \times 100 \%$	<p>2.028</p> <p>2.713</p>	74,75	Dinas Kesehatan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		10 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di kabupaten/kota	5.396 10.714	50,36 %	Dinas Kesehatan	
		11 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	1.753 3.995	43,87 %	Dinas Kesehatan	
		12 Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	69.666 74.912	92,99 %	Dinas Kesehatan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 %</p> <p>Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota</p>	<p>2.557</p> <p>12.912</p>	19,8 %	Dinas Kesehatan
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 %</p> <p>Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota</p>	<p>22.416</p> <p>24.141</p>	92,85 %	Dinas Kesehatan
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 %</p> <p>Jumlah penderita DM di kabupaten/kota</p>	<p>1.910</p> <p>2.078</p>	91,91 %	Dinas Kesehatan
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	<p>Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 %</p> <p>Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota</p>	<p>169</p> <p>169</p>	100 %	Dinas Kesehatan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	<p>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota</p>	632 632	100 %	Dinas Kesehatan
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota</p>	1.980 2.129	93 %	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	<p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</p> <p>----- x 100%</p> <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</p>	0,2306 0,2929	78,72 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (m)	12,69 12,69	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100 % luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	27 ha 1.543 ha	1,74 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. ----- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.	17.898 RT 33.713 RT	53,08 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten A	1.981 RT 33.713 RT	5,87 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ----- x 100 % Jumlah IMB yang berlaku	161 161	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap ----- x 100 % Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	575,02 824,8	69,71 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	194 1.000	19,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi ----- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak ada karena belum ada tenaga pengawas bersertifikat
4	Perumahan Rakyat						
		28	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak terealisasi karena tidak ada data korban bencana (Surat Pernyataan)
		29	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak terealisasi karena tidak ada data rumah yang terdampak relokasi program pemerintah (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	9,71 Ha 140,48 Ha	6,91 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	6.055 Unit 32.326 Unit	18,73 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak tersedia karena kegiatan yang berkaitan belum dianggarkan pada tahun 2020 (Surat Pernyataan)
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
		33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	9 9	100 %	Satuan polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuatsanksi}} \times 100\%$	11 33	33,33 %	Satuan polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		7.842 jiwa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		65 jiwa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		65 jiwa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
6	Sosial						
		40	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	978 5.241	18,66	Dinas Sosial
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	9.086 9.086	100 %	Dinas Sosial

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tenaga Kerja						
		42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota}} \times 100\%$	<p>13</p> <p>13</p>	100 %	DPMPTSPTK
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	<p>256</p> <p>63.444</p>	0,40 %	DPMPTSPTK
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	<p>26.449.690</p> <p>63.444</p>	41,689 %	BPS
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	<p>1</p> <p>1.536</p>	0,06 %	DPMPTSPTK
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	<p>2</p> <p>16</p>	12,5 %	DPMPTSPTK

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
		47	Persentase ARGH pada Belanja Langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah Seluruh Belanja Langsung APBD}} \times 100\%$	Rp. 610.601.000,- Rp.521.035.199.876,-	0,117 %	DP3AP2KB
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$	17 22.119	0,0007 %	DP3AP2KB
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$	4 64.947	0,006 %	DP3AP2KB
3	Pangan						
		50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$	2,7 Ton 14.583 Ton	0,018 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
4	Pertanahan							
		51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi ----- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi				Data belum tersedia karena merupakan kegiatan yang baru akan dilaksanakan Tahun 2021
		52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum				
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan				Data belum tersedia karena merupakan kegiatan yang baru akan dilaksanakan Tahun 2021
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform				Data belum tersedia karena merupakan kegiatan yang baru akan dilaksanakan Tahun 2021

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan			Data belum tersedia karena merupakan kegiatan yang baru akan dilaksanakan Tahun 2021
		56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan			Data belum tersedia karena merupakan kegiatan yang baru akan dilaksanakan Tahun 2021
5	Lingkungan Hidup						
		57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan		74,28 %	Dinas Lingkungan Hidup
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Jumlah seluruhTotal vol timbunan sampah tahun berjalankabupaten/kota	5.449,95 42.180,69	1,29 %	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota ----- x 100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	4 11	36,36 %	Dinas Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		60	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman ----- x 100% Jumlah penduduk wajib KTP-el	91.709 100.618	91,14 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	5.261 41.515	12,67 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		62	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	32.727 45.602	71,76 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama ----- x 100% Jumlah OPD	12 26	46,15 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
		64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	3 37	8,1 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	0 41	0 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
		66	TFR (Angka Kelahiran Total)			DP3AP2KB	Tidak ada pendataan tahun 2020 karena anggaran kegiatan dialihkan ke Covid 19 (Surat Pernyataan)
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	15.571 19.691	79,07 %	DP3AP2KB
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	4.013 19.691	20,37 %	DP3AP2KB
9	Perhubungan						
		69	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Rasio Konektivitas Kabupaten = (0,65 x 30) + (0,67 x 70) IK1 = $\frac{65 \times 0,8}{80}$	66,4 %	Dinas Perhubungan
				o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)			Dinas Perhubungan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)	= 48 80 = 0,65 = 19,5 + 46,9 = 66,4		Dinas Perhubungan	
			Keterangan:	IK2 = $\frac{2 \times 1}{3}$		Dinas Perhubungan	
			IK1 (Angkutan Jalan)	= $\frac{2}{3}$		Dinas Perhubungan	
			- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP	= 0,67		Dinas Perhubungan	
			- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu			Dinas Perhubungan	
			IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)			Dinas Perhubungan	
			- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil			Dinas Perhubungan	
			- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas			Dinas Perhubungan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu				
			Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:			Dinas Perhubungan	
			1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)			Dinas Perhubungan	
			2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)			Dinas Perhubungan	
			3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)			Dinas Perhubungan	
			4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)			Dinas Perhubungan	
			Bobot Trayek atau Lintas:			Dinas Perhubungan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
			a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1			Dinas Perhubungan		
			b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8			Dinas Perhubungan		
			c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			Dinas Perhubungan		
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	$\frac{12.216}{0,4}$	30,54 %	Dinas Perhubungan	
10	Komunikasi dan Informatika							
		71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD			Dinskominfo SP	Tidak terealisasi karna adanya refocusin anggaran akibat pandemi Covid 19 (Surat Pernyataan)
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	$\frac{2}{22}$	9,09	Dinskominfo SP	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah penduduk			Dinskominfo SP	Tidak terealisasi karna adanya refocusin anggaran akibat pandemi Covid 19 (Surat Pernyataan)
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
		74	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	16 165	24,615 %	Disperindagkop UKM	
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	504 2015	25,012	Disperindagkop UKM	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
12	Penanaman Modal						
		76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota}} \times 100\%$	1.257.400.69 0.451,00 778.135.753. 282,07	61,59 %	DPMPTSPK
13	Kepemudaan dan Olahraga						
		77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$	204 21.563	0,95%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$	791 21.563	3,66 %	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Revocusing anggaran untuk Covid 19 (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
14	Statistik						
		80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD	41 41	100 %	Diskominfo SP
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD			Diskominfo SP Surat Pernyataan
15	Persandian						
		82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	5 41	12,195	Diskominfo SP Surat Pernyataan
16	Kebudayaan						
		83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	9.768 9.768	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
17	Perpustakaan						
		84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		56 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		60 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
18	Kearsipan						
		86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = (a + i + s + j)/4$	$T = \frac{(0+743+2000+0)}{4}$ $T = 685,75 \%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				T= tingkat ketersediaan arsip			
				a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip	0		
				i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip	743		
				s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	2000		
				j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	$T = (0+0+2+366+2+0)/6$ $T = 61,6\%$	61,6 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban				
			m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	0			
			b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	0			
			g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK	2			
			a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	366			
			c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	2			
			I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0			

B. URUSAN PILIHAN

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Kelautan dan Perikanan						
		88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)		19.566,57 Ton	
2	Pariwisata						
		89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	155 Orang 1.068 Orang	- 85,48 %	Dinas Kepariwisataaan
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	5.734 Orang 11.355 Orang	- 49,5%	Dinas Kepariwisataaan
		91	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$			Dinas Kepariwisataaan Tidak ada pendataan langsung karena anggaran di revocusing (Surat Pernyataan)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		14.300.000.000	BPS	
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		2.076.226.444,50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Pertanian							
		94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ----- x 100% luas panen	26.786,04 Ton 3.983 ha	6,72 %		
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ----- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	3.432 3.503 3.503	-2,02 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4	Kehutanan						
5	Energi dan Sumber Daya Mineral						
		96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin			Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tidak ada pemanfaatan Sumber Geothermal di Kabupaten Kepulauan Selayar
6	Perdagangan						
		97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	3.033 3.033	100 %	Disperindagkop UKM
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ----- x 100% RDKK			
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	226 2.231	10,129 %	Disperindagkop UKM

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
7	Perindustrian						
		100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	$\frac{\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n} - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}} \times 100\%$	1.227 1.227 1.227	0 %	Disperindagkop UKM
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP				Disperindagkop UKM
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	23 15	153,33 %	Disperindagkop UKM
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$			Disperindagkop UKM Surat Pernyataan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p>		<p>Disperindagkop UKM</p> <p>DPMPTSPK</p>	Surat Pernyataan
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	Tidak	30 %	Disperindagkop UKM
				- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	Tidak		Disperindagkop UKM
				- Informasi produksi dan kapasitas produksi	Ya		Disperindagkop UKM
				- Informasi bahan baku dan bahan penolong	Ya		Disperindagkop UKM
				- Informasi bahan bakar/ energy	Tidak		Disperindagkop UKM
				- Informasi tenaga kerja	Ya		Disperindagkop UKM
8	Transmigrasi						

II.2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja Tahun 2020	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan Keuangan						
		1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100 % Jumlah APBD	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan Rp. 10.317.111.808,00 Jumlah APBD Rp. 1.113.374.734.102,00	0.926 %	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		2	Rasio PAD ----- X 100% Jumlah PDRB non migas	Jumlah PAD Rp. 66.359.401.903,37 Jumlah PDRB non migas Rp. 6.392.700.000.000,00	1,03 %	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BPS	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Inspektorat Daerah	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2 Plus	Inspektorat Daerah	

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja Tahun 2020	Sumber Data	Keterangan
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- X 100% jumlah belanja APBD	Rp. 837.105.199.296,70 Rp. 244.357.659.718,00 Rp. 1.010.035.371.653,70	58,68 %	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	- Tahun 2010 = Disclaimer - Tahun 2011 = Disclaimer - Tahun 2012 = Disclaimer - Tahun 2013 = Disclaimer - Tahun 2014 = Disclaimer - Tahun 2015 = WDP - Tahun 2016 = WTP - Tahun 2017 = WTP - Tahun 2018 = WTP - Tahun 2019 = WTP	4	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2	Pengadaan						
		7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n		0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Tidak ada Infrastruktur dengan nilai diatas 50 Milyar

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja Tahun 2020	Sumber Data	Keterangan
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	63 0	0 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- X 100% total belanja langsung	Rp. 74.236.779.445,74 Rp. 78.206.132.617,00	94,92 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
3	Kepegawaian						
		10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----- X 100% Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	1.055 Orang 540 Orang	195,37 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja Tahun 2020	Sumber Data	Keterangan
		11	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100% seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	115 Orang 1.595 Orang	7,21 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	115 Orang 1.480 Orang	7,77 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Manajemen Keuangan						
		13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- X 100% total belanja APBD dikurangi satu	Rp. 1.010.035.371.653,70 Rp. 1.113.374.734.102,00	0 %	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja Tahun 2020	Sumber Data	Keterangan
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	<p>Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi</p> <p>----- X 100%</p> <p>dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu</p>	<p>Rp. 66.359.401.903,73,00</p> <p>Rp. 84.684.347.742,00</p>	0 %	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		15	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	100 %	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya		
				3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya		
				Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya		
		16	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	<p>Nilai realisasi SiLPA</p> <p>----- X 100%</p> <p>total belanja anggaran tahun sebelumnya</p>	<p>Rp. 67.476.955.991,50</p> <p>Rp. 94.041.496.437,40</p>	717,52 %	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja Tahun 2020	Sumber Data	Keterangan
5	Transparansi dan Partisipasi Publik						
		17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- X 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Rp. 1.113.374.734.102,00 Rp. 1.010.035.371.653,70	110,23 %	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- X 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci	12 Dokumen 7 Dokumen	171,42 %	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

II.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA;

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuandan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sangksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”

No.	Misi	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi dan Basis Nilai Utama dalam Pembangunan secara Terencana, Menyeluruh, dan Berkelanjutan	1	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama	Pelaksanaan ibadah	Sangat Baik
				Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	0
II	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui	2	Meningkatnya kualitas pemerintahan	Opini atas laporan keuangan	WTP

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Misi	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan		daerah yang bersih dan akuntabel		
		3	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	(70) BB
				Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Sangat Tinggi (3.0000)
		4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%
		5	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keamanan) di kabupaten	96%
		6	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah	Transmigran lokal (KK)	20
		7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa mandiri	3 desa (16,05)
Persentase desa berkembang	10 desa (58,01)				
Persentase desa tertinggal	0				
III	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat	8	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase angka kemiskinan	4,79
				Jumlah penduduk miskin (KK)	6.165
		9	Meningkatnya daya beli masyarakat	Income per kapita penduduk (Juta)	28,5
		10	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka melek huruf	98,5
				Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	12,54
		11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	67,58
		12	Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	(KB) 99,98 (KS) 96,59
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	27,5				

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Misi	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,75
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,75
		13	Meningkatnya kemandirian pemuda	Persentase pemuda mandiri	100%
		14	Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	15
IV	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata	15	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat	(46%) 320 Bh
				Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut	(15%) 80 Bh
				Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara	(65%) 816 flight
		16	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar	Jalan lingkaran timur utara terbangun (%)	100,00
				Jalan lingkaran timur tengah terbangun (%)	92,30
				Jalan lingkaran timur selatan terbangun (%)	91,55
				Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)	80,00
				Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	(100%) 3 Bh
				Berfungsinya Bandara Kayuadi	(9) Fungsional
				Jumlah Pelabuhan Laut (%)	(85%) 17 Bh
				Perluasan terminal angkutan darat (%)	(81%) 100
				Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)	(100%) 6 Bh
		Rasio jaringan irigasi	80,00		

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Misi	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
				Rasio ketersediaan air baku	95,00
				Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	98,80
				Rasio ketersediaan air bersih industri (%)	100,00
				Rumah layak huni (%)	(93,57%) 1.250 Unit
				Cakupan sanitasi layak (%)	100
				Kawasan pemukiman kumuh tertangani (%)	(80) 220 Ha
				Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	59,15
				Rasio elektrifikasi industri (%)	43,65
				PLTMG terbangun dan beroperasi	Beroperasi
				Terminal gas terbangun dan beroperasi	Beroperasi
Jumlah kunjungan wisatawan asing	(80%) 2.877				
18	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	(45%) 115.000		
		19	Meningkatnya investasi		
Nilai PMA (\$)	10.500.000				
V	Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah	20	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Realisasi pembangunan KEK pariwisata	Ditetapkan
				21	Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Misi	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		22	Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa)	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	20
		23	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (ton)	Padi : (10%) 47.699 Ton
					Jagung : (15%) 18.172 Ton
				Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman holtikultura (ton)	Jeruk keprok : (0,30%) 5.949,75 Ton
				Persentase peningkatan produksi perkebunan (ton)	Kelapa : (5 %) 27.137,161 Ton
					Pala : (0,08 %) 410,40 Ton
					Cengkeh : (0,14%) 395,55
					Jambu mete : (0,09 %) 2.120.40
				Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan (kw/ha)	Padi :73,88 Ku/Ha
					Jagung : 59,21 Ku/Ha
				Tingkat produktivitas pertanian tanaman holtikultura (kw/ha)	Jeruk Keprok : 105,50 Ton
				Tingkat produktivitas perkebunan (kg/ha)	Kelapa : 1.502 Kg/Ha
					Pala : 400 Kg/Ha
					Cengkeh : 450 Kg/Ha
					Jambu Mete : 600 Kg/Ha
			Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali (%)	80 %	
			Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat	80 %	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Misi	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
				pembiakan sapi unggul (%)	
				Persentase peningkatan produksi ternak	Sapi potong : 23.715 ekor (41,53%)
					Sapi perah : 0%
					Kerbau : 4,980 ekor (1,66%)
					Kuda : 4,239 ekor (2,39%)
					Kambing : 95.400 ekor (18,024%)
					Domba : 112 ekor (25,84%)
					Ayam Buras : 278,166 ekor (0,42%)
					Ayam Pedaging : 11,550 ekor (5,75%)
					Ayam ras petelur: 14,295 ekor (5,65%)
					Itik : 8,044 ekor (7,16%)
				Rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	479,16 Ha (27,62%)
				Produksi hasil hutan (m ³)	1.088,80 M3 (148,82%)
				Kerusakan hutan dan lahan (ha)	40.597,48 Ha (-5,09%)
				Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (ton dan %)	(45,63 %) 35.179,12 ton

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Misi	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
				Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (ton dan %)	(16%) 933,14
				Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	(12,82%) 132
				Persentase peningkatan konsumsi ikan (kg/orang/tahun)	(6,17%) 52,5
		24	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam	Indeks Lingkungan Hidup	79
VI	Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan	25	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	40,76
				Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	1.750
		26	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	20.304
VII	Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan	27	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	1.700
				Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	80

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.113.374.734.102,00 (Satu Trilyun Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Dua Rupiah) dengan total realisasi per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.010.035.371.653,70 (Satu trilyun Sepuluh Milyar Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah). Dari perbandingan antara jumlah APBD dengan total realisasi belanja APBD Tahun 2020 maka nampak bahwa pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 103.339.362.448,30 (Seratus Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan

Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Koma Tiga Puluh Rupiah).

B. PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2020 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta masih mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar agar terwujud Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 91	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan kinerja dan target kinerja;
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan;
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan;
4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD terdapat 7 (tujuh) misi, 17 (tujuh belas) tujuan, 27 (dua puluh tujuh) sasaran dan 76 (tujuh puluh enam) indikator kinerja sasaran. Sesuai dengan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor: /III/Setda, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
 Pencapaian Indikator Sasaran

NO.	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKTOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1.	Misi 1	1	1	2	Sangat Tinggi = 2
2.	Misi 2	4	6	9	Tinggi = 1 Sangat Tinggi = 1 Rendah = 1 Sangat Rendah = 6
3.	Misi 3	2	7	12	Sangat Tinggi = 5 Sedang = 1 Sangat Rendah = 6
4.	Misi 4	5	5	28	Sangat Tinggi = 4 Tinggi = 5 Sedang = 2 Rendah = 1 Sangat Rendah = 12 * 4 indikator
5.					Sangat Tinggi = 7 Tinggi = 2

	Misi 5	2	5	20	Sedang = 1 Rendah =3 Sangat Rendah = 4 * 3 indikator
6.	Misi 6	2	2	3	Tinggi = 1 Sangat Rendah = 2
7.	Misi 7	1	1	2	Sangat Tinggi = 1 Tinggi =1

* Kewenangannya dialihkan ke provinsi

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama	1	Pelaksanaan ibadah	Sangat Baik	Baik	100%
		2	Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	0	0	100%
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	1	Opini atas laporan keuangan	WTP	proses	-
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	1	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	(70) BB	CC	%
		2	Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Sangat Tinggi (3.0000)	-	-
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%	81,67	85,97%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
5	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keamanan) di kabupaten	96%	100%	104,16%
6	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah	1	Transmigran lokal (KK)	20	0	0%
7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	1	Persentase desa mandiri	3 desa (16,05)	(0)	0
		2	Persentase desa berkembang	10 desa (58,01)	5 Desa (50)	50%
		3	Persentase desa tertinggal	0	34 Desa (41,97)	41,97%
8	Berkurangnya penduduk miskin	1	Persentase angka kemiskinan	4,79	11,47%	41,76%
		2	Jumlah penduduk miskin (KK)	6.165	16.119 kk	38,25%
9	Meningkatnya daya beli masyarakat	1	Income per kapita penduduk (Juta)	28,5	26,45	92,81%
10	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1	Angka melek huruf	98,5	98,20	99,69%
		2	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	12,54	12,40	99%
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup	67,58	68,46	101,30%
12	Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan	1	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	(KB) 99,98 (KS) 96,59	(KB) 69,86 (KS) -	(KB) 69,87% (KS) -
		2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	27,5	-	%
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,75	-	%
		4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,75	-	%
13	Meningkatnya kemandirian pemuda	1	Persentase pemuda mandiri	100%	92,45%	92,45%
14	Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat	1	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	15	0	0%
15	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan	1	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas	(46%) 320 Bh	(25,11%)	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Selayar		melalui moda transportasi darat		173	54,5 9%
		2	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut	(15%) 80 Bh	(13,44%) 70	89,6%
		3	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara	(65%) 816 flight	(7,17%) 262	11,03%
16	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar	1	Jalan lingkaran timur utara terbangun (%)	100,00	19,80	19,80%
		2	Jalan lingkaran timur tengah terbangun (%)	92,30	78,45	84,99%
		3	Jalan lingkaran timur selatan Terbangun (%)	91,55	60,46	66,04%
		4	Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)	80,00	69,72	87,15
		5	Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	(100%) 3 Bh	100%	100%
		6	Berfungsinya Bandara Kayuadi	(9) Fungsional	fungsiional	0%
		7	Jumlah Pelabuhan Laut (%)	(85%) 17 Bh	35% 7 bh	41,18%
		8	Perluasan terminal angkutan darat (%)	(81%) 100	28,90% 50	35,68%
		9	Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)	(100%) 6 Bh	50% 3 bh	50%
		10	Rasio jaringan irigasi	80,00	91,87	114,84
		11	Rasio ketersediaan air baku	95,00	81,33	85,61
		12	Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	98,80	75,26	76,17
		13	Rasio ketersediaan air bersih industri (%)	100,00	0	0
		14	Rumah layak huni (%)	(93,57%) 1.250 Unit	556	44,48%
		15	Cakupan sanitasi layak (%)	100	74,79	74,79%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		16	Kawasan pemukiman kumuh tertangani (%)	(80) 220 Ha	0,02 Ha	0,01%
		17	Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	59,15	-	-
		18	Rasio elektrifikasi industri (%)	43,65	-	-
		19	PLTMG terbangun dan beroperasi	Beroperasi	-	-
		20	Terminal gas terbangun dan beroperasi	Beroperasi	-	-
17	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	1	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	(50%) 21.427	5.734	26,76%
		2	Jumlah kunjungan wisatawan asing	(80%) 2.877	155	5,38%
18	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	1	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	(45%) 115.000	9,37% 23.977	20,81%
19	Meningkatnya investasi	1	Nilai PMDN (Rp)	56.605.136.000	845.080.677.261	1.492,93%
		2	Nilai PMA (\$)	10.500.000	31.332.437	298,40%
20	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	1	Realisasi pembangunan KEK pariwisata	Ditetapkan	Belum ditetapkan	0%
21	Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang	1	Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	60	48	80%
22	Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa)	1	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	20	19	95%
23	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	1	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (ton)	Padi : (10%) 47.699 Ton	26.797,49 Ton	56,18%
				Jagung : (15%) 18.172 Ton	5.144,72 Ton	28,31%
		2	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman hortikultura (ton)	Jeruk keprok : (0,30%) 5.949,75 Ton	3.228,8Ton	54,27%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	
		3	Persentase peningkatan produksi perkebunan (ton)	Kelapa : (5 %) 27.137,161 Ton	23.981,90 Ton	88,37%
				Pala : (0,08 %) 410,40 Ton	400,34 Ton	97,55%
				Cengkeh : (0,14%) 395,55	491,24 Ton	124,19%
				Jambu mete : (0,09 %) 2.120.40	2.020,42 Ton	95,28%
		4	Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan (kw/ha)	Padi :73,88 Ku/Ha	67,28 Ku/Ha	91,07%
				Jagung : 59,21 Ku/Ha	59,20 Ku/Ha	99,98%
		5	Tingkat produktivitas pertanian tanaman hortikultura (kw/ha)	Jeruk Keprok : 105,50 Ton	72,06 Ku/Ha	68,30%
		6	Tingkat produktivitas perkebunan (kg/ha)	Kelapa : 1.502 Kg/Ha	1.056,43 Kg/Ha	70,33%
				Pala : 400 Kg/Ha	140,50 Kg/Ha	35,13%
				Cengkeh : 450 Kg/Ha	490,43 Kg/Ha	108,98%
				Jambu Mete : 600 Kg/Ha	183,50 Kg/Ha	30,58%
				7	Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali (%)	80 %
8	Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi unggul (%)					80 %
9	Persentase peningkatan produksi ternak			Sapi potong : 23.715 ekor (41,53%)	23.528 ekor	100,60%
				Sapi perah : 0%	0	0%
			Kerbau : 4,980 ekor (1,66%)	4.974 ekor	98,96%	
			Kuda : 4,239 ekor	4.293 ekor	99,23%	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
				(2,39%)		
				Kambing : 95.400 ekor (18,024%)	97.204ekor	101.89%
				Domba : 112 ekor (25,84%)	32 ekor	28,57%
				Ayam Buras : 278,166 ekor (0,42%)	425.185 ekor	152,85%
				Ayam Pedaging : 11,550 ekor (5,75%)	20.818 ekor	180.24%
				Ayam ras petelur: 14,295 ekor (5,65%)	15.116 ekor	105,74%
				Itik : 8,044 ekor (7,16%)	17.521 ekor	217,81%
		10	Rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	479,16 Ha (27,62%)	-	-
		11	Produksi hasil hutan (m ³)	1.088,80 M3 (148,82%)	-	-
		12	Kerusakan hutan dan lahan (ha)	40.597,48 Ha (-5,09%)	-	-
		13	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	(45,63 %) 35.179,12 ton	18.729,12 ton	53,24%
		14	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	(16%) 933,14	837,36	89,74%
		15	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	(12,82%) 132	237	127,50%
		16	Persentase peningkatan konsumsi ikan (kg/orang/tahun)	(6,17%) 52,5	63,02	120,03%
24	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam	1	Indeks Lingkungan Hidup	79	74,28	93,40%

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
25	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	1	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	40,76	35,22	86,40%
		2	Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	1.750	292	16,68%
26	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan	1	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	20.304	4.012 (UMKM) 136 (Koperasi)	20,43 %
27	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar	1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	1.700	9.750	573,52%
		2	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	80	64	80%

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Target Kinerja dalam RPJMD Sama Dengan Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Perjanjian Kinerja, Karena Pada Dasarnya Yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Kinerja Adalah Yang Termuat Dalam RPJMD.

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG Mendukung Pencapaian Target Kinerja.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Aktivitas Keagamaan dan Kesalehan Sosial serta Toleransi Antar Umat Beragama

Sasaran strategis 1 ini merupakan upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi dan Basis Nilai Utama dalam Pembangunan secara Terencana, Menyeluruh, dan Berkelanjutan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **100%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelaksanaan ibadah	Baik	Baik	100%	Baik	Baik	100%
2	Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	0	0	100%	0	0	100%
Rata-rata Capaian Kinerja				100%	Rata-rata Capaian Kinerja		100%

1. Pelaksanaan Ibadah

Kerukunan umat beragama merupakan hubungan umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati,

saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya, dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah telah melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan Ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. Sesuai dengan tingkatannya, Forum Kerukunan Umat Beragama telah terbentuk di Kabupaten Kepulauan Selayar, melalui hubungan yang bersifat konsultatif dengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan. Dukungan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut diantaranya adalah terciptanya pemahaman bagi masyarakat tentang masalah nilai-nilai keagamaan, terbangunnya sarana dan prasarana ibadah, pengelolaan pendidikan al quran dalam hal ini penyediaan tenaga pendidik yang penempatannya secara merata di setiap sekolah, pelaksanaan zikir dan doa akhir tahun berjalan sesuai yang diharapkan meskipun dalam kondisi pandemi covid 19 .

2. Jumlah Insiden dalam Hubungan Antar Umat Beragama

Untuk mencapai indikator kinerja ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan tujuan agar seluruh umat beragama dapat saling menghargai dan menghormati didalam pelaksanaan kegiatan keagamaan masing-masing sehingga diharapkan tidak terjadi konflik antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun unsur-unsur keagamaan yang tergabung ke dalam Forum Kerukunan Umat beragama ini adalah unsur MUI, NU, Muhammadiyah, Protestan, Katholik , Hindu, Budha dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Disamping itu FKUB juga melaksanakan kegiatan monitoring, pertemuan, silaturahmi antar pengurus dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan toleransi umat beragama lainnya. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Selain itu dilaksanakan juga kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan dengan tujuan agar seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang multi etnik dapat terjalin ikatan sosial di masyarakat di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan diadakannya Forum Kerukunan Umat Beragama ini diharapkan tidak terjadi konflik antar umat beragama dan antar etnis di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun unsur-unsur etnis yang tergabung ke dalam Forum Pembauran Kebangsaan ini adalah unsur Kerukunan Keluarga Bone, Kerukunan Keluarga Bulukumba, Kerukunan Keluarga Mandar, Kerukunan Keluarga Toraja, Kerukunan Keluarga Wajo, Kerukunan Keluarga Jawa, Kerukunan Keluarga Bima, Kerukunan Keluarga Jeneponto, Kerukunan Keluarga Pinrang, Kerukunan Keluarga Takalar dan Kerukunan Keluarga Tionghoa.

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena ;

- a) Efektivitas sosialisasi ketokoh lintas agama dan etnis;
- b) Kesadaran terbentuknya Forum yang menjembatani kepentingan lintas agama dan etnis.
- c) Koordinasi antara Tokoh Lintas agama dan etnis dengan SKPD yang semakin Intesitas;
- d) Kesadaran para warga masyarakat dan banyak belajar pada daerah-daerah lain di Indonesia dalam penanganan konflik antar Suku, Ras maupun Agama.

Dengan keberhasilan pembentukan forum tersebut diharapkan:

- 1) Terjaganya dan terpeliharanya kerukunan antar umat beragama

- 2) Terciptanya keharmonisan antar umat beragama.
- 3) Terwujudnya kerukunan antar umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dalam menjalankan ajaran agamanya serta tolong menolong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Menghimpun aspirasi, menyalurkan dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait kebijakan dalam menciptakan kerukunan umat beragama.
- 5) Saling tukar menukar informasi dalam hal meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

Selain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mendukung indikator tersebut melaksanakan kegiatan pengamanan hari-hari besar keagamaan dan melakukan patroli ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan secara terpadu bersama TNI dan POLRI.

Tabel 2.6

Menciptakan kondisi stabilitas keamanan daerah yang kondusif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penurunan Angka Kriminalitas	305	171	143,93%
Jumlah Insiden dalam hubungan antar umat beragama	0%	0 %	100%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2020

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan**

Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan”. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh seluruh SKPD. Untuk mengukur sasaran kedua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dan hasil pengukuran peningkatan kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini atas laporan keuangan	WTP	Proses	WTP	WTP	proses	-
Rata-rata Capaian Kinerja				100%	Rata-rata Capaian Kinerja		-

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sementara ini masih dalam proses audit oleh Team Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga untuk indikator ini belum ada realisasi capaian kinerja.

Namun berdasarkan Hasil Resume LHP BPK, terdapat 12 entitas dari 57 entitas atau 21,05% entitas memiliki temuan BPK RI dan 45 entitas atau 78,95% entitas telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dari 98% yang ditargetkan oleh Inspektorat Daerah untuk indikator Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersaji sesuai SAP, pada Tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 78,95% dengan persentase capaian sekitar 80,56%.

Tabel 2.8
Peningkatan Realisasi Kinerja dari 2017 s.d 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2018 (LK 2017)	2019 (LK 2018)	2020 (LK 2019)	2021 (LK 2020)
Persentasi Laporan Keuangan perangkat daerah yang tersaji sesuai SAP	80%	82,45%	82,45%	80,56

Sumber: Inspektorat Daerah 2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 yang memuat opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dengan Nomor: 30.A/LHP/XIX.MKS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 30.B/LHP/XIX.MKS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 serta Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 30.C/LHP/XIX.MKS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020. Jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, pencapaian tersebut juga menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Tabel 2.9

Opini Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2016 s.d. 2019

No	Uraian	TAHUN 2016 (LKPD 2015)	TAHUN 2017 (LKPD 2016)	TAHUN 2018 (LKPD 2017)	TAHUN 2019 (LKPD 2018)	TAHUN 2020 (LKPD 2019)
-	Opini BPK atas LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Daerah 2020

Telah banyak upaya yang dilakukan, baik oleh Inspektorat melalui APIP Inspektorat maupun dalam bentuk kerjasama dengan KPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Peran APIP dalam melaksanakan pengawasan adalah sebagai *Quality Assurance, Consulting Partner* dan *Catalyst*

yang diimplementasikan melalui kegiatan pemeriksaan regular dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang mengacu kepada isu strategis yang ada pada saat itu, selain itu dilaksanakan program-program Pendampingan, Reviu dan Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan OPD.

Selanjutnya, untuk mengatasi adanya kelemahan-kelemahan yang menjadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan realisasi kinerja, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar kedepannya melaksanakan beberapa kebijakan, diantaranya:

1. Meningkatkan peran pengawasan secara optimal dan berkualitas, agar OPD dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan fasilitas koordinasi yang lebih intensif antara fungsi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program/kegiatan;
3. Meningkatkan komunikasi antar OPD dalam menyusun rencana aksi atas tindak lanjut temuan BPK dan memaksimalkan pendampingan penanganan Tindak Lanjut terhadap temuan tersebut berdasarkan rekomendasi BPK RI.

Sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah juga telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Keberhasilan pencapaian opini WTP atas LKD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, juga tak lepas dari dukungan:

1. Adanya peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam

pengelolaan keuangan daerah.

- Adanya upaya seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kualitas LK-OPD-nya masing-masing.

Selain itu pemerintah juga terus berusaha memperbaiki kelemahan baik pada sistem pengendalian Intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta berupaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh seluruh SKPD. Untuk mengukur sasaran ketiga ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran pada Tahun 2020. Hasil pengukuran peningkatan kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	BB (70,00)	CC (58,85)	84,07%	BB (70,00)	proses	%
2	Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Sangat Tinggi (3.0000)	Tinggi (3.0094)	100,31%	Sangat Tinggi (3.0000)	proses	%
Rata-rata Capaian Kinerja				92,19%	Rata-rata Capaian Kinerja		%

1. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

Hasil penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2019 adalah 58,85 dengan predikat “CC”. Sedangkan untuk Tahun 2020 penilaian akuntabilitas masih dalam tahap proses penilaian. Jika melihat hasil penilaian akuntabilitas tahun 2019 menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum berjalan dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat beberapa faktor yang harus ditindak lanjuti antara lain:

- a. Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil/outcome berupa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat;
- b. Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih andal;
- c. Memperbaiki penjabaran perencanaan kinerja (*cascade down*) dari level pemerintah daerah kepada OPD hingga level individu. Hasil penyempurnaan tersebut ditindaklanjuti dengan perbaikan pada Renstra OPD, program/kegiatan dan anggarannya, serta perjanjian kinerja individu untuk memastikan bahwa kinerja seluruh pegawai dan penggunaan anggaran daerah hanya untuk mencapai sasaran strategis daerah;
- d. Menyusun rencana aksi setiap OPD sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja OPD dengan target kinerja secara periodik/triwulan yang kemudian dimonitoring dan evaluasi secara

- berkala. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi agar lebih optimal;
- e. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan kinerja di periode yang akan datang;
 - f. Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja OPD serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan SAKIP yang berkelanjutan terhadap masing-masing OPD.

Tabel 2.11
 Perkembangan capaian Nilai SAKIP Kab. Kep. Selayar
 Tahun 2015 - 2020

Indikator	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	C 43,50	CC 50,48	CC 55,00	CC 58,21	CC 58,85	proses

Sumber: Bappelitbangda 2020

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 menunjukkan adanya perkembangan dari tahun ketahun namun belum sesuai dengan target yang diinginkan. Pada Tahun 2020 ini capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih dalam proses penilaian. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain:

1. Internal Birokrasi:
 - a. Masih lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD dengan kegiatan-kegiatan yang *project error*;
 - b. Masih rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan;
 - c. Masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).
2. Internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah:
 - a. Belum mampu menyediakan *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan yang baik, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
 - b. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Adapun alternatif strategi yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparatur perencana, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang perencanaan;
2. Melaksanakan penyusunan perencanaan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
3. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Kepala Daerah dan bekerja sama dengan SKPD atau pihak yang terkait;
4. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerja sama.

5. Diperlukan adanya koordinasi yang menyeluruh agar pada tahun mendatang target dapat dicapai.

Pencapaian indikator ini didukung oleh semua perangkat daerah melalui kegiatan penyusunan LAKIP SKPD, Asistensi LAKIP SKPD, dan program Pengembangan Indikator dan Capaian Kinerja Individu, Kegiatan dan Program SKPD.

2. Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahun melaksanakan Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebagai salah satu alat untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menempati peringkat 176 untuk skala nasional dengan Skor sebesar 3.0335 dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi** sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional. Sedangkan pada Tahun 2018, skor EKPPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan menjadi 2.8555 dan menempati peringkat 199 untuk skala nasional dengan predikat kinerja **Tinggi** sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 - 8840 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional.

Secara umum, nilai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat itu mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Hanya saja terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengalami penurunan disebabkan oleh meningkatnya penilaian terhadap indikator tersebut. Penilaian EKPPD bukan hanya administrasi semata, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan penggalian potensi sumber ekonomi untuk memajukan daerah sekaligus mensejahterakan rakyat. Nilai EKPPD selain sebagai tolok ukur, juga merupakan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun mendatang. Untuk itu diharapkan kepada seluruh instansi agar

melakukan berbagai perbaikan serta menjadikan EKPPD sebagai pedoman kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Untuk hasil EKPPD Tahun 2019, skor EKPPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kenaikan menjadi 3.0094 dan menempati peringkat 21 untuk provinsi Sulawesi Selatan dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi** (Sumber data: Bimtek EKPPD Februari 2020). Nilai tersebut diperoleh setelah sebelumnya melalui beberapa kali proses validasi sesuai mekanisme EKPPD terhadap LPPD kabupaten/kota. Evaluasi LPPD diawali dengan pelaksanaan validasi oleh Tim Teknis Daerah yang beranggotakan Tim dari Inspektorat Provinsi dan Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang kemudian disusul dengan pelaksanaan validasi terhadap hasil evaluasi Tim Daerah atas hasil monitoring dan kertas kerja evaluasi kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Nasional LPPD.

Pada Tahun 2020 ini, skor EKPPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih proses menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tabel 2.12
 Perkembangan Capaian Nilai EKPPD

Indikator	Tahun 2017 (LPPD 2016)	Tahun 2018 (LPPD 2017)	Tahun 2019 (LPPD 2018)	Tahun 2020 (LPPD 2019)
Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	3.0335	2.8555	3.0094	Proses

Sumber: Bappelitbangda 2020

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan bimtek/diklat/workshop;
2. Kerjasama yang baik antar SKPD dalam pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan memperbaiki nilai capaian yang masih dibawah standar minimal.

3. Dukungan yang kuat dari para kepala SKPD.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas pariwisata serta Dinas Perikanan dan Kelautan. Untuk mengukur sasaran keempat ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **85,97%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	89,25%	99,17%	95%	81,67 %	85,97%
Rata-rata Capaian Kinerja				99,17%	Rata-rata Capaian Kinerja		85,97%

Indeks Kepuasan masyarakat pada pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang diukur melalui upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap penerima layanan pada Tahun 2020 memiliki nilai realisasi sekitar 81,67% dari 95% yang ditargetkan dengan persentase capaian kinerja sekitar 85,97%. Jika

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 89,25% dari target 90% yang ditetapkan, maka capaian kinerja ini mengalami penurunan sekitar 13,2% tetapi masih dikategorikan dengan predikat sangat baik, hal tersebut disebabkan karena bencana pandemi *Corona Virus 2019* yang mengharuskan pelayanan menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan yang belum terbiasa oleh masyarakat mengganggu sistem pelayanan cenderung mempersulit pengguna layanan.

Sasaran Strategis 5

Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk mengukur sasaran kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **104,17%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keamanan) di kabupaten	95%	100%	105,26%	96 %	100%	104,17%
Rata-rata Capaian Kinerja				105,26%	Rata-rata Capaian Kinerja		104,17%

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) adalah jumlah kasus pelanggaran K3 yang dapat diselesaikan pada tahun tersebut. Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 merupakan perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dari hasil operasi terkait, dikali 100 %. Pada Tahun 2020, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 110 berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan keseluruhannya telah diselesaikan dengan baik. Jumlah kasus tersebut mengalami penurunan dibanding Tahun 2019 yang mencapai 118 kasus pelanggaran K3.

Tabel 2.14

Data Angka Kriminalitas Tahun 2014 – 2020

NO.	Jenis Kejahatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Narkoba	20	15	0	0	10
2	Pengrusakan	18	18	11	8	1
3	Penyerobotan Tanah	18	10	17	11	3
4	Senjata Tajam	2	2	1	1	2
5	Penodongan	0	0	0	0	0
6	Minuman keras	0	3	0	0	0
7	Perkelahian	0	0	0	1	0
8	Pemerasan	0	0	1	1	1
9	Penculikan	0	0	0	0	0
10	Curanmor	7	5	9	3	1
11	Pencurian Ternak	4	0	0	1	1
12	Pencurian Berat	1	0	1	2	1
13	Pencurian biasa	32	30	11	47	23
14	Penganiayaan	41	37	24	21	37
15	Penipuan	40	30	27	17	4
16	Pembakaran	-	0	0	0	0
17	Pengeroyokan	5	0	9	6	9
18	Kesusilaan	5	3	3	1	4
19	Pencabulan	13	3	6	1	6
20	Perjudian	1	3	1	2	3
21	Pemerksaan	2	0	1	2	2
22	Penyalahgunaan BBM	-	0	0	2	2
23	Percobaan Pemerksaan	-	0	2	1	0

NO.	Jenis Kejahatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
24	Senpi Ilegal / Rakitan	-	0	0	0	0
25	Korupsi	2	2	3	2	0
	Jumlah	211	161	127	130	110

Sumber : Satpol.PP Kab. Kepulauan Selayar 2020

Tabel 2.15
 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

NO.	URAIAN	TAHUN	
		2019	2020
1.	Jumlah Pelanggaran K3 (kasus)	118	108
2.	Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan (kasus)	118	108
3.	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100 %	100 %

Sumber: Satpol.PP Kab. Kepulauan Selayar 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut diatas antara lain pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini merupakan pembentukan forum – forum kewaspadaan dini masyarakat di seluruh tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan yang diketuai oleh Bupati Kepulauan Selayar dengan unsur - unsur keanggotaan yang terlibat dalam Tim ini adalah unsur Kepala Perangkat Daerah dan para camat se Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah yang dilaksanakan guna mengidentifikasi masalah Ipoleksosbud Hankam melalui pengumpulan bahan keterangan di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan setiap bulannya melalui kegiatan rapat koordinasi dan melakukan rapat konsultasi/evaluasi bersama dengan unsur-unsur intelijen daerah yang dibentuk pada 11 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah melaksanakan koordinasi dengan melakukan rapat/pertemuan membahas agenda permasalahan yang

merupakan isu sentral di kalangan masyarakat serta melakukan pengkajian dan evaluasi perkembangan situasi aktual daerah dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Selain itu dilaksanakan pula kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Orang asing yang dilaksanakan melalui rapat – rapat koordinasi, monitoring dan konsultasi serta pengolahan informasi tentang kegiatan orang asing yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing yang dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol dengan jumlah anggota sebanyak 26 orang terdiri dari unsur Intelijen Polres Kepulauan Selayar, Intelijen dari Kodim 1415 Kepulauan Selayar, para camat dan unsur dari ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Makassar.

Dilaksanakan pula kegiatan Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskominfo) bidang Sosial Kemasyarakatan Bakesbangpol yang merupakan sarana pengumpulan data dan informasi yang berkembang di masyarakat terutama dalam bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Pertahanan Keamanan. Data dan informasi yang dihimpun merupakan data dari kecamatan – kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk menghimpun data yang ada di kecamatan, maka camat akan merekrut anggota intelijen dari unsur masyarakat yang ada di kecamatan atau di desa minimal 2 (dua) orang per desa yang akan diberikan pembekalan tentang dasar-dasar intelijen sehingga penyebaran informasi cepat dan akurat.

Terdapat pula kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan yang dilaksanakan di 5 Kecamatan Kepulauan dengan tujuan untuk memantau situasi dan kondisi keamanan menjelang pemilihan Bupati, disamping itu diadakan silaturahmi dengan aparat pemerintah setempat dan Babinsa, Bhabinkamtibmas serta tokoh masyarakat setempat.

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Permendagri nomor 61 tahun 2011 tentang

Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah. Kegiatan pemantauan perkembangan politik dilakukan terhadap :

1. Pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
4. Situasi Politik lainnya dan
5. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Selain Badan Kesatuan Bangsa turut memegang peranan penting pula program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain pelaksanaan program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum, Program Pemberantasan Peredaran Cukai Rokok Illegal, Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Kebakaran, serta Program Penanggulangan Kebakaran.

Menurunnya angka kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Adanya forum-forum strategis yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mengantisipasi

setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi antara Kesbangpol dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Adanya rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di daerah yang difokuskan kepada kasus-kasus sosial yang ada di masing-masing daerah demi menjaga kondusifitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.
4. Koordinasi yang baik dari masing-masing instansi yang membidangi antara lain Satpol PP, Kantor Kementerian Agama, Kodim 1415, Kantor Kesbangpol, dan Kepolisian.
5. Keterbukaan pada masing-masing sekolah untuk mengatasi masalah kenakalan remaja, Miras dan narkoba serta illegal fishing.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Transmigrasi Lokal Berdasarkan Kebutuhan Daerah

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan**”. Untuk mengukur sasaran keenam ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar 0 % dengan kategori predikat **Sangat Rendah**. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hasil pengukuran peningkatan pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Transmigran lokal (KK)	20	0	0%	20	0	0%
Rata-rata Capaian Kinerja				0%	Rata-rata Capaian Kinerja		0%

Jumlah transmigrasi lokal yang ditargetkan dalam RPJMD untuk Tahun 2020 sebanyak 20 KK, target yang sama dengan Tahun 2019. Namun realisasi capaian untuk indikator transmigrasi lokal tidak terealisasi karena pada dasarnya di Kabupaten Kepulauan Selayar belum ada Kawasan transmigrasi yang nantinya akan di tetapkan sebagai kawasan pedesaan dalam menampung warga transmigran lokal. Pada tahun 2020 kegiatan program transmigrasi tidak dapat terlaksana disebabkan adanya pandemi covid -19 yang mengakibatkan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan sehingga sampai akhir tahun 2020 masih sampai pada tahap koordinasi dalam rangka pembebasan lahan. Akan tetapi tidak berlanjut karena pemilik lahan tidak setuju lahannya dijadikan lokasi. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam usaha pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Adanya pandemi covid 2019 yang mengakibatkan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan.
2. Adanya pernyataan tidak setuju dari pemilik lahan yang akan menjadikan lahannya sebagai lokasi transmigrasi.

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sasaran strategis 7 ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat. Untuk mengukur sasaran ketujuh ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **30,66%** dengan kategori predikat **Sangat Rendah**. Hasil pengukuran peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase desa mandiri	1 desa (12,35)	1 desa (12,35)	100%	3 desa (16,05)	(0)	0
2	Persentase desa berkembang	6 desa (45,68)	6 desa (45,68)	100%	10 desa (58,01)	5 desa (50)	50%
3	Persentase desa tertinggal	0	0	100%	0	34 Desa (41,97)	41,97%
Rata-rata Capaian Kinerja				100 %	Rata-rata Capaian Kinerja		30,66%

1. Persentase desa mandiri

Suatu Desa dikatakan Desa Mandiri apabila sudah memiliki sarana dan prasana yang memadai (pendidikan, perkantoran, kesehatan, tempat ibadah serta akses jalan dan komunikasi), terjadinya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, sumber daya alamnya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, memiliki kemampuan untuk menunjang pembangunan dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Dari total 81 desa di Kabupaten Kepulauan Selayar, pada Tahun 2019 terdapat 1 desa yang menjadi kategori desa mandiri yaitu Desa Polebung, terletak di

Kecamatan Bontomanai dengan skor IPD (Indeks Pembangunan Desa) Tahun 2019 sebesar 75,56 % dari nilai skor Tahun 2018 sebesar 74,98. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan 0,58 % dari tahun sebelumnya yaitu pada dimensi kondisi infrastruktur pada infrastruktur air bersih dan sanitasi dan dimensi aksesibilitas transportasi.

Namun pada tahun 2020, tidak lagi terdapat desa mandiri. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 Indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang merupakan gambaran tingkat kemajuan desa dalam suatu waktu pada wilayah tertentu dengan pengklasifikasian yang terbagi dalam 3 bagian yaitu Desa Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Mandiri. Sedangkan pada Tahun 2020 indeks yang digunakan tidak lagi IPD melainkan IDM (Indeks Desa Membangun) dimana pengklasifikasian desa dibagi dalam 5 status desa yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Kedua indeks tersebut (IPD dan IDM) sama-sama dibangun dengan satu data dasar, yaitu potensi desa, dan berdasar pada UU No. 6 tentang Desa, ditambah beberapa literatur pembangunan desa. Perbedaan dari kedua indeks tersebut terdapat pada metode perhitungan indeks dan interpretasi hasil perhitungan indeks, yang pada akhirnya berdampak pada klasifikasi desa. Dalam IPD, desa dengan skor indeks kurang dari sama dengan 50 tergolong tertinggal, bila antara 50 sampai 75 tergolong berkembang, dan bila di atas 75 tergolong mandiri.

Berbeda dengan IDM yang menggolongkan desa dengan skor kurang dari sama dengan 0.491 sangat tertinggal, antara 0.491 sampai 0.599 tertinggal, antara 0.599 sampai 0.707 berkembang, antara 0.707 sampai 0.815 maju, dan lebih dari 0.815 mandiri. Klasifikasi yang berbeda antara IPD dan IDM ini, berdampak terhadap hasil nasional dan juga Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menurut IPD mayoritas desa nasional pada tahap berkembang sementara menurut IDM mayoritas desa nasional masih pada tahap tertinggal dan sangat tertinggal. Sehingga pada tahun 2020 tidak terdapat desa dengan status

mandiri, dan terdapat 34 desa dengan status tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Persentase desa berkembang

Desa Berkembang adalah desa yang sudah terpenuhi SPM desa pada semua aspek tetapi pengelolaannya belum menunjukkan keberlanjutan. Pada desa berkembang ini sudah terjadi perkembangan baik dari segi mata pencaharian yang sudah beragam, adat istiadat yang sudah mengalami perubahan, pengaruh dari luar sudah masuk sehingga terjadi perubahan cara berfikir, gotong royong membangun desa sudah meningkat, lapangan kerja bertambah, masyarakat telah mampu meningkatkan taraf kehidupannya sehingga bantuan pemerintah hanya sebagai perangsang saja.

Jumlah desa berkembang pada tahun 2020 sebanyak 41 desa, sama dengan tahun sebelumnya. Namun terdapat 5 desa yang meningkat status Indeks Desa Membangun-nya (IDM), dari status desa tertinggal menjadi desa berkembang. Target peningkatan jumlah desa berkembang tahun 2020 sebesar 10 desa, dan realisasi 5 desa atau sebesar 50 % dari target yang ditetapkan. 5 desa dimaksud yaitu :

1. Desa Parak, terletak di Kecamatan Bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2019 sebesar 0,5621 dan pada tahun 2020 menjadi 0,6460, terjadi peningkatan nilai IDM sebesar 0,0839 dari tahun sebelumnya dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social dan indeks ketahanan ekonomi.
2. Desa Laiyolo Baru, terletak di Kecamatan Bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2019 sebesar 0,5854 dan pada tahun 2020 menjadi 0,6841, terjadi peningkatan nilai IDM sebesar 0,0987 dari tahun sebelumnya dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan.
3. Desa Binanga Sombaiya, terletak di Kecamatan Bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2019

sebesar 0,5632 dan pada tahun 2020 menjadi 0,6422, terjadi peningkatan nilai IDM sebesar 0,079 dari tahun sebelumnya dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social, dan indeks ketahanan ekonomi.

4. Desa Appatanah, terletak di Kecamatan Bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2019 sebesar 0,5068 dan pada tahun 2020 menjadi 0,6024, terjadi peningkatan nilai IDM sebesar 0,0956 dari tahun sebelumnya dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan.
5. Desa Bonea, terletak di Kecamatan Pasimarannu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2019 sebesar 0,5933 dan pada tahun 2020 menjadi 0,5992, terjadi peningkatan nilai IDM sebesar 0,0059 dari tahun sebelumnya dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan sosial.

a. Persentase desa tertinggal

Desa tertinggal adalah desa dimana pendidikan masyarakat masih rendah, sebagian besar penduduk hidup bertani, daerahnya bergunung-gunung atau daerah perbukitan, lembaga-lembaga yang ada masih sangat sederhana, kegiatan penduduk dipengaruhi oleh alam, kegiatan ekonomi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sendiri, lokasi desa terpencil dan masyarakatnya masih cenderung tertutup. Dari total 81 desa di Kabupaten Kepulauan Selayar, pada Tahun 2019 tidak terdapat lagi desa yang masuk kategori desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada Tahun 2020 berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat 34 (Tiga Puluh Empat) desa dengan status IDM Desa tertinggal, terjadi penurunan sebesar 3,7 % dibanding tahun sebelumnya yakni sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) desa dengan status IDM Desa tertinggal pada tahun 2019.

Khusus untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berbagai

program dan kegiatan telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2020 antara lain:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - a. Pelatihan LPM dan KPMD,
Adapun hasil yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu terlaksananya pelatihan LPM dan KPMD dengan sasaran 41 orang, namun karena adanya realokasi anggaran dan refocusing program kegiatan karena adanya Pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan ini hanya sampai pada tahap koordinasi.
 - b. Penataan lembaga adat istiadat Masyarakat Perdesaan Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini hanya sampai pada tahap koordinasi.
 - c. Pembinaan dan sosialisasi peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini hanya sampai pada tahap koordinasi.
 - d. Bulan bhakti gotong royong masyarakat.
Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini hanya sampai pada tahap koordinasi.
 - e. Pembinaan kelembagaan Baruga Sayang.
Adapun hasil yang dicapai yaitu terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Baruga Sayang.
 - f. Identifikasi Kearifan Lokal desa.
Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya data Kearifan Lokal.
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan kegiatan “Bimtek Manajemen Pengelolaan BUMDES”.
Adapun hasil yang dicapai meningkatnya kapasitas 45 orang pengelola BUMDES (Persentase BUMDES aktif sebesar 43,59% dari 78 BUMDES yang ada)
3. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
 - a. Penunjang operasional PKK Kabupaten.
Adapun hasil yang dicapai yaitu terwujudnya

- pelaksanaan/operasional PKK kabupaten selama 1 Tahun berjalan.
- b. Pembinaan Kelompok Dasawisma.
Adapun hasil yang dicapai terbinanya Kelompok Dasawisma sebanyak 10 Desa.
 - c. Pelatihan Kader Posyandu.
Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini hanya sampai pada tahap koordinasi.
 - d. Pengurus Karang Taruna.
Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini hanya sampai pada tahap koordinasi.
4. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna, kegiatan Monitoring/Pembinaan terhadap Pengrajin Teknologi Tepat Guna. Adapun hasil yang dicapai yakni terbinanya Pengrajin TTG sebanyak 10 Kelompok.
 5. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Pembinaan Administrasi Desa. Adapun output dari kegiatan ini adalah Administrasi Desa tertata dengan baik tertib dan akuntabel di 22 Desa.
 6. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemerintah Desa. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemerintahan Desa sebanyak 11 Peraturan Bupati.
 - 1) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020.
 - 2) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - 3) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020;
 - 4) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2020

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020;

- 5) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar T.A. 2020;
 - 6) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi;
 - 7) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020;
 - 8) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar T.A. 2020;
 - 9) Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 10) Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021;
 - 11) Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar T.A. 2021;
7. Pengendalian APBDesa.
Adapun hasil yang dicapai adalah terwujudnya pengawasan pengelolaan APBDesa di 81 Desa.
8. Evaluasi Penyusunan Pertanggungjawaban APBDesa Adapun hasil yang dicapai yaitu terwujudnya laporan pertanggungjawaban APBDesa yang tepat waktu dan akuntabel di 81 Desa

9. Verifikasi Data Pemerintah Desa.

Adapun output dari kegiatan ini adalah terverifikasinya data pemerintahan desa di 81 Desa.

10. Evaluasi Penyusunan APBDesa.

Adapun hasil yang dicapai yaitu terwujudnya penyusunan APBDesa yang tepat waktu dan akuntabel di 81 Desa.

11. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa.

Adapun hasil yang dicapai yaitu meningkatnya kemampuan dan kapasitas Tugas Pendamping Desa dalam 12 Bulan berjalan.

12. Evaluasi Penyusunan APBDesa Perubahan.

Adapun hasil yang dicapai yaitu terwujudnya penyusunan APBDesa Perubahan yang tepat waktu dan akuntabel di 81 Desa.

13. Bimtek Kepala Desa Terpilih.

Adapun hasil yang dicapai yaitu meningkatnya kemampuan dan kapasitas Kepala Desa terpilih sebanyak 54 orang di 54 desa.

Sasaran Strategis 8

Berkurangnya Penduduk Miskin

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran kedelapan ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja

sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **40%** dengan kategori predikat **Sangat Rendah**. Hasil pengukuran pengurangan penduduk miskin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase angka kemiskinan	5,29 %	11,47%	46,12%	4,79%	11,47%	41,76%
2.	Jumlah penduduk miskin (KK)	6.815 kk	15.942 kk	42,74%	6.165 kk	16.119 kk	38,25%
Rata-rata Capaian Kinerja				44,43%	Rata-rata Capaian Kinerja		40%

1. Persentase angka kemiskinan.

Persentase angka kemiskinan pada Tahun 2020 yaitu 11,47% dari target 4,79% yang ditetapkan dengan persentase capaian sekitar 41,76%. Realisasi ini menunjukkan terjadinya penurunan masyarakat miskin sebesar 4,36% pada Tahun 2020 ini.

2. Jumlah Penduduk Miskin.

Pada Tahun 2020 jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial adalah sebanyak 16.119 kk yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan baik di wilayah kecamatan daratan maupun di wilayah kecamatan kepulauan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding jumlah masyarakat miskin pada Tahun 2019 yang hanya sebesar 15.942 jiwa atau 177 kk. Salah satu penyebab meningkatkan jumlah penduduk miskin adalah karena Basis Data Terpadu (BDT) yang dimiliki Dinas Sosial belum lagi dilakukan pemutakhiran data sejak Tahun 2015 sehingga saat ini masih ditemukan warga yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan atau telah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam BDT.

Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, selalu konsisten memadukan program pusat dengan daerah secara sinergis dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Berbagai langkah strategis pemerintah daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui intervensi program/kegiatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintah yang dapat dilihat pada uraian berikut ini.

1. Dinas Sosial dengan sasaran meningkatnya akses keluarga miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif dan meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial.
 - Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui bantuan UEP, dengan kegiatan:
 - a. Pembinaan dan pemberdayaan keluarga miskin melalui UEP dengan capaian kinerja 153 KK.
 - b. Pembinaan dan pemberdayaan keluarga rentan melalui UEP dengan capaian kinerja 12 KK.
 - c. Pembinaan dan pemberdayaan Wanita rawan sosial ekonomi melalui UEP dengan capaian kinerja 16 KK
 - d. Pembinaan dan pemberdayaan Anak terlantar melalui UEP dengan capaian kinerja 10 Anak
 - e. Pembinaan dan pemberdayaan Lanjut usia potensial melalui UEP dengan capaian kinerja 20 KK
 - f. Pembinaan dan pemberdayaan Penyandang disabilitas melalui UEP dengan capaian kinerja 7 KK
 - g. Pembinaan dan pemberdayaan Eks Narapidana melalui UEP dengan capaian kinerja 6 KK
 - h. Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu dengan capaian kinerja 50 KK
 - Jumlah keluarga Miskin yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui bantuan KUBE dengan kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan keluarga miskin

melalui KUBE dengan capaian kinerja 6 KK.

- Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh bantuan Rastra dan Bantuan Pangan dengan rincian Jumlah masyarakat miskin yang terbantu dengan bantuan Rastra yang berubah nama menjadi BPNT (Bantuan pangan non tunai) dan sejak 2020 berubah nama lagi menjadi Program Sembako sebanyak 12779 KPM sedangkan jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 900 KK, jd total penerima bantuan untuk indikator jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan Rastra dan Bantuan pangan sebanyak 13.679 KK.
 - Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Tunjangan Hidup sebanyak 680 orang
 - Jumlah Anak Yatim Piatu dan anak yatim yang mendapatkan bantuan tunjangan hidup sebanyak 150 Anak
 - Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan tunjangan hidup (penyandang cacat fisik dan mental) dengan jumlah sebanyak 150 Orang
 - Jumlah Masyarakat Miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebanyak 16.119 KPM
2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, memberikan bantuan usaha kepada para alumni Balai Latihan Kerja yang pada Tahun 2020 bantuan tersebut berupa bantuan peralatan pertukangan kepada 8 kelompok, peralatan perbengkelan sebanyak 7 kelompok dan bantuan mesin jahit sebanyak 7 kelompok.
 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pada Tahun 2020 memberikan bantuan berupa handtraktor kepada 13 kelompok petani, bibit kambing jantan dan betina kepada 1 Gabungan kelompok peternak, kawat duri kepada 13 kelompok petani, bak fiber kepada 1 gabungan kelompok petani, jaring pengaman kebun kepada 9

- kelompok petani, tangka semprot kepada 5 kelompok tani, DAM kepada 4 kelompok tani, sumur tani kepada 2 kelompok tani serta pengadaan berbagai macam bibit dan pupuk yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan tersebar hampir diseluruh kecamatan.
4. Dinas Perikanan dan Kelautan, pada Tahun 2020 memberikan bantuan kepada nelayan kurang mampu berupa alat Perahu Ikan Lebih Kecil dari 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan kepada sebanyak 30 unit, cool box sebanyak 47 unit, fix finder kepada 23 kelompok, pengadaan alat tangkap sero sebanyak 5 unit, pengadaan mesin sebanyak 42 unit, pengadaan perahu sebanyak 71 unit, bantuan jarring keramba sebanyak 13 unit, mesin alkon dan pompa sebanyak 16 unit.
 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, pada Tahun 2019 memberikan bantuan kepada kelompok usaha kurang mampu berupa mesin jahit dan obras kepada 12 kelompok, alat pertukangan kepada 17 kelompok, alat perajang keripik kepada 15 kelompok, mesin parut kelapa dan penepung beras kepada 11 kelompok, mesin pencetak batu merah kepada 5 kelompok, alat masak memasak kepada 25 kelompok, alat pengupas sabut kelapa kepada 5 sentra usaha, mesin pencacah sampah dan mesin pres sampah kepada 1 sentra usaha, bantuan alat pengrajin souvenir kepada 17 kelompok usaha, bantuan mesin pemipil jagung kepada 2 kelompok, bantuan alat ketrampilan tata busana kepada 4 kelompok, mesin penggiling kacang hijau kepada 1 kelompok serta bantuan peningkatan mutu batu merah (alcon dan gerobak) kepada 17 kelompok usaha, sedangkan untuk tahun 2020 program kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat tidak dilaksanakan dikarenakan adanya wabah virus corona yang mengakibatkan anggarannya di refocusing.
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan bantuan pembangunan sarana air bersih dan pemasangan sambungan jaringan air bersih kerumah yang pada Tahun 2020 mencakup 5 desa yaitu desa Parak kec. Bontomai sebanyak 107 sambungan rumah (SR), desa

Ujung Kec. Pasimasunggu Timur sebanyak 116 SR, desa Bonerate kec. Pasimarannu sebanyak 100 SR, desa Kalaotoa kec. Pasilambena sebanyak 102 SR dan desa Lembang Matene kec. Pasilambena sebanyak 64 SR dengan jumlah total 489 SR.

Belum optimalnya pencapaian indikator persentase masyarakat miskin dan jumlah masyarakat miskin disebabkan karena:

1. Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial dari Tahun 2015 sampai Tahun 2020 belum pernah dilakukan verifikasi dan validasi data, sehingga data yang ada sudah tidak up to date.
2. Masih kurangnya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas sektor/SKPD dengan mengedepankan kepentingan masyarakat miskin.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan belum bersinergi dan bersifat sektoral sehingga terkesan program yang dilahirkan bersifat parsial yang berdampak pada pelaksanaan program tidak terpadu dan terintegrasi.
4. Masih terdapatnya Program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kurang tepat sasaran.
5. Masih kurang intensifnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan

Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan serta masih terdapatnya beberapa kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut maka disarankan kepada Pemerintah daerah untuk menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di kabupaten kepulauan selayar , antara lain:

1. Perlunya data yang akurat (nama dan alamat Rumah Tangga Miskin) yang akan menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan .

2. Program yang diterima oleh Rumah Tangga Miskin harus sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan hasil identifikasi program.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan hendaknya bersinergi dan terpadu yang melibatkan (pemerintah, swasta, masyarakat, pelaku ekonomi serta LSM) berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas dan transparansi yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Mengembangkan Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga bagi masyarakat miskin.
6. Meningkatkan Akses Usaha kecil terhadap Sumberdaya Produktif.
7. Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan selayar.

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat”**. Untuk mengukur sasaran kesembilan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kepariwisata, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan KB. Untuk mengukur sasaran kesembilan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **92,81%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran sasaran peningkatan daya beli masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Income per kapita penduduk (Juta)	27	27,17	100,63%	28,5	26,45	92,81
Rata-rata Capaian Kinerja				100,63%	Rata-rata Capaian Kinerja		92,81

Pendapatan perkapita penduduk (income perkapita) adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang diperoleh dari hasil pembagian antara pendapatan Daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDRB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya maka semakin besar juga kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 Income perkapita penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 26,449,690,- sedangkan Tahun 2019 sebesar 27,175,640,- dan Tahun 2018 sebesar Rp. 25.489,050,-. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 Income perkapita penduduk mengalami peningkatan sebesar Rp.1.686,590,- atau sekitar 6,20% dari Tahun 2018. Sedangkan pada Tahun 2020 Income perkapita penduduk mengalami penurunan sebesar Rp.725,950,- atau sekitar 2,74% dari Tahun 2019. Income perkapita penduduk sering diring digunakan sebagai tolok ukur

kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah; semakin besar Income perkapita penduduknya maka semakin makmur daerah tersebut. Adapun pencapaian indikator tersebut di dukung oleh:

1. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menekan laju inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2020 yaitu sebesar -1,78% dimana Tahun 2019 mencapai 7,68%. Pengendalian inflasi ini dilakukan melalui berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain senantiasa meningkatkan koordinasi baik di tingkat kecamatan, sidak ke pasar, toko dan gudang sembako yang ada, kemudian peningkatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM, gas LPG.
2. Laju pertumbuhan ekonomi yang mana penunjang utamanya adalah konsumsi rumah tangga disamping konsumsi makanan dan minuman, kesehatan, transportasi, komunikasi dll.

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat**”. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Untuk mengukur sasaran kesepuluh ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **99,35%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan derajat pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka melek huruf	98	98,15	100,15%	98,5	98,20	99,69
2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	12,47	12,40	99,43%	12,54	12,40	99
Rata-rata Capaian Kinerja				99,97%	Rata-rata Capaian Kinerja		99,35

1. Angka melek huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk 15 tahun ke atas terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis. Meningkatnya jumlah penduduk usia >15 tahun melek huruf merupakan sasaran strategis untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan bebas buta aksara, maka dirasa penting untuk tetap melanjutkan program penuntasan wajib belajar bagi mereka yang sudah dewasa. Tingkat melek huruf menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya

Pada Tahun 2020, realisasi angka melek huruf adalah sebesar 98,20% dari 98,50% yang ditargetkan dalam RPJMD dengan persentase capaian sekitar 99,69%. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan dan baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, adapun program yang dilakukan dalam pemberantasan buta aksara adalah sebagai berikut:

- i. Meningkatkan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMP.

- ii. Membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang cukup efektif untuk meningkatkan Angka Melek Huruf yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Capaian pemberantasan buta aksara pada indikator angka melek huruf menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhasil menekan angka buta aksara huruf menjadi melek aksara.

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Angka Melek Huruf	96,14	96	87,88	98,15	98,20

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020

2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP. Indikator Kinerja Utama Angka Rata-rata Lama Sekolah, adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

Tabel 2.22
 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Rata-rata lama sekolah	10	10,68	12,40	12,40	12,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020

Berdasarkan tabel 3.13.2 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian Angka Rata rata Lama Sekolah (RLS) dapat direalisasikan sebesar 12,40 tahun dari target sebesar 12,54 tahun, dengan persentase capaian kinerja sekitar 99%, masih ada kesenjangan sebesar 0,14 point. Hal ini diketahui bahwa rata rata pendidikan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menyelesaikan sekolah sampai lulus kelas 3 Sekolah Menengah. Ada banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah bagi penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain:

1. Dengan menggulirkan sekolah bebas biaya;
2. Memberikan bantuan kepada siswa baru yang kurang mampu seperti bantuan seragam sekolah sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dengan alasan tidak mampu membeli seragam sekolah.
3. Pengalokasian dana BOS untuk seluruh sekolah SD dan SMP dengan harapan semua siswa dapat bersekolah dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menekan angka putus sekolah baik di tingkat SD /MI maupun SMP/MTs.
4. Meningkatkan kualitas pendidik yang merupakan faktor penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran;
5. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Walaupun demikian, sampai saat ini pemerintah daerah masih

menghadapi kendala dalam upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah yang salah satunya adalah banyaknya warga diwilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih bertempat tinggal tidak tetap/ berpindah- pindah sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam usaha memberikan bantuan.

Tabel 2.23
 Data Jumlah siswa dan Jumlah penduduk

N0	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Siswa PAUD usia 5 – 6 Tahun	5.553
2	Jumlah Siswa SD Sederajat	14.336
3	Jumlah Siswa SMP Sederajat	7.105
4	Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun	5.642
5	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	14.610
6	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	7.283

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020

Berikut ini data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020:

1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

a. APK PAUD

Berdasarkan tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa target angka partisipasisipasi kasar PAUD yaitu 61% dengan realisasi capaian 110%. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah penduduk usia 4-6 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 8.465 jiwa. Sementara jumlah siswa di jenjang pendidikan PAUD adalah 5.701 siswa. Sehingga APK PAUD pada tahun 2019 adalah 67,34 % . Hal tersebut dikarenakan kesadaran minat orang tua untuk menyekolahkan anak di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terutama untuk Ibu yang tidak bekerja sudah mengalami peningkatan. Kondisi ini diakibatkan oleh

ketersediaan sarana ruang pembelajaran dan fasilitas pendukungnya yang memadai. Begitupula dengan guru pada TK terpenuhi sesuai rasio yang dibutuhkan.

Tabel 2.24
 Data Angka Partisipasi

No	Indikator	Target 2020	Realisasi	Capaian
				(%)
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	63	98,42	156,2
2	Angka Partisipasi Kasar SD	100	98,12	98,12
3	Angka Partisipasi Kasar SMP	98,65	98	99,34

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020

b. APK PAUD

Berdasarkan tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa target angka partisipasi kasar PAUD yaitu 63% dengan realisasi capaian 98,42%. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah penduduk usia 5-6 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 5.642 jiwa. Sementara jumlah siswa di jenjang pendidikan PAUD adalah 5.553 siswa. Sehingga APK PAUD pada tahun 2020 adalah 98,42 % . Hal tersebut dikarenakan kesadaran minat orang tua untuk menyekolahkan anak di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terutama untuk Ibu yang tidak bekerja sudah mengalami peningkatan. Kondisi ini diakibatkan oleh ketersediaan sarana ruang pembelajaran dan fasilitas pendukungnya yang memadai. Begitupula dengan guru pada TK terpenuhi sesuai rasio yang dibutuhkan.

c. APK SD/MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat pada Tahun 2020 direalisasikan sebesar 98,12% dari target 100% dengan capaian kinerja 98,12%. Berdasarkan data BPS di Kabupaten Kepulauan

Selayar jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 14.610 jiwa. Sementara jumlah siswa di jenjang pendidikan SD adalah 14.336 siswa. Sehingga APK SD pada tahun 2020 adalah 98,12%. Pencapaian realisasi APK SD terjadi peningkatan dalam hal pencapaian realisasinya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain mutasi siswa dari luar daerah yang ingin bersekolah di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Faktor lain yang menyebabkan pencapaian tidak sesuai target adalah bertambahnya angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar. Pemerintah telah melakukan pemerataan akses pendidikan dengan adanya wajib belajar Sembilan tahun dengan kegiatan penambahan ruang kelas, penambahan sarana prasarana pendukung lainnya untuk setiap jenjang pendidikan, selain itu juga melakukan perbaikan segala sarana dan prasarana yang ada sehingga setiap ada penerimaan siswa baru dapat tertampung dengan maksimal.

d. APK SMP

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat pada Tahun 2020 direalisasikan sebesar 98% dari target 98,65% dengan capaian kinerja 99,34%. Pencapaian realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP kurang dari target sebesar 0,65% karena beberapa faktor, antara lain mutasi siswa dari dalam daerah yang ingin bersekolah di luar daerah kabupaten Kepulauan Selayar dan adapun faktor lain yang menyebabkan pencapaian tidak sesuai target adalah adanya angka putus sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) didasarkan pada penambahan ruang kelas, penambahan sarana dan prasarana pendukungnya untuk setiap jenjang pendidikan selain itu juga melakukan perbaikan segala sarana dan prasarana yang ada sehingga sehingga setiap ada

penerimaan siswa baru dapat tertampung dengan maksimal dan setiap peserta didik mendapat fasilitas sesuai dengan SPM.

1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Tabel 2.25

Capaian Angka Partisipasi Murni

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
				(%)
1	Angka Partisipasi Murni SD	99,02	97,22	98,18
2	Angka Partisipasi Murni SMP	98	91	92,85

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020

1. Angka Partisipasi Murni SD

Berdasarkan data di Kabupaten Kepulauan Selayar jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 14.610 jiwa sementara jumlah siswa berusia 7-12 tahun di jenjang pendidikan SD adalah 14.205 siswa. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat pada Tahun 2020 di realisasikan sebesar 97,22% dengan capaian kinerja 98,18% dan belum mencapai target dimana target yang dicanangkan adalah 99,02%. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya yaitu mutasi orangtua siswa ke luar daerah dan tumbuhnya Paud, tidak diiringi dengan aturan yang ketat tentang pembatasan umur seorang anak untuk mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di Paud tanpa menyadari bahwa anaknya belum berada di usia pendidikan. sehingga setelah anak mengikuti pendidikan timbul rasa jenuh yang akhirnya orang tua anak memaksakan untuk mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi (SD), walaupun usia anak belum mencapai 7 tahun, hal ini menyebabkan APM SD tentunya tidak akan mencapai target.

2. Angka Partisipasi Murni SMP

Berdasarkan data di Kabupaten Kepulauan Selayar jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 7.283 orang, sementara jumlah siswa berusia 13-15 tahun di jenjang pendidikan SD adalah 6.617 siswa. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat pada tahun 2019 direalisasikan sebesar 91% dengan capaian kinerja 92,85% dan belum mencapai target yang dicanangkan sebesar 98%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya mutasi orang tua siswa ke luar daerah serta usia siswa yang memang dirasa yang mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi (SMP) yang belum mencapai usia 13-15 tahun oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi mengenai APM ini kepada masyarakat.

Sasaran Strategis 11

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat**”. Untuk mengukur sasaran kesebelas ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk mengukur sasaran kesebelas ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **101,30%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka usia harapan hidup	67,57	68,34	101,14%	67,58	68,46	101,30%
Rata-rata Capaian Kinerja				101,14%	Rata-rata Capaian Kinerja		101,30

Angka Harapan Hidup menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah karena semakin baik kesehatan seseorang maka cenderung untuk hidup lebih lama. Angka Harapan Hidup juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan pembangunan kesehatan baik itu kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk usaha pemberantasan kemiskinan. Pada Tahun 2020, Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencapai 68,46 dari 67,58 yang ditargetkan dengan persentase capaian sekitar 101,30%. Artinya bahwa bayi-bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki harapan hidup rata-rata sampai 68 tahun.

Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata maka Dinas Kesehatan dan RSUD melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung berperan dalam peningkatan kesehatan masyarakat yang mencakup aspek:

1. Pelayanan kesehatan ibu yang melaksanakan berbagai kegiatan seperti pertemuan peningkatan cakupan program kesehatan keluarga dan gizi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan keluarga dan gizi serta adanya jaminan persalinan yang pada Tahun 2019 ini melayani 497 orang ibu bersalin. Keberhasilan aspek ini didukung oleh:

- a. Meningkatnya kompetensi petugas dan kepatuhan dalam memberi layanan sehingga keterlambatan dalam mendeteksi penanganan ke tempat rujukan dapat diminimalkan;
 - b. Mengoptimalkan sistim rujukan dari fasilitas kesehatan pada tingkat pertama (bidan pratek) ke fasilitas kesehatan rujukan.
2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang melaksanakan berbagai kegiatan seperti, penanggulangan penyakit TB dan kusta, pengendalian penyakit hepatitis dan HIV, penanggulangan penyakit diare, rabies, tifoid, kecacingan dan ISPA, pengendalian penyakit dan pengendalian malaria.
3. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular yang melaksanakan berbagai kegiatan antara lain BIMTEK Petugas P2PTM, Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa, POSBINDU OPD/Organisasi, Pengambilan Logistik dan Vaksin Program Imunisasi, Pemantauan Kualitas Vaksin, Surveilens Dan Imunisasi, Supervisi supportive (SS) Program imunisasi, Kesehatan Haji, Pengadaan Alat Deteksi Dini Posbindu (DBH CHT).
4. Upaya kesehatan masyarakat yang melaksanakan berbagai kegiatan antara lain Operasional Posko Publik Servis Center (PSC), Save Guarding, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), JKN, BPJS dengan capaian Tahun 2019 sebanyak 3.805 orang. Keberhasilan aspek ini didukung oleh:
 - a. Meningkatnya akses fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar baik di wilayah kecamatan daratan maupun di wilayah kecamatan kepulauan. Salah satu capaiannya adalah dengan dibangunnya Rumah Sakit Pratama di Pulau Jampea dan sejumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di pulau-pulau lainnya;
 - b. Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu yang merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan selayar;
 - c. Dukungan dari berbagai dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan tenaga kesehatan yang memadai dan terampil;

- d. Ruang rawat inap yang bersih dan nyaman, mulai dari kelas III sampai kelas VIP;
- e. Meningkatnya upaya promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya.

Sasaran Strategis 12

Meningkatnya Kualitas Keluarga, Keberdayaan, dan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Sasaran strategis 12 ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk mengukur sasaran kedua belas ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **69,87%** dengan kategori predikat **Sedang**. Hasil pengukuran peningkatan kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 12

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	(KB) 99,98	(KB) 71,17	(KB) 71,17%	(KB) 99,98	(KB) 69,86	(KB) 69,87%
		(KS) 94,31	(KS) 75,65	(KS) 80,21%	(KS) 96,59	(KS) -	(KS) -
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	25	0,26	249,74%	27,5	-	-
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,50	72,67	78,56%	92,75	-	-
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,40	67	110,93%	60,75	-	-

Rata-rata Capaian Kinerja	116,72%	Rata-rata Capaian Kinerja	69,87%
---------------------------	---------	---------------------------	--------

1. Rasio Keluarga Berencana (KB)

Rasio Keluarga Berencana adalah Perbandingan antara jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB dengan Jumlah PUS yang ada. Berdasarkan realisasi data DP3AP2KB, diketahui bahwa pencapaian akseptor baru Tahun 2020 sebesar 1.801 akseptor dengan capaian 69,86% dan target AB sebanyak 2.578 akseptor. Adapun pencapaian akseptor baru premix kontrasepsi adalah : IUD sebanyak 145 akseptor dengan capaian 88.95%, MOW sebanyak 56 akseptor, MOP sebanyak 0 akseptor, Implant sebanyak 539 akseptor, suntik 757 akseptor dengan capaian 0,87%, Pil sebanyak 214 akseptor dan kondom sebanyak 90 akseptor. Pencapaian Akseptor KB Aktif masing – masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 , dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28

Peserta KB Aktif menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Peserta KB Aktif (PA)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	persenPA terhadap PUS
1	2	3	4	5
1	Pasilambena	991	1303	76,05
2	Pasimarannu	1563	1750	89,31
3	Pasimasunggu	1.091	1469	74,27
4	Taka Bonerate	1.979	2.126	93,08
5	Pasimasunggu Timur	952	1.196	79,43
6	Bontosikuyu	1.967	2344	83,92
7	Bontoharu	1470	2060	71,36
8	Benteng	2329	3060	76,11
9	Bontomanai	1388	1937	71,60
10	Buki	686	843	81,38
11	Bontomatene	1157	1603	72,88
	TOTAL	15.571	19.691	79,08

Sumber : DPP3AP2KB (Bid. Data & Info) Kab. Kep. Selayar, 2020

Dari tabel tersebut diatas, hasil pendataan dan pemuktahiran data keluarga Tahun 2020 DP3AP2KB peserta KB Aktif tertinggi adalah Kecamatan Takabonerate mencapai 93,08% sedangkan yang terendah adalah kecamatan Bontoharu sebanyak 71,36%. Dari kecamatan yang ada di

Kepulauan Selayar, maka kecamatan yang presentase kesertaan Ber-KB berada diatas rata-rata pencapaian kabupaten hanya 3 kecamatan yaitu: Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Takabonerate dan Kecamatan Bontosikuyu, sedangkan 8 kecamatan berada dibawah pencapaian kabupaten (73,36%).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus berupaya mewujudkan slogan 2 anak cukup bagi setiap keluarga. Dan berdasarkan hasil pendataan keluarga Tahun 2020 diperoleh data bahwa rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga adalah 2,85 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu keluarga terdapat 3 – 4 jiwa yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sehingga diasumsikan bahwa jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah anatara 1 – 2 orang.

Secara nasional, SDKI 2017 jumlah anak dalam satu keluarga atau lebih tepatnya disebut Total Fertility Rate (TFR) tercatat rata-rata 2,4. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka di Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun survei lain yakni Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 menunjukkan data yang berbeda. Menurut survei ini, TFR di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah lebih rendah dibanding TFR nasional menurut SDKI 2017 yakni 2,85.

Tingkat kesertaan ber-KB, juga cukup memuaskan. Sebanyak 76,51 persen pasangan usia subur di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah menjadi peserta KB aktif, sementara angkanya secara nasional baru mencapai 57,4 persen. Jumlah *unmet need* atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, Kepulauan Selayar mencatatkan angka terendah yakni 7,6 persen, sedangkan angka secara nasional masih 8,1 persen.

2. Rasio Keluarga Sejahtera (KS)

Rasio KS adalah perbandingan antara Jumlah KS (KS II, KS III, KS III+) dengan jumlah Keluarga yang ada berdasarkan realisasi data Perjanjian Kerja DP3AP2KB Tahun 2019 dimana Rasio KS adalah sebesar 75,65%, menunjukkan bahwa dari 100 keluarga yang ada di Kabupaten

Kepulauan Selayar terdapat 76 keluarga yang berada pada kategori Keluarga Sejahtera sedangkan 24 keluarga berada pada Pasangan Keluarga Pra S dan KS 1 (belum sejahtera). Jumlah keluarga yang ada saat ini di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Pendataan Tahun 2019 adalah sebanyak 36.581 KK yang terdiri dari Keluarga Pra S dan KS 1 adalah 9.685 KK dan keluarga yang masih kategori KS II, KS III dan KS III+ adalah 27.674 KK.

Tahun 2020 capaian untuk indikator Rasio Keluarga Sejahtera tidak ada, disebabkan tidak dilakukannya kegiatan pendataan akibat adanya rasionalisasi anggaran yang di alihkan pada kegiatan penanganan Covid – 19. Hal tersebut di perkuat dengan Surat Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 529/LP.001/J5/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Penundaan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2020.

3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kesenjangan pendapatan yang diterima tidak terlepas dari perbedaan kualitas pendidikan. European Commission (2005) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan adalah karakteristik terpenting dalam menjelaskan fenomena ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Mussida dan Picchio (2013) menjelaskan bahwa penurunan kesenjangan upah dalam beberapa dekade terakhir terjadi karena peningkatan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja perempuan.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar masih relatif tinggi karena masih terjadi diskriminasi gender yang menandakan bahwa kesetaraan gender masih rendah terutama dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen, antara perempuan dan laki - laki masih timpang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perempuan dalam hal kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih belum setara dengan laki- laki. Adapun capaian Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 0,26% dari target 25 dalam RPJMD.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah karena masih lemahnya komitmen

pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Meskipun Indonesia sudah memiliki kebijakan dalam Pengarusutamaan Gender yaitu Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Surat Keputusan bersama 4 Menteri (Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), namun dua kebijakan tersebut tidak lagi di terapkan secara konsisten.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memperkuat penerapan PUG dan PPRG guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan. Beberapa solusi yang direkomendasikan oleh Koalisi Perempuan adalah:

- a. Pemerintah pusat segera menyusun Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (Stranas PUG) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat sipil, swasta dan akademisi.
- b. Pemerintah daerah menertibkan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan menerapkannya dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Tahun 2020 capaian untuk indikator Indeks Ketimpangan Gender tidak ada disebabkan tidak dilakukannya kegiatan pendataan akibat adanya rasionalisasi anggaran yang di alihkan pada kegiatan penanganan Covid – 19. Hal tersebut di perkuat dengan Surat Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 529/LP.001/J5/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Penundaan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2020.

4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pembangunan gender bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Indonesia selalu menunjukkan

peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indikator ini merupakan adopsi dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang disusun oleh UNDP. Capaian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 adalah 72,67% dari target 92,5%, menandakan bahwa pembangunan Gender dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sudah semakin meningkat yang berarti bahwa angka harapan hidup perempuan, angka harapan lama sekolah dan rata - rata lama sekolah juga sudah meningkat.

Indeks pembangunan gender tingginya IPG Kabupaten Kepulauan Selayar menandakan bahwa pembangunan Gender dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sudah semakin meningkat yang berarti bahwa angka harapan hidup perempuan, angka harapan lama sekolah dan rata - rata lama sekolah juga sudah meningkat.

Tahun 2020 capaian untuk indikator Indeks Pembangunan Gender tidak ada disebabkan tidak dilakukannya kegiatan pendataan akibat adanya rasionalisasi anggaran yang di alihkan pada kegiatan penanganan Covid – 19. Hal tersebut di perkuat dengan Surat Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 529/LP.001/J5/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Penundaan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2020.

5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemberdayaan gender erat kaitannya dengan pembangunan gender. Pemberdayaan gender terjadi ketika perbaikan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi berhasil mendorong terwujudnya pemberdayaan (Cinar, 2018). Idealnya, peningkatan pembangunan gender akan menciptakan keseimbangan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan. Selama ini, perempuan cenderung tertinggal

di berbagai peran seperti ekonomi tenaga kerja dan pengambilan keputusan yang disebabkan oleh mengakarnya budaya patriarki. Seiring dengan meningkatnya kualitas perempuan antar waktu, yang ditandai dengan peningkatan IPG, pemberdayaan yang adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan diharapkan dapat terwujud. Capaian pada Tahun 2019 Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 67% dari target 60,4%, ini menandakan bahwa peningkatan presentase jumlah perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. sementara keterlibatan perempuan diperlemen dan pengambilan keputusan cenderung menurun untuk menselaraskan antara IPG dan IDG diperlukan upaya yang berkesinambungan dengan melibatkan semua sektor dan berbagai peran, sehingga akan menjadi pedoman dalam perencanaan, penganggaran yang responsif gender (PPRG) oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya berbagai regulasi mengenai perlindungan perempuan dan anak termasuk SPM/SPO Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
- b. Masih terbatasnya Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk belum optimalnya Operasionalisasi P2TP2A.
- c. Kurangnya komitmen OPD sebagai penentu kebijakan dalam hal penganggaran yang responsif Gender dan Anak.
- d. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya berKB .
- e. Kurangnya jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, seharusnya satu orang satu Desa, sementara yang terjadi di Kabupaten Kepulauan selayar tidak ada Kecamatan yang cukup jumlah penyuluhnya.

- f. Adanya wilayah yang tidak mempunyai pejabat defenitif sebagai Kepala UPT Wilayah Kecamatan.

Solusi Yang dilakukan adalah :

- a. Penyusunan dan pengesahan PERDA tentang sistem Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk perda KLA/TPPO dan Penyediaan SPM/SPO penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
- b. Penyediaan anggaran yang memadai untuk berbagai kegiatan dan program perlindungan perempuan dan anak termasuk pembiayaan yang selektif mungkin untuk mendukung operasionalisasi dan kinerja P2TP2A.
- c. Perlu adanya komitmen SKPD sebagai penentu kebijakan agar lebih meningkatkan penganggaran yang responsif gender dan anak.
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia setiap lapisan masyarakat.
- e. Peningkatan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana.

Tahun 2020 capaian untuk indikator Indeks Pemberdayaan Gender tidak ada disebabkan tidak dilakukannya kegiatan pendataan akibat adanya rasionalisasi anggaran yang di alihkan pada kegiatan penanganan Covid – 19. Hal tersebut di perkuat dengan Surat Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 529/LP.001/J5/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Penundaan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2020.

Sasaran Strategis 13

Meningkatnya Kemandirian Pemuda

Sasaran strategis 13 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran ketiga belas ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **92,25%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan

kemandirian pemuda adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 13

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pemuda mandiri	100%	92,25%	92,25%	100%	92,45%	92,45%
Rata-rata Capaian Kinerja				92,25%	Rata-rata Capaian Kinerja		92,45%

1. Pengelolaan anggaran pembangunan kepemudaan dan olahraga berbasis kinerja.

Pencapaian indikator ini diukur melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah Tahun 2012–2014 yang secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK (Transparency International, 2016).

Sebagai implementasi pelaksanaan Stranas PPK maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui tugas dan fungsinya terus berupaya mencegah terjadinya korupsi melalui penyelenggaraan kegiatan pembangunan kepemudaan dan olahraga. Langkah nyata yang telah dilakukan adalah membangun, mengembangkan, dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern terhadap pelaksanaan anggaran yang dikelola serta meningkatkan kompetensi SDM Aparat pengelola keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Langkah tersebut ditempuh melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah. Dari upaya tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mampu melaksanakan anggaran dan menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akual.

Nilai indeks persepsi korupsi Pada Tahun 2020 yang dihitung berdasarkan rumus yang dijelaskan dalam metodologi adalah sebesar 87,83 dari target yang ditetapkan sebesar 95 dengan persentase capaian 92,45%.

Tabel 2.30
 Responden pada pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi

No	Status Responden	Jumlah
1.	Aparat APIP Inspektorat KKS (orang)	10
2.	Aparat Pengelola Keuangan BPKP-AD (orang)	25
3.	Unsur Organisasi Kepemudaan (orang)	25
4.	Tokoh Masyarakat	15
	Total	75

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga, 2020

2. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan Bahasa Asing

Dalam rangka mendukung kesuksesan pencapaian ketiga agenda strategis yaitu mewujudkan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, mewujudkan Selayar sebagai Kawasan Distribusi Logistik Indonesia (khususnya KTI), mewujudkan Selayar sebagai Pusat Industri Perikanan Terpadu maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga menetapkan kebijakan berupa penyiapan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan penguasaan bahasa asing. Kelompok sasaran yang dibina adalah remaja dan orang dewasa.

Dalam Tahun 2020, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memfasilitasi kegiatan English Park dikarenakan adanya wabah virus corona – 19 yang melarang adanya kegiatan berkumpul atau kerumunan.

Tabel 2.31

Jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Proporsi Remaja dan Dewasa yang	0.35 persen	0	0

	memiliki Kemampuan Bahasa Asing			
--	---------------------------------	--	--	--

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga, 2020

Tidak tercapainya target kinerja pada sasaran ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain karena faktor keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan English Park, juga karena faktor lain, yaitu adanya wabah virus corona – 19 sehingga kegiatan tidak terlaksana.

3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pramuka dalam rangka melahirkan generasi muda berkarakter tangguh.
 - Jumlah Guru yang memiliki potensi sebagai Pembina pramuka mahir dasar dan lanjutan

Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan diluar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan metode Kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Pada Tahun 2020 ini kegiatan kursus Pembina Pramuka mahir dasar dan lanjutan tidak terlaksana karena adanya Refocusing anggaran sehubungan dengan pandemic covid-19.

Indeks Pembangunan Olahraga

Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index – SDI) adalah metode pengukuran untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. Indeks Pembangunan Olahraga dihitung berdasarkan empat dimensi dasar dalam pembangunan olahraga, yaitu : (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga,(2) sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam

kegiatan olahraga, (3) partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur dan (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat.

Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan bahwa kondisi kebudayaan berolahraga di Kabupaten Kepulauan Selayar masih rendah yang dapat dilihat dari tingkat kemajuan pembangunan olahraga daerah yang hanya mencapai 13.80 pada Tahun 2020. Indeks ini dihitung berdasarkan angka indeks partisipasi, ruang terbuka, sumber daya manusia, dan kebugaran. Rendahnya kesempatan untuk beraktivitas olahraga disebabkan oleh terbatasnya lapangan dan fasilitas untuk berolahraga, lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam hal penyediaan fasilitas umum untuk lapangan dan fasilitas olahraga bagi masyarakat umum dan tempat pemukiman.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga sebagai landasan untuk menjaga kualitas kesehatan sekaligus kesadaran akan budaya olahraga masih rendah yakni berkisar 85%, hanya 15% masyarakat yang sadar akan berolahraga. Data IPO 2020 menunjukkan kondisi kebugaran masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar : 1,08% masuk dalam kategori baik sekali; 4,07% baik; 13,55% sedang; 43,90% kurang; dan 37,40% kurang sekali.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa sistem keolahragaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini dalam kondisi yang masih kurang. Untuk itu dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas olahraga masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 telah melaksanakan beberapa program, yaitu :

Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan seni

- Jumlah masyarakat yang mengikuti olahraga Senam Kebugaran Jasmani selama tahun 2020 dari bulan januari sampai maret dan oktober sampai dengan desember sebanyak

2300 orang. Senam dilaksanakan rutin setiap hari jumat mulai pukul 05.30 wita sampai pukul 07.00 wita.

- Jumlah Pelajar yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten sebanyak 150 orang, direkrut dari sekolah menengah atas dan sederajat se Kabupaten Kepulauan Selayar. Seleksi tersebut menghasilkan 6 paskibraka tingkat kabupaten dan 1 paskibraka tingkat provinsi. Kegiatan seleksi paskibraka tingkat kabupaten mengikuti karantina dan pemusatan latihan mulai tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020. Pemusatan latihan paskibraka utusan selayar di tingkat provinsi dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020.

Tabel 2.32
 Capaian Indikator Pemuda Mandiri

Indikator	Target	Capaian	Persentase
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	100%	92,45%	92,45%
Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan Bahasa Asing	0.35%	0%	0%
kapasitas kelembagaan pramuka dalam rangka melahirkan generasi muda berkarakter tangguh	100%	0%	0%
Rata-rata capaian			92,45%

Sasaran Strategis 14

Meningkatnya Prestasi Olahraga Bagi Pemuda dan Masyarakat

Sasaran strategis 14 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat”**. Sasaran ini didukung oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemuda dan

Olah Raga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran keempat belas ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **0%** dengan kategori predikat **Sangat Rendah**. Hasil pengukuran peningkatan prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 14

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	15	15	100%	15	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja				100%	Rata-rata Capaian Kinerja		0

Pada Tahun 2019 dari 15 cabang olah raga yang ditargetkan baik itu berprestasi di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional dapat direalisasikan 100%. Berbagai macam event olahraga telah diikuti oleh atlit-atlit berprestasi dari Kabupaten Kepulauan Selayar baik itu bertaraf internasional, nasional dan tingkat provinsi.

Realisasi capaian pada Tahun 2020 untuk prestasi olahraga di tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat kabupaten tidak ada disebabkan adanya rasionalisasi anggaran atas penanganan wabah virus corona-19.

Sasaran Strategis 15

Meningkatnya Aksesibilitas Dari dan Ke Kepulauan Selayar

Sasaran strategis 15 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat

Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Dinas Perhubungan. Untuk mengukur sasaran kelima belas ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **51,74%** dengan kategori predikat **Rendah**. Hasil pengukuran peningkatan aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 15

No	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat	(41%) 280 Unit	(24,67%) 170	60,71%	(46%) 320 Unit	(25,11%) 173	54,59%
2.	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut	(13 %) 70 Bh	(12,09%) 63	90%	(15 %) 80 Bh	(13,44%) 70	89,6%
3.	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara	(56 %) 704 Bh	(54,32%) 679	96,45%	(65 %) 816 Bh	(7,17%) 262	11,03%
Rata-rata Capaian Kinerja				82,39%	Rata-rata Capaian Kinerja		51,74%

1. Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat

Pencapaian pada indikator ini adalah sebesar 54,59% yang didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari hasil yang dicapai dan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020, dimana dari 320 unit sarana transportasi darat yang ditargetkan terealisasi sebanyak 173 unit transportasi darat yang beroperasi selama Tahun 2020. Capaian ini diperoleh dari berapa banyak angkutan melakukan uji KIR di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2019, terlihat mengalami peningkatan nilai capaian dari 170 unit dengan persentase sebesar 24,67% menjadi 173 unit dengan persentase sebesar 25,11% capaian target pada Tahun 2020. Ada beberapa faktor

tidak tercapainya target antara lain disebabkan oleh :

- 1) Semakin banyaknya jumlah kendaraan roda dua mengakibatkan berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi/ angkutan umum sehingga banyak pengusaha angkutan yang memilih berhenti karena tidak mampu menutupi biaya operasional kendaraan.
- 2) Adanya pandemik Covid 19 yang mengakibatkan adanya peniadaan aktivitas pelayanan umum.

Adapun rekomendasi untuk perbaikan di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan angkutan umum.
- b. Meningkatkan pengawasan di lapangan, bekerja sama dengan stake holder terkait, seperti Satlantas Polres Kepulauan Selayar.
- c. Mendorong pihak terkait guna memberlakukan sanksi maksimal bagi siapapun operator kendaraan umum yang tidak memiliki SIM umum, tidak memiliki kendaraan yang laik jalan sesuai rekomendasi Pengujian Kendaraan Bermotor dan tidak memiliki kelengkapan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang.
- d. Mengupayakan agar secepatnya diadakan fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor sesuai standar.

Tabel 2.35

Data Transportasi Darat
 Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Tahun	Jenis Kendaraan			
		Mobil Penumpang (unit)	Bus (unit)	Truk (unit)	Sepeda Motor (unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2019	85	8	107	578.022
2	2020	87	8	107	572.834

2. Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut

Pencapaian pada indikator ini adalah sekitar 89,6% yang diperoleh dari hasil perhitungan yang dicapai yaitu sebanyak 70 unit dari target yang ditetapkan sebanyak 80 unit kapal laut angkutan penumpang dan barang yang beroperasi di perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2020. Sedangkan pencapaian pada Tahun 2019 adalah sekitar 90% dengan realisasi capaian 63 unit kapal laut angkutan penumpang dari 70 unit kapal laut yang ditargetkan . Dari capaian tersebut terjadi peningkatan realisasi capaian kinerja.

Adapun upaya untuk peningkatan capaian di tahun yang akan datang antara lain:

1. Mengupayakan adanya penambahan armada atau jadwal kunjungan kapal pelni yang melayani Pelayaran Selayar – Wilayah Kepulauan atau Selayar – NTT;
2. Mengupayakan adanya penambahan armada untuk rute penyebrangan Pamatata Bira; dan
3. Mengupayakan adanya pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan Penyebrangan Pattumbukang sehingga Kapal Feri bisa Home Base dan dapat melayani rute Pattumbukang – Wilayah Kepulauan setiap hari.

Tabel 2.36
 Data Kapal di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Jenis Kapal	Jumlah Kapal				Ket
		2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kapal Niaga >6 GT	52	55	63	70	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

3. **Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara**

Pencapaian indikator ini adalah sebesar 54,32% yang diperoleh dari realisasi Tahun 2020 sebanyak 262 flight atau sebesar 7,18% dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 816 flight keberangkatan pesawat udara melalui Bandar Udara H. Aroeppala Kabupaten Kepulauan Selayar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian kinerja ketersediaan moda transportasi udara mengalami penurunan sekitar 47,14% penerbangan. Hal tersebut terlihat dimana pada Tahun 2019 capaian target sebesar 96,45% dengan jumlah penerbangan sebanyak 679 dari 704 flight yang ditargetkan.

Salah satu penyebab menurunnya capaian kinerja pada moda transportasi udara adalah:

1. Adanya wabah virus corona yang mengakibatkan dilarangnya melakukan pelayanan transportasi udara.

Sasaran Strategis 16

Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Dasar

Sasaran strategis 16 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata”**. Sasaran ini didukung oleh beberapa SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama dengan Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk mengukur sasaran keenam belas ini terdapat 4 (empat) program pembangunan daerah yang terdiri dari 20 (dua puluh) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **62,81%** dengan kategori predikat **Rendah**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas infrastruktur dasar adalah sebagai berikut:

16.1. Program Peningkatan Kapasitas infrastruktur Perhubungan dan Transportasi

Tabel 2.37
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jalan lingkaran timur utara terbangun (%)	94,95	0	0%	100	0	0
2.	Jalan lingkaran timur tengah terbangun (%)	85,55	0	0%	92,30	0	0
3.	Jalan lingkaran timur selatan terbangun (%)	82,18	0	0%	91,55	0	0
4.	Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)	75,00	78,47	104,63%	80	69,72	87,15
5.	Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	(67%) 2 buah	3 buah	150%	100 % 3 Bh	100%	100 %
6.	Berfungsinya Bandara Kayuadi	Study KKOP dan amdal	Tidak terealisasi	0%	8 Pemb. Fisik sisi darat dan Udara	Tidak terealisasi	0%
7.	Jumlah Pelabuhan Laut (%)	(65%) 13 buah	7 buah	54%	(75 %) 15 Bh	35% 7 bh	41,18%
8.	Perluasan terminal angkutan darat (%)	(65%) 80	(40%) 50	63%	(73 %) 90	28,90% 50	35,68%
9.	Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)	(67%) 4 buah	(50%) 3 buah	75%	83% 5 Bh	50% 3 bh	50%
Rata-rata Capaian Kinerja				77,22%	Rata-rata Capaian Kinerja		62,81

1. Jalan lingkaran timur utara terbangun

Salah satu indikator kinerja peningkatan kapasitas infrastruktur dasar adalah terbangunnya jalan lingkaran timur utara. Namun untuk capaian indikator ini sejak awal RPJMD Tahun 2016 sampai Tahun 2020 dimana telah memasuki tahun ke lima, jalan lingkaran timur utara

yang terbangun masih tetap sepanjang 3,90 km dari 19,70 km (19,80%). Jalan yang telah terbangun adalah Lembangia - Langsangereng, Tanaera – Lembangia dan Patori – Tanaera yang dibangun pada Tahun Anggaran 2018 yang lalu.

Sejak Tahun 2018 hingga tahun 2020, anggaran untuk jalan lingkaran timur utara sudah tidak ada sehingga realisasi kinerja yang digunakan tidak berubah dari tahun 2017 sebesar 19,80 sehingga total realisasi capaian indikator Jalan Lingkaran Timur Utara terbangun sampai tahun 2020 tetap sebanyak 19,80%.

2. Jalan lingkaran timur tengah terbangun

Indikator kinerja lainnya untuk peningkatan kapasitas infrastruktur dasar adalah terbangunnya jalan lingkaran timur tengah. Tidak jauh beda dengan pembangunan jalan lingkaran timur utara, untuk indikator terbangunnya jalan lingkaran timur tengah, sejak awal RPJMD Tahun 2017 sampai Tahun 2020 dimana telah memasuki tahun ke lima, pembangunan untuk indikator ini masih belum terlaksana disebabkan karena belum adanya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan indikator tersebut. Hal ini disebabkan karena data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tidak sesuai dengan data Kementerian Pekerjaan Umum, maka kegiatan yang terkait dengan pembangunan jalan lingkaran timur tengah belum pernah dilaksanakan. Atau dengan kata lain, realisasi pembangunan jalan lingkaran timur tengah masih tetap sama dengan posisi awal RPJMD, yaitu tahap pembukaan jalan lingkaran timur tengah.

3. Jalan lingkaran timur selatan terbangun

Selain terbangunnya jalan lingkaran timur utara dan jalan lingkaran timur tengah, dibangun juga jalan lingkaran timur selatan yang terletak di kecamatan Bontosikuyu yaitu pembangunan ruas jalan Jammeng – Maja-Maja, namun karena ruas tersebut telah dialihkan ke jalan

Provinsi sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1159/IV/Tahun 2018 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Sulawesi Selatan dan anggaran untuk ruas Jammeng – Maja Maja dialihkan ke ruas Peningkatan jalan dalam kota Onto dan Pengaman Tebing Sungai Tulang karena telah terjadi longsor dan sudah masuk ke badan jalan. Oleh karena itu untuk Tahun 2020 tidak ada capaian untuk indikator ini dan luas Jalan lingkaran Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang terbangun sampai Tahun 2020, masih tetap sama dengan realisasi tahun 2019 dikarenakan tidak adanya anggaran dan ruas jalan ini sudah dialihkan ke provinsi.



Gambar 2.1
 Kondisi jalan di
 Kecamatan
 Bontosikuyu

4. Tingkat pemenuhan jaringan jalan

Tabel 2.38
 Data kondisi jalan

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	82,75	69,72	84,25
2	Panjang Jalan dilalui roda 4	548,81 km	824,8 km	150,29%
3	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan keKawasan Permukiman Penduduk (minimal dilalui roda 4)	402,69 km	569,88km	141,52%
4	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (40 km/jam)	317,44 km	569,88 km	179,52%
5	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)	14.417 meter	16.433 meter	113,98%

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2020

Tabel 2.39
 Daftar jalan menurut keadaan dan status jalan dalam kilometer
 Tahun 2020

Keadaan	Status jalan			
	Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten	
	2018	2019	2019	2020
I. JENIS PERMUKAAN				
a. Diaspal			478,99	459,14
b. Beton			11,54	10,74
c. Kerikil			181,97	160,81
d. Tanah			195,10	194,10
e. Tidak dirinci			-	
Jumlah			867,60	824,79
II. KONDISI JALAN				
a. Baik			265,5	272,76
b. Sedang			114,9	110,20
c. Rusak			231,27	192,06
d. Rusak Berat			255,92	249,78
Jumlah			867,60	824,79

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2020

Pada Tahun 2020 terjadi penurunan dalam capaian indikator tingkat pemenuhan jaringan jalan diakibatkan karena terjadi rasionalisasi anggaran yang diakibatkan oleh adanya Virus Corona 19. Rasionalisasi ini menyebabkan anggaran untuk pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan menjadi berkurang. Walaupun terdapat beberapa anggaran yang dikembalikan ketika perubahan namun anggaran tersebut tidak bisa digunakan dengan maksimal mengingat waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan/waktu terlalu singkat.

5. Kapasitas Bandara Aroepalla

Indikator kapasitas Bandara Aroepalla dapat diukur dari daya tampung *apron* (terminal pesawat) yang dalam hal ini terkait

berapa unit pesawat yang mampu ditampung *apron* (terminal pesawat) Bandara Aroeppala . Sampai Tahun 2020 realisasi capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100% dimana *apron* (terminal pesawat) Bandara Aroeppala mampu menampung pesawat sebanyak 3 unit pesawat jenis ATR sesuai dengan yang ditargetkan.

Selain itu perluasan terminal pesawat yang merupakan standar ukuran capaian kinerja kapasitas Bandara Aroeppala, pada Tahun 2019 juga dilakukan pengembangan terminal penumpang dengan kegiatan pembangunan gedung baru terminal penumpang. Sebelumnya terminal penumpang masih merupakan bangunan lama sejak Bandara Aroeppala pertama dibangun. Terminal penumpang yang lama sudah tidak mampu lagi menampung kapasitas penumpang pengguna jasa Bandara Aroeppala dan seluruh aktifitas petugas bandara seperti *checking counter*, pemuatan bagasi, pemeriksaan keamanan, boarding dan sebagainya. Dengan adanya pembangunan terminal penumpang yang baru, penumpang akan merasa lebih nyaman karena kondisi terminal yang lebih luas.

Faktor yang menjadi penyebab peningkatan capaian indikator kinerja peningkatan kapasitas Bandara Aroeppala tersebut antara lain karena :

- 1) Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menggunakan jasa transportasi udara.

Gambar 2.2
Area Parkir Pesawat (*Apron*) Bandara H. Aroeppala



6. Berfungsinya Bandara Kayuadi

Capaian indikator berfungsinya Bandara Kayuadi dapat dilihat dari sejauh mana proses pembangunan Bandara Kayuadi mulai dari proses study, pembangunan fisik sampai dapat difungsikannya. Pada Tahun 2020 target capaian berupa terlaksananya pembangunan fisik sisi darat dan udara, namun sama dengan tahun sebelumnya target capaian indikator yang ditetapkan tidak dapat terealisasi.

Tidak tercapainya indikator berfungsinya Bandara Kayuadi sebagaimana pada tabel di atas disebabkan oleh :

- 1) Terkendala belum adanya Peraturan Menteri Perhubungan terkait penetapan lokasi dimana ini merupakan salah landasan hukum yang menjadi dasar acuan untuk pelaksanaan tahapan proses pembangunan Bandara Kayuadi mulai dari proses study, pembangunan fisik sampai tahap fungsional.
- 2) Kementerian Perhubungan mengutamakan untuk lebih fokus terlebih dahulu pada pengembangan Bandara H. Aroepala sebagai salah satu fasilitas penting dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar ke depan.

7. Jumlah Pelabuhan Laut

Capaian kinerja jumlah pelabuhan laut sejak awal periode RPJMD tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 7 (tujuh) unit. Hanya pada persentase capaian yang mengalami penurunan dikarenakan jumlah capaian yang ditargetkan setiap tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 capaian indikator ini hanya sekitar 35% dari 75% yang ditargetkan, yang diperoleh dari jumlah pelabuhan laut yang terbangun yaitu sebanyak 7 unit pelabuhan dibagi dengan target yang ditetapkan sebanyak 15 unit

pelabuhan laut. Adapun hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 54% menjadi 41,18% dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Untuk membangun pelabuhan laut membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui beberapa tahapan. Tahapan awal membutuhkan beberapa study yang menentukan apakah pembangunan pelabuhan laut pada wilayah tersebut layak untuk dilaksanakan.
- 2) Pelabuhan laut yang ada saat ini dapat dikatakan sudah dapat mewakili kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan karena pada setiap kecamatan sudah memiliki pelabuhan laut, sehingga APBD bisa dimaksimalkan untuk pembangunan di sektor lain yang lebih penting.
- 3) Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan laut yang sangat besar sehingga untuk membiayai pembangunan pelabuhan laut sangat diharapkan adanya bantuan dari dana APBN.

Gambar 2.3 Pelabuhan Penyeberangan Pamatata



Tabel 2.40
 Data Pelabuhan Laut Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi
1.	Pelabuhan Laut Pamatata	Pamatata Kec. Bontomatene
2.	Pelabuhan Laut Benteng	Benteng Kec. Benteng
3.	Pelabuhan Laut Jampea	Benteng Jampea Kec. Pasimasunggu
4.	Pelabuhan Laut Kayuadi	Kayuadi Kec. Takabonerate
5.	Pelabuhan Laut Jinato	Jinato Kec. Takabonerate
6.	Pelabuhan Laut Bonerate	Bonerate Kec. Pasimarannu
7.	Pelabuhan Laut Kalaotoa	Kalaotoa Kec. Pasilambena

8. Perluasan terminal angkutan darat

Capaian indikator perluasan terminal angkutan darat pada Tahun 2020 adalah sebesar 35,68% atau sebanyak 50 unit kendaraan angkutan dari 100 unit kendaraan angkutan yang ditargetkan mampu ditampung di area parkir Terminal Angkutan Darat Benteng. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 nilai capaian kinerja perluasan terminal angkutan darat tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 50 unit kendaraan angkutan, namun mengalami peningkatan persentase capaian dari 40% menjadi 63% atau naik sebesar 23%.

Belum adanya peningkatan nilai capaian indikator perluasan terminal angkutan darat tersebut disebabkan antara lain :

- 1) Belum maksimalnya fungsi terminal angkutan darat Benteng sebagai fasilitas bongkar muat penumpang, dimana masih banyak kita jumpai angkutan pedesaan yang melakukan bongkar muat penumpang disembarang tempat seperti pasar, tempat pelelangan ikan dan sebagainya.
- 2) Jika dilakukan pengembangan terhadap terminal angkutan darat yang ada sekarang, akan berdampak pada peningkatan tipe

terminal dari tipe C ke tipe B. Jika terjadi peningkatan ke tipe B maka secara otomatis pengelolaan Terminal Angkutan Darat Benteng diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Gambar 2.4
Area Parkir dan Peron Kedatangan/Keberangkatan
Terminal Angkutan Darat Benteng



Persentase capaian kinerja pada Tahun 2020 sebesar 50% dengan nilai capaian jumlah pelabuhan penyeberangan sebanyak 3 unit dari target sebanyak 6 unit. Jika dibandingkan dengan capaian indikator pada Tahun 2019 sebesar 60%, maka pada tahun ini realisasi capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 10%. Hal ini disebabkan karena jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun sampai Tahun 2020 adalah sebanyak 2 (dua) pelabuhan, yang ditambah 1 (satu) unit pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan plensengan yang dibangun pada pelabuhan pamatata sebagai alternatif tempat sandar kapal ferry saat pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi *Moveable Bridge* (MB) Pelabuhan Penyeberangan Pamatata.

Peningkatan capaian kinerja Jumlah Pelabuhan Penyeberangan disebabkan oleh adanya pembangunan pelabuhan plensengan pada Pelabuhan Pamatata sebagai jembatan

penyeberangan alternatif saat berjalannya proses pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi *Moveable Bridge (MB)* Pelabuhan Penyeberangan Pamatata. Pelabuhan plensengan tersebut dapat dimanfaatkan seterusnya setelah selesainya proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi MB tersebut. Kita patut bersyukur dengan adanya kegiatan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Pamatata karena selain perbaikan MB juga disertai dengan pembangunan sarana prasarana lain seperti, gedung kantor, mushollah, toilet dan kios.

Selain pelabuhan Penyeberangan Pamatata, terdapat satu lagi pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang yang menghubungkan daratan Selayar dengan wilayah kepulauan dan wilayah timur Indonesia seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain pembangunan wilayah daratan tentunya diharapkan adanya pemerataan pembangunan terutama di kepulauan, sehingga diharapkan pada wilayah kepulauan terdapat juga pelabuhan penyeberangan terutama pada ibu kota kecamatan. Namun, sampai saat ini apa yang diharapkan tersebut belum dapat terealisasi. Hal tersebut disebabkan oleh :

- 1) Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan, sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sangat berharap adanya bantuan dana dari Pemerintah Pusat melalui dan APBN.
- 2) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan harus melalui beberapa tahap antara lain sebelum pembangunan fisik harus melalui beberapa studi kelayakan yang harus dibiayai sendiri oleh pemerintah daerah.

Gambar 2.5
 Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang



16.2. Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Air dan Irigasi ok

Tabel 2.41
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio jaringan irigasi	75,00	91,87	122,50%	80	91,87	114,84%
2.	Rasio ketersediaan air baku	90,00	81.03	90,04%	95	81,33	85,61%
Rata-rata Capaian Kinerja				106,27%	Rata-rata Capaian Kinerja		100,23%

1. Rasio Jaringan Irigasi

Dari uraian tabel di atas tergambar bahwa persentase realisasi indikator rasio jaringan irigasi tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tetap 91,87% diakibatkan kegiatan yang terlaksana adalah rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan panjang 2.50 M^c dan lebar 2.50 M^c.

Peningkatan Jaringan Irigasi merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator rasio jaringan irigasi pada tahun 2020. Kegiatan tersebut mengalami hambatan di sebabkan adanya rasionalisasi anggaran akibat covid 19 namun dianggarkan kembali

pada perubahan, kegiatan ini tidak dapat terlaksana mengingat waktu yang sangat singkat dan bertepatan dengan musim tanam yang kemudian anggaran tersebut diluncurkan untuk tahun anggaran 2021.

Tabel 2.42
Rasio Jaringan Irigasi

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio jaringan irigasi	80,00%	91,87%	114,84%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2020



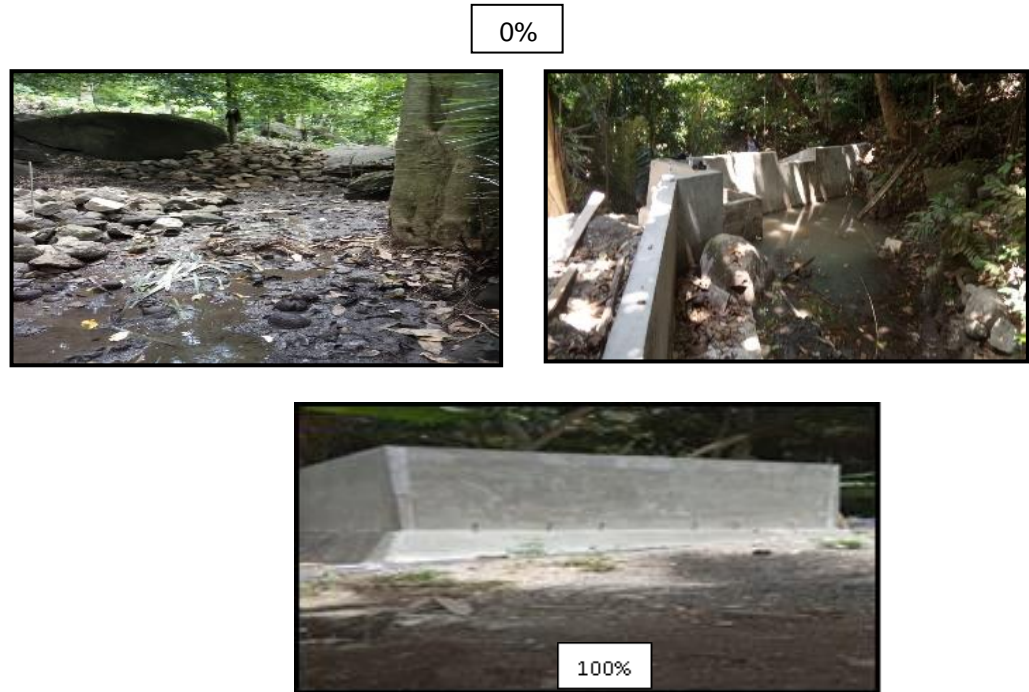
Gambar 2.6: Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Binanga Parra 3
(Kecamatan Pasimasunggu)

2. Rasio ketersediaan air baku

Permasalahan yang timbul pada sumber air permukaan dan sumber air non permukaan yaitu pada musim kemarau jumlah air permukaan yang mengalir sangat kecil karena air permukaan yang mengalir merupakan air buangan maupun air tanah yang keluar ke dalam saluran. Sebaliknya pada musim hujan, jumlah air yang dialirkan sangat besar yang berasal dari air hujan yang melimpah. Hal ini berpotensi menimbulkan banjir, karena penampang saluran yang terbatas dan banyak material yang menghambat aliran air dalam saluran, seperti sampah dan tanaman.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber air permukaan ini adalah: pengaturan aliran, perlindungan daerah tangkapan air, pengaturan tata ruang, melakukan proteksi dan konservasi daerah recharge dan lokasi sumber air baku potensial, dukungan regulasi/kebijakan dari pemerintah, menerapkan teknologi daur pakai air, menerapkan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan air, studi lebih detail identifikasi potensi sumber air baku. Sedangkan untuk sumber air non permukaan: menampung dan menyalurkan air ke dalam akifer melalui bangunan tertentu, menghambat air permukaan supaya meresap ke dalam tanah dan mengatur penggunaan air secara optimal. Untuk menjamin ketersediaan air tanah untuk masa mendatang maka pengaturan pemanfaatan air tanah harus dilakukan. Dalam hal ini sangat diperlukan peraturan yang tegas, jelas dan mengikat terhadap pemanfaatan air tanah itu sendiri.

Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku melalui pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang pada Tahun 2020 telah membangun 1 unit bangunan air. Program lainnya adalah pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya melalui pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya yang pada tahun ini telah membangun 1 unit penampungan air.



Gambar 2.7: Pembangunan Intake dan Tata Air Baku Bikoti

16.3. Program Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 2.42
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	96,77	74,65	77,14%	98,8	75,26	76,18
2.	Rasio ketersediaan air bersih industri (%)	100	0	0%	100	0	0
3.	Rumah layak huni (%)	(90,38) 1.250 Unit	621 Unit	49,68%	1.250 unit	556 unit	44,48%
4.	Cakupan sanitasi layak (%)	100	72,77	72,77%	100	74,79	74,79
5.	Kawasan pemukiman kumuh tertangani (%)	(60) 220 Ha	9,69 Ha	4,40%	220 Ha	0,83 Ha	0,38%
Rata-rata Capaian Kinerja				74,21%	Rata-rata Capaian Kinerja		48,96%

1. Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga

Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga pada Tahun 2020 adalah 76,18 dari target 98,8, Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019 yang hanya 74,65, maka capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,53%. Untuk mencapai indikator tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2020 melaksanakan berbagai program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dengan kegiatan seperti pendampingan program PANSIMAS, pembangunan sarana dan prasarana air bersih serta pembangunan sarana air bersih dan pemasangan sambungan jaringan air bersih ke rumah (SR) yang merupakan program hibah air minum perdesaan dimana Tahun 2020 ini diberikan kepada 5 (lima) Desa yaitu Desa Parak Kecamatan Bontomanai sebanyak 107 SR (Sambungan Rumah), Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 116 SR, Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu sebanyak 100 SR, Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena sebanyak 102 SR dan Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena sebanyak 64 SR dengan total sambungan air bersih kerumah sebanyak 489 SR.

Belum maksimalnya pencapaian kinerja indikator ini disebabkan karena masih adanya kendala yang dihadapi seperti:

- a. Jauhnya jarak dari sumber air bersih ke rumah penduduk sehingga menyulitkan dalam pendistribusian dengan menggunakan mesin pompa;
- b. Kualitas air yang berbeda dengan instalasi di kampung satu dengan kampung lainnya sehingga dibutuhkan pengolahan yang berbeda-beda;
- c. Kurangnya sumber air di daerah tersebut.

2. Rasio ketersediaan air bersih industri

Sama halnya dengan tahun sebelumnya, pada Tahun 2020 tidak ada realisasi yang dicapai untuk rasio ketersediaan air bersih industri disebabkan karena belum adanya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan indikator tersebut.

3. Rumah layak huni

Sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2020, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang terdapat di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, baik di wilayah daratan maupun wilayah kepulauan adalah sebanyak 7.734 unit ditambah jumlah rumah nelayan yang terbangun dari tahun 2014, 2017 dan tahun 2018 sebanyak 213 unit.

Pada Tahun 2017, jumlah rumah tidak layak huni yang telah ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 308 unit, Tahun 2018, jumlah rumah tidak layak huni yang telah tertangani sebanyak 434 unit, Tahun 2019 jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani adalah sebanyak 539 unit dengan rincian 139 unit rumah ditangani melalui anggaran dana alokasi khusus (DAK), 200 unit rumah ditangani melalui Program BSPS reguler dan 200 unit rumah melalui Program BSPS Strategi, sedangkan untuk Tahun 2020 jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani sebanyak 556 unit sehingga total rumah layak huni yang ditangani menjadi rumah layak huni sampai tahun 2020 sebanyak 1.837 unit. Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan :

- Koordinasi terkait kegiatan perumahan formal, khusus, umum dan komersil,
- Pendampingan Program BSPS,
- DAK perumahan dan permukiman,
- Verifikasi data RTLH secara berkala di Kabupaten Kepulauan Selayar,

- Pendampingan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya,
- Peningkatan peran pokja perumahan dan kawasan permukiman, dan
- Bantuan stimulant peningkatan kualitas rumah swadaya.

Untuk mewujudkan indikator tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus berupaya setiap tahunnya untuk memperoleh bantuan dana APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baik reguler maupun strategi seperti tahun ini. Diharapkan juga kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran lebih besar lagi kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun berikutnya agar supaya dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sedangkan Dinas Sosial melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan membantu masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni juga telah melaksanakan program RTLH dan menangani sebanyak 82 unit rumah pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebanyak 584 unit rumah.

Tabel 2.43
 Capaian Rumah Layak Huni Tahun 2017 – 2020

Indikator	Instansi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Rumah layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	308 unit	434 unit	539 unit	556 unit
Rumah layak huni	Dinas Sosial	-	549 unit	82 unit	584 unit
Total		308 unit	983 unit	621 unit	1.140 unit

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2020

Dari data tersebut diatas, dipastikan bahwa dari 7.734 jumlah rumah tidak layak huni yang terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2020, yang telah mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah adalah sebanyak 1.140 unit rumah dari jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni

yang terdapat diseluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, atau dengan kata lain masih terdapat 6.110 rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

1. Kurangnya SDM atau tenaga teknis
2. Adanya fluktuasi harga
3. Ketersediaan bahan baku yang terlambat dari pemasok atau rekanan
4. Biaya operasional yang masih kurang.

Adapun saran perbaikan dalam rangka pencapaian indikator sesuai target yang telah ditentukan adalah:

1. Diharapkan adanya dukungan kebijakan di bidang perumahan yang memadai;
2. Peningkatan Koordinasi dan penataan kelembagaan dibidang perumahan;
3. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan;
4. Perlunya kejelasan arah kebijakan tentang Pengembangan Perumahan.

4. Cakupan sanitasi layak

Ketersediaan sanitasi yang layak merupakan upaya menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam kawasan pemukiman, salah satu cara dengan pembangunan drainase pada tempat tersebut. Pada Tahun 2019, jumlah rumah tangga bersanitasi layak sebanyak 24.532 KK dengan capaian realisasi sebesar 72,77%. Untuk tahun 2020, penambahan jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan sanitasi layak sebanyak 681 KK sehingga jumlah keseluruhan realisasi di tahun 2020 sebanyak 25.213 KK dengan persentase capaian sebesar 74,79%. Cakupan ini mengalami kenaikan sebanyak 2.02% dibanding tahun lalu. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual dilaksanakan di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Bontosikuyu Desa Harapan sebanyak 181

KK, Kecamatan Bontoharu Desa Bontosunggu sebanyak 300 KK dan Kecamatan Bontomanai Desa Mare-Mare sebanyak 200 KK.

Adapun faktor yang mendukung pencapaian indikator ini adalah keberhasilan pelaksanaan program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Air Limbah dengan kegiatan pembangunan drainase dan air limbah yang pada Tahun 2020 telah membangun drainase sepanjang 5.567 meter serta kegiatan infrastruktur sanitasi yang telah melayani 681 KK pada tahun ini.

5. Kawasan pemukiman kumuh tertangani

Sesuai data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, luas kawasan kumuh untuk wilayah perkotaan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 24,27 Ha sesuai Surat Keputusan Bupati No. 365/V/Tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan luas kawasan kumuh untuk wilayah pedesaan adalah seluas 248,77 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Bupati nomor No.567/X/Tahun 2017 dan Surat Keputusan Bupati nomor 641/XII/Tahun 2018 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga total luas kawasan kumuh secara keseluruhan adalah seluas 401,16 Ha.

Tabel 2.44
 Kawasan Kumuh Tertangani 2016 – 2020

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Total Capaian
Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani (%)	0	3,20 Ha	0,7 Ha	5,79 Ha	0,02	9,71Ha

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2020

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa sampai Tahun 2020 luas kawasan kumuh yang telah ditangani oleh Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman adalah seluas 9,71 Ha. Capaian kinerja ini sangat jauh dibandingkan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini disebabkan karena target yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana SK Kumuh Tahun 2017 sebesar 55,61 Ha (dibawah 10 Ha) dan Tahun 2018 sebesar 70,31 Ha (dibawah 10 Ha) dan SK Kumuh 2019 sebesar 14,56 Ha sehingga total luas sebesar 140,48 Ha. Pengurangan luasan kawasan kumuh sesuai SK Kumuh pada tahun 2020 sebesar 0,02 Ha. Adapun upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan sasaran ini adalah :

1. Melakukan perhitungan persentase pengurangan kawasan kumuh dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai dari tahun 2017 sehingga bisa diketahui pengurangannya dari tahun ke tahun.
2. Mengajukan permohonan anggaran/proposal ke Provinsi agar mendapatkan alokasi dana untuk program KOTAKU. Program ini ditujukan untuk mendukung terciptanya kawasan Kota Tanpa Kumuh KOTAKU.

Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar disamping melaksanakan Program Pemberdayaan Komunitas Kawasan Permukiman dengan kegiatan:

- Pendampingan Program KOTAKU
- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu (Jalan dan Drainase Lingkungan)
- Pembinaan Kawasan Layak Huni di Kecamatan Benteng
- Sosialisasi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh

Turut mendukung pula program Penataan Bangunan dan Lingkungan yang pada Tahun 2020 ini telah membangun jalan lingkungan dengan panjang 3.919,08 meter dan lebar 3 meter

sehingga luasan menjadi 11.757,24 meter atau 117,57 Ha dan drainase lingkungan dengan panjang 1.061,22 meter. Adapun saran perbaikan dalam rangka pencapaian indikator sesuai target yang telah ditentukan adalah:

1. Diharapkan adanya dukungan kebijakan di bidang kawasan permukiman yang memadai;
2. Peningkatan Koordinasi dan penataan kelembagaan dibidang kawasan permukiman;
3. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman;
4. Perlunya dukungan dari pihak terkait untuk pembangunan areal Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
5. Perlunya kejelasan arah kebijakan tentang Pengembangan Kawasan Permukiman.

16.4. Program pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Energi

Tabel 2.45
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	59,15	-	-	59,15	-	-
2.	Rasio elektrifikasi industri (%)	43,65	-	-	43,65	-	-
3.	PLTMG terbangun dan beroperasi	Beroperasi	-	-	Beroperasi	-	-
4.	Terminal gas terbangun dan beroperasi	Beroperasi	-	-	Beroperasi	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja				-	Rata-rata Capaian Kinerja		-

1. Rasio elektrifikasi rumah tangga dan industri

Untuk indikator rasio elektrifikasi rumah tangga dan industri pada Tahun 2020 ini sudah tidak ada lagi realisasi capaian sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan Dinas Energi, Sumber Daya Manusia dan Pertambangan yang kepengurusannya dialihkan ke provinsi sejak Tahun 2017 lalu sehingga pemerintah daerah sudah tidak mengalokasikan anggaran lagi untuk pencapaian indikator tersebut.

2. PLTMG dan terminal gas terbangun dan beroperasi

Sama halnya dengan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga dan Industri, PLTMG dan Terminal Gas Terbangun dan Beroperasi sudah tidak ada lagi realisasi capaian sejak Tahun 2017 disebabkan karena terjadinya peralihan kewenangan dari daerah ke provinsi sehingga pemerintah daerah sudah tidak mengalokasikan anggaran lagi untuk pencapaian indikator tersebut.

Sasaran Strategis 17

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Sasaran strategis 17 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata”**. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kepariwisata, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perhubungan serta Dinas

Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Untuk mengukur sasaran ke tujuh belas ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **16,07%** dengan kategori predikat **Sangat Rendah**. Hasil pengukuran peningkatan kunjungan wisatawan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 17

No	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	(40%) 14,285	11.355 orang	79,49%	(50%) 21.427	5.734 orang	26,76%
2.	Jumlah kunjungan wisatawan asing	(70%) 1.598	1.068 orang	66,83%	(80%) 2.877	155 orang	5,38%
Rata-rata Capaian Kinerja				73,16%	Rata-rata Capaian Kinerja		16,07

Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2020 ini mengalami penurunan dalam kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Capaian kunjungan wisatawan domestik sebanyak 5.734 orang dengan capaian persentase sebesar 26,76 % dengan kata lain mengalami penurunan yang sangat drastis dibanding capaian kunjungan wisata domestik pada tahun 2019 sebanyak 11.355 orang dengan persentase capaian sebesar 79,49% sedangkan kunjungan wisata asing (Mancanegara) sebanyak 155 orang dengan persentase capaian sebesar 5,38% juga mengalami penurunan dibanding jumlah kunjungan mancanegara pada tahun 2019 sebanyak 1.068 orang dengan persentase capaian sebesar 66,83%.

Program dan kegiatan yang langsung berdampak pada penurunan capaian target kunjungan wisatawan adalah Peningkatan Sistem Informasi Pariwisata, hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Meningkatnya persaingan antar destinasi dengan daerah lain, terutama sesama destinasi bahari.

- b. Destinasi di Kepulauan Selayar masih berupa potensi yang belum dikelola dengan baik.
- c. Aksesibilitas ke lokasi destinasi masih belum mendukung wisata di Kepulauan Selayar, terutama wisatawan yang memiliki waktu berwisata sangat singkat.
- d. Pandemi covid 19 yang mewabah sejak bulan maret 2020 berdampak pada sektor pariwisata yang dapat dilihat dari penurunan jumlah wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu pandemi ini juga berdampak pada *refocusing* anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Akibatnya beberapa *event* yang telah direncanakan untuk promosi wisata dalam mendatangkan wisatawan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Berikut ini beberapa potret obyek wisata yang menjadi destinasi di Kabupaten Kepulauan Selayar:

1. Pantai Liang kareta



Pantai Liang Kareta adalah salah satu obyek wisata pantai yang terdapat di Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Lokasinya

berjarak sekitar setengah sampai 1 jam perjalanan laut dari ibu kota kabupaten. Bagi yang punya kendaraan bisa juga menuju Desa Bontosunggu terlebih dahulu yang jaraknya sekitar 5 km dari kota Benteng lalu kemudian menggunakan perahu reguler sehingga perjalanan lautnya paling cuma ditempuh sekitar 15 menit ke lokasi ini.

2. Takabonerate



Takabonerate adalah Taman Laut Nasional yang terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Jarak dari Benteng, ibu kota Kabupaten Kepulauan

Selayar adalah 25 kilometer. Sementara kalau dari Kota Makassar sekitar 300 kilometer. Asal-usul Takabonerate adalah sebuah gunung berapi yang meletus dan sisa-sisanya terendam sekitar 2.000 meter di bawah permukaan laut. Terbentuklah terumbu karang dengan aneka tanaman laut. Sampai-sampai ada satu bagian yang lapang sekali mirip sabana di daratan yang disebut padang lamun.

3. Baloiya



Pantai Baloiya Sulawesi Selatan Pemandangan Batu di Tengah Pantai Menjadi Daya Pikat Luar Biasa Sebagai daerah kepulauan, Selayar memiliki

banyak spot wisata pantai yang menarik.

Salah satu tempat yang bisa menjadi pilihan adalah Pantai Baloiya. Pantai Baloiya merupakan sekian banyak lokasi wisata bahari primadona yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Jaraknya hanya sekitar 10 km arah utara kota Benteng. Di kawasan Pantai Baloiya tersedia fasilitas penginapan dan fasilitas lain seperti cafe dan restoran. Suasananya juga tak kalah eksotis dengan Taman Nasional Takabonerate yang sudah terkenal itu. Di kawasan

Pantai Baloiya sendiri, terdiri dari beberapa spot wisata yang bisa anda datangi. Selayar Island Resort adalah salah satu diantaranya. Selayar Island Resort dikelola oleh pihak asing dan tersedia fasilitas restoran serta bungalow.

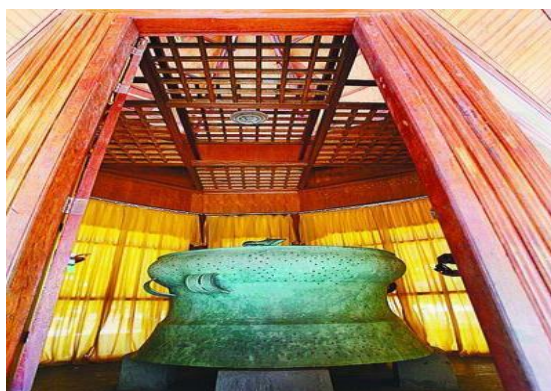
4. Pantai Pa'badilang



Topografi Pantai Pa'badilang yang berbentuk tanjung, menawarkan pesona tersendiri untuk anda yang berkesempatan menyinggahi tempat yang berlokasi di Desa

Bungaiya, Kecamatan Bontomate'ne. Disisi baratnya adalah pantai berpasir putih sementara sisi timur berupa tebing karang yang ditumbuhi pepohonan berukuran sedang. Pantai Pa'badialng berjarak sekitar 35 km sebelah utara kota Benteng.

5. Gong Nekara



Gong Nekara Adalah benda peninggalan sejarah yang menurut data arkeologi berasal dari pusat kerajaan perunggu pada abad ke 2 SM.. Pada masanya alat ini

digunakan sebagai simbol pemerintahan dan alat komando. Gong Nekara ditemukan pada abad ke XVII (1868). Berlokasi sekitar 4 Km dari kota Benteng. Konon, Gong Nekara ini merupakan gong terbesar di Asia Tenggara. Gong Nekara ini mempunyai garis tengah 126 cm dengan luas lingkaran permukaan 396 cm persegi. Lingkaran pinggang 340 cm persegi, tinggi badan 95 cm, bintang 16 jari, jari-jari

permukaan 63 cm, adapun gambar atau lukisan motifnya adalah lukisan gajah 16 ekor, pohon sirih 11 batang, burung 54 ekor dan ikan 18 ekor. Pada permukaan gong nekara ini terdiri atas 4 buah arca katak, dan disamping gong ini ada 4 daun telinga. Gong Nekara Selayar terbuat dari logam perunggu yang saat ini tersimpan di daerah Bonto Bangun (Matalalang). Menurut informasi lisan dari tetua adat dan penduduk setempat, nekara tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang penduduk dari Kampung Rea-Rea yang bernama Sabuna pada tahun 1686. Pada saat itu Sabuna sedang mengerjakan sawah Raja Puta Bangung di Papaniohea.

6. Jangkar Raksasa



Jangkar ini diyakini terbesar dan terpanjang di masanya. Jangkar tersebut kini tersimpan di Desa Nelayan Padang. Jangkar yang dilengkapi dengan

meriam itu diperkirakan merupakan peninggalan pedagang Cina pada abad 17-18. Konon katanya, Jangkar Raksasa ini milik seorang saudagar China bernama Gowa Liong Hui yang mengadakan pelayaran menggunakan kapal besar dan singgah di Padang pada akhir abad XVII. Sampai suatu saat kapal dagang milik Cowa Liong Hui ini rusak hingga tidak dapat lagi digunakan untuk berlayar, kemudian jangkar kapal diamankan oleh penduduk setempat yang dikemudian hari menjadi bukti sejarah.

Ada dua jangkar ditempat ini. Jangkar pertama berukuran, panjang batang : 226 cm, panjang lengkungan : 167 cm, lingkaran batang : 60 cm. Sementara jangkar kedua berukuran, panjang batang : 229 cm, panjang lengkungan 117 cm dan lingkaran

batang, 70 cm. Dari penuturan warga, ternyata bukan hanya wisatawan lokal yang sering datang di tempat ini. Wisatawan dan peneliti budaya dan sejarah dari luar negeri juga berdatangan di tempat ini.

Selain jangkar, di mesium ini juga terdapat meriam kuno. Meriam ini jumlahnya 3 buah. Konon, pemilik meriam ini seorang saudagar dari Gowa keturunan Cina yang bernama Baba Desan.

7. Kampung Tua Bitombang



Perkampungan Tua Bitombang adalah sebuah kampung yang terletak di Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu,

Kabupaten Kepulauan Selayar. Lokasi ini berjarak sekitar tujuh kilometer dari Benteng. Kampung tersebut bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat dan roda dua dengan waktu kurang lebih 30 Menit.

Asal-usul dari penamaan kampung ini adalah karena banyaknya rumah yang memiliki usia di atas 100 – 200 Tahun sehingga dinamakan Perkampungan Tua Bitombang. Adapun yang menarik adalah rumah tersebut terbuat dengan desain rumah panggung. Kampung ini terletak di lereng sampai ke puncak bukit. Rumah-rumah sebagian besar terletak di lereng bukit dengan tiang-tiang yang menjulang di bagian belakang berkisar 10 - 20 meter dan bagian depannya hanya berkisar 2-3 meter.

8. Kampung Penyu (turtle village)

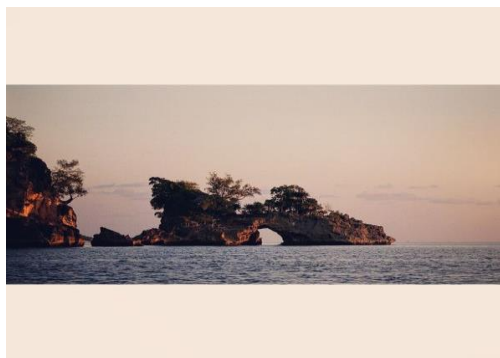


Kampung

Penyu, yang merupakan singkatan dari Perkumpulan Pemuda Pelindung Penyu. Kawasan konservasi penyu ini diinisiasi oleh Sileya

Scuba Drivers (SSD), sebuah organisasi penyelam di Kepulauan Selayar. Inisiatif pembuatan kampung penyu ini didasari oleh keprihatinan maraknya aktivitas pengambilan telur di Desa Barugaia, salah satu kawasan pantai habitat penyu di Selayar. Kampung Penyu terletak di garis pantai Dusun Tulang, Desa Barugaia, Kec. Bontomanai. Upaya itu akhirnya membuahkan hasil akhirnya pada tanggal 13 April 2014, Kampung Penyu diresmikan oleh Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Drs. Ike Edwin, SH, MH.

9. Batu Karapu/ Batu So'bolo



Pantai meliuk, berlekuk, eksotik adalah label untuk Pantai Batu Karapu, Selayar. Letaknya di Dusun Tongke Tongke, Desa Iowa, Kecamatan Bontoharu. Pantai ini

berjarak 40 kilometer ke selatan Kota Benteng. Batu Karapu adalah objek wisata favorit domestik maupun internasional kala tandang ke Selayar. Oleh sebagian pihak Pantai Batu Karapu setanding Pantai Durdle Door di Inggris karena memiliki keunikan sendiri yaitu batu berlubang, condong ke laut dan unik.

10. Mangrove Gusung.



Jika ingin berenang dalam lekuk menghijau, disela batang-batang, dikecipak airlaut silakan menyeberang ke Pasi, ada hamparan

mangrove Gusung menawan. Jika dilihat dari udara, kawasan ini serupa labirin yang dialiri air laut yang dimainkan pasang surut. Jejak-jejak pasang dan surut menjadi saksi keindahan kawasan yang bisa ditempuh selama 15 menit dari Kota Benteng dengan naik perahu bermesin ini.

11. Punagaan



Punagaan adalah objek wisata alam kepulauan selayar, terletak di Desa Laiyolo, Kecamatan Bontosikuyu.

Lokasi wisata ini berjarak ± 40 km dari Benteng. Pantainya berpasir putih bercampur hitam namun eksotik dan mempesona. Letaknya di pantai timur Selayar. Di depan pantai terdapat spot diving dengan biota lobster, ikan kerapu, topografi *drop off*.

12. Air Terjun Patikore



Berekreasi ke Selayar tak lengkap tanpa menjajal Air Terjun Patikore. Letaknya di jarak sekitar 20 kilometer dari Benteng. Air terjun ini adalah

unggulan Desa Laiyyolo, Kecamatan Bontosikuyu. Letaknya di atas bukit dan mengarah ke pantai membuat kita merasakan sensasi lengkap tentang pesona perbukitan dan garis cakrawala di laut biru.

13. Bahuluang



Julukan Surga Tersembunyi, sepertinya tak terlalu berlebihan disematkan ke Pantai Bahuluang. Pantai yang terletak Pulau Selayar,

tepatnya di Pulau Bahuluang, pulau kecil yang bisa diakses dengan kapal laut dari Appatanah, Kepulauan Selayar. Adapun jarak Appatanah dari Benteng, ibukota Kepulauan Selayar adalah sekitar 55 km. Bisa ditempuh selama 1 jam menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua. Pantai yang bersih dengan pasir putih bertekstur lembut, air laut yang jernih dengan gradasi biru dan hijau di Pantai Bahuluang, menjadi garansi keindahan bagi Anda penikmat wisata bahari.

Di Appatanah, terdapat beberapa perahu nelayan yang bisa anda sewa untuk sampai ke pulau nan eksotis ini. Pulau Bahuluang sendiri dihuni oleh warga yang kebanyakan mata pencahariannya

adalah nelayan. Mengunjungi Bahuluang, Andaharus mempersiapkan perlengkapan, semisal alat snorkeling, jika berniat menikmati panorama alam bawah lautnya.

14. Air terjun suttia



Air terjun Suttia adalah salah satu obyek wisata alam yang terletak di Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan

Selayar. Tempat ini berjarak sekitar 25 km dari Kota Benteng (Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar dan bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

15. Pantai Batulohe



Pantai Batu Lohe adalah pantai yang memiliki relief-relief karang yang begitu indah disepanjang pantai. Pantai ini berada di pantai timur Pulau Selayar berpasir

putih dan terletak di Dusun Balang Butung, Desa Balang Butung, Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

16. Gusung karang



Satu lagi surga tersembunyi yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Gusung Karang. Pulau karang ini berbentuk

sangat indah dan layak menjadi persinggahan. Bentuknya yang begitu unik dan indah, membuat pulau ini merupakan salah satu tempat wajib di kunjungi.

17. Masjid Tua Gantarang Lalalang Bata



Mesjid tua ini terletak di Desa Gantarang Lalang Bata, Bontomarannu Kec. Bontomanai. Masjid ini merupakan sebuah situs

peninggalan monumental bersejarah yang tergolong sangat unik karena bangunan masjidnya didirikan di atas sebuah sumur di tengah-tengah areal perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang (baki) emas.

Selain itu, Masjid ini memiliki ciri khas tersendiri yang sangat jelas terlihat dari konstruksi atap tumpang dan mustika di bagian puncaknya. Meski posisinya terletak jauh dari pusat ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar dan relatif terpencil di atas puncak bukit akan tetapi merupakan potensi obyek wisata sejarah dan budaya kebanggaan masyarakat Dusun Gantarang Lalang Bata

karena usianya yang sudah ratusan tahun sehingga situs ini tak pernah lepas dari perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk terus dilestarikan.

Sasaran Strategis 18

Meningkatnya Kelancaran Arus Barang dan Jasa Antara Wilayah Daratan dengan Wilayah Kepulauan

Sasaran strategis 18 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah serta Dinas Perhubungan. Untuk mengukur sasaran kedelapan belas ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **20,82%** dengan kategori predikat **Sangat Rendah**. Hasil pengukuran peningkatan kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 18

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	(40 %) 103.000	(21,17%) 54.845	53%	(45%) 115.000	(9,37%) 23.977	20,82%
Rata-rata Capaian Kinerja				53%	Rata-rata Capaian Kinerja		20,82%

Capaian kinerja kelancaran arus barang dan penumpang dari dan ke wilayah daratan dengan wilayah kepulauan pada Tahun 2020 sebesar 20,82%, menurun bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 53,56%.

Tabel 2.48
 Data Produktifitas Penumpang Dari dan Ke Wilayah Daratan
 Dengan Wilayah Kepulauan Melalui Pelabuhan di
 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Pelabuhan	Jumlah Penumpang		
		Naik (orang)	Turun (orang)	Jumlah (orang)
1	Pelabuhan Laut Benteng	3.321	3.463	6.784
2	Pelabuhan Penyebrangan Pattumbukang	9.598	7.595	17.193
Total		12.919	11.058	23.977

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja pada Tahun 2020 ini yang antara lain disebabkan oleh:

1. Kabupaten Kepulauan Selayar hanya dilayani oleh 2 unit kapal Pelni yaitu Sabuk Nusantara 84 dan KM. Sabuk Nusantara 85 dengan jumlah kunjungan 4 (empat) kali dalam satu bulan. Selan itu untuk wilayah kepulauan hanya dilayani oleh kapal motor kayu yang tentunya dengan dan kapasitas yang jauh lebih kecil.
2. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki angin musim barat dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan gelombang laut sangat tinggi pada bulan-bulan tertentu, sehingga banyak kapal laut yang tidak beroperasi pada saat itu disebabkan oleh adanya larangan operasi dari otoritas terkait.
3. Rute penyeberangan Pelabuhan Pamatata-Bira hanya dilayani oleh 1 (satu) unit kapal feri yaitu KMP. Balibo, dan hanya melayani tiga kali penyebrangan dalam satu minggu.

Adapun rekomendasi perbaikan pada tahun yang akan datang antara lain sebagai berikut:

1. Mengupayakan adanya penambahan armada atau jadwal kunjungan kapal Pelni yang melayani rute pelayaran Selayar – Wilayah Kepulauan atau Selayar - NTT.

2. Mengupayakan adanya pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan penyeberangan Pattumbukang sehingga kapal feri bisa *Home Base* dan dapat melayani rute Patumbukang – Wilayah Kepulauan setiap hari.

Sasaran Strategis 19

Meningkatnya Investasi

Sasaran strategis 19 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran kesembilan belas ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **895,66%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.49
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 19

No	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai PMDN	51.459.215.500	537.235.402.298,.	1.044%	56.605.136.000	845.080.677.261	1.492,93%
2.	Nilai PMA (\$)	5.250.000	9.330.000,-	177,71%	10.500.000	31.332.437	298,40%
Rata-rata Capaian Kinerja				610,86%	Rata-rata Capaian Kinerja		895,66%

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Pada Tahun 2020, capaian indikator Nilai Investasi PMDN (Rupiah) meningkat sangat tinggi sebesar 1.492,93% dengan realisasi 845.080.677.261 hal ini menunjukkan capaian untuk tahun ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang memiliki capaian sebesar 1.044% dengan realisasi 537.235.402.298 sementara indikator Nilai Investasi PMA pada tahun 2020 sebesar 298,40% dengan realisasi 31.332.437 juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebesar 177,71% dengan realisasi 9.330.000.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran strategis Nilai Investasi PMDN (Rupiah) menunjukkan pencapaian yang rendah sedangkan sasaran strategis Nilai Investasi PMA (\$) berada pada kategori sangat tinggi.

Kenyataan yang menunjukkan rendahnya capaian kinerja pada tahun 2020 dipengaruhi oleh bencana Pandemi *Corona Virus* 2019 yang terjadi selama tahun 2020 yang menyebabkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga pelaksanaan kegiatan promosi dan pelaksanaan Investasi terhambat.

Faktor yang paling mendukung adalah program pemerintah yang tengah mempersiapkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang Kepariwisata.

Adapun permasalahan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja adalah:

- a. Belum tersebarnya investasi ke seluruh Sektor di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya berada pada sektor sekunder dan tersier, masih minim minat investor untuk menanamkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan;

- c. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), secara rutin;
- d. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum optimal disebabkan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan diantaranya disebabkan tidak adanya regulasi yang mewajibkan penyampaian (LKPM) yang bersifat memaksa.

Adapun solusi dari permasalahan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja adalah:

- a. Penyusunan dokumen profil peluang investasi sampai dengan tahap Feasibility Study (FS) dan diusahakan memakai konsultan yang sudah kredibel di mata investor luar negeri, sehingga profil peluang investasi tersebut sudah layak untuk dijual kepada investor, terutama investor dari luar negeri.
- b. Pembuatan profil peluang investasi lebih diutamakan pada sektor tersier, misalnya sektor pertanian dan perkebunan sehingga minat investor pada kedua sektor tersebut akan meningkat.
- c. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN tentang pentingnya menyampaikan laporan LKPM. Juga perlu diwacanakan adanya reward bagi perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM setiap triwulan
- d. Lebih meningkatkan koordinasi pihak yang terlibat dalam penyiapan investasi terutama dengan Instansi seperti Pajak, PLN, dan regulasi yang memaksa untuk menyampaikan (LKPM) karena permasalahan yang menyangkut hal itu susah untuk dicarikan solusinya.

Pada Tahun 2020, investor yang telah memiliki izin untuk menanamkan modal di Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai data aplikasi “PP OSS” adalah sebanyak 334 perusahaan dengan jumlah investasi sebesar Rp. 845.080.677.261.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Pada Tahun 2020 Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar \$31.332.437,- dari \$10.500.000 yang ditargetkan dengan persentase capaian sebesar 298,40%. Capaian kinerja ini mengalami peningkatan pesat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai \$9.330.000,- dari \$5.250.000,- yang ditargetkan.

Adapun Permasalahan yang dialami oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah:

- a. Belum tersebarnya informasi ke seluruh Sektor di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya berada pada sector sekunder dan tersier, masih minim minat inverstor untuk menanamkan usahanya pada sector primer misalnya di sector pertanian dan perkebunan;
- c. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM), secara rutin;
- d. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum optimal disebabkan adanya beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan diantaranya disebabkan tidak adanya regulasi yang mewajibkan penyampaian (LPKM) yang bersifat memaksa;

Adapun solusi dari permasalahan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah :

- a. Penyusunan dokumen profil peluang investasi dengan tahap Feasibility Study (FS) dan diusahakan memakai konsultan yang sudah kredibel di mata investor luar negeri, sehingga profil peluang investasi tersebut sudah layak untuk dijual kepada investor, terutama investor dari luar negeri.
- b. Pembuatan profil peluang investasi lebih diutamakan pada sektor tersier, misalnya sektor pertanian dan perkebunan

sehingga minat investor pada kedua sektor tersebut akan meningkat.

Sasaran Strategis 20

Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata

Sasaran strategis 20 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja serta Dinas Kepariwisata. Untuk mengukur sasaran kedua puluh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran, Hasil pengukuran terbangun dan berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2.50
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 20

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Realisasi pembangunan KEK pariwisata	Ditetapkan	80%	80%	Ditetapkan	belum ditetapkan	-
Rata-rata Capaian Kinerja				80%	Rata-rata Capaian Kinerja		-

Untuk indikator realisasi pembangunan KEK pariwisata, Tahun 2020 ini belum bisa ditetapkan sesuai target karena masih terkendala izin lokasi KEK yang luasannya mencapai 500 Ha yang rencananya berlokasi di Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, sampai ke Taka Bonerate. Pertimbangan lokasi

pengembangan KEK Pariwisata di Kecamatan Bontoharu dan sekitarnya disebabkan karena pada wilayah ini terdapat destinasi wisata yang indah dan bervariasi, dekat dengan pusat ibukota kabupaten, aksesibilitas Pelabuhan Benteng dan Pelabuhan Pattumbukang, serta Bandara Udara Selayar H. Aroepala. Khusus di kawasan Taka Bonerate, pulau tersebut memiliki *unique value proposition* sebagai atoll terbesar di Asia Tenggara. Bahkan KEK Kepulauan Selayar kedepannya akan di-branding sebagai “*The New Virgin Atoll in the heart of 17.000 Tropical Island in Indonesian Archipelago South East Asia*”.

Dari 17 dokumen yang dipersyaratkan dalam pembangunan KEK pariwisata, saat ini tinggal izin lokasi yang belum ada namun gubernur Sulawesi Selatan telah menerbitkan rekomendasi yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk menerbitkan izin usaha sebagai lokasi Kawasan Ekonomi Khusus. Setelah ke 17 dokumen tersebut lengkap maka akan segera diserahkan ke Dewan KEK Nasional sehingga Kabupaten Kepulauan Selayar dapat segera ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Sasaran Strategis 21

Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan Pusat Budi Daya Ikan Karang

Sasaran strategis 21 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah**”. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja. Untuk mengukur sasaran kedua puluh satu ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **80%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan Pusat Budi Daya Ikan Karang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 21

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	55	48	87,27%	60	48	80%
Rata-rata Capaian Kinerja				87,27%	Rata-rata Capaian Kinerja		80%

Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu program prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode RPJMD Tahun 2016 – 2021. Ada 2 (dua) pendekatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, yaitu memaksimalkan pengelolaan kawasan perikanan yang sudah ada seperti PPI/TPI Bonehalang dan sentra-sentra pendaratan perikanan lainnya, serta membentuk Kawasan perikanan baru yang lebih dekat dengan area penangkapan dan dapat mengintegrasikan seluruh aspek industri perikanan mulai penangkapan hingga pengolahan dan distribusi produk yang diharapkan akan memicu efek pengganda ekonomi bagi pelaku usaha perikanan.

Pendekatan memaksimalkan pengelolaan PPI/TPI Bonehalang dan sentra nelayan dilakukan dengan kerjasama pengelolaan sarana yang sudah ada dan melengkapi berbagai kebutuhan pemanfaat terhadap fasilitas perikanan pada sentra nelayan dan PPI/TPI Bonehalang, misalnya pabrik es, cold storage, UPI, pasar ikan dan sebagainya.

Sedangkan pendekatan pembangunan kawasan perikanan yang baru, dilaksanakan dengan membagi pada 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a. Tahap Pertama (nilai 40 %), dengan mewujudkan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan KIPT, berupa :
 1. Studi kelayakan lokasi KIPT
 2. Penetapan lokasi KIPT
 3. Penyusunan Dokumen Masterplan KIPT.
 4. Penyusunan SK Tim Kerja KIPT
 5. Penyesuaian lokasi terhadap tata ruang wilayah (RZWP3K, RTRW Kabupaten, dan RTRW Propinsi)
 6. Kerjasama Investasi perikanan dalam Kawasan Perikanan KIPT.
 7. Penguatan kapasitas Aparatur dalam rangka pembangunan KIPT dan pengelolaan Kawasan perikanan.
 8. Penetapan Lokasi KIPT oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
 9. Dokumen AMDAL KIPT
 10. Dokumen Bisnisplan KIPT
- b. Tahap Kedua (nilai 20 %), dengan mewujudkan pengadaan/pembebasan lahan KIPT
- c. Tahap Ketiga (nilai 40%), dengan mewujudkan pembangunan infrastruktur/fasilitas Pokok, Fungsional dan Penunjang KIPT.

Dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan hingga Tahun 2020 telah melaksanakan beberapa upaya, yaitu :

Tabel 2.52
 Capaian Kinerja Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Tahun 2020

No	Uraian Tahapan	Keterangan	Nilai Kriteria	
I.	Tahap penyediaan dokumen perencanaan pembangunan KIPT, dengan nilai 40 %			
	1.	Dokumen Studi kelayakan lokasi KIPT	Tersedia	10
	2.	Penetapan lokasi KIPT	SK Bupati, ada	10
	3.	Penyusunan Dokumen Masterplan KIPT.	Tersedia	10
	4.	Pembentukan Tim Kerja KIPT	SK Bupati	10
	5.	Penyesuaian lokasi terhadap tata ruang	Terakomodir dalam	10

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

	wilayah (RZWP3K, RTRW Kabupaten, dan RTRW Propinsi)	3 regulasi tata ruang	
6.	Kerjasama Investasi perikanan dalam Kawasan KIPT	- MoU KKP/Investor - Forum Bisnis	10
7.	Penguatan kapasitas Aparatur dalam rangka pembangunan KIPT dan pengelolaan Kawasan perikanan.	Studi Banding pengelolaan Kawasan perikanan	10
8.	Penetapan Lokasi KIPT oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.	Dalam Proses	10
9.	Dokumen AMDAL KIPT	Tahun 2020	0 (Pemangkasan anggaran covid-19)
10.	Dokumen Bisnisplan KIPT	Tahun 2020	0 (Pemangkasan anggaran covid-19)
Jumlah Nilai :			80
Pengukuran : $\{80/100\} \times 40 \%$			32 %
II.	Tahap II : Merealisasikan pembebasan lahan KIPT, dengan Nilai 20 %		
1.	Dokumen Pengadaan Tanah KIPT	Tersedia 1 dokumen	50
2.	Pembebasan Lokasi KIPT Hangkoang secara bertahap sebesar 32 Ha	Dalam proses	(Pemda tidak punya kewenangan dalam pembebasan lahan untuk investasi swasta)
Jumlah Nilai :			10
Pengukuran : $\{50/100\} \times 20 \%$			10 %
III.	Tahap III : Merealisasikan pembangunan infrastruktur, dengan Nilai 40 %		
1.	Melengkapi Fasilitas Kawasan Perikanan PPI/TPI Bonehalang dan sentra nelayan (Rehabilitasi Cold storage, pengadaan mesin kompresor pabrik es)	- PPI/TPI Bonehalang	5
2.	Pembangunan Fasilitas Pokok, Fungsional, dan Penunjang di KIPT Hangkoang	0	0
Jumlah Nilai :			5
Pengukuran : $\{5/100\} \times 40 \%$			2 %
Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Setelah Diolah, Tahun 2020.			

Tabel 2.53
 Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Pembangunan Kawasan
 Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Realisasi Pembangunan KIPT	%	55	48	80	Tinggi
Sumber : Pengolahan Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2020						

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh program pembangunan kawasan industri terpadu dengan kegiatan penyediaan dokumen KIPT, forum investasi bisnis KIPT serta pengadaan sarana dan prasarana sentra nelayan. Turut mendukung pula program penyelenggaraan dan pengelolaan TPI dengan kegiatan pengelolaan TPI dan penerbitan SIUP budidaya.

Sasaran Strategis 22

Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Distribusi Logistik (Barang dan Jasa)

Sasaran strategis 22 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah”**. Sasaran ini didukung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Untuk mengukur sasaran kedua puluh dua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **95%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.54
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 22

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	15	13	86,67%	20	19	95%
Rata-rata Capaian Kinerja				86,67%	Rata-rata Capaian Kinerja		95%

Pencapaian Kinerja di tahun 2020, Dinas Perindagkum Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencanangkan program Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik Indonesia Timur dan Kawasan Industri yang terintegrasi dengan segala sarana penunjang pelaksanaan sebuah bandar niaga di kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Perindagkum Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu dinas yang diberikan tugas khusus untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pusat distribusi logistik Kawasan Timur Indonesia. Adapun mekanisme dan rancangan program Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik Indonesia Timur dan Kawasan Industri adalah :

1. Menyediakan kebijakan dan regulasi yang saling mendukung antara Kabupaten, Provinsi dan nasional.
2. Menyediakan kawasan dengan luas lahan yang cukup untuk pengembangan sebuah bandar niaga.
3. Membuat dan menetapkan regulasi pelaksana/ pengelola pengembangan kawasan Distribusi Logistik.
4. Melakukan konsolidasi dan pemasaran investasi kepada pihak yang membutuhkan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, telah disusun jadwal kegiatan dalam rangka pengembangan kawasan sebagai penyedia infrastruktur dasar sebuah bandar niaga, seperti Kawasan konsolidasi, Sarana pelabuhan,

Sarana jalan, Air bersih, Telekomunikasi, Sentra jasa pertokoan dan Pergudangan, Sentra Industri kecil, menengah dan besar, Sentra Perkantoran dan Kawasan Penunjang pengembangan kawasan lainnya, sebagai berikut :

1. Penetapan tempat dan luas kawasan industri logistik
2. Konsolidasi dan Sinkronisasi Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional
3. Sosialisasi dan permintaan kesediaan dukungan masyarakat kepada Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik
4. Pengukuran lahan Kawasan Distribusi Logistik
5. Penyusunan study kelayakan, DED dan Kajian yang berhubungan dengan Pengembangan Kawasan

Pada sektor perindustrian, secara garis besar pertumbuhan industri Tahun 2020 sekitar 0,25%, sangat berbanding jauh dengan tahun sebelumnya karena sangat terdampak pandemi covid-19 sehingga semua kegiatan diarahkan ke penanganan covid-19, meskipun pada tahun 2019 terdapat 45 Industri Kecil Menengah atau 15% dari tahun sebelumnya sementara pada Tahun 2018 pertumbuhan industri mencapai 40 pelaku usaha industri. Dalam perjalanan pelaksanaan program tersebut telah disusun road map sebagai dasar pelaksanaan kerja dengan meliputi 3 hal, yakni :

1. Pembuatan Regulasi untuk kemudahan investasi
2. Studi kelayakan kawasan dan pembebasan lahan
3. Penyediaan modal transportasi dan konsolidasi petensi perdagangan

Pengembangan kawasan ini dimulai dari penyediaan alat transportasi barang dalam jumlah besar seperti peti kemas yang saat ini telah tersedia di pelabuhan Benteng. Selanjutnya MOU Bupati dengan Dirut PT. Pelindo IV Makassar dan SK Kementerian Perhubungan tentang Penetapan Jalur pelayaran TOL Laut untuk pengembangan pelabuhan peti kemas. Dengan status kepemilikan kawasan :

- 1) Kawasan Pelabuhan Benteng oleh UPP Pelabuhan Benteng.
- 2) Kawasan konsolidasi peti kemas TPI (PEMDA)

Sasaran Strategis 23

Bertambahnya Produksi Beberapa Kali Lipat pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan

Sasaran strategis 23 ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk mengukur sasaran kedua puluh tiga ini terdapat 16 (enam belas) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **74,89%** dengan kategori predikat **Sedang**. Hasil pengukuran bertambahnya produksi pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan adalah sebagai berikut:

23. 1. Program Revolusi Tani

Tabel 2.55
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (ton)	Padi : (10%) 39.421	34.979 Ton	80,67%	Padi : (10%) 43.363	26.797,49 Ton	56,18%
		Jagung : (15%) 13.741	7.127 Ton	54,89%	Jagung : (15%) 15.802	5.144,72 Ton	28,31%
2	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman holtikultura (ton)	Jeruk keprok: (0,30%) 5.910.01	3.219,8 Ton	54,33%	Jeruk keprok : (0,30%) 5.929,88	3.228,8Ton	54,27%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase peningkatan produksi perkebunan (ton)	Kelapa : (1,5 %) 26.736.12	24.342,36 Ton	91,05%	Kelapa : 1,5 % 26.736,12	23.981,90 Ton	88,37%
		Pala : (0,08%) 375,38	396,39 Ton	105,59%	Pala : (0,08 %) 375,38	400,34 Ton	97,55%
		Cengkeh : (0,15%) 341,60	488,72 Ton	143,07%	Cengkeh : (0,15%) 341,60	491,24 Ton	124,19%
		Jambu mete : (0,09%) 1.938.20	1.976,10 Ton	101,96%	Jambu mete : 0,09 % 1.938.20	2.020,42	95,28%
4	Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan (kw/ha)	Padi : 67,64	79,79 Ku/Ha	113,09%	Padi :70,55	67,28 Ku/Ha	91,07%
		Jagung : 44,98	68,80 Ku/Ha	133,31%	Jagung : 51,61	59,20 Ku/Ha	99,98%
5	Tingkat produktivitas pertanian tanaman hortikultura (kw/ha)	Jeruk keprok : 103,90	67,71 Ku/Ha	64,79%	Jeruk Keprok : 104,50	72,06 Ku/Ha	68,30%
6	Tingkat produktivitas perkebunan (kg/ha)	Kelapa : 1.502	24.342,36 Kg/Ha	91,05%	Kelapa : 1,502	1.056,43 Kg/Ha	70,33%
		Pala :350	396,39 Kg/Ha	105,59%	Pala : 375	140,50 Kg/Ha	35,13%
		Cengkeh : 350	488,72 Kg/Ha	143,07%	Cengkeh : 400	490,43 Kg/Ha	108,98%
		Jambu mete : 500	1.976,10 Kg/Ha	101,96%	Jambu Mete : 550	183,50 Kg/Ha	30,58%
Rata-rata Capaian Kinerja				98,89%	Rata-rata Capaian Kinerja		74,89

Untuk mendukung terlaksananya program revolusi tani di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka indikator yang diukur oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56
 Pengukuran Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) dan
 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Tukar Petani (NTP)		103	97,56)*	94,71
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		85	79,8	93,88

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Keterangan :)* = NTP gabungan Provinsi Sulawesi Selatan

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan pada Bulan Desember 2020, NTP di Sulawesi Selatan secara umum mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen dibandingkan bulan sebelumnya. NTP Bulan November 2020 sebesar 97,33 naik menjadi 97,56 pada Bulan Desember 2020. Kenaikan NTP tersebut terjadi karena kenaikan indeks yang diterima petani (it) lebih besar bila dibandingkan dengan kenaikan indeks yang dibayar petani (ib). Indeks yang diterima petani (it) mengalami kenaikan sebesar 0,47 persen sedangkan indeks yang dibayar petani (ib) mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen. Indeks yang diterima petani (it) mengalami kenaikan pada semua subsektor dengan kenaikan it terbesar terjadi pada Subsektor Holtikultura yaitu naik 2,62 persen. Indeks yang dibayar petani (ib) juga mengalami kenaikan pada semua subsektor dengan kenaikan terbesar terjadi pada Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, yaitu naik sebesar 0,30 persen.

Sedangkan pada indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 79,8% dari target sebesar 85% yang direncanakan, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 93,88% atau belum mencapai target yang di perjanjikan. Pola Pangan Harapan dapat diimplementasikan dalam perencanaan konsumsi pangan dan penyediaan pangan untuk dikonsumsi, Berkaitan dengan kegunaan ini maka PPH merupakan instrument sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun mendatang.

Tabel diatas menunjukkan target yang diharapkan sebesar 85 dan realisasi hanya 79,8. Hal ini menandakan bahwa pola konsumsi pangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan hasil susenas Tahun 2020 skor PPH yang mencerminkan keragaman mutu belum memenuhi harapan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Demikian pula dari segi keragaman dan keseimbangannya yaitu konsumsi padi-padian masih berlebih sedangkan konsumsi sayuran dan buah, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan masih kurang. Kondisi ini mencerminkan pola konsumsi pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat tergantung pada padi-padian.

Skor PPH yang mencerminkan keragaman dan mutu gizi masih kurang yaitu 79,8 (pada tingkat konsumsi) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.57
 Situasi Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Konsumsi Energi dan Protein serta Besarnya Skor PPH

No.	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal	%	%AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	376,7	1.501	65,3	69,8	0,5	32,6	34,9	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	28,1	35	1,5	1,6	0,5	0,8	0,8	2,5	0,8
No.	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH

		Kapita/ Hari								
3.	Pangan hewani	143,9	210	9,1	9,8	2,0	18,3	19,5	24,0	19,5
4.	Minyak dan Lemak	24,4	218	9,5	10,2	0,5	4,8	5,1	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	9,5	51	2,2	2,4	0,5	1,1	1,2	1,0	1,0
6.	Kacang-kacangan	11,9	34	1,5	1,6	2,0	2,9	3,1	10,0	3,1
7.	Gula	31,1	114	5,0	5,3	0,5	2,5	2,7	2,5	2,5
8.	Sayur dan Buah	188,5	98	4,3	4,6	5,0	21,3	22,8	30,0	22,8
9.	Lain-lain	65,2	38	1,6	1,8	-	-	-	-	-
	Total		2.299	100,0	106,9	-	84,3	90,1	100,0	79,8

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dalam pencapaian Nilai Tukar Petani (NTP) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, maka dilaksanakan pencapaian indikator sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan tingkat produktifitas

a. Tanaman Padi

Indikator kinerja Jumlah Produksi Tanaman Padi, ditargetkan sebesar 39,634 ton pada Tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 26.799,49 ton dengan persentase tingkat capaian sekitar 67,62%. Sedangkan indikator kinerja Produktivitas Tanaman Padi, ditargetkan sebesar 61,87 Ku/Ha, terealisasi sebesar 67,28 Ku/Ha dengan persentase tingkat capaian sekitar 108,74%. Penurunan produksi padi pada Tahun 2020 ini disebabkan karena terjadinya penurunan Indeks Pertanaman (IP) dan luas panen yang disebabkan oleh kekurangan air akibat curah hujan yang sangat rendah dan debit air saluran irigasi yang tidak mencukupi kebutuhan air sawah berdampak pada luas tanam dan luas panen. Lahan sawah pada Kabupaten Kepulauan Selayar sebahagian besar masih merupakan sawah tadah hujan sehingga luas tanam masih sangat dipengaruhi oleh factor iklim. Usaha peningkatan produktivitas padi didukung melalui intensifikasi dengan penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, dan perlindungan tanaman.

Tabel 2.58
 Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas
 Padi 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan produksi pertanian tanaman Padi (ton)	36.865,26	37.715	39.523	34.979	26.799,49)*
2.	Tingkat produktivitas pertanian tanaman Padi (kw/ha)	121,08	75,43	67,25	79,79	67,28)*

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 2020

Catatan :)* = data sementara

Dari tabel tersebut diatas jumlah produksi padi Tahun 2020 mencapai 26.799,49 ton, menurun sebesar 23,38% dari produksi Tahun 2019. Sedangkan angka produktivitas padi Tahun 2020 sebesar 67,28 Ku/Ha, mengalami penurunan sebesar 15,68 % dari Tahun 2019, yang produktivitasnya sebesar 79,79 Ku/Ha.

b. Tanaman Jagung

Indikator kinerja Jumlah Produksi Tanaman Jagung, pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 18.172 ton sedangkan yang terealisasi hanya sebesar 5.144,72 ton dengan persentase tingkat capaian sekitar 28,31%. Indikator Kinerja Produktivitas Tanaman Jagung, ditargetkan sebesar 59,21 Ku/Ha, dapat terealisasi sebesar 59,20 Ku/Ha dengan persentase tingkat capaian sekitar 99,98%. Penurunan produksi Tahun 2020 terjadi karena adanya penurunan Indeks Pertanaman (IP) dan luas panen yang disebabkan oleh kekurangan air akibat curah hujan yang sangat rendah. Angka produktivitas jagung Tahun 2020 sebesar 59,20 Ku/Ha, hal ini didukung melalui intensifikasi dengan penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, perlindungan tanaman, meningkatkan optimalisasi brigade alat dan mesin pertanian yang dikembangkan dan meminta perhatian khusus dari segenap stake holder pertanian.

Tabel 2.59
 Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas
 Jagung 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan produksi pertanian tanaman Jagung (ton)	13.411,89	18.914	11.634	7.127	5.144,72)*
2.	Tingkat produktivitas pertanian tanaman Jagung (kw/ha)	45,50	80,59	68,80	68,80	59,21)*

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 2020

Catatan :)* = data sementara

Jumlah produksi jagung Tahun 2020 sebesar 5.144,72 ton, mengalami penurunan 27,81% dari produksi Tahun 2019. Sedangkan angka produktivitas jagung pada Tahun 2020 sebesar 59,21% mengalami penurunan dari Tahun 2019 yaitu sebesar 9,59%.

2. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura dan tingkat produktifitas

c. Jeruk Keprok

Indikator Kinerja Jumlah Produksi Jeruk Keprok, ditargetkan sebesar 5.949,75 Ton, dapat terealisasi sebesar 3.228,8 Ton dengan persentase tingkat capaian 54,27%. Indikator Kinerja Produktivitas Jeruk Keprok, ditargetkan sebesar 105,50 Ku/Ha, dapat terealisasi sebesar 72,06 Ku/Ha dengan persentase tingkat capaian 68,30%. Produksi dan produktivitas jeruk keprok tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan :

- Belum adanya penanganan secara serius oleh petani
- Belum ada pengembangan khusus Jeruk Keprok
- Belum adanya kegiatan peremajaan untuk menggantikan tanaman yang sudah tua dan mati
- Belum adanya pengembangan secara kawasan
- Cuaca/iklim yang sangat kering sehingga banyak bunga dan putik yang gugur yang menyebabkan tidak terbentuknya buah.

Tabel 2.60
 Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas
 Jeruk Keprok 2016 – 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan produksi pertanian tanaman Jeruk Keprok (ton)	4.599,89	1.937,49	1.792,58	3.219,8	3.228,8
2.	Tingkat produktivitas pertanian tanaman Jagung (kw/ha)	83,92	50,51	68,4	67,71	72,06

SumbSumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2020

Jumlah produksi Jeruk Keprok di tahun 2020 mencapai 3.228,80 ton, mengalami peningkatan sebesar 0,28% dari produksi tahun 2019. sedangkan jumlah produktifitas Jeruk keprok tahun 2020 sebesar 72,06kw/ha, mengalami peningkatan sebesar 4,35% dari produktifitas tahun 2019.

3. Persentase peningkatan produksi perkebunan dan tingkat produktifitas
a. Peningkatan produksi Perkebunan

Indikator Kinerja Jumlah Produksi Kelapa, ditargetkan sebesar 27.137,16 Ton, dapat terealisasi sebesar 23.981,90 Ton dengan persentase tingkat capaian 88,37%. Jumlah produksi Pala, ditargetkan sebesar 410,40 ton dan terealisasi sebesar 400,34 ton dengan persentase tingkat capaian 97,55%. Jumlah produksi cengkeh ditargetkan sebesar 395,55 ton, dapat terealisasi sebesar 491,24 ton dengan persentase tingkat capaian 124,19%. Jumlah produksi Jambu Mete ditargetkan sebesar 2.120,40 ton dan terealisasi sebesar 1.976,10 ton dengan persentase tingkat capaian 93,19%.

b. Tingkat Produksi Perkebunan

Indikator kinerja produktifitas kelapa, ditargetkan sebesar 1.502 kg/Ha, dapat terealisasi sebesar 1.056,43 kg/Ha dengan persentase tingkat capaian 70,33%. Produktifitas Pala, ditargetkan sebesar 400 Kg/Ha dan terealisasi sebesar 140,50 Kg/Ha dengan persentase tingkat capaian 35,13%. Produktifitas Cengkeh, ditargetkan sebesar

4500 Kg/Ha, dapat terealisasi sebesar 490,43 Kg/Ha dengan persentase tingkat capaian 108,98%. Produktifitas Jambu Mete ditargetkan sebesar 600 Kg/Ha dengan persentase tingkat capaian 30,58%.

Permasalahan yang mendasar selama ini dalam mengembangkan tanaman kelapa, antara lain rendahnya harga tingkat petani, sehingga masyarakat memilih panen muda karena harganya lebih tinggi dibanding panen tua, selain itu juga akibat pertambahan kelapa banyak kebun kelapa digunakan untuk pembangunan rumah dan fasilitas umum, pengelolaan perkebunan kelapa di Kabupaten kepulauan Selayar masih menggunakan pola tradisional, sehingga produk kelapa selayar relative masih rendah.

Pencapaian target ini tidak lepas dari dukungan anggaran, baik dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN. Adanya upaya petani melakukan budidaya secara baik diantaranya melakukan perawatan, pemangkasan, pemupukan, peremajaan serta rehabilitasi terhadap tanaman perkebunan yang sudah tua, selain itu juga adanya program pemerintah seperti intensifikasi dan pengendalian OPT secara terpadu.

Peningkatan produktifitas dan produksi ini juga tidak lepas dari kenaikan lahan tanam meghasilkan. Untuk meningkatkan produksi dan produktifitas, berbagai upaya dilakukan antara lain konservasi lahan, sanitasi kebun, perawatan, peningkatan luas areal yang produktif, meningkatnya tanaman menghasilkan. Selain itu upaya pendampingan berkelanjutan terus dilakukan guna memberikan bimbingan dan transfer pengetahuan kepada petani pala, cengkeh dan jambu mete di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.61
 Capaian Produksi dan Produktivitas perkebunan
 (Kelapa, Pala, Cengkeh, Jambu Mete) 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan	24.937,21	24.979,2	25.055,63	24.342,36)*	23.981,90

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	produksi Perkebunan (Kelapa)					
2.	Peningkatan produksi Perkebunan (Pala)	291,5	282,01	285,78	396,39)*	400,34
3.	Peningkatan produksi Perkebunan (Cengkeh)	178,35	102,49	535,1	488,72)*	491,24
4.	Peningkatan produksi Perkebunan (Jambu Mete)	1.919,4	2.011,29	2.090,17	1.976,1	2.020,42)*
5.	Tingkat produktivitas Perkebunan (Kelapa)	1.484	1.474	1.462	2.006	1.056)*
6.	Tingkat produktivitas Perkebunan (Pala)	304	292	283	235	141)*
7.	Tingkat produktivitas Perkebunan (Cengkeh)	218	125	568	524	490)*
8.	Tingkat produktivitas Perkebunan (Jambu Mete)	537	557	579	547	183)*

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 2020

Catatan :)* = data sementara

23.2. Program Pembangunan dan Pengembangan Sentra Usaha Peternakan

Tabel 2.62
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali (%)	70 %	70%	100%	80 %	0 %	0%
2	Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi	70 %	0	0%	80 %	0%	0%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	unggulan (%)						
3	Persentase peningkatan produksi ternak	Sapi potong: (29,46%) 21.693	21.823	100,60%	Sapi potong : 23.715 ekor (41,53%)	23.528 ekor	100,60%
		0	0	0%	Sapi perah : 0%	0	0%
		Kerbau : (1,66%) 4.898	4.847	98,96%	Kerbau : 4,980 ekor (1,66%)	4.974 ekor	98,96%
		Kuda : (2,39%) 4.140	4.108	99,23%	Kuda : 4,239 ekor (2,39%)	4.293 ekor	99,23%
		Kambing : (11,93%) 90.476	90.582	100,12%	Kambing : 95.400 ekor (18,024%)	97.204ekor	101.89%
		Domba : (25,35%) 89	35	39,32%	Domba : 112 ekor (25,84%)	32 ekor	28,57%
		Ayam Buras: (0,42%) 276,997	285.766	103,17%	Ayam Buras : 278,166 ekor (0,42%)	425.185 ekor	152,85%
		Ayam Pedaging : (5,75%) 10,992	11.030	100,35%	Ayam Pedaging : 11,550 ekor (5,75%)	20.818 ekor	180.24%
		Ayam ras petelur : (5,65%) 13,791	15.897	115,27%	Ayam ras petelur: 14,295 ekor (5,65%)	15.116 ekor	105,74%
		Itik : (7,16%) 7,506	7.643	101,83%	Itik : 8,044 ekor (7,16%)	17.521 ekor	217,81%
Rata-rata capaian kinerja				99,38%	Rata-rata Capaian Kinerja		

1. Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali

Tujuan dari indikator tersebut diatas adalah untuk mempertahankan dan mengembangbiakkan mutu genetic dari ternak sapi Bali (pemurnian sapi Bali) di Tanamalal. Pada Tahun 2019 telah dilakukan Pembangunan dan pembenahan sarana dan prasarana pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan pusat pemurnian sapi bali di Pulau Tanamalala sebagai lanjutan dari pembangunan dari tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2019 ini telah dilakukan pemagaran areal lokasi instalasi pembibitan ternak, paddock 6 unit (kandang penanganan ternak) dan JIAT dangkal 1 unit sebagai sumber air untuk penanganan ternak dan pengadaan joloro 1 unit untuk transport alat dan bahan untuk pengembangan ternak. Adapun capaian kinerja untuk Tahun 2019 mencapai 70% sesuai dengan yang ditargetkan sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Untuk tahun 2020 indikator kinerja persentase pembangunan pulau tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi bali, ditargetkan sebesar 80%, dapat terealisasi sebesar 0% dengan persentase tingkat capaian 0%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran menghadapi pandemi Covid 19.

2. Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi unggul

Pembangunan dan pembenahan sarana dan prasarana untuk menjadikan pulau kalao menjadi pusat pembiakan ternak unggul belum dapat direalisasikan karena pertimbangan dana yang belum memungkinkan sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sampai Tahun 2020 masih belum ada.

3. Peningkatan Populasi Ternak

Proses peningkatan populasi ternak mencakup 9 (unggas), yaitu sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik.

Indikator kinerja jumlah populasi sapi potong, ditargetkan sebesar 23.715 ekor, dapat terealisasi sebesar 23.528 ekor dengan persentase tingkat capaian 99,12%. Jumlah Populasi Kerbau ditargetkan sebesar 4.980 ekor dan terealisasi sebesar 4.874 ekor dengan persentase tingkat capaian 99,88%. Jumlah Populasi kuda ditargetkan sebesar 4.239 ekor, dapat terealisasi sebesar 4.293 ekor dengan persentase tingkat capaian 101,27%.

Jumlah populasi Kambing ditargetkan sebesar 95.400 ekor dan terealisasi sebesar 425.185 ekor dengan persentase tingkat capaian 152,85%. Jumlah populasi Ayam Ras Pedaging ditargetkan sebesar 11.550 ekor dan terealisasi sebesar 20.818 ekor dengan persentase tingkat capaian 180,24%. Jumlah populasi Ayam Ras Petelur ditargetkan sebesar 14.295 ekor dan terealisasi sebesar 15.116 ekor dengan persentase tingkat capaian 105,74%. Jumlah populasi itik ditargetkan sebesar 8.044 ekor dan terealisasi sebesar 17.521 ekor dengan persentase tingkat capaian 217,81%.

Meningkatnya populasi ternak disebabkan ada perhatian pemerintah kabupaten kepulauan selayar melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana peternakan, pelayanan kesehatan hewan, pengadaan obat-obatan ternak dan pengembangan Hijauan Makanan Ternak.

Populasi domba mengalami penurunan tahun 2020 disebabkan karena kemampuan dan minat masyarakat untuk budidaya ternak domba sangat minim.

Tabel 2.63
 Perbandingan Capaian Populasi Ternak (ekor) 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan populasi sapi potong	18.060	18.894	19.996	21.823	23.528

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

2.	Peningkatan populasi Kerbau	4.674	4.648	4.727	4.847	4.974
3.	Peningkatan populasi Kuda	3.856	3.869	3.975	4.108	4.293
4.	Peningkatan populasi Kambing	81.465	80.089	86.730	90.582	97.204
5.	Peningkatan populasi Domba	46	56	41	35	32
6.	Peningkatan populasi Ayam Buras	271.014	270.111	315.621	285.766	425.185
7.	Peningkatan populasi Ayam Ras Pedaging	8.968	12.027	9.019	11.030	20.818
8.	Peningkatan populasi Ayam Ras Petelur	13.371	16.770	17.226	15.897	15.116
9.	Peningkatan populasi Itik	6.886	9.525	8.240	7.643	17.521

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2020

23.3. Program Pengembangan Hutan Rakyat

Tabel 2.64
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	456,35 Ha (21,55%)	-	-	479,16 Ha (27,62%)	-	-
3	Produksi hasil hutan (m ³)	907,34 M3 (107,35%)	-	-	1.088,80 M3 (148,82%)	-	-
2	Kerusakan hutan dan lahan (ha)	42.076,64 Ha (-3,97%)	-	-	40.597,48 Ha (-5,09%)	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja				-	Rata-rata Capaian Kinerja		-

Untuk ke 3 (tiga) indikator ini sejak Tahun 2017 pengelolaannya telah dialihkan ke provinsi sehingga pihak pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah tidak mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan tersebut.

23.4. Program Peningkatan Produksi Perikanan dan Kelautan

Tabel 2.65
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23

No	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (ton dan %)	(36,69 %) 33.503,92 ton	28.268,30	84,37%	(45,63%) 35.179,12 ton	18.729,12 ton	53,24%
2	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (ton dan %)	(13 %) 905,96	573,12	63,26%	(16%) 933,14	837,36	89,74%
3	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	(11,11 %) 130	165,75	127,50%	(12,82%) 132	237	127,50%
4	Persentase peningkatan konsumsi ikan (kg/orang/tahun)	(5,16%) 52	57,4	110,39%	(6,17%) 52,5	63,02	120,03%
Rata-rata Capaian Kinerja				96,38%	Rata-rata Capaian Kinerja		97,62%

Program peningkatan produksi perikanan dan kelautan didukung oleh 4 (empat) indikator utama yang dilaksanakan untuk meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi). Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) adalah perbandingan pendapatan nelayan dan pembudidaya terhadap pengeluaran nelayan dan pembudidaya selama satu tahun. Apabila NTP dan NTPi mencapai di atas 100 berarti nelayan dan pembudidaya ikan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya. Semakin tinggi Nilai Tukar, secara relatif semakin kuat kemampuan daya beli nelayan/pembudidaya tersebut. Oleh sebab itu Nilai Tukar dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator dini tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.

Pengukuran NTN dan NTPi selama ini belum dapat dilakukan secara internal karena memerlukan biaya yang cukup besar.

Pengukuran terhadap NTN dan NTPi masih mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 2.66
Pengukuran Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	100	107,62	107,62	Sangat Tinggi
	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Nilai	100	104,13	104,13	Sangat Tinggi

Sumber : Rilis Laporan NTN dan NTPi Sulawesi Selatan Tahun 2019, DKP Propinsi Sulawesi Selatan

Berikut ini dijelaskan lebih rinci capaian 4 (empat) indikator dalam pencapaian program peningkatan produksi perikanan dan kelautan.

1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap adalah jumlah volume produksi perikanan hasil tangkapan yang didaratkan di tempat-tempat pendaratan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga estimasi produksi perikanan hanya ditujukan pada produksi perikanan yang didaratkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.67
Data Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
1.	Produksi Perikanan	2.080,3	3.110,5	6.815,1	6.723,3	18.729,2

	Tangkap (Ton)					
Sumber : Data Statistik Perikanan Tahun 2020						

Tabel 2.68
 Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan
 Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	35.179,12	18.729,2	53,24	Rendah
Sumber : Data Statistik Perikanan Tahun 2020						

Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 mencapai 28.268,3 ton atau hanya sebesar 84.37 % dari jumlah yang ditargetkan. Meskipun belum mencapai target kinerja, namun jumlah produksi ini meningkat sebesar 6,675.8 ton atau sebesar 30.92 % dari tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap akan berkontribusi secara nyata terhadap meningkatnya pendapatan nelayan (NTN) dan nilai PDRB subsektor perikanan. Perbandingan antara target kinerja dan capaian indikator peningkatan produksi perikanan tangkap selama periode Renstra 2016 – 2020, disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.69
 Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Produksi Perikanan Tangkap

Uraian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap	Periode RENSTRA					
	Awal 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target (Ton)	24,155.80	26,598.77	28,992.66	31,312.07	33,503.92	35,179.12
Realisasi (Ton)	24,155.80	24,092.60	20,152.20	21,592.50	28,268.30	18.729,2
Capaian (%)	100.00	90.58	69.51	68.96	84.37	53,24
Sumber : Statistik Perikanan Tahun 2016 - 2020						

Pasca Pandemi *COVID-19* yang melanda Indonesia hampir satu tahun berdampak besar pada menurunnya intensitas nelayan dalam melakukan kegiatan melaut dan menurunnya daya beli pasar. Menurunnya jumlah produksi perikanan tangkap akan berkontribusi secara nyata terhadap menurunnya pendapatan nelayan (NTN) dan nilai PDRB subsektor perikanan. Permasalahan utama yang mempengaruhi masih kurangnya jumlah produksi perikanan tangkap adalah tingginya intensitas penjualan ikan di atas kapal (transshipment) dan banyaknya nelayan luar dengan armada dan alat tangkap yang lebih maju. Kedua permasalahan utama yang menjadi alasan tidak terdapatkannya produksi tangkapan di Selayar, disebabkan oleh :

1. Belum adanya kawasan pendaratan ikan yang mengintegrasikan seluruh bisnis perikanan, sehingga tidak memberikan kepastian harga dan pasar bagi nelayan.
2. Selain kurangnya sarana dan prasarana, beberapa infrastruktur perikanan belum dimanfaatkan dengan baik pada PPI Bonehalang dan sentra-sentra pendaratan ikan lainnya.
3. Belum optimalnya pengembangan kerjasama kelembagaan antara nelayan tangkap dengan pengusaha perikanan di daerah.

4. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya adalah jumlah volume produksi perikanan budidaya yang dihasilkan oleh pelaku usaha pembudidaya di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, baik produksi budidaya laut (rumput laut dan ikan hidup), budidaya air tawar (lele), dan budidaya air payau (udang dan bandeng). Jumlah produksi budidaya berdasarkan data triwulan tahun 2020, dan pengukuran capaian indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020

No	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
1.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	68,61	185,38	443,40	139,85	837,36
Sumber : Statistik Perikanan Tahun 2020						

Tabel 2.71
Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan
Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	933,14	837,36	89,74	Tinggi
Sumber : Statistik Perikanan, Tahun 2020						

Tabel 2.72
Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Produksi Perikanan Budidaya

Uraian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya	Periode RENSTRA					
	Awal 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target (Ton)	804.93	829.08	853.95	879,57	905,96	933,14
Realisasi (Ton)	804.93	465,30	456,20	493,02	573,11	837,36
Capaian (%)	100,00	56,12	53,42	56,05	63,26	89,74
Sumber : Statistik Perikanan, Tahun 2016 – 2020						

Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 mencapai 837,36 ton atau sebesar 89,74 % dari nilai yang ditargetkan dengan predikat tinggi. Beberapa faktor penghambat atas pencapaian target indikator pada produksi perikanan budidaya antara lain:

1. Usaha budidaya tambak masih didominasi skala kecil, tradisional, dan subsistem.
2. Tingginya biaya investasi dan operasional pada usaha perikanan budidaya menyebabkan jumlah pelaku usaha budidaya menurun.
3. Beberapa pembudidaya tambak gagal panen akibat penyakit dan pengelolaan yang kurang baik.
4. Usaha budidaya rumput laut di beberapa lokasi tidak berhasil akibat tercemarnya perairan.

5. Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan

Jumlah produksi olahan hasil perikanan tahun 2020 mencapai 160,84 ton dan melampau target sebesar 121,84 %. Jumlah produksi olahan tersebut mengalami penurunan sebanyak 4,91 ton dari pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi disebabkan dampak pandemi covid 19 yang menyebabkan kurangnya dan mahalnya bahan baku produk olahan. Adapun capaian kinerja pada indikator produksi olahan hasil perikanan diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72
 Target dan Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	Jumlah	132	160,84	121,84	Sangat Tinggi
Sumber : Statistik Perikanan Tahun 2020						

Untuk membandingkan capaian target dan indikator capaian pada Produksi Olahan Hasil Perikanan selama periode Renstra 2016 -2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.73
 Perbandingan Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan

Uraian Indikator Kinerja Produksi Olahan Hasil Perikanan	Periode RENSTRA					
	Tahun Awal 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target (Ton)	117	120	123	126	130	132
Realisasi (Ton)	117	121,3	123	132	165,75	160,84
Capaian (%)	100.00	101.08	100,00	104,80	127.50	121,84
Sumber : Statistik Perikanan, Tahun 2016 - 2020						

6. Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan

Pengumpulan dan pengolahan data untuk nilai konsumsi ikan tidak dilakukan secara internal, karena selain biaya dan instrumen, metode pengukuran membutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan khusus pendataan. Sehingga data konsumsi ikan merupakan data sekunder dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan. Konsumsi ikan merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingginya kebutuhan ikan oleh sebuah daerah atau wilayah. Pada tahun 2020, konsumsi ikan di kabupaten Kepulauan Selayar ditargetkan sebesar 52,50 kg/orang/tahun dan terealisasi sebesar 63,02 kg/orang/tahun atau 120,03 %.

Ketersediaan produk perikanan tangkap yang tinggi dan budaya konsumsi masyarakat terhadap produk ikan, merupakan pendorong tingginya angka konsumsi ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun nilai konsumsi ikan tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.74
Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Konsumsi Ikan

Uraian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya	Periode RENSTRA					
	Awal 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target (Perkapita)	49,45	50,5	51,0	51,5	52,0	52,50
Realisasi (Perkapita)	49,45	53,45	53,45	53,45	57,4	63,02
Capaian (%)	100,00	105.84	104.80	103,79	110.39	120,03
Diolah dari berbagai sumber data						

Tabel 2.75
Capaian Indikator Kinerja pada Konsumsi Ikan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Konsumsi Ikan	Kg/Orang /Tahun	52,50	63,02	120,03	Sangat tinggi
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019						

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja di tahun yang akan datang, maka langkah yang akan ditempuh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Membangun komitmen pejabat dan para pengambil keputusan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja.
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, instansi pemerintah provinsi maupun pusat atau pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

- Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 24

Terpeliharanya Kelestarian Sumberdaya Alam

Sasaran strategis 24 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah”**. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk mengukur sasaran kedua puluh empat ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 adalah sebesar **93,40%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.76
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 24

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Lingkungan Hidup	78,9	78,74	99,60%	79,53	74,28	93,40%
Rata-rata Capaian Kinerja				99,60%	Rata-rata Capaian Kinerja		93,40%

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, maka dapat diketahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (\text{IKA} \times 30\%) + (\text{IKU} \times 30\%) + (\text{IKTL} \times 40\%) \\
 &= (50,00 \times 30\%) + (88,80 \times 30\%) + (89,12 \times 40\%) \\
 &= \mathbf{74,28}
 \end{aligned}$$

Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar diukur berdasarkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2020 adalah sebesar 74,28. Nilai IKLH ini mengalami penurunan dibanding Tahun 2019 yang lalu sebesar 78,74. IKLH pada Tahun 2020 memperoleh Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 50,00, Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,80 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 89,12.

Tabel 2.77
Data perbandingan IKLH dengan Tingkat Provinsi dan Nasional
Tahun 2015 s.d Tahun 2020

Tahun	IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar	IKLH Tingkat Provinsi	IKLH Tingkat Nasional	Keterangan
2015	78,08	67,01	64,84	Baik
2016	74,83	70,54	65,73	Baik
2017	70,86	73,24	66,46	Baik
2018	66,23	74,83	71,67	Cukup Baik
2019	78,74	67,61	66,55	Baik
2020	74,28	71,74	66,55*	Baik

Sumber : P3E Suma

1. Indeks Kualitas Air

Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahun 2020 adalah sebesar 50,00. Bila dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan sebesar 61,10, maka persentase capaian kinerjanya adalah 81,83 %. Capaian target pada indikator ini belum mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2016 s/d Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.78
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air

No	Tahun Renstra	IKA		%
		Target	Realisasi	
1	2016	52,9	42,01	79,41

2	2017	53	41,50	78,30
3	2018	54	30,71	56,87
4	2019	55	61,04	110,98
5	2020	61,10	50,00	81,83

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020

Untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Khusus untuk Tahun 2020, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Standar Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup disimpulkan bahwa sungai yang dipantau (berdasarkan 14 sampel yang telah dianalisis) dalam kondisi cemar ringan. Selain pemantauan kualitas sungai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah melakukan pemantauan kualitas air laut, kualitas air sumur, kualitas limbah padat dan limbah cair.

2. Indeks Kualitas Udara

Tabel 2.79
 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara

No	Tahun Renstra	IKU		Persentase
		Target	Realisasi	%
1	2016	99,98	99,97	99,99
2	2017	99,98	87,55	87,57
3	2018	99,98	82,62	82,64
4	2019	99,98	82,62	82,64
5	2020	84,20	88,80	105,46

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2020 adalah sebesar 88,80 dari 84,20 yang ditargetkan dengan persentase capaian 105,46%. Kualitas udara sangat dipengaruhi uji emisi

kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin (NO₂) 0,18 sedangkan untuk uji emisi industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya (SO₂) 0,64.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2020 adalah sebesar 89,12. Bila dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan sebesar 89,12, maka persentase capaian kerjanya adalah 100 %. Capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Realisasi kinerja tahun ini tetap, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2019.

Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016 s/d Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80
 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan

No	Tahun Renstra	IKTL		%
		Target	Realisasi	
1	2016	70,54	80,59	114,25
2	2017	70,60	80,59	114,15
3	2018	70,67	80,59	114,04
4	2019	70,74	89,12	125,98
5	2020	89,12	89,12	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

Penghitungan IKTH dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTH, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTH tertinggi (100) adalah daerah

yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 adalah 89,12.

Keberadaan hutan di Kepulauan Selayar yang meliputi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas dimana pengelolaannya telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dan selebihnya adalah hutan hak. Hutan lindung (*protection forest*) maupun hutan produksi terbatas, pengelolaannya telah dilimpahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, namun operasionalisasinya berada dalam koordinasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Selayar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 2.81
 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Hutan Mangrove Sekunder (Ha)	Hutan Primer (Ha)	Hutan Sekunder (Ha)
Benteng	0	0	190,31
Bontoharu	95,84	0	8.107,83
Bontomanai	0	0	10.986,01
Bontomatene	0	0	11.166,37
Bontosikuyu	0,88	38,03	16.141,74
Buki	0	0	3.695,48
Pasilambena	33,26	140,14	5.610,20
Pasimarannu	0	10.392,45	2.005,90
Pasimasunggu	57,54	0	8.783,68
Pasimasunggu Timur	125,27	0	3.107,41
Takabonerate	0	5,30	528,86
Total	312,79	10.575,92	70.323,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

Selain kawasan hutan, keberadaan lahan kritis merupakan salah satu kawasan yang luasannya cukup luas dan produktivitas lahan masih kurang dalam hal pengelolaannya. Sehingga perlu ada kegiatan rehabilitasi lahan pada lahan kritis, sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya alam yang ada untuk dapat dikembangkan dan dilestarikan. Kegiatan merehabilitasi lahan kritis memerlukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan mutu sumber daya manusia yang menangani lahan kritis merupakan salah satu kunci penentu

keberhasilan pencapaian sasaran rehabilitasi lahan kritis. Untuk lebih jelasnya, luas kawasan penggunaan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.82
Luas Kawasan Penggunaan Lainnya

Kecamatan	Lahan Terbuka	Pemukiman	Perkebunan	Rawa	Savana	Sawah	Semak Belukar	Tambak
Benteng	11,64	289,65	0	0	0	4,09	0	0
Bontoharu	14,69	191,05	1.438,83	0	0	2.593,75	47,51	267,36
Bontomanai	0	254,23	438,39	0	0	1.061,49	0	0
Bontomatene	10,78	327,86	0	0	0	3.960,56	262,78	0
Bontosikuyu	975,99	220,28	1.815,99	7,94	0	862,18	851,44	133,85
Buki		149,55	0	0	0	2.991,42	0	0
Pasilambena	254,05	62,18	2.944,85	0	0	1.205,61	13,61	0
Pasimarannu	120,07	61,21	4.195,27	1,01	121,16	488,06	0	0
Pasimasunggu	740,63	114,26	481,32	78,89	0	1.407,63	443,39	65,36
Pasimasunggu Timur	13,51	90,32	23,14	0	0	1.738,33	0	316,75
Takabonerate	420,87	97,20	1.285,70	0	0	0	231,06	1,34
Total	2.562,23	1.857,79	12.623,49	87,84	121,16	16.313,12	1.849,79	784,66

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya meningkatkan tutupan vegetasi dan perlindungan dan konservasi sumber daya alam telah melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Dengan melakukan penghijauan dan reboisasi serta pelatihan terhadap masyarakat sebagai perubahan pola pikir. Kegiatan penghijauan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 tersebar di sepuluh kecamatan yaitu kecamatan Buki, Bontomatene, Bontomanai, Benteng, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimasunggu Timur, Pasilambena, Pasimarannu dan Kecamatan Pasimasunggu. Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk penyediaan bibit tanaman, baik tanaman kayu-kayuan maupun tanaman yang sifatnya multi purpose tree species (MPTS). Jenis bibit yang diadakan untuk kegiatan penghijauan sebanyak 11 jenis yaitu

mangga, sukun, bakau, pusuk merah, glodogan tiang, jati super, pala, cengkeh, durian, rambutan dan ketapang kencana.

2. Melakukan kegiatan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yaitu pemeliharaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, perencanaan dan pengembangan tanaman keanekaragaman hayati serta pengadaan bibit yang tersebar di sepuluh kecamatan.
3. Kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air juga dilaksanakan dengan 1 lokasi pelaksanaan yaitu yaitu sumber air topa dan sungai giring-giring.

Pada tahun 2020, luas RTH Publik sebesar 1.868,98 Ha dari luas wilayah Kepulauan Selayar 135.663 Ha atau sebanyak 1,37%. Dan secara khusus Kecamatan Benteng mempunyai luas RTH Publik sebesar 52,25 Ha dari luas wilayah 2.463 Ha atau sebanyak 2,12%. Secara keseluruhan, luas ruang terbuka hijau Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 2.83
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2019

Kecamatan	Luas Wilayah		Luas RTH Publik (Ha)	% RTH Publik	Ket.
	Km2	Ha			
Benteng	24,63	2.463	52,25	2,038	
Bontoharu	128,21	12.812	41,22	0,313	
Bontomanai	136,42	13.642	432,96	3,156	
Bontomatene	193,05	19.305	26,00	0,126	
Buki	67,74	6.774	1.116,66	16,471	
Bontosikuyu	248,22	24.822	61,50	0,242	
Pasimasunggu Timur	67,14	6.714	30,30	0,447	
Pasimasunggu	131,8	13.180	35,36	0,266	
Pasimarannu	195,33	19.533	40,13	0,205	
Pasilambena	114,88	11.488	30,00	0,261	
Taka Bonerate	49,3	4.930	2,60	0,053	
Total RTH Publik		135.663	1.868,98	1,377	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

Terhadap pencapaian indikator tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menemukan hambatan antara lain:

1. Kurangnya pemahaman pihak pemerintah dan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kurangnya kesadaran pihak pemilik usaha/kegiatan terhadap

kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3. Adanya pemahaman yang salah terhadap dokumen lingkungan yang dianggap hanya sebagai bahan pelengkap administrasi dalam pengajuan permohonan kredit.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan hidup;
2. Menyusun peraturan terkait pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Menyusun peta indikatif daya dukung dan daya tampung Kabupaten;
4. Melakukan bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha;
5. Melakukan pengangkatan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup.

Sasaran Strategis 25

Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran strategis 25 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan”**. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja serta Dinas sosial. Untuk mengukur sasaran kedua puluh lima ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **51,54%** dengan kategori predikat sasaran **Rendah**. Hasil pengukuran peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.84
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 25

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	27,95 %	12,64%	45,22%	40,76	35,22	86,40%
2.	Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	1.200	316	26,33%	1.750	292	16,68%
Rata-rata Capaian Kinerja				35,78%	Rata-rata Capaian Kinerja		51,54%

1. Rasio daya serap tenaga kerja (%)

Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja adalah sebesar 69.858 orang dengan rincian jumlah yang bekerja sebanyak 68.156 orang dan yang masih mencari pekerjaan sebanyak 1.702 orang (merupakan pengangguran terbuka). Sedangkan jumlah yang bukan angkatan kerja adalah sebanyak 32.603 orang dengan rincian 6.362 orang masih bersekolah, 19.891 orang mengurus rumah tangga dan lainnya sebanyak 6.350 orang.

Tabel 2.85
Distribusi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kegiatan

No.	Kegiatan Utama (Main Activity)	Jenis Kelamin (Sex)		
		Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah (Total)
1.	Angkatan Kerja / <i>Economically Active</i> : - Bekerja - Mencari Pekerjaan	40.202 38.977 1.225	29.656 29.179 477	69.858 68.156 1.702
2.	Bukan Angkatan Kerja / <i>Economically Inactive</i> - Sekolah - Mengurus Rumah Tangga - Lainnya	8.264 3.126 1.202 3.936	24.339 3.236 18.689 2.414	32.603 6.362 19.891 6.350
Jumlah Jiwa		48.466	53.995	102.461

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2020)

2. Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)

Untuk mengetahui persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan, diukur dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar pada Tahun 2020. Dari 1.700 orang yang ditargetkan dalam RPJMD pada Tahun 2020 yang terealisasi hanya 292 orang. Sedangkan target jumlah calon tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 1.750 orang, memiliki nilai capaian indikator kinerja sebesar 16,68 dengan kategori sangat rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 realisasi jumlah pencari kerja yang di tempatkan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Beberapa kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Masih kurangnya lowongan pekerjaan di kabupaten Kepulauan Selayar baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta
- b. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat pencari kerja itu sendiri untuk didata sehingga pihak Dinas PMPTSPK bisa memberikan feedback manakala ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
- c. Tidak adanya laporan dari pencari kerja ketika mendapatkan pekerjaan
- d. Sejumlah perusahaan menerima/membuka lowongan tidak mempersyaratkan AK1/Kartu Pencari Kerja sehingga pekerja yang ditempatkan tidak terdata.
- e. Bencana pandemi covid -19 yang terjadi sepanjang tahun menyebabkan kegiatan masyarakat terganggu.

Berdasarkan hal tersebut diatas , maka langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah daerah adalah:

- Meningkatkan kesempatan kerja baik dengan perluasan maupun pengembangan kesempatan kerja;
- Menciptakan lapangan kerja melalui tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja khusus (disabilitas);

- Peningkatan informasi pasar kerja dan bursa kerja online;
- Pemberdayaan dan perluasan kerja bagi petani dan nelayan;

Sasaran Strategis 26

Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan

Sasaran strategis 26 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan**”. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk mengukur sasaran kedua puluh enam ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **101,24%** dengan kategori predikat **Sangat tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.86
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 26

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	19.270	19.347 (UMKM) 162 (Koperasi)	101,24%	20.304	4.012 (UMKM) 136 (Koperasi)	20,43%
Rata-rata Capaian Kinerja				101,24%	Rata-rata Capaian Kinerja		20,43

1. Koperasi

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam tatanan perekonomian, koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh dikalangan masyarakat luas sebagai pendorong tumbuhnya ekonomi dengan berasaskan kekeluargaan. Berikut data capaian kinerja koperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.87
Persentase Koperasi Tahun 2020

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Tahun 2020		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi :			
	a. Persentasi Koperasi Aktif	130	136	104,61
	b. Persentasi Koperasi Sehat	145	85	58,62
	c. Persentase Koperasi yang Berprestasi	4	3	75

Sumber data: Dinas perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM 2020

- ✓ Jumlah koperasi aktif sampai dengan per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 136 koperasi dari 165 koperasi yang ada.
- ✓ Menerima penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sejak tahun 2016-2020 sebagai Koperasi Berprestasi yaitu koperasi Kontue Toje', Koperasi Sadar dan Koperasi Primer Kepolisian.
- ✓ Hasil Pemutakhiran data koperasi se Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.89
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 - 2020
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	129	135	130	136	145	131	132	136
2	Jumlah koperasi	178	184	186	189	189	161	162	165
3	Persentase koperasi aktif	72,47	73,37	69,89	71,96	76,72	81,37	81,48	82,42

Sumber data: Dinas perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM 2020

Tabel 2.90
Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2013 - 2020
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecamatan Benteng								
	Jumlah koperasi aktif	45	48	43	48	57	44	44	47
	Jumlah koperasi	79	82	84	86	86	63	63	65
	Persentase koperasi aktif	56,96	58,54	57,14	55,81	66,28	69,84	69,84	72,30
2	Kecamatan Bontoharu								
	Jumlah koperasi aktif	8	9	9	10	10	9	9	10
	Jumlah koperasi	10	11	11	12	12	10	10	11
	Persentase koperasi aktif	80	81,82	81,82	83,33	83,33	90	90	90,90
3	Kecamatan Bontomanai								
	Jumlah koperasi aktif	10	11	11	11	11	10	10	11
	Jumlah koperasi	13	14	14	14	14	12	12	13
	Persentase koperasi aktif	76,92	78,57	78,57	78,57	78,57	83,33	83,33	84,61
4	Kecamatan Bontomatene								
	Jumlah koperasi aktif	15	15	15	15	15	16	16	16
	Jumlah koperasi	18	18	18	18	18	18	18	18
	Persentase koperasi aktif	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	88,89	88,89	88,89
5	Kecamatan Buki								
	Jumlah koperasi aktif	12	12	12	12	12	5	5	5
	Jumlah koperasi	15	15	15	15	15	6	6	6
	Persentase koperasi aktif	80	80	80	80	80	80	80	80
6	Kecamatan Bontosikuyu								
	Jumlah koperasi aktif	6	6	6	6	6	12	13	12
	Jumlah koperasi	7	7	7	7	7	15	16	15
	Persentase koperasi aktif	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	80	81	80
7	Kecamatan Pasimasunggu								
	Jumlah koperasi aktif	7	7	7	7	7	7	7	7
	Jumlah koperasi	8	8	8	8	8	8	8	8
	Persentase koperasi aktif	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
8	Kecamatan Pastim								
	Jumlah koperasi aktif	4	4	4	4	4	4	4	4
	Jumlah koperasi	6	6	6	6	6	4	4	4
	Persentase koperasi aktif	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	100	100	100
9	Kecamatan Pasimarannu								
	Jumlah koperasi aktif	8	8	8	8	8	9	9	9
	Jumlah koperasi	8	8	8	8	8	9	9	9
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Kecamatan Takabonerate								
	Jumlah koperasi aktif	9	9	9	9	9	9	9	10
	Jumlah koperasi	9	9	9	9	9	9	9	10
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Kecamatan Pasilambena								

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah koperasi aktif	5	5	5	5	5	5	5	5
	Jumlah koperasi	6	6	6	6	6	6	6	6
	Persentase koperasi aktif	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
	Total Jumlah koperasi aktif	129	135	130	136	145	131	132	136
	Total Jumlah koperasi	178	184	186	189	189	161	162	165
	Total Persentase koperasi aktif	72,47	73,37	69,89	71,96	76,72	81,37	81,48	82,42

Sumber data: Dinas perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah koperasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada Tahun 2017 Peresentase jumlah Koperasi Aktif adalah 81,37 dari target 161 koperasi dan realisasinya sebanyak 131 koperasi per 31 Desember 2018, pada tahun 2018 adalah Koperasi Aktif sebanyak 131 Koperasi dari jumlah seluruh dari jumlah seluruh koperasi sebanyak 161 koperasi. Tahun 2019 Koperasi Aktif sebanyak 132 koperasi dari jumlah seluruh koperasi sebanyak 162 koperasi, tahun ini ada satu koperasi bar terbentuk yaitu koperasi nelayan dopa bersatu. Pada Tahun 2020, koperasi aktif sebanyak 136 koperasi dari jumlah seluruh koperasi sebanyak 165 koperasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator diatas oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Masih rendahnya pelaksanaan ART
2. Adanya tunggakan penerima bantuan
3. Kegiatan usaha tidak berjalan
4. Belum optimalnya pengelolaan sentra produksi
5. Terbatasnya tenaga terampil

Adapun langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terhadap permasalahan yang dihadapi adalah dengan :

1. Merestrukturisasi Kelembagaan/Penataan system dan prosedur kinerja organisasi yang professional

2. Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak
3. Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi
4. Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya
5. Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif

2. Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pada Tahun 2020 persentase jumlah Usaha Kecil menengah yang aktif adalah sekitar 16,63%, ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2018 dari jumlah UKM 18.639 menjadi 4.012 UKM, ini disebabkan oleh karena 83,37% pelaku usaha tidak aktif lagi. Sejalan dengan itu berbagai bantuan peralatan bagi pelaku usaha yang merupakan Program Prioritas/Gratis Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 (sebanyak 901 Unit/Set Peralatan atau peningkatannya sekitar 41,07% dari tahun sebelumnya sebanyak 217 Unit/Set peralatan, tahun 2018 sebanyak 370 Unit/Paket peralatan atau sekitar 58,65%) dapat meningkatkan pendapatan IKM secara keseluruhan, dan pendapatan rata-rata di range Rp. 1.000.000 s/d 5.000.000,- sehingga masih mampu bersaing dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi global, namun di tahun 2020 terjadi pandemic covid 19 sehingga mengalami penurunan omset sekitar 50% dari tahun sebelumnya namun para pelaku usaha kecil dan menengah tetap berproduksi. Adapun program yang mendukung antara lain pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya capaian target pertambahan industri
2. Masalah permodalan menjadi permasalahan tersendiri dalam penumbuhan dan pengembangkan industri kecil menengah

3. Tingginya ketergantungan wirausaha baru terhadap bantuan permodalan dan mesin produksi dari Pemerintah dan Pemangku kepentingan lainnya menyebabkan belum maksimalnya peningkatan produksi yang mempengaruhi peningkatan kapasitas IKM secara keseluruhan.
4. Masih belum maksimalnya pendataan perkembangan IKM sehingga masih belum maksimal disajikan secara real dan akurat.
5. Belum tersedianya sistem dan instrumen pengumpulan data yang dapat menyajikan data secara real time dan valid sehingga pengumpulan data masih bersifat manual dan membutuhkan proses lebih lama.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Memfasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri
2. Memfasilitasi akses permodalan bagi wira usaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan daerah/nasional, BUMN, BUMD dan instansi terkait permodalan usaha.
3. Melakukan pendampingan manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha baru agar dapat memiliki mental yang tanggung dalam memulai usaha.
4. Melakukan pemutakhiran data perkembangan sektor industri melalui pendekatan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan data secara real time dan valid sesuai dengan kebutuhan informasi data.
5. Melatih petugas pendataan industri yang disiapkan untuk kabupaten/kota serta memaksimalkan fungsi penyuluh industri dalam melakukan pendampingan kepada sentra-sentra yang vacum atau berhenti untuk di fasilitasi jalan keluar dari kelangsungan produksi dan usaha IKM baik dalam bentuk modal maupun peralatan.

Sedangkan hal-hal penting lainnya yang dianggap perlu untuk

dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dimasa yang akan datang adalah:

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan : pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan'
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang ; produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan tehnologi.
3. Menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat, berupa : kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya.
4. Memfasilitasi kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah dan besar melalui pola; inti plasma, subkontrak, dagang umum waralaba, keagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.

Sasaran Strategis 27

Meningkatnya Kecintaan dan Kebanggaan Sebagai Orang Selayar

Sasaran strategis 27 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan”**. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kepariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kecamatan. Untuk mengukur sasaran kedua puluh tujuh ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 sebesar **214%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.91
 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 27

No.	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	1.600	5.460	341%	1.700	9.750	573,52%
2.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	70	61	87%	80	64	80%
Rata-rata Capaian Kinerja				214%	Rata-rata Capaian Kinerja		%

1. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan

Pelestarian budaya sebagai rangkaian kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan dan warisan budaya ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya dalam usaha mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan melebihi target yaitu 9.750 buah yang terdiri dari etnografika 45 buah, numismatika dan heraldika 7.501 buah, filologika 2 buah, keramologika 2.173 buah dan lain – lain terdiri dari 29 buah. Indikator kinerja ini terealisasi dengan baik karena tepat sasaran sesuai rencana, baik secara mutu, waktu, biaya dan pemanfaatannya. Dengan demikian tafsiran pencapaian Kinerja dikatakan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1.700 buah dengan persentase capaian kinerja sekitar 573,52%.

Capaian sangat meningkat tajam jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2019 lalu yaitu hanya sebanyak 5.460 buah. Adapun program yang mendukung adalah Salah satu program yang mendukung indikator kinerja adalah yaitu program pengelolaan Kekayaan Budaya.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

1. Pelaksanakan program dengan berbagai macam kegiatan yang mendukung pelestarian cagar budaya;
2. Dilaksanakannya pemetaan kembali tentang benda budaya, cagar budaya, situs budaya yang perlu dilestarikan secara berkala sehingga kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan dan warisan budaya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat lebih terfokus.

2. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan

Target capaian Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan tahun 2020 yaitu 80 jenis dengan realisasi capaian 64 jenis. Realisasi capaian mengalami peningkatan dari Tahun 2019 yang hanya sebanyak 61 dari 70 yang di targetkan dalam RPJMD. Salah satu warisan budaya tak benda yang dilestarikan yaitu anjala Ombong, tari silonreng dan attaraluk. Anjala Ombong adalah salah satu upacara tradisional yang telah dilakukan sejak lama khususnya di kecamatan Bontosikuyu, Anjala Ombong dilakukan sekali dalam setahun sekitar bulan Agustus. Dihadiri oleh berbagai masyarakat dari desa dan perkampungan/perkebunan termasuk pemerintah dan pegawainya. Semua berdatangan untuk menikmati hasil laut dan beberapa dari mereka datang untuk tujuan hiburan saja. Anjala Ombong biasanya bertepatan dengan masa panen jagung yang kedua oleh petani. Anjala Ombong bertempat di muara sungai yang disebut dengan Binanga Sangkulu- kulu.merupakan bagian antara 2(dua) wilayah yang bernama Pariangan dan Tile – tile. Lebar muara sungai tersebut sekitar 20 meter dan kedalaman 4 meter.

Istilah atau kata Silonreng dalam bahasa selayar berarti Silassukang (Lahir bersama)atau lahir kembar. Sedangkan dalam bahasaGowa, Maros, Takalar dan Je'nepono menyebutnya Salonreng yang berarti selendang

sedangkan di Ara Bulukumba Salonreng dimaknai sebagai kata yang berasal dari SalaOnro artinya Salah tempat. Pada Masa lalu ketika kerajaan BallaBulo Berjaya tarian ini ditampilkan pada upacara adat kerajaan, termasuk pada upacara pelantikan raja. Tari Silonreng adalah salah satu bentuk tarian tradisional yang cukup populer di kalangan masyarakat selayar khususnya di BallaBulo Kecamatan Bontosikuyu.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut adalah pengembangan nilai budaya, pengembangan keragaman budaya dan peningkatan kompetensi SDM tenaga budaya.

Adapun kendala yang dihadapi sehingga pencapaian indikator ini belum maksimal adalah:

- a. Masih terdapatnya tradisi, ekspresi lisan dan lain-lain di masyarakat yang belum terdata sehingga menyulitkan dalam pelestarian dan pengembangan tradisi tersebut.
- b. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau-pulau baik pulau besar maupun pulau kecil sehingga menyulitkan dalam pendataan WBTB.

Dalam rangka mencapai target kinerja sebanyak 27 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada rincian realisasi anggaran berikut ini:

Tabel 2.92
 Realisasi Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama	Pelaksanaan ibadah	2.140.884.000,-	2.055.244.200,-	96%
		Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	1.104.358.826,-	1.084.346.883,-	98,19%
2	Meningkatnya kualitas	Opini atas laporan	9.935.365.164	8.816.645.836,-	88,74%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
	pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	keuangan			
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	319.834.825,-	271.457.265,-	84,87%
		Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	7.947.434.652,-	7.230.587.487,-	90,98%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	138.205.597	136.509.700	98,77%
5	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kabupaten	1.910.321.100,-	1.899.037.012,-	99,41%
6	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah	Transmigran lokal (KK)	5.438.000,-	1.550.120,-	28,51%
7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa mandiri	794.284.380,-	793.225.030,-	99,86%
		Persentase desa berkembang			
		Persentase desa tertinggal			
8	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase angka kemiskinan	4.546.818.000,-	4.499.733.433,-	98,96%
		Jumlah penduduk miskin (KK)			
9	Meningkatnya daya beli masyarakat	Income per kapita penduduk (Juta)	APBD		
10	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka melek huruf	1.790.327.000,-	1.788.484.920	99,89%
		Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	37.933.895.730,-	36.609.928.856	96,51%
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	90.940.278.602,-	69.664.485.002,-	76,60%
12	Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5.184.010.430,-	4.696.113.192,-	90,59%
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	133.500.000,-	130.056.100,-	97,42%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
13	Meningkatnya kemandirian pemuda	Persentase pemuda mandiri	389.750.000,-	133.500.000,-	34,25%
14	Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	780.600.000,-	101.480.000,-	13%
15	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat	359.425.000,-	355.021.600,-	98,77%
		Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut			
		Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara			
16	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar	Jalan lingkaran timur utara terbangun (%)	63.386.066.005,-	52.596.955.465,-	82,98%
		Jalan lingkaran timur tengah terbangun (%)			
		Jalan lingkaran timur selatan terbangun (%)			
		Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)			
		Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	2.320.803.200,-	1.295.703.204	55,83%
		Berfungsinya Bandara Kayuadi			
		Jumlah Pelabuhan Laut (%)			
		Perluasan terminal angkutan darat (%)			
		Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)			
		Rasio jaringan irigasi	1.144.534.153	599.526.692,-	52,38%
		Rasio ketersediaan air baku	309.964.215,-	286.569.965,-	92,45%
		Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	5.131.602.185,-	3.731.070.785,-	72,71%
		Rasio ketersediaan air bersih industri (%)			
		Rumah layak huni (%)	2.451.735.800,-	2.288.039.847,-	93,32%
		13.307.229.297,-	12.383.311.501,-	93,06%	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
		Cakupan sanitasi layak (%)			
		Kawasan pemukiman kumuh tertangani (%)	5.547.179.771	4.630.013.090,-	83,47%
		Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	-	-	-
		Rasio elektrifikasi industri (%)			
		PLTMG terbangun dan beroperasi	-	-	-
		Terminal gas terbangun dan beroperasi	-	-	-
17	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	25.000.000,-	25.000.000,-	100%
		Jumlah kunjungan wisatawan asing			
18	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	15.886.140.000,-	752.499.490,-	4,74%
19	Meningkatnya investasi	Nilai PMDN	1.059.563.660,-	949.444.505-	89,61%
		Nilai PMA (\$)			
20	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Realisasi pembangunan KEK pariwisata	78.000.000,-	39.665.800	50,85%
21	Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang	Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	761.920.000,-	750.498.280,-	98,50%
22	Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa)	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	117.229.377,-	100.079.377.-	85,37%
23	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (ton)	10.359.563.650,-	10.251.248.337,-	98,95%
		Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman holtikultura (ton)			
		Persentase peningkatan produksi perkebunan (ton)			

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
		Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan (kw/ha)	Anggaran sama dengan anggaran persentase peningkatan produksi		
		Tingkat produktivitas pertanian tanaman hortikultura (kw/ha)			
		Tingkat produktivitas perkebunan (kg/ha)			
		Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali (%)			
		Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi unggul (%)	0	0	0%
		Persentase peningkatan produksi ternak	297.000.000,-	295.958.240,-	99,65 %
		Rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	-	-	-
		Produksi hasil hutan (m ³)	-	-	-
		Kerusakan hutan dan lahan (ha)	-	-	-
		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (ton dan %)	4.115.267.151,-	3.900.456.996,-	94,78%
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (ton dan %)	1.210.608.087,-	1.179.556.387,-	97,43%
		Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	528.413.000,-	435.959.163,-	82,50%
		Persentase peningkatan konsumsi ikan (kg/orang/tahun)	Anggaran sama dengan anggaran peningkatan produksi perikanan budidaya		
24	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam	Indeks Lingkungan Hidup	4.470.040.050,-	4.420.061.101,-	98,88 %
25	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	508.095.040,-	505.338.107,-	99,46%
		Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)			
26	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	3.185.479.457,-	2.550.721.870,-	80,07%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
27	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	622.254.000,-	612.770.221,-	98,47%
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	22.254.000,-	19.909.000,-	89,46%

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Tingkat efektifitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, sedangkan efisiensi merupakan penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang maksimum. Berikut ini perbandingan antara tingkat efektifitas dan efisiensi sumber daya terhadap perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) sasaran.

Tabel 2.93
Tingkat Efektivitas sumber daya Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama	Pelaksanaan ibadah	99,95%	100%	0,05%
		Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	99,59%	100%	0,41%
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan	88,74%	proses	proses
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	84,87%	84,07%	-0,8%
		Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	97,53%	100,31%	2,78%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,77%	85,97%	-12,8%
5	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kabupaten	99,41%	104,16%	4,75%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
6	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah	Transmigran lokal (KK)	28,51%	0%	-28,51%
7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa mandiri	99,86%	0%	-69,20%
		Persentase desa berkembang		50%	
		Persentase desa tertinggal		41,97%	
8	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase angka kemiskinan	98,96%	46,12%	-56,22%
		Jumlah penduduk miskin (KK)		42,74%	
9	Meningkatnya daya beli masyarakat	Income per kapita penduduk (Juta)	APBD		
10	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka melek huruf	99,89%	98,20%	-1,69%
		Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	96,51%	12,40%	-84,11%
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	76,60%	68,46	-8,14%
12	Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	90,59%	(KB) 69,87% (KS) -	-20,72%
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	97,42%	0%	-97,42%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		0%	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		0%	
13	Meningkatnya kemandirian pemuda	Persentase pemuda mandiri	34,25%	92,45%	58,2%
14	Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	13%	0%	0%
15	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat	98,77%	54,59%	-47,03%
		Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut		89,6%	
		Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara		11,03%	
16	Meningkatnya kapasitas infrastruktur	Jalan lingkaran timur utara	82,98%	0%	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
	dasar	terbangun (%)			-13,26%
		Jalan lingkaran timur tengah terbangun (%)		0%	
		Jalan lingkaran timur selatan terbangun (%)		0%	
		Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)		69,72%	
		Kapasitas Bandara Aroepala (%)	55,83%	100 %	0,89%
		Berfungsinya Bandara Kayuadi		0%	
		Jumlah Pelabuhan Laut (%)		41,18%	
		Perluasan terminal angkutan darat (%)		35,68%	
		Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)		50%	
		Rasio jaringan irigasi	52,38%	114,84	62,46%
		Rasio ketersediaan air baku	92,45%	85,61	-6,84%
		Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	72,71%	76,17	3,46%
		Rasio ketersediaan air bersih industri (%)		0	
		Rumah layak huni (%)	93,32%	44,48%	-48,84%
		Cakupan sanitasi layak (%)	93,06%	74,79%	-18,27%
		Kawasan pemukiman kumuh tertangani (%)	83,47%	0,01%	-83,46%
		Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	0	-	-
		Rasio elektrifikasi industri (%)		-	
				PLTMG terbangun dan beroperasi	0
Terminal gas terbangun dan beroperasi	0			-	-
17	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	100%	26,76%	-167,86%
		Jumlah kunjungan wisatawan asing		5,38%	
18	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	4,74%	20,81%	16,07%
19	Meningkatnya investasi	Nilai PMDN	89,61%	1.492,93%	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi	
		Nilai PMA (\$)		298,40%	806,06%	
20	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Realisasi pembangunan KEK pariwisata	50,85%	0%	-50,85%	
21	Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang	Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	98,50%	80%	-18,50%	
22	Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa)	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	85,37%	95%	9,63%	
23	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (ton)	98,95%	Padi : 56,18%	-21,21%	
				Jagung : 28,31%		
		Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman holtikultura (ton)		Jeruk Keprok : 54,27%		
		Persentase peningkatan produksi perkebunan (ton)		Kelapa : 88,37%		
				Pala : 97,55%		
				Cengkeh : 124,19%		
				Jambu Mete : 95,28%		
		Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan (kw/ha)	98,95%	Padi : 91,07%		-26,90%
				Jagung : 99,98%		
		Tingkat produktivitas pertanian tanaman holtikultura (kw/ha)		Jeruk Keprok : 68,30%		
Tingkat produktivitas perkebunan (kg/ha)	Kelapa : 70,33%					
		Pala : 35,13%				
		Cengkeh : 108,98%				
		Jambu Mete : 30,58%				
		Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali (%)		0%		

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi unggul (%)	0	0%	0%
		Persentase peningkatan produksi ternak	96,99%	Sapi Potong : 100,60%	23,66%
				Sapi Perah : 0%	
				Kerbau : 98,96%	
				Kuda : 99,23%	
				Kambing : 101,89%	
				Domba : 28,57%	
				Ayam Buras : 152,85%	
				Ayam Pedaging : 180,24%	
				Ayam Ras Petelur : 105,74%	
				Itik : 217,81%	
		Rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	0	-	-
		Produksi hasil hutan (m ³)	0	-	-
		Kerusakan hutan dan lahan (ha)	0	-	-
		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (ton dan %)	94,78%	53,24%	-41,54%
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (ton dan %)	97,44%	89,74%	-7,7%
		Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	82,50%	127,50%	45%
		Persentase peningkatan konsumsi ikan (kg/orang/tahun)	82,50%	120,03%	37,53%
24	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam	Indeks Lingkungan Hidup	98,88%	74,28%	-24,60%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
25	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	99,46%	86,40%	-47,92%
		Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)		16,68%	
26	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	80,07%	20,43%	-59,64%
27	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	98,47%	573,52%	475,05%
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	89,46%	80%	-9,46%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran dan yang diperjanjikan dalam RPJMD, terdapat 18 (delapan belas) sasaran dengan tingkat efisiensi cukup baik dengan rata-rata capaian tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar 44,50%. Selain itu terdapat 8 sasaran dengan tingkat efisiensi kurang baik dan 1 sasaran masih sementara dalam proses. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap pencapaian kinerja misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini digambarkan hubungan antara sasaran, indikator kinerja dengan program yang mendukung pencapaian indikator tersebut serta SKPD penanggung jawab.

Tabel 2.94
 Keterkaitan Sasaran Strategis, IKU dan Program

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama	Pelaksanaan ibadah Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	1. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama. 2. Peningkatan kualitas hidup beragama. 3. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 4. Pengembangan wawasan kebangsaan. 5. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.	Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan	1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. 4. Peningkatan aktifitas pengawasan. 5. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengawasan. 6. Penanganan Pengaduan masyarakat. 7. Pencegahan Korupsi. 8. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut. 9. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 10. Pendampingan Reviu dan Konsultasi Penyusunan LK	Seluruh SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
			SKPD. 11. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 12. Perbaikan Praktik Profesional.	
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	1. Pengembangan Indikator dan Capaian Kinerja Individu, Kegiatan dan Program SKPD. 2. Penyusunan LAKIP Kabupaten. 3. Penyusunan LAKIP SKPD 4. Asistensi LAKIP SKPD	Seluruh SKPD
		Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	1. Ketatalaksanaan daerah. 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Pengkoordinasian kebijakan dan pengendalian administrasi bidang pembangunan. 4. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah 5. Peningkatan pelaksanaan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah. 6. Penataan daerah otonomi. 7. Kerjasama pembangunan. 8. Penelitian dan pengembangan. 9. Perencanaan pembangunan daerah. 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 11. Perencanaan pembangunan ekonomi. 12. Perencanaan sosial budaya.	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
			13. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 14. Penguatan kapasitas pranata Litbang. 15. Informasi Ristek Daerah.	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Survey Kepuasan Masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan	Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja, Bappelitbangda
5	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kabupaten	1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 2. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. 3. Pemberdayaan dan perlindungan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. 4. Pemberantasan peredaran bea cukai rokok ilegal. 5. Pendidikan politik masyarakat. 6. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam kesiap siagaan kebakaran 7. Penanggulangan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah
6	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah	Transmigran lokal (KK)	1. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. 2. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. 3. Peningkatan peran perempuan di pedesaan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Meningkatnya kinerja	Persentase desa	4. Pengembangan teknologi tepat guna.	Dinas Pemberdayaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
	penyelenggaraan pemerintahan desa	mandiri	5. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa. 6. Pengembangan Kawasan Pedesaan dan wilayah transmigrasi	Masyarakat dan Desa
		Persentase desa berkembang		
		Persentase desa tertinggal		
8	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase angka kemiskinan	1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. 2. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, 3. Pembinaan anak terlantar. 4. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma. 5. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). 6. Pelestarian NK.3 7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan. 8. Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah penduduk miskin (KK)		
9	Meningkatnya daya beli masyarakat	Income per kapita penduduk (Juta)		Seluruh SKPD
10	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka melek huruf	1. Pendidikan Non Formal.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan
		Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	1. Pendidikan anak usia dini (PAUD). 2. Pendidikan wajib belajar 9 tahun. 3. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Manajemen pelayanan pendidikan 5. Peningkatan mutu pendidikan.	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
			6. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan 7. Peningkatan kualitas pelayanan informasi	
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	1. Pengembangan lingkungan sehat 2. Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Pengawasan Obat dan makanan 4. Promkes & Pemberdayaan Masyarakat 5. Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular 6. Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya 7. Pelayanan Kesehatan Ibu 8. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 9. Pengadaan, Peningkatan Sarana& Prasarana RS 10. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 11. Upaya Kesehatan Masyarakat (BLUD)	Dinas kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
12	Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Pelayanan kontrasepsi 2. Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga 3. Pemenuhan hak anak (PHA) 4. Keluarga berencana/sejahtera 5. Pengendalian penduduk 6. Penataan administrasi kependudukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Indeks Ketimpangan	1. Peningkatan kualitas hidup perempuan.	Dinas Pemberdayaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
		Gender (IKG)	2. Usaha ekonomi perempuan menuju kemandirian dan kesejahteraan. 3. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
13	Meningkatnya kemandirian pemuda	Persentase pemuda mandiri	1. Peningkatan koordinasi peran serta kepemudaan. 2. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan seni. 3. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)		
15	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat	1. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2. Pengembangan dan Keselamatan Transportasi	Dinas Perhubungan
		Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut		
		Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara		
16	Meningkatnya kapasitas	Jalan lingkar	1. Pembangunan jalan dan jembatan	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab	
	infrastruktur dasar	timur utara terbangun (%)	2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Pembangunan infrastruktur perdesaan 4. Program pengendalian banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Jalan lingkaran timur tengah terbangun (%)			
		Jalan lingkaran timur selatan terbangun (%)			
		Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)			
		infrastruktur dasar	Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Berfungsinya Bandara Kayuadi		
			Jumlah Pelabuhan Laut (%)		
			Perluasan terminal angkutan darat (%)		
			Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)		
			Rasio jaringan irigasi		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
		Rasio ketersediaan air baku	1. penyediaan dan pengelolaan air baku	Ruang
		Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	1. pengembangan kinerja pengelolaan air minum 2. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	
		Rasio ketersediaan air bersih industri (%)		
		Rumah layak huni (%)	1. Pemberdayaan Komunitas Perumahan 2. Pengembangan Perumahan 3. Program legislasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Cakupan sanitasi layak (%)	1. Pembangunan turap/talud/bronjong 2. Pembangunan/rehabilitasi saluran drainase dan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kawasan pemukiman kumuh tertangani (%)	1. Pemberdayaan Komunitas Kawasan Permukiman 2. Penataan bangunan dan lingkungan 3. Penataan ruang terbuka hijau 4. Pengelolaan areal pemakaman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	Dialihkan ke provinsi	-
		Rasio elektrifikasi industri (%)		
		PLTMG terbangun dan	Dialihkan ke provinsi	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
		beroperasi		-
		Terminal gas terbangun dan beroperasi		
17	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	1. Pengembangan destinasi pariwisata 2. Pengembangan pemasaran pariwisata. 3. Pengembangan kemitraan pariwisata 4. Pengembangan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan asing		
18	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	1. Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan
19	Meningkatnya investasi	Nilai PMDN	1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 2. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 3. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah. 4. Peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan terpadu satu pintu. 5. Menginsentifikasi penanganan pengaduan masyarakat. 6. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama investasi. 7. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
		Nilai PMA (\$)		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
			8. Pengembangan hubungan industrial.	Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
20	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Realisasi pembangunan KEK pariwisata	1. Koordinasi KEK Pariwisata	Dinas Pariwisata
21	Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang	Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	1. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu 2. Penyelenggaraan dan Pengelolaan TPI	Dinas Kelautan dan Perikanan
22	Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa)	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	1. Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM
23	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (ton) Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman holtikultura (ton)	1. Peningkatan kesejahteraan petani 2. Peningkatan ketahanan pangan 3. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 4. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 6. Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
		Persentase peningkatan produksi perkebunan (ton)		
		Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali (%)	1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2. Peningkatan produksi hasil peternakan 3. Peningkatan penerapan teknologi peternakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi unggul (%)		
		Persentase peningkatan produksi ternak		
		Rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	Dialihkan ke provinsi	-
		Produksi hasil hutan (m ³)		
		Kerusakan hutan dan lahan (ha)		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (ton dan %)	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (ton dan %)	1. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	
		Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	1. Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	
		Persentase peningkatan konsumsi ikan (kg/orang/tahun)	2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 3. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	
24	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam	Indeks Lingkungan Hidup	1. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
			7. Penaatan Hukum Lingkungan Hidup 8. Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat	
25	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja (%) Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 2. Peningkatan kesempatan kerja. 3. Perlindungan tenaga kerja. 4. Pelayanan administrasi BLK. 5. Peningkatan jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
26	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM 2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 4. Penataan sistem kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan koperasi. 5. Peningkatan apresiasi hasil kinerja koperasi atas prestasi nilai dasar. 6. Peningkatan Efisiensi. 7. Pengembangan perdagangan. Koordinasi dan kerjasama 8. Pengendalian kemetrolagian 9. Perlindungan konsumen 10. Pengembangan industri kecil dan menengah 11. Peningkatan kemampuan teknologi 12. Penataan struktur industri 13. Penciptaan iklim usaha kecil	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
27	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan	1. Pengembangan Nilai Budaya 2. Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
	Selayar	dikembangkan		
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan		

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan, sebagaimana berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42286);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU no. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816).

2. GAMBARAN UMUM TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari dua Kementerian sebagai berikut :

A. Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian meliputi dua bidang urusan sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pertanian

Tugas pembantuan bidang urusan pertanian diterima dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan dasar hukum pelaksanaan :

1. DIPA Nomor : 018.08.4.199133/2020 tanggal 7 januari 2020
2. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 188-43/80/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020.

Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian, dimana alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp.

667.480.003,- (Enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga rupiah). Jumlah kegiatan sebanyak 4, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana
3. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
4. Fasilitas Pembiayaan Pertanian

2. Bidang Urusan Pangan

Tugas pembantuan bidang urusan pangan diterima dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan dasar hukum pelaksanaan :

1. DIPA Nomor : 018.08.4.199133/2020 tanggal 7 Januari 2020
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
3. Peraturan Menteri Pertanian No.56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020
4. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan nomor 218/HK.310/C/12/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020
5. Rencana Operasional Penggunaan Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten kepulauan Selayar Satker Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018.03.4.199125 Tahun Anggaran 2020
6. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 188.4.43/30/II/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten,

Penanggungjawab Kegiatan, Bendahara Pembantu, Staf Bendahara Pembantu, Petugas Pelaporan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Tugas Pembantuan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020.

Tugas pembantuan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dimana alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 337.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Jumlah kegiatan sebanyak 4, sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi kacang hijau 100 Ha
2. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
3. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan selama 12 bulan berupa :
4. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

B. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan meliputi satu bidang urusan sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Perdagangan

Tugas pembantuan bidang urusan perdagangan diterima dari Kementerian Perdagangan, dengan dasar hukum pelaksanaan DIPA Nomor : SP DIPA-090.02.4.191438/2020 tanggal 17 Agustus 2020.

Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan Program Pengembangan Perdagangan dalam Negeri, dimana alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Adapun kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selain mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian, juga mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dari :

A. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan

Tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri satu bidang urusan sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pangan

Tugas pembantuan bidang urusan pangan diterima dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dasar hukum pelaksanaan DIPA Nomor : SP DIPA-081.11.3.199374/2020, tanggal 19 Juni 2020.

Tugas pembantuan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dimana alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 508.420.000,- (Lima ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Jumlah kegiatan sebanyak 3, sebagai berikut:

1. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan
2. Pengembangan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
3. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan.

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH

3.1.1. Target Kinerja

A. OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Bidang Urusan Pertanian

Target Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 667.480.003,- (Enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga rupiah) dengan target kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
 - Pembangunan embung pertanian 2 unit
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana
 - Pengelolaan Kegiatan selama 12 bulan
3. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
 - a. e-RDKK mendukung penyaluran pupuk bersubsidi berbasis penerapan kartu tani penyusunan dan penginputan e-RDKK
 - Up dating RDKK 11 kecamatan
 - Koordinasi pengawalan dan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi pada 11 kecamatan
 - b. Bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pupuk dan pestisida
 - Pelaksanaan KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida berupa pembinaan peredaran pupuk dan pestisida serta penyusunan laporan KP3.
4. Fasilitas Pembiayaan Pertanian
 - a. Bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian
 - Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian berupa koordinasi pelaksanaan FPPS, temu usaha pembiayaan dan monev selama 7 bulan.

2. Bidang Urusan Pangan

Target Kinerja Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dimana Alokasi anggaran sebesar Rp. 337.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan target capaian kinerja sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi kacang hijau 100 Ha
 - a. Bantuan Benih 100 Ha
 - b. Bantuan Pupuk Hayati Cair 100 Ha
2. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
 - a. Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi kegiatan pengelolaan system penyediaan benih tanaman pangan
3. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan selama 12 bulan berupa
 - a. Layanan keuangan dan perlengkapan melalui pengelolaan perbendaharaan selama 12 bulan
 - b. Layanan evaluasi dan pelaporan melalui pengelolaan data dan informasi sebanyak 3 kali
4. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
 - a. Melaksanakan penyaluran perontok/pemipil untuk sarana pasca panen yaitu power thresher sebanyak 5 unit
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan sarana pasca panen tanaman pangan .

B. OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

1. Bidang Urusan Perdagangan

Target Kinerja Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Target Kinerja Program dan Kegiatan :

- a. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan
 - Pembangunan Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur

3.1.2. Realisasi

A. OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Bidang Urusan Pertanian

Capaian realisasi anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian sebesar Rp. Rp.606.089.800,- (Enam ratus enam juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau terealisasi sekitar 90,81 %, dengan capaian realisasi target kinerja program/kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
 - Pembangunan embung pertanian 2 unit
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana
 - Pengelolaan Kegiatan selama 12 bulan
3. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
 - a. e-RDKK mendukung penyaluran pupuk bersubsidi berbasis penerapan kartu tani penyusunan dan penginputan e-RDKK
 - Up dating RDKK 11 kecamatan
 - Koordinasi pengawalan dan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi pada 11 kecamatan
 - b. Bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pupuk dan pestisida
 - Pelaksanaan KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida berupa pembinaan peredaran pupuk dan pestisida serta penyusunan laporan KP3.

4. Fasilitas Pembiayaan Pertanian
 - a. Bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian
 - Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian berupa koordinasi pelaksanaan FPPS, temu usaha pembiayaan dan monev selama 7 bulan.

2. Bidang Urusan Pangan

Capaian realisasi anggaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp. 337.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau terealisasi 100 % dengan capaian target kinerja program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi kacang hijau 100 Ha
 - a. Bantuan Benih 100 Ha
 - b. Bantuan Pupuk Hayati Cair 100 Ha
2. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
 - a. Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi kegiatan pengelolaan system penyediaan benih tanaman pangan
3. Dukungan manajemen dan tekhnis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan selama 12 bulan berupa
 - a. Layanan keuangan dan perlengkapan melalui pengelolaan perbendaharaan selama 12 bulan
 - b. Layanan evaluasi dan pelaporan melalui pengelolaan data dan informasi sebanyak 3 kali
4. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
 - a. Melaksanakan penyaluran perontok/pemipil untuk sarana pasca panen yaitu power thresher sebanyak 5 unit

- b. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan sarana pasca panen tanaman pangan .

B. OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

1. Bidang Urusan Perdagangan

Capaian realisasi anggaran Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp. 2.452.883.108,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratur Delapan Rupiah) atau terealisasi 98,12 % dengan capaian target kinerja program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan
 - Pembangunan Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pertanian	Peraturan Menteri Pertanian No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	667.480.003	606.089.800	100		100	
			Pembangunan Embung Pertanian mendukung TP	Desa Lembang Baji, Bontomalling Kec. Pastim		240.000.000	240.000.000		Tersedianya embung 2 unit		
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasana dan Sarana Pertanian			147.840.003					
			Layanan Dukungan Manajemen Satker(Base Line)			147.840.003	133.331.800		Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PSP		
			Pengelolaan Kegiatan			147.840.003					
			Honor Operasional Satuan Kerja			37.800.000	37.800.000				
			Belanja Bahan			7.240.003	7.200.000				
			Belanja Honor Output Kegiatan			2.800.000	0				
			Beban Perjalan Dinas Biasa			58.000.000	47.790.000				

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			27.000.000	26.100.000				
			Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			15.000.000	14.441.800				
			Fasilitas Pupuk dan Pestisida			279.640.000	232.758.000				
			e-RDCK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani (Base Line)			148.050.000					
			Penyusunan dan Penginputan e-RDCK mendukung Kartu Tani			148.050.000	120.050.000		Tersedianya laporan pupuk dan pestisida 1 dokumen		
			Belanja Bahan			2.000.000	2.000.000				
			Belanja Honor Output Kegiatan			100.950.000	100.950.000				
			Belanja Jasa Profesi			2.400.000	0				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			17.100.000	17.100.000				
			Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pupuk dan Pestisida (Base Line)			84.500.000					
			Pelaksanaan KP3 Mendukung Pengawasan Pupuk dan Pestisida			84.500.000	79.268.800		Tersedianya laporan KP3 1 dokumen		
			Belanja Bahan			6.000.000	5.998.800				
			Belanja Jasa Lainnya			450.000	450.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			59.000.000	57.820.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting			15.000.000	15.000.000				

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dalam daerah								
			Fasilitas Pembiayaan Pertanian			47.090.000					
			Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian (Base Line)			47.090.000					
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian			47.090.000	33.440.000		Tersedianya laporan pembiayaan pertanian laporan 1		
			Belanja Bahan			13.800.000	11.800.000				
			Honor Output Kegiatan			10.290.000	6.790.000				
			Belanja Jasa profesi			3.500.000	0				
			Beban Perjalanan Dinas Biasa			19.500.000	14.850.000				
2.	Pangan	Peraturan Menteri Pertanian No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	337.000.000	337.000.000	100	Peningkatan Produksi Kacang Hijau Seluas 100 Ha dari target luasan pertanaman kacang hijau 100 Ha	100	
			Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Kawasan Kacang Hijau			87.000.000	87.000.000				
			Penyaluran Sarana Produksi			87.000.000	87.000.000				
			Kegiatan Peningkatan Produksi Kacang Hijau			87.000.000	87.000.000				

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			87.000.000	87.000.000				
			- Bantuan Benih			67.500.000	67.500.000		Tersedianya Benih Kacang Hijau untuk luasan 100 Ha dari target luasan pertanaman kacang hijau 100 Ha	100	
			- Bantuan Pupuk Hayati Cair			19.500.000	19.500.000		Tersedianya pupuk hayati cair untuk luasan 100 Ha dari target luasan pertanaman kacang hijau 100 Ha	100	
			Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan			14.400.000	14.400.000				
			Koordinasi Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah)			14.400.000	14.400.000		Terlaksananya bimbingan dan sosialisasi kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	100	
			Belanja Bahan			1.000.000	1.000.000				
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			1.000.000	1.000.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.400.000	12.400.000				
			Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan			104.200.000	104.200.000		Terlaksananya operasional kegiatan Tugas Pembantuan Tanaman Pangan	100	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			104.200.000	104.200.000				
			Layanan Keuangan dan Perlengkapan			101.500.000	101.500.000				
			Honorarium operasional Satuan Kerja			51.000.000	51.000.000				
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			24.000.000	24.000.000				
			Belanja Jasa Profesi			1.500.000	1.500.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.000.000	15.000.000				
			Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah			10.000.000	10.000.000				
			Layanan Evaluasi dan Monitoring			2.700.000	2.700.000		Tersedianya data dan informasi / laporan statistik tanaman pangan	100	
			Pengelolaan Data dan Informasi			2.700.000	2.700.000				
			Belanja Bahan			1.500.000	1.500.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar daerah			1.200.000	1.200.000				
			Pengelolaan dan pemasaran Hasil Tanaman Pangan			131.400.000	131.400.000				
			Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan			121.000.000	121.000.000				
			Perontok/ Pemipil			121.000.000	121.000.000				
			Belanja Peralatan dan mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			121.000.000	121.000.000		Tersedianya power thresher 5 unit dari target 5 unit power thresher	100	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Koordinasi Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat)			10.400.000	10.400.000		Terlaksananya sosialisasi dan bimtek sarana pascapanen TP	100	
			Pengamanan Susut Hasil Produksi Tanaman Pangan			10.400.000	10.400.000				
			Belanja Bahan			3.400.000	3.400.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1.000.000	1.000.000				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.000.000	6.000.000				
3.	Perdagangan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Program : Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kec. Pasimasunggu Timur	Disperindagkukm Kab. Kep. Selayar	Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.452.883.108,00	98,15	1 Unit	100	
		Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Kegiatan : Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan								
		Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 ttg Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka	Output : Sarana Perdagangan yang dibangun/direvitalisasi								

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020									

3.2. TUGAS PEMBANTUAN DARI PROVINSI YANG DILAKSANAKAN

3.2.1. Target Kinerja

A. OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Bidang Urusan Pertanian

Target Kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 508.420.000,- (Lima ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Target Kinerja Program dan Kegiatan :

1. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan
 - a. Melakukan analisis ketersediaan pangan wilayah dengan cara mengumpulkan, mengelolah dan menganalisis data sehingga tersusun buku Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas -FSVA) level Desa/ Kelurahan 2020 se Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pengembangan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan melalui pendampingan pemberdayaan pekarangan pangan untuk 8 (delapan) kelompok yaitu :
 - a. KWT Benteng Pancasila Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene
 - b. KWT Dahlia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu
 - c. KWT Teratai Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu

- d. KWT Matahari Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu
 - e. KWT Mawar Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai
 - f. KWT Mekar Desa Kohala Kecamatan Buki
 - g. KWT Anggrek Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu
 - h. KWT Sayang Suami Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu
3. Dukungan manajemen dan tekhnis lainnya Badan Ketahanan Pangan yaitu dukungan manajemen dan administrasi 12 bulan.

3.2.1. Realisasi

A. OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Bidang Urusan Pertanian

Capaian realisasi anggaran sebesar 100% sebesar Rp.508.410.000,- (Lima ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) atau terealisasi 100 % dengan capaian target kinerja program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan
 - a. Melakukan analisis ketersediaan pangan wilayah dengan cara mengumpulkan, mengelolah dan menganalisis data sehingga tersusun buku Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas -FSVA) level Desa/ Kelurahan 2020 se Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan melalui pendampingan pemberdayaan pekarangan pangan untuk 8 (delapan) kelompok yaitu :
 - a. KWT Benteng Pancasila Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene
 - b. KWT Dahlia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu
 - c. KWT Teratai Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu
 - d. KWT Matahari Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu
 - e. KWT Mawar Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai
 - f. KWT Mekar Desa Kohala Kecamatan Buki
 - g. KWT Anggrek Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu
 - h. KWT Sayang Suami Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu
3. Dukungan manajemen dan tekhnis lainnya Badan Ketahanan Pangan yaitu dukungan manajemen dan administrasi 12 bulan.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Ketahanan Pangan	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 637/III/tahun 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	508.420.000	508.410.000	100	Terealisasi	100	
		Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800.08/178/III/DKPN Tahun 2020 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Anggaran dan Penetapan Besarnya Honor Terkait Dengan Operasional Kegiatan APBN (Dan Dekonsentrasi) Kabupaten/ Kota, Satker Dinas Ketahanan Pangan	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan			42.000.000	42.000.000	100			

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.									
			Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah			42.000.000	42.000.000				
			Mengumpulkan, Mengelola dan Menganalisis Data			42.000.000	42.000.000				
			Penyusunan FSVA Kabupaten Kepulauan Selayar			42.000.000	42.000.000		Tersusunnya buku FSVA Kab. Kepulauan Selayar	100	
			Belanja Bahan			2.500.000	2.500.000	100			
			Honor Output Kegiatan			21.000.000	21.000.000	100			
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			7.000.000	7.000.000	100			
			Beban Perjalanan Dinas Biasa			1.000.000	1.000.000	100			
			Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.000.000	3.000.000	100			
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			7.500.000	7.500.000	100			
			Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			445.900.000	445.900.000	100			
			Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga			445.900.000	445.900.000				
			Pendampingan Kab. Kepulauan Selayar (8 Kelompok)			445.900.000	445.900.000		Kegiatan sebanyak 8 Kelompok dari target 8 kelompok	100	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									kegiatan P2L		
			Belanja Bahan			13.500.000	13.500.000	100			
			Belanja Honor Output Kegiatan			24.000.000	24.000.000	100			
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			1.767.000	1.767.000	100			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2.233.000	2.223.000	99,55			
			Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota			14.400.000	14.400.000	100			
			Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah			390.000.000	390.000.000	100			
			Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan			20.520.000	20.520.000				
			Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			20.520.000	20.520.000				
			Manajemen dan Administrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah			20.520.000	20.520.000	100			
			Dukungan Manajemen dan Administrasi			20.520.000	20.520.000		Terlaksananya operasional kegiatan Ketahanan Pangan	100	
			Honorarium operasional Satuan Kerja			6.000.000	6.000.000	100			
			Belanja Bahan			1.500.000	1.500.000	100			
			Honor Output Kegiatan			3.000.000	3.000.000	100			

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			1.820.000	1.820.000	100			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2.200.000	2.200.000	100			
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			6.000.000	6.000.000	100			

3.3 HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. OPD Dinas Pertanian dan Ketanahan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keempatnya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Terbitnya aturan terkait penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berdampak dilakukannya rasionalisasi anggaran pada Kementerian dan Lembaga. Implementasinya di daerah diantaranya melalui rasionalisasi dana Tugas Pembantuan baik di tingkat Provinsi maupun di Kab/Kota. Revisi DIPA dilakukan beberapa kali ditengah perjalanan untuk menyesuaikan dengan pagu baru, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak Target/ Sasaran yang belum bisa dicapai.

B. OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Selama proses pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tidak ditemukan kendala yang berarti

3.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT

A. OPD Dinas Pertanian dan Ketanahan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa upaya dan tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Eselon I (Kementerian/ Lembaga) juga dengan KPPN untuk memperoleh informasi terkait perubahan alokasi DIPA. Selanjutnya perlu dilakukan perencanaan ulang kegiatan dan identifikasi capaian output kegiatan dalam rangka menyesuaikan dengan pagu baru.
- 2) Satuan Kerja harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.

B. OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Untuk kedepan perlu Pengembangan sarana pasar yang representative.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)

Penyusunan Laporan tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar ini, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan dan pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dan NKRI, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Kebudayaan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, namun demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian

Berikut adalah target capaian SPM di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 :

- A. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada pendidikan anak usia dini

Tabel 4.1
Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada
pendidikan anak usia dini

NO	INDIKATOR	ELEMEN DATA	TARGET
1.	Persentase anak usia 5 (Lima) sampai dengan 6 (Enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (Lima) sampai dengan 6 (Enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100%
		Jumlah anak usia 5 (Lima) sampai dengan 6 (Enam) tahun	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

B. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada sekolah dasar

Tabel 4.2
Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada
Sekolah Dasar

NO	INDIKATOR	ELEMEN DATA	TARGET
1.	Persentase anak usia 7 (Tujuh) sampai dengan 12 (Dua Belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Jumlah anak usia 7 (Tujuh) sampai dengan 12 (Dua Belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100%
		Jumlah anak usia 7 (Tujuh) sampai dengan 12 (Dua Belas) tahun	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

C. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama

Tabel 4.3
 Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada
 Sekolah Menengah Pertama

NO	INDIKATOR	ELEMEN DATA	TARGET
1.	Persentase anak usia 12 (Dua Belas) sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	Jumlah anak usia 12 (Dua Belas) sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	100%
		Jumlah anak usia 12 (Dua Belas) sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

D. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan kesetaraan

Tabel 4.4
 Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan kesetaraan

No	Indikator	Elemen Data	Target
1.	Persentase jumlah anak usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	jumlah anak usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
		jumlah anak usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas)	

		tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	
--	--	---	--

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

4.1.3. Realisasi

Capaian pelaksanaan penerapan SPM bidang pendidikan Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- A. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada pendidikan anak usia dini

Tabel 4.5
 Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada pendidikan anak usia dini

No	Indikator	Elemen Data	Realisasi	%	Target	Capaian
1.	Persentase anak usia 7 (Tujuh) sampai dengan 12 (Dua Belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Jumlah anak usia 7 (Tujuh) sampai dengan 12 (Dua Belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	14.610	95,14	100%	95,14
		Jumlah anak usia 7	13.900			

		(Tujuh) sampai dengan 12 (Dua Belas) tahun				
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

B. Pencapaian pemebuhan SPM pendidikan pada sekolah dasar

Tabel 4.6

Pencapaian pemebuhan SPM pendidikan pada Sekolah Dasar

No	Indikator	Elemen Data	Realisasi	%	Target	Capaian
1.	Persentase anak usia 5 (Lima) sampai dengan 6 (Enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (Lima) sampai dengan 6 (Enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	5.642	98,42	100%	98,42
		Jumlah anak usia 5 (Lima) sampai	5.553			

		dengan 6 (Enam) tahun				
--	--	-----------------------------	--	--	--	--

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

C. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada sekolah menengah pertama

Tabel 4.7

Pencapaian pemebuhan SPM pendidikan pada
 Sekolah Menengah Pertama

No	Indikator	Elemen Data	Realisasi	%	Target	Capaian
1.	Persentase anak usia 12 (Dua Belas) sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	Jumlah anak usia 12 (Dua Belas) sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	12.130	51,78	100%	51,78
		Jumlah anak usia 12 (Dua Belas) sampai dengan 15	6.282			

No	Indikator	Elemen Data	Realisasi	%	Target	Capaian
		(Lima Belas) tahun				

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

D. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan kesetaraan

Tabel 4.8

Pencapaian pemebuhan SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Indikator	Elemen Data	Realisasi	%	Target	Capaian
1.	Persentase jumlah anak usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	jumlah anak usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	530	93,96	100%	93,96
		jumlah anak usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	498			

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

4.1.4. Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan selama tahun 2020 (sampai dengan bulan Desember) telah dialokasikan dana sebesar Rp. 72.078.044.499,-

dengan realisasi sebesar Rp. 71.914.830.775, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2020

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	Sisa
2020 s.d Bulan Desember	72.078.044.499,-	71.914.830.775,-	163.213.724,-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 41 orang dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.10

jumlah personil pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktur	Pejabat Fungsional
1	41	S2 : 5 orang S1 : 24 orang D3 : 2 orang D2 : 1 orang SMA : 7 orang SMP : 3 orang	Gol I : 2 orang Gol II : 8 orang Gol III : 24 orang Gol IV : 8 orang	Esl.II : 1 Esl.III : 6 Esl.IV : 18 orang	orang

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
2. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1;
3. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
4. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih perlu diupayakan standar Nasional;
5. Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan metode penghitungan, baru mencapai angka 12,40 Tahun sebagai indikasi penuntasan wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun.

Solusi

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
2. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
3. Melalui pemerataan di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru;
4. Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB;
5. Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah.

4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)

Sebagai kebutuhan dasar setiap manusia, pembangunan di bidang kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tapi juga Pemerintah Daerah. Namun demikian mengingat kebutuhan kesehatan yang vital, unik dan kompleks, serta perbedaan kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia, maka peran pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). Salah satu prinsipnya adalah SPM merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk pelaksanaan SPM tersebut, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota. Permenkes ini sudah mengakomodir konsep baru SPM sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsep SPM yang baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan

maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan dan kinerja Pemerintah Daerah.

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi
 - a) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ berpotensi bencana provinsi
 - b) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa
2. Pemerintah kabupaten
 - a) Pelayanan kesehatan ibu hamil
 - b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - d) Pelayanan kesehatan balita
 - e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - i) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
 - j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 - k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
 - l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal untuk urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11
 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (INDIKATOR SPM)	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100 %

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2021

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM tahun 2020 Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.12

Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (INDIKATOR SPM)	STRUKTUR PENCAPAIAN	TARGET SPM 2020(%)	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah Bumil mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten}} \times 100\%$ $\text{Capaian Kinerja} = \frac{2411}{2984} \times 100\%$</p>	100 %	81 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah Bulin mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$ $\text{Capaian Kinerja} = \frac{2139}{2848} \times 100\%$</p>	100 %	75 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah Bayi baru Lahir mendapatkan layanan sesuai}}$</p>	100 %	79 %

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (INDIKATOR SPM)	STRUKTUR PENCAPAIAN	TARGET SPM 2020(%)	CAPAIAN (%)
		<p><u>standar</u></p> <hr/> <p>x100 % Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten</p> <p style="text-align: right;">2149</p> <p>Capaian Kinerja = $\frac{\text{---}}{\text{---}}$ x100%</p> <p style="text-align: right;">2713</p>		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	<p>Rumus : <u>Jumlah Balita mendapatkan layanan kesehatan</u></p> <hr/> <p>x100 % Jumlah Balita di Kabupaten</p> <p style="text-align: right;">6758</p> <p>Capaian Kinerja = $\frac{\text{---}}{\text{---}}$ x100%</p> <p style="text-align: right;">10714</p>	100 %	63 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	<p>Rumus : <u>Jumlah Anak usia pendidikan dasar mendapatkan layanan sesuai standar</u></p> <hr/> <p>x100 % Jumlah Anak Usia Dasar di Kabupaten</p> <p style="text-align: right;">2588</p> <p>Capaian Kinerja = $\frac{\text{---}}{\text{---}}$ x100%</p> <p style="text-align: right;">3980</p>	100 %	76 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada	<p>Rumus : <u>Jumlah orang usia 15 - 59 tahun</u></p>	100 %	93 %

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (INDIKATOR SPM)	STRUKTUR PENCAPAIAN	TARGET SPM 2020(%)	CAPAIAN (%)
	Usia Produktif	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar x100 % Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di Kabupaten 69666 Capaian Kinerja = $\frac{\quad}{74912} \times 100\%$		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Rumus : Jumlah Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar x100 % Jumlah Warga Negara usia 60 tahun di Kabupaten 9739 Capaian Kinerja = $\frac{\quad}{12917} \times 100\%$	100 %	75 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rumus : Jumlah Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar x100 % Jumlah Penderita Hipertensi di Kabupaten 22416 Capaian Kinerja = $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	100 %	93 %

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (INDIKATOR SPM)	STRUKTUR PENCAPAIAN	TARGET SPM 2020(%)	CAPAIAN (%)
		29760		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Penderita DM di Kabupaten}} \times 100 \%$ $\text{Capaian Kinerja} = \frac{1910}{2078} \times 100\%$</p>	100 %	92 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	<p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{\text{Jumlah ODGJ Berat di Kabupaten}} \times 100 \%$ $\text{Capaian Kinerja} = \frac{186}{186} \times 100\%$</p>	100 %	100 %
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	<p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah Orang Terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar}}{\text{Jumlah Orang Terduga TB di Kabupaten}} \times 100 \%$</p>	100 %	100 %

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (INDIKATOR SPM)	STRUKTUR PENCAPAIAN	TARGET SPM 2020(%)	CAPAIAN (%)
		Kabupaten 632 Capaian Kinerja = $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ 632		
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rumus : $\frac{\text{Jumlah Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah Orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten}} \times 100 \%$ $\frac{1980}{2130} \times 100\%$	100 %	93 %

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2021

4.2.4. Alokasi Anggaran

Dalam pengalokasian anggaran Dinas Kesehatan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum dialokasikan secara khusus, namun Dinas Kesehatan dalam mengalokasikan anggaran terkait SPM didasarkan pada anggaran kegiatan yang berhubungan dengan tiap item indikator kinerja SPM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.13
Alokasi Anggaran SPM Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (INDIKATOR SPM)	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 1.887.221.392,-
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 1.778.069.554,-

3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 1.778.069.554,-
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 1.282.288.256,-
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 1.282.288.256,-
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Rp. 1.282.288.256,-
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Rp. 1.282.288.256,-
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 1.505.956.169,-
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp. 1.505.956.169,-
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	Rp. 1.282.288.256,-
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Rp. 1.505.956.169,-
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp. 1.505.956.169,-

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2021

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 209 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 62 orang dan PTT sebanyak 147 orang.

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

1. Baru diusulkannya Perbup terkait SPM Bidang Kesehatan sehingga belum ada standarisasi capaian kabupaten yang ditetapkan dalam perbup sehingga penentuan sasaran capaian, masih menggunakan proyeksi sasaran dari Kementerian Kesehatan yang relative cukup tinggi.
2. Belum adanya alokasi sumber daya secara khusus untuk implementasi SPM Bidang Kesehatan, namun dukungan

pengalokasian sumber daya ditujukan pada program kesehatan secara keseluruhan.

3. Keterlambatan pemasukan laporan capaian SPM dari UPT di wilayah kepulauan.

b. Solusi

1. Perlu adanya Perbup tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2. Pengalokasian anggaran khusus terkait Implementasi SPM Bidang Kesehatan
3. Koordinasi pemasukan laporan SPM dengan UPT Puskesmas selaku garda terdepan dalam pelayanan

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG (DINAS PUPR)

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b) Penyediaan pengolahan air limbah domestik

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Tabel 4.14
 Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Urusan PUPR

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai	
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2021
2.	Penyediaan pelayanan	Jumlah warga negara yang	100	2021

NO	Jenis	Standar Pelayanan Minimal	Batas
	pengolahan air limbah domestik	memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	

Sumber : Dinas PUPR tahun 2021

4.3.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM tahun 2020, urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.15

Realisasi Pencapaian SPM Urusan PUPR Tahun 2020

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		
		Indikator	Nilai	Realisasi
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	48.3-%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	39.62%

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2021

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Indikator : Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari

(Tersedianya Akses Air Minum yang Aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 Liter/Orang/Hari)

Rumus :

$$\frac{\sum \text{Masyarakat yang memiliki Akses Air Minum yang Aman}}{\sum \text{Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota pada Akhir Tahun Pencapaian SPM}}$$

$$\frac{71.593 \text{ jiwa}}{148.238 \text{ jiwa}} = 48.30 \%$$

Tabel 4.16
Pencapaian SPM Air Tahun 2016-2020

TAHUN	JUMLAH MASYARAKAT YANG MEMILIKI AKSES AIR MINUM YANG AMAN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK KAB./KOTA PADA AKHIR TAHUN PENCAPAIAN SPM	PENCAPAIAN SPM AIR MINUM RUMUS : (Σ (2) / Σ (3) X 100%)	SUMBER DATA
	(JIWA)	(JIWA)		
1	2	3	4	6
2016	54,978	148,238	37.09	Cipta Karya
2017	56,769	148,238	38.30	Cipta Karya
2018	63,637	148,238	42.93	Cipta Karya
2019	67,837	148,238	45.76	Cipta Karya
2020	71,593	148,238	48.30	Cipta Karya

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2021

2. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Indikator : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

(Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD)

Rumus :

Σ Rumah yang memiliki sambungan rumah & air limbahnya dikelola IPALD

Σ Jumlah Rumah di Wilayah Pengembangan SPALD pada Akhir Tahun Pencapaian SPM

$$\frac{1.981 \text{ RT}}{5.000 \text{ RT}} = 39.62 \%$$

Tabel 4.17
Pencapaian SPM Air Limbah

TAHUN	JUMLAH RT YANG MEMILIKI TERHADAP SPALD	PROYEKSI JUMLAH RT PADA AKHIR TAHUN PENCAPAIAN SPM	PENCAPAIAN SPM AIR LIMBAH RUMUS : $(\sum (2) / \sum (3) \times 100\%)$	SUMBER DATA
	RT	RT		
1	2	3	8	6
2016	-	5,000	0.00	Cipta Karya
2017	450	5,000	9.00	Cipta Karya
2018	650	5,000	13.00	Cipta Karya
2019	1,300	5,000	26.00	Cipta Karya
2020	1,981	5,000	39.62	Cipta Karya

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2021

4.3.4. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki anggaran yang mendukung pencapaian Standar pelayanan Minimal yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar. Anggaran tersebut sebesar Rp. 13.385.416.985,- dan terealisasi sebanyak Rp. 11.854.203.965,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.18

Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Urusan PUPR Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	4.922.086.885	3.716.765.785	75,71
	- Pendampingan Program PAMSIMAS	344.410.000	295.299.939	85,74
	- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih (DAK)	549.708.800	444.822.250	80,92
	- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	2.208.530.000	1.564.006.511	70,82
	- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih (Lanjutan)	245.472.835	222.670.485	90,71
	- Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Pemasangan Sambungan Jaringan Air Bersih Ke Rumah	1.524.508.000	1.140.509.350	74,81
	- Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Pemasangan Sambungan Jaringan Air Bersih Ke Rumah (Lanjutan)	49.457.250	49.457.250	100
2	Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Air Limbah	8.463.330.100	8.137.438.180	96,15
	- Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah (DAK)	3.585.787.650	3.574.200.000	99,68
	- Pembangunan Sal.Drainase	4.763.400.000	4.449.096.630	93,40
	- Pembangunan Saluran Drainase (Lanjutan)	114.142.450	114.141.550	100

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2021

4.3.5. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar di dukung oleh sumber daya. Penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kepulauan Selayar sampai akhir bulan Desember 2020 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 57 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 106 orang Pegawai Non PNS dan 1 orang Pegawai Honorer.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sukarela di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Luar Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 165 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.19
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	1	S2	Pembina Utama Muda, IV/c
2	1	S2	Pembina Tk. I, IV/b
3	4	S1	Pembina, IV/a
4	2	S2	Penata Tk. I, III/d
	6	S1	
	1	SLTA	
5	1	S2	Penata, III/c
	3	S1	
6	6	S1	Penata Muda Tk.I, III/b
	1	SLTA	
7	13	S1	Penata Muda, III/a
	1	D3	
8	9	SLTA	Pengatur Tk. I, II/d
9	2	D3	Pengatur, II/c
	1	SLTA	
	1	PAKET C	
10	2	SLTA	Pengatur Muda Tk.I, II/b
	1	SMK	
11	1	PAKET C	Pengatur Muda, II/a

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2021

Tabel 4.20
Jumlah Pegawai Non PNS
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Jumlah Pegawai Non PNS	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan
1	42	S1	
2	6	D3	
3	58	SMA	

Tabel 4.21
Jumlah Tenaga Sukarela
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Jumlah Pegawai Non PNS	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan
1	1	SMA	

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2021

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

1. Terbatasnya anggaran pada tiap indikator menyebabkan target-target yang ditetapkan belum tercapai,
2. Untuk kegiatan SPAM (Sistem Penyedia Air Minum) yang dibangun dengan belanja modal, belum/tidak tersedia anggaran pemeliharaannya.
3. Sinergi yang belum maksimal antara seluruh stakeholder pengelola pelayanan dasar sanitasi dan air minum (perangkat daerah, BUMD, kementerian terkait dan kelompok pengelola).
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait pengelolaan sanitasi dan air minum.

B. Solusi

1. Diperlukan alokasi dana yang memprioritaskan terlaksananya program-program/ indikator SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Anggaran pemeliharaan diperlukan untuk menjaga nilai guna sarana prasarana air bersih dan sanitasi.
3. Membangun sinergi dengan arah, tujuan dan keinginan serta perilaku yang nyata dalam meningkatkan pelayanan dasar bidang sanitasi dan air minum.
4. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pelatihan formal maupun nonformal.

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT (DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN)

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Secara umum bahwa Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat penting dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun. Meskipun Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM, Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jenis Pelayanan Dasar pada bidang Perumahan Rakyat ada dua yaitu :

1. **Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota.**

Layanan ini merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten, dengan ketentuan:

- a. Pada saat masa pasca bencana;
- b. Surat penetapan bencana dari Bupati;
- c. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Merupakan jenis layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

- a. Pengurangan kawasan kumuh 5 – 10 Ha; dan/atau
- b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukit fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Target dan capaian SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22
 Target Pencapaian SPM bidang Perumahan dan
 Kawasan Permukiman Tahun 2020

No	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS CAPAIAN
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program	100 %	Setiap Tahun

masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/Kota	pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.		
---	---	--	--

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

4.4.3. Realisasi

Realisasi Capaian SPM bidang Perumahan pada RPJMD 2016-2020, masih menggunakan penerapan SPM sesuai Permen No. 22/Permen/M/2008, dimana Jenis Layanan yaitu Rumah Layak huni yg terjangkau dan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.

Namun pada Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM sesuai Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018.

Tabel 4.23

Realisasi Capaian SPM bidang Perumahan Tahun 2020

No	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2020	KET
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100% (No Variable)	Ada Bencana angin kencang/puting beliung dan telah mendapatkan bantuan tanggap darurat bencana. namun Kegiatan yang terlaksana adalah Pendataan/survey penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana

2.	Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100 %	100% (No variable)	Belum ada rumah korban relokasi program pemerintah kabupaten, namun kegiatan pendataan penyediaan rehabilitasi rumah yang berpotensi terkena program pemerintah tetap terlaksana
----	---	--	-------	--------------------	--

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan Layanan Dasar Wajib Bidang Perumahan pada Tahun 2020 adalah sebesar : Rp. 185.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar RP. 39.336.460,-

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 27 orang yang terdiri dari :

- a. Pejabat Struktural : - Eselon II : 1 Orang
 - Eselon III : 4 Orang
 - Eselon IV : 11 Orang
- b. Pejabat Fungsional tertentu : -
- c. Pejabat Fungsional Umum : 1 Orang
- d. Kualifikasi Pendidikan
 - Strata 3 : 1 Orang
 - Strata 2 : -
 - Strata 1 : 20 Orang
 - D3 : -
 - SMA : 5 Orang
 - SMP : -
 - SD : -
- e. Golongan

- Golongan IV : 4 Orang
- Golongan III : 18 Orang
- Golongan II : 5 Orang
- Golongan I : -

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN :

- a) Belum adanya pelatihan – pelatihan teknis terkait penerapan SPM bidang perumahan, antara lain : pelatihan tim satgas bencana, Pelatihan fasilitator pendamping, Pelatihan identifikasi rumah korban bencana, pelatihan metode pengumpulan data dan pengolahan data, Pelatihan Penyusunan Laporan pelaksanaan SPM bidang perumahan, metode perhitungan Capaian SPM, dll.
- b) Belum maksimalnya koordinasi antar perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal atau OPD yang terkait.
- c) Kurangnya SDM yang terlatih dan memahami penerapan dan pelaksanaan secara teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan.
- d) Terbatasnya anggaran prioritas untuk Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan.
- e) Kurangnya/Tidak adanya lahan untuk relokasi korban bencana atau relokasi program pemerintah kabupaten/kota.
- f) Belum adanya sarana dan Prasarana terkait Layanan dasar di bidang Perumahan

SOLUSI :

- a) Perlu adanya Pelatihan – pelatihan teknis
- b) Memaksimalkan koordinasi antar OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal atau OPD yang terkait.
- c) Perlu peningkatan sumber daya manusia sehingga dalam penerapan dan pelaksanaan SPM dapat maksimal.
- d) Menambah/memprioritaskan anggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan.
- e) Perlu adanya pembebasan Lahan dari pemerintah daerah

- f) Perlu ada bantuan/penganggaran sarana dan prasarana terkait layanan dasar.

4.5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

4.5.1. Jenis Pelayanan dasar

Dengan semakin berkembangnya dinamika ekonomi, politik, sosial dan budaya di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, maka potensiterjadinya gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat, dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kepulauan Selayar bertanggungjawab melaksanakan Pelayanan Dasar meliputi :

A. Pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman umum, ketentraman Masyarakat dan Perlindungan

Masyarakat

- 1) Standar Operasional Prosedur;
 - 2) Standar Sarana Prasarana;
 - 3) Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpolpp dan anggota perlindungan masyarakat;
 - 4) Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara.
- ##### **B. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran**
- 1) Pelayanan kerugian materil

2) Pelayanan pengobatan

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tabel 4.24

Target Pencapaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian SPM (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
I.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	2020	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
II.	Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	2020	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sumber : Satuan PolPP Damkar Tahun 2021

4.5.3. Realisasi

Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan dan menyusun Pelayanan Dasar, Indikator, Nilai SPM dan target pencapaian di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.25
Capaian Target SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Target	Relalisasi/ Capaian	Keterangan
I.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100%	Tidak ada Korban Warga Negara yg terdampak akibat penegakan Hukum perda/Perkada
II.	Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	91,10%	

Sumber : Satuan PolPP Damkar Tahun 2021

Dari data di atas, pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2020 adalah:

1. Capaian SPM Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Tahun 2020 adalah **91,10 % (sembilan puluh satu koma satu persen)**.
2. Layanan penunjang berupa penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) **tidak ada**.

4.5.4. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui APBD dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok mengalokasikan anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, adapun kegiatan tersebut antara lain :

- 1) Tindak Lanjut atas pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan indikasi gangguan keamanan dan ketertiban;
- 2) Patroli Wilayah untuk menjaga kondisi wilayah yang aman dan tertib;
- 3) Pengawasan dan Pengamanan insidental untuk kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
- 4) Penertiban Pelanggaran Perda/Perkada
- 5) Penindakan Pelanggaran Perda/Perkada
- 6) Pengawasan Perda/Perkada serta Pengawasan Cukai Rokok
- 7) Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan pada APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.26

Besaran Anggaran dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2020

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4
I.	Program Pelayanan Administarasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.000.000
		2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000
		3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	294.902.813
		4. Pelaksanaan Penunjang administrasi perkantoran	4.372.000.000
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan gedung kantor	0 (Anngaran dialihkan ke penanganan Covid-19)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4
		2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	27.220.000
		3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.000.000
		4. Pengadaan Mebeleur	25.000.000
		5. Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor	10.000.000
		6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/Operasional	193.227.820
		7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.000.000
		8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebaran	64.600.000
		9. Pengadaan Sarana Penunjang Operasional Pemadam Kebakaran	30.000.000
		10. Pengadaan Tabung Apar Pemadam Kebakaran	0(Anngaran dialihkan ke penanganan Covid-19)
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pembinaan Tertib Pemerintahan,Pengawasan PNS,Non PNS dan Lingkungan Sosial	27.000.000
		2. Penunjang Operasional Penegakan Tindak Disiplin Internal Satuan Polisi Pamong Praja	17.000.000
		3. Pengadaan Pakaian Operasional Pemadam Kebakaran (Baju Anti Api)	50.000.000
IV	Proram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	0(Anngaran dialihkan ke penanganan Covid-19)
V	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.000.000
		2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000
		3. Penyusunan Renja SKPD	5.000.000
		4. Penyusunan Laporan Hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)	6.000.000

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4
VI	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Penanganan dan Penertiban Hewan Ternak	35.000.000
		2. Pengamanan Aset Vital Pemerintah Daerah	18.000.000
		3. Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan Pejabat	50.000.000
		4. Penyediaan Insentif Petugas Jaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000
		5. Penyelenggaraan HUT POL PP, LINMAS dan DAMKAR	100.000.000
		6. Peringatan HUT DAMKAR	50.000.000
VII	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	1. Patroli Terpadu Ketentraman dan Ketertiban Umum Antara Satpol PP, TNI dan POLRI	30.000.000
VIII	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan Ketertiban Umum	1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	61.650.000
IX	Program Pemberantasan Peredaran Cukai Rokok Illegal	1. Penegakan Hukum Larangan Merokok di Tempat-Tempat Tertentu	100.000.000
		2. Penyusunan Laporan Hasil Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Penegakan Hukum Larangan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok	24.400.000
		3. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran/Pendataan dan Penertiban Rokok Tanpa Cukai	49.445.000
X	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	1. Penunjang Operasional Sekretariat PPNSD	32.564.000
		2. Penertiban Pelanggaran Hukum terhadap Ketentuan Pidana Perda dan Peraturan Kepala Daerah	16.245.400
		3. Pemberdayaan dan Operasional Intel	13.000.000

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4
		4. Operasional Penyidikan Pelanggaran Perda oleh PPNS	20.000.000
XI	Program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Kebakaran	1. Penyuluhan Pencegahan Kebakaran (Penyuluhan Masyarakat tentang Proteksi Dini Kebakaran)	30.000.000
		2. Pemberdayaan Tim Relawan	25.000.000
		3. Pengawasan dan Monitoring Pencegahan dan Peralatan Proteksi Kebakaran	20.000.000
XII	Program Penanggulangan Kebakaran	1. Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran	194.000.000
		2. Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	42.505.000
		3. Penunjang Operasional Posko Pemadam Kebakaran (Posko Pengendalian dan Pemadam Kebakaran)	214.000.000
		4. Peningkatan Investigasi dan Pemadaman Pasca Kebakaran	69.425.800
		5. Pemberdayaan Tim Redaksi Cepat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	15.186.800
JUMLAH			6.509.372.633

Sumber : Satuan PolPP Damkar Tahun 2021

Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Pemadam Kebakaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2020 sangat terbatas dibanding dengan kebutuhan operasional di lapangan. Namun pelayanan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemadam Kebakaran terus diupayakan secara optimal dengan memperhatikan tingkat keseriusan gangguan yang terjadi. Alokasi anggaran dalam rangkaian pencapaian SPM Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Pemadam Kebakaran akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga sesuai dengan target yang direncanakan.

4.5.5. Dukungan Personil

Adapun dukungan personil/ pegawai aktif pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kepulauan Selayar berjumlah 515 Orang terdiri dari :

Tabel 4.27
 Jumlah Personil Aktif Satpol.PP dan Damkar Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2020

TAHUN 2019	JUMLAH
PNS	52 Orang
NON PNS	463 Orang
JUMLAH	515 Orang

Sumber : Satuan PolPP Damkar Tahun 2021

Tabel 4.28
 Personil Satpol.PP dan Damkar Kab. Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH	
	PNS	NON PNS
SARJANA (S1)	21	27
PASCA SARJANA (S2)	4	
DOKTOR (S3)		
DIPLOMA IV		
DIPLOMA III		4
DIPLOMA II		2
SLTA	25	401
SLTP		9
SD		
Paket B		1
Paket C	2	19
JUMLAH KESELURUHAN	52	463

Sumber : Satuan PolPP Damkar Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa Jumlah Personil Organik (PNS) Sangat Kurang dibandingkan Jumlah Personil Non Organik (NON PNS) dan didominasi Personil dengan tingkat Pendidikan SLTA sebesar 82,72%, Sarjana (S1) sebesar 9,32% dan

Sarjana (S2) sebesar 0,77 % sedangkan sisanya adalah DIII, DII dan Pascasarjana sebesar 6,79%.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2019 antara lain :

1. Terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Solusi : Mengikutsertakan Personil Satpol.PP mengikuti Diklat Penyidik guna mengoptimalkan fungsi penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda dan perkara;
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
Solusi : Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung terutama alat pemadam kebakaran;
3. Terbatasnya Anggaran Operasional Penegakan Perda dan Pemadam Kebakaran
Solusi : Mengusulkan Penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.5.7. Jenis Pelayanan dasar

Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana yang di selenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018 ada tiga jenis. Pelayanan Dasar tersebut meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana

4.5.8. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari beberapa Pelayanan Dasar dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar tersebut salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar bertanggung jawab akan Pelayanan Dasar yaitu pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (pasca bencana) dengan 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dari tiga jenis layanan dasar yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana telah menetapkan target pencapaian SPM yang dalam Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Untuk lebih jelasnya target pencapaian sesuai RPJMD digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.29

Target Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target RPJMD						Target SPM (%)
			2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan Bencana	50	75	80	90	100	100	100

2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	50	75	80	90	100	100	100
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	0	0	0	0	100

Sumber : BPBD Tahun 2021

4.5.9. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM tahun 2020, urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.30
 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Jenis Pelayanan	Struktur Pencapaian	Target RPJMD 2020 (%)	Target SPM 2021 (%)	Capaian (%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan Bencana $\frac{133.003}{140} \times 100 \%$	0,001	100	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana $\frac{133.003}{89.197} \times 100\%$	0,67	100	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana $\frac{133.033}{270} \times 100 \%$	0,002	100	100

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021

4.5.10. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digambarkan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan jenis pelayanan dasar Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 964.095.144 dengan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 841.719.552 atau 87 persen.

4.5.11. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 20 orang dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.31

Kualifikasi Pendidikan Personil SPM BPBD Tahun 2020

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata Dua (S2)	2
2.	Strata Satu (S1)	12
3.	Diploma Tiga (D3)	1
4.	SLTA	5
5.	SLTP	-
Jumlah		20

Sumber : BPBD tahun 2021

Tabel 4.32

Kualifikasi Pangkat dan Golongan Personil SPM BPBD Tahun 2020

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	-
3.	Pembina	IV/a	2

4.	Penata Tk.I	III/d	4
5.	Penata	III/c	6
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	2
7.	Penata Muda	III/a	1
8.	Pengatur Tk.I	II/d	2
9.	Pengatur	II/c	-
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
11.	Juru Tingkat I	I/d	-
Jumlah			20

Sumber : BPBD tahun 2021

4.5.12. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah kurangnya SDM yang terlatih dalam Penanganan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Solusi diperlukan mengajukan bantuan dana yang bersumber dari APBD/APBN untuk pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM terkait dengan tiga jenis pelayanan dasar khususnya pelayanan informasi Rawan Bencana.

Program dan kegiatan serta pendanaan merupakan langkah nyata dari tindak lanjut permasalahan yang dihadapi sehingga presentase Standar Pelayanan Minimal dapat ditingkatkan dari berbagai masalah yang dihadapi pemecahannya yaitu pada kualitas, pegawai, sarana dan Prasarana serta pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi berikut ini merupakan Program dan Kegiatan yang diperlukan :

1. Sosialisasi Penerapan SPM;
2. Pelatihan bagi Anggota / Staf dalam Penanggulangan Bencana;

3. Pemetaan Daerah Rawan Bencana, pada 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
5. Pembuatan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana;
6. Pengkajian Resiko Bencana;
7. Pelatihan Relawan Bencana.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL (DINAS SOSIAL)

4.6.1. Jenis Pelayanan dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. target pencapaian standar pelayanan minimal oleh daerah adalah :

Tabel 4.33

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL

NO	JENIS LAYANAN DASA	INDOKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET
1	Program Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
2	Program Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
3	Program Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
4	Program Rehabilitasi Sosial dasar tuna susila khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase penduduk/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %
5	Program perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan	100 %

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2021

4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM tahun 2020 Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.34
Capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Jenis Pelayanan (Indikator SPM)	Struktur Pencapaian	Target SPM 2020 (%)	Capaian (%)
1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100$ <p>158 832 X 100 %</p>	100 %	18,99 %
2	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Anak terlantar Yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100$ <p>119 372 X 100 %</p>	100 %	31,99 %
3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah lanjut usia terlantar Yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100$	100 %	17,35 %

		$\frac{700}{4033} \times 100 \%$		
4	Persentase penduduk/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	<p>Jumlah Gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun</p> $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \%$ <p>Jumlah gelandangan dan pengemis Yang seharusnya memperoleh bantuan sosial</p> $\frac{1}{4} \times 100 \%$	100 %	25 %
5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan	<p>Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</p> $\frac{\quad}{\quad} \times 100 \%$ <p>Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</p> $\frac{32}{32} \times 100 \%$	100 %	100 %

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2021

4.6.4. Alokasi Anggaran

Sebagai salah satu unsur pendukung yang memegang peranan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, maka keberadaan sumber pendanaan mutlak diperlukan. Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2020 Mendapat alokasi dana melalui APBD dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan : Rp. 0,-
- b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.310.400.000,-
- c. Belanja Langsung : Rp. 5.893.003.302,-
- d. Total Belanja : Rp. 8.203.403.302,-

4.6.5. Dukungan Personil

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2020 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 76 (Tujuh Puluh Empat) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang, PTT sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) orang dan Tenaga Pendamping sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, dengan mengklarifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. Pejabat Struktural sebanyak 16 (Enam Belas) Orang, terdiri dari:
 - Eselon II : 1 Orang
 - Eselon III : 4 Orang
 - Eselon IV : 11 Orang
- b. Pegawai Negeri Sipil Sebanyak 9 (Sembilan) Orang
- c. Pegawai Tidak Tetap sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) Orang
- d. Tenaga Pendamping sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) Orang
 - Pendamping Disabilitas : 1 (Satu) Orang
 - Pendamping Anak : 4 (Empat) Orang
 - Pendamping Lansia : -
 - Taruna Siaga Bencana : 22 (Dua Puluh Dua) Orang

Berdasarkan Golongan/Ruang pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :

- a. Golongan IV : 4 (Empat) Orang
- b. Golongan III : 15 (Lima Belas) Orang
- c. Golongan II : 6 (Enam) Orang

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya Kualitas dan Kuantitas tenaga pendamping, khususnya tenaga pendamping di lapangan sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan.
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai, masih perlu penambahan Komputer, Laptop, printer dan penambahan ruangan Kantor serta pengadaan Operasional roda 4 dan roda 2 untuk penanggulangan bencana.
3. Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam penerapan SPM

Solusi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Diusulkan penambahan pegawai khususnya pekerja sosial (Tenaga Pendamping) ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana untuk anggaran Tahun 2021 yang akan datang.
3. Mengharapkan kucuran bantuan dana pembangunan yang lebih banyak dari Pemerintah Tk II Pemerintah Tk I dan Pemerintah Pusat

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
2. Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran
3. Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

4. Pelaksanaan Penunjang Operasional UPT museum/SKB Daratan dan Kepulauan
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan peralatan gedung kantor
 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 5. Pendataan dan Pengelolaan Aset Sekolah
 6. Peningkatan Maintenance Aplikasi Website dan Server Data Dikbud
- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Sosialisasi Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- D. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 1. Penyusunan/Pembuatan RKA dan DPA Pokok dan Perubahan
 2. Penyusunan Program dan Perencanaan
 3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
 4. Penyusunan Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
 5. Penyusunan Laporan Standar Operasional Prosedur Bidang Pendidikan
- E. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 1. Pelatihan Guru PAUD
 2. Pengadaan Ijazah TK
 3. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD
 4. Penyelesaian TK Negeri I Bontosikuyu
 5. Pembangunan Pagar TK
 6. Pelaksanaan DAK Bidang PAUD
 7. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah

- F. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - 1. Pendataan WBTB
- G. Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - 1. Pelaksanaan DAK SD
 - 2. Pelaksanaan DAK SMP
 - 3. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah
 - 4. Rehabilitasi Perumahan Guru (Lanjutan)
 - 5. Penyelesaian Pembangunan RKB (Lanjutan)
 - 6. Pembangunan Pagar SD
 - 7. Pembangunan Lanjutan Perpustakaan UPT SDN 126 Kepulauan Selayar
 - 8. Pengadaan Komputer UNBK SMP
 - 9. Pembangunan Pagar SMP 11 Kep. Selayar
 - 10. Penataan Halaman SMP 46 Kep. Selayar
 - 11. Penataan Halaman SDN No. 32 Desa Majapahit
- H. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - 1. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya
 - 2. Biaya Penunjang DAK Non Fisik
- I. Program Pendidikan Non Formal
 - 1. Pelaksanaan DAK SKB
 - 2. Satuan Pendidikan Non Formal SKB Daratan dan Kepulauan
 - 3. Penunjang Operasional Ujian Nasional Paket A, B, dan C
- J. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- K. Program Peningkatan Kompetensi SDM Tenaga Budaya
- L. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - 1. Penunjang Operasional Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah
 - 2. Visualisasi Media Elektronik Pelaksanaan Kegiatan Dikbud
- M. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Pendidik

1. Pemeriksaan Angka Kredit Tenaga Fungsional Guru, Pengawas dan Pamong Belajar

N. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

1. Penyediaan Bahan Ajar Kurikulum Budaya Lokal

2. BIDANG URUSAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS KESEHATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.35
Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Dinas Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak	Program Pelayanan Kesehatan Ibu	Monitoring dan Evaluasi Program Kesga dan Gizi
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak	Program Pelayanan Kesehatan Ibu	Monitoring dan Evaluasi Program Kesga dan Gizi
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak	Program Pelayanan Kesehatan Ibu	Monitoring dan Evaluasi Program Kesga dan Gizi
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak	Program Pelayanan Kesehatan Ibu	Monitoring dan Evaluasi Program Kesga dan Gizi
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan pada Usia Pendidikan dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penjaringan Anak Sekolah

6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan pada Usia Produktif	Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Posbindu
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Usila	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Posbindu
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Penanganan Penderita Hipertensi	Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Posbindu
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Penanganan Penderita DM	Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Posbindu
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	Cakupan Penemuan dan Penanganan ODGJ	Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelatihan Tenaga Kesehatan Jiwa
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TB	Program Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan Penyakit TB
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita HIV	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	Pengendalian Penyakit HIV

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2021

3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Minum terdiri atas 6 (enam) kegiatan, yaitu:

a. Pendampingan Program PAMSIMAS

Tujuan dari kegiatan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah untuk

meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota. Kegiatan pendampingan ini teranggarkan sebanyak Rp. 344.410.000,- dengan jumlah yang terealisasi sebanyak 295.299.939. Terlaksananya kegiatan program PAMSIMAS di 1 desa yaitu Desa Lantibongan dengan realisasi 1 unit PMA, 5600 pipa (m), 33 Reservoir (m³).

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)

Pada tahun 2020, kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp.549.7908.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 444.822.250,-. Dari kegiatan ini, sarana dan prasarana air bersih dapat dinikmati oleh 52 jiwa.

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAU)

Pada tahun 2020, kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp.2.208.530.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.564.006.511,-

d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Lanjutan)

Pada tahun 2020 anggaran retensi (jaminan pemeliharaan) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih sebanyak Rp.245.472.835,- dengan realisasi sebanyak Rp.222.670.485,- dengan jumlah paket 25 paket.

e. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Pemasangan Sambungan Jaringan Air Bersih ke Rumah

Pembangunan sarana air bersih dan pemasangan sambungan jaringan air bersih ke rumah merupakan program hibah air minum perdesaan yang juga program prioritas Pada tahun 2020 dianggarkan Rp. 1.524.508.000,- dengan realisasi sebanyak Rp. 1.140.509.350,- dengan realisasi pemasangan sambungan rumah sebanyak 489 SR (Sambungan Rumah) atau 1.956 jiwa terlayani air minum layak.

f. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Pemasangan Sambungan Jaringan Air Bersih ke Rumah (lanjutan)

Pada tahun 2020, kegiatan retensi (jaminan pemeliharaan) kegiatan ini teranggarkan sebanyak Rp. 49.457.250,- dengan jumlah realisasi sebanyak Rp.49.457.250,- yang terdiri dari 5 paket.

2. Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Air Limbah

Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Air Limbah terdiri atas 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)

Pada tahun 2020, kegiatan ini memiliki anggaran sebanyak Rp.3.585.787.650,- dan terealisasi sebanyak Rp. 3.574.200.000,- dengan Jumlah KK yang terlayani sanitasi layak adalah 681 KK.

b. Pembangunan Saluran Drainase

Pada tahun 2020, kegiatan ini memiliki anggaran sebanyak Rp. 4.763.400.000,- dan terealisasi Rp. 4.449.096.630,- dengan panjang drainase yang terbangun 5657 m.

c. Pembangunan Saluran Drainase (lanjutan)

Tahun 2020 dianggarkan 22 paket untuk retensi (jaminan pemeliharaan) dengan anggaran sebesar Rp. 114.142.450,- dengan realisasi sebanyak Rp. 114.142.450,- dengan jumlah paket 22 paket.

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 4.36
Target Kinerja dan Anggaran Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Air Limbah

NO	URAIAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
A.	Program Pengembangan Perumahan		
1.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1 Laporan	Rp 40.000.000
2.	Pendataan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Relokasi Program Pemerintah	1 Laporan	Rp. 90.000.000
3.	Pendataan/survey Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban Bencana	1 Laporan	RP. 55.000.000

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2021

5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dilaksanakan Oleh 2 (Dua) Organisasi Pemerintahan Daerah Yaitu :

A. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pemenuhan pelayanan minimal adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- c. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar

daerah

d. Pelaksanaan Penunjang administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Adapun dalam Program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi :

- a. Pembangunan gedung kantor
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d. Pengadaan Mebeleur
- e. Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/Operasional
- g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
- h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebaran
- i. Pengadaan Sarana Penunjang Operasional Pemadam Kebakaran
- j. Pengadaan Tabung Apar Pemadam Kebakaran

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi :

- a. Pembinaan Tertib Pemerintah, Pengawasan PNS, Non PNS dan Lingkungan Sosial
- b. Penunjang Operasional Penegakan Tindak Disiplin Internal Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Pengadaan Pakaian Operasional Pemadam Kebakaran (Baju Anti Api)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Adapun tujuannya adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan intelektualitas aparatur.
- b. Meningkatkan disiplin, kreatifitas serta loyalitas anggota satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- c. Penyusunan Renja SKPD
- d. Penyusunan Laporan Hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi :

- a. Penanganan dan Penertiban Hewan Ternak
- b. Pengamanan Asset Vital Pemerintah Daerah
- c. Penyediaan Insentif Petugas Jaga Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan Pejabat
- e. Penyelenggaraan HUT POL.PP, LINMAS dan DAMKAR
- f. Peringatan HUT DAMKAR

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Adapun dalam Program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi :

- a. Patroli Terpadu Ketentraman dan Ketertiban Umum antara Satpol.PP, TNI dan POLRI

Tujuan Kegiatan adalah :

- a) Menciptakan rasa aman, tertib dan nyaman dilingkungan masyarakat
- b) Menjamin keberlangsungan hidup sosial masyarakat untuk beraktifitas
- c) Menciptakan sinergitas dalam penegakan hukum antara Satpol.PP, Kepolisian dan TNI

8. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan Ketertiban Umum

- a. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

9. Program Pemberantasan Peredaran Cukai Rokok Illegal

- a. Penegakan Hukum Larangan Merokok di Tempat-tempat tertentu.
- b. Penyusunan Laporan Hasil Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Penegakan Hukum Larangan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran/Pendataan dan Penertiban Rokok Tanpa Cukai.

10. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi :

- a. Penunjang Operasional Sekretariat PPNSD
- b. Penertiban Pelanggaran Hukum terhadap Ketentuan Pidana Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pemberdayaan dan Operasional Intel.
- d. Operasional Penyidikan Pelanggaran Perda oleh PPNS.

11. Program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Kebakaran

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi :

- a. Penyuluhan Pencegahan Kebakaran (Penyuluhan Masyarakat tentang Proteksi Dini Kebakaran)
- b. Pemberdayaan Tim Relawan.
- c. Pengawasan dan Monitoring Pencegahan dan Peralatan Proteksi Kebakaran

12. Program Penanggulangan Kebakaran

- a. Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran
- b. Evakuasi Korban Bencana kebakaran
- c. Penunjang Operasional Posko Pemadam Kebakaran (posko

Pengendalian dan Pemadam Kebakaran)

- d. Peningkatan Investigasi dan Pemadaman Pasca Kebakaran.
- e. Pemberdayaan Tim Redaksi Cepat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program dan kegiatan wajib yang merupakan pendukung program kegiatan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan pemenuhan SPM urusan ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

1) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Alokasi anggaran sebesar Rp. 143.330.000 dengan realisasi sampai bulan Desember 2020 sebesar Rp. 26.361.100 atau 55 persen.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pendampingan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana;
- b. Pengkajian dan Pendataan Resiko Bencana.

2) Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam

Alokasi anggaran sebesar Rp. 297.590.144 dengan realisasi sampai bulan Desember 2020 sebesar Rp. 296.855.144 atau 100 persen.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alama;
- b. Koordinasi dan Konsultasi Pengurangan Resiko Bencana;
- c. Sosialisasi Kebencanaan;
- d. Edukasi Kebencanaan dan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi;
- e. Pembuatan Data Potensi Penanggulangan Bencana;

- f. Peningkatan Kapasitas Aparat Daerah Dalam Menghadapi Bencana;
- g. Pengurangan Resiko Bencana;
- h. Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana.

3) Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana / Penanganan Darurat Bencana

Alokasi anggaran sebesar Rp. 618.175.000 dengan realisasi sampai bulan Desember 2020 sebesar Rp. 518.503.308 atau 84 persen.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Penyediaan Dana Siap Pakai bagi Korban Bencana ;
- b. Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC);
- c. Peninjauan & Assesment kerusakan dan kerugian masyarakat pasca bencana;
- d. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana;
- e. Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Pasca Bencana;
- f. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada wilayah wilayah pasca bencana.

4. BIDANG URUSAN SOSIAL DILAKSANAKAN OLEH DINAS SOSIAL

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pemenuhan pelayanan minimal adalah :

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Adapun rincian kegiatan dari program pelayanan dan rehabilitasi sebagai berikut :

- a) Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa, dengan anggaran Rp. 100.000.000,-
- b) Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lanjut Usia Jompo Potensial melalui UEP, dengan anggaran Rp. 87.000.000,-
- c) Kegiatan Pelayanan dan Penanganan Orang Terlantar, dengan anggaran Rp. 34.700.000,-

- d) Kegiatan Pelayanan dan Penanganan Korban Bencana Sosial, dengan anggaran Rp. 228.000.000,-

2) Program Pembinaan Anak Terlantar

Adapun rincian kegiatan dari Program Pembinaan Anak Terlantar sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penunjang Operasional Pemberian Tunjangan Hidup bagi Anak Yatim Piatu, dengan anggaran Rp. 43.500.000,-
- b) Kegiatan Pendampingan Anak yang Bermasalah Hukum (ABH), dengan anggaran Rp. 35.800.000,-
- c) Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Terlantar, dengan anggaran Rp. 87.000.000

3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Adapun rincian dari Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma adalah sbb :

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan penyandang cacat melalui UEP, dengan anggaran Rp. 94.000.000,-
- b) Kegiatan Penunjang Operasional Pemberian Tunjangan Hidup Bagi Penyandang cacat Fisik dan Mental, dengan anggaran Rp. 50.000.000,-

4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan rincian kegiatan sbb :

- a. Kegiatan operasional Program Keluarga Harapan (PKH), dengan anggaran Rp. 286.000.000,-
- b. Kegiatan penunjang kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dengan anggaran Rp. 20.000.000,-
- c. Kegiatan Penunjang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), dengan anggaran Rp. 52.000.000,-
- d. Kegiatan Penunjang Operasional Pemberian Tunjangan Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar (Non Potensial), dengan anggaran 130.000.000,-

BAB V P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 diuraikan dalam dokumen ini, diharapkan akan menjadi awal kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang dalam melakukan perbaikan ke depan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 bukan hanya sebagai pemenuhan formalitas belaka, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. LPPD ini disusun berdasarkan hasil capaian dari setiap Organisasi Perangkat Daerah yang diyakini keandalan informasinya, serta menyajikan data-data yang valid dan akurat dan telah direviu oleh pihak inspektorat kabupaten.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan belum semua permasalahan dapat diatasi serta memuaskan semua pihak, namun apa yang telah dicapai merupakan modal dasar bagi upaya perbaikan maupun penajaman program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyelenggaraan pemerintahan adalah komitmen bersama untuk melayani, memberdayakan dan membangun masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada seluruh aparatur pemerintah daerah untuk menyatukan langkah dan membulatkan tekad serta bekerja keras dalam mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Akhirnya, Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disampaikan sepenuhnya kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta khususnya kepada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang terhormat.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 beserta Indikator Kinerja Kunci dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang memuat berbagai laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Semoga Allah SWT

selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan dan mengemban tugas menyiapkan Kabupaten Kepulauan Selayar agar ke depannya semakin maju dan dapat memperoleh manfaat dari proses pembangunan secara berkelanjutan menuju

Visi Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu "*Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural*".

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Benteng, 30 Maret 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR



H. MUH. BASLI ALI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				312,266,778,200			342,232,456,020
01	PENDIDIKAN				62,036,798,459			68,240,478,305
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				62,036,798,459			68,240,478,305
1	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah			264,510,459			290,961,505
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan realisasi fisik dan keuangan	Kab.Kep.Selayar	1 lap	10,000,000		1 lap	11,000,000
2	Penyusunan program dan perencanaan	Output : Laporan program dan perencanaan	Kab.Kep.Selayar	1 lap	7,256,459		1 lap	7,982,105
3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Output : Terwujudnya laporan prognosis realisasi anggaran yang akurat	Kab.Kep.Selayar	1 lap	7,500,000		1 lap	8,250,000
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Output : jumlah dokumen laporan aset yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Kab.Kep.Selayar	1 lap	7,500,000		1 lap	8,250,000
5	Penyusunan RKA/DPA Pokok dan Perubahan	Output : kesesuaian muatan antara RPJMD dan RENSTRA,RENJA,RKA, dan DPA	Kab.Kep.Selayar	1 lap	22,254,000		1 lap	24,479,400
6	Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP)	Output : penyusunan tujuan/sasaran program/kegiatan yang selaras dan relevan dengan indikator kinerja utama (IKU)/indikator kinerja (sesuai tupoksi)	Kab.Kep.Selayar	1 lap	5,000,000		1 lap	5,500,000
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan gratis	Output : sekolah yang dapat dimonitoring	Kab.Kep.Selayar	120 sklh	10,000,000		120 sklh	11,000,000
8	Perencanaan, Pengawasan dan Pemantauan sekolah	Output : sekolah yang dapat dipantau	Kab.Kep.Selayar	120 sklh	10,000,000		120 sklh	11,000,000
9	Penyusunan profil pendidikan kabupaten kepulauan selayar	Output : Dokumen data pokok dan profil pendidikan yang tersedia	Kab.Kep.Selayar	1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
10	Pelaksanaan dan Penyusunan database pangkalan data pendidikan dan informasi pendidikan berbasis web	Output : Dokumen database pangkalan data dan informasi pendidikan berbasis web	Kab.Kep.Selayar	1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
11	Penyusunan Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Output : Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab.Kep.Selayar	1 lap	5,000,000		1 lap	5,500,000
12	Penyusunan Laporan Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Kepulauan Selayar	Output : Laporan Capaian Kinerja Bidang Pendidikan	Kab.Kep.Selayar	1 lap	10,000,000		1 lap	11,000,000
13	Penyusunan Laporan Capaian Standar Operasional Prosedur Bidang Pendidikan	Output : Laporan Capaian Standar Operasional Prosedur Bidang Pendidikan	Kab.Kep.Selayar	1 lap	5,000,000		1 lap	5,500,000
14	Pelatihan dan Sinkronisasi RKAS dan RKA Disdikbud	Output : Jumlah Peserta Sosialisasi	Kab.Kep.Selayar	1 lap	40,000,000		1 lap	44,000,000
15	Penataan dan Pengendalian Rencana Kerja Keuangan Disdikbud	Output : Jumlah Dokumen Rencana Kerja Keuangan yang ditata	Kab.Kep.Selayar	1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
16	Peningkatan Aplikasi Laporan Data Aset dan Data Kegiatan	Output : Aplikasi Laporan Aset dan data kegiatan yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	1 lap	75,000,000		1 lap	82,500,000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran			26,738,942,000			29,412,836,200
1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah	Output : Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kab.Kep.Selayar	12 bln	392,508,000		12 bln	431,758,800
2	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Output : Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik	Kab.Kep.Selayar	12 bln	7,127,154,000		12 bln	7,839,869,400
3	Pelaksanaan penunjang operasional UPT TK/SD,SKB dan SMKN 3 Benteng	Output : Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik	Kab.Kep.Selayar	12 bln	50,000,000		12 bln	55,000,000
4	Pelaksanaan penunjang operasional UPT Museum/SKB Daratan dan Kepulauan	Output : Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik	Kab.Kep.Selayar	3 UPT	75,000,000		3 UPT	82,500,000
5	Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Output : Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik	Kab.Kep.Selayar	12 bln	25,000,000		12 bln	27,500,000

6	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Output : Tersedianya Pelayanan Operasional Sekolah dengan baik	Kab.Kep.Selayar	188 sklh	19,019,280,000		188 sklh	20,921,208,000
7	Pelaksanaan penunjang operasional TK Negeri	Output : Terwujudnya kelancaran administrasi TKN	Kab.Kep.Selayar	1 lap	50,000,000		1 lap	55,000,000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas kerja aparatur yang mendukung kinerja			2,210,000,000			2,431,000,000
1	Pembangunan Gedung Kantor	Output : Jumlah gedung kantor yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	1 unit	250,000,000		1 unit	275,000,000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas	Output : Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	5 unit	100,000,000		5 unit	110,000,000
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Persentase sarana dan prasarana yang memadai	Kab.Kep.Selayar	11 unit	70,000,000		11 unit	77,000,000
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Output : Persentase sarana dan prasarana yang memadai	Kab.Kep.Selayar	5 unit	30,000,000		5 unit	33,000,000
5	Pengadaan Peralatan kantor	Output : Tersedianya peralatan kantor	Kab.Kep.Selayar	4 unit	25,000,000		4 unit	27,500,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Output : Terwujudnya pemeliharaan rumah jabatan kepala dinas	Kab.Kep.Selayar	1 unit	40,000,000		1 unit	44,000,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output : Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	Kab.Kep.Selayar	12 bln	30,000,000		12 bln	33,000,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Kab.Kep.Selayar	12 bln	100,000,000		12 bln	110,000,000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Kep.Selayar	12 bln	20,000,000		12 bln	22,000,000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Output : Terwujudnya pemeliharaan meubiler	Kab.Kep.Selayar	3 unit	20,000,000			22,000,000
11	Pendataan dan pengelolaan aset sekolah	Output : Tersedianya data aset yang akurat	Kab.Kep.Selayar	1 paket	170,000,000		1 paket	187,000,000
12	Pembangunan Kantin Sehat Dikbud	Output : Jumlah Ruang yang di bangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
13	Pembangunan Sekretariat UKS	Output : Jumlah Ruang yang di bangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
14	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Output : Jumlah Gedung yang di rehab	Kab.Kep.Selayar	1 unit	120,000,000		1 unit	132,000,000
15	Rehabilitasi Kantor UPT Benteng	Output : Jumlah Gedung Kantor yang di rehab	Kab.Kep.Selayar	1 unit	150,000,000		1 unit	165,000,000
16	Pembuatan Website dan Jaringan Informasi Terintegrasi Dikbud	Output : Jumlah Website yang terintegrasi	Kab.Kep.Selayar	1 pket	50,000,000		1 pket	55,000,000
17	Peningkatan Maintenance Aplikasi Website dan Server Data Dikbud	Output : Jumlah Bulan Pelaksanaan	Kab.Kep.Selayar	12 bln	15,000,000		12 bln	16,500,000
18	Pembangunan Ruang Merokok Kantor Dikbud	Output : Jumlah Ruang yang di bangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
19	Penataan Lapangan Upacara Dikbud	Output : Jumlah Lapangan Upacara yang di tata	Kab.Kep.Selayar	1 paket	50,000,000		1 paket	55,000,000
20	Pembangunan pagar kantor Diknas (lanjutan)	Output : Pagar Kantor yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 paket	130,000,000		1 paket	143,000,000
21	Penataan halaman dan tempat parkir kantor Diknas	Output : Jumlah Halaman dan tempat parkir yang di tata	Kab.Kep.Selayar	1 paket	40,000,000		1 paket	44,000,000
22	Pembangunan Baruga Guru (Lanjutan)	Output : Jumlah Baruga Guru yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 paket	40,000,000		1 paket	44,000,000
23	Pembangunan pendopo Diknas Kabupaten Kepulauan Selayar	Output : Jumlah Pendopo yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 paket	50,000,000		1 paket	55,000,000
24	Pengadaan Laptop UPT TK-SD Kecamatan	Output : Jumlah Laptop yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	5 unit	50,000,000		5 unit	55,000,000
25	Pembangunan Pintu Gerbang kantor Diknas Pendidikan	Output : Pintu Gerbang kantor yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	60,000,000		1 unit	66,000,000
26	Penimbunan halaman kantor UPT TK SD Kecamatan Benteng	Output : Jumlah Halaman kantor yang di tata	Kab.Kep.Selayar	1 unit	120,000,000		1 unit	132,000,000
27	Pengadaan Meubleur UPT TK SD Kecamatan Bontoharu	Output : Jumlah Meubelair yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	4 unit	50,000,000		4 unit	55,000,000
28	Pembangunan pagar kantor Diknas Pendidikan	Output : Pagar Kantor yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	8 unit	50,000,000		8 unit	55,000,000
29	Pembangunan pagar kantor UPT TK/SD Kecamatan Bontosikuyu	Output : Pagar Kantor yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	60,000,000		1 unit	66,000,000
30	Pengadaan Mebeleur Kantor	Output : Jumlah Meubelair yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	5 unit	20,000,000		5 unit	22,000,000
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Proporsi SDM Aparatur yang sesuai dengan bidang tugas			350,000,000			385,000,000
1	Sosialisasi pelaksanaan program pendidikan gratis	Output : Jumlah peserta sosialisasi	Kab.Kep.Selayar					
2	Sosialisasi Penyelenggaraan dan Bantuan operasional Sekolah (BOS)	Output : Jumlah peserta sosialisasi	Kab.Kep.Selayar	384 Orang	20,000,000		384 Orang	22,000,000
3	Sosialisasi program gratis Pakaian Seragam	Output : Jumlah peserta sosialisasi	Kab.Kep.Selayar	20 orang	15,000,000		20 orang	16,500,000
4	Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pendidikan	Output : Jumlah peserta sosialisasi	Kab.Kep.Selayar	20 orang	15,000,000		20 orang	16,500,000
5	Pelaksanaan Penegakan Disiplin Guru	Output : Jumlah Guru yang ditindaki	Kab.Kep.Selayar	20 orang	15,000,000		20 orang	16,500,000
6	Pendidikan dan pelatihan teknis luar daerah	Output : Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan teknis luar daerah	Kab.Kep.Selayar	20 orang	15,000,000		20 orang	16,500,000
7	Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Kinerja Guru	Output : Jumlah Guru dan Pengawas yang mengikuti Pendidikan Pelatihan PKG	Kab.Kep.Selayar	20 orang	15,000,000		20 orang	16,500,000

8	Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Karya Ilmiah	Output : Jumlah Guru yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Karya Ilmiah	Kab.Kep.Selayar	20 orang	15,000,000		20 orang	16,500,000
9	Fasilitasi Pelaksanaan Hari Pendidikan dan Hari Guru	Output : Jumlah Hari-hari Nasional yang difasilitasi	Kab.Kep.Selayar	2 keg	15,000,000		2 keg	16,500,000
10	Pemberdayaan Pengawasan TK/SD, SMP dan Pamong Belajar	Output : Jumlah Sekolah dan lembaga yang di kunjungi	Kab.Kep.Selayar	50 sekolah	40,000,000		50 sekolah	44,000,000
11	Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	Output : Jumlah Guru yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	Kab.Kep.Selayar	25 orang	25,000,000		25 orang	27,500,000
12	Diklat Penyusunan Daftar Usul penetapan Angka Kredit	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat dan memenuhi standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	5 org	10,000,000		5 org	11,000,000
13	Diklat PIM Tingkat III dan Tingkat IV	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat PIM dan memenuhi syarat	Makassar	2 org	50,000,000		2 org	55,000,000
13	Seleksi dan Pelatihan Pengawas TK/SD/SMP	Output : Jumlah Pengawas yang mengikuti seleksi dan pelatihan	Kab.Kep.Selayar	10 org	80,000,000		10 org	88,000,000
14	Bimtek Calon Tim Penilai Angka Kredit	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan memenuhi standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	3 org	20,000,000		3 org	22,000,000
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				562,254,000			618,479,400
1	Pengelolaan dan Penyusunan Data NUPTK	Output : Jumlah Data NUPTK guru yang dikelola	Kab.Kep.Selayar	3 sekolah	10,000,000		3 sekolah	11,000,000
2	Pelatihan Operator Dapodikmen	Output : Jumlah Tenaga Operator yang mengiuti Pelatihan	Kab.Kep.Selayar	20 org	20,000,000		20 org	22,000,000
3	Penunjang Operasional Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis	Output : Jumlah Sekolah Penerima Pendidikan Gratis	Kab.Kep.Selayar	1 lap	40,000,000		1 lap	44,000,000
4	Pengelolaan dan Penyusunan Data Guru Penerima Tunjangan Profesi guru, Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Khusus Guru	Output : Jumlah Data Guru Penerima Tunjangan yang dikelola	Kab.Kep.Selayar	30 org	10,000,000		30 org	11,000,000
5	Pengelolaan dan Penyusunan Data Guru Penerima Tambahan Penghasilan	Output : Jumlah Guru Penerima Tambahan Penghasilan	Kab.Kep.Selayar	30 org	10,000,000		30 org	11,000,000
6	Pengelolaan dan Penyusunan Data Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru	Output : Jumlah Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru	Kab.Kep.Selayar	30 org	10,000,000		30 org	11,000,000
7	Pengelolaan dan Penyusunan Data Guru Penerima Tunjangan Khusus, Fungsional dan Kualifikasi	Output : Jumlah Guru Penerima Tunjangan Khusus, Fungsional dan Kualifikasi	Kab.Kep.Selayar	30 org	10,000,000		30 org	11,000,000
8	Pengelolaan dan Pendataan Sekolah Penerima Dana Pendidikan Gratis	Output : Jumlah sekolah penerima Bantuan Pendidikan Gratis	Kab.Kep.Selayar	30 org	10,000,000		30 org	11,000,000
9	Pengelolaan dan Pembinaan Sekolah Sehat SD	Output : Jumlah Sekolah sehat yang dibina	Kab.Kep.Selayar	5 sklh	10,000,000		5 sklh	11,000,000
10	Pengelolaan dan Penyusunan Data Siswa Miskin SD	Output : Jumlah siswa penerima Bantuan Siswa Miskin SD	Kab.Kep.Selayar	1000 siswa	10,000,000		1000 siswa	11,000,000
11	Pengelolaan dan Penyusunan Data Siswa Miskin (BSM) SMP	Output : Jumlah siswa penerima Bantuan Siswa Miskin SMP	Kab.Kep.Selayar	1000 siswa	20,000,000		1000 siswa	22,000,000
12	Penunjang Operasional Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah	Output : Jumlah sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Kab.Kep.Selayar	192 sklh	20,000,000		192 sklh	22,000,000
13	Penyusunan Peta Mutu Pendidikan SMP	Output : Jumlah Peserta penyusun peta mutu pendidikan	Kab.Kep.Selayar	1 Peta	20,000,000		1 Peta	22,000,000
14	Pameran Pendidikan	Output : Jumlah peserta Pameran pendidikan	Kab.Kep.Selayar	10 org	40,000,000		10 org	44,000,000
15	Penunjang Operasioanal Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SD	Output : Persentase Siswa yang mendapatkan bantuan beasiswa program indonesia pintar	Kab.Kep.Selayar	2000 siswa	30,000,000		2000 siswa	33,000,000
16	Penyusunan Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMP	Output : Persentase Siswa yang mendapatkan bantuan beasiswa program indonesia pintar	Kab.Kep.Selayar	1500 siswa	10,000,000		1500 siswa	11,000,000
17	Pengadaan V-satelit SMP Kabupaten Kepulauan Selayar		Kab.Kep.Selayar	1 lp	20,000,000		1 lp	22,000,000
18	Selayar Smart School (Pelatihan Aplikasi Gesshool)	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	Kab.Kep.Selayar	10 org	10,000,000		10 org	11,000,000
19	Visualisasi Media Elektronik Pelaksanaan Kegiatan Dikbud	Output : Jumlah Pelayanan Media Elektronik	Kab.Kep.Selayar	1 layanan	50,000,000		1 layanan	55,000,000
20	Pembinaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Aparatur	Output : Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang di bina	Kab.Kep.Selayar	15 org	20,000,000		15 org	22,000,000
21	Penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KKS	Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Kab.Kep.Selayar	1 dok	20,000,000		1 dok	22,000,000
22	Pengelolaan dan Penyusunan Data Penerima Jasa Pegawai Non PNS / Tenaga Kontrak	Output : Jumlah Pegawai Non PNS penerima Jasa	Kab.Kep.Selayar	150 org	20,000,000		150 org	22,000,000
23	Pembuatan Aplikasi sistem informasi pendataan kabupaten kepulauan selayar	Output : Layanan Sistem Informasi Pendataan yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	1 layanan	50,000,000		1 layanan	55,000,000
24	Pendataan dan Pemetaan Tenaga pendidik jenjang SD dan SMP	Output : Jumlah Tenaga pendidik SD dan SMP yang didata	Kab.Kep.Selayar	10 org	20,000,000		10 org	22,000,000
25	Pengadaan Aplikasi Panitia Penerimaan Siswa Baru SMP (E-Caraddek)	Output : Jumlah Aplikasi yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	1 aplikasi	20,000,000		1 aplikasi	22,000,000
26	Pengendalian, Pengawasan dan memfasilitasi kegiatan Akreditasi	Output : Jumlah Laporan Sekolah yang terakreditasi	Kab.Kep.Selayar	1 lpa	20,000,000		1 lpa	22,000,000
27	Pengelolaan Bantuan Seragam Sekolah Gratis	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan bantuan	Kab.Kep.Selayar	1 lap	22,254,000		1 lap	24,479,400

28	Manajemen Pengelolaan tata Kelola SD	Output : Jumlah sekolah yang didata	Kab.Kep.Selayar	100 skl	10,000,000		100 skl	11,000,000
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin			3,036,208,000			3,339,828,800
1	Lomba Kreatifitas Anak Usia Dini	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba	Kab.Kep.Selayar	20 siswa	30,000,000		20 siswa	33,000,000
2	Gebyar PAUD Tingkat Propinsi	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Gebyar PAUD	Kab.Kep.Selayar	15 siswa	10,000,000		15 siswa	11,000,000
3	Monitoring program PAUD (TK/KB/TPA/SPS)	Output : Jumlah Lembaga yang dimonitoring	Kab.Kep.Selayar	5 lembaga	10,000,000		5 lembaga	11,000,000
4	Pelatihan Guru PAUD	Output : Jumlah guru PAUD yang mengikuti Pelatihan dan mencapai standar nilai minimum	Kab.Kep.Selayar	30 Guru Paud	22,254,000		30 Guru Paud	24,479,400
5	Pembinaan Tutor PAUD	Output : Jumlah Tutor PAUD yang dibina dan mencapai standar bilai minimum	Kab.Kep.Selayar	20 Tutor	25,000,000		20 Tutor	27,500,000
6	Pembinaan Pengelola PAUD	Output : Jumlah Pengelola PAUD yang dibina dan mencapai standar nilai minimum	Kab.Kep.Selayar	2 jenis	20,000,000		2 jenis	22,000,000
7	Pengelolaan PAUD	Output : Jumlah Pengelola PAUD yang Menerima Insentif	Kab.Kep.Selayar	3 pengelola	20,000,000		3 pengelola	22,000,000
8	Sosialisasi Kurikulum 2013	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	Kab.Kep.Selayar	20 org	15,000,000		20 org	16,500,000
9	Pelatihan Pembuatan Alat Peraga PAUD	Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kab.Kep.Selayar	20 org	15,000,000		20 org	16,500,000
10	Lomba Gugus PAUD	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti lomba	Kab.Kep.Selayar	10 org	10,000,000		10 org	11,000,000
11	Lomba Kepala Sekolah TK dan Guru PAUD Berprestasi Tingkat Kab. Dan Propinsi	Output : Jumlah Kepala Sekolah TK/Guru PAUD yang mengikuti Lomba	Kab.Kep.Selayar	18 org	15,000,000		18 org	16,500,000
12	Pelaksanaan KKG TK	Output : Jumlah guru yang mengikuti KKG TK	Kab.Kep.Selayar	20 guru	10,000,000		20 guru	11,000,000
13	Pendataan dan Pemetaan Tenaga pendidik jenjang PAUD	Output : Jumlah Guru yang terdata	Kab.Kep.Selayar	2000 org	25,000,000		2000 org	27,500,000
14	Manajemen Pengelolaan BOP PAUD	Output : Jumlah Pengelola PAUD	Kab.Kep.Selayar	3 org	20,000,000		3 org	22,000,000
15	Sosialisasi DAPODIK PAUD	Output : Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	Kab.Kep.Selayar	10 org	15,000,000		10 org	16,500,000
16	Sosialisasi Pengelolaan Program TK/PAUD	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	Kab.Kep.Selayar	10 org	15,000,000		10 org	16,500,000
17	Pengadaan Ijazah TK	Output : Jumlah Siswa yang lulus	Kab.Kep.Selayar	2170 Lembar	22,254,000		2170 Lembar	24,479,400
18	Pembangunan ruang kelas baru,mobileur dan perabotnya TK Negeri 4 Bontomatene	Output : Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	200,000,000		1 unit	220,000,000
19	Pembangunan RKB dan Perabotnya	Output : Jumlah RKB Meubelair dan Perabotnya	Kab.Kep.Selayar	1 paket	250,000,000		1 paket	275,000,000
20	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	Output : Jumlah Sekolah/Lembaga yang menerima Bantuan	Kab.Kep.Selayar	2000 skl	863,400,000		2000 skl	949,740,000
21	Bantuan Operasional Pendidikan Daerah	Output : Jumlah Sekolah/Lembaga yang menerima Bantuan	Kab.Kep.Selayar	200 skl	411,300,000		200 skl	452,430,000
22	Pengadaan Meubelair	Output : Jumlah Meubelair yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	18 unit	22,000,000		18 unit	24,200,000
23	Pembangunan Pagar TK	Output : Jumlah TK yang dibangun Pagarnya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
24	Pembangunan Pagar TK Negeri 4 Bontomanai	Output : Jumlah TK yang dibangun Pagarnya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
25	Rehabilitasi TK Negeri 2 Bontomanai	Output : Jumlah Ruang yang direhab	Kab.Kep.Selayar	1 unit	200,000,000		1 unit	220,000,000
26	Penataan Halaman Taman Kanak-Kanak (TK)	Output : Jumlah Halaman Sekolah TK yang ditimbon	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
27	Penimbunan halaman sekolah TK	Output : Jumlah TK yang tata halamannya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	75,000,000		1 unit	82,500,000
28	Pengawasan dan Pemantauan Program PAUD (TK/KB/TPA/SPS)	Output : Jumlah Program PAUD yang dipantau	Kab.Kep.Selayar	15 org	70,000,000		15 org	77,000,000
29	Rehab Lembaga PNF	Output : Jumlah Lembaga PNF yang direhab	Kab.Kep.Selayar	1 unit	75,000,000		1 unit	82,500,000
30	Rehab Lembaga PAUD dan TK	Output : Jumlah Lembaga PAUD dan TK yang direhab	Kab.Kep.Selayar	2 unit	150,000,000		2 unit	165,000,000
31	Pengadaan APE dalam dan APE luar	Output : Jumlah APE dalam dan APE Luar yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	50 unit	100,000,000		50 unit	110,000,000
32	Pendataan dan Pembinaan Lembaga PAUD	Output : PTK PAUD yang Valid	Kab.Kep.Selayar	1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
33	Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD	Output : Jumlah prasarana belajar yang direhab	Kab.Kep.Selayar					
34	Pembangunan Prasarana Belajar PAUD	Output : Jumlah prasarana belajar yang disediakan	Kab.Kep.Selayar					
33	Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD	Output : Jumlah prasarana belajar yang direhab	Kab.Kep.Selayar					
34	Pembangunan Prasarana Belajar SKB	Output : Jumlah prasarana belajar yang disediakan	Kab.Kep.Selayar					
35	Pembangunan Prasarana Belajar SKB	Output : Jumlah prasarana belajar yang disediakan	Kab.Kep.Selayar					
7	Program Peningkatan Mutu Pendidikan				1,414,868,000			1,556,354,800

1	Penyelenggaraan lomba mata pelajaran SD/MI	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Mata Pelajaran Minimum yang mengikuti lomba mata pelajaran SD/MI	Kab.Kep.Selayar	36 Orang	22,254,000		36 Orang	24,479,400
2	Penyelenggaraan lomba cerdas cermat SD/MI	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Mata Pelajaran Minimum yang mengikuti lomba cerdas cermat SD/MI	Kab.Kep.Selayar	2700 Siswa	23,000,000		2700 Siswa	25,300,000
3	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB	Output : Jumlah Peserta didik yang mengikuti Ujian Sekolah dan telah mencapai standar nilai rata-rata	Kab.Kep.Selayar	2700 Siswa	23,000,000		2700 Siswa	25,300,000
4	Pengandaan Naskah Ujian Nasional SD/MI	Output : Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian Akhir Berstandar Nasional	Kab.Kep.Selayar	2700 Siswa	23,000,000		2700 Siswa	25,300,000
5	Penyelenggaraan ujian Nasional SD/MI	Output : Jumlah Sekolah yang melaksanakan Ujian Akhir Berstandar Nasional	Kab.Kep.Selayar	36 sklh	229,000,000		36 sklh	251,900,000
6	Penyelenggaraan Lomba olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional dan telah memenuhi standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 org	30,000,000		20 org	33,000,000
7	Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreativitas Anak SD/MI	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Kreatifitas SD/MI dan telah memenuhi standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 sisw	25,000,000		20 sisw	27,500,000
8	Lomba Kantin Kejujuran SD/MI	Output : Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba dan telah memenuhi standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 siswa	20,000,000		20 siswa	22,000,000
9	Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasioanal (O2SN) Tk. Propinsi	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Minimum yang mengikuti Lomba olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN) SD/MI	Kab.Kep.Selayar	10 siswa	30,000,000		10 siswa	33,000,000
10	Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tk. Kabupaten	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Minimum yang mengikuti Lomba olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN) SD/MI	Kab.Kep.Selayar	20 siswa	30,000,000		20 siswa	33,000,000
11	Penyelenggaraan Lomba olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI Tingkat Provinsi	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Minimum yang mengikuti Lomba olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI	Kab.Kep.Selayar	156 Orang	30,000,000		156 Orang	33,000,000
12	Lomba Olimpiade MIPA (Sains) Tingkat SD/MI	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Minimum yang mengikuti Lomba olimpiade MIPA SD/MI	Kab.Kep.Selayar	10 org	25,000,000		10 org	27,500,000
13	Lomba Gugus SD dalam rangka peningkatan kelembagaan SD	Output : Jumlah Gugus yang mengikuti lomba dan telah memenuhi standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	5 gugus	25,000,000		5 gugus	27,500,000
14	Pelatihan Pembinaan Kelembagaan Sekolah SD	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan dan mencapai standar nilai minimum	Kab.Kep.Selayar	12 org	25,000,000		12 org	27,500,000
15	Lomba Pidato Siswa SMP	Output : Jumlah Sekolah yang ikut Lomba dan telah memenuhi standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 siswa	20,000,000		20 siswa	22,000,000
16	Lomba The Best Student (Lacaradde)	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Mata Pelajaran Minimum yang mengikuti lomba The best student (Lacaradde)	Kab.Kep.Selayar	36 siswa	30,000,000		36 siswa	33,000,000
17	Launching Program Kejar Prestasi	Output : Jumlah Peserta Launching Program Kejar Prestasi	Kab.Kep.Selayar	35 org	10,000,000		35 org	11,000,000
18	Sosialisasi program dan Kegiatan Kejar Prestasi	Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Kejar Prestasi	Kab.Kep.Selayar	50 org	30,000,000		50 org	33,000,000
19	Lomba Olimpiade Sains SMP/MTs	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Mata Pelajaran Minimum yang mengikuti Lomba Olimpiade SMP/Mts	Kab.Kep.Selayar	25 siswa	20,000,000		25 siswa	22,000,000
20	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tk. Provinsi	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Minimum yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN)	Makassar	18 siswa	20,000,000		18 siswa	22,000,000
21	Olimpiade Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tk. Kabupaten	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Minimum yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN)	Kab.Kep.Selayar	156 Orang	22,254,000		156 Orang	24,479,400
22	Bina Kreatifitas Siswa Teladan SMP Sederajat Kabupaten Kepulauan Selayar	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Mata Pelajaran Minimum yang mengikuti Bina Kreatifitas Siswa Teladan SMP Sederajat	Kab.Kep.Selayar	30 org	25,000,000		30 org	27,500,000
23	Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Inggris Jenjang SMP/MTs	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Mata Pelajaran Minimum yang mengikuti Lomba Debat	Kab.Kep.Selayar	25 siswa	20,000,000		25 siswa	22,000,000
24	Pembinaan Sekolah Unggulan SMP	Output : Jumlah Sekolah Unggulan yang dibina	Kab.Kep.Selayar	5 sklh	20,000,000		5 sklh	22,000,000
25	olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN) SMP/MTs Tk. Kabupaten	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Mata Pelajaran Minimum yang mengikuti olimpiade Olahraga Siswa nasional	Kab.Kep.Selayar	30 siswa	25,000,000		30 siswa	27,500,000
26	olimpiade olahraga Siswa nasional (O2SN) SMP/MTs Tk. Provinsi	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Mata Pelajaran Minimum yang mengikuti olimpiade Olahraga Siswa nasional	Kab.Kep.Selayar	30 siswa	25,000,000		30 siswa	27,500,000

27	Gala Siswa Indonesia Tingkat SMP	Output : Jumlah Peserta yang mencapai Nilai Standar Mata Pelajaran Minimum yang mengikuti Gala Siswa Indonesia	Kab.Kep.Selayar	30 siswa	10,000,000		30 siswa	11,000,000
28	Manajemen Operasional Gala Siswa Indonesia Tingkat SMP	Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Gala Siswa Indonesia	Kab.Kep.Selayar	30 siswa	20,000,000		30 siswa	22,000,000
29	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Ujian Sekolah dan Mencapai standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	2700 siswa	95,560,000		2700 siswa	105,116,000
30	Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/SMA/MA dan SMK	Output : Jumlah siswa peserta ujian nasional dan ujian sekolah SMP/MTs/SMA/MA dan SMK	Kab.Kep.Selayar		-		-	-
31	Akreditasi Sekolah Tingkat SD, SLTP, PAUD dan Non Formal	Output : Jumlah Lembaga dan sekolah yang diakreditasi	Kab.Kep.Selayar	50 lembaga	40,000,000		50 lembaga	44,000,000
32	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dan Silabus Mata Pelajaran Seni dan Budaya	Output : Jumlah Kurikulum Mulok kesenian dan kebudayaan daerah dan terintegrasi yang disusun	Kab.Kep.Selayar	2 Jenis	15,000,000		2 Jenis	16,500,000
34	Lomba Olimpiade SMP/MTs	Output : Jumlah peserta lomba olimpiade SMP/MTs	Kab.Kep.Selayar	40 siswa	25,000,000		40 siswa	27,500,000
35	Bina Kreatifitas Siswa Teladan SMP/SMA/Sederajat Kabupaten Kepulauan Selayar	Output : Jumlah peserta bina kreatifitas siswa teladan SMP/MTs,SMA/MA/SMK	Kab.Kep.Selayar	30 siswa	15,000,000		30 siswa	16,500,000
36	Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK	Output : Jumlah peserta lomba keterampilan siswa (LKS)	Kab.Kep.Selayar	30 siswa	25,000,000		30 siswa	27,500,000
37	Lomba Cipta Karya Iptek Terapan SMA/SMK	Output : Jumlah peserta cipta karya iptek terapan SMA/SMK	Kab.Kep.Selayar	20 siswa	20,000,000		20 siswa	22,000,000
38	Fasilitas Beasiswa Kepada Calon Mahasiswa Bebas Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Output : Jumlah Siswa penerima Beasiswa kepada calon mahasiswa bebas tes masuk ke PTN	Kab.Kep.Selayar	50 siswa	200,000,000		50 siswa	220,000,000
39	Seminar Pendidikan Nasional Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Output : Jumlah Peserta Seminar Pendidikan	Kab.Kep.Selayar	40 org	20,000,000		40 org	22,000,000
40	Penyediaan Bahan Ajar Kurikulum budaya lokal	Jumlah buku yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	1741 Buku	101,800,000		1741 Buku	111,980,000
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1,524,254,000			1,676,679,400
1	Pembinaan Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP	Output : Jumlah Guru SMP yang mengikuti Pembinaan Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP	Kab.Kep.Selayar	20 guru	20,000,000		20 guru	22,000,000
2	Pelaksanaan Sistem Pendataan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar	Output : Jumlah Operator yang mengikuti Pelatihan teknis tentang Dapodik	Kab.Kep.Selayar	20 guru	15,000,000		20 guru	16,500,000
3	Pelaksanaan Pendataan Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar	Output : Jumlah Operator yang mengikuti Pelatihan teknis tentang PMP	Kab.Kep.Selayar	20 guru	10,000,000		20 guru	11,000,000
4	Lomba Olimpiade Sains Guru (OSN Guru) SMP Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Output : Jumlah Guru SMP yang mengikuti Lomba dan mencapai standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	25,000,000		20 guru	27,500,000
5	Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Output : Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SMP yang mengikuti Lomba dan mencapai standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	25,000,000		20 guru	27,500,000
6	Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SD Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Output : Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SD yang mengikuti Lomba dan mencapai standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	25,000,000		20 guru	27,500,000
7	Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Output : Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SMP yang mengikuti Lomba dan mencapai standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	25,000,000		20 guru	27,500,000
8	Lomba Guru Mata Pelajaran SMP	Output : Jumlah GuruSMP yang mengikuti Lomba dan mencapai standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	12,000,000		20 guru	13,200,000
9	Pelatihan Kurikulum SMP	Output : Jumlah Guru, Kepala Sekolah SMP yang mengikuti Pelatihan dan mencapai standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	15,000,000		20 guru	16,500,000
10	Pelatihan Guru Mata Pelajaran IPA SD dan SMP	Output : Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan	Kab.Kep.Selayar	50 guru	100,000,000		50 guru	110,000,000
11	Pelatihan Guru Mata Pelajaran IPS SD dan SMP	Output : Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan	Kab.Kep.Selayar	50 guru	100,000,000		50 guru	110,000,000
12	Sosialisasi UN SMP/MTs	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan dan mencapai standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	65 Orang	30,000,000		65 Orang	33,000,000
13	Sosialisasi Permendikbud tentang Penyelenggaraan Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI	Output : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Kab.Kep.Selayar	139 orang	40,000,000		139 orang	44,000,000
14	Pelatihan Pembina Olimpiade Sains Nasional SD/MI	Output : Jumlah Pembina Olimpiade Sains Nasional SD/MI yang mencapai standar nilai minimum	Kab.Kep.Selayar	20 guru	25,000,000		20 guru	27,500,000
15	Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Sekolah	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan dan mencapai standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	25,000,000		20 guru	27,500,000
16	Pelatihan Penguatan Guru SD/MI	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan dan mencapai standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	70 orang	150,000,000		70 orang	165,000,000
17	Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bhs. Indonesia kelas IV bagi guru SD	Output : Jumlah guru mata pelajaran bahasa indonesia kelas VI bagi guru SD yang mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	25,000,000		20 guru	27,500,000

18	Pelatihan Komputer bagi Guru SD	Output : Jumlah guru yang mengikuti pelatihan komputer dan mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	25,000,000		20 guru	27,500,000
19	Pelatihan Guru Mata Pelajaran Matematika kelas IV bagi guru SD	Output : Jumlah Guru mata pelajaran Matematika kelas IV yang mengikuti pelatihan dan mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	25,000,000		20 guru	27,500,000
20	Pelatihan Guru Seni Budaya SD dan SMP	Output : Jumlah Guru Seni Budaya dan Keterampilan yang mengikuti pelatihan dan mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	20,000,000		20 guru	22,000,000
21	Pelatihan Guru Sastra Indonesia disetiap jenjang Pendidikan	Output : Jumlah guru sastra indonesia yang telah mengintegrasikan mata pelajaran dan mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	20,000,000		20 guru	22,000,000
22	Pelatihan Guru Seni dan Pengajar muatan budaya lokal	Output : Jumlah guru mengikuti pelatihan	Kab.Kep.Selayar	50 orang	100,000,000		50 orang	110,000,000
23	Pelatihan Bagi guru-guru sejarah disetiap jenjang pendidikan	Output : Jumlah guru sejarah yang telah mengintegrasikan mata pelajaran dan mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	20,000,000		20 guru	22,000,000
24	Pelatihan Manajemen Mutu SD	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan dan mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	20,000,000		20 guru	22,000,000
25	Pelatihan Calon Kepala Sekolah (Lanjutan 2016)	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan dan mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 guru	25,000,000		20 guru	27,500,000
26	Seminar Pendidikan Karakter	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti seminar dan mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	25 guru	30,000,000		25 guru	33,000,000
27	Pelatihan Pendidikan Karakter SD	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan dan mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	25 guru	20,000,000		25 guru	22,000,000
28	Pelatihan Guru Kreatif dan Produktif	Output : Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan yang mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	25 guru	20,000,000		25 guru	22,000,000
29	Pelatihan Kelas Aktif	Output : Jumlah Peserta Pelatihan yang mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	25 guru	20,000,000		25 guru	22,000,000
30	Pelatihan (Penguatan) Kurikulum Sekolah Dasar	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti (Penguatan) Kurikulum Sekolah Dasar dan mencapai nilai standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	25 guru	25,000,000		25 guru	27,500,000
31	Lomba Olimpiade Sains Guru SD Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Output : Jumlah Guru Sains SD yang mengikuti Lomba dan memenuhi Standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	25 guru	10,254,000		25 guru	11,279,400
32	Pemilihan Guru SD dan SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Output : Jumlah Guru SD dan SMP yang berprestasi dan memenuhi Standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	25 guru	20,000,000		25 guru	22,000,000
33	Pemilihan Kepala SD dan SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Output : Jumlah Kepala SD dan SMP yang berprestasi dan memenuhi Standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	25 guru	25,000,000		25 guru	27,500,000
34	Penyusunan Bahan Ajar Kurikulum Mulok Mata Pelajaran Kesenian dan kebudayaan daerah SD	Output : Jumlah Sekolah yang mengintegrasikan Kurikulum Mulok Mata Pelajaran Kesenian dan kebudayaan daerah	Kab.Kep.Selayar	25 guru	20,000,000		25 guru	22,000,000
35	Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran jenjang SD	Output : Jumlah Peserta Pelatihan yang mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	25 guru	30,000,000		25 guru	33,000,000
36	Pelatihan Pembina Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI	Output : Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Pembina Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI	Kab.Kep.Selayar	25 guru	30,000,000		25 guru	33,000,000
37	Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum SD/MI	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar dan mencapai nilai standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	25 guru	20,000,000		25 guru	22,000,000
38	Pelaksanaan KKG SD	Output : Jumlah guru yang mengikuti KKG	Kab.Kep.Selayar	25 guru	20,000,000		25 guru	22,000,000
39	Pelaksanaan MKKS SD	Output : Jumlah Kepala Sekolah SD yang mengikuti kegiatan	Kab.Kep.Selayar	25 guru	30,000,000		25 guru	33,000,000
40	Pelaksanaan MKPS SD dan SMP	Output : Jumlah Pengawas SD dan SMP yang mengikuti kegiatan	Kab.Kep.Selayar	25 guru	20,000,000		25 guru	22,000,000
41	Pelaksanaan MKKS SMP	Output : Jumlah Kepala SMP yang mengikuti kegiatan	Kab.Kep.Selayar	25 guru	20,000,000		25 guru	22,000,000
42	Penyusunan Bahan Ajar Kurikulum Mulok SMP	Output : Jumlah Sekolah yang mengintegrasikan Kurikulum Mulok SMP	Kab.Kep.Selayar	1000 sklh	22,000,000		1000 sklh	24,200,000
43	Pengembangan Sekolah Binaan Khusus SMP	Output : Jumlah Sekolah Binaan Khusus	Kab.Kep.Selayar	1000 sklh	20,000,000		1000 sklh	22,000,000
44	Pemberdayaan pengawas TK/SD	Output : Jumlah sekolah yang di kunjungi pengawas TK/SD	Kab.Kep.Selayar	1000 sklh	20,000,000		1000 sklh	22,000,000
45	Pemberdayaan pengawas SMP	Output : Jumlah sekolah yang di kunjungi pengawas SMP	Kab.Kep.Selayar	1000 sklh	20,000,000		1000 sklh	22,000,000
46	Pemberdayaan pamong belajar, SKB daratan, SKB kepulauan dan penilik PLS	Output : Jumlah Lap Hasil Pemantauan Pamong dan Penilik	Kab.Kep.Selayar	1000 sklh	20,000,000		1000 sklh	22,000,000
47	Pembinaan Sekolah Unggulan Tingkat SMP	Output : Jumlah Sekolah yang dibina dan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	1000 sklh	20,000,000		1000 sklh	22,000,000
48	Pembinaan dan Pengembangan sekolah model	Output : Jumlah Sekolah yang dibina yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	1000 sklh	20,000,000		1000 sklh	22,000,000

49	Workshop Pengembangan Sekolah Berbasis Karakter	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop dan memenuhi Standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	1000 sklh	20,000,000		1000 sklh	22,000,000
50	Diklat Penguatan Kepala Sekolah	Output : Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Diklat dan memenuhi Standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	1000 sklh	20,000,000		1000 sklh	22,000,000
51	Lomba Best Practice bagi kepala sekolah	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti lomba dan memenuhi Standar yang ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	1000 sklh	20,000,000		1000 sklh	22,000,000
52	Pelatihan Mulok Kelautan dan Perikanan Bagi Guru	Output : Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Kurikulum Mulok Kelautan bagi Guru SD	Kab.Kep.Selayar	25 guru	20,000,000		25 guru	22,000,000
53	Sosialisasi Penerimaan Tunjangan Kualifikasi, Fungsional Khusus Daerah Terpencil	Output : Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Penerimaan Tunjangan Kualifikasi, Fungsional, Khusus daerah terpencil dan sangat terpencil	Kab.Kep.Selayar	25 guru	20,000,000		25 guru	22,000,000
9	Program Penuntasan Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Persentase SD berakreditasi minimal B.			21,291,254,000			23,420,379,400
1	Penyediaan Bantuan dana Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar	Output : Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Dana Pendidikan Gratis	Kab.Kep.Selayar	3000 siswa	500,000,000		3000 siswa	550,000,000
2	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Output : Jumlah Sekolah Baru yang di bangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	200,000,000		1 unit	220,000,000
3	Pembangunan Lanjutan Perpustakaan UPT SDN 126 Kepulauan Selayar	Output : Jumlah Perpustakaan dan Ruang Guru yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	22,254,000		1 unit	24,479,400
4	Penimbunan Halaman SD Matalalang	Output : Jumlah halaman sekolah yang ditimbulkun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
5	Penataan Halaman TK Pembina Benteng	Output : Jumlah halaman sekolah yang ditata	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
6	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDN Pa'garangan	Output : Jumlah Ruang Kelas sekolah yang direhab	Kab.Kep.Selayar	1 unit	250,000,000		1 unit	275,000,000
7	Pembangunan Ruang Kantor Guru, Kepala SD dan Perabotnya	Output : Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	300,000,000		1 unit	330,000,000
8	Pembangunan Perpustakaan dan Perabotnya SD	Output : Jumlah Perpustakaan dan Ruang Guru yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	300,000,000		1 unit	330,000,000
9	Pembangunan Gerbang Sekolah	Output : Jumlah Gerbang Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	2,000,000,000		1 unit	2,200,000,000
10	Penyelesaian Pembangunan Ruang/Gedung Perpustakaan SD (Lanjutan)	Output : Jumlah Ruang Kelas dan Gedung Perpustakaan sekolah yang direhab	Kab.Kep.Selayar	1 unit	150,000,000		1 unit	165,000,000
11	Pembangunan Ruang UKS dan Perabotnya	Output : Jumlah UKS yang dibangun dan perabot yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	1 unit	250,000,000		1 unit	275,000,000
12	Pembangunan Perumahan Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SD	Output : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	200,000,000		1 unit	220,000,000
13	Pembangunan Perumahan Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SD (Lanjutan)	Output : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	330,000,000		1 unit	363,000,000
14	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SD	Output : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Yang direhab	Kab.Kep.Selayar	1 unit	300,000,000		1 unit	330,000,000
15	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Guru/Ruang kelas SD	Output : Jumlah Ruang guru dan Ruang Kelas yang direhab	Kab.Kep.Selayar	1 unit	300,000,000		1 unit	330,000,000
16	Pembangunan Ruang AULA SD	Output : Jumlah Aula yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	190,000,000		1 unit	209,000,000
17	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Output : Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	400,000,000		1 unit	440,000,000
18	Pembangunan Pagar SD	Output : Jumlah Pagar Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	250,000,000		1 unit	275,000,000
19	Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman SDN Parak	Output : Jumlah sekolah yang dibangun pagarnya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
20	Pemagaran SDN Laiyolo Desa Laiyolo Baru	Output : Jumlah sekolah yang dibangun pagarnya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
21	Pembangunan Pagar SDI Rajuni Bakka	Output : Jumlah sekolah yang dibangun pagarnya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	120,000,000		1 unit	132,000,000
22	Penataan halaman SDN No. 32 Desa Majapahit	Output : Jumlah sekolah yang dibangun pagarnya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	200,000,000		1 unit	220,000,000
23	Penyelesaian Pembangunan Pagar SDI Bonelambere	Output : Jumlah sekolah yang dibangun pagarnya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	150,000,000		1 unit	165,000,000
24	Pembangunan Pagar SDI Bonelambere	Output : Jumlah sekolah yang dibangun pagarnya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
25	Pembangunan Pagar SDI Kayuadi	Output : Jumlah sekolah yang dibangun pagarnya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
26	Pembangunan Pagar SDI Tangga-Tangga	Output : Jumlah sekolah yang dibangun pagarnya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
27	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Lanjutan)	Output : Jumlah sekolah yang dibangun Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Kab.Kep.Selayar	1 unit	280,000,000		1 unit	308,000,000
28	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SD	Output : Jumlah Sekolah yang dipantau	Kab.Kep.Selayar	1 unit	30,000,000		1 unit	33,000,000
29	Pembangunan Ruang Ibadah SD	Output : Jumlah Ruang Ibadah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	150,000,000		1 unit	165,000,000
30	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (Toilet Sekolah) SD	Output : Jumlah Jamban Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	200,000,000		1 unit	220,000,000
31	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SD	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana yang di bangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	200,000,000		1 unit	220,000,000
32	Paving Blok Halaman Sekolah SD	Output : Jumlah Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	300,000,000		1 unit	330,000,000

33	Pengadaan Meubiler Sekolah SD	Output : Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Meubiler Sekolah	Kab.Kep.Selayar	1 unit	400,000,000		1 unit	440,000,000
34	Penimbunan dan Penataan Halaman Sekolah SD	Output : Jumlah SD yang halaman sekolahnya ditimbu	Kab.Kep.Selayar	1 unit	150,000,000		1 unit	165,000,000
35	Penataan SDI Benteng III	Output : Jumlah SD yang ditata halaman sekolahnya ditimbu	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
36	Penanggulan Sekolah SD	Output : Jumlah tanggul Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
37	Rehabilitasi Prasarana Belajar SD	Output : Jumlah prasarana belajar yang direhab	Kab.Kep.Selayar					
38	Pembangunan Prasarana Belajar SD	Output : Jumlah prasarana belajar yang disediakan	Kab.Kep.Selayar					
39	Pengadaan Sarana Belajar SD	Output : Jumlah sarana belajar yang disediakan	Kab.Kep.Selayar					
40	Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang (lanjutan)	Output : Jumlah Pagar dan Gerbang Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	300,000,000		1 unit	330,000,000
41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Lanjutan)	Output : Jumlah Bangunan Sekolah yang direhab	Kab.Kep.Selayar	1 unit	600,000,000		1 unit	660,000,000
42	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Output : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	1 paket	250,000,000		1 paket	275,000,000
43	Pengadaan Meubelair/Perabot Ruang Kelas Sekolah	Output : Jumlah Meubelair/Perabot Ruang Kelas SD/MI yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	1 paket	270,000,000		1 paket	297,000,000
44	Pengadaan Alat Scan Hasil Ujian Nasional SD/MI	Output : Jumlah Alat Scan Hasil Ujian Nasional SD/MI yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	1 paket	150,000,000		1 paket	165,000,000
45	Pengadaan Peralatan Qasidah	Output : Jumlah Peralatan Qasidah yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	1 paket	120,000,000		1 paket	132,000,000
46	Bantuan Seragam Sekolah	Output : Jumlah Siswa Penerima Seragam Sekolah	Kab.Kep.Selayar	3269 siswa	2,767,000,000		3269 siswa	3,043,700,000
47	Pendataan, Verifikasi dan Monitoring Bantuan Seragam Sekolah	Output : Laporan Hasil Verifikasi Bantuan Seragam Sekolah	Kab.Kep.Selayar	1 lap	50,000,000		1 lap	55,000,000
48	Penataan Halaman SMP	Output : Jumlah Sekolah Yang ditata halamannya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	350,000,000		1 unit	385,000,000
49	Penataan Halaman SMPN 4 Bontomanai (Lanjutan)	Output : Jumlah Sekolah Yang ditata halamannya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
50	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	Output : Jumlah Ruang Kelas Baru yg dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	500,000,000		1 unit	550,000,000
51	Pembangunan Perpustakaan SMP	Output : Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	500,000,000		1 unit	550,000,000
52	Pembangunan Laboratorium SMP	Output : Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	450,000,000		1 unit	495,000,000
53	Pembangunan Laboratorium Komputer (SMP Unggulan)	Output : Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	400,000,000		1 unit	440,000,000
54	Pembangunan Perumahan Kasek SMP	Output : Jumlah Rumah Dinas Kasek yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	200,000,000		1 unit	220,000,000
55	Pembangunan Perumahan Guru SMP	Output : Jumlah Rumah Dinas Guru yg dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	350,000,000		1 unit	385,000,000
56	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah (Lanjutan)	Output : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah yg dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	400,000,000		1 unit	440,000,000
57	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah (Lanjutan)	Output : Jumlah Rumah Dinas yang direhab	Kab.Kep.Selayar	1 unit	400,000,000		1 unit	440,000,000
58	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	Output : Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Kab.Kep.Selayar	1 unit	200,000,000		1 unit	220,000,000
59	Penyelesaian Rehab Sedang Ruang Kelas SMP (Lanjutan)	Output : Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Kab.Kep.Selayar	1 unit	200,000,000		1 unit	220,000,000
60	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	Output : Jumlah Pagar Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	300,000,000		1 unit	330,000,000
61	Pengadaan Komputer UNBK SMP	Output : Jumlah Komputer Sekolah yang diadakan	Kab.Kep.Selayar	1 unit	27,000,000		1 unit	29,700,000
62	Pembangunan Pagar SMP 11 Kep. Selayar	Output : Jumlah Pagar Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	75,000,000		1 unit	82,500,000
63	Pembangunan Pagar SMPN 4 Bontosikuyu	Output : Jumlah Pagar Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
64	Pembangunan Pagar SD-SMPN Satap 3 Pasimaranu	Output : Jumlah Pagar Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
65	Pembangunan Pagar SMPN 2 Benteng	Output : Jumlah Pagar Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
66	Pembangunan Pagar (SMP Unggulan)	Output : Jumlah Pagar Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
67	Pembangunan Pagar SMPN 2 Bontosikuyu	Output : Jumlah Pagar Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
68	Pembangunan Pagar SMPN 1 Taka Bonerate	Output : Jumlah Pagar Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
69	Pembangunan Pagar dan pintu Gerbang (Lanjutan)	Output : Jumlah Pagar Sekolah yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
70	Pengadaan Peralatan Multimedia SMP Negeri 3 Benteng	Output : Jumlah Sekolah Penerima Peralatan Multimedia	Kab.Kep.Selayar	1 unit	150,000,000		1 unit	165,000,000
71	Pembangunan Pintu Gerbang Perumahan SMPN 2 Benteng	Output : Jumlah Pintu dan gerbang Perumahan yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
72	Pengadaan Peralatan Aplikasi Sekolah (SMP Unggulan)	Output : Jumlah Peralatan Aplikasi Sekolah yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	1 unit	150,000,000		1 unit	165,000,000
73	Penimbunan SMPN 1 Buki	Output : Jumlah Sekolah yang ditimbu halamannya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	170,000,000		1 unit	187,000,000
74	Pengadaan Meubleur Sekolah	Output : Jumlah Sekolah Penerima Meubleur yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	1 unit	330,000,000		1 unit	363,000,000
75	Penataan Halaman Perumahan SMPN 2 Benteng	Output : Jumlah Perumahan Sekolah yang ditata halamannya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	200,000,000		1 unit	220,000,000

76	Penataan Halaman SMP 46 Kep. Selayar	Output : Jumlah Sekolah yang ditata halamannya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000
77	Penataan Halaman SMPN I Buki	Output : Jumlah Sekolah yang ditata halamannya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	140,000,000		1 unit	154,000,000
78	Desain Asrama Guru dan Siswa Guru SMP Unggulan	Output : Jumlah Hasil Gambar Asrama Siswa dan Guru SMP Unggulan yang didesain	Kab.Kep.Selayar	1 unit	70,000,000		1 unit	77,000,000
79	Pembangunan Asrama Siswa SMPN 3 Benteng	Output : Jumlah Gedung Asrama Siswa dan Guru SMP Unggulan yang didesain	Kab.Kep.Selayar	1 unit	750,000,000		1 unit	825,000,000
80	Penyelesaian dan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Benteng	Output : Jumlah Gedung yang di Rehab	Kab.Kep.Selayar	1 unit	300,000,000		1 unit	330,000,000
81	Pembangunan Selasar SMPN 1 Benteng	Output : Jumlah Sekolah yang dibangun selasarnya	Kab.Kep.Selayar	1 unit	150,000,000		1 unit	165,000,000
82	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP	Output : Jumlah prasarana belajar yang direhab	Kab.Kep.Selayar					
83	Pembangunan Prasarana Belajar SMP	Output : Jumlah prasarana belajar yang disediakan	Kab.Kep.Selayar					
84	Pengadaan Sarana Belajar SMP	Output : Jumlah sarana belajar yang disediakan	Kab.Kep.Selayar					
10	Program Pendidikan Non Formal	Proporsi pemuda mandiri per 100 ribu penduduk			622,254,000			684,479,400
1	Pengadaan Sarana Ujian Nasional SKB Kepulauan	Output : Jumlah Sarana yang disediakan	Kab.Kep.Selayar	10 unit	60,000,000		10 unit	66,000,000
2	Penyelenggaraan Paket A Setara SD Kelas VI Semester 2 (Persiapan Ujian Sekolah)	Output : Jumlah Masyarakat yang putus sekolah dilayani	Kab.Kep.Selayar	40 org	30,000,000		40 org	33,000,000
3	Penyelenggaraan Paket A Setara SD Kelas IV Semester 1 (Kelas Baru)	Output : Jumlah Angka Putus Sekolah setara SD	Kab.Kep.Selayar	40 org	30,000,000		40 org	33,000,000
4	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Kelas 9 Semester 2 (Persiapan Ujian Sekolah)	Output : Jumlah Masyarakat yang putus sekolah dilayani	Kab.Kep.Selayar	40 org	30,000,000		40 org	33,000,000
5	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Kelas 7 Semester 1 (Kelas Baru)	Output : Jumlah Masyarakat yang putus sekolah dilayani	Kab.Kep.Selayar	40 org	30,000,000		40 org	33,000,000
6	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Kelas 11 Semester 2 dan Kelas 12 Semester 1 (Kelas Lanjutan)	Output : Jumlah Masyarakat yang putus sekolah dilayani	Kab.Kep.Selayar	40 org	30,000,000		40 org	33,000,000
7	Biaya Operasional Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B, dan Paket C	Output : Jumlah Masyarakat yang putus sekolah dilayani	Kab.Kep.Selayar	3 Paket (a,b, dan c)	50,000,000		3 Paket (a,b, dan c)	55,000,000
8	Hari Aksara Internasional Tk. Provinsi	Output : Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lomba	Kab.Kep.Selayar	40 org	13,054,000		40 org	14,359,400
9	Program Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Output : Jumlah TBM yang dikembangkan	Kab.Kep.Selayar	5 TBM	30,000,000		5 TBM	33,000,000
10	Program Penunntasan Buta Aksara Dasar	Output : Jumlah Buta Aksara Dasar yang dituntaskan	Kab.Kep.Selayar	50 Org	25,000,000		50 Org	27,500,000
11	Pelatihan Tutor KUM	Output : Adanya Tutor KUM Yang lebih Kompetitif	Kab.Kep.Selayar	20 Tutor	20,000,000		20 Tutor	22,000,000
12	Pendataan Kesenataran dan Keaksaraan	Output : Jumlah Peserta Kesenataran dan Keaksaraan yang didata	Kab.Kep.Selayar	40 org	15,000,000		40 org	16,500,000
13	Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF)	Output : Jumlah Peserta Pelatihan Tutor KF	Kab.Kep.Selayar	20 Tutor	20,000,000		20 Tutor	22,000,000
14	Penunjang Operasional ujian nasional paket A, B dan C	Output : Persentase warga belajar yang mengikuti ujian	Kab.Kep.Selayar	40 org	25,000,000		40 org	27,500,000
15	Pengawasan,pemantauan peserta didik dan kelompok belajar	Output : Jumlah Kelompok Belajar yang di pantau	Kab.Kep.Selayar	40 org	25,000,000		40 org	27,500,000
16	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 2 Bontomatene (Lanjutan)	Output : Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	Kab.Kep.Selayar	40 org	30,000,000		40 org	33,000,000
19	Koordinas dan Konsultasi Tentang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Tingkat Propinsi dan Pusat	Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Kab.Kep.Selayar	40 org	9,200,000		40 org	10,120,000
21	Jambore/Apresiasi GTK PAUD-DIKMAS Tingkat Propinsi	Output Jumlah Peserta jambore GTK PAUD DIKMAS yang mengikuti Lomba	Kab.Kep.Selayar	40 org	20,000,000		40 org	22,000,000
22	Kursus Tata Rias Adat Tradisional	Output : Jumlah Binaan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 org	20,000,000		20 org	22,000,000
24	Kursus Tata Boga	Output : Jumlah Binaan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 org	20,000,000		20 org	22,000,000
25	Kursus Menjahit	Output : Jumlah Binaan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 org	20,000,000		20 org	22,000,000
26	Kursus Treatmen Rambut	Output : Jumlah Binaan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	20 org	20,000,000		20 org	22,000,000
27	Pendataan dan Pengembangan Lembaga-lembaga PNF	Output : Jumlah Lembaga-lembaga PNF Yang terdata	Kab.Kep.Selayar	6 lembaga	15,000,000		6 lembaga	16,500,000
28	Keaksaraan Usaha Mandiri	Output : Jumlah Binaan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	10 UM	20,000,000		10 UM	22,000,000
29	Kelompok Belajar Usaha	Output : Jumlah Binaan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan	Kab.Kep.Selayar	10 KBU	15,000,000		10 KBU	16,500,000
11	Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas dengan baik			4,022,254,000			4,424,479,400
1	Pembayaran Tunjangan Terpercil dan Sangat Terpercil Kab. Kepulauan Selayar	Output : Jumlah Penerima Tunjangan Terpercil dan Sangat Terpercil dengan persentase kehadiran diatas 85 %	Kab.Kep.Selayar	890 guru	4,000,000,000		890 guru	4,400,000,000
2	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional guru, Pengawas dan Pamong belajar	Output : jumlah guru yang dinilai angka kreditnya	Kab.Kep.Selayar	1900 orang	22,254,000		1900 orang	24,479,400

02	KESEHATAN					111,993,388,929			122,092,727,822
2	DINAS KESEHATAN					55,470,443,540			61,017,487,894
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran				5,106,536,178			5,617,189,796
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Dinkes & Puskesmas	100%	350,000,000	Dinkes & Puskesmas	100%		385,000,000
2	Penyediaan bahan Bacaan dan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	Dinkes	100%	25,000,000	Dinkes	100%		27,500,000
3	Rapat-rapat konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah undangan/pertemuan yang diikuti	Dinkes	100%	350,000,000	Dinkes	100%		385,000,000
4	Penunjang Administrasi perkantoran	persentase penunjang Administrasi perkantoran	Dinkes	100%	4,381,536,178	Dinkes	100%		4,819,689,796
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Peresentase Sarana dan prasarana yang diadakan				591,372,000			650,509,200
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional		2 unit	50,000,000	Dinkes	2 unit		55,000,000
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Dinkes	100%	155,000,000	Dinkes	100%		170,500,000
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralataan Gedung Kantor	Dinkes/PKM	100%	64,000,000	Dinkes/PKM	100%		70,400,000
4	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	Dinkes	100%	10,000,000	Dinkes	100%		11,000,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan mobil jabatan dinas yang di service	Dinkes	100%	33,000,000	Dinkes	100%		36,300,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang di service	Dinkes	80%	219,000,000	Dinkes	80%		240,900,000
7	Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di pelihara	Dinkes	100%	10,000,000	Dinkes	100%		11,000,000
8	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara	Dinkes	100%	10,000,000	Dinkes	100%		11,000,000
9	Operasional Puskesmas Pasilambena	Terpeliharanya Puskesmas Pasilambena	Dinkes	100%	15,000,000	Dinkes	100%		16,500,000
10	Pemeliharaan Kapal Puskesmas	Tersedianya Operasional Puskesmas	Dinkes	100%	10,372,000	Dinkes	100%		11,409,200
11	Operasional Puskesmas Pasitallu	Tersedianya Operasional Puskesmas Pasitallu	Dinkes	100%	15,000,000	Dinkes	100%		16,500,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					345,000,000			379,500,000
1	Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) fungsional Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat Formal	Dinkes		20,000,000	Dinkes			22,000,000
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Laboratorium Puskesmas	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Laboratorium Puskesmas	Puskesmas	-	25,000,000	Puskesmas	-		27,500,000
3	Pelatihan BTCLS/Penanganan Kegawatdaruratan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan BTCLS/Penanganan Kegawatdaruratan	Dinkes	-	30,000,000	Dinkes	-		33,000,000
4	Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti	Dinkes/Pkm	100%	20,000,000	Dinkes/Pkm	100%		22,000,000
5	Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan	Jumlah Unit Pelayanan Kesehatan yang di lakukan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan	Dinkes/Pkm	-	32,000,000	Dinkes/Pkm	-		35,200,000
6	Bimtek Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	Dinkes/Pkm	100%	20,000,000	Dinkes/Pkm	100%		22,000,000
7	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Tugas dan Capaian Sasaran Kerja Pegawai Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas dan capaian sasaran kerja pegawai tenaga kesehatan	Dinkes/Pkm	-	20,000,000	Dinkes/Pkm	-		22,000,000
8	Rapat Koordinasi Penguatan Peran Organisasi Profesi Kesehatan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	Organisasi Profesi Kesehatan	-	15,000,000	Organisasi Profesi Kesehatan	-		16,500,000
9	Pengawasan dan Pembinaan Sarana Kesehatan Mandiri dan Apotik	Jumlah Sarana yang di Pantau	Dinkes	-	18,000,000	Dinkes	-		19,800,000
10	Pelatihan Manajemen Puskesmas	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	Dinkes/Pkm	-	15,000,000	Dinkes/Pkm	-		16,500,000
11	Konsultasi Program Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Keluar Daerah	Jumlah Konsultasi yang Dilaksanakan	Dinkes	-	10,000,000	Dinkes	-		11,000,000
12	Penyusunan Dokumen Data SDM dan Profil Tenaga Kesehatan Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen yang Disusun	Dinkes	-	15,000,000	Dinkes	-		16,500,000
13	Pemeriksaan Angka Kredit Petugas Fungsional	jumlah petugas fungsional	Donkes/PKM	100%	15,000,000	Donkes/PKM	100%		16,500,000
14	Evaluasi dan Pelaksanaan Tugas dan Capaian Sasaran Kerja Pegawai Tenaga Kesehatan		Dinkes	100%	15,000,000	Dinkes	100%		16,500,000
15	Bimtek penyusunan Renstra & lakip di 14 Puskesmas	terlaksananya Bimtek	14 puskesmas	100%	25,000,000	14 puskesmas	100%		27,500,000
16	Penerapan Standar Pelayanan Masukan (SPM)	terlaksananya Penerapan	14 puskesmas	100%	25,000,000	14 puskesmas	100%		27,500,000
17	Penerapan Aplikasi Aspak		14 puskesmas	100%	25,000,000	14 puskesmas	100%		27,500,000

4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				37,000,000			40,700,000
1	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen Laporan Lakip	DINKES	100%	7,000,000	DINKES	100%	7,700,000
2	Peningkatan Pengelolaan Barang	Jumlah dokumen Aset yang dibuat	DINKES	100%	30,000,000	DINKES	100%	33,000,000
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				34,096,529,742			37,506,182,716
1	Jaminan Persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan jaminan	-	-	445,212,000			489,733,200
4	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Integrasi	Terlaksananya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Integrasi	3805 Jiwa	100%	15,598,348,000	3805 Jiwa	100%	17,158,182,800
5	Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS)	Terlaksananya Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS)		100%	17,295,969,742		100%	19,025,566,716
6	Monitoring Evaluasi Program Yanskestrad di Puskesmas	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program Yanskestrad di Puskesmas	14Puskesmas Daratan	100%	40,000,000	14Puskesmas Daratan	100%	44,000,000
7	Pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri Pemamfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur	Terlaksananya Pembinaan	14 Kelompok	100%	55,000,000	14 Kelompok	100%	60,500,000
8	Dessiminasi Informasi Pelaksanaan Asuhan Mandiri/Self Care Bagi Kader Posyandu dan Dasawisma	Terlaksananya Dessiminasi Informasi Pelaksanaan Asuhan Mandiri /Self Care	2 sarana penyehat	100%		2 sarana penyehat	100%	-
9	Koordinasi dan Monitoring Rujukan Puskesmas Daratan dan Puskesmas Kepulauan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Monitoring Rujukan Puskesmas Daratan dan Puskesmas Kepulauan	16 Puskesmas	100%	50,000,000	16 Puskesmas	100%	55,000,000
10	Operasional Posko Public Centre (PSC)	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Operasional Posko Public Centre	16 Puskesmas	100%	371,000,000	16 Puskesmas	100%	408,100,000
11	Pelayanan Kesehatan Bergerak		5 Kec Pulau	100%	101,000,000	5 Kec Pulau	100%	111,100,000
12	Monitoring dan Evaluasi PIS-PK	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Evaluasi PIS-PK	14 Pkm	100%	20,000,000	14 Pkm	100%	22,000,000
13	Pembinaan Pelayanan Darah	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Darah	14 Pkm	-	20,000,000	14 Pkm	-	22,000,000
14	Kaji Banding Telemedicine		2 kabupaten/Kodya dan 1 Rs Pengampu	100%	50,000,000	2 kabupaten/Kodya dan 1 Rs Pengampu	100%	55,000,000
15	Save Guarding		14 PKM	-	50,000,000	14 PKM	-	55,000,000
6	Program Pengawasan Obat dan Makanan				147,867,500			162,654,250
1	Penyuluhan Keamanan pangan untuk mengelola industri rumah tangga	Terlaksananya kegiatan Keamanan pangan untuk pengelola industri rumah tangga dan penerbitan sertifikat untuk pengelola PIRT	15 Sarana	100%	32,016,500	15 Sarana	100%	35,218,150
2	Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Kualitas dan Mutu pangan menjelang hari raya	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan , pemeriksaan dan pembinaan kualitas dan Mutu pangan menjelang Hari Raya Idul Adha	30 Sarana	100%	23,220,500	30 Sarana	100%	25,542,550
	Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Kualitas dan Mutu pangan menjelang hari Adha	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan , pemeriksaan dan pembinaan kualitas dan Mutu pangan menjelang Hari Raya Idul Adha	30 Sarana	100%	12,630,500	30 Sarana	100%	13,893,550
4	Pengambilan Obat Puskesmas dan Jaringannya	Terlaksananya Pengambilan Obat Obat dan BMHP Program untuk Puskesmas dan Jaringannya			30,000,000			33,000,000
5	Pendataan Sarana BATRA di Puskesmas	Pendataan Sarana Batra di Puskesmas			20,000,000			22,000,000
6	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Penggunaan Obat Rasional Melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)	Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Penggunaan Obat Tradisional Melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)			30,000,000			33,000,000
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				185,000,000			203,500,000
1	Up Date Strata Posyandu (63 posyandu)	Jumlah Posyandu Aktif (Mandiri + Purnama)			30,000,000			33,000,000
2	Pembinan dan Lomba Desa Siaga Aktif Tk. Kabupaten	Jumlah Desa/Kel Siaga Aktif yang Dibina			20,000,000			22,000,000
3	Belanja Cetak (Pengadaan Media Promkes)	Jumlah Media Cetak			20,000,000			22,000,000
4	Peningkatan Program Promosi Kesehatan (Konsultasi)	Jumlah Konsultasi ke Provinsi			15,000,000			16,500,000
5	Orientasi Kader Posyandu				100,000,000			110,000,000
8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				138,084,550			151,893,005
1	Perawatan Anak Balita Gizi Buruk	persentase kasus anak balita gizi buruk yang Mendapat Perawatan						
2	Monitoring dan Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Pkm yang Menerapkan Protap tentang Perbaikan Gizi Masyarakat			30,350,000			33,385,000

3	Pengadaan Pembelian Makanan Balita Khusus Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) (DBH-CHT)		310 Orang	107,734,550		310 Orang	118,508,005
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			4,282,800,000			4,711,080,000
1	Pengambilan Dan Pemeriksaan Sampel Air Dan Makanan	Meningkatnya kualitas air dan makanan yang memenuhi syarat kesehatan		15,000,000			16,500,000
2	Pengadaan Alat, Bahan/Reagen Laboratorium Untuk Pemeriksaan Air Dan Makanan	Jumlah Pemeriksaan Terhadap Keamanan Air dan Makanan		20,000,000			22,000,000
3	Pembinaan Dan Pengawasan Tpm	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan TPM		25,000,000			27,500,000
4	Inspeksi Sanitasi	Persentase Sarana Kesehatan Lingkungan yang Memenuhi Syarat Kesehatan		30,000,000			33,000,000
5	Klinik Sanitasi	Jumlah Klinik Sanitasi yang Dibina		25,500,000			28,050,000
6	Konsultasi Teknis ke Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi ke Provinsi		26,300,000			28,930,000
7	Pembinaan Dan Pengawasan Ttu	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan TTU		50,000,000			55,000,000
8	Pengadaan Kaporit dan Abate	Terlaksananya pengadaan Kaporit dan abate		20,000,000			22,000,000
10	Monev Program Kesehatan Olahraga	Jumlah Monev Program Kesehatan Olahraga		20,000,000			22,000,000
11	Verifikasi Desa Odf	Bertambahnya Jumlah Desa yang ODF		20,000,000			22,000,000
12	Pembinaan Kebugaran Calon Jemaah Haji Tahun 2020	Terlaksananya Pembinaan Kebugaran Calon Jemaah Haji Tahun 2020		15,000,000			16,500,000
13	Pembinaan Kebugaran Asn	Persentase ASN yang Terbina Kebugarannya		15,000,000			16,500,000
14	Pembangunan Jamban Keluarga	Terlaksananya pembangunan Jamban Keluarga menuju Kabupaten ODF		3,116,000,000			3,427,600,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga di desa Bontotangga Kecamatan Bontoharu			50,000,000			55,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Tersebar Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur			100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Desa Jinato			100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Desa Bontosai			100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Kampung Baru Lingkungan matalalang Kecamatan Bontoharu			60,000,000			66,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Desa Lantibongan			100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Dusun Baera dan Suburu Desa Bontotangga			120,000,000			132,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Tersebar Desa Bontojati			150,000,000			165,000,000
-	pembangunan jamban keluarga kec benteng tersebar			100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Desa Lantibongan			150,000,000			165,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Desa Bungaiya kec Bontomatene			150,000,000			165,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga desa polisi kec Bontosikuyu			200,000,000			220,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Dusun Lopi-Lopin Kec Bontosikuyu			150,000,000			165,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Dusun Bontoala dan Dusun Parangia Selatan			150,000,000			165,000,000
-	pembangunan jamban Desa Kayuadi ,Rajuni dan Latondu			300,000,000			330,000,000
-	Pembangunan jamban keluarga desa Bontoburasa Kec .Bontoharu			200,000,000			220,000,000
-	Pembangunan jamban keluarga dusun Bonto Te'ne desa patikarya kec Bontosikuyu			100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Dusun Timoro Desa Layolo			100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Dusun Siholung dan Dusun Balang Kajeng			150,000,000			165,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Dusun Baera Utara			150,000,000			165,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Lembangia Desa Patikarya Kec.Bontosikuyu			100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Kolo Kolo Kel.Putabangun			100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Bontojaya Kel. Putabangun			50,000,000			55,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Desa Kalepadang			50,000,000			55,000,000
-	Pembangunan Jamban Keluarga Desa Tambuna			100,000,000			110,000,000

-	Pembangunan Jamban Keluarga Dusun Lembongan Desa Bontobaru				36,000,000			39,600,000
15	Monev Program UKK				20,000,000			22,000,000
16	Pengadaan APD (alat pelindung diri) untuk pos UKK bagi pekerja				20,000,000			22,000,000
17	Pendamping STBN				25,000,000			27,500,000
18	Monev Kesling,Kesjor				20,000,000			22,000,000
19	Pengelolaan Sampah Medis				100,000,000			110,000,000
20	Operasional Kabupaten Sehat	Terlaksananya Opersional Kabupaten Sehat			600,000,000			660,000,000
21	Dokumen pengelolaan Lingkungan (DPLH)	Terlaksananya Pengelolaan Lingkungan Hidup			100,000,000			110,000,000
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				516,000,000			567,600,000
1	Sosialisasi "Ketuk Pintu"	Tersosialisasinya Penyakit TB di Masyarakat	Kabupaten	75%	11,600,000	Kabupaten	75%	12,760,000
2	Pelaksanaan Ketuk Pintu	Meningkatnya Penemuan Kasus TB Secara Dini di Masyarakat	Fasyankes Masyarakat	-	11,000,000	Fasyankes Masyarakat	-	12,100,000
3	Pelatihan Tenaga Laboratorium dalam Mendeteksi Penyakit Menular	Meningkatnya Keterampilan Tenaga Laboratorium dalam Mendeteksi Penyakit Menular	Puskesmas	-	20,000,000	Puskesmas	-	22,000,000
4	Deteksi Dini Kusta di Masyarkat	Menurunnya Kasus Kusta yang Mengalami Cacat	Masy	100%	18,900,000	Masy	100%	20,790,000
5	Sosialisasi Kusta pada 10 Desa Daratan	Terlaksananya sosialisasi	Masy	-	20,000,000	Masy	-	22,000,000
6	Belanja Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh bagi Tenaga Labororium di Puskesmas Daratan		Nakes	-	15,000,000	Nakes	-	16,500,000
7	Supervisi Program P2 Tifoid ke Puskesmas			100%	6,750,000		100%	7,425,000
8	Supervisi Supportive Program P2 Ispa/			100%	7,750,000		100%	8,525,000
9	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Mendeteksi Malaria bagi Tenaga Kesehatan pada 5 Wilayah Kepulauan	Meningkatnya Keterampilan Petugas dalam Penanganan Penyakit Malaria		-	10,000,000		-	11,000,000
10	Pembentukan dan Pelatihan Tenaga Pos Malaria Desa (POSMALED)	Terlibatnya Masyarakat dalam Penanggulangan Malaria	Masy	-	15,000,000	Masy	-	16,500,000
11	Pelatihan Pembuatan Peta Perindukan Vektor Malaria Bagi Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Terpetakannya Daerah/Lokasi yang Reseptif Nyamuk Malaria	Masy	-	15,000,000	Masy	-	16,500,000
12	Supervisi Supportive Program P2 Malaria di PKM		Masy	100%	20,000,000	Masy	100%	22,000,000
13	Sosialisasi dan Advokasi Hepatitis	Tersosialisasinya Penyakit Hepatitis di Masyarakat dan Nakes	Masyarakat	100%	15,000,000	Masyarakat	100%	16,500,000
14	Pengadaan RDT Hepatitis	Tersedianya RDT Hepatitis di Fasyakes	pkm	-	30,000,000	pkm	-	33,000,000
15	Pengadaan Buku Pedoman Hepatitis	Tersedianya Buku Pedoman Untuk Puskesmas	Pkm	-	15,000,000	Pkm	-	16,500,000
16	Pelatihan VCT bagi Tenaga Kesehatan	Meningkatnya Penemuan Kasus HIV/AIDS dan Keterampilan		-	20,000,000		-	22,000,000
17	Perjalanan Dinas sosialisasi Rabies		Prov	-	15,000,000	Prov	-	16,500,000
18	Sosialisasi HIV/AIDS	Tersosialisasi HIV/AIDS pada Tokoh Agama dan Masyarakat	Masy	100%	15,000,000	Masy	100%	16,500,000
19	Sosialisasi Penyakit Rabies	Tersosialisasinya Bahaya GHP Rabies di Masyarakat	Masy	100%	10,000,000	Masy	100%	11,000,000
20	Pengadaan Vaksin Anti Rabies	Tersedianya VAR di Puskesmas	Puskesmas	-	30,000,000	Puskesmas	-	33,000,000
21	Workshop Sistem Pelaporan Data Program Filariasis dan Kecacingan dengan e-FILCA	Pengelola Kecacingan Melaporkan Program Kecacingan dengan Aplikasi e-FILCA		-	30,000,000		-	33,000,000
22	Monitoring dan Evaluasi Program P2 Kecacingan	Pencatatan dan Pelaporan Berjalan dengan Lancar		100%	10,000,000		100%	11,000,000
23	Pengadaan Logistik Kecacingan	Tersedianya Bahan Pemeriksaan Cacing di Fasyankes	Puskesmas	-	40,000,000	Puskesmas	-	44,000,000
24	Pelatihan Manajemen Layanan Rehidrasi Oral (LROA) Bagi Tenaga Kesehatan	Terampilnya Petugas dalam Penanganan Kasus Diare	Puskesmas	100%	15,000,000	Puskesmas	100%	16,500,000
25	Konsultasi Program P2 di Pusat dan Provinsi	Terlaksananya Konsultasi Program P2 di Kementerian Kesehatan dan Dinkes Provinsi	Prov	-	15,000,000	Prov	-	16,500,000
26	Sosialisasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumentik (1RIG)	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam PSN	Masy	100%	10,000,000	Masy	100%	11,000,000
27	Pengadaan RDT DBD	Tersedianya RDT DBD di PKM	Puskesmas	-	30,000,000	Puskesmas	-	33,000,000
28	Supervisi dan Bimtek Program P2 di Puskesmas	Terlaksananya Monitoring dan Bimbingan Tekhnis Program P2 di Puskesmas	Puskesmas	-	20,000,000	Puskesmas	-	22,000,000
29	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DBH Pajak Rokok)			-	25,000,000		-	27,500,000
30	Pengadaan Alat dan Bahan pengendalian penyakit dan Kesehatan Lingkungan							

11	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				6,377,103,570			7,014,813,927
	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi di Setiap Apotek Puskesmas	Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi di Setiap Apotek Puskesmas			32,132,500			35,345,750
	Pengepakan Obat	Terlaksananya Pengepakan Obat			20,000,000			22,000,000
	Pengambilan Obat Puskesmas dan Jaringannya	Cakupan Pengambilan Obat Puskesmas dan Jaringannya			40,000,000			44,000,000
	Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Terlaksananya Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)			15,000,000			16,500,000
	Kalibrasi alat kesehatan	terpeliharanya alat kesehatan			20,000,000			22,000,000
	Pengadaan Meubileur Puskesmas	Terlaksananya Pengadaan Meubileur Puskesmas			60,000,000			66,000,000
	Pengadaan Alkes	Tersedianya Alat Kesehatan di Sarana Kesehatan			2,000,000,000			2,200,000,000
	Kalibrasi alat kesehatan	terpeliharanya alat kesehatan		100%	146,144,900		100%	160,759,390
	Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	tersedianya bangunan dan sarana prasarana			136,560,720			150,216,792
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya							-
	Pembangunan Baru Pustu Permanen Desa Tambuna				200,000,000			220,000,000
	Pembangunan Pagar Puskesmas Polebungin				150,000,000			165,000,000
	Penataan halaman belakang Puskesmas Polebunging (lanjutan)				200,000,000			220,000,000
	Penataan Halaman Puskesmas Buki				100,000,000			110,000,000
	Pembangunan Pustu Biropa				350,000,000			385,000,000
	Pemb. ruang pertemuan Puskesmas Parangia				200,000,000			220,000,000
	Pemb. ruang pertemuan Puskesmas Bontomatene				250,000,000			275,000,000
	Pembangunan Pagar Pembatas antara Puskesmas Buki dan Kantor Camat				150,000,000			165,000,000
2	Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya							-
	- Rehabilitasi Pustu/Poskesdes Kayu Bauk	Terpeliharanya Gedung Pustu/Poskesdes			150,000,000			165,000,000
	- Rehabilitasi Pustu Bontodatara	Terpeliharanya Pustu Bontodatara			200,000,000			220,000,000
	- Rehabilitasi Pustu Lambongan	Terpeliharanya Pustu Lambongan			200,000,000			220,000,000
	- Rehabilitasi Pustu Mare-mare	Terpeliharanya Pustu Mare-mare			300,000,000			330,000,000
	- Rehab Pustu Bontonumpa	Terpeliharanya Gedung Pustu			200,000,000			220,000,000
	- Rehab Pagar Belakang Puskesmas Ujung Jampea				100,000,000			110,000,000
	- Rehab Pustu Desa Nyiur Indah				300,000,000			330,000,000
	- Rehab. ruang rawat inap Puskesmas Ujung				500,000,000			550,000,000
3	Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan (DBH Pajak Rokok)							-
	Pembangunan Pustu Polassi				307,265,450			337,991,995
	Pembangunan Selasar Puskesmas Parangia	teredianya selasar puskesmas parangia			50,000,000			55,000,000
	Rehab Poskesdes Kadempa	Terpeliharanya Gedung Poskesdes						
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				7,500,000			8,250,000
1	Bimbingan Teknis bagi pengelola Lansia	Jumlah Pengelola lansia yang dibina	Kabupaten	14	7,500,000	Kabupaten	14	8,250,000
13	Program pelayanan Kesehatan Ibu				101,850,000			112,035,000
1	Audit Maternal Perinatal (AMP)	persentase keberhasilan pemanfaatan kohortibu, bayi dan balita bagi bidan pustu	Kabupaten	-	30,000,000	Kabupaten	-	33,000,000
2	Pembahasan PWS KIA Tingkat Kabupaten	persentase cakupan PWS KIA	Kabupaten	0.9	35,850,000	Kabupaten	0.9	39,435,000
3	Monitoring & Evaluasi Program KIA/KB	Persentase pelayanan kesehatan Ibu dan anak	Kabupaten	0.9	21,000,000	Kabupaten	0.9	23,100,000
4	Peningkatan Program Kegiatan KIA/GIZI (DBHP ROKOK)		Kabupaten		15,000,000	Kabupaten		16,500,000
14	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai				3,100,800,000			3,410,880,000
1	Penyediaan Insentif Tenaga Kesehatan	Terlaksananya penyediaan Insentif Tenaga Kesehatan	14	440 ptgs	3,100,800,000	14	440 ptgs	3,410,880,000
15	Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular				437,000,000			480,700,000

1	Program Kesehatan Haji	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jemaah Calon Haji Secara Komperhensif			3,025,000			3,327,500
2	Pengembangan Posbindu di Desa/kel	Meningkatnya Cakupan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi usia Produktif dan Lansia			44,621,000			49,083,100
3	Supervisi Program Keswa	Meningkatnya Cakupan Sasaran Pengetahuan dan Keterampilan dalam Mengelola Program			3,025,000			3,327,500
4	Konsultasi Tekhnis Program	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Terkait Program P2PTM dan Keswa			45,980,000			50,578,000
5	Konsultasi Program PTM				10,000,000			11,000,000
6	Supervisi Program P2PTM Kesehatan Indera				5,000,000			5,500,000
7	Posbindu di Tempat Kerja				25,000,000			27,500,000
8	Supervisi Program P2TM ke Puskesmas				3,025,000			3,327,500
9	Pengadaan Spekulum untuk Deteksi IVA				5,000,000			5,500,000
10	Pengadaan Alat Tes Gula Darah Merk Accu Check				1,936,000			2,129,600
11	Pengadaan Alat Tes Kolesterol Merk Nesco				1,694,000			1,863,400
12	Pengadaan Alat Tes Asam Urat Merk Nesco				1,694,000			1,863,400
13	Konsultasi Program ke Pusat/Kemenkes				5,000,000			5,500,000
14	Sosialisasi Surveilans AFP dan PD3I Lainnya	Terlaksananya Surveilans AFP dan PD3I Lainnya di Puskesmas			25,000,000			27,500,000
15	Penyelidikan dan Penanggulangan KLB	KLB Ditangani < 24 Jam			10,000,000			11,000,000
16	Pelacakan Kasus PD3I	Dilakukan Pelacakan dan Upaya Penemuan Dini Kasus Kasus PD3I di Desa Berisiko			10,000,000			11,000,000
17	Monitoring dan Evaluasi Data Sistem Surveilans	Terlaksananya Monev Data Sistem Surveilans			30,000,000			33,000,000
18	Pengambilan Logistik dan Vaksin Program Imunisasi				30,000,000			33,000,000
19	Pelacakan KIPI Serius dan Non Serius				12,000,000			13,200,000
20	Pemantauan Kualitas Vaksin	Tersedianya Vaksin Program Imunisasi di Puskesmas dengan Kualitas yang baik			5,000,000			5,500,000
21	Sosialisasi Program Imunisasi bagi Kelompok Anti (Resisten) Imunisasi	Tersosialisasinya Program Imunisasi bagi Kelompok Resisten			20,000,000			22,000,000
22	Pelatihan Kordinator dalam rangka Penatalaksanaan Program Imunisasi				20,000,000			22,000,000
23	Pelatihan Petugas Imunisasi yang tersertifikat				15,000,000			16,500,000
24	Validasi Data Pencapaian UCI desa/Kelurahan	Tervalidasinya data sasaran untuk Pencapaian UCI			15,000,000			16,500,000
25	Supervisi Supportif Program Imunisasi				20,000,000			22,000,000
26	Pelatihan Petugas Imunisasi Tersertifikat	Terlaksananya Pelatihan Petugas Imunisasi yang Tersertifikat			15,000,000			16,500,000
27	Deteksi IVA dan Kanker Payudara				15,000,000			16,500,000
28	Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DBH PAJAK ROKOK)				40,000,000			44,000,000
3	RSUD K.H. HAYYUNG				56,522,945,389			61,075,239,928
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec Bontoharu		7,315,000,000	Kec Bontoharu		8,046,500,000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Tahun		1,815,000,000		1 Tahun	1,996,500,000
2	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		1 Tahun		550,000,000		1 Tahun	605,000,000
3	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran		1 Tahun		4,950,000,000		1 Tahun	5,445,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,699,500,000			1,869,450,000
1	Pengadaan Meubeler				275,000,000			302,500,000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				165,000,000			181,500,000
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				275,000,000			302,500,000
4	Pengadaan Alat Non Medis				132,000,000			145,200,000
5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				550,000,000			605,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas				27,500,000			30,250,000

7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas				275,000,000			302,500,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				368,500,000			405,350,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal				302,500,000			332,750,000
2	Pemeriksaan Angka Kredit Petugas Fungsional				33,000,000			36,300,000
3	Survei Pelayanan Publik				33,000,000			36,300,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			204,500,000			224,950,000
1	Penyusunan Laporan Program dan Perencanaan	Tersedianya laporan program dan perencanaan			20,000,000			22,000,000
2	Penyusunan Profil	Tersedianya profil			15,000,000			16,500,000
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun			15,000,000			16,500,000
4	Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Ikhtiar dan Kinerja	Tersedianya laporan capaian realisasi ikhtiar dan kinerja			10,000,000			11,000,000
5	Penyusunan SPM RS	Tersedianya SPM RS			16,500,000			18,150,000
6	Penyusunan HBL	Tersedianya laporan HBL			15,000,000			16,500,000
7	Satuan Pengawasan Internal (SPI)	Terlaksannnya satuan pengawasan internal			88,000,000			96,800,000
8	Penyusunan Ranperda Tarif Pelayanan Kesehatan	Tersedianya ranperda tarif pelayanan kesehatan			25,000,000			27,500,000
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat			28,505,133,395			30,255,646,735
1	Pelayanan BLUD				27,505,133,395			30,255,646,735
2	Pelayanan Masyarakat Miskin	Terselenggaranya pelayanan masyarakat miskin			1,000,000,000			1,100,000,000
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			632,500,000			695,750,000
1	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				27,500,000			30,250,000
2	Klinik TKIP dan PDP				27,500,000			30,250,000
3	Pengolahan Limbah Medis RS				577,500,000			635,250,000
7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit			5,285,500,000			5,814,050,000
1	Operasional BLUD RS				3,300,000,000			3,630,000,000
2	Operasional UTRS/Bank Darah				550,000,000			605,000,000
3	Akreditasi				605,000,000			665,500,000
4	Promosi Kesehatan				110,000,000			121,000,000
5	Pelayanan Rekam Medik Pasien				555,500,000			611,050,000
6	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien				165,000,000			181,500,000
8	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	Terwujudnya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata			3,717,500,000			4,089,250,000
1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)				467,500,000			514,250,000
2	Pengadaan Alat Kesehatan				550,000,000			605,000,000
3	Pembangunan Gedung				1,100,000,000			1,210,000,000
4	Penataan Parkir				110,000,000			121,000,000
5	Pengadaan Linen				220,000,000			242,000,000
6	Pembangunan Selasar				500,000,000			550,000,000
7	Pembangunan Rumah Dinas Dokter Ahli				770,000,000			847,000,000
9	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata			1,073,671,994			1,181,039,193
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit				330,000,000			363,000,000

2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit				330,000,000			363,000,000
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Ambulance/ Jenazah				173,250,000			190,575,000
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala IPAL/ Incenerator				75,421,994			82,964,193
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Sakit				165,000,000			181,500,000
10	Program Pelayanan Kesehatan Gratis				100,000,000			110,000,000
1	Pelayanan Masyarakat Miskin	Terselenggaranya pelayanan masyarakat miskin			100,000,000			110,000,000
11	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Pegawai			7,621,140,000			8,383,254,000
1	Penyediaan Tunjangan Tenaga Kesehatan			1 Paket	7,621,140,000		1 Paket	8,383,254,000
03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				97,060,000,000			106,766,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				97,060,000,000			106,766,000,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,200,000,000			3,520,000,000
1	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan penunjang administrasi perkantoran	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	2,000,000,000		12 Bulan	2,200,000,000
2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kab. Kep. Selayar	300 Kali	800,000,000		300 Kali	880,000,000
3	Penunjang Operasional UPTD Kep. Wil. I	Jumlah UPTD yang membutuhkan penunjang operasional	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	100,000,000		1 Unit	110,000,000
4	Penunjang Operasional UPTD Kep. Wil. II	Jumlah UPTD yang membutuhkan penunjang operasional	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	100,000,000		1 Unit	110,000,000
5	Penyusunan Revisi RPI2JM Kab. Kep. Selayar	Jumlah UPTD yang membutuhkan penunjang operasional	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	100,000,000		1 Unit	110,000,000
6	Pelaksanaan hari bakti PU	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan hari bakti pu	Kab. Kep. Selayar	1 kegiatan	100,000,000		1 kegiatan	110,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana Prasarana dan Fasilitas KerjaAparatur yang Mendukung Kinerja			455,000,000			500,500,000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Kab. Kep. Selayar	2 unit	50,000,000		2 unit	55,000,000
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	4 Unit	50,000,000		100%	55,000,000
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	3 Unit	30,000,000		100%	33,000,000
4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Kab. Kep. Selayar	51 Unit	75,000,000		100%	82,500,000
5	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Luas Gedung dan Halaman gedung yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	964 m ²	100,000,000		100%	110,000,000
6	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	56 Unit	100,000,000		100%	110,000,000
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	144 Unit	50,000,000		100%	55,000,000
								-
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun Secara Tepat, akurat dan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah			50,000,000			55,000,000
1	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	11,000,000
2	Penyusunan laporan aset	Jumlah laporan aset yang tersusun	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	10,000,000		1 Laporan	11,000,000
3	Penyusunan tim tindak lanjut LHP OPD	Jumlah laporan LAKIP yang tersusun	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	20,000,000		1 Dokumen	22,000,000
4	Penyusunan Lakip	Jumlah laporan LAKIP yang tersusun	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	11,000,000
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Jalan dan Jembatan			57,150,000,000			62,865,000,000
A	Pembangunan / Peningkatan Jalan Kabupaten	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik			55,800,000,000			61,380,000,000
	Dana Alokasi Umum (DAU)				55,800,000,000			61,380,000,000
1	Peningkatan Jalan Ruas Kartika/Fatmawati			100%	150,000,000		100%	165,000,000

2	Peningkatan Jalan Ruas Balang Hibur - Matalalang		100%	600,000,000		100%	660,000,000
3	Peningkatan Jalan Ruas Parang-Bonelambere		100%	16,000,000,000		100%	17,600,000,000
4	Peningkatan Jalan Ruas Benteng - Mangatti		100%	7,000,000,000		100%	7,700,000,000
5	Peningkatan jalan Barro - Unjuriya		100%	1,000,000,000		100%	1,100,000,000
6	Peningkatan Jalan Ruas Biku - Tanabau Kenang-Kenang		100%	400,000,000		100%	440,000,000
7	Peningkatan Jalan Rea-Rea - Hulu		100%	800,000,000		100%	880,000,000
8	Peningkatan Jalan Buttu - Hulu Laiyolo		100%	1,500,000,000		100%	1,650,000,000
9	Peningkatan Jalan Lingkar Tongke-tongke - Pondang		100%	800,000,000		100%	880,000,000
10	Peningkatan/Pengaspalan Jalan alternatif Tile-tile Utara ke Tile-tile Selatan		100%	200,000,000		100%	220,000,000
11	Pembangunan Jalan Lingkar Dusun Baera Utara Desa Bontotangga		100%	200,000,000		100%	220,000,000
12	Peningkatan Jalan Ruas Limbo - One Malangka		100%	3,000,000,000		100%	3,300,000,000
13	Peningkatan Jalan Ruas Bonerate - Miantu'u		100%	7,000,000,000		100%	7,700,000,000
14	Peningkatan Jalan Ruas Bonelambere - Timoro		100%	6,000,000,000		100%	6,600,000,000
15	Peningkatan Jalan Ruas Timoro - Bangko		100%	4,000,000,000		100%	4,400,000,000
16	Peningkatan Jalan Ruas Polebungin - Tihoro		100%	3,000,000,000		100%	3,300,000,000
17	Peningkatan Jalan Ruas Karumpa Barat - Karumpa Timur		100%	2,000,000,000		100%	2,200,000,000
18	Pengaspalan/Hotmix Jalan Ruas Erasa - Tanete Pale		100%	1,500,000,000		100%	1,650,000,000
19	Hotmix Ruas Bandara - Padang (Lanjutan)		100%	400,000,000		100%	440,000,000
20	Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Pulau Selayar		100%	100,000,000		100%	110,000,000
21	DED Pembangunan Jalan Ruas Ngapaloka - Bikoti			150,000,000			165,000,000
22	Pengelolaan kegiatan						
23	Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas struktur jalan (Khusus Kabupaten) Ruas Todakke - Ereposo (4,3 Km)						
24	Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas struktur jalan (Khusus Kabupaten) Ruas Buranga - Kawau (2,4 Km)						
25	Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas struktur jalan (Khusus Kabupaten) Hulu - Jammeng (1 Km)						
	Peningkatan Jalan Kabupaten						
1	Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas struktur jalan (Khusus Kabupaten) Ruas Todakke - Ereposo (4,3 Km)						
2	Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas struktur jalan (Khusus Kabupaten) Ruas Buranga - Kawau (2,4 Km)						
3	Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas struktur jalan (Khusus Kabupaten) Hulu - Jammeng (1 Km)						
B	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan kabupaten yang terbangun		1,350,000,000			1,485,000,000
	DAU			1,350,000,000			1,485,000,000
1	Pembangunan Jembatan Baru Bonehalang						
2	Pembangunan Jembatan Sungai Kadempa - Tanabau Tiju Kec. Bontomanai		100%	200,000,000		100%	220,000,000
3	Pembangunan jembatan baru Suburu			200,000,000			220,000,000
4	Pembangunan Jembatan baru Garassi			250,000,000			275,000,000
5	Pembangunan/peningkatan Jembatan Latodok			250,000,000			275,000,000
6	Pembangunan/ peningkatan Jembatan Kalautowa			250,000,000			275,000,000
7	Pembangunan/peningkatan Jembatan Sampang			200,000,000			220,000,000
5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Jalan dan Jembatan yang terpelihara		2,470,000,000			2,717,000,000
A	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan		1,600,000,000			1,760,000,000
	DAU			1,600,000,000			1,760,000,000
1	Pemeliharaan Jalan Kemakmuran		100%	200,000,000		100%	220,000,000
2	Pemeliharaan Jalan Ruas Lembang Mate'ne - Taddu		100%	200,000,000		100%	220,000,000

3	Pemeliharaan Jalan Gollek-Bali'ra		100%	200,000,000		100%	220,000,000
4	Pemeliharaan Jalan Ruas Lebo - Ledong		100%	300,000,000		100%	330,000,000
5	Pemeliharaan Jalan Ruas Joong - Polebunging		100%	500,000,000		100%	550,000,000
6	Pemeliharaan Jalan Baturibullung - Posi		100%	200,000,000		100%	220,000,000
	Pemeliharaan Jalan						
1	Pemeliharaan Berkala Jalan (Khusus Kabupaten) Ruas Karajaang - Baturapa (4,2 Km)						
2	Pemeliharaan Berkala Jalan (Khusus Kabupaten) Ruas Bangko - Bonelambere (3,9 Km)						
3	Pemeliharaan Berkala Jalan (Khusus Kabupaten) Ruas Buranga - Garaupa Raya (5,3 Km)						
B	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	Prosentase Jembatan yang terpelihara dan berfungsi		400,000,000			440,000,000
	Dana Alokasi Umum (DAU)			400,000,000			440,000,000
1	Pemeliharaan Jembatan Tanabau Tenro						
2	Pemeliharaan Rutin Jembatan						
3	Pemeliharaan Jembatan Bua-bua 2 (Ahmad Yani)		100%	100,000,000		100%	110,000,000
4	Rehabilitasi Jembatan Garassik			300,000,000			330,000,000
C	Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan	Tersedianya bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung jalan		470,000,000			517,000,000
1	Talud Penahan Tanah Bontotinggi - Bontosale Desa Polebunging		100%	150,000,000		100%	165,000,000
2	Penimbunan Bahu Jalan Desa Bontomarannu		100%	150,000,000		100%	165,000,000
3	Pembangunan Tanggul Penahan Tanah Jalan Lingkar Dusun Bontonumpa dan Selamaju		100%	70,000,000		100%	77,000,000
4	Tanggul Pengaman Jalan Dusun Boritta		100%	100,000,000		100%	110,000,000
6	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Tersedianya Jalan dan Jembatan desa		4,325,000,000			4,757,500,000
A	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Tersedianya Jalan dan Jembatan yang menghubungkan		4,325,000,000			4,757,500,000
	Wilayah Daratan			4,325,000,000			4,757,500,000
1	Rehab Jalan Dan Jembatan Lingk. Tabang Baru Kel. Putabangun		100%	200,000,000		100%	220,000,000
2	Peningkatan Jalan Ke Perumahan Regency Samping Balai Karantina		100%	300,000,000		100%	330,000,000
3	Pembangunan Jalan Rabat Beton di Jl. Ahmad Yani			200,000,000			220,000,000
4	Rabat Beton Jalan Kampung Tallayya dari Sappadan Desa Lalangbata		100%	100,000,000		100%	110,000,000
5	Pembangunan Rabat Beton Barat Lambongan - Bontona Saluk (Lanjutan)		100%	100,000,000		100%	110,000,000
6	Pembangunan jalan setapak depan kantor Desa Parak			100,000,000			110,000,000
7	Pembangunan Setapak Jl. Andi Matja Amirullah Poros ke Rumah Sakit Kel. Bontobangun		100%	100,000,000		100%	110,000,000
8	Hotmix Kantor Gabungan Dinas-dinas		100%	100,000,000		100%	110,000,000
9	Hotmix Kantor Dinas Kesehatan		100%	100,000,000		100%	110,000,000
10	Hotmix Kantor Dinas Sosial		100%	100,000,000		100%	110,000,000
11	Pengaspalan Jalan Samping PU (lanjutan)		100%	100,000,000		100%	110,000,000
12	Peningkatan Jalan Dalam Lingkar Rumah Sakit KH.Hayyung		100%	200,000,000		100%	220,000,000
13	Pembangunan Jalan Rabat Beton Perumahan Norsyah		100%	100,000,000		100%	110,000,000
14	Lanjutan Rehabilitasi Jalan Desa & Pembangunan Drainase Dusun Pajalaiya Desa Barugaia		100%	100,000,000		100%	110,000,000
15	Pembangunan Jalan Desa (Desa Onto)		100%	100,000,000		100%	110,000,000
16	Pembangunan Jalan Kuburan Opu Bonto			200,000,000			220,000,000
17	Jalan dari Makam We Tenri Dio ke Benteng Pertahanan, rea-rea		100%	100,000,000		100%	110,000,000
18	Perintisan Jalan Hulu - Hara Desa Harapan			150,000,000			165,000,000

19	Perintisan Jalan Ruas Padang Oge Desa Kalepadang		100%	150,000,000		100%	165,000,000
20	Perintisan Jalan di bagian Barat Dusun Suburu			100,000,000			110,000,000
21	Perintisan Jalan Sangkulu-kulu Kec. Bontosikuyu			200,000,000			220,000,000
22	Pembangunan Rabat Beton Dusun Leppe			100,000,000			110,000,000
23	Pembangunan Jalan Rabat Beton Tanabau Lengak Desa Kaburu		100%	75,000,000		100%	82,500,000
24	Perintisan Jalan Ruas Tanatappu - Timbula Dusun Binanga Benteng (lanjutan)			75,000,000			82,500,000
25	Pembangunan Rabat Beton Dusun Ujung Loe Desa Binanga Sombaiya (lanjutan)			75,000,000			82,500,000
26	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Bontomanai Desa Bontosunggu		100%	100,000,000		100%	110,000,000
27	Rehabilitasi Jalan Setapak Kampung Tenro dan Kampung Munte Desa Tambolongan		100%	200,000,000		100%	220,000,000
28	Rehabilitasi Jalan setapak Dusun Letta Desa Polassi		100%	200,000,000		100%	220,000,000
29	Pemeliharaan Jalan Rabat Puskesmas Desa Tanete		100%	100,000,000		100%	110,000,000
30	Pembangunan Rabat Beton Desa Tamalanrea		100%	100,000,000		100%	110,000,000
31	Pengaspalan Jalan Tani Pattingalloang			100,000,000			110,000,000
32	Rehabilitasi Jalan Setapak Dalam Desa Barugaia			100,000,000			110,000,000
33	Pembangunan Jembatan Dusun Binanga Benteng Desa Binanga Sombaiya		100%	150,000,000		100%	165,000,000
34	Rehabilitasi Jembatan Lingkungan Tabang Baru dekat Pustu Kel. Putabangun		100%	50,000,000		100%	55,000,000
	Wilayah Kepulauan			3,250,000,000			3,575,000,000
1	Pemb. Jalan Desa Sambali			200,000,000			220,000,000
2	Pemb. Jalan poros Desa Sambali (Laratu) Miantuu Desa Lamantu			200,000,000			220,000,000
3	Rabat Beton Menuju Bendungan/Cakdam Dusun Dodak Desa Masungke			100,000,000			110,000,000
4	Rabat Beton Labuang Marege Desa Maminasa			150,000,000			165,000,000
5	Rehab Jalan Setapak Depan Balai Pertemuan Desa Tambuna		100%	100,000,000		100%	110,000,000
6	Peningkatan Jalan Biropa Tanjung Pandang Kec. Pasimasunggu Timur		100%	150,000,000		100%	165,000,000
7	Pembangunan Jembatan Latokdok Barat Kec. Pasilambena		100%	100,000,000		100%	110,000,000
8	Pembangunan Jembatan Ke Pesantren Marege Utara Desa Maminasa		100%	250,000,000		100%	275,000,000
9	Rabat Beton Ruas Malengo - Waiki Desa Sambali (lanjutan)		100%	100,000,000		100%	110,000,000
10	Rabat Beton Ruas Limbo Selatan - Sumur Jawa (lanjutan)		100%	200,000,000		100%	220,000,000
11	Pembangunan Jalan Ke Te'e naga Desa Majapahit		100%	200,000,000		100%	220,000,000
12	Pembukaan Jalan Laole-Te'e La Baso Desa Majapahit		100%	200,000,000		100%	220,000,000
13	Pembangunan Jalan baru Dari Jambu Ke Para Desa Majapahit		100%	200,000,000		100%	220,000,000
14	Pembukaan Jalan Baru dari Fungka ke Burungo		100%	200,000,000		100%	220,000,000
15	Pembangunan/Pengaspalan Jalan Dusun Parang-Perumaang-Erelompa		100%	200,000,000		100%	220,000,000
16	Perintisan Jalan Tanjung Ringgi		100%	200,000,000		100%	220,000,000
17	Pembangunan jalan Alternatif Dusun perumaang Kec. Pasimasunggu Timur		100%	200,000,000		100%	220,000,000
18	Pembangunan Jalan Rabat Beton Kec. Pasimasunggu Timur		100%	200,000,000		100%	220,000,000
19	Rabat Beton Dalam Kota Lamantu		100%	100,000,000		100%	110,000,000
7	Program Pemrograman dan Penganggaran, Perencanaan Teknis dan Penilaian Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum	Tersedianya Program Kerja, Data Teknis, Dokumen perencanaan teknis dan tingkat pelayanan infrastruktur PU		4,110,000,000			4,521,000,000
A	Perencanaan dan Penganggaran	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran		350,000,000			385,000,000
1	Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran		100%	125,000,000		100%	137,500,000
2	Benchmarking Pemrograman			125,000,000			137,500,000

3	Penyusunan Rencana Kerja		100%	60,000,000		100%	66,000,000
4	Forum OPD		100%	20,000,000		100%	22,000,000
5	Sosialisasi capaian program Dinas PUTR		100%	20,000,000		100%	22,000,000
B	Penyusunan database infrastruktur pekerjaan	Tersedianya Sistem Informasi sistem informasi dan database prasarana pekerjaan umum		330,000,000			363,000,000
1	Penyusunan Data Dasar Pengaman Pantai		100%	100,000,000		100%	110,000,000
2	Penyusunan Data Dasar Drainase dalam Kota Benteng		100%	20,000,000		100%	22,000,000
3	Penyusunan Data Dasar Sanitasi		100%	50,000,000		100%	55,000,000
4	Penyusunan Data Dasar Air Bersih		100%	50,000,000		100%	55,000,000
5	Penyusunan laporan LPPD		100%	10,000,000		100%	11,000,000
6	Survey kebutuhan air bersih untuk industri			100,000,000			110,000,000
C	Pengumpulan data teknis dan informasi sebagai acuan perencanaan teknis dan penelitian	Tersedianya data teknis dan informasi sebagai acuan perencanaan teknis dan penelitian		425,000,000			467,500,000
1	Pengumpulan data teknis hasil Musrenbang		100%	100,000,000		100%	110,000,000
2	Pengukuran Debit Sumber Air Sungai dan Mata Air		100%	75,000,000		100%	82,500,000
3	Kunjungan Lapangan Perkembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum		100%	100,000,000		100%	110,000,000
4	Pembuatan WebSite Dinas PUTR		100%	50,000,000		100%	55,000,000
5	Pengukuran Pasang Surut		100%	100,000,000		100%	110,000,000
D	Perencanaan Teknis	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis pembangunan prasarana		2,775,000,000			3,052,500,000
1	Koordinasi Perencanaan Teknis		100%	50,000,000		100%	55,000,000
2	Evaluasi perencanaan teknis		100%	50,000,000		100%	55,000,000
3	Survey Investigasi Desain		100%			100%	-
-	SID Pembangunan Breakwater Pantai Appabatu - Parak		100%	350,000,000		100%	385,000,000
-	SID Pengendalian Sedimen Pantai Tambuna		100%	250,000,000		100%	275,000,000
-	SID Pembangunan Embung Balang Pitung Desa Ma'minasa Kec. Pasmasinggu		100%	200,000,000		100%	220,000,000
-	SID Pengendalian Sedimen Pantai Kayuadi		100%	250,000,000		100%	275,000,000
-	SID Pembangunan Embung Pattumbukang 2 Kec. Bontosikuyu		100%	210,000,000		100%	231,000,000
-	SID Pembangunan Embung Timbula Bontomarannu Kec. Bontomanai		100%	210,000,000		100%	231,000,000
-	SID Pembangunan Embung Liaganda Kec. Pasilambena		100%	210,000,000		100%	231,000,000
4	Detail Desain						-
-	DED Bangunan Akuifer Buatan Simpanan air hujan dan jaringan di Pulau Tambolongan, Polasi dan Bahuluang		100%	110,000,000		100%	121,000,000
-	SID Pengendalian Sedimen Pantai Tambuna		100%	110,000,000		100%	121,000,000
-	SID Pengendalian Sedimen Pantai Kayuadi		100%	105,000,000		100%	115,500,000
-	DED Bangunan Akuifer Buatan Simpanan air hujan dan jaringan di Kec. Pasmarannu		100%	105,000,000		100%	115,500,000
-	DED Bangunan Akuifer Buatan Simpanan air hujan dan jaringan di Pulau Pasi Tanete		100%	105,000,000		100%	115,500,000
-	DED Pembangunan instalasi pengolahan air sangat sederhana (IPASS) di kec. Bontomanai		100%	105,000,000		100%	115,500,000
-	DED Pembangunan IPAL WetLand Biocord di Kota Benteng (construsted wetland type horizontal subsurface flow)			105,000,000			115,500,000
-	DED Pembangunan IPAL terpusat kawasan pemukiman kawasan Kelurahan Benteng Selatan			100,000,000			110,000,000
-	Perencanaan Teknis rehabilitasi gedung dan penataan halaman kantor Inspektorat Kabupaten.			50,000,000			55,000,000
-	DED Penataan Pantai Jalan Soekarno Hatta Bagian Selatan			50,000,000			55,000,000
-	DED Penataan Ruang Terbuka Publik di Jalan Saparuddin Bagian Barat (Dekat Jembatan)			50,000,000			55,000,000
E	Penilaian Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum	Tersedianya Dokumen Tingkat Pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum		230,000,000			253,000,000
-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan		100%	100,000,000		100%	110,000,000

-	Koordinasi Monev		100%	50,000,000		100%	55,000,000
-	Penyusunan SPM		100%	15,000,000		100%	16,500,000
-	Sosialisasi Program Kerja		100%	50,000,000		100%	55,000,000
-	Evaluasi RPJMD, Renstra dan Renja		100%	15,000,000		100%	16,500,000
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tersedianya Air Irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada		1,255,000,000			1,380,500,000
A	Pembangunan Jaringan Irigasi			730,000,000			803,000,000
	Dana Alokasi Umum (DAU)			730,000,000			803,000,000
1	Pembangunan Intake dan Jaringan Irigasi Desa Kembang Ragi		100%	100,000,000		100%	110,000,000
2	Pembangunan Irigasi Bandai Benteng Jamea			100,000,000			110,000,000
3	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Galung Nasara Dusun Eremata		100%	130,000,000		100%	143,000,000
4	Pembangunan Jaringan irigasi D.I. Mare-mare		100%	100,000,000		100%	110,000,000
5	Pembangunan Jaringan Irigasi Pahabalo Desa Labuang Pamajang Kec. Pasimasunggu		100%	100,000,000		100%	110,000,000
6	Reviuw Data Daerah Irigasi Kecamatan Pasimasunggu Timur		100%	100,000,000		100%	110,000,000
7	Perencanaan Teknis DAK Irigasi Tahun 2021		100%	100,000,000		100%	110,000,000
B	Peningkatan Jaringan Irigasi			350,000,000			385,000,000
	DAU			350,000,000			385,000,000
1	Peningkatan Jaringan Irigasi Dusun Erelompa Desa Bontomalling Kec. Pasimasunggu Timur		100%	150,000,000		100%	165,000,000
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa dari Bendungan ke Lokasi Persawahan Kajuanging Desa Massungke		100%	200,000,000		100%	220,000,000
B	Rehabilitasi Jaringan Irigasi			-			-
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Binanga Parra III						
C	OP Jaringan Irigasi			175,000,000			192,500,000
1	OP Jaringan Irigasi		100%	100,000,000		100%	110,000,000
2	Survey AKNOP Jaringan Irigasi		100%	75,000,000		100%	82,500,000
9	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	tersedianya prasarana SDA untuk memenuhi kebutuhan air baku		200,000,000			220,000,000
A	Pemeliharaan dan rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya			200,000,000			220,000,000
1	Pemeliharaan Embung Mini		100%	200,000,000		100%	220,000,000
10	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tingkat Pemenuhan Air Baku (Rumah tangga dan industri)		920,000,000			1,012,000,000
A	Peningkatan distribusi penyediaan air baku			920,000,000			1,012,000,000
1	Pembangunan intake dan tata air baku dusun batu sobbolo Desa Labuang Pamajang			300,000,000			330,000,000
2	Pembangunan intake dan tata air baku Desa Laiyolo			300,000,000			330,000,000
3	Pembangunan intake dan tata air baku Bikoti		100%	300,000,000		100%	330,000,000
4	Koordinasi dan penunjang kegiatan			20,000,000			22,000,000
11	Program Pengendalian Banjir	Proporsi Pantai Yang Aman dari pengaruh erosi dan abrasi		4,200,000,000			4,620,000,000
A	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai			1,700,000,000			1,870,000,000
-	Pembangunan Pengaman Pantai Teluk Kampe Desa Teluk Kampe		100%	150,000,000		100%	165,000,000
-	Pengaman Pantai Dusun Kayuangan Desa Massungke		100%	125,000,000		100%	137,500,000
-	Penambahan Ketinggian Tanggul Belakang Masjid Bonto Datok		100%	100,000,000		100%	110,000,000
-	Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Dusun Barugaiya		100%	200,000,000		100%	220,000,000
-	Tanggul Penahan Ombak Parak Selatan Desa Parak		100%	100,000,000		100%	110,000,000
-	Pembangunan Tanggul Penahan Ombak di Pasi Desa Menara Indah		100%	100,000,000		100%	110,000,000
-	Pembangunan tanggul Penahan Ombak Dusun Panaikang Desa Barat Lambongan		100%	75,000,000		100%	82,500,000

	-	Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Dusun Likbo Desa Parak			100%	100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Dusun Letta Desa Polassi Kec. Bontosikuyu (lanjutan)			100%	100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Dusun Lemba Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu			100%	100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Dusun Biropak Desa Bontomalling (lanjutan)			100%	150,000,000		100%	165,000,000
	-	Kubus Pemecah Ombak Pantai Bagian Utara Desa Nyiur Indah			100%	150,000,000		100%	165,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Tarupa Kec. Takabonerate			100%	150,000,000		100%	165,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Mangarabombang Kel. Bontobangun			100%	100,000,000		100%	110,000,000
B		Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana pengaman pantai				2,500,000,000			2,750,000,000
	-	Pembangunan Pengaman Pantai Desa Majapahit							
	-	Rehab Tanggul Penahan Ombak Lingk. Bua-bua Barat (Lanjutan)				200,000,000			220,000,000
	-	Rehabilitasi pengaman pantai Desa Komba-komba				200,000,000			220,000,000
	-	Rehabilitasi pengaman pantai Kampung Kayuangin				200,000,000			220,000,000
	-	Rehabilitasi pengaman pantai Binanga Sombaiya				150,000,000			165,000,000
	-	Rehabilitasi Tanggul Penahan Gelombang Dusun Turungan				1,000,000,000			1,100,000,000
	-	Rehabilitasi pengaman pantai Dusun Bajo Desa Kayupanda				500,000,000			550,000,000
	-	Rehabilitasi pengaman pantai Pulau Pasi				250,000,000			275,000,000
12		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong				3,550,000,000			3,905,000,000
A		Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Tanah	Panjang Daerah rawan longsor yang tertangani			1,850,000,000			2,035,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Penahan Tanah Dusun Bontonumpa				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Penahan Longsor Desa Harapan				150,000,000			165,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Penahan Longsor Dusun Gojang Selatan				150,000,000			165,000,000
	-	Pembangunan Bronjong di Tanah Tumbang Dusun Lembang Matene				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Penahan Tanah Dusun Panaikang Desa Jambuyya				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Penahan Tanah Dusun Buki-buki Selatan Desa Bonea Makmur				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Penahan Tanah Dusun Dusun Bonto Jaya Desa Bonea Timur				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Penahan Longsor Rumah Dusun Dodaiya Desa Harapan Kec. Bontosikuyu				50,000,000			55,000,000
	-	Pembangunan tanggul sungai Dusun Ballabulo Tengah Desa Bontojati (lanjutan)			100%	100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Talud Penahan Longsor Binanga Nipa				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Bonesiallak				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Pekuburan Kampung Dolok			100%	100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Talud TPA Kaburu			100%	100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Bronjong Dallemambua			100%	100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Bronjong Dolak			100%	100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Kel. Bontobangun				200,000,000			220,000,000
	-	Pembangunan Bronjong Mare-mare			100%	100,000,000		100%	110,000,000
B		Kegiatan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai	Panjang Sungai yang aman dari pengaruh longsor tebing sungai			1,700,000,000			1,870,000,000
	-	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Balang Hibung			100%	100,000,000		100%	110,000,000
	-	Rehab Tanggul Penahan Tanah Sungai Bua-bua				200,000,000			220,000,000
	-	Bronjong Pengaman Sungai Posi Desa Bonea Makmur				150,000,000			165,000,000
	-	Bronjong Penahan Banjir Dusun Cinimabela				200,000,000			220,000,000
	-	Tanggul Pengendali Banjir Matalalang				200,000,000			220,000,000

	-	Pembuatan Tanggul Penahan Air dan Lorong Jl. S. Parman sampai ke Jl. Parappa I					100,000,000			110,000,000
	-	Pembuatan Tanggul Sungai Jln. Kartika dan Jln. Tien Soeharto					200,000,000			220,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Sungai Likua Lingk. Bontosaile Kel. Bontobangun					200,000,000			220,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Sungai Balang Bo'dong Lingk. Bontosaile Kel. Bontobangun					200,000,000			220,000,000
	-	Pembangunan Tanggul Sungai Kolo-kolo sebelum Workshop PU.					100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Cinimabela (Bronjong)					50,000,000			55,000,000
13		Program Pembangunan saluran drainase dan air limbah					3,435,000,000			3,778,500,000
1		Pembangunan Saluran Drainase	tersedianya sistem drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)							
		DAU					3,435,000,000			3,778,500,000
	-	Pembangunan Drainase Jl. Abdul Kadir Kasim			100%		150,000,000		100%	165,000,000
	-	Pembangunan Drainase Lingkungan Bonea Utara Jl. Pahlawan			100%		100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Dusun Polebunging Desa Polebunging			100%		100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Dusun Dolak Desa Mare-mare			100%		100,000,000		100%	110,000,000
	-	Rehabilitasi Drainase Tabang			100%		50,000,000		100%	55,000,000
	-	Rehab. Drainase Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo - Jl. Ahmad Dahlan			100%		100,000,000		100%	110,000,000
	-	Rehab Drainase Jl. S. Parman Ke Sungai Parappa			100%		100,000,000		100%	110,000,000
	-	Rehab Drainase dan Plat Jl. S. Siswomiharjo menuju aspol Lango-Lango			100%		180,000,000		100%	198,000,000
	-	Pembangunan Drainase dan Plat Jl. Mangga			100%		100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembuatan Drainase Jl. S. Parman			100%		200,000,000		100%	220,000,000
	-	Pembuatan Kanal Selokan Induk (Samping Sebelah Barat Polesek)			100%		200,000,000		100%	220,000,000
	-	Pembangunan Pipa Saluran Air Limbah Jl. Soekarno Hatta Benteng			100%		50,000,000		100%	55,000,000
	-	Pembangunan Drainase Jalan Poros Pattumbukang Desa Lowa			100%		150,000,000		100%	165,000,000
	-	Pembangunan Drainase Dusun Parangia			100%		100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Dusun Pa'garangan			100%		200,000,000		100%	220,000,000
	-	Pembangunan Drainase Pariangan Selatan Desa Harapan			100%		150,000,000		100%	165,000,000
	-	Pembangunan Drainase Dusun Timoro Desa Tambolongan			100%		200,000,000		100%	220,000,000
	-	Pembangunan Drainase Samping Kantor PU Lingk. Tanga-tanga			100%		100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Dekker dan Drainase Pembuangan ke Laut Lingk. Tanga-tanga			100%		150,000,000		100%	165,000,000
	-	Pembangunan Drainase Pembuangan ke Laut Lingk. Kampung Beru			100%		100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Induk Ibu Kota Kec. Pasilambena			100%		130,000,000		100%	143,000,000
	-	Pembangunan Drainase Desa Tamalanrea			100%		100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Dusun Tinggi Sisila Desa Tanete			100%		100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Lanjutan Sebelah Barat dan Timur Jalan Raya Lingk. Tanga-tanga			100%		100,000,000		100%	110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Dusun Sapohatu Desa Kayu Bauk			100%		150,000,000		100%	165,000,000
	-	Pembangunan Drainase Desa Onto			100%		100,000,000		100%	110,000,000
	-	Drainase Buki-buki Utara Desa Bonea Timur					100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Baturapa			100%		75,000,000		100%	82,500,000
2		Pembangunan Sarana prasarana air limbah	Jumlah Sarana prasarana air limbah yang terbangun							
14		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih layak dan berkelanjutan				2,545,000,000			2,799,500,000

1	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih				2,545,000,000			2,799,500,000
	Dana Alokasi Umum				2,545,000,000			2,799,500,000
-	Pendampingan Program Pamsimas			100%	350,000,000		100%	385,000,000
-	Pendampingan DAK Air Bersih			100%	120,000,000		100%	132,000,000
-	Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Pemasangan Sambungan Jaringan Air Bersih ke rumah			100%	1,225,000,000		100%	1,347,500,000
-	Pembangunan dan pemasangan sarana dan Prasarana Air Bersih (Lanjutan) Bitombang			100%	100,000,000		100%	110,000,000
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Tanabau Tenro				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Sumur Bor dan Bak penampungan air Dusun Padangoge				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Bak Air Pembagi Dusun Tombangangia			100%	100,000,000		100%	110,000,000
-	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Parak Appabatu Desa Parak			100%	100,000,000		100%	110,000,000
-	Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih Kel. Batangmata			100%	150,000,000		100%	165,000,000
-	Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih Desa Tamalanrea			100%	100,000,000		100%	110,000,000
-	Pembangunan Sumur Bor Dusun Tangnga Bangko Desa Bontosai			100%	100,000,000		100%	110,000,000
1	Peningkatan Sarana Prasarana Air Minum (SPAM)				-			-
15	Program Pembangunan Sarana Prasarana Publik				5,050,000,000			5,555,000,000
1	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Pemerintah	proporsi sarana prasarana gedung pemerintah yang representatif			4,000,000,000			4,400,000,000
-	Pembangunan Gudang, Ruang Laktasi dan Musholah Dinas PUTR			100%	400,000,000		100%	440,000,000
-	Penataan Halaman Kantor Dinas PUTR				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Kantor UPTD PUTR Wilayah II				300,000,000			330,000,000
-	Pembangunan Rumah Jabatan Camat Pasimarannu				500,000,000			550,000,000
-	Pembangunan Gedung PKK Kecamatan Pasimarannu				300,000,000			330,000,000
-	Pembangunan Pagar Kecamatan Bontosikuyu				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Gedung PKK Kecamatan Bontosikuyu				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan / Rehab. Pagar UPT SDN 59 Kepulauan Selayar				200,000,000			220,000,000
-	Pembangunan Pagar UPT SDI 112 Kepulauan Selayar				150,000,000			165,000,000
-	Pemagaran Kantor Camat Pasimasunggu Timur (lanjutan)			100%	100,000,000		100%	110,000,000
-	Pembangunan Gedung Serbaguna Lembang Sapadang Desa Bukit Timur				200,000,000			220,000,000
-	Rehab Rumah Jabatan Camat Bontomanai				150,000,000			165,000,000
-	Rehab Kantor Camat Bontomanai				100,000,000			110,000,000
-	Rehab. Workshop DISPUTR			100%	500,000,000		100%	550,000,000
-	Penyelesaian Pembangunan Rujab Bupati			100%	800,000,000		100%	880,000,000
2	Pembangunan sarana prasarana masyarakat umum	proporsi sarana prasarana masyarakat umum representatif			1,050,000,000			1,155,000,000
-	Penataan Lapangan Sepak bola pemuda Gátung				100,000,000			110,000,000
-	Penataan Lapangan Sepak Bola BahoRea				100,000,000			110,000,000
-	Penataan Lapangan Sepak Bola Lantibongan				100,000,000			110,000,000
-	Penyelesaian dan Penataan Taman Lapangan Olahraga Dusun lembangiya Desa Patilereng				75,000,000			82,500,000
-	Pembuatan Rumah Tahfiz Lingkungan Bua-Bua Barat				200,000,000			220,000,000
-	Pembangunan Pagar Lapangan Sepakbola Kec. Pasimarannu (lanjutan)			100%	150,000,000		100%	165,000,000
-	Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola Batangmata (lanjutan)				75,000,000			82,500,000
-	Pembangunan pagar pekuburan depan Kantor Lurah Benteng			100%	100,000,000		100%	110,000,000

	-	Rehab Asrama Mahasiswa Selayar Kepulauan di Jl. Pelita Makassar				150,000,000			165,000,000
16		Program Peningkatan Pelayanan jasa konstruksi	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan yang sesuai standar			1,195,000,000			1,314,500,000
1		Peningkatan pelayanan Uji Laboratorium	persentase peningkatan pelayanan uji laboratorium untuk peningkatan mutu konstruksi			175,000,000			192,500,000
	-	Koordinasi pelayanan uji lab		100%		50,000,000		100%	55,000,000
	-	Pemeliharaan Alat Laboratorium		100%		25,000,000		100%	27,500,000
	-	Survey Harga Bahan dan Material Konstruksi sesuai dengan Harga Setiap Lokasi		100%		100,000,000		100%	110,000,000
2		Peningkatan pelayanan penunjang pekerjaan konstruksi	tersedianya peralatan penunjang pekerjaan konstruksi			600,000,000			660,000,000
	-	Koordinasi Pelayanan Penunjang Peralatan Konstruksi		100%		50,000,000		100%	55,000,000
	-	Pengadaan Alat Berat		100%		250,000,000		100%	275,000,000
	-	Pemeliharaan Alat Berat		100%		200,000,000		100%	220,000,000
	-	Pengadaan Alat Perbengkelan		100%		100,000,000		100%	110,000,000
3		Pembinaan jasa konstruksi	persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggara konstruksi			170,000,000			187,000,000
	-	Koordinasi Jasa Konstruksi		100%		50,000,000		100%	55,000,000
	-	Pelatihan pekerja konstruksi		100%		50,000,000		100%	55,000,000
	-	Pengawasan tertib jasa konstruksi		100%		20,000,000		100%	22,000,000
	-	Pengelolaan SIPJAKI dan IUJK		100%		50,000,000		100%	55,000,000
4		Pengadaan Alat Laboratorium	Jumlah alat yang diadakan			250,000,000			275,000,000
		Pengadaan Alat Laboratorium				250,000,000			275,000,000
17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				225,000,000			247,500,000
1		Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	Tersedia prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang			100,000,000			110,000,000
	-	Inventarisasi Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan RTRW				50,000,000			55,000,000
	-	Pengadaan VIDOTRON				50,000,000			55,000,000
2		Pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang	Jumlah Objek pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang			125,000,000			137,500,000
	-	Pengawasan Pemanfaatan Ruang		100%		75,000,000		100%	82,500,000
	-	Koordinasi Pengendalian Tata Ruang		100%		50,000,000		100%	55,000,000
18		Program Pemanfaatan Ruang				200,000,000			220,000,000
1		Pembuatan Peta Analog Pemanfaatan Ruang	Tersedianya peta analog pemanfaatan ruang						
2		Penyusunan Prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan Ruang	Tersedianya Kebijakan pemanfaatan ruang			200,000,000			220,000,000
	-	Penyusunan Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Distribusi Logistik				30,000,000			33,000,000
	-	Penyusunan Neraca Penggunaan Lahan Kec. Bontoharu				20,000,000			22,000,000
	-	Penyusunan Neraca Penggunaan Lahan Kec. Bontomanai				20,000,000			22,000,000
	-	Inventarisasi Bangunan Terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Ruang				30,000,000			33,000,000
	-	Koordinasi Pemanfaatan Ruang		100%		50,000,000		100%	55,000,000
	-	Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau		100%		50,000,000		100%	55,000,000
19		Program Perencanaan Tata Ruang				2,525,000,000			2,777,500,000
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang dan Kelengkapannya	Tersedianya dokumen pemanfaatan ruang			2,525,000,000			2,777,500,000

	-	Penyusunan Ranperda RDTR dan Zonasi Kawasan Perkotaan Pamatata				300,000,000			330,000,000
	-	Revisi RDTR dan Zonasi Kec. Bontoharu				200,000,000			220,000,000
	-	Penyusunan KLHS Revisi RDTR dan Zonasi Kec. Bontoharu				400,000,000			440,000,000
	-	Penyusunan RDTR dan Zonasi Kecamatan Bontosikuyu				300,000,000			330,000,000
	-	Penyusunan KLHS RDTR dan Zonasi Kec. Bontosikuyu				300,000,000			330,000,000
	-	Penyusunan RDTR dan Zonasi Kec. Takabonerate				400,000,000			440,000,000
	-	Penyusunan KLHS RDTR dan Zonasi Kec. Takabonerate				300,000,000			330,000,000
	-	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang			100%	50,000,000		100%	55,000,000
	-	Penyempurnaan RDTR Kec. Bontoharu			100%	275,000,000		100%	302,500,000
04		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				17,941,701,181			19,588,371,299
4		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				17,941,701,181			19,588,371,299
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi			902,824,381			993,106,819
		Kegiatan :							
	1	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penunjang administrasi perkantoran	Kab. Kep. Selayar	1 tahun	702,824,381			773,106,819
	2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah laporan hasil perjalanan dinas	Dalam dan Luar daerah	1 laporan	200,000,000			220,000,000
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Jumlah Sarpras yang Terpenuhi dari Jumlah Aparatur DPKP			613,710,000			675,081,000
		Kegiatan :							
	1	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan dinas yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	33,630,000			36,993,000
	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Kab. Kep. Selayar	22 Unit	80,080,000			88,088,000
	3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	10,000,000			11,000,000
	4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	20,000,000			22,000,000
	5	Pengadaan meubeleur	Jumlah meubeleur	Kab. Kep. Selayar	3 Unit	10,000,000			11,000,000
	6	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya usia pakai perlengkapan kantor	Kab. Kep. Selayar	12 Unit	5,000,000			5,500,000
	7	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya usia pakai peralatan gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	11 Unit	5,000,000			5,500,000
	8	Pemeliharaan gedung kantor	Meningkatnya usia pakai gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	50,000,000			55,000,000
	9	Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda empat			1 Unit	250,000,000			275,000,000
	10	Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua			3 unit	75,000,000			82,500,000
	11	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi dan Pendataan RTLH	Tersedianya database RTLH	Kab. Kep. Selayar	1 Kab.	75,000,000			82,500,000
3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Laporan Yang Penyampaiannya Tepat Waktu			105,000,000			115,500,000
		Kegiatan :							
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Data Terpilah Tentang Kinerja Dan Keuangan DPKP		1 Laporan	15,000,000			16,500,000
	2	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kep. Selayar	12 Laporan	10,000,000			11,000,000
	3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	15,000,000			16,500,000
	4	Penyusunan Laporan Aset	Laporan Aset tahun berjalan		1 Laporan	20,000,000			22,000,000
	5	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP OPD DPKP	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	7,500,000			8,250,000
	6	Penyusunan RENSTRA/RENJA OPD	Tersedianya Dokumen RENSTRA/RENJA OPD	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	7,500,000			8,250,000
	7	Penyusunan RKA /DPA	Tersedianya Dokumen RKA/DPA	Kab. Kep. Selayar	4 Laporan	15,000,000			16,500,000
	8	Penyusunan SPM	Tersedianya SPM	Kab. Kep. Selayar	2 Laporan	10,000,000			11,000,000
	9	Penyusunan tim tindak lanjut LHP OPD	Jumlah LHP OPD	Kab. Kep. Selayar	3 Laporan	5,000,000			5,500,000
4		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Presentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani			5,665,166,800			6,231,683,480
		Kegiatan :							

1	Penanganan Kawasan Kumuh Perdesaan					40,000,000			44,000,000
2	Replikasi KOTAKU					150,000,000			165,000,000
3	Pendataan Penanganan Kawasan Kumuh					30,000,000			33,000,000
4	Koordinasi terkait bidang Permukiman					20,000,000			22,000,000
6	Penataan dan Peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kec. Benteng					350,000,000			385,000,000
7	Identifikasi kawasan kumuh di 10 (sepuluh) Kecamatan					40,000,000			44,000,000
8	Monitoring dan evaluasi dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kec. Benteng					20,000,000			22,000,000
10	Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengawasan kegiatan pemukiman					20,000,000			22,000,000
13	Monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengawasan kegiatan jalan lingkungan dan utilitas					30,000,000			33,000,000
14	Koordinasi terkait bidang PSU					20,000,000			22,000,000
17	Perencanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di 11 (sebelas) Kecamatan					80,000,000			88,000,000
19	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan RTLH					20,000,000			22,000,000
21	Monitoring dan evaluasi penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di 11 (sebelas) Kecamatan					20,000,000			22,000,000
22	Pendampingan Program KOTAKU					110,000,000			121,000,000
24	Verifikasi Data RTLH Secara Berkala di Kab. Kepulauan Selayar	Tersedianya data RTLH yang diverifikasi	Kab. Kep. Selayar	1 Paket		75,000,000			82,500,000
25	Pendampingan Program BSPS	Terwujudnya Pembangunan BSPS	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun		65,000,000			71,500,000
26	Pendampingan DAK								-
27	Pembuatan Aplikasi Data RTLH di kab. Kepulauan Selayar	Tersedianya Sistem Informasi Pendataan Perumahan				150,000,000			165,000,000
28	Pendampingan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Tersedianya data rumah swadaya	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun		102,540,000			112,794,000
29	Pendampingan Program Rumah Khusus	Terlaksananya Pembangunan Rumah Khusus							-
30	Koordinasi terkait Perumahan Formal, Umum, Khusus dan Komersil	Terlaksananya pendampingan rumah khusus	Kab. Kep. Selayar	1 Paket		55,000,000			60,500,000
31	Pengembangan Data dan Informasi Perumahan					80,000,000			88,000,000
32	Sosialisasi dan Pendataan Rumah formal, khusus, umum, komersil dan swadaya					40,000,000			44,000,000
33	Penyusunan Desain/Prototipe Rusun dan Rusun, Komersil dan Perumahan					90,000,000			99,000,000
34	Program BSPS Peningkatan Kualitas					1,200,000,000			1,320,000,000
35	Program BSPS Pembangunan baru					1,000,000,000			1,100,000,000
36	Pembangunan Rumah Santri					2,500,000,000			2,750,000,000
37	Penyusunan Standar Pelayanan dan Prosedur Perizinan					20,000,000			22,000,000
38	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan					30,000,000			33,000,000
39	Sosialisasi Regulasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Perumahan Rakyat					40,000,000			44,000,000
40	Pembentukan dan Peningkatan Peran Pokja Perumahan					20,000,000			22,000,000
41	Peningkatan Peran Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Pokja	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun		37,626,800			41,389,480
42	Revisi dan Penyesuaian RP3KP sesuai RTRW					50,000,000			55,000,000
43	Penanganan Rumah Korban Bencana dan Yang terkena Relokasi					30,000,000			33,000,000
44	Fasilitas Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan SKGB					80,000,000			88,000,000
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Bontotangga Kec. Bontoharu								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Kelurahan Batangmata Kec. Bontomate'ne								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Menara Indah Kec. Bontomate'ne								-

	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Buki Kec. Buki								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Barugaiya Kec. Bontomanai								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Parak Kec. Bontomanai								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Binanga Sombaiya Dusun Bajo Kec. Bontosikuyu								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Binanga Sombaiya Dusun Ujung Loe Kec. Bontosikuyu								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Kayuadi Kec. Takabonerate								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Batang Kec. Takabonerate								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Kembang Ragi Kec. Pasimasunggu								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Lamantu Kec. Pasimarannu								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Lamantu Kec. Pasimarannu								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Bonerate Kec. Pasimarannu								-
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Layak Huni di Desa Kalaotoa Kec. Pasilambena								-
									-
	Program Pengembangan Perumahan					185,000,000			203,500,000
1	Fasilitasi dan Pembangunan Rumah Sederhana bagi Korban Bencana	Tersedianya Rumah Sederhana bagi korban bencana	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	40,000,000				44,000,000
2	Fasilitasi dan Pembangunan Rumah Sederhana bagi Korban Relokasi Program Pemerintah	Tersedianya rumah sederhana bagi korban relokasi program pemerintah	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	90,000,000				99,000,000
3	Pendataan/survei Penyediaan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Tersedianya Data Rumah Layak huni bagi korban bencana	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	55,000,000				60,500,000
4	Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Perumahan								
5	Program Pemberdayaan Komunitas Kawasan Permukiman					300,000,000			330,000,000
1	Penataan Kawasan Kumuh	Tertatanya kawasan kumuh perdesaan	Kab. Kep. Selayar	1 Paket	300,000,000				330,000,000
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu (Jalan dan drainase Lingkungan)				300,000,000				330,000,000
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kecamatan Benteng								-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Menara indah Kec. Bontomatene (Jalan dan drainase Lingkungan)								-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Buki Kec. Buki (Jalan dan drainase Lingkungan)								-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Barugaia Kec. Bontomanai (Jalan dan drainase Lingkungan)								-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Parak Kec. Bontomanai (Jalan dan drainase Lingkungan)								-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Binanga Sombaiya Dusun Bajo Kec. Bontosikuyu (Jalan dan drainase Lingkungan)								-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Binanga Sombaiya Dusun Ujung Loe Kec. Bontosikuyu (Jalan dan drainase Lingkungan)								-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Kayuadi Kec. Takabonerate (Jalan dan drainase Lingkungan)								-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Batang Kec. Takabonerate (Jalan dan drainase Lingkungan)								-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Kembang Ragi Kec. Pasimasunggu (Jalan dan drainase Lingkungan)								-

-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Bonto Bulaeng Kec. Pasimasunggu Timur (Jalan dan drainase Lingkungan)							-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur (Jalan dan drainase Lingkungan)							-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Lamantu Kec. Pasimarannu (Jalan dan drainase Lingkungan)							-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Bonerate Kec. Pasimarannu (Jalan dan drainase Lingkungan)							-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Kalaotoa Kec. Pasilambena (Jalan dan drainase Lingkungan)							-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Balanghibung Kel. Benteng Selatan (Jalan dan drainase Lingkungan)							-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Bonehalang Selatan Kel. Benteng Selatan (Jalan dan drainase Lingkungan)							-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Lango-Lango Kel. Benteng (Jalan dan drainase Lingkungan)							-
-	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Bua-Bua Barat Kel. Benteng Utara (Jalan dan drainase Lingkungan)							-
6	Program Legislasi							-
1	Penyusunan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kepulauan Selayar	Tertatanya kawasan kumuh perdesaan	Kab. Kep. Selayar	1 Paket				-
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Presentasi Jalan Setapak Yang Ditangani				7,700,000,000		8,322,500,000
	Kegiatan :							
1	Monev Perencanaan dan Pengawasan terkait Penataan bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Monev Perencanaan dan Pengawasan terkait Penataan bangunan dan Lingkungan	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun		75,000,000		82,500,000
2	Monev Perencanaan dan Pengawasan terkait Pembangunan Jalan Lingkungan							-
3	Monev Perencanaan dan Pengawasan terkait Pembangunan Drainase Lingkungan							-
4	Pembangunan Jalan Setapak	Jumlah Jalan Setapak yang dibangun	Kab. Kep. Selayar	17 Paket		3,270,000,000		3,597,000,000
-	Pembangunan/Pelebaran Jalan Setapak Kota Intan Desa Lembang Baji					100,000,000		110,000,000
-	Pembangunan Rabat Beton Dusun Pandang Timur Desa Bontobulaeng (lanjutan)					100,000,000		110,000,000
-	Pembangunan Jalan Setapak Lorong 1 di Baera Selatan					100,000,000		110,000,000
-	Pembangunan Jalan Setapak Menuju Kuburan Desa Laiyolo					200,000,000		220,000,000
-	Pembangunan Jalan Setapak Dusun Samba Desa Tamalanrea					100,000,000		110,000,000
-	Pembangunan jalan setapak Palemba ke Buhung Bakka (Lanjutan)					100,000,000		110,000,000
-	Pembangunan jalan setapak Parak Selatan Desa Parak					200,000,000		220,000,000
-	Pembangunan jalan setapak lingkungan bonehalang					100,000,000		110,000,000
-	Pembangunan jalan setapak Jl. D.I. Panjaitan Ling. Balanghibung Kel. Benteng Selatan							-
-	Pembangunan jalan setapak Togading-Opu Karajeng Desa Baratlambongan					100,000,000		110,000,000
-	Pembangunan Jalan Setapak Ling. Bonea					100,000,000		110,000,000
-	Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan Tabang Baru					100,000,000		110,000,000
-	Pembangunan jalan setapak samping kantor pajak tembus samping PLN							-
-	Pembangunan Jalan Setapak Perumahan H.Makdewari					100,000,000		110,000,000
-	Pembangunan Jalan Setapak JL. Cakalang (pasar TPI Benteng Selatan)					70,000,000		77,000,000
-	Pembangunan Jalan Setapak Samping Kantor Sosial					100,000,000		110,000,000
-	Pembangunan Jalan Setapak (Jl. S. Parman ke Sungai Parappa)					200,000,000		220,000,000
-	Pembangunan Jalan/Setapak Dari Lorong Bambu ke Pekuburan					200,000,000		220,000,000
-	Pembangunan jalan setapak Jl. RA Kartini ke Hati suci					200,000,000		220,000,000
-	Pembangunan Jalan Setapak ke Lapangan Sepak Bola Dusun Sipatuo Desa Onto					150,000,000		165,000,000

	-	Pembangunan Jalan Setapak Buhung Pute Dusun Maulana Desa Onto				150,000,000			165,000,000
	-	Pembangunan Jalan Setapak Buhung Demmak Desa Onto				200,000,000			220,000,000
	-	Pembangunan Rabat beton akses permukiman ke pekuburan umum dusun Unjuriya				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Jalan Setapak Dekat Toko Laristo Jl. KH. Hayyung Kec. Benteng				100,000,000			110,000,000
	-	Perluasan Rabat Beton Jalan setapak Tanatoa; Bontona				200,000,000			220,000,000
	-	Pembangunan Jalan Setapak sebelah Timur Kantor Dinas Sosial				200,000,000			220,000,000
5		Rehabilitasi Jalan Setapak	Terlaksananya Rehab. Jalan Setapak	Kab. Kep. Selayar	15 Paket	1,475,000,000		15 Paket	1,475,000,000
	-	Rehab. Jalan Setapak Jl. Piere Tendean Lorong				150,000,000			150,000,000
	-	Rehab Lorong Perumahan Pemda				50,000,000			50,000,000
	-	Rehab Jalan Setapak Lingkungan Garassi - Tatarima Kel. Batangmata Sapo				100,000,000			100,000,000
	-	Rehab. Jalan Setapak Jl. Jend. Sudirman				100,000,000			100,000,000
	-	Rehab Jalan Setapak Jl. Arocppala Lr. I Belakang MAN				75,000,000			100,000,000
	-	Rehab. Jalan Setapak Jl. Cakalang ke Jl. Ahmad Dahlan samping Bengkel Galaxi Motor				100,000,000			100,000,000
	-	Rehab. Jalan Setapak Jl. Patta Tjora samping Koramil				100,000,000			100,000,000
	-	Rehab. Jalan Setapak Lr. Perumahan Pemda				150,000,000			100,000,000
	-	Rehab. Jalan Setapak Lr. Mayat (Jl. AP. Pettarani)				100,000,000			100,000,000
	-	Rehab. jalan lingkungan ke Pekuburan Desa Lantibongan				75,000,000			100,000,000
	-	Rehab. Jalan Setapak Jl. Rauf Rahman RW II/RT I Lr. 1				100,000,000			100,000,000
	-	Rehab. Jalan Setapak Jl. Rauf Rahman RW II/RT I Lr. 2				100,000,000			100,000,000
	-	Rehab Jalan Setapak Jl. Rauf Rahman Lorong 4				100,000,000			100,000,000
	-	Rehab Jalan Setapak Dusun Dodak Desa Massungke				100,000,000			100,000,000
	-	Rehab. Jalan Setapak SDI Onto Dusun Onto Sapo desa Onto				75,000,000			75,000,000
6		Sanitasi dan Air Limbah				2,880,000,000			3,168,000,000
		Monev Perencanaan dan Pengawasan terkait Pembangunan Sanitasi dan Air limbah	Terlaksananya Monitoring Perencanaan dan Pengawasan terkait Pembangunan Sanitasi dan Air limbah	Kab. Kep. Selayar	1 Paket	25,000,000			27,500,000
1		Rehabilitasi Drainase	Terlaksananya rehabilitasi drainase	Kab. Kep. Selayar	2 Paket	490,000,000			539,000,000
	-	Rehab. Penutup Selokan (Duiker) Jl. Yos Sudarso (Dekat Toko Zaman Baru)				100,000,000			110,000,000
	-	Rehab drainase Jl. AP. Pettarani ke Jl. S. Parman				60,000,000			66,000,000
	-	Rehab Drainase Jl. Samratulangi Lr. 1				100,000,000			110,000,000
	-	Rehab Plat dekker Jl. Samratulangi Lr. 1				50,000,000			55,000,000
	-	Rehab drainase Jl. KH. Hayyung Sebelah Barat				100,000,000			110,000,000
	-	Rehab. Drainase di Lingkungan Balang Sembo				80,000,000			88,000,000
2		Pembangunan Drainase	Terlaksananya pembangunan drainase	Kab. Kep. Selayar	9 Paket	2,365,000,000			2,601,500,000
	-	Pembangunan drainase Jl. Patta Tjora Depan Kantor Koramil ke Selatan				200,000,000			220,000,000
	-	Pembangunan drainase Jl. Patta Tjora Depan Masjid Nurul Yakin ke SMK Kelautan				200,000,000			220,000,000
	-	Pembangunan drainase Jl. Kihajar Dewantara				150,000,000			165,000,000
	-	Pembangunan Drainase Balang Sembo Kel. Putabangun				75,000,000			82,500,000
	-	Pembangunan Drainase Lingk. Bonea				50,000,000			55,000,000
	-	Pembangunan/ Rehab Drainase Lingkungan Lango-Lango Barat				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Jl. Arocppala Lr. III				90,000,000			99,000,000
	-	Pembangunan Drainase Jl. S. Parman				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Jl. Kepiting Belakang Rumah mantan Kepala Lingk. Sampai Kanal				150,000,000			165,000,000
	-	Pembangunan Drainase Jl. Pierre Tendean Lorong 1				200,000,000			220,000,000
	-	Pembangunan drainase Jl. Piere Tendean RW I/RT I Lorong 5				200,000,000			220,000,000

	-	Pembangunan Drainase Jl. Pierre Tendean RW.1/RT.1 Lr.7				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Dusun Parumaang Desa Bontomalling				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Dusun Bonelambere Desa Bontosale				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Dusun Garassik Timur Desa Bontobaru				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Drainase Dusun Manarai				100,000,000			110,000,000
	-	Lanjutan Pembangunan Drainase Dusun Benteng Selatan				100,000,000			110,000,000
	-	Lanjutan Pembangunan Drainase Dusun Bonelambere				150,000,000			165,000,000
	-	Pembangunan Drainase Dusun Biringbalang Kec. Bontosikuyu				100,000,000			110,000,000
8		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Cakupan Ketersediaan Taman Kota			1,650,000,000			1,815,000,000
		Kegiatan :							
	1	Monev. Perencanaan dan Pengawasan terkait Ruang Terbuka Hijau				20,000,000			22,000,000
	2	Pemeliharaan dan Penataan Taman-Taman dan Patung/Tugu				150,000,000			165,000,000
	3	Pengadaan Bibit Tanaman/Bunga				200,000,000			220,000,000
	4	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Taman (Tersebar)				50,000,000			55,000,000
	5	Penunjang Operasional Kendaraan Penyiram Taman	Lancarnya operasional kendaraan penyiram taman	Kab. Kep. Selayar	3 Unit	30,000,000			33,000,000
	6	Pemeliharaan Taman (Tersebar)	Terwujudnya keindahan taman	Kab. Kep. Selayar	8 Taman	100,000,000			110,000,000
	7	Pengadaan Alat Bantu Pemeliharaan Taman				100,000,000			110,000,000
	8	DED Pintu Gerbang Kota Benteng				40,000,000			44,000,000
	9	Pembangunan Taman-Taman dan Gerbang Kota Benteng				150,000,000			165,000,000
	10	Pengelolaan, perencanaan Teknik (DED) dan Pengawasan Pembangunan Taman Kota Benteng				60,000,000			66,000,000
	11	Pembangunan Gerbang Kota Benteng 2 Unit				100,000,000			110,000,000
	12	Biaya Operasional Penjaga Taman Pusaka				60,000,000			66,000,000
	13	Pembangunan Taman di Jalan Soekarno Hatta				70,000,000			77,000,000
	14	Desain Bagian Depan Taman Pusaka				20,000,000			22,000,000
	15	Pembangunan Taman Depan Pelabuhan Rauf Rahman Benteng				100,000,000			110,000,000
	16	Rehabilitasi Taman				200,000,000			220,000,000
	17	Rehabilitasi pintu gerbang dan Taman Appabatu							-
	18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Tanjung Merayu Desa Parak	Terciptanya keindahan Taman Tanjung Merayu Desa Parak	Kab. Kep. Selayar	1 Paket	150,000,000			165,000,000
	18	Rehabilitasi Taman Edelweis				50,000,000			55,000,000
9		Program Pengelolaan Area Pemakaman	Persentase unit area pemakaman yang tertangani			820,000,000			902,000,000
		Kegiatan :							
	1	Monitoring dan evaluasi kegiatan pemakaman	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengawasan keg. Pembangunan dan pemeliharaan pemakaman	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	50,000,000			55,000,000
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah lokasi pembangunan area pemakaman	Kab. Kep. Selayar	3 Paket	770,000,000			847,000,000
	-	Pembangunan Pagar Lokasi Pemakaman Umum Dusun Bontorikja Desa Tanete				50,000,000			55,000,000
	-	Pembangunan Pagar Pekuburan Sampagayya Lingkungan Tangga-Tangga Kelurahan Bontobangun				50,000,000			55,000,000
	-	Pembangunan Pagar Pekuburan Parak Selatan Desa Parak				150,000,000			165,000,000
	-	Pembangunan Pagar Pekuburan Umum Dusun Barang-Barang Desa Lowa				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Pagar Pekuburan Pa'Batteang				100,000,000			110,000,000
	-	Penataan Lokasi pekuburan Desa Lembang Matene Kec. Pasilambena				70,000,000			77,000,000
	-	Pembangunan Pagar Pemakaman Umum Dg. Patoro Kel. Batangmata Sapo				100,000,000			110,000,000
	-	Pembangunan Pagar Pekuburan Umum Dusun Binanga Benteng Desa Binanga Sombaiya				150,000,000			165,000,000

17	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				16,349,236,329			17,970,659,962
12	I. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2,416,638,162			2,655,801,978
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran			702,238,162			772,461,978
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Terwujudnya peningkatan pelayanan yang efektif	Benteng	12 Bulan	63,677,562		12 Bulan	70,045,318
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	Kabupaten Kepulauan Selayar	3 Buah	15,000,000		3 Buah	16,500,000
3	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi yang efektif dan efisien	Dalam dan Luar Daerah	218 Kali	250,000,000		218 Kali	275,000,000
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tertib dan Efisien	Benteng	12 Bulan	373,560,600		12 Bulan	410,916,660
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana Aparatur			153,200,000			168,520,000
1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Meningkatnya usia pakai dan tingkat kenyamanan	Benteng	12 Bulan	53,000,000		12 Bulan	58,300,000
2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Meningkatnya usia pakai dan tingkat kenyamanan	Benteng	17 Buah	60,200,000		17 Buah	66,220,000
3	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya usia pakai dan peningkatan kinerja aparat	Benteng	3 Buah	5,000,000		3 Buah	5,500,000
4	Pengadaan Kendaraan dinas / Operasional Roda Dua	Tersedianya kendaraan dinas			-			-
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor			5,000,000			5,500,000
6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor			2,850,000			3,135,000
7	Pengadaan Meubelir	Tersedianya meubelir kantor	Benteng	34 Buah	27,150,000		34 Buah	29,865,000
								-
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kinerja aparatur			200,000,000			220,000,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas pegawai		20 psg	100,000,000			110,000,000
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian batik pegawai	Benteng	20 psg	100,000,000			110,000,000
								-
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas dan Kapabilitas Aparat Kesbang			40,000,000			44,000,000
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kinerja bagi Aparatur Pemerintah	Benteng	4 Orang	40,000,000		4 Orang	44,000,000
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dan laporannya			40,000,000			44,000,000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelesaian dokumen LAKIP	Benteng	2 Dokumen	7,500,000		2 Dokumen	8,250,000
2	Rekonsiliasi Penyusunan Pelaporan Keuangan dan asset	Persentase penyelesaian dokumen keuangan	Benteng	2 Dokumen	15,000,000		2 Dokumen	16,500,000
3	Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran (Renstra, RKP, Renja, RKA dsb) tepat waktu	Benteng	4 Dokumen	17,500,000		4 Dokumen	19,250,000
6	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif			438,450,000			482,295,000
1	Pemantauan Kegiatan Orang Asing (POA)	Tersedianya laporan khusus kegiatan orang asing	Kepulauan Selayar	5 Kali	45,000,000		5 Kali	49,500,000
2	Deteksi Dini Potensi Konflik Bagi aparat Pemerintah	Meningkatnya keterampilan aparatur dalam pembinaan keamanan dan ketentraman	Kepulauan Selayar	60 Orang	32,450,000		60 Orang	35,695,000
3	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras / Narkoba	Terwujudnya pemahaman siswa tentang bahaya miras / narkoba	Kepulauan Selayar	60 Orang	34,000,000		60 Orang	37,400,000
4	Workshop Pencegahan Radikalisme / Terorisme	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya terorisme/radikalisme	Benteng	60 Orang	30,000,000		60 Orang	33,000,000
5	Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskominfo) bidang sosial kemasyarakatan Bakesbangpol	Terbentuknya wadah penyediaan data dan informasi permasalahan sosial kemasyarakatan			100,000,000			110,000,000
6	Sosialisasi / pembekalan dasar - dasar intelijen bagi anggota Puskominfo Bakesbangpol	Meningkatnya aparat intelijen kesbangpol dalam pengumpulan bahan keterangan	Kepulauan Selayar	60 Orang	52,000,000		60 Orang	57,200,000
7	Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah	Optimalisasi penanganan ATHG yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah	Kepulauan Selayar	100%	35,000,000		100%	38,500,000
8	Pencegahan Tindak Kenakalan Remaja	Jumlah siswa yang tersosialisasi		20 org	30,000,000		20 org	33,000,000

9	Penyusunan Ranperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Naskah akademik dan Ranperda yang dibuat		1 lap	25,000,000		1 lap	27,500,000
10	Workshop Pembinaan dan Pencegahan Gangguan Kamtibmas	Jumlah peserta workshop		10 org	30,000,000		10 org	33,000,000
11	Fasilitasi pokja tim terpadu penanganan konflik	Terlaksananya fasilitasi tim terpadu penanganan konflik		1 lap	25,000,000		1 lap	27,500,000
7	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa			265,000,000			289,000,000
1	Orientasi Pembauran Bangsa bagi generasi Muda / Pramuka	Jumlah generasi muda yang tersosialisasi		20 org	25,000,000		20 org	25,000,000
2	Pemantapan Kesadaran Bela negara	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air	Kepulauan Selayar	150 Orang	30,000,000		150 Orang	33,000,000
3	Pendidikan Wawasan dan Karakter Kebangsaan bagi generasi muda	Meningkatnya pemahaman Generasi muda terhadap wawasan kebangsaan		1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
4	Sosialisasi empat pilar kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika	Kepulauan Selayar	70 Orang	30,000,000		70 Orang	33,000,000
5	Penguatan Nilai Nilai Kebangsaan	Jumlah generasi muda yang tersosialisasi		20 org	25,000,000		20 org	27,500,000
6	Workshop pemantapan ketahanan nasional bagi generasi muda	Jumlah Generasi Muda yang mengikuti workshop	Kepulauan Selayar	20 org	30,000,000			33,000,000
7	Pembentukan Kader Bela Negara	Jumlah Kader yang dibentuk	Kepulauan Selayar	20 org	25,000,000		20 org	27,500,000
8	Dialog Publik dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila	Jumlah peserta dalam aktualisasi nilai-nilai pancasila	Kepulauan Selayar	20 org	20,000,000		20 org	22,000,000
9	Pembentukan Kader Teritorial Desa untuk Pemasarakatan Nilai – Nilai Pancasila	Jumlah Kader yang dibentuk	Kepulauan Selayar	20 org	30,000,000		20 org	33,000,000
10	Pembinaan Aliran Kepercayaan	Jumlah Aliran kepercayaan yang dibina	Kepulauan Selayar	20 org	30,000,000		20 org	33,000,000
8	Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan			100,000,000			110,000,000
1	Forum pembauran Kebangsaan (FPK)	Tersedianya laporan Forum Pembauran Kebangsaan	Benteng	1 Laporan	35,000,000		1 Laporan	38,500,000
2	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Kepulauan Selayar	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Kecamatan Kepulauan	100%	40,000,000		100%	44,000,000
3	Sarasehan membangun kebersamaan multi etnis	Jumlah lintas etnis yang mengikuti sarasehan	Benteng	6	25,000,000		6	27,500,000
9	Pendidikan Politik Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dalam Berdemokrasi			390,650,000			429,715,000
1	Pembinaan Ormas dan LSM Bidang Kesbangpol	terwujudnya pelayanan pendaftaran Ormas dan verifikasi Ormas serta tersedianya data Ormas/LSM	Selayar	3 Kegiatan	30,000,000		3 Kegiatan	33,000,000
2	Pemantauan Perkembangan Situasi Politik Daerah menjelang Pemilihan Bupati	terwujudnya dukungan kelancaran pelaksanaan kebijakan polkamtibmas yang kondusif di daerah	Selayar	100%	185,650,000		100%	204,215,000
3	Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada partai politik	Jumlah partai politik yang menerima bantuan	Selayar	16 Partai Politik	30,000,000		16 Partai Politik	33,000,000
4	Bimtek pengelolaan bantuan keuangan bagi partai politik	Jumlah Partai Politik Penerima bantuan	Benteng	50 Orang	30,000,000		50 Orang	33,000,000
5	Verifikasi orkemas	Jumlah legalitas dan tertip administrasi keberadaan orkemas	Benteng	80 Orkemas	35,000,000		80 Orkemas	38,500,000
6	Sosialisasi undang-undang bidang politik dan kemasyarakatan	Jumlah tersosialisasi tentang partai politik dan uu penyelenggaraan pemilu	Benteng	20 org	20,000,000		20 org	22,000,000
7	Sarasehan peningkatan wawasan politik bagi kaum perempuan	Jumlah perempuan dalam pendidikan politik	Benteng	30 org	25,000,000		30 org	27,500,000
8	Orientasi pendidikan politik bagi pelajar	Jumlah pelajar dalam pendidikan politik	Benteng	60 Orang	35,000,000		60 Orang	38,500,000
9	Sarasehan Demokrasi	Jumlah Peserta Sarasehan Demokrasi			-			-
10	Pelatihan Komunikasi Politik	Jumlah Peserta Pelatihan			-			-
10	Pengembangan Nilai Budaya/Sejarah	Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya			87,100,000			95,810,000
1	Penyediaan Dukungan Peringatan HUT Proklamasi / KORPRI / TIE dan Hari Jadi	Tersedianya dukungan penyelenggaraan kegiatan pelestarian budaya / sejarah	Benteng	1 Kegiatan	32,100,000		1 Kegiatan	35,310,000
2	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	Meningkatnya semangat kebangsaan warga masyarakat	Benteng	1 Kegiatan	10,000,000		1 Kegiatan	11,000,000
3	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	Terwujudnya masyarakat yang memahami pentingnya Pancasila dan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Benteng	1 Kegiatan	15,000,000		1 Kegiatan	16,500,000
4	Peringatan Hari Bela Negara	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai - nilai kejuangan bangsanya	Benteng	1 Kegiatan	15,000,000		1 Kegiatan	16,500,000
5	Peringatan Hari Lahir Pancasila	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dasar negara	Benteng	1 Kegiatan	15,000,000		1 Kegiatan	16,500,000

13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH				9,190,196,433			10,098,216,076
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan administrasi yang terpenuhi.			4,868,596,433			5,355,456,076
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah tempat yang dipenuhi jasa komunikasi, sumber daya air dan listriknya			72,000,000			79,200,000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah/peraturan perundang-undangan yang tersedia			5,000,000			5,500,000
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Persentase SPPD keluar daerah yang digunakan			300,796,433			330,876,076
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah rincian kegiatan penunjang administrasi perkantoran yang direncanakan			4,240,800,000			4,664,880,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor Sat.Pol.PP dan Damkar			50,000,000			55,000,000
6	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan dan Kesehatan Anggota Sat.Pol.PP dan Damkar	Jumlah anggota yang mendapat jaminan			100,000,000			110,000,000
7	Penyediaan jasa tenaga bantuan PolPP dan Pemadam Kebakaran	Jumlah jasa tenaga bantuan PolPP dan Damkar			100,000,000			110,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana aparatur yang terpenuhi			1,950,000,000			2,145,000,000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan			35,000,000			38,500,000
2	Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran dan perlengkapannya	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan			1,000,000,000			1,100,000,000
4	Pengadaan Mebeulier Kantor	Jumlah mebelier yang dibutuhkan			25,000,000			27,500,000
5	Pengadaan Peralatan gedung Kantor				50,000,000			55,000,000
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Pemadam Kebakaran	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibutuhkan			40,000,000			44,000,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki			10,000,000			11,000,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang yang membutuhkan pemeliharaan			150,000,000			165,000,000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki			10,000,000			11,000,000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubilier	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki			-			-
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah alat-alat studio dan komunikasi yang diperbaiki			15,000,000			16,500,000
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Pemadam Kebakaran	Jumlah peralatan dan mesin pemadam kebakaran yang diperbaiki			15,000,000			16,500,000
13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara			220,000,000			242,000,000
14	Rekondisi Kendaraan Pemadam Kebakaran	Jumlah kendaraan pemadam yang butuh rekondisi			100,000,000			110,000,000
15	Pengadaan Sarana Penunjang Operasional Pemadaman Kebakaran	Jumlah sarana yang dibutuhkan			30,000,000			33,000,000
16	Pengadaan Tabung Apar Pemadam Kebakaran	Jumlah tabung apar yang dibutuhkan			20,000,000			22,000,000
17	Pengadaan Mesin Pompa Air (Alcon)	Jumlah mesin pompa air yang dibutuhkan			20,000,000			22,000,000
18	Pengadaan Mesin Penghisap Air (Jet Pump)	Jumlah mesin penghisap air yang dibutuhkan			20,000,000			22,000,000
19	Pembuatan BAK Penampung Air Pemadam Kebakaran	Jumlah BAK penampung air yang dibutuhkan			100,000,000			110,000,000
20	Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor dan Dapur	Jumlah peralatan kebersihan yang dibutuhkan			20,000,000			22,000,000
21	Pengadaan Stasiun Mobile, Rig dan Perlengkapannya				50,000,000			55,000,000
22	Pengadaan Handy Talky (HT)	Jumlah HT yang diadakan			10,000,000			11,000,000
23	Pengadaan Sound System	Jumlah Sound System yang diadakan			5,000,000			5,500,000
24	Pengadaan Sirine Mobil	Jumlah sirine mobil yang diadakan			5,000,000			5,500,000
25	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun			-			-
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin aparatur baik PNS maupun PTT			394,000,000			433,400,000
1	Penyediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas lengkap beserta perlengkapannya yang dibutuhkan.			100,000,000			110,000,000
2	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas lengkap beserta perlengkapannya yang dibutuhkan.			100,000,000			110,000,000
3	Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas lengkap beserta perlengkapannya yang dibutuhkan.			-			-
5	Pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Personil Sat.Pol.PP dan Damkar	Jumlah KTA personil Sat.Pol.PP dan Damkar yang diterbitkan			100,000,000			110,000,000

6	Pengadaan Pakaian Operasional Pemadam Kebakaran (baju Anti Api)	Jumlah pakaian baju anti api beserta perlengkapannya yang dibutuhkan		50,000,000		55,000,000
7	Gerakan Disiplin Aparatur	Jumlah Kegiatan Disiplin Aparatur				-
8	Penunjang Operasional Penegakan Tindak Disiplin Internal Sat. Pol. PP dan Damkar	Jumlah Provost/PTI yang melakukan penindakan		17,000,000		18,700,000
9	Penegakan Disiplin PNS dan Pegawai Tidak Tetap (Pembinaan Tertib Pemerintahan, pengawasan PNS/Non PNS dan Lingkungan Sosial)	Jumlah pegawai PNS dan PTT yang diterbitkan		27,000,000		29,700,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Cakupan laporan peningkatan pengembangan sistem pelaporan yang baik		85,000,000		93,500,000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip yang disusun		5,000,000		5,500,000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun		5,000,000		5,500,000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah laporan dokumen perencanaan yang terselesaikan		20,000,000		22,000,000
4	Penatausahaan Keuangan	Jumlah kegiatan penatausahaan keuangan		10,000,000		11,000,000
5	Penyusunan laporan Pencapaian Standar Pelayanan minimal (SPM)	Jumlah laporan SPM yang disusun		5,000,000		5,500,000
6	Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Sat. Pol. PP dan Damkar	Jumlah SOP yang disusun		10,000,000		11,000,000
7	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sat. Pol. PP dan Damkar	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan		10,000,000		11,000,000
8	Penyusunan Dokumen Renja	Jumlah renja yang terselesaikan		5,000,000		5,500,000
9	Pemetaan Wilayah Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah kecamatan yang dibuat pemetaan rawan bencana				-
10	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD	Jumlah laporan RFK Sat. Pol. PP yang tersusun		5,000,000		5,500,000
11	Penyusunan Laporan Evaluasi pencapaian pelaksanaan RENSTRA SKPD	Jumlah laporan evaluasi renstra yang tersusun		5,000,000		5,500,000
12	Rekonsiliasi Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Aset	Jumlah Rekonsiliasi pelaporan dan aset		5,000,000		5,500,000
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.		273,000,000		300,300,000
1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelanggaran aturan/perda/perbup/ yang mendapat pembinaan.				-
2	Penyelenggaraan HUT Pol, PP, LINMAS	Jumlah personil yang mengikuti HUT Sat. Pol. PP dan Linmas		100,000,000		110,000,000
3	Peringatan HUT DAMKAR	Jumlah personil yang mengikuti HUT Damkar tingkat kabupaten		50,000,000		55,000,000
4	Penunjang Operasional Penertiban Hewan Ternak (operasi Penertiban Usaha Peternakan)	Jumah tempat/kecamatan penertiban hewan ternak		35,000,000		38,500,000
5	Pelaksanaan Pengamanan Pejabat dan Pengawasan	Jumlah pejabat yang dikawal		50,000,000		55,000,000
6	Pengamanan Asset Vital Pemerintah Daerah (Posko Pengamanan Objek Vital)	Jumlah aset vital daerah yang diamankan.		18,000,000		19,800,000
7	Penyediaan Insentif Petugas Jaga Ketentraman dan Ketertiban Umum (Posko Markas Komando, Posko Siaga Ketentraman dan Ketertiban)	Jumlah personil yang melakukan posko trantibum		20,000,000		22,000,000
						-
6	Program Penegakan peraturan perundang-undangan daerah	Cakupan penurunan pelanggaran perda		190,000,000		201,000,000
1	Sosialisasi Perda Prioritas di Kecamatan Daratan dan Kepulauan	Jumlah perda prioritas yang disosialisasikan.		50,000,000		50,000,000
2	Pengawasan dan monitoring Penegakan Perda /perundang-undangan.	Jumlah Perda dan perbup yang ditegakkan.		30,000,000		30,000,000
12	Pemberdayaan dan Operasional Intel	Jumlah Intel yang mengadakan penyelidikan		10,000,000		11,000,000
13	Penertiban Pelanggaran Peraturan daerah/Peraturan Bupati	Persentase penurunan peredaran miras, praktek perjudian, prostitusi dan pedagang kaki lima.		30,000,000		33,000,000
14	Penertiban Pelanggaran Hukum terhadap ketentuan Pidana Perda dan peraturan Kepala Daerah	Jumlah penertiban		5,000,000		5,500,000
15	Operasional Sekretariat Penyidik (PPNS)	Jumlah pelayanan dan penegakan Perda yang ditegakkan.		25,000,000		27,500,000
16	Operasional Penyidikan Pelanggaran Perda oleh PPNS	Jumlah pelayanan dan penegakan Perda yang ditegakkan.		20,000,000		22,000,000

17	Gerakan Aklimbo (Ajak Lingkungan Masyarakat Berhenti Merokok)	Presentase masyarakat yang berhenti merokok			20,000,000			22,000,000
7	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah gangguan Kemanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (K3) yang ditangani.			60,000,000			66,000,000
1	Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum (patroli terpadu ketentraman dan ketertiban umum antara Sat.Pol.PP, TNI, dan POLRI)	Jumlah Patroli wilayah yang dilakukan			30,000,000			33,000,000
2	Penyediaan Sarana Layanan Pengaduan 24 jam Pelanggaran Perda dan Pelanggaran Trantibum	Jumlah kasus yang diadakan di layanan pengaduan 24 jam selama setahun.			30,000,000			33,000,000
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Arparatur (SDM Sat.Pol.PP dan Damkar)	Cakupan SDA yang meningkat kapasitasnya.			115,000,000			126,500,000
1	Pendidikan dan pelatihan formal dan non-formal	Jumlah personil satpolpp yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			30,000,000			33,000,000
2	Pengiriman peserta diklat bagi Pegawai Sat.Pol.PP dan Damkar	Jumlah personil satpolpp dan Damkar yang mengikuti diklat			20,000,000			22,000,000
3	Pelaksanaan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol.PP	Jumlah anggota yang mengikuti diklat PPNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang dihasilkan.			20,000,000			22,000,000
4	Pelatihan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Perda bagi Unit Sat.Pol.PP Kecamatan	Jumlah personil satpolpp dan Damkar yang mengikuti pelatihan			15,000,000			16,500,000
5	Peningkatan Kapasitas Sat.Pol.PP dan Pemadam Kebakaran	Jumlah personil yang meningkat kapasitasnya			30,000,000			33,000,000
9	Program Pemberantasan Peredaran Cukai Rokok Ilegal	Persentase Penurunan pelanggaran terkait pengawasan aturan rokok			259,445,000			282,389,500
1	Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Jumlah kecamatan yang menjadi target penyuluhan pencegahan peredaran cukai palsu			30,000,000			30,000,000
2	Penyuluhan pencegahan peredaran Cukai palsu	Jumlah anggota Tim Koordinasi Kabupaten yang terlibat dalam pengendalian peredaran rokok ilegal.			10,000,000			10,000,000
3	Pengendalian Peredaran Rokok ilegal dan Pengakan hukum oleh Tim Koordinasi Kabupaten.	Jumlah anggota Tim Koordinasi Kabupaten yang terlibat dalam pengendalian peredaran rokok ilegal.			30,000,000			30,000,000
4	Penegakan Hukum Larangan Merokok di tempat-tempat tertentu (penertiban Pengawasan Tanpa Rokok)	Jumlah tempat yang diawasi			100,000,000			110,000,000
5	Pengadaan Media Sosialisasi Perda Larangan Merokok/Papan Bicara	Jumlah Media Sosialisasi yang digunakan			10,000,000			11,000,000
6	Pengawasan Iklan Produk Rokok Tanpa Izin dan Penertiban rokok tanpa cukai di peredaran atau tempat penjual eceran.	Jumlah kecamatan yang dipantau iklan produk rokoknya			20,000,000			22,000,000
7	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran/(Pendataan dan Penertiban Rokok tanpai cukai)	Jumlah kecamatan yang dijadikan tempat pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai			49,445,000			54,389,500
8	Penyusunan Laporan Hasil Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Penegakan Hukum Larangan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah laporan yang disusun dari hasil Pemanfaatan Dana Bagia Hasil Pajak rokok			50,000,000			55,000,000
10	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat untuk menjaga Ketamanan dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan perlindungan masyarakat			271,650,000			298,815,000
1	Pemberdayaan Sat Linmas dalam Meningkatkan Fungsi Poskamdes dan Poskamling (Pemberdayaan Satuan Linmas dalam menunjang terwujudnya Trantib Swakarsa)	Jumlah Pos Keamanan Lingkungan di Kecamatan Daratan dan Kepulauan yang tersedia.			30,000,000			33,000,000
2	Sosialisasi Peran dan Fungsi keamanan masyarakat kepada Camat, Kepala Desa/ Lurah, Tokoh Masyarakat dan LSM	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi.			30,000,000			33,000,000
3	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.	Jumlah personil Linmas sesuai dengan kebutuhan.			61,650,000			67,815,000
4	Patroli malam tenaga pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Petugas Linmas yang melakukan patroli malam di wilayah kerja.			40,000,000			44,000,000
5	Pembangunan Pos Ronda/Pos Keamanan Lingkungan	Jumlah Pos Keamanan Lingkungan di Kecamatan Daratan dan Kepulauan yang tersedia.			30,000,000			33,000,000
6	Inventarisasi, pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah kegiatan data dan informasi			20,000,000			22,000,000
7	Posko Perlindungan Masyarakat di tempat Bencana	Jumlah anggota yang terlibat posko			20,000,000			22,000,000
8	Operasional dan koordinasi pengamanan daerah dalam rangka pemilihan presiden dan pilkades (fasilitasi dan koordinasi Pengamanan dalam rangka pemilihan presiden)	Jumlah kegiatan pengamanan			40,000,000			44,000,000

11	Program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Kebakaran	Cakupan peningkatan pencegahan kebakaran			125,000,000			137,500,000
1	Pemberdayaan Tim relawan	Jumlah Anggota Timrelawan			25,000,000			27,500,000
2	Penyuluhan Pencegahan Kebakaran (Penyuluhan Masyarakat tentang proteksi dini kebakaran)	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan			30,000,000			33,000,000
3	Monitoring dan Pengawasan Potensi Kebakaran	Jumlah monitoring pengawasan potensi kebakaran			20,000,000			22,000,000
4	Pengawasan dan monitoring pencegahan dan peralatan proteksi kebakaran	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan			20,000,000			22,000,000
5	Sosialisasi dan Pembentukan Tim Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi			30,000,000			33,000,000
12	Program Penanggulangan kebakaran	Persentase penurunan kebakaran			598,505,000			658,355,500
1	Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan.						
2	Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah anggota Damkar yang mengikuti posko			200,000,000			220,000,000
3	Investigasi dan Evakuasi Kejadian Kebakaran	Jumlah anggota tim relawan yang terbentuk						-
4	Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	Jumlah kebakaran yang perlu penanggulangan			42,505,000			46,755,500
5	Pemberdayaan Tim Redaksi Cepat dalam Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	Jumlah Anggota Tim reaksi cepat			50,000,000			55,000,000
6	Peningkatan Investigasi dan pemadaman pasca Kebakaran	Jumlah pemadaman yang perlu investigasi			86,000,000			94,600,000
7	Pengawasan dan Monitoring Pengendalian Evakuasi dan Penyelamatan Bencana	Jumlah kebakaran yang perlu evakuasi dan penyelamatan						-
8	Penunjang Operasional Posko Pemadam Kebakaran (Posko Pengendalian dan Pemadam Kebakaran)	Jumlah anggota Damkar yang mengikuti posko			220,000,000			242,000,000
9	Operasional Peningkatan Pemadaman dan Investigasi bencana kebakaran	Jumlah kegiatan peningkatan operasional						-
14	3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4,742,401,734			5,216,641,907
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi			1,034,066,734			1,137,473,407
1	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dapat Dipenuhi	14 Layanan		552,566,734		14 Layanan	607,823,407
2	Penyediaan Jasa Komuniasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Persediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	4 Unit		121,500,000		4 Unit	133,650,000
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 Tabloid		20,000,000		10 Tabloid	22,000,000
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang Dilaksanakan	1 tahun		300,000,000		1 tahun	330,000,000
5	Tunjangan Resiko Kerja Personil Kebencanaan	Tersedianya Dana Tunjangan Resiko Kerja Personil Kebencanaan			40,000,000			44,000,000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			409,000,000			449,900,000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara	1 Unit		30,000,000		1 Unit	33,000,000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	22 Unit		150,000,000		22 Unit	165,000,000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang dilaksanakan	1 Unit		15,000,000		1 Unit	16,500,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang	47 Unit		30,000,000		47 Unit	33,000,000
5	Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 unit		50,000,000		1 unit	55,000,000
6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dapat disediakan	2 Unit		15,000,000		2 Unit	16,500,000
7	Pengadaan Meubeleir	Jumlah Mobiler yang tersedia	3 unit		10,000,000		3 unit	11,000,000
8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit		60,000,000		3 unit	66,000,000
9	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	5 unit		30,000,000		5 unit	33,000,000
10	Pengadaan Finger Print	Persentase kehadiran pegawai tepat waktu	1 set		7,000,000		1 set	7,700,000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Website OPD	Jumlah Pemeliharaan Operasional Website yang Tersedia	12 bulan		12,000,000		12 bulan	13,200,000

3	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Sumberdaya Aparatur yang Difasilitasi			80,000,000			88,000,000
1	Pengembangan Wawasan SDM Aparatur dan Masyarakat Pengelola Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur dan masyarakat yang terlatih		20 org	30,000,000		20 org	33,000,000
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		3 Orang	25,000,000		3 Orang	27,500,000
3	Pengelolaan Penanggulangan Bencana Pelatihan Penyelamatan dan Evakuasi di Laut	Jumlah Pegawai yang terlatih		10 org	25,000,000		10 org	27,500,000
4	Peningkatan Penembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			112,000,000			123,200,000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja yang tersedia		1 Dokumen	4,000,000		1 Dokumen	4,400,000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun tepat waktu dan sesuai dengan regulasi		4 Dokumen	15,000,000		4 Dokumen	16,500,000
3	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Profil SKPD		1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	11,000,000
4	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia		3 Dokumen	10,000,000		3 Dokumen	11,000,000
5	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Rencana Kinerja SKPD yang sesuai dengan Renstra dan RPJMD		1 Dokumen	4,000,000		1 Dokumen	4,400,000
6	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran sesuai dengan regulasi		1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,500,000
7	Penyusunan RENSTRA SKPD	Persentase Peningkatan Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersedia		1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	11,000,000
8	Penyusunan Administrasi Keuangan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Penatausahaan Keuangan dan perbendaharaan yang sesuai regulasi		12 Dokumen	7,500,000		12 Dokumen	8,250,000
9	Pelaksanaan Tim Tindak Lanjut SKPD	Jumlah Tindak Lanjut SKPD hasil pemeriksaan yang difasilitasi		1 lap	5,000,000		1 lap	5,500,000
10	Penatausahaan Barang dan Persediaan SKPD	Jumlah Kartu Inventaris Barang dan Persediaan SKPD yang tersedia		1 lap	10,000,000		1 lap	11,000,000
11	Inventarisasi Aset dan Kodefikasi Barang SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset dan Kodefikasi Barang SKPD yang tersedia		1 lap	5,000,000		1 lap	5,500,000
12	Penyusunan RKA/RKAP, DPA/PDPA	Jumlah Dokumen RKA/RKAP, DPA/PDPA yang tersedia		2 Dokumen	11,000,000		2 Dokumen	12,100,000
13	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang dibuat		1 Dokumen	4,000,000		1 Dokumen	4,400,000
14	Pengelolaan Aset SKPD	Laporan Aset SKPD		4 Dokumen	7,500,000		4 Dokumen	8,250,000
15	Penyusunan Standar Pelayanan SPM	Jumlah Standar Pelayanan SPM sesuai regulasi		1 Dokumen	4,000,000		1 Dokumen	4,400,000
16	Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana	Perda		1 Dokumen	20,000,000		1 Dokumen	22,000,000
5	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam	Peningkatan Persentase Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Bencana Alam			741,830,000			816,013,000
1	Pelatihan Relawan Bencana	Jumlah Masyarakat yang terlatih		60 Orang	45,656,250		60 Orang	50,221,875
2	Penyebarluasan Informasi Bencana Alam (Kalender dan Baliho)	Jumlah kalender dan baliho yang didistribusikan kepada masyarakat		1 Aplikasi	62,142,000		1 Aplikasi	68,356,200
3	Penyusunan Peta Rawan Bencana Wilayah Kecamatan Kepulauan	Jumlah Peta Rawan Bencana Yang Tersedia		1 peta	50,000,000		1 peta	55,000,000
4	Pembuatan Rambu Jalur Evakuasi	Jumlah Rambu Jalur Evakuasi yang terpasang		1 lap	30,000,000		1 lap	33,000,000
5	Pembuatan Data Potensi Penanggulangan Bencana	Jumlah Data Potensi yang tersedia		1 dok	75,000,000		1 dok	82,500,000
6	Pelaksanaan Apel Siaga Bencana	Persentase Kesiagaan dalam Menghadapi Bencana		1 kali	15,000,000		1 kali	16,500,000
7	Pelaksanaan Program Desa Tangguh bencana	Jumlah desa yang difasilitasi		4 Desa/ Kel.	99,854,250		4 Desa/ Kel.	109,839,675
8	Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah Pohon yang Dipangkas dan Dibersihkan/Dirapikan		200 Pohon	92,023,000		200 Pohon	101,225,300
9	Edukasi Kebencanaan di Tingkat Sekolah	Jumlah Siswa yang Terlatih		30 siswa	15,000,000		30 siswa	16,500,000
10	Koordinasi dan Konsultasi Pengurangan Risiko Bencana	Pengurangan Resiko Bencana Bagi Masyarakat		1 Tahun	88,000,000		1 Tahun	96,800,000
11	Edukasi Kebencanaan dan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi	Jumlah Siswa yang Terlatih		5 Sekolah, 450 Lbr/ 6 Buah	56,733,750		5 Sekolah, 450 Lbr/ 6 Buah	62,407,125
12	Sosialisasi Kebencanaan	Jumlah Masyarakat yang Mendapat Edukasi Kebencanaan		140 Orang	62,420,750		140 Orang	68,662,825
13	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Peningkatan Persentase Pelibatan Aparat Desa dalam Pencegahan Bencana Alam		81 aparat	50,000,000		81 aparat	55,000,000
								-

6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Peralatan dan Logistik Bencana yang Tersedia			53,330,000			58,663,000
1	Pendampingan Bantuan Peralatan dan Logistik	Jumlah Bantuan Logistik dan Peralatan yang Diperoleh dari Pemerintah Provinsi dan Pusat		1 Paket	33,330,000		1 Paket	36,663,000
2	Penyusunan dan Inventarisasi Peralatan dan Logistik Bencana	Jumlah Peralatan Logistik bencana di setiap SKPD terkait		1 Dokumen	20,000,000		1 Dokumen	22,000,000
7	Program Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Korban Darurat Bencana			232,835,000			256,118,500
1	Penyediaan Dana Siap Pakai Bagi Korban bencana	Jumlah Pemberian Bantuan Stimulasi Bagi Korban Bencana		35 KK	130,000,000		35 KK	143,000,000
2	Pengkajian dan Pendataan Peristiwa Bencana	Jumlah Pengkajian dan Pendataan Bencana yang Difasilitasi		35 Peristiwa Bencana	20,000,000		35 Peristiwa Bencana	22,000,000
3	Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat yang Terlatih		80 Orang	82,835,000		80 Orang	91,118,500
8	Program Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Kejadian Bencana yang Difasilitasi			2,079,340,000			2,287,274,000
1	Peninjauan dan Assesment Kerusakan dan Kerugian Masyarakat Pasca Bencana	Jumlah Kegiatan Assesment yang Difasilitasi		1 Dokumen	15,000,000		1 Dokumen	16,500,000
2	Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana	Jumlah Rumah Masyarakat Pasca Bencana yang Diperbaiki		75 KK	204,340,000		75 KK	224,774,000
3	Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pasca Bencana		10 Kali	55,000,000		10 Kali	60,500,000
4	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Jenis Material Dasar yang Difasilitasi		1 paket	200,000,000		1 paket	220,000,000
5	Pendampingan Pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah	Pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah dapat terdampingi		1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
6	Pembangunan Tanggul/Bronjong	Persentase Jumlah Tanggul yang Difasilitasi		1 paket	250,000,000		1 paket	275,000,000
7	Pembangunan Tanggul/Bronjong (lanjutan)	Persentase Jumlah Tanggul yang Difasilitasi		1 paket	200,000,000		1 paket	220,000,000
8	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Lanjutan)	Cakupan Jenis Material Dasar yang Difasilitasi		1 paket	200,000,000		1 paket	220,000,000
9	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Break Water	Jumlah Break Water yang direhabilitasi		1 paket	200,000,000		1 paket	220,000,000
10	Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai	Jumlah Tanggul Pengaman Pantai yang dibangun		1 paket	200,000,000		1 paket	220,000,000
11	Pembangunan Tanggul Pengaman Sungai	Jumlah Tanggul Pengaman Sungai yang dibangun		1 paket	200,000,000		1 paket	220,000,000
12	Studi Banding Kebencanaan	Tersedianya Informasi Kebencanaan dan Bahan Perbandingan dalam Penanganan Bencana pada Tahap Pasca Bencana		1 kali	75,000,000		1 kali	82,500,000
13	Perbaikan lingkungan Wilayah Pasca Bencana	Terpenuhinya Perbaikan Lingkungan Wilayah Pasca Bencana		1 lap	150,000,000		1 lap	165,000,000
14	Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum Pasca Bencana	Terpenuhinya Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum Masyarakat pada Pasca Bencana		1 lap	100,000,000		1 lap	110,000,000
15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Wilayah Pasca Bencana	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana		1 lap	10,000,000		1 lap	11,000,000
11	SOSIAL				6,885,653,302			7,574,218,632
9	DINAS SOSIAL				6,885,653,302			7,574,218,632
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran			821,053,302			903,158,632
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	15,000,000		15,000,000	16,500,000
2	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	95,000,000		12 Bulan	104,500,000
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Media Langganan	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	10,000,000		12 Bulan	11,000,000
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	terwujudnya laporan hasil hasil rapat koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas lainnya di dalam dan diluar daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	250,000,000		12 Bulan	275,000,000
5	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	penunjang administrasi perkantoran	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	451,053,302		12 Bulan	496,158,632
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			518,600,000			570,460,000
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Kep. Selayar	19 Unit	100,000,000		7 Unit	110,000,000
2	Pengadaan Kendaraan Operasional	Jumlah kendaraan roda dua yang disediakan		2 unit	40,000,000		2 unit	44,000,000

3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	10,000,000		1 Tahun	11,000,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil dinas yg dipelihara		1 unit	20,000,000		1 unit	22,000,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dan Empat	Kab. Kep. Selayar	20 Unit	80,000,000		2 Mobil & 30 Motor	88,000,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	52 Unit	20,000,000		1 Tahun	22,000,000
7	Rehabilitasi sekretariat LK3, SLRT, PKH, dan TKSK	Terpeliharanya Bangunan Sekretariat LK3, SLRT, PKH dan TKSK	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	150,000,000		1 Unit	165,000,000
8	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Kep. Selayar	16 Unit	48,600,000		11 Unit	53,460,000
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah	Terwujudnya Pelaksanaan sarana dan prasarana Rumah Singgah	Kab. Kep. Selayar	1 Paket	50,000,000		1 Tahun	55,000,000
								-
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan			442,000,000			486,200,000
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen LAKIP	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	4,000,000		1 Dokumen	4,400,000
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen SOP	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	4,000,000		1 Dokumen	4,400,000
3	Penatausahaan Keuangan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	4,000,000		1 Dokumen	4,400,000
4	Peningkatan Pengelolaan Barang/asset	Laporan Pengelolaan Barang/asset	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	4,000,000		1 Dokumen	4,400,000
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	50,000,000		1 Dokumen	55,000,000
6	Penyusunan Laporan SPM	Laporan Penerapan SPM	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	4,000,000		2 Dokumen	4,400,000
7	Updating Data dan Informasi PMKS	Laporan/ data		1 Laporan	12,000,000		1 Laporan	13,200,000
8	Pemutakhiran Data Masyarakat Miskin	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	360,000,000		6 Dok	396,000,000
								-
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi			1,707,000,000			1,877,700,000
1	Penyediaan Bantuan Kelangsungan Hidup Bagi Keluarga Fakir Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh bantuan	Kab. Kep. Selayar	106 KK	200,000,000		120 KK	220,000,000
2	Pengawasan, Pemantauan/Distribusi BPNT	Terwujudnya Pengawasan Pemantauan Distribusi BPNT	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	62,000,000		88 Desa/kef.	68,200,000
3	Pemantapan Data Penerima Manfaat Melalui Aplikasi SIKS-NG	Tersedianya (DT-PPFM) Secara Online	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	80,000,000		1 Laporan	88,000,000
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui KUBE	Jumlah Keluarga Miskin Memperoleh Bantuan Kelompok	Kab. Kep. Selayar	6 Kelompok	150,000,000		10 Kelompok	165,000,000
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui UEP	Jumlah Keluarga Miskin Memperoleh Bantuan UEP	Kab. Kep. Selayar	204 KK	1,000,000,000			1,100,000,000
6	Penunjang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Tersedianya Program Pemberdayaan Fakir	Kab. Kep. Selayar	1 laporan	15,000,000		1 tahun	16,500,000
7	Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Rentan Melalui UEP	Keluarga Rentan memperoleh Bantuan Usaha	Kab. Kep. Selayar	28 Orang	100,000,000		35 KK	110,000,000
8	Pembinaan dan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Melalui UEP	Wanita Rawan Ekonomi memperoleh Bantuan	Kab. Kep. Selayar	29 Orang	100,000,000		35 KK	110,000,000
								-
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas			1,497,000,000			1,646,700,000
1	Penanganan Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terwujudnya Pelayanan Korban Bencana Alam	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	100,000,000		12 Bulan	110,000,000
2	Penunjang Pelaksanaan Tanggap darurat	Terlaksananya Operasional Pendampingan (Tahun)	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	50,000,000		12 Bulan	55,000,000
3	Pelayanan dan Penanganan Orang Terlantar	Penanganan Orang Terlantar	Kab. Kep. Selayar	20 Orang	50,000,000		20 Orang	55,000,000
4	Pelayanan dan Penanganan Korban Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial yang memperoleh bantuan	Kab. Kep. Selayar	90 KK	150,000,000		90 KK	165,000,000
5	Pendampingan Psikologis bagi korban bencana alam	Terlaksananya pendampingan psikologis bagi korban bencana alam	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	25,000,000			27,500,000
6	Koordinasi perlindungan sosial korban bencana alam dan instansi terkait	Terwujudnya koordinasi perlindungan sosial korban bencana alam dengan instansi terkait	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	15,000,000			16,500,000
7	Penguatan akses kearifan lokal dan keserasian sosial	Terwujudnya koordinasi perlindungan sosial korban bencana sosial dengan instansi terkait	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	20,000,000			22,000,000
8	Penunjang Operasional Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Terwujudnya RTLH	Kab. Kep. Selayar	1200 KK	400,000,000		1 tahun	440,000,000
9	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Terwujudnya RTLH			-			-

10	Pembinaan dan Pemberdayaan Lanjut Usia Jompo Potensial Melalui UEP	Terlaksananya pemberian Bantuan terhadap lanjut usia jompo	Kab. Kep. Selayar	20 Orang	87,000,000		35 KK	95,700,000
11	Pembangunan Sistem Informasi Bantuan sosial	Aplikasi/ Sistem Informasi Bansos						-
12	Pembangunan Sistem Informasi E-PMKS	Aplikasi E-PMKS						-
13	Pengadaan Bantuan Pangan	Terealisasinya Bantuan Pangan pada Masyarakat Miskin	Kab. Kep. Selayar	900 KK/Thn	600,000,000		1000 KK	660,000,000
14	Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolahan data untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota							
6	Program pembinaan anak terlantar	Persentase anak terlantar yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas			497,000,000			546,700,000
1	Pengiriman Anak Terlantar/Remaja Putus Sekolah untuk Mengikuti Pelatihan Keterampilan Kerja	Anak Terlantar/Remaja Putus Sekolah Memperoleh Keterampilan						
2	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pekerja Sosial Anak	Pekerja Sosial Anak Mendapatkan Peningkatan Kesejahteraan	Kab. Kep. Selayar	4 Orang	30,000,000		4 peksos	33,000,000
3	Penunjang Operasional Pemberian Tunjangan Hidup bagi Anak Yatim Piatu dan Anak Yatim	Terlaksananya Tunjangan Hidup Bagi Anak Yatim Piatu	Kab. Kep. Selayar	250 anak	50,000,000		150 anak	55,000,000
4	Pemberian Bantuan Kepada Anak EKS Peserta Keterampilan Kerja	Terlaksananya Pembinaan Anak terlantar/Remaja putus sekolah melalui EUP			70,000,000			77,000,000
5	Pendampingan Anak Yang Bermasalah Hukum (ABH)	ABH Mendapatkan Pendampingan Hukum	Kab. Kep. Selayar	55 Anak	50,000,000		1 Tahun	55,000,000
6	Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Terlantar	Anak Terlantar Memperoleh Bantuan	Kab. Kep. Selayar	20 anak	87,000,000		30 anak	95,700,000
7	Pemberian Bantuan terhadap Anak sebagai Korban (ABH)	Terpenuhinya Hak-hak serta penguatan Psikis Anak	Kab. Kep. Selayar	25 anak	100,000,000		25 anak	110,000,000
8	Melaksanakan Sosialisasi SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)	Terciptanya pemahaman tentang perlindungan anak	Kab. Kep. Selayar	30 anak	50,000,000		30 anak	55,000,000
9	Pelaksanaan Hari Anak Nasional	Peningkatan Motivasi, Kreatifitas dan Kepekaan Sosial	Kab. Kep. Selayar	1 kali	10,000,000		1 kali	11,000,000
10	Peksos Go To School	Terwujudnya Peksos Go to School di Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	4 Kali	50,000,000		3 Sekolah	55,000,000
7	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas			150,000,000			165,000,000
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat Melalui UEP	Terwujudnya Pembinaan Penyandang Cacat	Kab. Kep. Selayar	20 Orang	100,000,000		10 KK	110,000,000
2	Penunjang Oprasional Pemberian Tunjangan Hidup Bagi Penyandang Cacat Fisik dan Trauma	Terwujudnya Pemberian Tunjangan Hidup Bagi Penyandang Fisik dan Trauma	Kab. Kep. Selayar	250 Orang	50,000,000		350 KK	55,000,000
8	Pelestarian NK.3	jumlah NK.3 yang dilestarikan			158,000,000			173,800,000
1	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)	Terlaksananya Hari Kesetiakawanan Sosial	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	20,000,000			22,000,000
2	Pemberian bantuan kepada janda/ ahli waris pahlawan	Keluarga pahlawan yang memperoleh bantuan	Kab. Kep. Selayar	27 Orang	45,000,000		27 KK	49,500,000
3	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	18,000,000		1 Tahun	19,800,000
4	Peringatan Hari Pahlawan	Terlaksananya Peringatan Hari pahlawan	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	20,000,000		1 Tahun	22,000,000
5	Karya Bhakti Kesetiakawanan Sosial	Terpeliharanya nilai nilai Kesetiakawanan Sosial		1 Laporan	15,000,000		1 Laporan	16,500,000
6	Pelaksanaan anjagsana dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RI dan Hari jadi Selayar	Terwujudnya Anjagsana	Kab. Kep. Selayar	35 Orang	40,000,000		2 Kali	44,000,000
9	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas			50,000,000			55,000,000
1	Pembinaan dan pemberdayaan Eks Narapidana Melalui UEP	Terwujudnya pembinaan dan pemberdayaan Eks Napi.	Kab. Kep. Selayar	10 Orang	50,000,000		15 KK	55,000,000
2	Pemantauan Kemajuan/Perkembangan Usaha Eks Narapidana Yang Telah Memperoleh Bantuan Sosial.	Terlaksananya Pemantauan Kemajuan Perubahan Usaha Eks Narapidana.						
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Proporsi lembaga sosial yang mampu berperan dalam menangani dan menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat			1,045,000,000			1,149,500,000
1	Penunjang Operasional Pemberian Tunjangan Hidup Bagi Lanjut Usia Terlantar (Non Potensial)	Persentase Penerima Tunjangan Hidup Bagi Lanjut Usia Terlantar	Kab. Kep. Selayar	750 KK	125,000,000		1300 KK	137,500,000
2	Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) Dana Sharing	Persentase Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan	Kab. Kep. Selayar	1 Paket	100,000,000		1 tahun	110,000,000

3	Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Siaga Bencana (Kapal, Mobil Dumlap dan Motor)	Jumlah Kendaraan Siaga Bencana yang terpelihara	Kab. Kep. Selayar	5 unit	48,000,000		5 unit	52,800,000
4	Penunjang Operasional dan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Anggota TAGANA memperoleh Kesejahteraan	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	97,000,000		26 orang	106,700,000
5	Kampung Siaga Bencana (KSB)	Tercapainya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	75,000,000		12 Bulan	82,500,000
6	Pembangunan Gudang Logistik Bencana	Terwujudnya bangunan Logistik Bencana	Kab. Kep. Selayar	1 unit	220,000,000		1 unit	242,000,000
7	Peningkatan dan penguatan kelembagaan PSKS	Terwujudnya Kegiatan PSKS	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	40,000,000		1 tahun	44,000,000
8	Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna	Karang Taruna memperoleh pembinaan dan pemberdayaan	Kab. Kep. Selayar	3 KT	125,000,000		3 KT	137,500,000
9	Study Karya Bakti Karang Taruna (SKBTN)	Terlaksananya Study Karya Bhakti Karang Taruna						-
10	Penunjang Kegiatan LK3	Meningkatnya pelayanan konsultasi	Kab. Kep. Selayar	8 Orang	20,000,000		15 KK	22,000,000
11	Penunjang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Terwujudnya SLRT	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	50,000,000		1 tahun	55,000,000
12	Penunjang Operasional Kegiatan PSKS	Terlaksananya kegiatan PSKS	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	15,000,000		1 tahun	16,500,000
13	Penunjang Operasional Penanganan Korban Bencana Sosial	Terlaksananya Penanganan Korban Bencana	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	80,000,000		1 Laporan	88,000,000
14	Penunjang Operasional Tenaga Kesehatan sosial Kecamatan (TKSK)	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan TKSK	Kab. Kep. Selayar	11 orang	50,000,000		11 orang	55,000,000
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				46,304,566,381			50,690,023,019
12	TENAGA KERJA				2,072,150,540			2,279,365,594
10	1. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				2,072,150,540			2,279,365,594
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan (%)			1,648,150,540			1,812,965,594
1	Pengukuran tingkat produktivitas tenaga Kerja	Terukurnya tingkat produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Kep. Selayar	1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
2	Pelatihan wirausaha	Jumlah wirausaha muda yang memiliki piagam/sertifikasi pelatihan wirausaha muda	Kab. Kep. Selayar	15 org	30,000,000		15 org	33,000,000
3	Koordinasi dan pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Jumlah koordinasi dan jumlah pembinaan	Kab. Kep. Selayar	3 kali	10,000,000		3 kali	11,000,000
4	Pelatihan pengembangan motivasi berprestasi (ATM)	Jumlah tenaga kerja yang memiliki piagam/sertifikasi pelatihan ATM	Kab. Kep. Selayar	15 org	30,000,000		15 org	33,000,000
5	Penunjang pelaksanaan Asian Skill Comptition (ASC)	Jumlah kegiatan penunjang ASC yang dilaksanakan	Kab. Kep. Selayar	1 keg	10,000,000		1 keg	11,000,000
6	Sosialisasi pemberdayaan tenaga kerja usaha mandiri masyarakat	Jumlah pelaku usaha yang memiliki kompetensi di Bidang Kewirausahaan	Kab. Kep. Selayar	35 Orang	30,000,000		1 Tahun	33,000,000
7	Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Terwujudnya prasarana pendidikan dan pelatihan yang representif	Kab. Kep. Selayar	1 paket	10,000,000			11,000,000
8	Bantuan peralatan pertukangan bagi alumni BLK	Terlaksananya Pemberian Bantuan Peralatan Pertukangan bagi alumni BLK	Kab. Kep. Selayar	8 klp/40 org	424,535,740		8 klp/40 org	466,989,314
9	Bantuan peralatan perbengkelan bagi alumni BLK	Terlaksananya Pemberian Bantuan Peralatan Perbengkelan bagi alumni BLK	Kab. Kep. Selayar	7 klp/35 org	384,000,000		7 klp/35 org	422,400,000
10	Bantuan mesin jahit bagi alumni BLK	Terlaksananya Pemberian Bantuan Peralatan Mesin Jahit bagi alumni BLK	Kab. Kep. Selayar	7 klp/35 org	369,614,800		7 klp/38 org	406,576,280
11	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan						-
-	Pelatihan manajemen usaha konveksi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kab. Kep. Selayar	30 org	70,000,000		30 org	77,000,000
-	Pelatihan pertukangan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kab. Kep. Selayar	30 org	70,000,000		30 org	77,000,000
-	Pelatihan perbengkelan las	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kab. Kep. Selayar	30 org	70,000,000		30 org	77,000,000
-	Pelatihan jahit menjahit	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kab. Kep. Selayar	30 org	70,000,000		30 org	77,000,000
12	Koordinasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan daya saing tenaga kerja	Kab. Kep. Selayar	1 tahun	50,000,000		1 tahun	55,000,000
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			205,000,000			225,500,000
1	Padat karya infrastruktur	Terwujudnya pembangunan sarana infrastruktur	Kab. Kep. Selayar	1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
2	Padat karya produktif	Terwujudnya sarana usaha ekonomi bagi masyarakat	Kab. Kep. Selayar	1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
3	Pendampingan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja (PPKK)	Terwujudnya kesempatan kerja bagi pencari kerja dan penganggur	Kab. Kep. Selayar	1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
4	Pelayanan Informasi Pasar Kerja (bursa kerja online)	Terwujudnya informasi pasar kerja bagi masyarakat penganggur	Kab. Kep. Selayar	1 lap	25,000,000		1 lap	27,500,000

6	Pendataan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur	Terdatanya tenaga kerja penganggur	Kab. Kep. Selayar	1 lap	25,000,000		1 lap	27,500,000
9	Penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja khusus (Disabilitas)	Terciptanya lapangan kerja bagi tenaga kerja khusus (Disabilitas)	Kab. Kep. Selayar	1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
10	Temu konsultasi dan evaluasi pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana (TKS)	Tersedianya Tenaga Kerja sarjana yang berdaya saing	Kab. Kep. Selayar	1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
11	Pemutakhiran data angkatan kerja dan penganggur	Terwujudnya inventarisasi data angkatan kerja dan penganggur	Kab. Kep. Selayar	44 Desa/7 Kel	35,000,000		1 tahun	38,500,000
12	Pemberdayaan dan perluasan kerja bagi petani dan nelayan	Terwujudnya pembinaan/ pemberian bimbingan bagi masyarakat petani dan nelayan	Kab. Kep. Selayar	20 petani	25,000,000		20 petani	27,500,000
3	Program Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang dilindungi dan di kembangkan			137,250,000			150,975,000
1	Sosialisasi dan koordinasi masyarakat tentang keselamatan dan kesehatan kerja	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi masyarakat tentang keselamatan kerja (K3)	Kab. Kep. Selayar	20 org	15,000,000		20 org	16,500,000
2	Sosialisasi Dasar-dasar keselamatan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja informal	Terlaksananya sosialisasi dasar dasar keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja Informal	Kab. Kep. Selayar	40 Tenaga Kerja	25,000,000		40 orang	27,500,000
3	Pelatihan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sektor informal	Meningkatnya pengetahuan tenaga kerja informal mengenai (SMK3) (orang)	Kab. Kep. Selayar	30 org	27,000,000		30 org	29,700,000
4	Peningkatan pengetahuan bagi perusahaan mengenai perlindungan pekerja anak	Meningkatnya pengetahuan pengusaha mengenai perlindungan pekerja anak (perusahaan)	Kab. Kep. Selayar	20 org	17,000,000		20 org	18,700,000
5	Penyuluhan tentang regulasi perlindungan pekerja perempuan	Meningkatnya pengetahuan tentang regulasi perlindungan pekerja perempuan (perusahaan)	Kab. Kep. Selayar	30 org	25,000,000		30 org	27,500,000
6	Monitoring dan evaluasi pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3	Tersedianya data perusahaan yang belum dan telah sesuai standar K3 (perusahaan)	Kab. Kep. Selayar	25 Perusahaan	28,250,000		6 laporan	31,075,000
4	Program Peningkatan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Jumlah Jaminan Sosial bagi Kesejahteraan Tenaga Kerja			41,750,000			45,925,000
1	Sosialisasi dan koordinasi pembinaan jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja	Terlaksananya koordinasi dan monitoring pembinaan jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja		30 org	15,000,000		30 org	16,500,000
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial tenaga kerja	Persentase Badan Usaha/Pemberi Kerja yang terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab. Kep. Selayar	50 PK/BU	26,750,000		50 PK/BU	29,425,000
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BLK	Persentase administrasi perkantoran BLK yang ditingkatkan pelayanannya			40,000,000			44,000,000
1	Penunjang Operasional UPTD BLK	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran BLK	Kab. Kep. Selayar	1 tahun	10,000,000		1 tahun	11,000,000
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BLK	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Prasarana BLK	Kab. Kep. Selayar	1 tahun	30,000,000		1 tahun	33,000,000
3	Pemasangan unit sambungan baru (USB) listrik PLN BLK	Jumlah USB						
4	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan						
-	Pendidikan dan Pelatihan perbengkelan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Perbengkelan	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		20 org	44,000,000
-	Pendidikan dan Pelatihan Las	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan las	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		20 org	44,000,000
-	Pendidikan dan Pelatihan pertukangan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan pertukangan	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		20 org	44,000,000
-	Pendidikan dan pelatihan finishing moubel	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan industri	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		20 org	44,000,000
-	Pendidikan dan pelatihan industri kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan industri komputer	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		20 org	44,000,000
-	Pengadaan peralatan kerja (BLK)	Jumlah peralatan kerja yang diadakan	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		20 org	44,000,000
-	Pendidikan dan pelatihan menjahit	Tersedianya jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		0	44,000,000
-	Pendidikan dan Pelatihan Teknik jaringan Komputer	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		0	44,000,000
-	Pendidikan dan Pelatihan Perakitan dan Servis Program Aplikasi Windows	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		0	44,000,000
-	Pendidikan dan Pelatihan Autocad	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		0	44,000,000
-	Pendidikan dan Pelatihan Teknik Pendingin AC	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		0	44,000,000
-	Pendidikan dan Pelatihan Tata Rias/Salon	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		0	44,000,000
-	Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		0	44,000,000
-	Pendidikan dan Pelatihan Biro Perjalanan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		0	44,000,000
-	Pendidikan dan Pelatihan Industri Kreatif	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		0	44,000,000
-	Pendidikan dan Pelatihan Teknik Elektronik	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		0	44,000,000
-	Pendidikan dan Pelatihan Operator alat berat	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Kep. Selayar	20 org	40,000,000		0	44,000,000

09	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1,508,011,975			1,658,313,173
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				1,508,011,975			1,658,313,173
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah		100%	55,000,000		100%	60,000,000
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase dokumen laporan keuangan yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah		1 lap	10,000,000		1 lap	11,000,000
2	Pengelolaan administrasi kepegawaian bagi PKB/PLKB	Jumlah Penyuluh KB yang di nilai angka kreditnya	Kab. Kep. Selayar	20 Orang	10,000,000		20 Orang	11,000,000
3	Penyusunan Lakip	Tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintahk (LAKIP) OPD yang tepat waktu		1 lap	5,000,000		1 lap	5,500,000
4	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan LPPD	Tersusunnya ISPM, SOP dan LPPD OPD yang tepat waktu		1 lap	5,000,000		1 lap	5,500,000
5	Penyusunan Lakip, SPM, LPPD dan LKPI serta Penyusunan Data Laporan Presentase Evaluasi Bulanan dan Tahunan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan		1 lap	5,000,000		1 lap	5,500,000
6	penyusunan renstra, RKA/RKAP,DPA/DPPA	Persentase kesesuaian muatan antara RPJMD dan Renstra, Renja, RKA dan DPA		2 Dokumen	5,000,000		2 Dokumen	5,500,000
7	Penyusunan dokumen perencanaan	Meningkat dan berkembangnya sistem pelaporan yang sesuai standar	Kab. Kep. Selayar	5 Dokumen	10,000,000		5 Dokumen	11,000,000
8	Pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban	Persentase ketersediaan laporan keuangan yang sesuai dengan standsr akuntanssi pemerintah		1 lap	5,000,000		1 lap	5,000,000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah			651,511,975			716,663,173
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kab. Kep. Selayar	90%	42,500,000		90%	46,750,000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yg tersedia	Kab. Kep. Selayar	75%	2,500,000		75%	2,750,000
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Persentase peningkatan Informasi dan Peningkatan Pelayanan	Kab. Kep. Selayar	80%	210,000,000		80%	231,000,000
4	Pelaksanaa penunjang administrasi perkantoran	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Perkantoran	Kab. Kep. Selayar	80%	396,511,975		80%	436,163,173
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah			113,500,000			124,850,000
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia						
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	12,000,000		2 Unit	13,200,000
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Peralatan gedung kantor yang tersedia	Kab. Kep. Selayar	1 Buah	1,500,000		1 Buah	1,650,000
4	Pengadaan mebeuliner	Persentase mebeuliner yang tersedia	Kab. Kep. Selayar	5 Jenis	7,500,000		5 Jenis	8,250,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase kondisi bangunan kantor dalam kondisi mantap	Kab. Kep. Selayar	1 Gedung	5,000,000		1 Gedung	5,500,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	persentase kendaraan dinas yang terpelihara	Kab. Kep. Selayar	65 Unit	80,000,000		65 Unit	88,000,000
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	persentase perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	20 Buah	7,500,000		20 Buah	8,250,000
8	Pembangunan pagar balai penyuluhan KB	Jumlah pagar balai yang dibangun						
4	Program Usaha Ekonomi Perempuan menuju Kemandirian dan Kesejahteraan				26,000,000			28,600,000
1	Pembinaan pengelolaan usaha ekonomi produktif bagi kelompok usaha perempuan	persentase peningkatan usaha ekonomi produktif	Kab. Kep. Selayar	4 Kelompok	6,500,000		4 Kelompok	7,150,000
2	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi		Kab. Kep. Selayar	4 Kelompok	6,500,000		4 Kelompok	7,150,000
3	Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi berkeadilan		Kab. Kep. Selayar	4 Kelompok	6,500,000		4 Kelompok	7,150,000
4	Pemberdayaan perempuan kepala keluarga (Pekka) melalui kelompok usaha ekonomi produktif		Kab. Kep. Selayar	4 Kelompok	6,500,000		4 Kelompok	7,150,000

5	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Pemberdayaan dan pemberian kesempatan bagi kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan			207,000,000			227,700,000
1	Pelatihan pendidikan politik bagi perempuan	persentase peningkatan perempuan di lembaga legislatif	Kab. Kep. Selayar	100%	40,000,000		100%	44,000,000
2	Penunjang Operasional Dharma Wanita	Persentase peningkatan kinerja darma wanita dalam pemberdayaan perempuan	Kab. Kep. Selayar	100%	150,000,000		100%	165,000,000
3	Monitoring evaluasi dan penguatan PUG	persentase peningkatan PUG	Kab. Kep. Selayar	6 Kecamatan	17,000,000		6 Kecamatan	18,700,000
6	program Pemenuhan hak anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah dan dunia usaha di tingkat kabupaten			312,000,000			343,200,000
1	Pelatihan penyusunan perencanaan program yg responsif anak							
2	Pembinaan KLA (Kab.Kota layak anak)	Persentase KLA tingkat Kecamatan dan Desa yang dibina	Kab. Kep. Selayar	1 Kabupaten	50,000,000		1 Kabupaten	55,000,000
3	Pendampingan anak korban kekerasan	persentase kekerasan terhadap anak			30,000,000			33,000,000
4	Penguatan & pengembangan forum anak	persentase forum anak			20,000,000			22,000,000
5	Sosialisasi KHA bagi guru & masyarakat	Terlaksananya KHA bagi Guru, Siswa dan Masyarakat			15,000,000			16,500,000
6	Festival anak daerah Kab.Kepulauan Selayar	Persentase Festivl anak daerah Kab.Kepulauan Selayar			45,000,000			49,500,000
7	Pembentukan forum anak tingkat Desa dan Kecamatan	Jumlah forum anak tingkat Desa dan Kecamatan yang terbentuk			30,000,000			33,000,000
8	Pemasangan Tesa (telepon sahabat anak) tingkat kabupaten	Jumlah tesa yang dipasang			20,000,000			22,000,000
9	Sosialisasi Tesa (telepon sahabat anak)	Pengenalan Tesa di Kecamatan dan Desa			20,000,000			22,000,000
10	Musrenbang anak	Persentase pemenuhan hak-hak anak untuk mengeluarkan pendapat			25,000,000			27,500,000
11	Penyusunan profil anak	Persentase ketersediaan data tentang anak			22,000,000			24,200,000
12	Pembuatan brosur tentang anak	Persentase pengenalan tentang anak di masyarakat			20,000,000			22,000,000
13	Sosialisasi undang-undang perlindungan anak	Pengenalan undang-undang perlindungan anak di tingkat kecamatan			15,000,000			16,500,000
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Cakupan lembaga /organisasi masyarakat yang terlatih dalam peningkatan pelayanan kepada anak dan perempuan			143,000,000			157,300,000
1	Pelatihan penyusunan kebijakan teknis PPRG	Persentase perangkat daerah yang melaksanaakn PPRG			15,000,000			16,500,000
2	Monitoring evaluasi dan penguatan PUG	persentase peningkatan PUG			15,000,000			16,500,000
3	Pertemuan pokja PUG	Meningkatnya umlah peserta Pertemuan pokja PUG			10,000,000			11,000,000
4	Pembuatan RAD PUG	Persentase tersedianya RAD PUG			10,000,000			11,000,000
5	TOT Calon fasilitator PUG	Persentase tersedianya gender champion			15,000,000			16,500,000
6	Penguatan focal point	persentase focal point di Selayar			15,000,000			16,500,000
7	Advokasi penerapan PPRG	Persentase Anggaran responsif gender pada masing-masing OPD			16,000,000			17,600,000
8	Pelatihan kepemimpinan bagi organisasi perempuan	Persentase terciptanya pemimpin perempuan yang berkualitas			15,000,000			16,500,000
9	Penguatan dan pengembangan jejaring PUG	Persentase terciptanya komitmen bersama untuk melaksanakan PUG di semua sektor pembangunan			10,000,000			11,000,000
10	Rakortek percepatan PUG	terwujudnya IPM, IPG dan IDG			12,000,000			13,200,000
11	Pertemuan focal point	persentase focal point di Selayar			10,000,000			11,000,000
07	PERTANAHAN				6,195,601,416			6,815,161,558
18	BAGIAN PERTANAHAN SETDA				6,195,601,416			6,815,161,558
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			70,000,000			77,000,000
1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan, Surat Kabar dan Biaya Advetorial			5,000,000			5,500,000
2	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Terlaksananya Penunjang Administrasi Perkantoran			65,000,000			71,500,000

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur				140,601,416			154,661,558
1	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Meningkatnya Kinerja Organisasi yang didukung dengan Tersedianya Peralatan Kerja yang memadai				65,601,416			72,161,558
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang didukung oleh ketersediaan Kendaraan Dinas				75,000,000			82,500,000
3	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terealisasinya Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum				780,000,000			858,000,000
1	Pemasangan Patok dan Pemberian Identitas Tanah-Tanah Milik Pemda	Terealisasinya Pemasangan patok Tanah-Tanah Pemda				30,000,000			33,000,000
2	Inventarisasi Tanah-Tanah Milik Pemerintah Daerah	Terealisasinya Inventarisasi Tanah-Tanah Milik Pemda				50,000,000			55,000,000
3	Sosialisasi Tentang Perolehan Hak Tanah	Terlaksananya Sosialisasi Perolehan hak Tanah				30,000,000			33,000,000
4	Sosialisasi tentang Sengketa pertanahan	Terlaksananya Sosialisasi Konflik Pertanahan				50,000,000			55,000,000
5	Pemasangan Batas Tanah dengan Membangun Pagar/Kawat Duri	Terealisasinya Pembangunan Pagar dan atau Kawat Duri dan Pemberian Identitas				250,000,000			275,000,000
6	Pemasangan Tanda Kepemilikan Tanah Milik Pemda /Papan Identitas	Tersedianya Pemasangan Tanda Kepemilikan Tanah Milik Pemda/Papan identitas				70,000,000			77,000,000
7	Pelaksanaan Pengawasan Tanah-Tanah Milik Pemda	Tersedianya Pelaksanaan Pengawasan Tanah-Tanah Milik Pemda				25,000,000			27,500,000
8	Penertiban Administrasi dan Pemuktahiran Data Administrasi dan Dokumen Pertanahan	Tersedianya Penertiban Administrasi Pemuktahiran data Administrasi dan Dokumen				40,000,000			44,000,000
9	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pertanahan	Tersedianya Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen pertanahan				100,000,000			110,000,000
10	Penertiban data Administrasi Dan Dokumen Kepemilikan Tanah Milik Pemda	Terlaksananya Penertiban Data Administrasi dan Dokumen Kepemilikan Tanah Milik Pemda				35,000,000			38,500,000
11	Peningkatan Pelayanan Kedinasan dan Rapat-Rapat Koordinasi	Tersedianya Layanan Kedinasan dan Rapat-Rapat Koordinasi				100,000,000			110,000,000
4	Program Penata Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terealisasinya Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum				4,900,000,000			5,390,000,000
1	Pengadaan Tanah bagi Pembangun Untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum				4,900,000,000			5,390,000,000
2	Perencanaan Pengadaan Tanah								
3	Persiapan Pengadaan Tanah								
4	Pelaksanaan Pengadaan Tanah								
5	Program Penata Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terealisasinya Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum				280,000,000			308,000,000
1	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah kepada Pengelola aset	Terealisasinya Dokumen Kepemilikan atau Sertifikat Milik Pemda				15,000,000			16,500,000
2	Pelaksanaan Penelitian Hibah Tanah-tanah Pemda	Terealisasinya Penelitian Hibah Tanah-tanah Pemda				15,000,000			16,500,000
3	Pensertifikatan Tanah-tanah Aset Pemda	Terealisasinya Pensertifikatan Tanah aset Pemda				250,000,000			275,000,000
6	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terlaksananya Penanganan Konflik/Sengketa Pertanahan				25,000,000			27,500,000
1	Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan	Terlaksananya Penanganan Konflik/Sengketa Pertanahan				25,000,000			27,500,000
06	LINGKUNGAN HIDUP					10,700,202,152			11,770,222,367
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					10,700,202,152			11,770,222,367
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					57,000,000			62,700,000
1	Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Benteng	1 Laporan		10,000,000		1 Dok	11,000,000
2	Peningkatan Pengelolaan Barang Persediaan / Asset	Dokumen Barang Persediaan/ Asset	Benteng	1 Laporan		10,000,000		1 Dok	11,000,000
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Presentase Laporan yang Penyampaianya Tepat Waktu dan Sesuai Standar	Benteng	1 Laporan		10,000,000		1 Dok	11,000,000
4	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase Laporan yang Penyampaianya Tepat Waktu	Benteng	1 Laporan		10,000,000		1 Dok	11,000,000

5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Benteng	5 Dok	10,000,000	5 Dok	11,000,000
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan LH	Jumlah Pengelolaan LH yang dievaluasi	Benteng	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,700,000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			3,585,952,152		3,944,547,367
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Telpon, Listrik dan Air	Benteng	3 Layanan	35,000,000	3 Buah	38,500,000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar	Benteng	3 Eks	7,500,000	3 Eks	8,250,000
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas	Dalam dan Luar Kab. Kep. Selayar	160 Lap	225,000,000	160 Lap	247,500,000
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah Petugas DLHK yang Tersedia untuk melaksanakan pelayanan	Benteng	305 Org	3,318,452,152	305 Org	3,650,297,367
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas kerja aparatur yang mendukung kinerja			1,318,000,000		1,449,800,000
1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Benteng	1 unit	5,000,000	1 unit	5,500,000
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	Benteng	50 psg	50,000,000	50 psg	55,000,000
3	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan	Benteng	1 unit	250,000,000	1 unit	275,000,000
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Pejabat Eselon/Fungsional	Benteng	3 unit	70,000,000	3 unit	77,000,000
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Benteng	7 unit	15,000,000	7 unit	16,500,000
6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Benteng	6 unit	15,000,000	6 unit	16,500,000
7	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang tersedia	Benteng	3 unit	5,000,000	3 unit	5,500,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terawat	Benteng	8 Unit	5,000,000	4 Buah	5,500,000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terawat	Benteng	2 Unit	50,000,000	2 Buah	55,000,000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terawat	Benteng	40 Unit	850,000,000	40 Unit	935,000,000
11	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang terawat	Benteng	2 Unit	1,000,000	9 Unit	1,100,000
12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terawat	Benteng	8 Unit	2,000,000	19 Unit	2,200,000
13	Kalibrasi Alat Laboratorium	Jumlah Alat yang dikalibrasi					
4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Kehati)	Presentase RTH Kehati yang dikelola			336,500,000		370,150,000
1	Pengawasan dan Pengendalian RTH	Luas RTH Publik yang diawasi dan dikendalikan	Benteng	1 Lokasi	50,000,000	1 Lokasi	55,000,000
2	Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH	Jumlah Perda RTH dan Jumlah RTH yang diidentifikasi	Benteng	1 Lokasi	30,000,000	1 Lokasi	33,000,000
3		Jumlah RTH yang ditata	Benteng	1 Lokasi	226,500,000	1 Lokasi	249,150,000
4	Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang dipelihara	Benteng	1 Lokasi	30,000,000	1 Lokasi	33,000,000
5	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan kawasan konservasi yang dijaga			2,445,000,000		2,689,500,000
1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Jumlah Lokasi Sumber Mata Air yang dikonservasi	Kab. Kep. Selayar		30,000,000		33,000,000
2	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan RAD-GRK	Kab. Kep. Selayar		50,000,000		55,000,000
3	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Jumlah sungai yang dikonservasi	Kab. Kep. Selayar	1 lokasi	50,000,000	1 buah	55,000,000
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konsevasi SDA	Jumlah Kearifan Lokal yang Tumbuh Kembangkan			30,000,000		33,000,000
5	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah Bibit Tanaman	Kab. Kep. Selayar	71601 pohon	1,820,000,000	48710 pohon	2,002,000,000
6	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Jumlah Species flora lokal yang dikonservasikan			25,000,000		27,500,000
7	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan	Jumlah Lokasi Ekowisata yang ditetapkan			30,000,000		33,000,000
8	Perencanaan dan Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati yang direncanakan dan dikembangkan	Benteng	1 Lokasi	10,000,000	1 Lokasi	11,000,000
9	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah Species flora lokal yang dikonservasikan	Benteng	1 Spesies	10,000,000	1 Spesies	11,000,000
10	Penguatan tebing sungai yang ramah lingkungan	Jumlah Lokasi Sungai yang diturap Ramah Lingkungan			70,000,000		77,000,000
11	Pembangunan Sarpras Kampung Iklim	Jumlah Kampung Iklim			150,000,000		165,000,000
12	Peningkatan Sarana Prasarana Pelestarian Fungsi LH	Jumlah sarpras pelestarian fungsi LH			100,000,000		110,000,000
13	Pantai dan Laut Lestari	Panjang garis pantai yang dibersihkan	Benteng	1 Km	50,000,000	1 Km	55,000,000

14	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data Terpilah Tentang Konsevasi SDA			20,000,000			22,000,000
6	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Cakupan Luas Kerusakan SDA yang terpulihkan			350,000,000			385,000,000
1	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk	Jumlah Kawasan /lokasi pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	Kab. Kep. Selayar	1 lokasi	200,000,000		1 lokasi	220,000,000
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Lahan Kritis yang direboisasi			150,000,000			165,000,000
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penurunan sampah harian dari sektor usaha/kegiatan dan RT			1,180,000,000			1,298,000,000
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia	Kab. Kep. Selayar	697 unit	640,000,000		3 unit	704,000,000
	- Pengadaan Kontainer				90,000,000			99,000,000
	- Pengadaan Jembatan Timbang				350,000,000			385,000,000
	- Pengadaan Tong Sampah				200,000,000			220,000,000
2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah TPA yang ditimbon	Kab. Kep. Selayar	1 unit	40,000,000		1 unit	44,000,000
	- Penimbunan TPA	Jumlah TPA yang ditimbon			40,000,000			44,000,000
3	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Jumlah mesin penghancur sampah non organik			60,000,000			66,000,000
4	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Jumlah aparatur persampahan yang terlatih			60,000,000			66,000,000
5	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Jumlah produk hukum lingkungan yang disosialisasikan			30,000,000			33,000,000
6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang menjadi kompos per hari			50,000,000			55,000,000
7	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Jumlah masyarakat yang terlatih mendaru ulang			30,000,000			33,000,000
8	Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir	Jumlah sampah tertimbon per hari						-
9	Pengelolaan Sampah Terpadu	Jumlah volume sampah yang dikelola per hari	Kab. Kep. Selayar	0.25 Ton	10,000,000		0.25 Ton	11,000,000
10	Penanganan Kebersihan Kota	Jumlah sampah tertangani per hari						-
11	Pengadaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan TPA	Jumlah sarpras pengelolaan TPA	Kab. Kep. Selayar	2 unit	230,000,000		3 unit	253,000,000
	- Pembangunan Bak Kontrol TPA	Jumlah Bak Kontrol yang dibangun			30,000,000			33,000,000
	- Sanitary Landfill	Jumlah Sanitary Landfill			200,000,000			220,000,000
12	Pembentukan Bank Sampah Unit	Jumlah bank sampah unit			200,000,000			220,000,000
13	Peningkatan operasional persampahan	Jumlah sampah yang tertangani	Kab. Kep. Selayar	5 Ton	30,000,000		3 Ton	33,000,000
								-
8	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu Kualitas			212,000,000			233,200,000
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Penghargaan Kota Sehat/Adipura	Dalam dan Luar Kab. Kep. Selayar	1 Buah	75,000,000		1 Buah	82,500,000
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah lokasi yang dipantau kualitas lingkungannya	Kab. Kep. Selayar	20 Lokasi	12,000,000		20 Lokasi	13,200,000
3	Pengawasan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang taat	Kab. Kep. Selayar	5 Usaha/Kegiatan	10,000,000		5 Usaha/Kegiatan	11,000,000
4	Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang dipantau dan dibina	Kab. Kep. Selayar	140 Dok	20,000,000		35 Dok	22,000,000
5	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Jumlah Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang dikoordinasikan penyusunannya			30,000,000			33,000,000
6	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah jenis produk lokal ramah lingkungan			30,000,000			33,000,000
7	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina/dipantau	Kab. Kep. Selayar	5 Usaha/kegiatan	10,000,000		5 Usaha/kegiatan	11,000,000
8	Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Jumlah kelompok usaha/kegiatan yang dibina	Kab. Kep. Selayar	15 Usaha/kegiatan	10,000,000		15 Usaha/kegiatan	11,000,000
9	Penanggulangan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Lokasi Bantaran Sungai yang direhabilitasi	Kab. Kep. Selayar	10 Lokasi	10,000,000		10 Lokasi	11,000,000
10	Peningkatan Kapasitas Laboratorium LH	Jumlah laboratorium LH yang ditingkatkan kapasitasnya	Benteng	1 Unit	5,000,000		1 Buah	5,500,000
								-
9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup Daerah yang tersedia			957,900,000			1,053,690,000
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah kelompok daur ulang sampah non organik yang dikembangkan						
2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah data dan informasi lingkungan	Kab. Kep. Selayar	1 Dok	10,000,000		1 Dok	11,000,000

3	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	Jumlah data dan informasi lingkungan yang dipublikasikan						
4	Penyusunan Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan	Kab. Kep. Selayar	2 Dok	554,800,000		2 Dok	610,280,000
5	Penyusunan Dokumen AMDAL	Jumlah Dokumen Lingkungan (AMDAL)	Kab. Kep. Selayar	1 dok	183,100,000		1 dok	201,410,000
6	Penyusunan Kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Jumlah Dokumen JAKSTRADA	Kab. Kep. Selayar	1 doc	100,000,000		1 doc	110,000,000
7	Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kab. Kep. Selayar		110,000,000			121,000,000
10	Program Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Unit Jejaring dan Mitra yang Aktif			90,000,000			99,000,000
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat / Kearifan Lokal dalam Pengelolaan LH	Jumlah Masyarakat Adat yang dibina sebagai Kader Lingkungan						
2	Pembinaan Kelompok Pengelolaan dan Pemakai Air	Jumlah Kearifan Lokal yang Terbina						
		Jumlah KP2A yang dibina						
3	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lingkungan	Jumlah Mitra LH yang dibina	Kab. Kep. Selayar	45 Klip	90,000,000		45 Klip	99,000,000
11	Program Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Persentase Usaha/Kegiatan yang Mendapat Izin Lingkungan			167,850,000			184,635,000
1	Identifikasi, investigasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan/Kasus Lingkungan yang ditindak Lanjuti	Kab. Kep. Selayar	5 Kasus	7,850,000	Kab. Kep. Selayar	5 Kasus	8,635,000
2	Koordinasi Penegakan Hukum dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus Lingkungan yang dikoordinasikan dengan PPLH			10,000,000			11,000,000
3	Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah Perda yang dikoordinasikan			10,000,000			11,000,000
4	Sosialisasi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Jumlah Pengaduan/Sengketa Lingkungan yang disosialisasikan			20,000,000			22,000,000
5	Pembangunan dan Pengadaan Sarana Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Jumlah prasarana dan sarana pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan			100,000,000			110,000,000
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Data Terpilah tentang mitra dan kasus lingkungan			20,000,000			22,000,000
08	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1,581,511,530			1,739,662,683
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1,581,511,530			1,739,662,683
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan dan Asset yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah			36,000,000			39,600,000
1	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bulanan/SPJ	Jumlah laporan SPJ	Benteng	12 Lap	13,000,000	Benteng	12 Lap	14,300,000
2	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Jumlah Laporan RFK	Benteng	12 Lap	7,000,000	Benteng	12 Lap	7,700,000
3	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Benteng	1 Dok	8,000,000	Benteng	1 Dok	8,800,000
4	Penyusunan laporan asset PD	Jumlah laporan Asset	Benteng	9 lap	8,000,000	Benteng	9 lap	8,800,000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			561,661,530			617,827,683
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terfasilitasi	Benteng	1 Tahun	59,400,000	Benteng	1 Tahun	65,340,000
2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Benteng	1 Tahun	10,000,000	Benteng	1 Tahun	11,000,000
3	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	Jumlah laporan pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Benteng	1 Tahun	200,221,530	Benteng	1 Tahun	220,243,683
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah penunjang administrasi perkantoran	Dalam dan luar daerah	1 Tahun	292,040,000	Dalam dan luar daerah	1 Tahun	321,244,000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung kinerja			269,350,000			296,285,000
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional roda dua	Jumlah Kendaraan dinas/operasional roda dua yang dibeli	Benteng	2 unit	40,000,000	Benteng	2 unit	44,000,000
2	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang dibeli	Benteng	6 unit	53,850,000	Benteng	6 unit	59,235,000

3	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubeleur yang dibeli	Benteng	6 buah/ set	30,000,000	Benteng	6 buah/ set	33,000,000
4	Pengadaan Perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli	Benteng	8 unit	40,000,000	Benteng	8 unit	44,000,000
5	Penambahan Daya Listrik	Jumlah Penambahan Daya listrik	Benteng	-	5,000,000	Benteng	-	5,500,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Benteng	1 Unit	15,000,000	Benteng	1 Unit	16,500,000
7	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Benteng	1 Unit	32,000,000	Benteng	1 Unit	35,200,000
8	Pemeliharaan rutin/berkala mobil operasional	yang dipeliharaJumlah mobil operasional	Benteng		21,000,000	Benteng		23,100,000
9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda dua	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang dipelihara	Benteng	14 Unit	25,000,000	Benteng	14 Unit	27,500,000
10	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Benteng	14 Unit	7,500,000	Benteng	14 Unit	8,250,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Teknis/fungsional (sesuai bidangnya)			20,000,000			22,000,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional	Benteng	4 orang	20,000,000	Benteng	4 orang	22,000,000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				47,500,000			52,250,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran			26,000,000			28,600,000
2	Penyusunan LAKIP PD	Jumlah Dokumen LAKIP			5,000,000			5,500,000
3	Penyusunan LPPD	Jumlah Dokumen LPPD			4,000,000			4,400,000
4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah SOP			7,500,000			8,250,000
5	Penyusunan laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Jumlah Dokumen ANJAB			5,000,000			5,500,000
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan				647,000,000			711,700,000
1	Survey Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Laporan hasil survey indeks kepuasan masyarakat			30,000,000			33,000,000
2	Penyelenggaraan pelayanan Kartu Keluarga	Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan			20,000,000			22,000,000
3	Penyelenggaraan Pelayanan Pindah Datang penduduk	Jumlah Pindah Datang Penduduk yang diterbitkan			25,000,000			27,500,000
4	Pembinaan/monitoring pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem informasi administrasi kependudukan	Jumlah pelaksanaan pembinaan /monitoring			25,000,000			27,500,000
5	Bintek Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta bintek			30,000,000			33,000,000
6	Penyelenggaraan Dokumen kependudukan yang terintegrasi	Jumlah KK, KTP dan Pindah datang yang diterbitkan			40,000,000			44,000,000
7	Penyelenggaraan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan	Jumlah Akte kelahiran dan akta kematian yang diterbitkan			25,000,000			27,500,000
8	Penyelenggaraan pelayanan akta kelahiran	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan			20,000,000			22,000,000
9	Penyelenggaraan Pelayanan Perubahan Status anak dan Kematian	Jumlah perubahan status anak kematian yang diterbitkan			25,000,000			27,500,000
10	Penyelenggaraan pelayanan perkawinan dan perceraian bagi non muslim	Jumlah penduduk non muslim yang terdata			25,000,000			27,500,000
11	Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah draf rancangan peraturan daerah			22,000,000			24,200,000
12	Penerbitan KTP-Elektronik	Persentase KTP-EI yang diterbitkan			20,000,000			22,000,000
13	Pembangunan dan pegeporasian SIAK secara Terpadu	Ketersediaan data dase Kependudukan			30,000,000			33,000,000
14	Inovasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Jenis Inovasi pelayanan administrasi yang telah dilaksanakan			35,000,000			38,500,000
15	Sosialisasi Pemanfaatan dokumen dan data kependudukan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan dokumen dan data kependudukan			30,000,000			33,000,000
16	Sosialisasi PERDA Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi PERDA Administrasi Kependudukan			30,000,000			33,000,000
17	Sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil			25,000,000			27,500,000
18	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Kartu Identitas Anak yang terbitkan			30,000,000			33,000,000
19	Kerjasama lintas sektor upaya penebitan dokumen kependudukan (DAK)	Jumlah perangkat daerah yang melakukan kerjasama dalam upaya penerbitan dokumen kependudukan						
20	Pelayanan Keliling Penerbitan Kartu Keluarga (DAK)	Jumlah kartu keluarga yang diterbitkan						
21	Pelayanan Keliling Penerbitan Akta Kelahiran (DAK)	Jumlah Akta kelahiran yang diterbitkan						
22	Pelayanan Keliling Perekaman KTP-EI (DAK)	Jumlah KTP-Elektronik yang diterbitkan						
23	Penyediaan Blangko dan Formulir pendaftaran Penduduk (DAK)	Jumlah Blangko pendaftaran penduduk yang dsediakan						

24	Penyediaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil (DAK)	Jumlah blangko pencatatan sipil yang disediakan						
25	Penyediaan bahan pendukung KTP-Elektronik dan Kartu Identitas Anak (DAK)	Jumlah bahan pendukung KTP-Elektronik						
26	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil						
27	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan (DAK)	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan						
28	Pemeliharaan Perangkat SIAK (DAK)	Pemeliharaan Perangkat SIAK						
29	Pengadaan Kartu Identitas Anak (DAK)							
30	Penyusunan Laporan Pelaksanaan DAK	Penyusunan Laporan Pelaksanaan DAK						
31	Pendataan Penduduk	Jumlah Penduduk yang terdata						
32	Pelayanan Keliling Akta Kematian (DAK)	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan						
33	Pembangunan dan pengembangan sistem penyajian dan pemanfaatan data kependudukan berbasis WEB	Ketersediaan Aplikasi Website			40,000,000			44,000,000
34	Pelatihan Operator Aplikasi dan Pengolahan Data	Jumlah Operator yang mengikuti pelatihan			35,000,000			38,500,000
35	Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah Buku Data Perkembangan Kependudukan			30,000,000			33,000,000
36	Penyusunan dan pengolahan Data Agregat kependudukan	Data Agregat Kependudukan			25,000,000			27,500,000
37	Sinkronisasi Data Kependudukan dalam rangka pelaksanaan pemilu	Pelayanan Pengecekan dan sinkronisasi data kependudukan dalam rangka pemilu			30,000,000			33,000,000
20	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3,136,208,871			3,449,829,758
44	I. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3,136,208,871			3,449,829,758
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			733,270,381			806,597,419
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Dis PMD	12 Bulan	60,000,000		12 Bulan	66,000,000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Outcome : Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Dis PMD	12 Bulan	5,270,381		12 Bulan	5,797,419
3	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Outcome : Cakupan Layanan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Kantor Dis PMD	12 Bulan	350,000,000		12 Bulan	385,000,000
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Outcome : Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Provinsi	Kabupaten/ Provinsi	12 Bulan	318,000,000		12 Bulan	349,800,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dan Fasilitas Kerja Aparatur yang mendukung kinerja			244,000,000			268,400,000
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Kantor Dis. PMD	5 unit	20,000,000		5 unit	22,000,000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur						-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Outcome : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur	Kantor Dis. PMD	1 Unit	35,000,000		1 Unit	38,500,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Kantor Dis. PMD	16 Unit	50,000,000		16 Unit	55,000,000
5	Pengadaan Meubeler	Outcome : Cakupan ketersediaan meubeler kantor		5 unit	30,000,000		5 unit	33,000,000
6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Outcome : Cakupan Ketersediaan peralatan gedung kantor	Kantor Dis. PMD	14 Unit	50,000,000		14 Unit	55,000,000
7	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor	Outcome : Cakupan ketersediaan pemeliharaan peralatan kantor	Kantor Dis. PMD	12 Bulan	10,000,000		12 Bulan	11,000,000
8	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Outcome : Cakupan ketersediaan pemeliharaan gedung kantor	Kantor Dis. PMD	1 Unit	49,000,000		1 Unit	53,900,000
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				42,000,000			46,200,000
1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Bulanan	Output : Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kantor Dis. PMD	13 Laporan	6,000,000		13 Laporan	6,600,000
2	Pelaksanaan Tim Tindak Lanjut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Output : Jumlah laporan tindak lanjut						-
3	Penyusunan RKA dan DPA	Output : Jumlah dokumen RKA dan DPA yang tersusun tepat waktu	Kantor Dis. PMD	4 Dokumen	5,000,000		4 Dokumen	5,500,000
4	Penyusunan LAKIP	Output : Jumlah dokumen Lakip yang tersusun tepat waktu	Kantor Dis. PMD	1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,500,000

5	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Output : Jumlah dokumen SOP yang tersusun tepat waktu		1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,500,000
6	Revisi Renstra	Output : Jumlah Dokumen		1 Dokumen	4,000,000		1 Dokumen	4,400,000
7	Penatausahaan Keuangan	Output : Jumlah laporan SPJ		1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,500,000
8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Output : Jumlah laporan RFK		1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,500,000
9	Penataan Penggunaan Aset OPD	Output : Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan Penataan Penggunaan Aset OPD		1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,500,000
10	Penyusunan RENSTRA dan RENJA OPD	Output : Jumlah dokumen Renstra dan Renja OPD yang disusun	Kantor Dis. PMD	1 Dokumen	2,000,000		1 Dokumen	2,200,000
4	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase kelompok masyarakat dan kelembagaan Teknologi Tepat Guna yang dibina			247,500,000			272,250,000
1	Monitoring / Pembinaan Terhadap Pengrajin Teknologi Tepat Guna	Output : Jumlah kelompok pengrajin TTG dengan pendapatan > 1 Juta	Kab. Kep. Selayar		20,000,000			22,000,000
2	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Output : Jumlah peserta/pengrajin TTG yang mengikuti pameran TTG	Kab. Kep. Selayar		47,500,000			52,250,000
3	Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek	Output : Jumlah anggota Posyantek yang mengikuti pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek TTG	Kab. Kep. Selayar		40,000,000			44,000,000
4	Pembentukan Posyantek Tiap Kecamatan	Output : Jumlah Posyantek yang dibentuk pada tiap kecamatan	Kab. Kep. Selayar		30,000,000			33,000,000
5	Fasilitasi Desa Mandiri Energi	Output : Jumlah desa yang terfasilitasi sebagai Desa Mandiri Energi	Kab. Kep. Selayar		30,000,000			33,000,000
6	Bimtek Pengembangan TTG dan Program-Program Lainnya Guna Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Desa/Kelurahan	Output : Jumlah waktu pelaksanaan Bimtek Pengembangan TTG dan Program lainnya	Kab. Kep. Selayar		40,000,000			44,000,000
7	Fasilitasi Pembinaan Desa Mandiri Energi (DME) dan Mengikuti Lomba Desa	Output : Jumlah desa yang terfasilitasi sebagai Desa Mandiri Energi dan mengikuti lomba	Kab. Kep. Selayar		25,000,000			27,500,000
8	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Output : Keikutsertaan dalam perlindungan dan konservasi SDA	Kab. Kep. Selayar		15,000,000			16,500,000
5	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Mewujudkan kemajuan desa dari aspek ekonomi pedesaan dan kelembagaan dengan optimal			155,000,000			170,500,000
1	Bimtek Manajemen Pengelolaan BUMDES	Output : Terselenggaranya Bimtek Manajemen Pengelolaan BUMDES	Kab. Kep. Selayar		40,000,000			44,000,000
2	Pembinaan/Monitoring Pengelolaan BUMDES	Output : Jumlah BUMDES yang aktif	Kab. Kep. Selayar		30,000,000			33,000,000
3	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Data Profil Desa	Output : Jumlah desa yang di Monitoring dan di Evaluasi Penyusunan Data Profilnya			20,000,000			22,000,000
4	Pembinaan BUMDesa Percontohan	Output : BUMDESA dengan omset > 50 Juta			15,000,000			16,500,000
5	Pelaksanaan Lomba BUMDesa Berprestasi Tingkat Provinsi	Output : Jumlah BUMDesa yang mengikuti lomba BUMDesa Berprestasi Tingkat Provinsi			20,000,000			22,000,000
9	Pelatihan Penyusunan Profil Desa Berbasis Aplikasi Sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2007	Output : Profil desa lengkap sesuai permendagri			30,000,000			33,000,000
6	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			621,838,490			684,022,339
1	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa	Output : Jumlah desa yang melaporkan penggunaan dana desa dengan tepat waktu						
2	Evaluasi Penyusunan APBDDesa	Output : Jumlah APBDDesa yang disusun tepat waktu dan dievaluasi	Kab. Kep. Selayar	81 Desa	21,674,190		81 Desa	23,841,609
3	Pembinaan Administrasi Desa	Output : Jumlah desa yang administrasi desanya tertata dengan baik, tertib dan akuntabel	Kab. Kep. Selayar	20 Desa	15,797,750		20 Desa	17,377,525
4	Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Output : Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Kasi) yang meningkat pengetahuannya	Kab. Kep. Selayar	81 Orang	72,087,400		81 Orang	79,296,140
5	Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Output : Jumlah desa yang mengikuti lomba	Kab. Kep. Selayar	81 Orang	30,000,000		81 Orang	33,000,000
6	Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama antar Desa	Output : Jumlah Desa yang dibina dalam rangka pengembangan kerjasama antar desa	Kab. Kep. Selayar	81 Desa	20,000,000		81 Desa	22,000,000
7	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Output : Melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat desa secara berkala						-
8	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	Output : Jumlah Peraturan Bupati yang tersusun	Kab. Kep. Selayar	5 Peraturan	22,616,350		5 Peraturan	24,877,985
13	13. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pendampingan Desa	Output : Terlaksananya koordinasi-koordinasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pendampingan desa	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	42,824,100		12 Bulan	47,106,510

14	14. Asistensi Pertanggungjawaban APB Desa	Output : Jumlah desa yang menyusun pertanggungjawaban APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kab. Kep. Selayar	81 Desa	25,000,000	81 Desa	27,500,000
16	16. Pengendalian APB Desa	Output : Terwujudnya pengendalian dan pengawasan pengelolaan APBDesa	Kab. Kep. Selayar	81 Desa	57,500,000	81 Desa	63,250,000
17	17. Verifikasi Kelengkapan Berkas Pencairan	Output : Kelengkapan berkas pencairan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kab. Kep. Selayar	81 Desa	27,500,000	81 Desa	30,250,000
20	20. Peningkatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	Output : Jumlah desa yang mengikutkan operator desanya dalam Peningkatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	Kab. Kep. Selayar	81 Desa	44,352,000	81 Desa	48,787,200
21	21. Evaluasi Penyusunan APBDesa Perubahan	Output : Jumlah APB Desa Perubahan yang di evaluasi dan disusun tepat waktu	Kab. Kep. Selayar	81 Desa	22,824,200	81 Desa	25,106,620
22	22. Pengendalian APB Desa Perubahan	Output : Terwujudnya Pengendalian APBDesa Perubahan	Kab. Kep. Selayar	81 Desa	43,164,000	81 Desa	47,480,400
24	24. Orientasi Kepala Desa Terpilih	Output : Jumlah kepala desa terpilih yang mengikuti orientasi	Kab. Kep. Selayar		61,498,500		67,648,350
27	27. Evaluasi Penyusunan Pertanggungjawaban APBDesa	Output : Jumlah desa yang tepat waktu dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDesa	Kab. Kep. Selayar	81 Desa	20,000,000	81 Desa	22,000,000
28	28. Verifikasi Data Pemerintah Desa	Output : Jumlah data pemerintah desa yang diverifikasi	Kab. Kep. Selayar	81 Desa	25,000,000	81 Desa	27,500,000
29	29. Evaluasi Pelaksanaan dan Penyerapan APBDesa	Output : Jumlah desa yang di evaluasi penyelenggaraan dan penyerapan APBDesanya		81 Desa	25,000,000	81 Desa	27,500,000
30	30. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa (Bendahara Desa)	Output : Jumlah peserta (Bendahara Desa) yang mengikuti bimtek pengelolaan keuangan desa		81 Desa	25,000,000	81 Desa	27,500,000
31	31. Bimtek Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Output : Jumlah peserta (Anggota BPD) yang mengikuti bimtek Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Kep. Selayar	162 Orang	20,000,000	162 Orang	22,000,000
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase peningkatan kapasitas SDM kelembagaan masyarakat pedesaan			218,750,000		240,625,000
1	Pelatihan LPM dan KPMD	Output : Terselenggaranya pelatihan LPM dan KPMD	Kab. Kep. Selayar	41 Orang	35,000,000	41 Orang	38,500,000
2	Penataan Lembaga Adat Istiadat Masyarakat Perdesaan	Output : Jumlah lembaga adat istiadat masyarakat pedesaan yang dibina	Kab. Kep. Selayar	20 Desa	25,000,000	20 Desa	27,500,000
3	Pembinaan dan Sosialisasi Peningkatan Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat	Output : Meningkatkan gerakan Gotong Royong dan partisipasi serta kawasadaan masyarakat dalam pembangunan	Kab. Kep. Selayar	40 Desa	15,000,000	40 Desa	16,500,000
4	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Output : Meningkatkan kebersamaan, kekeluargaan serta melestarikan arti gotong royong menuju peningkatan pelaksanaan pembangunan	Kab. Kep. Selayar, Provinsi dan Luar Privinsi	1 Kali	25,000,000	1 Kali	27,500,000
5	Pembinaan Kelembagaan Baruga Sayang	Output : Memberikan motivasi kepada pengurus Baruga Sayang untuk lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Kab. Kep. Selayar	50 Desa	20,000,000	50 Desa	22,000,000
6	Identifikasi Kearifan Lokal Desa	Output : Teridentifikasinya kearifan-kearifan lokal di desa	Kab. Kep. Selayar	41 Desa	20,750,000	41 Desa	22,825,000
7	Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat	Output : Keikutsertaan dalam pelaksanaan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat			20,000,000		22,000,000
8	Monitoring Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan BUMDES dan BUMDES Bersama	Output : Terwujudnya pembinaan dan evaluasi kegiatan BUMDES dan BUMDES bersama			20,000,000		22,000,000
9	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa	Output : Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pendamping desa dan pendamping lokal			15,000,000		16,500,000
10	Pembangunan Poskamling				23,000,000		25,300,000
8	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase kelompok binaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, PKK aktif dan Posyandu aktif			873,850,000		961,235,000
1	Pembinaan Pokjandal Posyandu Tingkat Kecamatan	Output : Terwujudnya Sosialisasi Pokjandal Posyandu Tingkat Kecamatan	Kab. Kep. Selayar	10 Kecamatan	15,000,000	10 Kecamatan	16,500,000
2	Penunjang Operasional PKK Kabupaten	Output : Jumlah waktu pelaksanaan Kegiatan Penunjang Operasional PKK Kabupaten	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	693,850,000	12 Bulan	763,235,000
3	Pembinaan Kelompok Dasawisma	Output : Jumlah kelompok Dasawisma yang dibina	Kab. Kep. Selayar	41 Desa	20,000,000	41 Desa	22,000,000
4	Pelatihan Kader Posyandu	Output : Jumlah peserta Pelatihan Kader Posyandu	Kab. Kep. Selayar	41 Desa	35,000,000	41 Desa	38,500,000
5	Pelatihan Pengurus Karang Taruna	Output : Jumlah peserta Pelatihan Pengurus Karang Taruna	Kab. Kep. Selayar	41 Desa	35,000,000	41 Desa	38,500,000
6	Sosialisasi/Koordinasi Pokjandal Posyandu Tingkat Kabupaten	Output : Jumlah Posyandu yang menjadi peserta Sosialisasi/Koordinasi Pokjandal Posyandu Tingkat Kabupaten	Kab. Kep. Selayar	41 Desa	25,000,000		27,500,000

7	Pelatihan Pemberdayaan Wanita Prasejahtera		Kab. Kep. Selayar	41 Desa	25,000,000			27,500,000
8	Pembentukan Pokjanal Posyandu Kabupaten	Output : Terbentuknya Pokjanal Posyandu Kabupaten	Kab. Kep. Selayar	41 Desa	25,000,000			27,500,000
								-
10	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1,304,064,000			1,431,970,400
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				1,304,064,000			1,431,970,400
1	Program Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera	Peningkatan jumlah peserta KB baru dan aktif dan memuncunnya persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I			1,060,000,000			1,166,000,000
1	Forum antar umat beragama peduli keluarga sejahtera dan kependudukan	Persentase Forum antar umat beragama peduli keluarga sejahtera dan kependudukan	Kab. Kep. Selayar	1 lap	20,000,000			22,000,000
11	Pembinaan & pelaksanaan lomba-lomba bagi kelompok Pik remaja, triina, kader, IMP, kelompok UIPPKS dan saka kencana	Terlaksananya lomba-lomba bagi kelompok Pik remaja, triina, kader, IMP, kelompok UIPPKS dan saka kencana	Kab. Kep. Selayar	8 Jenis Kelompok	20,000,000		8 Jenis Kelompok	22,000,000
12	Pelatihan Kelompok UPPKS	Jumlah peserta yang dilatih		20 org	20,000,000		20 org	22,000,000
13	Pelatihan Kelompok Tribina	Jumlah peserta yang dilatih		20 org	20,000,000		20 org	22,000,000
14	Pelatihan Pik Remaja	Jumlah peserta yang dilatih		20 org	20,000,000		20 org	22,000,000
15	Pembinaan Saka Kencana	Jumlah peserta yang dibina		25 org	20,000,000		25 org	22,000,000
16	Analisis Data dan Informasi Kependudukan dan KB	Jumlah Data dan Informasi Kependudukan dan KB		1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
17	Pembuatan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan		1 lap	5,000,000		1 lap	5,500,000
18	Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi program KB melalui Data Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) melalui internet	persentase meningkatnya pengelolaan Data dan Penyajian Informasi program KB melalui Data Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) melalui internet		1 lap	25,000,000		1 lap	27,500,000
19	Pelaksanaan bulan bhakti IBI KB KES / Pelaksanaan bhakti sosial KB Kes, IBI, Bhayangkara, TNI Manunggal dan PKK	Persentase peningkatan Jumlah peserta KB baru/aktif yang dilayani		1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
20	Pelaksanaan Bulan Bhakti KB KES	Persentase peningkatan jumlah peserta KB baru		1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
21	Pelaksanaan Bulan Bhakti Bhayangkara KB KES	Persentase peningkatan jumlah peserta KB baru		1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
22	Pelaksanaan Bulan Bhakti TNI Manunggal KB KES	Persentase peningkatan jumlah peserta KB baru		1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
23	Pelaksanaan Bulan Bhakti PKK KB KES	Persentase peningkatan jumlah peserta KB baru		1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
24	Pengelolaan Mobil Penerangan (Mupen), Mobil unit pelayanan KB(Muyan) dan Mobil pengangkut calon Akseptor KB / Pengelolaan mobil operasional KB	Jumlah Mobil Operasional KB yang dikelola		1 lap	30,000,000		1 lap	33,000,000
25	Penunjang operasional PKB dan PLKB Gaya Baru	Jumlah PKB dan PLKB Gaya Baru		1 lap	60,000,000		1 lap	66,000,000
26	Koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	Persentase peningkatan pelaksanaan Koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar		1 lap	60,000,000		1 lap	66,000,000
27	Pembentukan kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk di Kecamatan dan Desa		11 desa	100,000,000		11 desa	110,000,000
28	Harganas tingkat Kabupaten, Provinsi dan pusat	Persentase peningkatan jumlah peserta yang mengikuti harganas tingkat kabupaten, provinsi dan pusat		1 lap	100,000,000		1 lap	110,000,000
29	Penunjang pelaksanaan PPKBD dan Sub PPKBD	persentase penunjang pelaksanaan PPKBD dan sub PPKBD	Kab. Kep. Selayar	295 Orang	215,000,000		295 Orang	236,500,000
30	Pelaksanaan KIE melalui jalur keagamaan, kemitraan dan media	Persentase ketersediaan sarana promosi KB di masyarakat		1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
31	Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan dan Penyuluhan KB	Jumlah Sarana Transportasi Pelayanan dan Penyuluhan KB		1 lap	60,000,000		1 lap	66,000,000
32	Pengadaan Media Penyuluhan KB	Jumlah Media Penyuluhan KB		6 unit	75,000,000		6 unit	82,500,000
33	Orientasi Pengelola Pencatatan dan pelaporan (R/R) Klinik dan Pustu	Jumlah Pengelola Pencatatan dan pelaporan (R/R) Klinik dan Pustu		1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
34	Penunjang Pelaksanaan UPTD	Persentase meningkatnya penunjang prasarana UPTD		1 lap	50,000,000		1 lap	55,000,000
35	Pengadaan Smartphone untuk PKB dan PLKB	Jumlah PKB/PLKB penerima smartphone		20 unit	20,000,000		20 unit	22,000,000
36	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Persentase peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		1 lap	5,000,000		1 lap	5,500,000
37	Pengadaan sarana KIE Kit dan media lini lapangan	Jumlah sarana KIE Kit dan media Lini Lapangan	Kab. Kep. Selayar	13 Kelompok				
38	Pengadaan sarana petugas lapangan KB	Persentase ketersediaan sarana petugas lapangan KB	Kab. Kep. Selayar	20 Unit				

39	Pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan KB	Jumlah sarana prasarana klinik pelayanan KB	Kab. Kep. Selayar	10 Set			
40	Pengadaan sarana rumah data kependudukan di kampung KB percontohan	Jumlah sarana pendataan yang tersedia	Kec. Bontoharu	1 Desa			
41	Dukungan media KIE dan manajemen	cakupan dukungan media KIE dan manajemen	Kab. Kep. Selayar	2 Media			
42	Operasional Balai Penyuluhan KB	Terpenuhinya dana operasional bagi balai penyuluhan KB	Kab. Kep. Selayar	11 Balai			
43	Operasional pembinaan program oleh kader	cakupan pembinaan program oleh kader	Kab. Kep. Selayar	2 Orang per Desa			-
44	Operasional integrasi program KKBPK & program pembangunan lainnya di kampung KB	persentase peningkatan integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di kampung KB	Kab. Kep. Selayar	27 Kampung KB			
45	Penurunan Stunting KB	Memurahnya desa stunting	Kab. Kep. Selayar	5 Desa			
2	Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi			91,540,000		100,694,000
1	Penunjang pelaksanaan Tim KB Keliling (TKBK)	Persentase peserta KB baru/aktif yang dilayani di daerah tertinggal dan terpencil	Kab. Kep. Selayar	6 Kecamatan	35,000,000	6 Kecamatan	38,500,000
2	Penunjang pelaksanaan pelayanan MOW/MOP	Jumlah akseptor MOW/MOP yang dilayani			20,000,000		22,000,000
3	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	Persentase peningkatan jumlah jenis alat dan obat kontrasepsi yang didistribusi	Kab. Kep. Selayar	15 Faskes	36,540,000	15 Faskes	40,194,000
3	Program Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang terlatih dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas keluarga			31,500,000		32,150,000
1	Bimbingan teknis penyusunan instrumen upaya peningkatan kualitas keluarga	Persentase peningkatan penyusunan instrumen upaya peningkatan kualitas keluarga	Kab. Kep. Selayar		15,000,000		15,000,000
2	KIE ketahanan & kualitas keluarga	persentase peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga	Kab. Kep. Selayar		10,000,000		10,000,000
3	Sosialisasi ketahanan keluarga & peningkatan layanan Puspaga	persentase peningkatan layanan puspaga	Kab. Kep. Selayar	1 Kali	6,500,000	1 Kali	7,150,000
4	Program Pengendalian Penduduk	Penurunan laju pertumbuhan penduduk			121,024,000		133,126,400
1	Pendataan & pemuktahiran data keluarga	Persentase peningkatan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipercaya	Kab. Kep. Selayar	11 Kecamatan	81,024,000	11 Kecamatan	89,126,400
2	Pelaksanaan fungsi pengelolaan data & informasi kependudukan & KB	Tersedianya R/R Pelayanan kontrasepsi dan Pegendalian lapangan			15,000,000		16,500,000
3	Pembuatan grand design pembangunan kependudakaan (GDPK)	cakupan pembuatan grand design kependudukan		1 Dok.	15,000,000	1 Dok.	16,500,000
4	Pembentukan sekolah siaga kependudukan (SSK)	Jumlah SSK yang dibentuk	Kab. Kep. Selayar	3 SSK	10,000,000	3 SSK	11,000,000
5	Penyusunan parameter kependudukan, KB dan pembangunan keluarga	Jumlah profil kependudukan			-		-
05	PERHUBUNGAN				5,074,538,830		5,581,992,713
5	DINAS PERHUBUNGAN				5,074,538,830		5,581,992,713
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,442,282,680		1,586,510,948
1	Penyediaan jasa komonikasi sumber daya air dan Listrik	Persentase keterpenuhan jasa komonikasi sumber daya air dan Listrik	Kab. Kep. Selayar	12 Bln	112,860,000		124,146,000
2	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase keterpenuhan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kep. Selayar	10 Koran	20,000,000		22,000,000
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam dan Luar Daerah	40 Kali	495,000,000		544,500,000
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase keterpenuhan Administrasi Perkantoran	Kab. Kep. Selayar	12 Bln	789,422,680		868,364,948
5	Peringatan Hari Perhubungan Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Perhubungan Nasional	Kab. Kep. Selayar	1 Kali	25,000,000		27,500,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			207,700,000		228,470,000
1	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		2 unit	40,000,000	2 unit	44,000,000
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	8 Unit	32,200,000	8 Unit	35,420,000
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		4 unit	30,000,000	4 unit	33,000,000
4	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		3 unit	15,000,000	3 unit	16,500,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya Usia Pakai gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000

6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya Usia Pakai Peralatan gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	45 Unit	15,500,000		45 Unit	17,050,000
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		10 unit	20,000,000		10 unit	22,000,000
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,000,000			55,000,000
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	Kab. Kep. Selayar	10 Orang	50,000,000		10 Orang	55,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			96,400,000			106,040,000
1	Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Perhubungan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi infrastruktur perhubungan	Kab. Kep. Selayar	11 Laporan	22,000,000		22,000,000	24,200,000
2	Penyusunan LAKIP SKPD	Tersedianya LAKIP SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	5,000,000		5,000,000	5,500,000
3	Penyusunan Renja Dishub	Renja Dinas Perhubungan	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	7,500,000		7,500,000	8,250,000
4	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA	Kab. Kep. Selayar	4 Dokumen	17,500,000		17,500,000	19,250,000
5	Pelaksanaan Tim Tindak Lanjut Dishub	Persentase terselesaikannya temuan hasil pemeriksaan inspektorat dan BPK	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	10,000,000		10,000,000	11,000,000
6	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Meningkatnya laopran capaian keuangan Semesteran yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan stansar akuntansi	Kab. Kep. Selayar	2 Laporan	4,400,000		4,400,000	4,840,000
7	Penyusunan Laporan Aset	Jumlah dokumen laopran aset yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan stansar akuntansi pemerintah	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	15,000,000		1 Laporan	16,500,000
8	Penyusunan LPPD SKPD	Tersusunnya LPPD SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	5,000,000		1 Laporan	5,500,000
9	Penyusunan LKPJ SKPD	Tersusunnya LKPJ SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,500,000
10	Penyusunan RFK SKPD	Tersusunnya RFK	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	5,000,000		1 Laporan	5,500,000
11	Rapat Kerja Teknis Bidang Perhubungan	Persentase usulan program dan kegiatan yang terakomodir pada Kerja Teknis Bidang Perhubungan			-			-
5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Presentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum			1,017,481,150			1,119,229,265
1	Penunjang Operasional Bus Sekolah	Jumlah anak sekolah yang menggunakan jasa bus sekolah	Kab. Kep. Selayar	3 Unit	211,000,000		3 Unit	232,100,000
2	Penunjang Operasional UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata	Persentase Peningkatan pelayanan UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	110,000,000		12 Bulan	121,000,000
3	Penunjang Operasional UPTD Pelabuhan penyeberangan Pattumbukang	Persentase peningkatan pelayanan UPTD Pelabuhan penyeberangan Pattumbukang	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	70,000,000		12 Bulan	77,000,000
4	Penunjang Operasional UPTD Terminal dan Perparkiran	Persentase Peningkatan pelayanan UPTD Terminal dan Perparkiran	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	177,640,000		12 Bulan	195,404,000
5	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tingkat peningkatan pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	30,000,000		12 Bulan	33,000,000
6	Penunjang Operasional UPTD Pelabuhan Laut Lokal	Persentase Peningkatan pelayanan UPTD Pelabuhan Laut Lokal	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	10,000,000		12 Bulan	11,000,000
7	Koordinasi dan Konsultasi Angkutan Penerbangan	Peningkatan Angkutan Penerbangan	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	35,000,000		12 Bulan	38,500,000
8	Koordinasi dan Konsultasi Angkutan Penyebrangan	Peningkatan Angkutan Penyebrangan	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	25,000,000		12 Bulan	27,500,000
9	Koordinasi dan Pemantauan Keselamatan Pelayaran	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Pemantauan Keselamatan Pelayaran	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	25,000,000		12 Bulan	27,500,000
10	Pengembangan Pelayanan dan sistem jaringan transportasi	Tersedianya rencana layanan dan sistem jaringan transportasi	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	5,500,000		1 Dokumen	6,050,000
11	Publikasi Data informasi secara Elektronik	Tersedianya data Secara Elektormik	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	5,000,000		12 Bulan	5,500,000
12	Penunjang Operasional Kapal Pelayaran Rakyat	Terpenuhinya kebutuhan operasional kapal pelayaran rakyat	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	273,341,150		1 Unit	300,675,265
14	Monitoring dan Pengolahan data moda transportasi	Tersedianya rencana pengolahan data transportasi	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	20,000,000		1 Laporan	22,000,000
15	Monitoring dan Evaluasi pengembangan Teknologi Informasi	Tersusunnya Laporan Pengembangan Teknologi Informasi	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	20,000,000		1 Laporan	22,000,000
6	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Keterpenuhan transportasi yang aman dan tertib			165,000,000			181,500,000
1	Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru, Peryaan Hari Besar Kenegaraan / Keagamaan dan Even Daerah	Tingkat kelancaran angkutan saat pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran, natal, tahun baru, dan perayaan hari besar	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	65,000,000			71,500,000

2	Operasi Penertiban Terpadu Lalu Lintas Bersama Instansi Terkait	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas	Kab. Kep. Selayar	24 kali	25,000,000			27,500,000
3	Pemanduan dan Pengendalian LLAJ / Tamu Daerah, Event/daerah dan Luar Daerah	Tingkat kelancaran Pemanduan dan Pengendalian LLAJ / Tamu Daerah, Event/daerah dan Luar Daerah	Kab. Kep. Selayar	5 Kali	65,000,000			71,500,000
4	Koordinasi Forum LLAJ	Tersusunnya laporan Koordinasi Forum LLAJ	Kab. Kep. Selayar	4 kali	5,000,000			5,500,000
5	Pelaksanaan dan Evaluasi andalalin	Persentase masyarakat yang sadar dampak lalu lintas	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	5,000,000			5,500,000
7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			1,445,000,000			1,589,500,000
1	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		1 laporan	20,000,000		1 laporan	22,000,000
2	Pembangunan Fasilitas penyimpanan BBM (Bunker) Pelabuhan Pattumbukan	Jumlah Fasilitas penyimpanan BBM (Bunker) Pelabuhan Pattumbukan yang terbangun			-			-
3	Penyusunan Masterplan Bandara Karumpa	Jumlah dokumen Masterplan Bandara Karumpa yang tersusun			-			-
4	Penyusunan Study Pengembangan Transportasi	Tersusunnya dokumen DED kapal bis air	Kab. Kep. Selayar	1 paket	175,000,000		1 paket	192,500,000
5	Pengembangan/ rehabilitasi fasilitas dermaga/pelabuhan							
6	Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan							
7	Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			-			-
8	Pembangunan Tambatan Perahu	Tambatan Perahu yang terbangun	Kab. Kep. Selayar	5 Unit	1,250,000,000		5 Unit	1,375,000,000
8	Program Pengembangan dan Keselamatan Transportasi	Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Transportasi			650,675,000			715,742,500
1	Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Bertambahnya usia pakai fasilitas keselamatan lalu lintas	Kab. Kep. Selayar	50 Unit	20,675,000		50 Unit	22,742,500
2	Kampanye Keselamatan Pelayaran	Persentase Masyarakat yang faham Keselamatan Pelayaran	Kab. Kep. Selayar	1 Kali	50,000,000		1 Kali	55,000,000
3	Pengadaan Peralatan Keselamatan Pelayaran	Jumlah pelaksanaan Selayar Dalam Genggaman	Kab. Kep. Selayar	1 kali	20,000,000		1 kali	22,000,000
4	Pemeliharaan Rambu Suar	Jumlah Rambu suar yang terpelihara	Kab. Kep. Selayar	1 buah	40,000,000		40,000,000	44,000,000
5	Sosialisasi Selayar Dalam Genggaman	Jumlah Masyarakat yang mengakses aplikasi Selayar Dalam Genggaman	Kab. Kep. Selayar	1 kali	20,000,000		1 kali	22,000,000
6	Sosialisasi/penyuluhan peningkatan keselamatan Transportasi bagi sopir, juru mudi angkutan	Persentase sopir, juru mudi angkutan yang faham keselamatan transportasi	Kab. Kep. Selayar	1 Kali	30,000,000		1 Kali	33,000,000
7	Survey Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan/Keselamatan Jalan	Terlaksananya Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan/Keselamatan Jalan	Kab. Kep. Selayar	1 Kali	50,000,000		1 Kali	55,000,000
8	Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Penerbangan	Jumlah Masyarakat yang faham Keselamatan Penerbangan	Kab. Kep. Selayar	1 Kali	20,000,000		1 Kali	22,000,000
9	Koordinasi dan Konsultasi pengembangan Teknologi Informasi Transportasi	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Konsultasi pengembangan Teknologi Informasi Transportasi	Kab. Kep. Selayar	1 Kali	20,000,000		1 Kali	22,000,000
10	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	200,000,000		2 Unit	220,000,000
11	Pengadaan dan Pemasangan Alat pengawasan Lalu Lintas Persimpangan Jalan secara Elektronik	Jumlah Alat pengawasan Lalu Lintas Persimpangan Jalan secara Elektronik yang terpasang	Kab. Kep. Selayar	10 unit	60,000,000		10 unit	66,000,000
12	Penyusunan data base fasilitas keselamatan Jalan	Tersusunnya data base fasilitas keselamatan Jalan	Kab. Kep. Selayar	1 laporan	100,000,000		1 laporan	110,000,000
13	Koordinasi Pengembangan Transportasi	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Transportasi	Kab. Kep. Selayar	1 laporan	20,000,000		1 laporan	22,000,000
21	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3,600,901,802			3,960,991,982
19	I. BAGIAN KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN SETDA				936,446,802			1,030,091,482
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran			184,446,802			202,891,482
1	Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran		100%	30,000,000		100%	33,000,000
2	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan (Langganan Koran)		1 tahun	2,000,000		1 tahun	2,200,000
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Rapat-Rapat Koordinasi keluar Daerah		1 Tahun	152,446,802		1 Tahun	167,691,482
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Sumberdaya Aparatur			70,000,000			77,000,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Pelatihan Pelatihan Formal		1 kali	20,000,000		1 kali	22,000,000

2	Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi melalui Persandian	Terselenggaranya Pelayanan & Pengelolaan SSB/Telkomda/Sandi & Telekomunikasi	1 kali	20,000,000		1 kali	22,000,000
3	Bimbingan Teknis PPID	Bimbingan Teknis PPID	1 kali	30,000,000		1 kali	33,000,000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		162,000,000			178,200,000
1	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor	5 unit	2,000,000		5 unit	2,200,000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Laptop dan Printer)	3 unit	50,000,000		3 unit	55,000,000
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit	15,000,000		2 unit	16,500,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	1 unit	16,000,000		1 unit	17,600,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional	6 unit	54,000,000		6 unit	59,400,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	15 unit	15,000,000		15 unit	16,500,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio/Komunikasi	Terpeliharanya Peralatan Studio/Komunikasi	32 unit	10,000,000		32 unit	11,000,000
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		5,000,000			5,500,000
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	10 Orang	5,000,000		10 Orang	5,500,000
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kominfo		416,000,000			457,600,000
1	Pengumpulan Data dan Pengelolaan Informasi	Tersedianya Layanan Informasi Bagi Masyarakat	1 kali	15,000,000		1 kali	16,500,000
2	Produksi Lembaga Penyiaran Publik	Siaran Radio dan TV Lokal Pemda					
3	Pengelolaan/Pengoperasian Transponder Bandwidth/Satelit	Kapasitas Bandwidth yang terpasang	30 MBpS	72,000,000		30 MBpS	79,200,000
4	Pengelolaan Media Centre, PPID dan aplikasi LAPOR SP4N	Tersedianya Pusat Informasi bagi Media, Pers dan Masyarakat umum	1 Tahun	101,000,000		1 Tahun	111,100,000
5	Pembangunan Jaringan Internet OPD Lingkup Pemkab Kepulauan Selayar	Tersedianya Jaringan Internet OPD yang mencukupi	1 kali	50,000,000		1 kali	55,000,000
6	Peningkatan Saran dan Prasarana Internet Publik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Internet Publik	1 kali	15,000,000		1 kali	16,500,000
7	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Pelayanan Publik	Diiterapkannya Aplikasi Pelayanan Publik di SKPD	1 kali	13,000,000		1 kali	14,300,000
8	Pendataan Pos dan Telekomunikasi (Warnet, wartel, Jasa Titipan)	Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	1 kali	20,000,000		1 kali	22,000,000
9	Pengawasan Menara Telekomunikasi	Mengetahui Kondisi Menara Se Kepulauan Selayar	100%	10,000,000		100%	11,000,000
10	Pengelolaan dan pengembangan Sistem informasi Daerah	Tersedianya Data Informasi Daerah	100%	120,000,000		100%	132,000,000
6	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Ketersediaan Sarana Komunikasi dan Determinasi Informasi		99,000,000			108,900,000
1	Penyebarnya informasi pembangunan daerah	Penyediaan jasa media cetak dan elektronik					
2	Pengelolaan/Pemeliharaan Website Pemkab Kepulauan Selayar	Jumlah Kunjungan terhadap Website Pemkab	2000 Hits	20,000,000		2000 Hits	22,000,000
3	Pelaksanaan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pendokumentasian Kegiatan-Kegiatan Pemerintah Daerah	1 Paket	45,000,000		1 Paket	49,500,000
4	Pengelolaan Penerbitan Mass media	Buletin Kominfo	1 Paket	15,000,000		1 Paket	16,500,000
5	Penerangan Keliling	Kunjungan terkait Penerangan keliling yang dilaksanakan	50 kali	19,000,000		50 kali	20,900,000
27	2. BAGIAN HUMAS PROTOKOLER SETDA			2,664,455,000			2,930,900,500
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		150,000,000			165,000,000
1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Langganan Koran)		100,000,000			110,000,000
2	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Terlaksananya Penunjang Administrasi Perkantoran		50,000,000			55,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		150,000,000			165,000,000
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		25,000,000			27,500,000
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		30,000,000			33,000,000
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya usia pakai kendaraan dinas		35,000,000			38,500,000

4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya usia pakai perlatan dan perlengkapan gedung kantor			10,000,000			11,000,000
5	Pengadaan Kendaraan Dinas	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang didukung oleh ketersediaan kendaraan Dinas			50,000,000			55,000,000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur			40,000,000			44,000,000
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur Humas & Protokol			40,000,000			44,000,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur			102,500,000			112,750,000
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya wawasan aparatur			30,000,000			33,000,000
2	Bimtek Protokoler Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Daerah dalam Bidang Jurnalistik			72,500,000			79,750,000
4	Program kerjasama informasi dengan mas media	Terlaksananya Kerjasama Informasi dengan Mas Media			1,344,455,000			1,478,900,500
1	Kerja sama Peliputan dan Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektronik	terlaksananya kontrak kerjasama peliputan dan pemberitaan dengan media cetak dan elektronik			944,455,000			1,038,900,500
2	Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan pemerintah Daerah	Terlaksananya Peliputan dan Pemberitaan kegiatan dan kebijakan Daerah			50,000,000			55,000,000
3	Pelaksanaan Publikasi dan Iklan, Advetorial Melalui Media Cetak	Terlaksananya Publikasi dan Iklan, Advetorial Melalui Media Cetak			350,000,000			385,000,000
5	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya layanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			400,000,000			440,000,000
1	Peningkatan Pelayanan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terkoordinasinya Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			35,000,000			38,500,000
2	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan			150,000,000			165,000,000
3	Pengadaan Buku Himpunan Sambutan Bupati	Tersedianya Buku Himpunan Sambutan Bupati			15,000,000			16,500,000
4	Pengadaan Kalender Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	Tersedianya Kalender Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar			150,000,000			165,000,000
5	Peningkatan Pelayanan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Staf Di Lingkungan Sekretariat Daerah	Tersedianya Pelayanan Lingkungan dan Sekretariat Lingkungan			30,000,000			33,000,000
6	Penyusunan Buku Pemerintahan	Tersedianya buku Pemerintahan			20,000,000			22,000,000
6	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur			477,500,000			525,250,000
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah			232,500,000			255,750,000
2	Peningkatan Pelayanan Kehumasan	Meningkatnya Pelayanan Kehumasan			130,000,000			143,000,000
3	Pelaksanaan Jumpa Pers	Terlaksananya Jumpa Pers			25,000,000			27,500,000
4	Pertemuan Periodik Bakohumas	Terjalinnya Koordinasi Anggota Bakohumas			30,000,000			33,000,000
5	Humas Expo	Berpartisipasinya Pemkab Kepulauan Selayar dalam Humas Expo Tingkat Prov. Sulawesi Selatan			60,000,000			66,000,000
13	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				1,924,260,000			2,116,686,000
49	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM				1,924,260,000			2,116,686,000
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif				675,840,000			743,424,000
1	Pengadaan Peralatan Industri Pengelolaan Kelapa Dalam di Kalotoa				-			-
2	Pengadaan Peralatan untuk Pelaku UKM				-			-
-	Bantuan Alat Perbengkelan	Tersedianya pelaku UMKM yang mandiri		1 Paket	98,960,000		1 Paket	108,856,000
-	Bantuan Alat Pertukangan	Tersedianya pelaku UMKM yang mandiri		1 Laporan	98,960,000		1 Laporan	108,856,000
-	Pengadaan mesin air minum kemasan gelas	Tersedianya pelaku UMKM yang mandiri		1 Laporan	200,000,000		1 Laporan	220,000,000
-	Pengadaan sarana dan Prasarana Pengolahan Kopra Putih dan Arang Tempurung	Tersedianya pelaku UMKM yang mandiri		1 Laporan	98,960,000		1 Laporan	108,856,000
-	Bantuan Peralatan Jahit Menjahit Kec. Pasimarannu	Tersedianya pelaku UMKM yang mandiri		1 Laporan	28,960,000		1 Laporan	31,856,000

1	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM	Data penerima bantuan dana pemerintah yang riil		1 Paket	50,000,000		1 Paket	55,000,000
2	Penguatan Usaha UMKM Berbasis OVOP (One Village One Product)							-
3	Pameran Promosi							-
4	Pendataan UMKM							-
5	Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Bantuan Modal Usaha							-
6	Legalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah							-
7	Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan Sertifikat Halal							-
8	Pengembangan SDM Kewirausahaan bagi Pelaku UKM							-
9	Pembentukan dan Pengembangan Sentra untuk Daerah Daratan dan Kepulauan							-
10	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pengadaan Peralatan	Data penerima bantuan peralatan yang riil		1 paket	50,000,000		1 paket	55,000,000
11	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Baru							-
12	Workshop Pembuatan Pangan Kering di Kabupaten Masamba	Meningkatnya SDM bagi perubahan pola pikir	Kab. Luwu Utara	15 UMKM	50,000,000		15 UMKM	55,000,000
13	Workshop Pengolahan Ikan							-
3	Program Pengembangan Kewirausahaan berdasarkan Keunggulan Kompetitif UKM				448,120,000			492,932,000
1	Pengadaan Alat Tenun untuk Sentra Tannung Siring							
2	Pengadaan Peralatan bagi UMKM				398,120,000			437,932,000
-	Pengadaan Mesin Pembuat Mie	Tersedianya pelaku UMKM yang mandiri	Kab.Kep.Selayar	1 Laporan	139,160,000		1 Laporan	153,076,000
-	Pengadaan Mesin Penggiling Daging	Tersedianya pelaku UMKM yang mandiri	Kab.Kep.Selayar	1 Laporan	149,160,000		1 Laporan	164,076,000
-	Pengadaan Alat Kacip Mete	Tersedianya pelaku UMKM yang mandiri	Kab.Kep.Selayar	1 Laporan	109,800,000		1 Laporan	120,780,000
3	Pelatihan peningkatan mutu hasil produksi	Tersedianya Pelaku UKM yang Berdaya saing	Kab.Kep.Selayar	30 UKM	50,000,000		30 UKM	55,000,000
4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM				327,000,000			359,700,000
1	Pameran Promosi terhadap Produk Unggulan dan Andalan Daerah	Pelaksanaan pametan promosi multi produk	Luar Daerah	100 org	50,000,000		100 org	55,000,000
2	Pameran Promosi Multi Produk dalam rangka Hari Jadi SulSel	Pelaksanaan pametan promosi multi produk	Luar Daerah	100 Org	50,000,000		100 Org	55,000,000
3	Peringatan Hari Jadi UMKM Nasional		Luar Daerah	1 kali	15,000,000		1 kali	16,500,000
4	Pemuktahiran Data UMKM Basis SIKP	Pendataan pelaku UKM	Kab. Kep. Selayar	11 Kec	50,000,000		11 Kec	55,000,000
5	Pelatihan Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Motivasi WUM	Jumlah peserta pelatihan	Kab.Kep.Selayar	20 org	22,000,000		20 org	24,200,000
6	Pelatihan Manajemen dan Keuangan bagi Pelaku UKM	Jumlah peserta pelatihan	Kab.Kep.Selayar	20 org	20,000,000		20 org	22,000,000
9	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan UMKM utusan Desa/Lurah	Kab.Kep.Selayar	1 Paket	50,000,000		1 Paket	55,000,000
10	Fasilitasi Legalisasi Usaha Penjaminan Sertifikat Hak Atas Tanah UMKM	Terlaksananya jumlah UKM yang tertib sertifikat	Kab.Kep.Selayar	6 Kec.	50,000,000		6 Kec.	55,000,000
11	Monitoring dan Evaluasi UMKM	Terlaksananya monitoring	Kab.Kep.Selayar	1 kali	15,000,000		1 kali	16,500,000
12	Pembuatan Katalog dan Kemasan UKM	Jumlah Katalog yang dibuat	Kab.Kep.Selayar	100 buah	5,000,000		5,000,000	5,500,000
13	Penetapan Standar dan Peningkatan Mutu UKM							
5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				248,100,000			272,910,000
1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah kecamatan yang dibina	Kab.Kep.Selayar	11 Kecamatan	43,160,000		11 Kecamatan	47,476,000
2	Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina	Kab.Kep.Selayar	12 Koperasi	38,500,000		12 Koperasi	42,350,000
3	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha koperasi		Kab.Kep.Selayar					-
4	Fasilitasi Kegiatan SMESCO dan EXPO KUKM terhadap Produk Unggulan dan Andalan Daerah	Terlaksananya SMESCO dan EXPO KUKM	Kab.Kep.Selayar	5 koperasi	92,100,000		5 koperasi	101,310,000
5	Peningkatan dan Penguatan Peran DEKOPINDA		Kab.Kep.Selayar					-
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab.Kep.Selayar	9 Kecamatan	27,500,000		9 Kecamatan	30,250,000
7	Bimbingan Pelaksanaan RAT dan Operasional PKL	Jumlah koperasi yang diberi bimbingan	Kab.Kep.Selayar	30 Koperasi	46,840,000		30 Koperasi	51,524,000

6	Program Penataan Sistem Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Koperasi				150,000,000		165,000,000
1	Pelatihan Akuntansi Koperasi (Tingkat Dasar dan Lanjutan)	Jumlah yang mengikuti pelatihan	Kab.Kep.Selayar	20 org	30,000,000	20 org	33,000,000
2	Penyuluhan Pembentukan Koperasi dan Sadar Koperasi	pelaksanaan penyuluhan	Kab.Kep.Selayar	1 kali		1 kali	
3	Revitalisasi dan Pembentukan Koperasi	Jumlah koperasi yang direvitalisasi	Kab.Kep.Selayar	30 Koperasi	35,000,000	30 Koperasi	38,500,000
4	Pelatihan Manajemen Kelembagaan Koperasi	Jumlah yang mengikuti pelatihan	Kab.Kep.Selayar	20 org	20,000,000	20 org	22,000,000
5	Pelatihan Kewirausahaan Koperasi	Jumlah yang mengikuti pelatihan	Kab.Kep.Selayar	20 org	20,000,000	20 org	22,000,000
6	Bimtek Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Terlaksananya bimtek bagi koperasi	Kab.Kep.Selayar	25 Koperasi	45,000,000	25 Koperasi	49,500,000
7	Program Peningkatan Apresiasi Hasil Kinerja Koperasi atas Prestasi Nilai Dasar dan Pematapan Jati Diri Koperasi				75,200,000		82,720,000
1	Peringatan Hari Koperasi dan Lomba Koperasi Berprestasi	Terlaksananya hari koperasi			75,200,000		82,720,000
2	Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Perkoperasian						
14	PENANAMAN MODAL				4,478,018,385		4,925,820,224
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				4,478,018,385		4,925,820,224
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,116,518,385		1,228,170,224
1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya ketersediaan jasa kantor	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	240,000,000	1 Tahun	264,000,000
2	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Media Surat Kabar/Majalah)	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	27,500,000
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	320,000,000	1 Tahun	352,000,000
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	531,518,385	1 Tahun	584,670,224
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Penataan Sistem Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan			28,000,000		30,800,000
1	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	3,000,000	1 tahun	3,300,000
2	Peningkatan Pengelolaan Barang	Terlaksananya pengelolaan barang kantor	Kab. Kep. Selayar	4 Laporan	3,000,000	1 tahun	3,300,000
3	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	3,000,000	1 tahun	3,300,000
4	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran	Tersusunnya RKA	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	3,000,000	1 tahun	3,300,000
5	Penyusunan RFK Dinas	Tersusunnya Dokumen RFK	Kab. Kep. Selayar	12 Dokumen	10,000,000	1 tahun	11,000,000
6	Penyusunan Renstra	Tersusunnya Renstra			-		-
7	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	3,500,000	1 tahun	3,850,000
8	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	2,500,000	1 tahun	2,750,000
9	Penyusunan Revisi Renstra	Tersusunnya Revisi Renstra			-		-
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			984,300,000		1,082,730,000
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda dua	Kab. Kep. Selayar	2 unit	40,000,000	2 unit	44,000,000
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya Sarana dan Prasana Aparatur	Kab. Kep. Selayar	6 unit	30,000,000	6 unit	33,000,000
3	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kab. Kep. Selayar	89 Unit	452,300,000	90 unit	497,530,000
4	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mebeleur Kantor/MPP	Kab. Kep. Selayar	43 unit	92,000,000	43 unit	101,200,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	1 Paket	260,000,000	1 Tahun	286,000,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpenuhnya pemeliharaan kendaraan mobil jabatan kantor	Kab. Kep. Selayar	1 unit	25,000,000	1 unit	27,500,000
7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai	Kab. Kep. Selayar	16 Unit	50,000,000	Unit	55,000,000
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	10 unit	35,000,000	10 unit	38,500,000
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kinerja Pegawai			17,500,000		19,250,000
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Kep. Selayar		-		-
2	Pengadaan pakaian dinas harian khusus	Tersedianya pakaian dinas kantor	Kab. Kep. Selayar	35 Pasang	17,500,000	orang	19,250,000

5	Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat			312,700,000			343,970,000
1	Pengarsipan izin secara Digital	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kep. Selayar	150 Dokumen	10,000,000		1 tahun	11,000,000
2	Pengembangan Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kep. Selayar	5 Konsultasi	54,500,000		1 tahun	59,950,000
3	Penyusunan Standar dan Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)	Kab. Kep. Selayar	1 doikumen	15,000,000		1 doikumen	16,500,000
4	Penunjang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kep. Selayar	300 Izin Terbit	32,700,000		1 tahun	35,970,000
5	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kep. Selayar	30 Peserta	23,000,000		1 tahun	25,300,000
6	Penyusunan Laporan Perizinan dan Non Perizinan	Tersusunnya Laporan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kep. Selayar	12 Laporan	9,000,000		1 tahun	9,900,000
7	Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kep. Selayar	8 Koordinasi	8,500,000		1 tahun	9,350,000
8	Pelaksanaan Kegiatan Excelent Service Training	Terlaksananya Kegiatan Excelent Service Training	Kab. Kep. Selayar	1 kali	20,000,000		1 kali	22,000,000
9	Penerapan Standar ISO 9001	Tersedianya jaringan perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kep. Selayar	1 lap	40,000,000		1 lap	44,000,000
10	Penyusunan draf Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Tersusunnya Penyusunan draf Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Kab. Kep. Selayar	1 dok	100,000,000		1 dok	110,000,000
6	Program Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Investasi	Meningkatnya pemahaman investasi terhadap aturan penanaman modal			92,575,000			101,832,500
1	Pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN	Terlaksananya pengendalian pengendalian penanaman	Kab. Kep. Selayar	1 kali	17,000,000		1 kali	18,700,000
2	Koordinasi Instansi Teknis dalam pelaksanaan investasi PMA/PMDN	Adanya koordinasi antara Instansi Teknis dalam pelaksanaan Investasi	Kab. Kep. Selayar	6 Kali	29,000,000		1 tahun	31,900,000
3	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelaksanaan Investasi PMA dan PMDN	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	26,575,000		1 tahun	29,232,500
4	Sosialisasi Peraturan-peraturan dibidang perizinan dan penanaman modal daerah	Terciptanya harmonisasi regulasi pusat dan daerah tentang perizinan dan penanaman modal	Kab. Kep. Selayar	1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
7	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Perkembangan data realisasi penanam modal serta informasi masalah yang dihadapi investor			42,600,000			46,860,000
1	Pengkajian, perumusan dan penyusunan penanaman modal daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan penanaman modal	Kab. Kep. Selayar	1 lap	30,000,000		1 lap	33,000,000
2	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi LKPM	Kab. Kep. Selayar	4 Laporan	12,600,000		1 tahun	13,860,000
8	Program Menginsentifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya prosentase penanganan aduan masyarakat dan tersedianya Indeks Kepuasan masyarakat			81,825,000			90,007,500
1	Evaluasi perizinan IMB, SITU, Izin, Izin Trayek dan perizinan lainnya	Tersedianya data dan potensi perizinan usaha dan bangunan	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	15,000,000		1 Laporan	16,500,000
2	Pembuatan penyusunan Perbup tentang layanan perizinan	Tersedianya Perbup tentang layanan pengaduan	Kab. Kep. Selayar	1 dok	20,000,000		1 dok	22,000,000
3	Monitoring/penanganan aduan masyarakat terkait layanan perizinan non perizinan	Tersedianya laporan Tindak Lanjut Terkait Aduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	18,575,000		1 tahun	20,432,500
4	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan masyarakat	Kab. Kep. Selayar	150 Responden	8,250,000		1 tahun	9,075,000
5	Pendataan Potensi Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya data perizinan IMB, SIUP dan Perizinan Lainnya	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	20,000,000		1 tahun	22,000,000
9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			352,000,000			387,200,000
1	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Terkoordinasinya antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA		1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
2	Peningkatan kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah	Meningkatnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah		1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
3	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Persentase Daerah yang menjadi Lahan Investor	Kab. Kep. Selayar	29 Kali	30,000,000		1 Tahun	33,000,000
4	Pengembangan Data dan System Informasi Pelayanan Investasi Daerah (SIPID)	Terlaksananya Pengembangan Data dan System Informasi Pelayanan Investasi Daerah		1 aplikasi	50,000,000		1 aplikasi	55,000,000
5	Event Pekan Hari Jadi Sulawesi Selatan	Terlaksananya Event Pekan Hari Jadi Sulawesi Selatan	Makassar	1 kali	10,000,000		1 kali	11,000,000
6	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah calon investor yang berminat untuk berinvestasi	Kab. Kep. Selayar	2 Kali	90,000,000		1 Tahun	99,000,000

7	Monitoring evaluasi dan pelaporan potensi pengembangan promosi penanaman modal	Tersedianya laporan potensi promosi penanaman modal	Kab. Kep. Selayar	1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
8	Pengembangan promosi investasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya kesepakatan investasi dalam dan luar daerah	Kab. Kep. Selayar	1 lap	22,000,000		1 lap	24,200,000
9	Pengadaan Papan Petunjuk Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Papan Petunjuk Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kep. Selayar	10 buah	5,000,000		10 buah	5,500,000
10	Penyediaan Sarana Promosi penanaman modal	Persentase peningkatan sarana promosi	Kab. Kep. Selayar	1 Paket	70,000,000		1 Tahun	77,000,000
11	Kerjasama dengan media sebagai promosi	Promosi melalui media	Kab. Kep. Selayar	2 Media	25,000,000		1 Tahun	27,500,000
10	Program Peningkatan Iklim Investasi Realisasi Investasi	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif			40,000,000			44,000,000
1	Koordinasi kerjasama di bidang investasi	Tercapainya fasilitasi dan koordinasi di bidang investasi			-			-
2	Penyusunan sistem informasi investasi penanaman modal daerah	Terlaksananya sistem informasi investasi penanaman modal daerah			-			-
3	Workshop peningkatan daya saing usaha daerah	Tersedianya Master Plan pengembangan penanaman modal			-			-
4	Koordinasi kemitraan usaha penanaman modal	Terwujudnya fasilitasi kemitraan usaha penanaman modal			-			-
5	Pendataan Perusahaan PMA dan PMDN	Tersedianya pendataan perusahaan PMA/PMDN			-			-
6	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	Terlaksananya deregulasi kebijakan penanaman modal			-			-
7	Koordinasi pengembangan investasi penanaman modal	Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Kab. Kep. Selayar	10 Lembaga	20,000,000		1 tahun	22,000,000
8	Penyusunan Ranperda Penanaman Modal	Tersedianya Ranperda dibidang penanaman modal			-			-
9	Penyusunan Peraturan Bupati di bidang Penanaman Modal	Tersusunnya Peraturan Bupati dibidang penanaman modal			-			-
10	Pengembangan Data dan System Informasi Pelayanan Investasi Daerah (SIPID)	Terlaksananya Pengembangan Data dan System Informasi Pelayanan Investasi Daerah			-			-
11	Kajian Pemetaan Potensi Daerah	Tersedianya kajian pemetaan potensi			-			-
12	Profil Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Tersedianya profil investasi daerah kab. Kepulauan Selayar			-			-
13	Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal	Terlaksananya pembinaan perusahaan penanaman modal			-			-
14	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan			-			-
15	Koordinasi Pemberdayaan UMKM di Bidang Investasi	Terwujudnya Koordinasi Pemberdayaan UMKM di Bidang Investasi	Kab. Kep. Selayar	70 Lembaga	20,000,000		1 tahun	22,000,000
11	Program Pengembangan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang bisa diketahui			75,000,000			82,500,000
1	Bimbingan teknis tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan (PP)	Adanya peningkatan Perusahaan/Badan Usaha bersyarat yang menjalankan Peraturan Perusahaan (PP)	Kab. Kep. Selayar	15 perusahaan	35,000,000		15 perusahaan	38,500,000
2	Sosialisasi pengenalan hubungan industrial bagi calon angkatan kerja	Terlaksananya sosialisasi pengenalan hubungan industrial bagi calon angkatan kerja	Kab. Kep. Selayar		20,000,000			22,000,000
3	Bimbingan teknis tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terlaksananya bimbingan teknis tata cara perselisihan hubungan industrial	Kab. Kep. Selayar		20,000,000			22,000,000
12	Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya sarana dan Prasarana Daerah	Tersedianya PLTS Terpusat, Pemanfaatan Biogas dan Pemasangan LPJU Solar Cell			1,335,000,000			1,468,500,000
1	Pendataan Potensi Pembangunan PLTS	Terbangunnya PLTS			-			-
2	Pemeliharaan LPJU PLN dan LPJU PLTS	Terpeliharanya LPJU yang rusak/ Tidak menyala	Kab. Kep. Selayar	300 Unit	280,000,000		unit	308,000,000
3	Pembangunan Biogas rumah	Terlaksananya pembangunan biogas rumah	Kab. Kep. Selayar		-			-
4	Koordinasi ketenagalistrikan EBT dan Bantuan Biogas	Tersedianya PLTS, PJU PLTS dan Biogas di Kab. Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	85,000,000		1 tahun	93,500,000
5	Study Banding Pengelolaan PLTS Terpusat	Terlaksananya Study Banding Pengelolaan PLTS Terpusat	Luar Daerah	1 kali	70,000,000		1 kali	77,000,000
6	Pembangunan PLTS Terpusat	Terlaksananya Pembangunan PLTS Terpusat	Kab. Kep. Selayar		250,000,000			275,000,000
7	Pengadaan LPJU Solar Cell	Persentase Peningkatan Desa Terpasangi LPJU Solar Cell	Kab. Kep. Selayar	18 Unit	400,000,000		unit	440,000,000
8	Bantuan Pemeliharaan PLTS Terpusat, PLT Pico Hydro serta PLT Hybrid	Terlaksananya pemeliharaan PLTS, PLT Pico Hydro serta PLT Hybrid	Kab. Kep. Selayar		200,000,000			220,000,000
14	Pemeliharaan Lampu Jalan	Terpeliharanya Lampu Jalan	Kab. Kep. Selayar		50,000,000			55,000,000

16	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					2,202,082,217			2,422,290,439
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					2,202,082,217			2,422,290,439
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran				540,947,217			595,041,939
1	Penyediaan penunjang administrasi perkantoran	Tersedianya administrasi kantor	Kab. Kep. Selayar	100%		240,010,000		100%	264,011,000
2	Rapat - rapat Koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	Kab. Kep. Selayar	100%		230,977,217		100%	254,074,939
3	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya belanja jasa telpon, air dan listrik	Kab. Kep. Selayar	100%		65,160,000		100%	71,676,000
4	Penyediaan Jasa langganan koran/majalah	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Kep. Selayar	100%		4,800,000		100%	5,280,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan Prasarana aparatur				79,890,000			87,879,000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Masyarakat	Kab. Kep. Selayar	100%		60,140,000		100%	66,154,000
2	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan Prasarana aparatur	Kab. Kep. Selayar	100%		8,750,000		100%	9,625,000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan Prasarana aparatur	Kab. Kep. Selayar	100%		11,000,000		100%	12,100,000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu				5,625,000			6,187,500
1	Penyusunan dokumen LAKIP	Ketersediaan laporan yang memadai	Kab. Kep. Selayar	100%		5,625,000		100%	6,187,500
4	Program Peningkatan Koordinasi dan Peran Serta Kepemudaan	Prosentase jumlah pemuda yang berperan dalam pemuda				756,250,000			831,875,000
1	Pelaksanaan hari-hari besar	Jumlah pemuda yang mengikuti	Kab. Kep. Selayar	100%		35,000,000		100%	38,500,000
2	Kursus Pembina Pramuka Mahir Dasar dan Lanjutan	Jumlah peserta kursus	Kab. Kep. Selayar	100%		50,000,000		100%	55,000,000
3	Pelaksanaan HUT Proklamasi, Korpri dan HJS	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi, Korpri dan HJS	Kab. Kep. Selayar	100%		56,250,000		100%	61,875,000
4	Seleksi dan pelaksanaan pasdikbra tingkat kabupaten dan propinsi	tercapainya peningkatan peran serta kepemudaan	Kab. Kep. Selayar	100%		500,000,000		100%	550,000,000
5	Pembinaan dan seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten dan propinsi	tercapainya peningkatan peran serta kepemudaan	Kab. Kep. Selayar	100%		40,000,000		100%	44,000,000
6	Pelatihan Wasit dan Pelatih Cabang Olahraga	Tercapainya pelatih dan wasit	Kab. Kep. Selayar	100%		75,000,000		100%	82,500,000
5	Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Permasalahan Olahraga	Jumlah prestasi olahraga binaan				759,120,000			835,032,000
1	Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah olahraga unggulan daerah	Kab. Kep. Selayar	100%		100,000,000		100%	110,000,000
2	Peningkatan kesegaran jasmani dan Rohani (SKJ)	Jumlah peserta senam kesegaran jasmani	Kab. Kep. Selayar	100%		80,000,000		100%	88,000,000
3	Lomba olahraga tradisional antar pelajar	Tercapainya pembinaan olahraga pelajar	Kab. Kep. Selayar	100%		25,000,000		100%	27,500,000
4	Pelaksanaan Kejuaraan Cabang Olahraga Tingkat Kabupaten	Tercapainya pembinaan dan pemasyarakatan	Kab. Kep. Selayar	100%		494,120,000		100%	543,532,000
5	Seleksi Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)	Tercapainya Pembinaan Prestasi Olahraga Pelajar	Kab. Kep. Selayar	100%		60,000,000		100%	66,000,000
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					60,250,000			66,275,000
1	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga		Kab. Kep. Selayar	100%		60,250,000		100%	66,275,000
15	KEBUDAYAAN					654,762,000			720,238,200
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					654,762,000			720,238,200
7	Program Pengembangan Nilai Budaya	Proporsi Cagar Budaya yang terdaftar dan terstandarisasi				261,508,000			287,658,800
1	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	Output : Jumlah adat budaya yang dilestarikan	Kab. Kep. Selayar			47,000,000		0	51,700,000
2	Pendataan dan Pemetaan Tenaga Kebudayaan	Output : Jumlah Tenaga Kebudayaan yang didata	Kab. Kep. Selayar			30,000,000		0	33,000,000
3	Lomba Seni Antar Sekolah	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Seni antar Sekolah	Kab. Kep. Selayar			22,254,000		0	24,479,400
4	Festival Budaya Daerah	Output : Jumlah peserta festival Budaya Daerah	Kab. Kep. Selayar			30,000,000		0	33,000,000

5	Pemberian penghargaan Tokoh Sejarah/Budaya	Output : Jumlah Tokoh Sejarah/ Budaya yang diberi penghargaan sesuai standar yang telah ditetapkan	Kab. Kep. Selayar		10,000,000	0	11,000,000
6	Pendataan Warisan Budaya Tak Benda	Output : Jumlah WBTB yang didata	Kab. Kep. Selayar		22,254,000	0	24,479,400
7	Pelatihan Pengembangan SDM Kebudayaan	Output : Jumlah Tenaga Kebudayaan yang dilatih	Kab. Kep. Selayar		100,000,000	0	110,000,000
8	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				278,000,000		305,800,000
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya				-		-
2	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Output : Jumlah Kesenian dan Kebudayaan daerah yang dikembangkan	Kab. Kep. Selayar	5 macam	10,000,000	5 macam	11,000,000
3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Output : Jumlah Peserta Dialog Kebudayaan	Kab. Kep. Selayar	20 org	12,000,000	20 org	13,200,000
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Output : Jumlah Keanekaragaman budaya yang movev	Kab. Kep. Selayar	4 macam	10,000,000	4 macam	11,000,000
5	Penulisan Sejarah Daerah dan Kearifan Lokal	Output : Jumlah Dokumen Sejarah Daerah dan Kearifan Lokal yang ditulis	Kab. Kep. Selayar	3 jenis	30,000,000	3 jenis	33,000,000
6	Biaya Penunjang DAK Non Fisik	Output : Jumlah Laporan DAK	Kab. Kep. Selayar		-	0	-
7	Pagelaran Seni Budaya sanggar seni daerah	Output : Jumlah Seni Budaya sanggar seni yang dipentaskan	Kab. Kep. Selayar	3 jenis	20,000,000	3 jenis	22,000,000
8	Penyusunan Prolegda Pelestarian Cagar Budaya	Output : Jumlah Prolegda yang disusun	Kab. Kep. Selayar	1 dok	50,000,000	1 dok	55,000,000
9	Sosialisasi UUCB	Jumlah Masyarakat yang memahami UUCB	Kab. Kep. Selayar	20 org	23,000,000	20 org	25,300,000
10	Sosialisasi Perda Cagar Budaya	Jumlah masyarakat yang memahami Perda CB	Kab. Kep. Selayar	13 org	12,000,000	13 org	13,200,000
11	Pengelolaan dan pemeliharaan Permuseuman	Jumlah koleksi museum yang dikelola	Kab. Kep. Selayar	4 jenis	30,000,000	4 jenis	33,000,000
12	Pelatihan Diving BMKT	Output : Jumlah Peserta Pelatihan yang mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab. Kep. Selayar	8 org	20,000,000	8 org	22,000,000
13	Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya (Inventarisasi CB)	Output : Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (Termasuk CB yang dikelola dan diinventarisasi)	Kab. Kep. Selayar	4 jenis	36,000,000	4 jenis	39,600,000
14	Penyusunan Kebijakan pengelolaan Sejarah dan Budaya Lokal Daerah (WBTB)	Output : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Sejarah dan Budaya lokal Daerah yang dibuat	Kab. Kep. Selayar	1 dok	25,000,000	1 dok	27,500,000
9	Peningkatan kompetensi SDM Tenaga Budaya				115,254,000		126,779,400
1	Pelatihan Kurator/Pengelola Museum	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan dan mencapai standar nilai yang ditetapkan	Kab. Kep. Selayar	20 org	30,000,000	20 org	33,000,000
2	Pelatihan Tokoh budaya dalam melestarikan nilai budaya	Output : Jumlah Tokoh budaya yang memiliki standarisasi yang ditetapkan	Kab. Kep. Selayar	20 org	30,000,000	20 org	33,000,000
3	Workshop Tari Tradisional Bagi guru Seni Budaya Tingkat SD dan SMP	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop dan mencapai Standar nilai yang ditetapkan	Kab. Kep. Selayar	15 siswa	22,254,000	15 siswa	24,479,400
4	Pendataan Tokoh Budaya dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya	Output : Jumlah Tokoh budaya yang didata dan memiliki standarisasi yang ditetapkan	Kab. Kep. Selayar	7 tokoh	33,000,000	7 tokoh	36,300,000
22	PERPUSTAKAAN				1,872,252,663		1,817,477,929
45	I. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				1,872,252,663		1,817,477,929
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terciptanya layanan administrasi perkantoran		100%	639,038,663	100%	702,942,529
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listerik	Jumlah unit jasa komunikasi, sumber daya air dan listerik yang diadakan	Selayar	12 Bulan	100,023,663	3 Jasa	110,026,029
2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Selayar	3 Majalah/ 6 Surat kabar	15,000,000	1 Dokumen	16,500,000
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	Selayar dan Luar Selayar	12 Bulan	210,000,000	12 Bulan	231,000,000
4	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah unit administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Selayar	1 Dokumen	314,015,000	1 Dokumen	345,416,500
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi layak dan fungsional		100%	509,483,000	100%	318,431,300
1	Pengadaan kendaraan dinas roda empat	Jumlah mobil jabatan		1 unit	220,000,000	1 unit	-
2	Pengadaan kendaraan roda dua	Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan			-		-
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Selayar	2 Unit	8,000,000	2 Unit	8,800,000

4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	Selayar	4 Unit	34,000,000		5 Unit	37,400,000
5	Pengadaan aplikasi perpustakaan berbasis website	Aplikasi perpustakaan berbasis website yang diadakan			-			-
6	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Meningkatnya usia pakai gedung kantor	Selayar	1 Unit	15,000,000		1 Unit	16,500,000
7	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara						-
8	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Selayar	13 Unit	206,400,000		13 Unit	227,040,000
9	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Selayar	30 Unit	10,000,000		30 Unit	11,000,000
10	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	Selayar	15 Unit	10,000,000		15 Unit	11,000,000
11	Pengolahan dan pengelolaan koleksi bahan pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dikelola dan diolah	Selayar	500 Exp	6,083,000		500 Exp	6,691,300
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya dan berkembangnya sistim pelaporan capaian kinerja sesuai standar dan tepat waktu		100%	10,000,000		100%	11,000,000
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Selayar	1 Laporan	1,000,000		1 Laporan	1,100,000
2	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP SKPD yang tersusun	Selayar	1 Laporan	2,000,000		1 Laporan	2,200,000
3	Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPAP SKPD	Jumlah RKA dan DPA yang tersusun	Selayar	20 Exp	2,000,000		20 Exp	2,200,000
4	Peningkatan dan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan keuangan	Selayar	1 Laporan	2,000,000		1 Laporan	2,200,000
5	Penyusunan Renstra	Jumlah Renstra yang disusun			-			-
6	Penyusunan Renja	Jumlah Renja yang disusun	Selayar	1 Laporan	2,000,000		1 Laporan	2,200,000
7	Peningkatan pengelolaan barang	Jumlah laporan penyimpanan barang dan pengurus barang yang disusun	Selayar	1 Laporan	1,000,000		1 Laporan	1,100,000
4	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Cakupan dokumen dan arsip yang diselamatkan dan dilestarikan		100%	176,000,000		100%	193,600,000
1	Pengelolaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya dokumen dan arsip daerah	Selayar	1 lap	12,000,000		1 lap	13,200,000
2	Pendataan dan penataan dokumen dan arsip daerah	Jumlah arsip SKPD yang didata dan ditata	Selayar	1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
3	Penelusuran arsip Selayar di BPAD Provinsi	Jumlah arsip Selayar yang tersedia dan ditelusuri di BPAD Provinsi	Luar Selayar	1.005 Exp	25,000,000		1005 Exp	27,500,000
4	Pemeliharaan rutin/ berkala arsip Daerah	Jumlah arsip yang terpelihara	Selayar	40 dos	15,000,000		40 dos	16,500,000
5	Fasilitasi penyusunan jadwal retensi arsip	Jumlah retensi arsip			-			-
6	Pelaksanaan alih media arsip statis	Jumlah alih media arsip statis	Selayar	150 Foto, 150 Pdf, 2 Disc	20,000,000		150 Lembar	22,000,000
7	Pengarsipan kegiatan Pemerintah Daerah melalui vidio rekaman/ foto	Jumlah rekaman/foto kegiatan Pemerintah Daerah yang diarsipkan	Selayar	35 Liputan 700 Foto	25,000,000		35 Video 700 Foto	27,500,000
8	Akuisisi dan penarikan arsip daerah	Jumlah arsip yang diakuisisi	Selayar	4 jenis	14,000,000		4 jenis	15,400,000
9	Pengarsipan destinasi wisata	Jumlah foto dan vidio destinasi wisata yang diarsipkan	Selayar	8 jenis	20,000,000		8 jenis	22,000,000
11	Penelusuran arsip dalam negeri (Kabupaten)	Jumlah penelusuran arsip dalam negeri (Kabupaten)	Selayar	1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
12	Penelusuran arsip luar negeri	Jumlah penelusuran arsip luar negeri	Selayar	1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	Persentase cakupan jumlah pemustaka dan jumlah koleksi bahan pustaka		100%	413,731,000		100%	455,104,100
1	Pengadaan bahan bacaan perpustakaan umum	Jumlah koleksi buku perpustakaan umum yang diadakan	Selayar	1000 buah	25,000,000		1000 buah	27,500,000
2	Pengadaan bahan bacaan perpustakaan keliling	Jumlah koleksi buku perpustakaan keliling yang diadakan	Selayar	1000 buah	25,000,000		1000 buah	27,500,000
7	Pemeliharaan dan penataan ruang anak	Jumlah perlengkapan ruang anak yang dipelihara	Selayar	1 ruangan	13,000,000		1 ruangan	14,300,000
8	Pengelolaan perpustakaan keliling darat	Jumlah kunjungan ke desa dan jumlah pemustaka	Selayar	10 Kunjungan	8,206,000		10 Kunjungan	9,026,600
9	Pengelolaan perpustakaan keliling laut	Jumlah kunjungan desa di pulau dan jumlah pemustaka	Selayar	6 Kunjungan	7,222,000		6 Kunjungan	7,944,200
10	Pengelolaan layanan internet dan layanan perpustakaan pagi, sore dan malam hari	Jumlah pemustaka dan jumlah pengunjung layanan internet dan layanan perpustakaan	Selayar	15.000 Pengunjung	65,905,000		15000 Pengunjung	72,495,500
11	Pelestarian bahan perpustakaan	Jumlah bahan pustaka yang dilestarikan	Selayar	3 Buku	10,000,000		10 Judul	11,000,000
12	Pemeliharaan dan pengawetan bahan perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan yang diolah dan dipelihara	Selayar	1.000 Exp	5,000,000		1000 Exp	5,500,000
13	Penyelenggaraan lomba-lomba dalam upaya peningkatan minat baca	Jumlah pelaksanaan lomba-lomba peningkatan minat baca	Selayar	5 Kali Lomba	17,323,600		5 Kali	19,055,960
14	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan desa/ kelurahan	Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan yang mendapat bantuan		1 kali	30,000,000		1 kali	33,000,000

15	Layanan story Telling dan mewarnai berbasis kepariwisataan	Jumlah layanan story telling yang dilaksanakan/jumlah peserta	Selayar	5 Kali Layanan	17,985,000	5 Layanan	19,783,500
16	Dekorasi ruang baca anak	% kualitas ruang baca anak dalam kondisi baik			10,000,000		11,000,000
17	Sirkulasi/ otomasi dan pengunjung perpustakaan	Jumlah pemustaka yang dilayani melalui otomasi perpustakaan	Selayar	300 Pengunjung/ tahun	2,673,000	300 Pengunjung/tahun	2,940,300
18	Monitoring dan pembinaan perpustakaan di Desa/Kelurahan/Sekolah	Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan yang dibina	Selayar	9 Desa/ 1 Kelurahan	18,396,400	10 Desa/Kel/Sek	20,236,040
19	Penyelenggaraan pekan perpustakaan/ pameran di Provinsi/Kabupaten	Jumlah pelaksanaan pameran perpustakaan	Selayar	1 Kali	67,890,000	1 Kali	74,679,000
20	Pengembangan bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan yang dilestarikan			22,000,000		24,200,000
21	Lomba perpustakaan desa	Jumlah lomba-lomba dalam upaya peningkatan minat baca		1 kali	40,000,000	1 kali	44,000,000
22	Promosi perpustakaan	Jumlah promosi perpustakaan	Selayar	4 Jenis	15,000,000	4 Jenis	16,500,000
23	Penyediaan taman baca perpustakaan di area publik	Jumlah taman baca perpustakaan	Selayar	20 Lokasi	13,130,000	20 Lokasi	14,443,000
24	Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan	Jumlah pengadaan perabot/ TIK Layanan Perpustakaan Umum	Selayar	25 m2, 91 Unit	-		-
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Meningkatnya kemampuan pengelolaan arsip		100%	124,000,000	100%	136,400,000
1	Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi	Selayar	40 OPD	25,000,000	40 OPD	27,500,000
2	Monitoring dan pembinaan kearsipan di OPD, Desa/Kelurahan	Jumlah pengelola kearsipan desa/kelurahan yang terbina	Selayar	20 Desa/Kel/OPD	20,000,000	20 Desa/Kel/OPD	22,000,000
3	Pendokumentasian pelaksanaan hari-hari besar nasional, hari jadi dan TIE	Jumlah pelaksanaan hari besar nasional, hari jadi dan TIE	Selayar	1 lap	22,000,000	1 lap	24,200,000
4	Pendokumentasian aset budaya lokal	Jumlah aset budaya lokal yang didokumentasikan	Selayar	1 lap	15,000,000	1 lap	16,500,000
5	Pengarsipan kegiatan pemerintah daerah melalui vidio rekaman/ foto	Jumlah kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan	Selayar	1 lap	22,000,000	1 lap	24,200,000
6	Pembangunan data base informasi kearsipan (e-archive)	Jumlah data base informasi kearsipan	Selayar	1 lap	20,000,000	1 lap	22,000,000
3	URUSAN PILIHAN				40,379,135,302		44,417,048,832
1	PERTANIAN				23,477,671,931		25,825,439,124
46	1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				23,477,671,931		25,825,439,124
1	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan, kinerja dan keuangan			46,000,000		50,600,000
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Lakip yang tersusun		1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,800,000
2	Inventarisasi barang persediaan dan aset	Jumlah laporan barang persediaan dan aset yang terinventarisir		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	11,000,000
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun		1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,800,000
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan (RKT)		1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	22,000,000
5	Penyusunan Naskah Ranperda	Jumlah Ranperda					
2	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Presentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran			1,961,118,181		2,157,229,999
1	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah petugas pelayanan administrasi		169 orang	1,500,000,000	169 orang	1,650,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Jasa Telekomunikasi, Air dan Listrik		12 Bulan	101,118,181	12 Bulan	111,229,999
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah layanan informasi melalui media koran		20 exp.	10,000,000	20 exp.	11,000,000
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana		350 SPD	350,000,000	350 SPD	385,000,000
3	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Keterpenuhan sarana dan prasarana Apratur			402,000,000		442,200,000
1	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Pagar BPP Pasimarranu) Lanjutan	Jumlah BPP yang terehabilitasi		1 Unit	100,000,000	1 Unit	110,000,000
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diperlihara		1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000

3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	23 Buah	100,000,000		23 Buah	110,000,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	50 Buah	10,000,000		50 Buah	11,000,000
5	Pemeliharaan rutin berkala meubiler kantor	Jumlah meubiler yang terpelihara	30 Buah	12,000,000		30 Buah	13,200,000
6	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor (Laptop/Printer/ AC dll)	10 unit	35,000,000		10 unit	38,500,000
7	Pengadaan meubiler kantor	Jumlah jenis meubiler (Meja/Kursi)	5 unit	15,000,000		5 unit	16,500,000
8	Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua	Jumlah kendaraan dinas/operasional	4 unit	80,000,000		4 unit	88,000,000
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Presentase peningkatan pendapatan petani		37,000,000			40,700,000
1	Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi	Jumlah Poktan yang menyusun Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi	70 Poktan	3,000,000		70 Poktan	3,300,000
2	Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida	Jumlah Laporan Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida	2 Laporan	3,000,000		2 Laporan	3,300,000
3	Pembinaan Kelembagaan P3A	Jumlah kelembagaan P3A yang terbina	2 Lembaga	3,000,000		2 Lembaga	3,300,000
4	Pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah poktan yang menerima pupuk bersubsidi	91 buah	3,000,000		91 buah	3,300,000
5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)	Jumlah Gapoktan penerima dana PUAP yang dievaluasi	1 lap	25,000,000		1 lap	27,500,000
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Cakupan ketahanan pangan		128,650,000			141,515,000
1	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah laporan neraca bahan makanan (NBM) yang tersusun	1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,500,000
2	Peningkatan Kinerja dan Fungsi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah pertemuan DKP	1 kali	7,000,000		1 kali	7,700,000
3	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terbina	3 Buah	5,000,000		3 Buah	5,500,000
4	Pengembangan Sistem Distribusi dan Akses Pangan	Jumlah Laporan perkembangan harga pasar dan akses pangan serta ketersediaan pangan	1 Dokumen	8,000,000		1 Dokumen	8,800,000
5	Penyusunan data potensi dan profil Dinas	Jumlah dokumen Potensi pertanian	1 buah	8,000,000		1 buah	8,800,000
6	Pengembangan Ketersediaan dan cadangan Pangan	Jumlah Beras	2500 Kg	40,000,000		2500 Kg	44,000,000
7	Pengembangan Keaneekaragaman Konsumsi	Jumlah kelompok wanita tani yang terbina	10 buah	15,650,000		10 buah	17,215,000
8	Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah wilayah rawan pangan yang terpantau	11 kecamatan	5,000,000		11 kecamatan	5,500,000
9	Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Jumlah sampel pangan segar yang diuji	5 jenis	15,000,000		5 jenis	16,500,000
10	Penyediaan sarana prasarana pengujian keamanan pangan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan pangan	6 jenis	20,000,000		6 jenis	22,000,000
6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Cakupan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		516,000,000			567,600,000
1	Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	jumlah lokasi promosi hasil produksi hasil pertanian	5 buah	88,000,000		5 buah	96,800,000
2	Pembangunan pusat penampungan produksi hasil pertanian/ perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan	Jumlah pusat penampungan produksi hasil pertanian/ perkebunan masyarakat untuk dipasarkan yang dibangun (unit)	1 unit	200,000,000		1 unit	220,000,000
3	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/ perkebunan masyarakat	Jumlah laporan harga pasar hasil produksi perkebunan masyarakat	12 dokumen	10,000,000		12 dokumen	11,000,000
4	Penyuluhan peningkatan kualitas pemasaran atas hasil produksi pertanian/ perkebunan masyarakat	Jumlah peserta Penyuluhan peningkatan kualitas pemasaran atas hasil produksi pertanian/ perkebunan masyarakat	30 org	30,000,000		30 org	33,000,000
5	Temu usaha komoditi unggulan daerah	Jumlah temu usaha / launching produksi unggulan daerah	1 kali	40,000,000		1 kali	44,000,000
6	Pengembangan grading packlaging hasil produksi pertanian/ perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana pemasaran produksi pertanian/ perkebunan yang tersedia (kelompok)	10 klp	50,000,000		10 klp	55,000,000
7	Pembangunan sanggar tani	Jumlah sanggar tani yang dibangun (unit)	1 unit	75,000,000		1 unit	82,500,000
8	Monitoring dan evaluasi perkembangan produksi hasil perkebunan	jumlah dokumen / laporan produksi perkebunan yang tersusun	1 lap	23,000,000		1 lap	25,300,000
9	Penyediaan/Peningkatan Prasarana Pertanian/Perkebunan jaringan irigasi air tanah dangkal	Jumlah jaringan irigasi air tanah dangkal yang tersedia					
10	Penyediaan/Peningkatan Prasarana Pertanian/ Perkebunan Dam Parit/Embung	Jumlah dam parit/embung yang tersedia (unit)					
7	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Proporsi luas tanam yang memperoleh layanan jaringan irigasi tersier		15,745,903,750			17,320,494,125

1	Penyediaan/Peningkatan prasarana pertanian/perkebunan jaringan irigasi air tanah permukaan	Jumlah jaringan irigasi air permukaan yang tersedia			-			-
2	Penyediaan/Peningkatan Prasarana Pertanian/Perkebunan jaringan irigasi air tanah dangkal	Jumlah jaringan irigasi air tanah dangkal yang tersedia			-			-
3	Penyediaan/Peningkatan Prasarana Pertanian/ Perkebunan Dam Parit/Embung	Jumlah dam parit/embung yang tersedia (unit)			-			-
4	Penyediaan/Peningkatan Prasarana Pertanian/ Perkebunan Jalan Usaha Tani	Jumlah ruas Jalan Usaha Tani	39 Ruas		5,450,000,000		39 Ruas	5,995,000,000
-	Perintisan JT Tingkasa-Batumeong Dusun Pajalayya Kec. Bontomanai				200,000,000			220,000,000
-	Pembangunan Jalan Tani Kalatta - Tabokka Dusun Pajalayya (Lanjutan) Kec. Bontomanai				200,000,000			220,000,000
-	Perintisan Jalan Tani Sagayya - Rabbanayya Kel. Batangmata Sapo Kec. Bontomatene				200,000,000			220,000,000
-	Perintisan Jalan Tani Dana' - Tolekleng Dasommeng Desa Kayu Bauk Kec. Bontomatene				200,000,000			220,000,000
-	Perintisan Jalan Tani Lembangsajo - Ammauhang Desa Kayu Bauk Kec. Bontomatene				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas Barabembe Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas Buhung Cinta (Lanjutan) Kec. Takabonerate				150,000,000			165,000,000
-	Jalan Tani Jene Tattala - Appabatu Kampung Bau Desa Bungaiya				100,000,000			110,000,000
-	Lanjutan JUT Ruas Ujung Laut - Soko Desa Lambego Kec. Pasimarannu				100,000,000			110,000,000
-	JUT Ruas Tee Laafa - Tee Laikano Desa Bonea Kec. Pasimarannu				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jalan Tani Mare Selatan Desa Ujung				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jalan Tani Kayuangin/ Massungke				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jalan Tani Mangatti/Labuang Panjang				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jalan Tani Dusun Gojang Desa Bontosunggu				200,000,000			220,000,000
-	Pembuatan Jalan Tani Ruas Ujung - Buhung Bonto Tuma (lanjutan) Desa Batang				100,000,000			110,000,000
-	Perintisan Jalan Tani Kanari Bara - Limporan Dusun Bontosaille Desa Polebungin Kec. Bontomanai				100,000,000			110,000,000
-	Jalan Tani Pa'bajaangia - Katti Katti Desa Kaburu Kec. Bontomanai				200,000,000			220,000,000
-	Jalan Tani Lenga' - Lempek Desa Kaburu Kec. Bontomanai				200,000,000			220,000,000
-	Jalan Tani Bolakang - Sussulu Desa Mekar Indah Kec. Buki				200,000,000			220,000,000
-	Jalan Tani Ampangan - Balang Lohe Dusun Ampangan Desa Balang Butung Kec. Buki				200,000,000			220,000,000
-	Jalan Tani Alasa - Tallepongko Kec. Buki				200,000,000			220,000,000
-	Lanjutan Peningkatan Jalan Buhung Cinta - Tanjong				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan JUT Dusun Parangtasulung Desa Bontosaille Kec. Pasimasunggu				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan JUT Desa Bontobulaeng Kec. Pasimasunggu Timur				150,000,000			165,000,000
-	Pembangunan JUT Dusun Mangatti Desa Labuang Pamajang Kec. Pasimasunggu				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan JUT Desa Bontomalling Kec. Pasimasunggu Timur				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jalan Tani Ruas Dolok - Lembang Lauro (Lanjutan)				75,000,000			82,500,000
-	Pembangunan JUT Te Bangke Separabangke - Tunggua Dusun Tunggua Desa Lamantu Kec. Pasimarannu				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jalan Tani Desa Tamalanrea Kec. Bontomatene				100,000,000			110,000,000
-	Pembangunan Jalan Tani Dusun Kenang-Kenang Kec. Bontosikuyu				200,000,000			220,000,000
-	Perintisan Jalan Ruas Batu Bissa-Dodaiya				200,000,000			220,000,000
-	Pembangunan JUT Ruas Kampong Tangnga Desa Teluk Kampe				200,000,000			220,000,000
-	Pembangunan JUT Balla Bulu Timur Desa Bontojati				100,000,000			110,000,000

-	Pembangunan JUT Ruas Bara Bembe-Kopi kopi Dusun Bajo Desa Kayuadi				75,000,000			82,500,000
-	Perintisan JUT desa Bontosunggu Kec. Bontoharu				100,000,000			110,000,000
-	Peningkatan JUT Menuju bendungan Desa Harapan Dusun Bontoala Kec. Bontosikuyu				150,000,000			165,000,000
-	Pembangunan JUT Kampung bau- batu rijang Dusun Padang Timur				150,000,000			165,000,000
-	Perintisan JUT Dusun Palemba Kec. Bontoharu				200,000,000			220,000,000
-	JUT Ruas Pungpipik Desa Kalepadang Kec. Bontoharu				100,000,000			110,000,000
5	Penyediaan/Peningkatan Prasarana Pertanian/ Perkebunan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani / jalan produksi yang tersedia (KM)			-			-
6	Pembangunan balai benih/ bibit Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perkebunan	Jumlah balai benih/bibit tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan yang dibangun (unit)			-			-
7	Pengembangan Tanaman Perkebunan Lokal	Jumlah tanaman lokal yang dikembangkan			100,000,000			110,000,000
8	Pengembangan Kebun Induk	Jumlah kebun Induk yang dibangun			200,000,000			220,000,000
9	Demfarm Percontohan Pertanian	Jumlah demfarm			120,000,000			132,000,000
10	Pertuasan Tanaman Hortikultura	Luas Lahan Pengembangan Tanaman Hortikultura	100 hektar		677,500,000	100 hektar		745,250,000
11	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah benih padi inbrida	12125 kg		197,363,750	12125 kg		217,100,125
12	Pengadaan bibit tanaman Hortikultura	Jumlah bibit tanaman hortikultura	3 Jenis		300,000,000	3 Jenis		330,000,000
-	Sayuran dan Manga				100,000,000			110,000,000
-	Durian				200,000,000			220,000,000
-	Rambutan							-
13	Pengadaan bibit tanaman perkebunan	Jumlah bibit tanaman perkebunan	6 Jenis		800,000,000	6 Jenis		880,000,000
-	Kakao				100,000,000			110,000,000
-	Vanili				100,000,000			110,000,000
-	kelapa dalam							-
-	kelapa kepyor dan pandang wangi				50,000,000			55,000,000
-	Jambu Mente				150,000,000			165,000,000
-	Cengkeh				200,000,000			220,000,000
-	Pala				200,000,000			220,000,000
14	Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan	Jumlah pestisida yang tersedia	800 liter		188,540,000	800 liter		207,394,000
15	Pembasmian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	Jumlah OPT Perkebunan yang dibasmi			100,000,000			110,000,000
16	Bimtek pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	Jumlah peserta bimtek	31 orang		20,000,000	31 orang		22,000,000
17	Penyediaan Sarana Pengendalian OPT Tanaman	Jumlah sarana pengendalian OPT yang tersedia			50,000,000			55,000,000
18	Intensifikasi tanaman perkebunan	Luasan tanaman perkebunan yang terpelihara	1 Ha		30,000,000	1 Ha		33,000,000
19	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Jumlah OPT Perkebunan yang terkendali	2 Jenis		50,000,000	2 Jenis		55,000,000
20	Pertuasan Tanaman Perkebunan	Luasan tanaman perkebunan yang bertambah			120,000,000			132,000,000
21	Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	Jumlah OPT Hortikultura yang terkendali	2 Jenis		30,000,000	2 Jenis		33,000,000
22	Intensifikasi Tanaman Hortikultura	Luasan tanaman hortikultura yang terpelihara	2 Ha		87,500,000	2 Ha		96,250,000
23	Pemilihan dan Penilaian Blok Penghasil Tinggi Tanaman Pala	Jumlah Pohon Terpilih			60,000,000			66,000,000
24	Penunjang Operasional Kegiatan Bidang	Jumlah dokumen laporan kegiatan Bidang yang tersedia			20,000,000			22,000,000
25	Pembangunan BAK Penampungan Air dan Mesin Pompa	Jumlah BAK Penampungan air	1 Unit		200,000,000	1 Unit		220,000,000
26	Pengembangan Jaringan Irigasi Perpipaan	Jumlah jaringan perpipaan	1 jenis		200,000,000	1 jenis		220,000,000
27	Pembangunan Sumur Tani	Jumlah sumur tani yang tersedia (unit)	5 unit		175,000,000	5 unit		192,500,000
28	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan UPH perkebunan	Jumlah laporan pemanfaatan UPH perkebunan	1 lap		20,000,000	1 lap		22,000,000
8	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Persentase teknologi spesifik yang diterapkan petani			704,000,000			774,400,000
1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna yang tersedia	4 paket		429,000,000	4 paket		471,900,000
2	Pengadaan sarana dan prasarana pasca panen perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana panen dan pasca panen perkebunan yang tersedia	19 buah		200,000,000	19 buah		220,000,000
3	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah peserta Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	30 org		75,000,000	30 org		82,500,000

9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi teknis sesuai NSPK yang ditetapkan			2,905,000,000			3,195,500,000
1	Penyusunan Program Penyuluhan	Jumlah programa penyuluhan yang tersusun	80 Dokumen	50,000,000		80 Dokumen	55,000,000	
2	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian yang terjangkau	80 buah	30,000,000		80 buah	33,000,000	
3	Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah metode/materi penyuluhan yang tersusun dan dikembangkan	3 metode	70,000,000		3 metode	77,000,000	
4	Pembuatan Demplot Percontohan	Jumlah demplot percontohan	5 unit	100,000,000		5 unit	110,000,000	
5	Pengembangan Kebun Wisata Pertanian	Jumlah Kebun Wisata	3 jenis	250,000,000		3 jenis	275,000,000	
6	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh	Jumlah penyuluh yang mengikuti pendidikan pelatihan	10 org	50,000,000		10 org	55,000,000	
7	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Utama	Jumlah Petani yang Mengikuti PENAS	10 Orang	250,000,000		10 Orang	275,000,000	
8	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian	Jumlah sistem informasi penyuluhan	2 buah	50,000,000		2 buah	55,000,000	
9	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang terбина dan terevaluasi	10 Buah	50,000,000		10 Buah	55,000,000	
10	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama	Jumlah Poktan yang dibina	11 Poktan	60,000,000		11 Poktan	66,000,000	
11	Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan penyediaan sarana pendukungnya (DAK)	Jumlah BPP yang terbangun dan sarana pendukung yang tersedia (unit)	1 Unit	1,945,000,000		1 Unit	2,139,500,000	
12	Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan penyediaan sarana pendukungnya (DAK)	Jumlah BPP yang terbangun/ diperbaiki dan sarana pendukung yang tersedia (unit)						
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Angka morbilitas dan mortalitas hewan ternak			332,000,000			365,200,000
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah ternak yang terpelihara kesehatannya	300 ekor	17,000,000		300 ekor	18,700,000	
2	Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah peserta sosialisasi	40 orang	10,000,000		40 orang	11,000,000	
3	Bimtek Kader Pelayan Kesehatan Hewan	Jumlah peserta Bimtek Kader Pelayan Keswan	8 org	25,000,000		8 org	27,500,000	
4	Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan hewan	Jumlah layanan posyandu ternak	1000 ekor	30,000,000		1000 ekor	33,000,000	
5	Penyediaan Obat-Obatan dan Perlengkapan Kesehatan Hewan	Jumlah sarpras keswan	1 paket	200,000,000		1 paket	220,000,000	
6	Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah peralatan/perlengkapan pelayanan Keswan yang tersedia	1 set	50,000,000		1 set	55,000,000	
11	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan produksi dan populasi ternak			670,000,000			737,000,000
1	Pembibitan dan Perawatan Ternak Besar	Jumlah bibit Sapi	25 ekor	200,000,000		25 ekor	220,000,000	
2	Pembibitan dan Perawatan Ternak Kecil	Jumlah bibit Kambing	55 ekor	100,000,000		55 ekor	110,000,000	
3	Pembibitan dan Perawatan Ternak Unggas	Jumlah bibit ayam buras	800 ekor	30,000,000		800 ekor	33,000,000	
4	Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan	Jumlah sarana dan prasarana RPH yang tersedia	2 Buah	50,000,000		2 Buah	55,000,000	
5	Penjaringan ternak betina produktif	Jumlah ternak betina yang diselamatkan dari pematongan	20 ekor	40,000,000			44,000,000	
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	Jumlah sarpras pembibitan ternak	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000	
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangbiakan Ternak	Ljumlah sarpras pengembangbiakan sapi	1 unit	100,000,000		1 unit	110,000,000	
8	Pembangunan/Pengembangan Pakan Hijauan Ternak	Luas lahan hijauan pakan ternak	5 Ha	50,000,000		5 Ha	55,000,000	
12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase teknologi tepat guna yang diterapkan peternak			30,000,000			33,000,000
1	Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan	Jumlah peserta bimtek Inseminasi Buatan	20 org	10,000,000		20 org	11,000,000	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah sarpras teknologi peternakan tepat guna	1 paket	20,000,000		1 paket	22,000,000	
4	PARIWISATA				2,464,706,640			2,711,177,304
47	47. DINAS KEPARIWISATAAN				2,464,706,640			2,711,177,304
1	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen LK yg disusun secara tepat, akurat, dan sesuai dgn standar akuntansi pemerintah			109,480,000			120,428,000

1	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan	Kab.Kep.Selayar	1 Laporan	8,000,000		1 Laporan	8,800,000
2	Pengelolaan Administrasi keuangan dan pertanggung jawaban	Persentase ketepatan pertanggung jawaban	Kab.Kep.Selayar	1 Laporan	10,000,000		1 Laporan	11,000,000
3	Pelaksanaan Tim Tindak Lanjut Dinas Kepariwisataan	Jumlah Laporan tindak lanjut	Kab.Kep.Selayar	1 Laporan	2,000,000		1 Laporan	2,200,000
4	Penyusunan Ranperda Dinas Kepariwisataan	Jumlah Ranperda		1 Dokumen	20,000,000		1 Dokumen	22,000,000
5	Penunjang Operasional DAK Pariwisata	Jumlah Dokumen						-
6	Penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA/DPA	Kab.Kep.Selayar	2 Dokumen	10,000,000		2 Dokumen	11,000,000
7	Penyusunan Renja Dinas Kepariwisataan	Jumlah dokumen Renja	Kab.Kep.Selayar	1 Dokumen	3,480,000		1 Dokumen	3,828,000
8	Penyusunan Laporan LKPJ Dinas Kepariwisataan	Jumlah laporan	Kab.Kep.Selayar	1 Dokumen	3,000,000		1 Dokumen	3,300,000
9	Rapat kerja teknis Dinas Kepariwisataan	Jumlah laporan	Kab.Kep.Selayar	1 Laporan	15,000,000		1 Laporan	16,500,000
10	Sosialisasi perda tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan kabupaten (RIPPARKAB)	Jumlah sosialisasi	Kab.Kep.Selayar	30 org	20,000,000		30 org	22,000,000
11	Penyusunan Dokumen TAPKIN	Jumlah Dokumen	Kab.Kep.Selayar	1 Dokumen	2,000,000		1 Dokumen	2,200,000
12	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen	Kab.Kep.Selayar	1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,500,000
13	Penyusunan LAKIP	Jumlah laporan LAKIP	Kab.Kep.Selayar	1 Dokumen	6,000,000		1 Dokumen	6,600,000
14	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	Kab.Kep.Selayar	2 Dokumen	5,000,000		2 Dokumen	5,500,000
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			806,200,000			886,820,000
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode penyediaan	Kab.Kep.Selayar	1 Tahun	54,000,000		1 Tahun	59,400,000
2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Periode penyediaan	Kab.Kep.Selayar	1 Tahun	3,000,000		1 Tahun	3,300,000
3	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Periode penyediaan	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	200,000,000		1 Tahun	220,000,000
4	Pelaksanaan Penunjang administrasi perkantoran	Periode penyediaan	Kab.Kep.Selayar	1 Tahun	544,200,000		1 Tahun	598,620,000
5	Event Kepariwisataan Dunia	Jumlah event	Kab.Kep.Selayar	1 Event	5,000,000		1 Event	5,500,000
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas kerja aparatur yang mendukung kinerja			250,000,000			275,000,000
1	Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan (unit)	Kab.Kep.Selayar	3 unit	65,000,000		3 unit	71,500,000
2	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit/ macam)	Kab.Kep.Selayar	10 unit	40,000,000		10 unit	44,000,000
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kab.Kep.Selayar	2 Unit	10,000,000		2 Unit	11,000,000
4	Pengadaan Meubelur	Jumlah meubelur	Kab.Kep.Selayar	5 unit	20,000,000		5 unit	22,000,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode pemeliharaan	Kab.Kep.Selayar	1 Tahun	15,000,000		1 Tahun	16,500,000
6	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan	Kab.Kep.Selayar	1 Unit	35,000,000		1 Unit	38,500,000
7	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Periode pemeliharaan	Kab.Kep.Selayar	1 Tahun	60,000,000		1 Tahun	66,000,000
8	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Periode pemeliharaan	Kab.Kep.Selayar	1 Tahun	3,000,000		1 Tahun	3,300,000
9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Periode pemeliharaan	Kab.Kep.Selayar	1 Tahun	2,000,000		1 Tahun	2,200,000
4	Pengembangan Kemitraan	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan SDM dan Kelembagaan			290,000,000			319,000,000
1	Pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata selam (Diving)	Jumlah yang dilatih	Kab.Kep.Selayar	20 org	35,000,000		20 org	38,500,000
2	Sosialisasi Gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona	Jumlah Desa yang disosialisasi	Kab.Kep.Selayar	20 org	35,000,000		20 org	38,500,000
3	Pelatihan SDM Pengelola Homestay	Jumlah Pengelola terlatih	Kab.Kep.Selayar	15 Pengelola	25,000,000		15 Pengelola	27,500,000
4	Pelatihan SDM Kelompok sadar wisata	Jumlah pokdarwis dilatih	Kab.Kep.Selayar	1 Pokdarwis	45,000,000		1 Pokdarwis	49,500,000
5	Pelatihan Pemandu wisata darat (tour guide)	Jumlah pemandu yang dilatih	Kab.Kep.Selayar	35 Orang	45,000,000		35 Orang	49,500,000
6	Pengendalian dan penguatan kelompok sadar wisata	Jumlah pokdarwis diberi penguatan /pengendalian	Kab.Kep.Selayar	1 Laporan	15,000,000		1 Laporan	16,500,000
7	Pelatihan SDM pariwisata	Jumlah yang dilatih	Kab.Kep.Selayar	35 Orang	30,000,000		35 Orang	33,000,000
8	Pelatihan Guide Diving	Jumlah peserta	Kab.Kep.Selayar	20 org	20,000,000		20 org	22,000,000
9	Pelatihan pemandu wisata diving	Jumlah peserta						
-	Pelatihan pemandu wisata selam bagi masyarakat (generasi muda) Kab .Kepulauan Selayar	Jumlah peserta pelatihan	Kab.Kep.Selayar	20 org	20,000,000		20 org	22,000,000
10	Pengembangan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah MoU	Kab.Kep.Selayar	1 Laporan	20,000,000		1 Laporan	22,000,000
5	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase usaha pariwisata yang standar			363,000,000			399,300,000

1	Bimtek manajemen usaha pariwisata	Jumlah peserta	Kab.Kep.Selayar	30 Peserta	50,000,000		30 Peserta	55,000,000
2	Pembangunan destinasi pariwisata	Jumlah amenitas/ sarana/ penunjang	Kab.Kep.Selayar	1 Wahana	150,000,000			165,000,000
3	Kajian Lingkungan Destinasi Unggulan	Dokumen	Kab.Kep.Selayar	1 Dokumen	100,000,000			110,000,000
4	Koordinasi KEK Pariwisata	Laporan Kemajuan	Dalam dan luar daerah	1 Laporan	63,000,000			69,300,000
5	Pembangunan TIC							
6	Dermaga Wisata							
7	Talud							
8	Sumber Air Bersih							
9	Tempat Ibadah							
10	Pergola							
11	Gazebo							
12	Kios Cinderamata							
13	Penataan Lansekap							
14	Menara Pandang							
15	Plaza Pusat Jajanan/Kuliner							
16	Jalur Pejalan Kaki (pedestrian)/Jalan Setapak							
17	Rambu-Rambu Petunjuk Arah (signage) di dalam Kawasan Daya Tarik Wisata							
18	Fasilitas Kebersihan							
6	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase ide, inovasi, dan kreativitas yang tumbuh berkembang dimasyarakat			366,026,640			402,629,304
1	Pendataan/ pemantauan potensi ekonomi kreatif	Jumlah dok	Kab.Kep.Selayar		20,000,000			22,000,000
2	Perencanaan pengembangan kawasan ekonomi kreatif	Jumlah dok	Kab.Kep.Selayar		15,000,000			16,500,000
3	Pameran Ekonomi kreatif di Makassar	Jumlah event	Kab.Kep.Selayar		15,000,000			16,500,000
4	Misi Ekonomi Berbasis Budaya?	Jumlah event	Kab.Kep.Selayar	1 Event	61,026,640			67,129,304
5	Selayar Expo Berbasis Ekonomi Kreatif	Jumlah event	Kab.Kep.Selayar		60,000,000			66,000,000
6	Film documenter produk ekonomi kreatif	Jumlah film	Kab.Kep.Selayar		40,000,000			44,000,000
7	Forum group discussion (FGD) Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan	Kab.Kep.Selayar		20,000,000			22,000,000
8	Misi kesenian dalam dan luar daerah	Jumlah event	Dalam dan luar daerah	1 Event	50,000,000			55,000,000
9	Pembangunan Fasilitas Ekonomi Kreatif	Jumlah fasilitas			20,000,000			22,000,000
10	Peningkatan Kemitraan Pengembangan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif	Jumlah MoU	Kab.Kep.Selayar		15,000,000			16,500,000
11	Promosi Produk ekonomi kreatif	Jumlah event	Kab.Kep.Selayar	1 Ev3nt	50,000,000			55,000,000
7	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah pelaksanaan /partisipasi event promosi dalam dan luar daerah, serta luar negeri			280,000,000			308,000,000
1	Familiarization Tour	Jumlah publikasi/ laporan			-			-
2	Pengadaan bahan dan Alat promosi	Jenis bahan dan promosi	Kab.Kep.Selayar	4 Jenis	45,000,000			49,500,000
-	Pembuatan bahan promosi wisata kab. Kepulauan Selayar (Buku, brosur, dan Kelender)	Jumlah bahan promosi yang dibuat	Kab.Kep.Selayar					-
3	Tourism Information Centre (TIC) di Bandara	Periode Pelayanan (tahun)	Kab.Kep.Selayar		50,000,000			55,000,000
13	Peningkatan sistem informasi pariwisata	Periode promosi	Kab.Kep.Selayar	1 Laporan	25,000,000			27,500,000
15	Misi Promosi Pariwisata/ road show	Jumlah road show	Kab.Kep.Selayar		40,000,000			44,000,000
19	Promosi pariwisata pada event dalam negeri/ luar negeri	Lokasi pameran	Dalam dan Luar daerah	1 Event	120,000,000			132,000,000
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN				8,758,855,565			9,634,741,122
48	48. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				8,758,855,565			9,634,741,122
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,277,402,205			1,405,142,426

1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kelautan dan Perikanan	Kab.Kep.Selayar	1 tahun	112,000,000		1 tahun	123,200,000
2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kab.Kep.Selayar	1 tahun	7,000,000		1 tahun	7,700,000
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tersedianya rapat-rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kab.Kep.Selayar	1 tahun	350,000,000		1 tahun	385,000,000
4	Penunjang administrasi perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran	Kab.Kep.Selayar	1 tahun	668,802,205		1 tahun	735,682,426
5	Penunjang operasional DAK perikanan	Tersedianya laporan bulanan pelaksanaan Kegiatan DAK KP TA. 2020 dan Dokumen Usulan/Rencana Kegiatan (RK) DAK KP tahun 2021	Kab.Kep.Selayar	12 Laporan	59,600,000		12 Laporan	65,560,000
6	Penunjang Operasional UPTD	Terlaksananya operasional Instalasi BBI	Kab.Kep.Selayar	1 Unit	50,000,000		1 Unit	55,000,000
7	Penunjang operasional pelaksanaan penyediaan dokumen kontrak dan pencairan	Terlaksananya pengelolaan dokumen kontrak dan pencairan	Kab.Kep.Selayar		30,000,000			33,000,000
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				111,407,360			122,548,096
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan pelaporan akhir tahun	Kab. Kep. Selayar	4 Laporan	10,033,360		4 Laporan	11,036,696
2	Penyusunan Renja	Terlaksananya kegiatan penyusunan renja						-
3	Penyusunan RKA/DPA, RKAP/DPPA	Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA/DPA, RKAP/DPPA	Kab. Kep. Selayar	4 Dokumen	15,000,000		4 Dokumen	16,500,000
4	Penyusunan Laporan Tindak Lanjut OPD/LHP	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut LHP	Kab. Kep. Selayar		5,000,000			5,500,000
5	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	6,500,000		1 Laporan	7,150,000
6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	6,455,000		1 Laporan	7,100,500
7	Penyusunan LKPJ	Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	6,455,000		1 Laporan	7,100,500
8	Sinkronisasi program dan kegiatan	Terakomodirnya usulan kegiatan pada APBD, APBD Provinsi dan DAK, APBN	Kab. Kep. Selayar	7 Prog/Kajian	45,000,000		7 Prog/Kajian	49,500,000
9	Forum OPD	Lahirnya Kesepahaman dan Sinergitas Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan antar sektor dan antar level pemerintahan	Kab. Kep. Selayar	67 Orang	16,964,000		67 Orang	18,660,400
3	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur				296,126,000			325,738,600
1	Pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	Jumlah ASN Yang Melakukan pendidikan dan pelatihan	Kab.Kep.Selayar	7 Orang	65,000,000		7 Orang	71,500,000
2	Sosialisasi peraturan perundangan-undangan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Peserta Sosialisasi Perundangan-undangan bidang kelautan dan perikanan	Kab.Kep.Selayar	80 Peserta	33,126,000		80 Peserta	36,438,600
3	Study banding kawasan pengembangan perikanan	Terlaksananya kegiatan Study banding kawasan pengembangan perikanan	Kab.Kep.Selayar	1 Kali	170,000,000		1 Kali	187,000,000
4	Peningkatan SDM teknis budidaya (magang)	Meningkatnya Pengetahuan SDM Dinas	Kab.Kep.Selayar	2 Orang	28,000,000		2 Orang	30,800,000
5	Magang Alat Penangkapan Ikan di BBPI Semarang	Jumlah staf yang magang						
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				298,000,000			327,800,000
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor						
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Keterpenuhan Peralatan Kantor Yang Tersedia	Kab.Kep.Selayar	10 Buah	82,000,000		10 Buah	90,200,000
3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan dinas yang dipelihara	Kab.Kep.Selayar	2 Unit	45,000,000		2 Unit	49,500,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kab.Kep.Selayar	30 Unit	61,000,000		30 Unit	67,100,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kab.Kep.Selayar	1 tahun	10,000,000		1 tahun	11,000,000
6	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu	Kab.Kep.Selayar	1 tahun	40,000,000		1 tahun	44,000,000
7	Penunjang operasional kapal perikanan	Terlaksananya penunjang operasional kapal perikanan	Kab.Kep.Selayar	1 tahun	20,000,000		1 tahun	22,000,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pabrik Es	Jumlah pabrik es yang direhabilitasi	Kab.Kep.Selayar	1 tahun	40,000,000		1 tahun	44,000,000
5	Program Pengembangan Data dan Informasi				230,500,000			253,550,000
1	Pameran perikanan	Terlaksananya kegiatan Pameran perikanan						
2	Pekan Raya Sul-Sel	Promosi Pengolahan Hasil Perikanan						
3	Penunjang operasional statistik perikanan	Penyediaan data statistik, pengolah data, dan pendataan	Kab.Kep.Selayar	1 Laporan	150,000,000			165,000,000
4	Monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan	Persentase Program/Kegiatan Dinas yang di Monitoring dan evaluasi	Kab.Kep.Selayar	4 Laporan	50,500,000			55,550,000

5	Perencanaan Kegiatan	Terlaksananya kegiatan perencanaan Kegiatan	Kab.Kep.Selayar						-
6	Penunjang Operasional sistem informasi kelautan dan perikanan	Prosentase Pengelolaan Sistem informasi bidang kelautan dan perikanan (%)	Kab.Kep.Selayar						-
7	Updating Peta Existing Lahan Budidaya	Adanya Peta Existensi Lahan Terkini	Kab.Kep.Selayar	9 Lembar	30,000,000				33,000,000
8	Pendampingan program one data	Terlaksananya kegiatan pendampingan terhadap program one data	Kab.Kep.Selayar						-
									-
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan				453,000,000				498,300,000
1	Pelatihan penggunaan alat tangkap modern dan ramah lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan alat tangkap modern dan ramah lingkungan	Kab.Kep.Selayar	25 Orang	113,000,000		25 Orang		124,300,000
2	workshop pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan kecil	Terlaksananya workshop pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan kecil	Kab.Kep.Selayar		30,000,000				33,000,000
3	Pembuatan jalan produksi	Tersedianya jalan produksi bagi pelaku usaha budidaya air payau	Kab.Kep.Selayar		100,000,000				110,000,000
4	Sarana Penanganan Hasil Tambak Udang(Bak Pencucian Udang)	Tersedianya sarana penanganan hasil tambak udang	Kab.Kep.Selayar		10,000,000				11,000,000
5	Penanganan Hama dan Penyakit Ikan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penanganan hama dan penyakit ikan	Kab.Kep.Selayar		30,000,000				33,000,000
6	Studi Wawasan ke Lokasi Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Studi wawasan ke Lokasi Pembudidayaan Ikan	Kab.Kep.Selayar	1 Kali	50,000,000		1 Kali		55,000,000
7	Pendampingan kegiatan provinsi bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan	Terlaksananya Pendampingan Provinsi	Kab.Kep.Selayar	1 Tahun	35,000,000		1 Tahun		38,500,000
8	Studi wawasan pengembangan perikanan tangkap	terlaksananya studi wawasan pengembangan perikanan tangkap	Kab.Kep.Selayar	1 Tahun	60,000,000		1 Tahun		66,000,000
9	Pemberdayaan kelompok pembudidaya	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan usaha pembudidaya ikan	Kab.Kep.Selayar	20 Kelompok	25,000,000		20 Kelompok		27,500,000
8	Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan				465,000,000				511,500,000
1	Penguatan kelembagaan nelayan	Jumlah KUB/Kelompok/Koperasi yang dibina	Kab.Kep.Selayar	20 Kelompok	40,000,000				44,000,000
2	Workshop pengembangan bisnis perikanan tangkap	Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai bisnis perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan	Kab.Kep.Selayar	35 Peserta	30,000,000				33,000,000
3	Temu Usaha Bidang Perikanan tangkap	Terlaksananya temu usaha			50,000,000				55,000,000
4	Temu Lapang Perikanan Tangkap	Terlaksananya Temu Lapang Bidang Perikanan			60,000,000				66,000,000
5	Temu Bisnis Perikanan	Terlaksananya Temu Bisnis Perikanan			70,000,000				77,000,000
6	Fasilitasi hukum kelembagaan nelayan kecil	Jumlah KUB dan Koperasi Nelayan yang berbadan hukum	Kab.Kep.Selayar	15 Kelompok	40,000,000		15 Kelompok		44,000,000
7	Pembinaan kelembagaan pembudidaya Ikan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan	Kab.Kep.Selayar	36 Kelompok	50,000,000		36 Kelompok		55,000,000
8	Kelembagaan Hukum Pembudidaya Ikan	Terfasilitasinya Kelembagaan Pembudidaya Ikan	Kab.Kep.Selayar	12 Kelompok	50,000,000		12 Kelompok		55,000,000
9	Pendampingan usaha kelompok pembudidaya ikan air laut, air tawar, dan air payau	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan usaha kelompok pembudidaya ikan air lau, air tawar, dan air payau	Kab.Kep.Selayar	30 Kelompok	45,000,000		30 Kelompok		49,500,000
10	Temu Usaha Perikanan Budidaya	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok pembudidaya	Kab.Kep.Selayar		30,000,000				33,000,000
9	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan				431,500,000				474,650,000
1	Indonesia Marine and Fishery Expo	Terlaksananya Indonesia Marine and Fishery Expo	Kab.Kep.Selayar		70,000,000				77,000,000
2	Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Pembudidaya	Terlaksananya Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Pembudidaya	Kab.Kep.Selayar		40,000,000				44,000,000
3	Bimtek pengembangan usaha pengolahan hasil budidaya	Terlaksananya Bimtek pengembangan usaha pengolah hasil perikanan	Kab.Kep.Selayar	1 Kali	30,000,000		1 Kali		33,000,000
4	Lomba masak serba ikan	terlaksananya kegiatan lomba masak serba ikan	Kab.Kep.Selayar	3 kali	57,500,000		3 kali		63,250,000
5	Festival Kuliner	terlaksananya festival kuliner	Kab.Kep.Selayar		50,000,000				55,000,000
6	Sosialisasi Gemar Makan Ikan	terlaksananya sosialisasi gemar makan ikan	Kab.Kep.Selayar		20,000,000				22,000,000
7	Pembinaan Rangka Diversifikasi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pembinaan Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan	Kab.Kep.Selayar	30 Orang	25,000,000		30 Orang		27,500,000
8	Promosi dan pengembangan produk perikanan (PENAS)	Adanya Pertukaran Informasi Antar Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan	Luar Daerah	40 Display	139,000,000		40 Display		152,900,000

10	Program Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu	Realisasi Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu			750,000,000			825,000,000
1	Penyediaan Dokumen KIPT	Presentase Ketersediaan dokumen pada KIPT	Kab.Kep.Selayar					
2	AMDAL Kawasan Industri Perikanan Terpadu	Persentase Dokumen Lingkungan yang disusun	Kab.Kep.Selayar	2 Laporan	750,000,000			825,000,000
3	Pembangunan Infrastruktur pada KIPT	Prosentasi Tersedianya Infrastruktur sentra KIPT	Kab.Kep.Selayar				2 Laporan	-
11	Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan TPI				660,000,000			726,000,000
1	Penunjang Operasional Bidang Pengelolaan TPI dan SIUP Budidaya	Tersedianya Dana Operasional Bidang pengelolaan TPI dan Penerbitan SIUP Budidaya	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	110,000,000			121,000,000
2	Pendataan Produksi di Sentra Nelayan	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Produksi Perikanan Pendaratan Ikan	Kab. Kep. Selayar	5 Daerah Pendataan	100,000,000		1 Tahun	110,000,000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sentra Nelayan	tersedianya sarana dan prasarana sentra nelayan					5 Daerah Pendataan	-
4	Pengadaan Sarana Pendukung TPI	Tersedianya sarana pendukung TPI						-
5	Pengadaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana TPI							-
6	Sosialisasi/Diseminasi/publikasi	Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi/publikasi	Kab. Kep. Selayar	1 Kali	50,000,000			55,000,000
7	Pembangunan TPI Mini	Terbangunnya TPI mini pada sentra-sentra nelayan		1 unit	150,000,000		1 Kali	165,000,000
8	Renovasi TPI Bonehalang	Terlaksananya Renovasi TPI Bonehalang	Kab. Kep. Selayar	1 Paket	250,000,000		1 unit	275,000,000
							1 Paket	
12	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				2,870,820,000			3,157,902,000
1	Pengadaan alat tangkap Sero	Jumlah alat tangkap Sero yang disediakan	Kab. Kep. Selayar	15 Paket	199,160,000			219,076,000
2	Pengadaan Kacamata Selam	Terlaksananya Pengadaan Kacamata Selam						-
3	Pengadaan alat tangkap bubu	Jumlah alat tangkap bubu						-
4	Pengadaan Alat Tangkap Pancing	Jumlah Alat Tangkap Pancing						-
5	Pengadaan Jaring	Tersedianya Pengadaan Jaring	Kab. Kep. Selayar	8 Set	99,160,000			109,076,000
6	Pengadaan Mesin	Jumlah Mesin yang diadakan	Kab. Kep. Selayar	72 Unit	640,000,000			704,000,000
7	Pengadaan alat bantu penangkapan Ikan	Jumlah alat bantu penangkapan						-
8	Pengadaan Perahu/Sampan Fiber	Tersedianya Pengadaan Perahu/Sampan Fiber	Kab. Kep. Selayar	65 Unit	1,650,000,000			1,815,000,000
9	Penunjang Operasional Perikanan Tangkap	Terlaksananya kegiatan yang menunjang peningkatan produksi perikanan	Kab. Kep. Selayar	16 Kegiatan	137,500,000			151,250,000
10	Pendampingan Penerbitan KUSUKA	Terlaksananya Pembuatan Kartu Pelaku Usaha Perikanan	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	50,000,000			55,000,000
11	Pendampingan Progran Asuransi Nelayan	Terlaksananya Verifikasi Asuransi Nelayan	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	50,000,000			55,000,000
12	Pendampingan Program SEHAT	Presentase Tanah Nelayan Yang Telah Diverifikasi	Kab. Kep. Selayar	100 Persil	45,000,000			49,500,000
13	Pembangunan Perahu/Kapal penangkap Ikan beserta mesin, alat penangkap ikan dan alat bantu Penangkap Ikan	Jumlah Perahu/Kapal yang diadakan						
14	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (Cold Box)	Jumlah Alat Bantu Penangkapan (Cold Box)						
15	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan (Jaring)	Jumlah Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Jaring)						
13	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				915,100,000			1,006,610,000
1	Pengadaan Sarana dan prasarana budidaya rumput laut	Tersedianya sarana dan prasarana rumput laut	Kab. Kep. Selayar	4 Kelompok	94,160,000			103,576,000
2	Pengadaan Jaring Keramba	Tersedianya jaring keramba	Kab. Kep. Selayar	13 Unit	99,160,000			109,076,000
3	Pengadaan Keramba Jaring Apung	Tersedianya Keramba Jaring apung	Kab. Kep. Selayar	3 Unit	198,460,000			218,306,000
4	Pembangunan/rehabilitasi sarpras unit pembenihan rakyat (UPR)	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi Sarpras Unit Pembenihan Rakyat (UPR)						
5	Pengembangan Jalan Produksi	Tersedianya Pengembangan Jalan Produksi						
6	Paket percontohan budidaya udang sederhana	Tersedianya percontohan budidaya udang sederhana						
7	Review Rencana Zonasi Budidaya Rumpuk Laut	Tersedianya dokumen review rencana zonasi budidaya rumput laut						-
8	Tambak Percontohan semi intensif udang vannamei (pintu monik)	Tersedianya pintu monik untuk tambak percontohan semi intensif udang vannamei						-
9	Pengadaan Mesin Alkon dan Pompa	Tersedianya mesin alkon dan mesin pompa	Kab. Kep. Selayar	6 Unit	114,160,000			125,576,000
10	Rehabilitasi Saluran Tambak	Tersedianya saluran tambak yang representatif untuk budidaya air payau						-
11	Pengembangan Budidaya Air Payau	Tersedianya pakan, bibit, dan sarana penunjang budidaya ikan air payau	Kab. Kep. Selayar	450 Ekor bibit	199,160,000			219,076,000

12	Pengelolaan Percontohan Budidaya Air Payau	Tersedianya tambak percontohan Dinas	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	60,000,000			66,000,000
13	Pembangunan Kolam Percontohan budidaya ikan air tawar	Tersedianya kolam bagi pelaku usaha budidaya air tawar						-
14	Pengelolaan Pentokolan Udag	Peningkatan Produksi tokolan windu/vaname di BBI Baloiya	Kab. Kep. Selayar	1 Paket	50,000,000			55,000,000
15	Asuransi Pembudidaya	Tersedianya asuransi bagi pembudidaya						-
16	Sertifikasi Lahan Tambak Pembudidaya	Terlaksananya sertifikasi lahan tambak bagi pembudidaya						-
17	Penunjang Operasional Perikanan Budidaya	Terlaksananya Kegiatan Operasional Perikanan Budidaya	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	100,000,000			110,000,000
6	PERINDUSTRIAN				3,455,429,166			3,800,972,083
49	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM				3,455,429,166			3,800,972,083
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				56,000,000			61,600,000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Disperindagkum yang mencapai target Indikator Kinerja Kunci (IKK) ≥80%	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	10,000,000		6 dok	11,000,000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Laporan Akhir Tahun	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10,000,000		1 lap	11,000,000
3	Penyusunan LAKIP	Terbitnya LAKIP	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	8,000,000		1 dok	8,800,000
4	Penyusunan RENJA	Dokumen Perencanaan Tahunan	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	8,000,000		1 dok	8,800,000
5	Penyusunan RENSTRA	Dokumen Rencana 5 Tahun						-
6	Penyusunan RKA/DPA	Dokumen Pelaksana Anggaran Satu Tahun	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	10,000,000		1 dok	11,000,000
7	Peningkatan Pengelolaan Barang	Terkendalinya Data-Data Aset SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10,000,000		1 dok	11,000,000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				668,069,166			734,876,083
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran yang baik	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	66,000,000		1 Tahun	72,600,000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	5,000,000		1 Tahun	5,500,000
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Kep. Selayar	25 Kali	240,000,000		14 Kali	264,000,000
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	357,069,166		1 Tahun	392,776,083
3	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas kerja aparatur yang mendukung kinerja			573,000,000			630,300,000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional						
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung	Kab. Kep. Selayar	6 unit	44,000,000		6 unit	48,400,000
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perataan kantor yang disediakan	Kab. Kep. Selayar	1 Set	35,000,000		4 unit	38,500,000
4	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur yang akan digunakan	Kab. Kep. Selayar		124,000,000			136,400,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	1 Gedung	250,000,000		1 Gedung	275,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Bertambahnya usia pakai kendaraan Dinas Mobil Jabatan	Kab. Kep. Selayar	1 unit	27,500,000		1 unit	30,250,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Bertambahnya usia pakai kendaraan dinas operasional	Kab. Kep. Selayar	30 Unit	27,500,000		1 tahun	30,250,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	25 Unit	5,000,000		1 tahun	5,500,000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Tersedianya pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	Kab. Kep. Selayar	6 unit	30,000,000		6 unit	33,000,000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	10 unit	30,000,000		10 unit	33,000,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat/fungsional (sesuai bidangnya)			53,000,000			58,300,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Non Formal	Tersedianya Sumber daya Aparatur	Kab. Kep. Selayar		18,000,000		16 kali	19,800,000
	- Pendidikan kemetrotrologian				35,000,000			38,500,000

5	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				370,000,000			407,000,000
1	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pengelolaan Kelapa	Terlaksananya Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pengelolaan Kelapa	Kab. Kep. Selayar	20 Kelompok			20 Kelompok	
	- Pelatihan Pengolahan Kopra Putih				100,000,000			110,000,000
2	Perluasan Penerapan Standar IKM							-
3	Pelatihan Industri Kreatif	Terlaksananya Pelatihan Industri Kreatif	Kab. Kep. Selayar	20 Kelompok	100,000,000		20 Kelompok	110,000,000
4	Pelatihan Wira Usaha Baru	Terlaksananya pelatihan wira usaha baru	Kab. Kep. Selayar	20 Kelompok	70,000,000		20 Kelompok	77,000,000
5	Pelatihan Desain Interior Industri Pertukangan	Terlaksananya pelatihan desain interior industri pertukangan	Kab. Kep. Selayar	20 Kelompok			20 Kelompok	-
	- Pelatihan pembuatan Kerajinan Limbah Kayu Pantai				100,000,000			110,000,000
6	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial				361,400,000			397,540,000
1	Pelatihan Peralatan Sistem Pertanian	Terlaksananya pelatihan sistem pertanian	Kec. Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur	50 Kelompok	65,000,000		50 Kelompok	71,500,000
2	Penyusunan Brosur Profil IKM Kerajinan Daerah dan Fasilitas Pameran				30,000,000			33,000,000
3	Fasilitasi Promosi Industri				20,000,000			22,000,000
4	Peningkatan dan Fasilitas IKM Pertukangan	Terlaksananya Peningkatan dan Fasilitas IKM Pertukangan	Kab. Kep. Selayar	20 Kelompok			20 Kelompok	-
	- Pelatihan Pertukangan Sampan Fiber				100,000,000			110,000,000
6	Pengembangan Kawasan Industri	Tercapainya pengembangan kawasan industri	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	146,400,000		1 Tahun	161,040,000
9	Fasilitasi Pemanfaatan Rumah Kemasan							-
7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				1,373,960,000			1,511,356,000
1	Pembinaan IKM Jasa Elektrikal	Jumlah IKM yang dibina	Kab. Kep. Selayar	27 IKM	50,000,000		27 IKM	55,000,000
2	Pembinaan dan Pengembangan Perbengkelan		Kab. Kep. Selayar		30,000,000			33,000,000
3	Penciptaan WUB dan Pengembangan SDM	Terlaksananya penciptaan WUB dan pengembangan SDM	Kab. Kep. Selayar	50 IKM	150,000,000		26 IKM	165,000,000
	- Pelatihan Pembuatan Gula Semut				100,000,000			110,000,000
4	Penyusunan Ranperda tentang Kawasan Industri Kabupaten Kep. Selayar			27 IKM	50,000,000		27 IKM	55,000,000
5	Pemberdayaan Usaha Jasa Industri	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Jasa Industri	Kab. Kep. Selayar	2 Kelompok	198,960,000		2 Kelompok	218,856,000
6	Pengolahan Ikan (Bakso dan Nugget Ikan)			3 Kelompok	160,000,000		3 Kelompok	176,000,000
7	Pelatihan Pembuatan Anyaman	Terlaksananya pelatihan pembuatan anyaman	Kab. Kep. Selayar	50 Kelompok	70,000,000		50 Kelompok	77,000,000
8	Pelatihan Kemasan dan Labeling			3 Kelompok	20,000,000		3 Kelompok	22,000,000
9	Pelatihan Pengolahan Rotan	Terlaksananya pelatihan pengolahan rotan	Kab. Kep. Selayar	20 Kelompok	70,000,000		20 Kelompok	77,000,000
10	Pembinaan dan Pengembangan WUB Berbasis Pangan							-
	- Pelatihan Pengolahan Pisang	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan WUB Berbasis Pangan			100,000,000			110,000,000
11	Pameran Deskranada	Terlaksananya pameran deskranada	Luar Daerah	1 Tahun	100,000,000		1 Tahun	110,000,000
12	Pelaksanaan Musda dan Munas	Terlaksananya munas dan musda deskranada	Luar Daerah	1 Tahun	175,000,000		1 Tahun	192,500,000
13	Promosi Industri	Terlaksananya promosi industri	Luar Daerah	1 Tahun	100,000,000		1 Tahun	110,000,000
7	PERDAGANGAN				2,039,034,000			2,242,937,400
49	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM				2,039,034,000			2,242,937,400
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				579,200,000			637,120,000
1	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Informasi harga	11 Kecamatan	4 Jenis	68,000,000		4 Jenis	74,800,000
2	Penujangan operasional UPT pasar	Operasional UPT pasar	Kab. Kep. Selayar	30 Pasar	185,000,000		30 Pasar	203,500,000
3	Pengendalian ketersediaan barang dan stabilitas harga	Pencegahan terjadinya penimbunan barang	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	50,000,000		1 Tahun	55,000,000
4	Promosi dan misi dagang	Komoditi produk unggulan	Kab. Kep. Selayar	9 Produk	70,000,000		9 Produk	77,000,000

5	Pengembangan sistem dan distribusi barang/produk	Terlaksananya sistem dan jaringan bongkar muat barang	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	68,200,000		1 Tahun	75,020,000
6	Penataan pedagang kaki lima	Tertatanya pedagang kaki lima	Kab. Kep. Selayar	50 PKL	38,000,000		50 PKL	41,800,000
7	Bimtek Pengelolaan Pasar	Terlaksananya bimtek pengelolaan pasar	Benteng Selayar	100 Peserta	100,000,000		100 Peserta	110,000,000
2	Program Pengendalian Kemetrolgian				244,350,000			268,785,000
1	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah							
2	Peningkatan Pengawasan Alat UTTP dan BDKT	Alat UTTP yang layak pakai dan BDKT yang baik	Kab. Kep. Selayar	11 Kec	35,000,000		11 Kec	38,500,000
3	Sosialisasi UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	Terlaksananya Sosialisasi	Kab. Kep. Selayar		70,000,000			77,000,000
4	Sosialisasi Kebijakan Metrologi Legal	Terlaksananya Sosialisasi	Kab. Kep. Selayar		30,000,000			33,000,000
5	Pemutakhiran Data Alat UTTP				40,000,000			44,000,000
6	Pelaksanaan Tera/Tera Ulang	Pengendalian alat UTTP	Kab. Kep. Selayar	11 Kec	69,350,000		11 Kec	76,285,000
4	Program Sarana dan Prasarana Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen				435,070,000			478,577,000
2	Kalibrasi Alat Standar Kemetrolgian	Pengendalian alat standar kemetrolgian		6 Kec	20,000,000		6 Kec	22,000,000
3	Pengadaan Kotak Saran Konsumen	Tersedianya kotak saran			16,000,000			17,600,000
4	Pengadaan Peralatan Standar Kemetrolgian Daerah	jumlah peralatan			50,000,000			55,000,000
5	Bantuan Alat Standar UTTP bagi Pelaku Usaha	Jumlah penerima bantuan			60,000,000			66,000,000
6	Pengadaan Kendaraan Operasional Kemetrolgian	Kendaraan operasional kemetrolgian		1 Keg	149,070,000		1 Keg	163,977,000
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Takar Ulang	Jumlah pos takar ulang			40,000,000			44,000,000
9	Bantuan Pengadaan Alat UTTP	Jumlah bantuan			100,000,000			110,000,000
10	Bantuan Pengadaan Alat Standar dan Kendaraan Operasional	Jumlah bantuan						
5	Program Pengembangan Perdagangan, Koordinasi dan Kerjasama				422,000,000			464,200,000
1	Penunjang Operasional Papan Informasi Elektronik							
2	Pemeliharaan Kawasan Plaza Marina							
3	Pemantauan dan Koordinasi Perdagangan Antar Pulau	Pemantauan dan pengendalian harga barang	Kab. Kep. Selayar	7 Pelabuhan	42,000,000		7 Pelabuhan	46,200,000
4	Penyusunan Zonasi Kawasan Pusat Distribusi Logistik		Kab. Kep. Selayar		260,000,000			286,000,000
5	Penunjang Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik	Kawasan pusat distribusi logistik	Kab. Kep. Selayar	2 Kecamatan	120,000,000		2 Kecamatan	132,000,000
6	Program Perlindungan Konsumen				358,414,000			394,255,400
1	Pendampingan Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar	Pengawasan peredaran barang dan jasa	Kab. Kep. Selayar	11 Kecamatan	31,150,000		11 Kec	34,265,000
2	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa							-
3	Sosialisasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Sosialisasi	Kab. Kep. Selayar		70,000,000			77,000,000
4	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Bahan Bakar Minyak (BBM)							-
5	Pembangunan Sarana MCK Pasar Sentral Bonea							-
6	Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Sosialisasi			60,000,000			66,000,000
7	Sosialisasi Perlindungan Konsumen untuk Tingkat SMP dan SMU	Peningkatan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban selaku konsumen	Kab. Kep. Selayar	90 Siswa	97,264,000		SLTP dan SLTA	106,990,400
8	Penetapan Desa Konsumen Cerdas							-
9	Peringatan Hari Konsumen Nasional (HARKONAS)		Kab. Kep. Selayar		100,000,000			110,000,000
8	KETRANSMIGRASIAN				183,438,000			201,781,800
44	1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				183,438,000			201,781,800
7	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Wilayah Transmigrasi	Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Wilayah Transmigrasi			183,438,000			201,781,800

1	Identifikasi dan Evaluasi Produk Unggulan Desa	Output : Mengidentifikasi produk unggulan desa kemudian mengevaluasi hasil dari data identifikasi	Kab. Kep. Selayar	45 Desa	8,438,000		45 Desa	9,281,800
2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan	Output : Jumlah peserta pelatihan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Kep. Selayar		20,000,000			22,000,000
3	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Output : Jumlah kawasan perdesaan yang dibangun	Kab. Kep. Selayar		25,000,000			27,500,000
4	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku, dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Output : Jumlah naskah/mekanisme kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi yang terjalin	Kab. Kep. Selayar		30,000,000			33,000,000
5	Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknik Satuan Pemukiman (RTSP) Transmigrasi	Output : Jumlah kawasan yang terfasilitasi penyusunan RTSP Transmigrasi	Kab. Kep. Selayar		60,000,000			66,000,000
6	Identifikasi Penyiapan Lokasi Pemukiman Transmigrasi	Output : Jumlah kawasan yang teridentifikasi dalam rangka penyiapan lokasi pemukiman transmigrasi	Kab. Kep. Selayar		40,000,000			44,000,000
4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN				88,004,470,787			96,765,198,858
18	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				60,447,947,830			66,492,742,613
15	SEKRETARIAT DAERAH				12,517,000,000			13,768,700,000
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran			6,711,070,800			7,382,177,880
1	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air & listrik	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	1,061,070,800	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	1,167,177,880
2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan luar daerah yang diselenggarakan	Dalam Daerah dan Luar Provinsi	1 Tahun	3,200,000,000	Dalam Darah dan Luar Provinsi	12 Bulan	3,520,000,000
3	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang diselenggarakan	Kab. Kep. Selayar	4 Layanan	2,450,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	2,695,000,000
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,015,000,000			1,116,500,000
1	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil jabatan/dinas yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	33 Unit	850,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	935,000,000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah mobil jabatan/dinas yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	3 Unit	30,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	33,000,000
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	3 Unit	50,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	55,000,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	28 Unit	30,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	33,000,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kab. Kep. Selayar		20,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	22,000,000
6	Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur	jumlah mebeleur yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	4 Unit	20,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	22,000,000
7	Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat studio dan komunikasi	jumlah alat-alat studio dan komunikasi yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	4 Unit	15,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	16,500,000
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Keterpenuhan Disiplin Aparatur			500,000,000			550,000,000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	kebutuhan pakaian dinas serta perlengkapannya Bupati/Wakil Bupati terpenuhi	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	500,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	550,000,000
2	Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu			-			-
4	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya			86,000,000			94,600,000
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kegiatan diklat yang diikuti	Dalam dan Luar Provinsi	10 Kali	86,000,000	Dalam dan Luar Provinsi	12 Bulan	94,600,000
5	Program peningkatan kesejahteraan pegawai	Persentase Pegawai yang meningkat kesejahteraannya			69,929,200			76,922,120
1	Biaya bahan kesehatan/obat-obatan				-			-
2	Medical Check up	Medical Check Up Bupati/Wakil Bupati tersedia	Kab. Kep. Selayar	8 Orang	69,929,200	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	76,922,120
6	Program Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemenuhan logistik kepala/wakil kepala daerah dan tamu			4,135,000,000			4,548,500,000
1	Dialog/audensi dgn tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terlaksananya Dialog/audensi dgn tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	450,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	495,000,000

2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	225,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	247,500,000
3	Rapat koordinasi unsur Muspida	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	30,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	33,000,000
4	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah terlaksana	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	100,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	110,000,000
5	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Kunjungan kerja inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terlaksana	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	600,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	660,000,000
6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya terlaksana	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	950,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	1,045,000,000
7	Penerimaan tamu-tamu Pemda	Penerimaan tamu-tamu pemda terlaksana	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	1,100,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	1,210,000,000
8	Peningkatan kapasitas Bupati/Wakil Bupati	Peningkatan kapasitas (Bupati/Wakil Bupati) terlaksana	Kab. Kep. Selayar	2 Kali	10,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	11,000,000
9	Koordinasi Pemerintahan Bupati/Wakil Bupati	Koordinasi pemerintahan Bupati/Wakil Bupati terlaksana	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	10,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	11,000,000
10	Belanja Rumah Tangga Bupati/Wakil Bupati	Belanja rumah tangga Bupati/Wakil Bupati terlaksana	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	660,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Bulan	726,000,000
16	2. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA				439,483,116			483,431,428
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran			23,375,000			25,712,500
1	Pelaksanaan Penunjang Administrasi perkantoran	Operasional pelaksanaan kegiatan penunjang administrasi perkantoran	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	23,375,000	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	25,712,500
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan kebutuhan sarana/prasarana aparatur yang terpenuhi			25,000,000			27,500,000
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas dapat beroperasi dengan baik	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	25,000,000	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	27,500,000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor						
3	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah unit pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah			252,625,116			277,887,628
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Koordinasi pejabat Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	75,000,116	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	82,500,128
	Rapat Kerja Camat	Jumlah rapat kerja camat yang di laksanakan						
	Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah						
	Penyusunan Laporan Presensi Kegiatan Bupati/Wakil Bupati Kep. Selayar	Tersedianya Laporan Presensi Kegiatan Bupati/Wakil Bupati Kep. Selayar	Kab. Kep. Selayar	12 Laporan	35,000,000	Kab. Kep. Selayar	12 Laporan	38,500,000
	Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	Kab. Kep. Selayar	1 Kecamatan	35,000,000	Kab. Kep. Selayar	1 Kecamatan	38,500,000
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Terlaksananya penyusunan LPPD Sekretariat daerah						-
	Forum Group Discussion (FGD) Unsur Pimpinan Daerah	Terlaksananya Forum Group Discussion Unsur Pimpinan Daerah	Kab. Kep. Selayar	24 Kali	92,625,000	Kab. Kep. Selayar	24 Kali	101,887,500
	Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia	Terlaksananya Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia	Dalam dan Luar Daerah	1 Kali	15,000,000	Dalam dan Luar Daerah	1 Kali	16,500,000
4	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah			60,000,000			66,000,000
	Pelaksanaan Kegiatan APKASI	Iuran Wajib APKASI	Dalam dan Luar Daerah	1 Kali	25,000,000	Dalam dan Luar Daerah	1 Kali	27,500,000
	Pelaksanaan Kerjasama Lembaga dan Daerah	Terlaksananya Kerjasama Lembaga dan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	35,000,000	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	38,500,000
5	Program Penataan Daerah				68,483,000			75,331,300
	Pembakuan Nama Rupabumi	Terlaksananya Verifikasi Pembakuan Nama Rupabumi	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	28,483,000	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	31,331,300
	Penetapan dan Penegasan Batas daerah	Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Daerah	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	40,000,000	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	44,000,000
	Penetapan Kecamatan Percontohan	Penetapan Kecamatan Percontohan						
	Pembinaan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kecamatan						
5	Program Perencanaan dan Pelaporan , Kinerja dan Keuangan				10,000,000			11,000,000

	Penyusunan Renja	Terlaksananya penyusunan Rencana kerja Sekretariat Daerah	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	5,500,000
	Penyusunan SOP	Terlaksananya Penyusunan SOP	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	5,500,000
6	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya			-			-
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal						
17	3. BAGIAN HUKUM SETDA				1,024,633,731			1,127,097,104
1	Program Peningkatan Aktivitas Pengawasan	Persentase Peningkatan Aktivitas Pengawasan			250,000,000			275,000,000
1	Pembahasan Tindak Lanjut LHP Pejabat Pengawan Pemerintah	Terlaksananya Pembahasan Tindak Lanjut LHP Pejabat Pengawasan Pemerintah			140,000,000			154,000,000
2	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Tingkat Bakorwil	Terlaksananya Pemutakhiran Tindak Lanjut Tingkat Bakorwil			20,000,000			22,000,000
3	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Tingkat Regional	Terlaksananya Pemutakhiran Tindak Lanjut Tingkat Regional			-			
4	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi SulSel	Terlaksananya Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi SulSel			30,000,000			33,000,000
5	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pemutakhiran Tindak Lanjut Tingkat Kabupaten			-			
6	Penyusunan Data Tindak Lanjut LHP APFP	Tersusunnya Data Tindak Lanjut LHP APFP			10,000,000			11,000,000
7	Penyelenggaraan Penagihan Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Penagihan Kerugian Negara/Daerah			10,000,000			11,000,000
8	Sosialisasi dan Pelaporan LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara	Terlaksananya Sosialisasi/Pelaporan LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara			40,000,000			44,000,000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase dan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			14,993,731			16,493,104
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			14,993,731			16,493,104
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah						
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			9,640,000			10,604,000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas			3,640,000			4,004,000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor						-
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor			6,000,000			6,600,000
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor						
4	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			6,000,000			6,600,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pejabat/Staf yang dikirim untuk mengikuti Diklat			6,000,000			6,600,000
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Peningkatan Jumlah Peraturan Perundang-undangan			54,000,000			59,400,000
1	Penyusunan Himpunan Produk Hukum Daerah	Tersedianya Himpunan Produk Hukum Daerah			10,000,000			11,000,000
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)	Terlaksananya Penyelenggaraan SJDIH			44,000,000			48,400,000
6	Program Peningkatan Aktivitas Penyediaan Produk Hukum	Persentase Peningkatan Jumlah Produk Hukum			560,000,000			616,000,000
1	Penyusunan Ranperda	Jumlah RANPERDA Kabupaten Kepulauan Selayar yang disusun			100,000,000			110,000,000
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksana Perda	Terselenggaranya Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Perda			50,000,000			55,000,000
3	Sosialisasi Perda	Terselenggaranya Sosialisasi Perda			100,000,000			110,000,000
4	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Evaluasi Produk Hukum Daerah			40,000,000			44,000,000
5	Penyusunan Himpunan Produk Hukum Desa	Tersedianya Himpunan Produk Hukum Desa						-

6	Asistensi Evaluasi Produk Hukum Desa	Terlaksananya Asistensi/Evaluasi Produk Hukum Desa			10,000,000			11,000,000
7	Workshop Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Workshop Penyusunan Produk Hukum Desa			30,000,000			33,000,000
8	Asistensi/Harmonisasi Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati	Terlaksananya Harmonisasi SK dan Perbup						-
9	Pelaksanaan RANHAM	Terlaksananya RANHAM			40,000,000			44,000,000
10	Penyelenggaraan KADARKUM	Terlaksananya KADARKUM			40,000,000			44,000,000
11	Sosialisasi/Pelaopran DBH Pajak Rokok				150,000,000			165,000,000
7	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat			130,000,000			143,000,000
	Penanganan Sengketa Litigasi dan non Litigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Terlaksananya Penanganan Sengketa Litigasi dan Non Litigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar			130,000,000			143,000,000
	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Terlaksananya Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin						
20	4. BAGIAN EKONOMI SETDA				1,115,228,089			1,226,750,898
1	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Indikator Kinerja Sasaran : Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD) 2. Indikator Kinerja Program : Cakupan kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi			26,375,000			29,012,500
1	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Output : Operasional pelaksanaan kegiatan penunjang administrasi perkantoran	12 Bulan		26,375,000		12 Bulan	29,012,500
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Indikator Kinerja Sasaran : Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD) 2. Indikator Kinerja Program : Cakupan kebutuhan Sarana/Prasarana aparatur yang terpenuhi			80,896,639			88,986,303
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara (Layak Pakai)	12 Bulan		30,896,639		12 Bulan	33,986,303
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat/Dua	Output: Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	12 Bulan		20,000,000		12 Bulan	22,000,000
3	Pengadaan Peralatan Kantor	Output: Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	12 Bulan		20,000,000		12 Bulan	22,000,000
4	Pengadaan Mebeleur Kantor	Output : Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	12 Bulan				12 Bulan	-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output : Jumlah dan Jenis alat - alat kantor yang dipelihara	12 Bulan		10,000,000		12 Bulan	11,000,000
3	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Indikator Kinerja Sasaran : Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD) 2. Outcome :Jumlah Aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional			30,000,000			33,000,000
1	Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Ekonomi	Output: Jumlah Aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional Bidang Ekonomi	20 org		30,000,000		20 org	33,000,000
4	Program : Koordinasi dan Fasilitasi Program Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	IKS : - % Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin - Income per kapita penduduk (Juta) dan Indeks Daya Beli IKP :Jumlah Kebijakan dan Program Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat yang dikoordinasikan dan difasilitasi			141,000,000			155,100,000
1	Kordinasi dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	1 lap		20,000,000		1 lap	22,000,000
2	Koordinasi dan Monev Program Gratis	Output: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Gratis Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan	1 lap		30,000,000		1 lap	33,000,000

3	Koordinasi dan Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Output : Jumlah Kebijakan Teknis Daerah terkait Harga Kebutuhan Pokok yang dikoordinasikan - Jumlah Dokumen/Data Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok	1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
4	Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Output : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	1 lap	71,000,000		1 lap	78,100,000
5	Koordinasi Peningkatan Lapangan Kerja	Output : Jumlah Dokumen/Rumusan Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan yang dikoordinasikan	1 lap			1 lap	
5	Program : Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Indikator Kinerja Program : Jumlah Kebijakan dan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dikoordinasikan dan difasilitasi		75,000,000			82,500,000
1	Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Pembangunan KEK Pariwisata	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan KEK Pariwisata	1 lap	20,000,000		1 lap	22,000,000
2	Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Pembangunan Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang	1 lap	30,000,000			33,000,000
3	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Distribusi Logistik	Output: Jumlah Dokumen/Rumusan Kebijakan Pembangunan Kawasan Ditrubusi Logistik yang dikoordinasikan dan difasilitasi	1 lap	25,000,000			27,500,000
6	Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. IKS : Nilai PMDN (dalam Milyar Rupiah) Nilai PMA (\$) 2. Indikator Kinerja Program : Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga dan Luar Negeri yang tersusun		210,000,000			231,000,000
1	Peningkatan Promosi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Output : Jumlah Event Promosi Potensi Investasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Yang Diikuti	1 lap	80,000,000		1 lap	88,000,000
2	Koordinasi Peningkatan Kerjasama Pihak Ketiga	Output : - Jumlah Dokumen/Rumusan Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah yang Dikoordinasikan	1 lap	30,000,000		1 lap	33,000,000
3	Koordinasi Peningkatan Pengelolaan BUMD	Output : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kinerja BUMD	1 lap	100,000,000		1 lap	110,000,000
7	Program : Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	1. IKS : Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan 2. Outcome : Jumlah Dokumen/Rumusan Kebijakan Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan		211,000,000			232,100,000
1	Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Sentra-sentra Produksi UKM dan PKL	Output : Jumlah Dokumen/Rumusan Kebijakan hasil Pembinaan dan Pengembangan Sentra-sentra Produksi UKM dan PKL yang dikoordinasikan	1 lap	51,000,000		1 lap	56,100,000
2	Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	1 lap	15,000,000		1 lap	16,500,000
3	Koordinasi, Sosialisasi, Evaluasi dan Penagihan Tunggalan Kredit Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	Output : Jumlah dokumen dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pembayaran tunggakan kredit pemberdayaan ekonomi rakyat tahun 2000-2002	1 lap	145,000,000		1 lap	159,500,000
8	Program : Kajian Pengembangan Potensi Daerah	Indikator Kinerja Program : Jumlah Dokumen Kajian/Studi Pengembangan Potensi Daerah		75,000,000			82,500,000
1	Kajian Pengembangan Potensi Peternakan	Output : Dokumen Kajian / Studi Pengembangan Potensi Peternakan	1 lap	75,000,000			82,500,000
9	Program : Pengkoordinasian Kebijakan dan Program Bidang Ekonomi	1. IKS : Jumlah Kebijakan dan Program Perekonomian Daerah yang dikoordinasikan dan difasilitasi 2. Outcome : Jumlah Dokumen/Rumusan Kebijakan Bidang Ekonomi yang dikoordinasikan dan difasilitasi		177,810,000			195,591,000

1	Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	IKS : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Output : Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha bagi Masyarakat	1 lap	30,000,000		1 lap	33,000,000
2	Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	IKS : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Output : Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Percepatan Akses Keuangan Daerah	1 lap	69,860,000		1 lap	76,846,000
3	Koordinasi dan Movev Distribusi BBM dan Gas Elpiji	Output : - Jumlah Kebijakan Teknis Daerah terkait Energi dan Sumber Daya Mineral yang dikoordinasikan dan difasilitasi - Jumlah dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi	1 lap	56,000,000		1 lap	61,600,000
4	Koordinasi Updating Data Lingkup Ekonomi	Output : Jumlah Dukumen/Data lingkup Ekonomi yang dikoordinasikan	1 lap	21,950,000		1 lap	24,145,000
10	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBH-CHT)	Outcome : Berkurangnya Tembakau yang di Iekati Cukai Ilegal		44,073,225			48,480,548
1	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Cukai Palsu	Jumlah Dokumen/Informasi hasil Tembakau yang dilekati Cukai Palsu	2 Pasar	44,073,225		2 Pasar	48,480,548
11	Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBH-CHT)			44,073,225			48,480,548
1	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai		165 Peserta	44,073,225		165 Peserta	48,480,548
21	BAGIAN PEMBANGUNAN			586,908,620			645,599,482
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	25,000,000		100%	27,500,000
1	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Operasional pelaksanaan kegiatan penunjang administrasi perkantoran	100%	25,000,000		100%	27,500,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kebutuhan sarana/prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	50,000,000		100%	55,000,000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibiayai	100%	35,000,000		100%	38,500,000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dibiayai	100%	5,000,000		100%	5,500,000
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan (Printer)	2 Buah	10,000,000		2 Buah	11,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan sumber daya aparatur bidang pembangunan yang meningkat kapasitasnya		95,000,000			104,500,000
1	Pendidikan, Pelatihan Formal dan Informal, Bimtek dan Sosialisasi	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan ASN yang mengikuti Bimtek	7 orang	95,000,000		7 orang	104,500,000
2	Study Banding	Jumlah daerah tujuan study banding					
4	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Bidang Pembangunan	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan penyelenggaraan administrasi yang dikendalikan bidang pembangunan		416,908,620			458,599,482
1	Pembinaan administrasi kegiatan pembangunan	Operasional pembinaan administrasi kegiatan pembangunan	100%	10,000,000		100%	11,000,000
2	Penyusunan Dokumen rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan	Jumlah dokumen rekapitulasi RFK yang disusun	4 Lap/dok	10,000,000		4 Lap/dok	11,000,000
3	Konsultasi dan Rapat Koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan	Jumlah konsultasi dan rapat koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan	1 Tahun	159,093,120		1 Tahun	175,002,432
4	Monitoring dan evaluasi proyek/kegiatan pembangunan	Jumlah kegiatan/proyek pembangunan yang dimonev	5 Lap/dok	110,000,000		5 Lap/dok	121,000,000
5	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan APBD	1 Lap/dok	7,300,500		1 Lap/dok	8,030,550
6	Lokakarya Mini (Lokmin) Evaluasi Pembangunan	Jumlah Lokakarya Mini yang dilaksanakan	11 Kecamatan	90,515,000		11 Kecamatan	99,566,500
7	Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah sosialisasi pedoman pelaksanaan kontrak kegiatan APBD		-			-
8	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan DAK	Jumlah rapat koordinasi dan jumlah kegiatan DAK yang dikendalikan	12 Lap/dok	20,000,000		12 Lap/dok	22,000,000
9	Pembinaan dan koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan realisasi Anggaran (TEPRA)	Jumlah pengawasan dan realisasi anggaran	4 Lap/dok	10,000,000		4 Lap/dok	11,000,000

22	BAGIAN KESRA SETDA				1,988,400,000			2,187,240,000
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP BERAGAMA				1,300,500,000			1,430,550,000
1	Pelaksanaan Safari Ramadhan di Kecamatan Daratan	Terlaksananya safari ramadhan di kecamatan daratan	30 Mesjid		20,000,000		30 Mesjid	22,000,000
2	Pelaksanaan Safari Ramadhan di Kecamatan Kepulauan	Terlaksananya safari ramadhan di kecamatan kepulauan						-
3	Peringatan Hari-hari Besar Islam	Terlaksananya peringatan hari-hari besar Islam (Nuzul Qur'an, Isra' Mi'raj, dan Tahun baru Islam)	3 Kegiatan		95,000,000		3 Kegiatan	104,500,000
4	Pelaksanaan Zikir dan Doa Akhir Tahun	Terlaksananya Zikir dan Doa Akhir Tahun	700 Orang		-		700 Orang	-
5	Pembinaan Rohani	Terlaksananya pembinaan rohani	250 Orang		-		250 Orang	-
6	Pembinaan Kader Penyelenggaraan Jenazah	Terlaksananya pembinaan kader penyelenggaraan jenazah dikecamatan kepulauan			-			-
7	Pengelolaan Pendidikan Al-Quran (Insentif Guru BTQ)	Tersedianya insentif Guru BTQ	100 Orang (12 bulan)		901,000,000		100 Orang (12 bulan)	991,100,000
8	Ujian pendidikan Al Qur'an (Munaqasyah)	Terlaksananya ujian pendidikan Al Quran (Munaqasyah)	2000 siswa		22,500,000		2000 siswa	24,750,000
9	Pembuatan Ijazah Pendidikan Al Qur'an	Tersedianya Ijazah Pendidikan Al Quran	2000 ijazah		5,000,000		2000 ijazah	5,500,000
10	Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi	Keikutsertaan pada MTQ Tingkat Provinsi	1 Kegiatan		185,000,000		1 Kegiatan	203,500,000
11	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten	Terwujudnya juara MTQ Tingkat Kabupaten	1 Kegiatan		44,400,000		1 Kegiatan	48,840,000
12	Pengelolaan dan Evaluasi kepada Pendidik Tilawatil Quran, Kaligrafi, Hafidz, Kitab Kuning dan Imam Masjid Agung	Terwujudnya pengelolaan dan evaluasi kepada pendidik tilawatil quran, kaligrafi, hafidz, kitab kuning dan imam mesjid agung			27,600,000			30,360,000
13	Gerakan Sadar Zakat	terwujudnya gerakan sadar zakat						-
14	Peningkatan Pengelolaan BAZNAS Kabupaten	terwujudnya peningkatan pengelolaan BAZNAS	5 Orang (2 Bln)		-		5 Orang (2 Bln)	-
2	PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG ADMINISTRASI PERKANTORAN.	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran.			94,500,000			103,950,000
	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	12 Bulan		94,500,000		12 Bulan	103,950,000
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pada Bagian Kesra Setda			68,000,000			74,800,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua dan empat	7 Unit		65,000,000		7 Unit	71,500,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	22 Unit		3,000,000		22 Unit	3,300,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kedaraan dinas/operasional						
4	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA				324,400,000			356,840,000
	Pelaksanaan Verifikasi Proposal Rumah-rumah ibadah	Terlaksananya Verifikasi Proposal rumah-rumah ibadah	60 Proposal		10,000,000		60 Proposal	11,000,000
	Pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji	Terlaksananya pemberangkatan jamaah haji	120 orang		157,200,000		120 orang	172,920,000
	Pelaksanaan pemulangan jamaah haji	Terlaksananya Pemulangan Jamaah haji	120 orang		157,200,000		120 orang	172,920,000
	Penyediaan Al Quran, Al Quran per Juz, Tafsir, Iqra', dan buku Tuntunan Shalat	Tersedianya Al Quran, Al Quran per Juz, Tafsir, Iqra', dan buku Tuntunan Shalat						
5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.				201,000,000			221,100,000
	Pemberian Santunan kepada Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan RI dan Onderstan	Terwujudnya kesejahteraan bagi Anggota Veteran dan Onderstan	14 orang		126,000,000		14 orang	138,600,000
	Peringatan Har-hari besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari-hari besar Nasional	1900 orang (peringatan HUT RI ke-74)		75,000,000		1900 orang (peringatan HUT RI ke-74)	82,500,000
	Pembinaan UKS Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar	Terlaksananya Pembinaan UKS Tingkat Kab. Kepulauan Selayar						
	Pelaksanaan Hari AIDS Sedunia	Terlaksananya Peringatan Hari AIDS Sedunia						
	Pelaksanaan Penyuluhan tentang HIV/AIDS	Terlaksananya Penyuluhan tentang HIV/AIDS						
	Pelaksanaan Hari Anti Narkoba	Terlaksananya peringatan Hari Anti Narkoba						

23	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SETDA.				595,918,332			655,510,165
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			368,318,332			405,150,165
1	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Operasional pelaksanaan kegiatan penunjang adminitrasi perkantoran			54,840,000			60,324,000
2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Tercapainya Koordinasi dalam dan luar daerah			312,000,000			343,200,000
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-			-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan				1,478,332			1,626,165
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kerja			163,600,000			179,960,000
1	Pengelolaan/Pengoperasian Jaringan Internet LPSE	Terlaksananya pengumuman lelang dan proses pengadaan secara elektronik			159,600,000			175,560,000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor							-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				4,000,000			4,400,000
3	Program peningkatan sumber daya aparatur				64,000,000			70,400,000
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat / Pelatihan			64,000,000			70,400,000
24	BAGIAN KEUANGAN SETDA				197,181,429			216,899,572
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran			62,000,000			68,200,000
1	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	Kab. Kep. Selayar	1 Tahun	62,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Bulan, 1 Paket	68,200,000
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			85,181,429			93,699,572
1	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional			-			-
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Kep. Selayar	4 Unit	40,181,429	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Bulan, 1 Paket	44,199,572
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	3 Unit	20,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Bulan, 1 Paket	22,000,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	11 Unit	15,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Bulan, 1 Paket	16,500,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Kep. Selayar	2 Jenis	10,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Bulan, 1 Paket	11,000,000
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah				50,000,000			55,000,000
1	Koordinasi pengelolaan, pelaporan, dan verifikasi	terkoordinasinya pengelolaan, pelaporan dan verifikasi	Dalam dan Luar Daerah	6 Dokumen	50,000,000	Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan, 1 Paket	55,000,000
25	9. BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA				376,875,820			414,563,402
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				186,875,820			205,563,402
1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terwujudnya pendukung kelancaran tugas Aparatur			161,875,820			178,063,402
2	Pelaksanaan Penunjang administrasi perkantoran	Tertib Administrasi Kepegawaian Setda			10,000,000			11,000,000
3	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya penunjang Administrasi perkantoran yang berkualitas						-
4	Pengadaan Buku Kerja	Terwujudnya pendukung kelancaran tugas aparatur						-

5	Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil (OID Card)	Tertub Administrasi dalam pelaksanaan Identitas pegawai			15,000,000			16,500,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				25,000,000			27,500,000
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor						
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor						
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional			20,000,000			22,000,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor			5,000,000			5,500,000
3	Program Peningkatan Kualitas Aparatur				20,000,000			22,000,000
1	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Setda	Terwujudnya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pegawai						
2	Penyesuaian Anjab, ABK dan Evjab di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	Meningkatnya penataan kepegawaian yang berbasis kompetensi dan kinerja			20,000,000			22,000,000
4	Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah				40,000,000			44,000,000
1	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi SOP	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SOP Perangkat			10,000,000			11,000,000
2	Penilaian Adibakti Tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) berprestasi bidang pertanian kab. Kep. Selayar	Tewujudnya penilaian Adibakti Tani dalam rangka meningkatkan Pelayanan publik dibidang pertanian						-
3	Pelaksanaan Inovasi pelayanan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	Tersedianya Dokumen Kompetisi inovasi pelayanan publik diLingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.			30,000,000			33,000,000
5	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab. Kep. Selayar				30,000,000			33,000,000
1	Evaluasi Pelaksanaan Roadmap Birokrasi Pemkab Kep. Selayar	Terwujudnya Roadmap reformasi birokrasi pemerintah kabupaten kepulauan selayar			20,000,000			22,000,000
2	Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah	Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang efisien			10,000,000			11,000,000
6	Program Penataan Kelembagaan Daerah				75,000,000			82,500,000
1	Evaluasi Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah			40,000,000			44,000,000
2	Evaluasi Penyusunan SOTKi Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Penyusunan SOTK Perangkat daerah			20,000,000			22,000,000
3	Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	Terlaksananya Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah			15,000,000			16,500,000
26	10. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA				4,055,795,496			4,461,375,046
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				820,000,000			902,000,000
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat	Benteng	1 Paket	60,000,000	Benteng	1 Paket	66,000,000
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pelayanan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Benteng	1 Paket	200,000,000	Benteng	1 Paket	220,000,000
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Benteng	1 Paket	45,000,000	Benteng	1 Paket	49,500,000
4	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	Benteng	1 Paket	80,000,000	Benteng	1 Paket	88,000,000
5	Pelaksanaan HUT Proklamasi	terlaksananya HUT proklamasi	Benteng	1 Paket	110,000,000	Benteng	1 Paket	121,000,000
6	Penunjang pelaksanaan kegiatan umum perlengkapan	Terlaksananya kegiatan umum dan perlengkapan	Benteng	1 Paket	200,000,000	Benteng	1 Paket	220,000,000
7	penyediaan pelayanan administrasi barang	tersedianya pelayanan administrasi barang	Benteng	1 Paket	25,000,000	Benteng	1 Paket	27,500,000
8	Penyediaan jasa pelayanan publik	Tersedianya jasa pelayanan publik	Benteng	1 Paket	25,000,000	Benteng	1 Paket	27,500,000
9	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Terlaksananya jasa pengamanan kantor			-			-
10	Penunjang kegiatan Pemerintah Daerah	Tersedianya penunjang kegiatan Pemerintah Daerah	Benteng	1 Paket	75,000,000	Benteng	1 Paket	82,500,000
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				2,765,795,496			3,042,375,046
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional			-			-

2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	Benteng	1 Paket	113,500,000	Benteng	1 Paket	124,850,000
3	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas	Benteng	1 Paket	113,500,000	Benteng	1 Paket	124,850,000
4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Benteng	1 Paket	130,000,000	Benteng	1 Paket	143,000,000
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Benteng	1 Paket	50,000,000	Benteng	1 Paket	55,000,000
6	Pengadaan Meubiler	Tersedianya Meubiler	Benteng	1 Paket	97,000,000	Benteng	1 Paket	106,700,000
7	Pengadaan Mesin	Tersedianya pengadaan Mesin			30,000,000			33,000,000
8	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan	Benteng	1 Paket	345,000,000	Benteng	1 Paket	379,500,000
9	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Benteng	1 Paket	350,000,000	Benteng	1 Paket	385,000,000
10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan	Benteng	1 Paket	85,000,000	Benteng	1 Paket	93,500,000
11	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Benteng	1 Paket	50,000,000	Benteng	1 Paket	55,000,000
12	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Rumah Jabatan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan peralatan rumah jabatan	Benteng	1 Paket	80,000,000	Benteng	1 Paket	88,000,000
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Benteng	1 Paket	25,000,000	Benteng	1 Paket	27,500,000
14	Pelayanan Sound System	Terlaksananya pelayanan sound system	Benteng	1 Paket	85,000,000	Benteng	1 Paket	93,500,000
15	Pengadaan bahan/material kegiatan dan sewa peralatan	Tersedianya bahan/material kegiatan	Benteng	1 Paket	125,000,000	Benteng	1 Paket	137,500,000
16	Pemeliharaan rutin berkala rumah singgah pemkab Selayar di Bira	Terlaksananya pemeliharaan rumah singgah di Bira	Benteng	1 Paket	40,000,000	Benteng	1 Paket	44,000,000
17	Pemeliharaan gedung/kantor perwakilan kep. selayar di Jakarta	Terlaksananya pemeliharaan kantor perwakilan di Jakarta	Benteng	1 Paket	50,000,000	Benteng	1 Paket	55,000,000
18	Penataan taman/pemeliharaan rutin kebersihan dan peralatan kebersihan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya penataan taman dan kebersihan	Benteng	1 Paket	85,000,000	Benteng	1 Paket	93,500,000
19	Pelayanan tamu pemda	Terlaksananya pelayanan tamu PEMDA	Benteng	1 Paket	100,000,000	Benteng	1 Paket	110,000,000
20	Pemeliharaan Rutin Berkala Lapangan Pemuda Benteng	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Lapangan Pemuda Benteng	Benteng	1 Paket	38,000,000	Benteng	1 Paket	41,800,000
21	Pemeliharaan tempat parkir kantor	Terlaksananya pemeliharaan tempat parkir kantor	Benteng	1 Paket	15,000,000	Benteng	1 Paket	16,500,000
22	Penataan taman/pemeliharaan rutin kantor bupati	Terlaksananya pemeliharaan tempat parkir kantor	Benteng	1 Paket	100,000,000	Benteng	1 Paket	110,000,000
23	Penyediaan alat kebersihan	Tersedianya alat kebersihan	Benteng	1 Paket	35,000,000	Benteng	1 Paket	38,500,000
24	Pemeliharaan rutin/berkala taman pelangi	Terlaksananya pemeliharaan taman pelangi	Benteng	1 Paket	50,000,000	Benteng	1 Paket	55,000,000
25	Pemeliharaan rutin/berkala GOW	Terlaksananya pemeliharaan GOW	Benteng	1 Paket	30,000,000	Benteng	1 Paket	33,000,000
26	Pemeliharaan rutin/berkala rumah adat benteng somba opu Makassar	Terlaksananya pemeliharaan rumah adat di Makassar	Benteng	1 Paket	50,000,000	Benteng	1 Paket	55,000,000
27	Pemeliharaan rutin/berkala gedung DPW/Sekretariat Kabupaten Sehat	Terlaksananya pemeliharaan Sekretariat Kab. Sehat	Benteng	1 Paket	24,295,496	Benteng	1 Paket	26,725,046
28	Pemeliharaan rumah dinas dan sarana pemerintah lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas dan lainnya	Benteng	1 Paket	100,000,000	Benteng	1 Paket	110,000,000
29	Pemeliharaan mess pemda	Terlaksananya pemeliharaan Mess PEMDA	Benteng	1 Paket	50,000,000	Benteng	1 Paket	55,000,000
30	pengadaan sound system	Tersedianya peralatan sound system	Benteng	1 pakpet	35,000,000	Benteng	1 pakpet	38,500,000
31	Pemeliharaan rutin/berkala gedung PKK	Terlaksananya pemeliharaan Gedung PKK	Benteng	1 Paket	35,000,000	Benteng	1 Paket	38,500,000
32	Pemeliharaan baruga rumah jabatan Bupati	Terlaksananya pemeliharaan baruga rujab bupati			-			-
33	Pengadaan sarana dan prasarana Mess Pemda	Tersedianya sarana dan prasarana mess PEMDA	Benteng	1 Paket	50,000,000	Benteng	1 Paket	55,000,000
34	Penyediaan sarana dan prasarana takziah	Tersedianya perlengkapan kegiatan takziah						-
35	Penunjang operasional peralatan dan mesin	Terlaksananya penunjang operasional peralatan/mesin	Benteng	1 Paket	25,000,000	Benteng	1 Paket	27,500,000
36	Penyediaan sarana rumah jabatan/dinas	Tersedianya sarana rumah jabatan/dinas	Benteng	1 Paket	174,500,000	Benteng	1 Paket	191,950,000
37	Pengadaan plakat pemerintah kabupaten kepulauan selayar	Tersedianya Plakat PEMDA			-			-
3	PROGRAM KETATALAKSANAAN DAERAH				15,000,000			16,500,000
1	Penyusunan Data ANJAB, EVJAB dan SOP	Terlaksananya penyusunan Data	Benteng	2 Dok.	15,000,000	Benteng	2 Dok.	16,500,000
4	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA				350,000,000			385,000,000
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan hari jadi selayar	Terlaksananya hari jadi selayar	Benteng	1 Paket	350,000,000	Benteng	1 Paket	385,000,000
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				105,000,000			115,500,000
1	Inventarisasi Barang setda	Terlaksananya inventarisasi barang	Benteng	1 Dok.	30,000,000	Benteng	1 Dok.	33,000,000
2	Penyusunan RKB dan RKPBU setda	tersusunnya RKB dan RKPBU setda	Benteng	1 Dok.	15,000,000	Benteng	1 Dok.	16,500,000

3	Penyusunan standar harga satuan barang	tersusunnya standar harga satuan barang	Benteng	3 Dok.	40,000,000	Benteng	3 Dok.	44,000,000
4	Penyusunan laporan capaian kinerja bagain umum dan perlengkapan	Tersusunnya laporan capaian kinerja bagain umum dan perlengkapan	Benteng	1 Dok.	10,000,000	Benteng	1 Dok.	11,000,000
5	Penyusunan Data Renstra, Renja dan Lakip Bagian Unper	Terlaksananya Penyusunan Data Renstra, Renja dan Lakip Bagian Unper	Benteng	1 Dok.	10,000,000	Benteng	1 Dok.	11,000,000
28	SEKRETARIAT DPRD				17,921,512,900			19,713,664,190
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Adminiastasi Perkantorn			3,510,187,400			3,861,206,140
1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	Benteng	12 Bln	250,000,000	Benteng	12 Bln	275,000,000
2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Berita/ ucapan selamat	Benteng	12 Bln	7,500,000	Benteng	5 Jasa	8,250,000
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan baik	Dalam dan Luar Provinsi	18 Kali	1,821,947,000	Dalam dan Luar Provinsi	15 Kali	2,004,141,700
4	Pelaksanaan penunjang admnistrasi perkantoran	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran	Benteng	12 Bln	1,273,240,400	Benteng		1,400,564,440
5	Penyediaan pendokumentasian/Publikasi dan Informasi Produk hukum dan kegiatan DPRD	Terlaksananya pendokumentasian/ Kegiatan Publikasi dan Jumpa pers	Benteng	1 tahun	157,500,000	Benteng	12 Bln	173,250,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				627,159,700			689,875,670
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Benteng	3 Unit	32,950,000	Benteng	10 Unit	36,245,000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor yang Representatif	Benteng	9 Unit	120,270,000	Benteng	9 Unit	132,297,000
3	Pengadaan Meubileur	Jumlah Meubileur	Benteng	45 Unit	70,450,000	Benteng	45 Unit	77,495,000
4	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan terawat dengan baik	Benteng	6 Unit	103,340,000	Benteng	6 Unit	113,674,000
5	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	Presentase Meningkatnya Usia Pakai Kendaraan Dinas Jabatan	Benteng	2 Unit	104,090,000	Benteng	2 Unit	114,499,000
6	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang terawat dan terpelihara dengan baik	Benteng	12 Unit	90,359,700	Benteng	15 Unit	99,395,670
7	Pemeliharaan rutin/Perlengkapan berkala Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terawat dan terpelihara dengan baik	Benteng	41 Unit	15,000,000	Benteng	40 Unit	16,500,000
8	Pemeliharaan rutin/Peralatan berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Usia Pakai Peralatan Kantor	Benteng	35 Unit	15,000,000	Benteng	31 Unit	16,500,000
9	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor							-
10	Pembangunan ruang tunggu dan pemasangan paving blok							-
11	Pengelolaan/Pemeliharaan Website Sekretariat DPRD	Terlaksananya pengelolaan/ pemeliharaan website DPRD	Benteng	12 Bln	35,550,000	Benteng	1 Tahun	39,105,000
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Persentase Kelancaran Tugas tugas sekretariat dalam melakukan pelayanan	Benteng	1 unit	40,150,000	Benteng		44,165,000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				874,340,000			961,774,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terlaksanya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Benteng	90 Stel	276,160,000	Benteng	100 Pasang	303,776,000
2	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian adat bagi Anggota DPRD	Benteng	25 Pasang	94,030,000	Benteng	25 Pasang	103,433,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD	Terlaksananya Medical Check-Up Anggota DPRD	Benteng	25 Orang	504,150,000	Benteng	25 Orang	554,565,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				250,000,000			275,000,000
1	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sekretariat DPRD	Dalam dan Luar Provinsi	18 Orang	250,000,000	Dalam dan Luar Provinsi	18 Orang	275,000,000
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan				434,764,700			478,241,170
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD	Benteng	6 Dokumen	31,825,000	Benteng	12 Dokumen	35,007,500
2	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Benteng	1 Dokumen	16,895,000	Benteng	1 Dokumen	18,584,500
3	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Laporan Lakip	Benteng	1 Dokumen	4,912,700	Benteng	1 Dokumen	5,403,970
4	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan keuangan SKPD	Benteng	12 Bulan	149,890,000	Benteng	12 Bulan	164,879,000
5	Penanganan Tindak Lanjut Laporan Pemeriksaan (TLHP) Aparat Fungsional	Terlaksananya penanganan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan	Benteng	1 Tahun	47,307,500	Benteng	12 Bulan	52,038,250

6	Penyusunan Perencanaan dan Anggaran	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran	Benteng	6 Dokumen	83,934,500	Benteng	6 Dokumen	92,327,950
7	Bimtek perencanaan & pengelolaan keuangan	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Benteng	10 Orang	100,000,000	Benteng	10 Orang	110,000,000
8	Penyusunan Renja							
6	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				12,225,061,100			13,447,567,210
1	Pembahasan rancangan perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Dalam dan Luar Provinsi	12 Ranperda	2,166,289,600	Dalam dan Luar Provinsi	12 Perda	2,382,918,560
2	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya Rapat-rapat Kelengkapan Dewan	Benteng	120 Kali	86,775,000	Benteng	120 Kali	95,452,500
3	Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna	Benteng	15 Kali	71,000,000	Benteng	15 Kali	78,100,000
4	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Dalam dan Luar Provinsi	120 kali	4,139,550,000	Dalam dan Luar Provinsi	90 org/ kali	4,553,505,000
5	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya diklat, bimtek, workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD	Dalam dan Luar Provinsi	5 kali	2,504,896,250	Dalam dan Luar Provinsi	5 kali	2,755,385,875
6	Penyediaan Tenaga Ahli	Tersedianya tenaga ahli yang mendampingi pembahasan perda	Makassar	6 Orang	166,700,000	Makassar	12 Orang	183,370,000
7	Kegiatan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	Wil. Daratan dan Kepulauan	3 Kali	1,590,884,000	Wil. Daratan dan Kepulauan	3 Kali	1,749,972,400
8	Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terlaksananya Kegiatan Hearing/dengar pendapat dengan pemerintah daerah atau tokoh masyarakat	Benteng	6 Kali	52,216,250	Benteng	10 Kali	57,437,875
9	Sosialisasi Nilai-nilai Pancasila dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Sosialisasi	Benteng		1,446,750,000			1,591,425,000
	15. KECAMATAN BENTENG				700,533,521			770,586,873
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Benteng	100%	384,533,521	Kec. Benteng	100%	422,986,873
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Benteng	100%	25,000,000	Kec. Benteng	100%	27,500,000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Surat Kabar dan Buku Perundang-Undangan, dll)	Kec. Benteng	100%	8,000,000	Kec. Benteng	100%	8,800,000
3	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar daerah	Kec. Benteng	100%	107,000,000	Kec. Benteng	100%	117,700,000
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Benteng	100%	244,533,521	Kec. Benteng	100%	268,986,873
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Benteng	100%	138,000,000	Kec. Benteng	100%	151,800,000
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai						
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai						
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat Benteng			-			-
4	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor sesuai kebutuhan	Kec. Benteng	100%	100,000,000	Kec. Benteng	100%	110,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional sesuai kebutuhan	Kec. Benteng	100%	35,000,000	Kec. Benteng	100%	38,500,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	Kec. Benteng	100%	3,000,000	Kec. Benteng	100%	3,300,000
7	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Bertambahnya Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional			-			-
8	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Camat Benteng	Pagar Rumah Dinas Kantor Camat Benteng			-			-
9	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor sesuai kebutuhan						
10	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Terpenuhinya Kebutuhan Mesin/Kartu Absensi			-			-
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin				-			-
12	Pelaksanaan Dana Kelurahan				-			-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	Kec. Benteng	100%	15,000,000	Kec. Benteng	100%	16,500,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Kec. Benteng	100%	15,000,000	Kec. Benteng	100%	16,500,000
2	Pengiriman Peserta Diklat Teknis Fungsional dan Bimtek Khusus	Terselenggaranya Pengiriman Peserta Diklat Teknis Fungsional dan Bimtek Khusus			-			-

4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen pelaporan	Kec. Benteng	100%	17,000,000	Kec. Benteng	100%	18,700,000
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun			-			-
2	Penyusunan dan Evaluasi SOP Kecamatan	Terwujudnya Laporan Standar Operasional Prosedur			-			-
3	Penyusunan Profil Kecamatan	Terwujudnya Laporan Profil Kecamatan			-			-
4	Penyusunan LAKIP	Terwujudnya Penyusunan LAKIP	Kec. Benteng		-	Kec. Benteng		-
5	Penyusunan RKA/DPA/DPPA	Tersedianya RKA/ DPA/ DPPA	Kec. Benteng	100%	5,000,000	Kec. Benteng	100%	5,500,000
6	Peningkatan Pengelolaan Barang	Laporan Pengelolaan Barang	Kec. Benteng	100%	12,000,000	Kec. Benteng	100%	13,200,000
7	Penyusunan Rencana Strategis 2016 - 2021	Terwujudnya Laporan Renstra 2016 - 2021			-			-
8	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-			-
9	Penyusunan Renja / Renstra / LAKIP	Trpenuhinya Pnyusunan Renja / Resntra/ LAKIP			-			-
10	Pelaksanaan Dana kelurahan				-			-
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase nilai budaya yang dikembangkan dan dilestarikan	Kec. Benteng	100%	25,000,000	Kec. Benteng	100%	27,500,000
1	Pelaksanaan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar	Terlaksananya Pelaksanaan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar			-			-
2	Pelaksanaan HUT Proklamasi RI	Terselenggaranya HUT Proklamasi RI	Kec. Benteng	100%	10,000,000	Kec. Benteng	100%	11,000,000
3	Pelaksanaan Hari Jadi Selayar	Terselenggaranya Hari Jadi Selayar	Kec. Benteng	100%	15,000,000	Kec. Benteng	100%	16,500,000
4	Pelaksanaan Takabonerate Island Expedition	Terlaksananya Takabonerate Island Expedition			-			-
5	Penyediaan Dukungan HUT Proklamasi/KORPRI /TIE dan Hari Jadi Selayar				-			-
7	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan			-			-
8	Pelaksanaan MTQ	Terlaksananya Pelaksanaan MTQ			-			-
9	Seleksi Tilawatil Qur-an	Terlaksananya Seleksi Tilawatil Qur-an			-			-
10	Festival Kuliner	Terlaksananya Festival Kuliner			-			-
11	Pembinaan Organisasi Kec.				-			-
21	Program Perencanaan, Pelaporan, Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja keuangan			-			-
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun			-			-
2	Penyusunan SOP	Terpenuhinya penyusunan SOP Kecamatan Benteng tepat waktu			-			-
3	Penyusunan RKA/DPA/DPPA	Terpenuhinya penyusunan RKA / DPA/ tepat waktu			-			-
4	Peningkatan Pengelolaan Barang	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang			-			-
5	Penyusunan Renja / Renstra / LAKIP	Renja / Renstra / LAKIP tersedia			-			-
6	Penyusunan Laporan Asset	Tersedianya Laporan Asset tepat waktu			-			-
6	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Pemerintahan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Benteng	100%	6,000,000	Kec. Benteng	100%	6,600,000
1	Penyusunan Profil Kecamatan / Kelurahan	Terwujudnya Laporan Profil Kecamatan / Kelurahan	Kec. Benteng	100%	3,000,000	Kec. Benteng	100%	3,300,000
2	Penunjang Pelaksanaan Registrasi Kependudukan	Terselenggaranya registrasi kependudukan			-			-
3	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Teridentifikasi jumlah penduduk se Kecamatan Benteng, jumlah mutasi kelahiran dan kematian, jumlah mutasi pindah datang penduduk, dll	Kec. Benteng	100%	3,000,000	Kec. Benteng	100%	3,300,000
4	Pelaksanaan Kegiatan ALAMAK	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan ALAMAK			-			-
7	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kec. Benteng	100%	10,000,000	Kec. Benteng	100%	11,000,000
1	Musrembang Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Musrembang Kecamatan	Kec. Benteng	100%	10,000,000	Kec. Benteng	100%	11,000,000
2	Musrembang Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Musrembang Tingkat Kelurahan			-			-
3	Intensifikasi PBB	Terselenggaranya Intensifikasi PBB			-			-
4	Pendataan Obyek Pajak Baru	Terselenggaranya Pendataan Obyek Pajak Baru			-			-
8	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi, Fasilitasi & Penyelenggaraan Layanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditingkatkan	Kec. Benteng	100%	10,000,000	Kec. Benteng	100%	11,000,000

1	Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kota Mendukung ADIPURA	Terciptanya kebersihan dan keindahan Kota mendukung ADIPURA			-			-
2	Eliminasi / Peracunan Anjing Liar	Berkurangnya Anjing Liar di Kec. Benteng	Kec. Benteng	100%	10,000,000	Kec. Benteng	100%	11,000,000
	Pengawan dan Penertiban Rumah Kos	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Bagi Masyarakat			-			-
3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Pembinaan dan Ketentraman Masyarakat			-			-
4	Tripikel	Jumlah laporan khusus pidana dan perdata setiap tahunnya			-			-
9	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase Koordinasi, Fasilitas & Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial	Kec. Benteng	100%	65,000,000	Kec. Benteng	100%	71,500,000
1	Festival Kuliner	Terlaksananya Festival Kuliner Kecamatan Benteng			-			-
2	Pelaksanaan STQ/MTQ	Terlaksananya STQ / MTQ tingkat Kecamatan	Kec. Benteng	100%	65,000,000	Kec. Benteng	100%	71,500,000
3	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya Hari Besar Keagamaan			-			-
4	Monitoring Pelaksanaan Penyaluran RASTRA Desa Kelurahan	100% Rastra tersalur			-			-
5	Penyaluran Rastra	Terselenggaranya Penyaluran Ranstra			-			-
6	Koordinasi Pembinaan Organisasi Pemuda dan Kemasyarakatan	100% lomba olahraga Pemuda diikuti			-			-
10	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang ditingkatkan	Kec. Benteng	100%	30,000,000	Kec. Benteng	100%	33,000,000
1	Koordinasi dan Penanggulangan Gizi Buruk	persentase gizi buruk yang tertanggulangi			-			-
2	Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat	Jumlah Lingkungan masuk kategori lingkungan sehat	Kec. Benteng	100%	10,000,000	Kec. Benteng	100%	11,000,000
3	Pelaksanaan Lomba Desa/ Kelurahan	Pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan			-			-
4	Penunjang Pelaksanaan program (PAP)Mandiri Perkotaan	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan program (PAP)Mandiri Perkotaan			-			-
5	Pelaksanaan Kelurahan Sehat	Terselenggaranya Operasional Kelurahan Sehat			-			-
6	Penunjang Pelaksanaan KPMK	Peran aktif kader KPMK dalam pengelolaan pembangunan di Tingkat Kelurahan			-			-
7	Penunjang Pelaksanaan LPM	Tersedianya Biaya Operasional LPM			-			-
8	Pembinaan Organisasi Wanita / PKK	Terlaksananya pembinaan Organisasi Wanita / PKK	Kec. Benteng	100%	20,000,000	Kec. Benteng	100%	22,000,000
9	Penunjang Pelaksanaan PKK				-			-
10	Pelaksanaan Dana kelurahan				-			-
11	Penunjang Pelaksanaan Karang Taruna				-			-
12	Penunjang Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)				-			-
13	Pengelolaan Bank Sampah Kelurahan	Tersedianya Pengelolaan Bank Sampah			-			-
14	Peningkatan SDM Masyarakat terhadap pariwisata	Terwujudnya partisipasi masyarakat dlm membangun kelurahan serta adanya pengetahuan msykat trhadap pariwisata			-			-
	16. KELURAHAN BENTENG				1,817,924,956			1,999,717,452
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			126,517,306			139,169,037
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Benteng	12 Bulan	17,800,000	Kel. Benteng	12 Bulan	19,580,000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Surat Kabar dan Buku Perundang-Undangan, dll)			-			-
3	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar daerah	Kel. Benteng	1 Paket	15,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	16,500,000
4	Penyediaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kel. Benteng	1 Paket	93,717,306	Kel. Benteng	1 Paket	103,089,037
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas kerja aparatur yang mendukung kinerja			38,000,000			41,800,000
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	Kel. Benteng	1 Unit	7,000,000	Kel. Benteng	1 Unit	7,700,000
2	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Roda 2				-			-
3	Pengadaan Kendaraan Sampah				-			-
4	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor sesuai kebutuhan			29,000,000			31,900,000

5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Kel. Benteng	1 Paket	2,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	2,200,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan			-			-
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup				205,000,000			225,500,000
2	Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah	Terlaksananya Sosialisasi	Kel. Benteng	1 Paket	25,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	27,500,000
3	Pembuatan Kebun Percontohan	Terciptanya Keindahan Lingkungan			-			-
4	Pelatihan Pencegahan Stunting	Terlaksananya Pelatihan	Kel. Benteng	1 Paket	30,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	33,000,000
5	Pembangunan Drainase	Jumlah drainase yang dibangun	Kel. Benteng	1 Paket	150,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	165,000,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan				427,200,000			469,920,000
1	Penunjang Pelaksanaan kelurahan	Tersedianya Honorarium Kepala Lingkungan, RT/RW	Kel. Benteng	61 Org	192,000,000	Kel. Benteng	61 Org	211,200,000
2	Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan	Tersedianya Honorarium Imam Lingkungan, Imam Masjid, Guru Mengaji dan Pemandi Mayat	Kel. Benteng	96 Org	205,200,000	Kel. Benteng	96 Org	225,720,000
3	Sosialisasi Tupoksi Perangkat Kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi	Kel. Benteng	1 Paket	30,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	33,000,000
5	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum				59,600,000			65,560,000
1	Tripikel	Tersedianya Honorarium Tripikel	Kel. Benteng	2 Org	9,600,000	Kel. Benteng	2 Org	10,560,000
2	Sosialisasi dan Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Keamanan Lingkungan	Kel. Benteng	1 Paket	25,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	27,500,000
3	Pelatihan Kepemimpinan Kepemudaan	Terlaksananya Pelatihan Kepemudaan	Kel. Benteng			Kel. Benteng		-
4	Sosialisasi Pemberdayaan organisasi Karang Taruna	Terlaksananya Sosialisasi	Kel. Benteng	1 Paket	25,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	27,500,000
6	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				1,500,000			1,650,000
1	Musrembang Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan	Kel. Benteng	1 Kali	1,500,000	Kel. Benteng	1 Kali	1,650,000
2	Intensifikasi PBB	Terlaksananya Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan			-			-
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			425,000,000			467,500,000
1	Pembinaan Gizi Buruk	Terlak. Pelaksanaan Penanggulangan gizi buruk	Kel. Benteng	1 Paket	35,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	38,500,000
2	Penunjang Pelaksanaan PKK	Untuk Meningkatkan Kegiatan Pengurus PKK	Kel. Benteng	1 Paket	10,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	11,000,000
4	Pelatihan Pembuatan VCO	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan VCO	Kel. Benteng	1 Paket	50,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	55,000,000
5	Pelatihan Kader BKB	Terciptanya Kader BKB berkualitas	Kel. Benteng	1 Paket	30,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	33,000,000
6	Penunjang Kader Posyandu	Terlak. Pelaksanaan Penanggulangan gizi buruk	Kel. Benteng			Kel. Benteng		-
7	Pengadaan Tong Sampah	Tersedianya Tong Sampah	Kel. Benteng	7 lingk.	90,000,000	Kel. Benteng	7 lingk.	99,000,000
8	Sosialisasi pelayanan hidup bersih							-
	Pelatihan Hidroponik	Terlaksananya Pelatihan Hidroponik	Kel. Benteng	7 lingk.	20,000,000	Kel. Benteng	7 lingk.	22,000,000
9	Pengadaan AP Edukatif	Jumlah AP Edukatif	Kel. Benteng	6 TPA	70,000,000	Kel. Benteng	6 TPA	77,000,000
10	Pengadaan Peralatan VCO	Jumlah Peralatan VCO yang diadakan	Kel. Benteng	1 Paket	70,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	77,000,000
11	Pengadaan Baju Pelatihan		Kel. Benteng	1 Paket	50,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	55,000,000
8	Program Pengembangan Nilai Budaya				104,500,000			114,950,000
1	Festival Hari Jadi Kepulauan Selayar	Terlaksananya kegiatan festival	Kel. Benteng	1 Paket	50,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	55,000,000
2	Festival Komunitas Pasisir	Meningkatnya partisipasi dan kreasi komunitas	Kel. Benteng	1 Paket	54,500,000	Kel. Benteng	1 Paket	59,950,000
9	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial				241,107,650			265,218,415
1	Pembinaan MTQ Tingkat Kelurahan	Terlaksananya MTQ	Kel. Benteng	1 Paket	50,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	55,000,000

2	Pembangunan Jamban Keluarga	Terciptanya Kebersihan Lingkungan	Kel. Benteng	1 Tahun	111,107,650	Kel. Benteng	1 Tahun	122,218,415
3	Pembinaan remaja mesjid	Terciptanya Generasi Islami	Kel. Benteng			Kel. Benteng		-
4	Pelatihan Ketrampilan jahit menjahit tingkat lanjutan	Terlaksananya Pelatihan	Kel. Benteng	1 Paket	30,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	33,000,000
5	Penunjang Pelaksanaan Kelurahan Sehat	Terlaksananya Lomba Kelurahan	Kel. Benteng	1 Paket	50,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	55,000,000
10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				189,500,000			208,450,000
1	Pembangunan Bank Sampah	Tersedianya Bangunan Bank Sampah	Kel. Benteng	1 Unit	50,000,000	Kel. Benteng	1 Unit	55,000,000
2	Pengadaan Lampu PJU	Tersedianya Lampu PJU	Kel. Benteng	1 Paket	50,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	55,000,000
	Pengadaan Peralatan Wira Usaha	Tersedianya Peralatan Wira usaha	Kel. Benteng	1 Paket	50,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	55,000,000
	Pengadaan Umbul-umbul	Tersedianya Umbul-umbul	Kel. Benteng	1 Paket	10,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	11,000,000
	Pengadaan Perangkat Hidroponik	Tersedianya Perangkat Hidroponik	Kel. Benteng	1 Paket	10,000,000	Kel. Benteng	1 Paket	11,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Tersedianya Sarana Prasarana Sanggar Seni	Kel. Benteng	1 Paket	19,500,000	Kel. Benteng	1 Paket	21,450,000
	17. KELURAHAN BENTENG SELATAN				1,752,143,043			1,927,357,347
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			92,491,493			101,740,642
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	Benteng Selatan	12 Bulan	13,000,000	Benteng Selatan	12 Bulan	14,300,000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Surat Kabar dan Buku Perundang-Undangan, dll)			-			-
3	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar daerah			-			-
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Benteng Selatan	12 Bulan	79,491,493	Benteng Selatan	12 Bulan	87,440,642
					-			-
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5,000,000			5,500,000
1	Intensifikasi PBB		Benteng Selatan	1 Laporan	5,000,000	Benteng Selatan	1 Laporan	5,500,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan				303,600,000			333,960,000
1	Penunjang Pelaksanaan kelurahan		Benteng Selatan	12 Bulan	151,200,000	Benteng Selatan	12 Bulan	166,320,000
2	Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan		Benteng Selatan	12 Bulan	152,400,000	Benteng Selatan	12 Bulan	167,640,000
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				9,600,000			10,560,000
1	Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		Benteng Selatan	1 Tahun	9,600,000	Benteng Selatan	1 Tahun	10,560,000
2	Peningkatan Kebersihan dan Keindahan kota				-			-
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				399,000,000			438,900,000
1	Pelaksanaan Kelurahan Sehat		Benteng Selatan	1 Tahun	10,000,000	Benteng Selatan	1 Tahun	11,000,000
2	Pelatihan Tenaga Sukarelawan Untuk Penanganan Bencana		Benteng Selatan	1 Paket	50,000,000	Benteng Selatan	1 Paket	55,000,000
3	Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana		Benteng Selatan	1 Kegiatan	50,000,000	Benteng Selatan	1 Kegiatan	55,000,000
4	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan		Benteng Selatan	1 Paket	49,000,000	Benteng Selatan	1 Paket	53,900,000
4	Pembangunan Pos Kamling		Benteng Selatan			Benteng Selatan		-
5	Penyediaan Peralatan Pelatihan		Benteng Selatan	15 Kegiatan	90,000,000	Benteng Selatan	15 Kegiatan	99,000,000
6	Pelatihan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan		Benteng Selatan	1 Kegiatan	50,000,000	Benteng Selatan	1 Kegiatan	55,000,000
7	Pengadaan Pakaian Pelatihan		Benteng Selatan			Benteng Selatan		-
8	Pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Benteng Selatan	1 Kegiatan	50,000,000	Benteng Selatan	1 Kegiatan	55,000,000
9	Pembangunan Jalan Setapak Balang Hibung		Benteng Selatan	1 Paket	50,000,000	Benteng Selatan	1 Paket	55,000,000

6	Program Perbaikan Gizi masyarakat				74,000,000			81,400,000
1	Koordinasi dan Penanggulangan Gizi Buruk		Benteng Selatan	1 Tahun	74,000,000	Benteng Selatan	1 Tahun	81,400,000
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				868,451,550			955,296,705
1	Penunjang Pelaksanaan LPM		Benteng Selatan	1 Kegiatan	2,700,000	Benteng Selatan	1 Kegiatan	2,970,000
2	Penunjang Pelaksanaan PKK		Benteng Selatan	1 Kegiatan	20,000,000	Benteng Selatan	1 Kegiatan	22,000,000
3	Festival Anak Sholeh		Benteng Selatan	1 Kegiatan	25,000,000	Benteng Selatan	1 Kegiatan	27,500,000
4	Pelatihan Guru Mengaji Lanjutan		Benteng Selatan	1 Kegiatan		Benteng Selatan	1 Kegiatan	-
5	Pelatihan Kerajinan Tangan Kreatif Berbasis Rumah Tangga (Pembuatan Tas)		Benteng Selatan	1 Kegiatan	35,000,000	Benteng Selatan	1 Kegiatan	38,500,000
6	Lomba MTQ Tingkat Kelurahan		Benteng Selatan	1 Kegiatan	30,000,000	Benteng Selatan	1 Kegiatan	33,000,000
7	Pelatihan Pendidikan Keagamaan		Benteng Selatan	1 Kegiatan	50,000,000	Benteng Selatan	1 Kegiatan	55,000,000
8	Pelatihan Pemandi Mayat		Benteng Selatan	12 Orang	30,000,000	Benteng Selatan	12 Orang	33,000,000
9	Pelatihan Seni Tari		Benteng Selatan	25 Orang	30,000,000	Benteng Selatan	25 Orang	33,000,000
10	Pelatihan Kader Posyandu		Benteng Selatan	30 Orang	35,000,000	Benteng Selatan	30 Orang	38,500,000
11	Pelatihan Alat Musik Seni Budaya		Benteng Selatan	1 Kegiatan	50,000,000	Benteng Selatan	1 Kegiatan	55,000,000
12	Pelatihan Karang Taruna		Benteng Selatan	1 Kegiatan	50,000,000	Benteng Selatan	1 Kegiatan	55,000,000
13	Pelatihan Kader PKK		Benteng Selatan	1 Kali	50,000,000	Benteng Selatan	1 Kali	55,000,000
14	Pelatihan Pengelolaan Ketentraman, Keterbiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Benteng Selatan	1 Kegiatan	50,000,000	Benteng Selatan	1 Kegiatan	55,000,000
15	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Bagi Perangkat Kelurahan		Benteng Selatan	48 Orang	50,000,000	Benteng Selatan	48 Orang	55,000,000
15	Pengadaan Kendaraan Sampah		Benteng Selatan	3 Unit	124,700,000	Benteng Selatan	3 Unit	137,170,000
16	Pengadaan Layanan Informasi tentang Bencana		Benteng Selatan	1 Paket	48,000,000	Benteng Selatan	1 Paket	52,800,000
17	Pengadaan Tenda		Benteng Selatan	1 Paket	49,000,000	Benteng Selatan	1 Paket	53,900,000
18	Pelatihan Kader BKB		Benteng Selatan	42 Orang	40,051,550	Benteng Selatan	42 Orang	44,056,705
19	Pelatihan Daur Ulang Sampah Plastik		Benteng Selatan	30 Orang	50,000,000	Benteng Selatan	30 Orang	55,000,000
20	Pengadaan Tong Sampah		Benteng Selatan	120 Unit	49,000,000	Benteng Selatan	120 Unit	53,900,000
-	18. KELURAHAN BENTENG UTARA				1,653,332,052			1,818,665,257
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			146,730,502			161,403,552
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	12,500,000		12 Bulan	13,750,000
2	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	10,900,000		12 Bulan	11,990,000
3	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Administrasi Perkantoran		12 Bulan	123,330,502		12 Bulan	135,663,552
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas kerja aparatur yang mendukung kinerja			45,250,000			49,775,000
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan		1 Unit	11,100,000		1 Unit	12,210,000
2	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan		1 unit	5,000,000		1 unit	5,500,000
3	Pengadaan Mobiler	Jumlah mobileur yang diadakan		3 Unit	7,700,000		3 Unit	8,470,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin		1 Unit	10,450,000		1 Unit	11,495,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara secara rutin		2 Unit	1,000,000		2 Unit	1,100,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin		1 Unit	3,000,000		1 Unit	3,300,000
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Dua			-			-
8	Pembangunan Website Kelurahan			1 website	7,000,000		1 website	7,700,000
9	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor				-			-
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa/kelurahan	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional (sesuai bidangnya)			225,000,000			247,500,000

1	Pendidikan dan pelatihan formal	terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Benteng Utara	-	-	Benteng Utara	-	-
2	Penunjang pelaksanaan Kelurahan	Jumlah petugas kemasyarakatan yang mendapatkan honorarium	Benteng Utara	12 Bulan	131,400,000	Benteng Utara	12 Bulan	144,540,000
3	Penunjang pelaksanaan pembinaan keagamaan	Jumlah petugas kemasyarakatan yang mendapatkan honorarium	Benteng Utara	12 Bulan	93,600,000	Benteng Utara	12 Bulan	102,960,000
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase nilai budaya yang dikembangkan dan dilestarikan			55,751,550			61,326,705
1	Pelaksanaan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar	Terlaksananya Pelaksanaan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar	Benteng Utara	1 Keg.	5,000,000	Benteng Utara	1 Keg.	5,500,000
2	Pelaksanaan Hari Jadi Selayar	Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Selayar			-			-
3	Pembinaan Sanggar seni	Tersedianya dana pendampingan sanggar seni	Benteng Utara	1 Keg.	20,000,000	Benteng Utara	1 Keg.	22,000,000
4	Karnaval budaya hari jadi selayar				-			-
5	Pagelaran Seni Budaya		Benteng Utara	1 Keg.	30,751,550	Benteng Utara	1 Keg.	33,826,705
5	Program Peningkatan Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan layanan bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan layanan bidang ekonomi dan pembangunan			5,000,000			5,500,000
1	Musrembang kelurahan	Terlaksananya kegiatan musrembang kelurahan	Benteng Utara	1 Laporan	5,000,000	Benteng Utara	1 Laporan	5,500,000
2	Intensifikasi PBB	Realisasi target PBB kelurahan Benteng Utara			-			-
6	Program Peningkatan Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan layanan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan layanan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditingkatkan			29,600,000			32,560,000
1	Tripikel	Tersedianya Honorarium	Benteng Utara	1 laporan	9,600,000	Benteng Utara	1 laporan	10,560,000
2	Koordinasi penilaian kabupaten sehat/ adipura	Terciptanya kebersihan dan keindahan kota mendukung adipura			-			-
3	Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persentase lingkungan yang meningkat ketenteraman dan ketertibannya	Benteng Utara	12 Bulan	20,000,000	Benteng Utara	12 Bulan	22,000,000
7	Program Peningkatan Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan layanan bidang kesejahteraan sosial	Persentase Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan layanan bidang kesejahteraan sosial			61,500,000			67,650,000
1	Penunjang pelaksanaan posyandu kelurahan	Tersedianya honorarium kader posyandu kelurahan			-			-
2	Penunjang pelaksanaan kelurahan sehat	Dana pendampingan kelurahan sehat	Benteng Utara	25 Kader	44,500,000	Benteng Utara	25 Kader	48,950,000
3	Bina keluarga balita gerakan sayang ibu	Terlaksananya pendampingan bagi balita			-			-
4	Pembinaan remaja masjid	Jumlah Remaja Mesjid yang Dibina	Benteng Utara	1 Kali	10,000,000	Benteng Utara	1 Kali	11,000,000
5	Penunjang pelaksanaan karang taruna mandiri kelurahan	Tersedianya dan pembinaan karang taruna mandiri	Benteng Utara	1 Keg.	7,000,000	Benteng Utara	1 Keg.	7,700,000
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Sinergitas Pemerintah dengan Kelembagaan Kelurahan			82,000,000			90,200,000
1	Pelaksanaan Kelurahan Sehat	Dana pendampingan kelurahan sehat			-			-
2	Penunjang Pelaksaan LPM	Tersedianya Biaya operasional LPM	Benteng Utara	12 Bulan	7,000,000	Benteng Utara	12 Bulan	7,700,000
3	Penunjang pelaksanaan PKK	Tersedianya Biaya operasional PKK			-			-
4	Pelatihan Perangkat Kelurahan	Jumlah Perangkat kelurahan yang dilatih			-			-
5	Sosialisasi pengelolaan persampahan	Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi	Benteng Utara	2 Hari/ 50 Peserta	20,000,000	Benteng Utara	2 Hari/ 50 Peserta	22,000,000
6	Pembinaan dan pengembangan olahraga kepemudaan di tingkat kecamatan	tersedianya dana pembinaan olahraga kepemudaan	Benteng Utara	1 Kali	30,000,000	Benteng Utara	1 Kali	33,000,000
7	Penunjang pelayanan hidup bersih dan sehat	Tersedianya layanan pengelolaan sampah	Benteng Utara	5 Lingkungan	25,000,000	Benteng Utara	5 Lingkungan	27,500,000
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasaran di Kelurahan			1,002,500,000			1,102,750,000
1	Pengadaan Prasaran Posyandu	Tersedianya Prasarana Posyandu yang Memadai	Benteng Utara	25 Unit	42,000,000	Benteng Utara	25 Unit	46,200,000
2	Pembangunan pusat kesehatan kelurahan	Tersedianya posyandu yang layak pakai	Benteng Utara	1 Paket	320,000,000	Benteng Utara	1 Paket	352,000,000
3	Penataan Halaman dan pagar TK Al-Qadri	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan TK Al-Qadri			100,000,000			110,000,000
4	Penataan Halaman dan Pagar Sekretariat Kemasyarakatan	Terbangunnya Sarana Sekretariat Kelompok Masyarakat	Benteng Utara	1 Paket	110,000,000	Benteng Utara	1 Paket	121,000,000

		100% desa memiliki fasilitas komputer sebagai alat kerja						-
3	Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Rasio mobilisasi penduduk terdata		1 kali	5,000,000		1 kali	5,500,000
4	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PEMILU	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU mencapai 75%		0.75	3,095,000		0.75	3,404,500
5	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditingkatkan			23,290,000			25,619,000
1	Koordinasi Pembangunan Sektor Perdagangan dan Industri	% desa teraliri jaringan listrik			-			-
2	Koordinasi Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan	pendapatan perkapita sebesar Rp. 7,5 jt pertahun			-			-
		penurunan angka pengangguran 25%						
		kenaikan angka partisipasi kerja sebesar 25%						
		Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 5%						
		tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 95%						
3	Koordinasi Pembangunan Sektor Pariwisata	pertumbuhan ekonomi wilayah naik sebesar 5%			-			-
4	Koordinasi Pembangunan Sektor Perhubungan dan Kominfo	100% desa dapat mengakses jaringan telekomunikasi			-			-
		100% desa pesisir yang memiliki fasilitas pelabuhan (tambatan perahu)						
		100% desa dapat mengakses layanan jasa transportasi						
5	Koordinasi Pembangunan Sektor Pekerjaan Umum	100% desa dilalui jaringan jalan kabupaten			-			-
6	Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah usulan yang terealisasi			-			-
		Jumlah usulan yang berasaskan PUG		9 kali	20,000,000		9 kali	22,000,000
7	Koordinasi dan Monitoring Pendataan Obyek dan Subyek Pajak	Rasio Obyek dan Subjek Pajak di Desa/Kelurahan		8 Desa/ Kel	3,290,000		8 Desa/ Kel	3,619,000
6	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kententraman dan Ketertiban Umum yang ditingkatkan			16,784,000			18,462,400
1	Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100% desa dengan angka kriminalitas 0,01%		8 Desa/ Kel	5,690,000		8 Desa/ Kel	6,259,000
		tidak ada gangguan kamtibmas						-
2	Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Ruang Terbuka Hijau sebesar 35%			-			-
		100% lahan kritis tertangani						-
		% luas kawasan konservasi laut sebesar 35%						-
		100% desa bebas pencemaran air						-
		100% desa bebas pencemaran udara						-
3	Pengawasan Ilegal Logging dan Ilegal Fishing	% Kasus Ilegal Logging yang tertangani		12 bulan	3,894,000		12 bulan	4,283,400
		% Kasus Ilegal Fishing yang tertangani						-
4	Penanganan dan Penertiban Hewan Ternak	Jumlah lingkungan melaksanakan penegakan Perda Penertiban Hewan Ternak		8 Desa/ Kel	7,200,000		8 Desa/ Kel	7,920,000
		Jumlah lingkungan melaksanakan penegakan Perda Penertiban Hewan Ternak						
5	Monitoring Penegakan PERDA	Jumlah PERDA yang ditindaklanjuti			-			-
		% penurunan kasus pelanggaran PERDA						
6	Penyebarluasan informasi potensi bencana	Jumlah posko siaga bencana desa/kelurahan			-			-
		% kerugian akibat bencana						
7	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial			56,485,500			62,134,050
1	Pembinaan Kampung KB	Angka penduduk miskin sebesar 8,5%	2 Desa		3,485,500	2 Desa		3,834,050
		95% Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB aktif						-
		100% anak usia sekolah bersekolah						-

2	Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu dan Anak	Angka kematian bayi sebesar 0,0015/1000KH	8 Desa/ Kel		5,000,000	8 Desa/ Kel		5,500,000
		Angka kematian ibu sebesar 0,0001/1000KH						-
3	Koordinasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan	Rasio murid per guru sebesar 30 : 1			-			-
		% anak usia sekolah dapat mengakses layanan pendidikan						-
4	Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Pemuda dan Masyarakat	100% desa memiliki LMD		100%	10,000,000		100%	11,000,000
		100% Lomba Olahraga Pemuda diikuti						-
5	Koordinasi dan Penyelenggaraan Layanan Sosial dan Keagamaan	100% desa memiliki kegiatan sosial kemasyarakatan		100%	38,000,000		100%	41,800,000
		Rasio kegiatan ramadhan yang dilaksanakan						-
		Rasio kegiatan lomba dalam rangka Festival Anak Sholeh yang dilaksanakan						-
		Persentase lomba yang diikuti dalam rangka MTQ/STQ						-
6	Pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI	Persentase lomba yang diikuti dalam rangka HUT Kemerdekaan RI			-			-
7	Pelaksanaan Hari Jadi Selayar	Persentase lomba yang diikuti dalam rangka Hari Jadi Selayar			-			-
8	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang ditingkatkan			47,456,500			52,202,150
1	Pembinaan APBDes	100% desa menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu		100%	7,456,500		100%	8,202,150
		Jumlah penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksa						-
2	Asistensi APBDes	100% desa bebas temuan		100%	5,000,000		100%	5,500,000
3	Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Kesehatan	100% penduduk dapat mengakses layanan kesehatan		100%	10,000,000		100%	11,000,000
		100% KK dapat mengakses layanan air bersih						-
		% masyarakat gizi baik						-
		% gizi buruk yang tertanggulangi						-
4	Pembinaan Kelompok Ekonom Masyarakat Pesisir	jumlah kelompok ekonomi masyarakat pesisir yang aktif		1 klp	3,000,000		1 klp	3,300,000
5	Penunjang Pelaksanaan PKK	persentase capaian program PKK		1 klp	10,000,000		1 klp	11,000,000
		Jumlah kegiatan TP.PKK yang dilaksanakan						-
6	Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan	Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten		8 Desa/ Kel	12,000,000		8 Desa/ Kel	13,200,000
9	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Pelaksanaan Hari Jadi Selayar dan Pelestarian Budaya Tradisional			30,000,000			33,000,000
1	Pelaksanaan Takabonerate Island Expedition (TIE)	Takabonerate Island Expedition (TIE)						
2	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Persentase lomba yang diikuti dalam rangka HUT Kemerdekaan RI		1 kali	20,000,000		1 kali	22,000,000
3	Peringatan Hari Jadi Selayar	Persentase lomba yang diikuti dalam rangka Hari Jadi Selayar		1 kali	10,000,000		1 kali	11,000,000
	20. KELURAHAN BONTOBANGUN				1,662,394,841			1,828,634,325
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			129,547,191			142,501,910
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			9,465,191			10,411,710
2	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						-
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			2,000,000			2,200,000
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran			118,082,000			129,890,200
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas kerja aparatur yang mendukung kinerja			5,000,000			5,500,000

1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor					
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor			1,000,000		1,100,000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			4,000,000		4,400,000
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional			-		-
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor			-		-
6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor			-		-
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah Desa/Kelurahan yang telah mengikuti diklat			226,800,000		249,480,000
1	Penunjang Pelaksanaan Kelurahan	Terpenuhinya Penunjang Aparatur Pemerintah Kelurahan			120,000,000		132,000,000
2	Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan	Terpenuhinya Penunjang Petugas Pembina Keagamaan			106,800,000		117,480,000
4	Program Perencanaan, Pelaporan, Kinerja dan Keuangan	Dokumen pelaporan			-		-
1	Penataan dan Penyusunan Profil Kelurahan	Profil Kelurahan tersedia			-		-
2	Penyusunan RKA/DPA/DPPA	RKA/DPA/DPPA tersedia			-		-
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Peningkatan Pendataan Administrasi Kependudukan			4,000,000		4,400,000
1	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Laporan Informasi Kependudukan					
2	Penunjang Pelaksanaan Registrasi Kependudukan	Registrasi Kependudukan			2,000,000		2,200,000
3	Penataan dan Penyusunan Profil Kelurahan	Data Monografi dan Profil Kelurahan			2,000,000		2,200,000
4	Pendataan Rumah Tangga Miskin	Persentase Penduduk yang teregistrasi data kependudukannya			-		-
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rasio Pelaksanaan Hari-hari Besar dan Pelestarian Budaya Tradisional			5,000,000		5,500,000
1	Pelaksanaan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar	HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar			5,000,000		5,500,000
2	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Persentase lomba yang diikuti dalam rangka HUT Kemerdekaan RI			-		-
3	Peringatan Hari Jadi Selayar	Persentase lomba yang diikuti dalam rangka Hari Jadi Selayar			-		-
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Strategi Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			11,700,000		12,870,000
1	Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			10,200,000		11,220,000
2	Pemantauan dan Pengawasan Illegal Logging dan Fishing	Pemantauan dan Pengawasan Illegal Logging dan Fishing			-		-
3	Pengendalian dan Penertiban Hewan Ternak	Penertiban Hewan Ternak			1,500,000		1,650,000
4	Pembasmian anjing liar	Pembasmian anjing liar			-		-
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			2,000,000		2,200,000
1	Intensifikasi PBB, Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Baru	Realisasi target PBB Kelurahan Bontobangun dan Terlaksananya Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Baru			2,000,000		2,200,000
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			6,500,000		7,150,000
1	Musrembang Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Musrembang			2,500,000		2,750,000
2	Pelaksanaan Lomba Desa/ Kelurahan/Lingkungan	Terlaksananya Lomba Desa/ Kelurahan/Lingkungan			-		-
3	Pelaksanaan Kelurahan Sehat	Terwujudnya Kelurahan Sehat			4,000,000		4,400,000

10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Program Perbaikan Gizi Masyarakat			30,000,000		33,000,000
1	Koordinasi dan Penanggulangan Gizi Buruk	Gizi Buruk yang tertanggulangi			30,000,000		33,000,000
11	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang ditingkatkan			6,740,000		7,414,000
1	Penunjang Pelaksanaan PKK	persentase capaian program PKK			5,000,000		5,500,000
2	Pelaksanaan Kelurahan Sehat	Jumlah Lingkungan masuk kategori lingkungan sehat			-		-
3	Koordinasi dan Penanggulangan Gizi Buruk	% gizi buruk yang tertanggulangi			-		-
4	Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah kader terlatih			-		-
5	Penunjang Pelaksanaan LPM	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas LPM			1,740,000		1,914,000
12	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat	Terpenuhinya sarana dan Prasarana kelurahan			1,235,107,650		1,358,618,415
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana				967,607,650		1,064,368,415
-	Pembangunan Jalan Setapak Bitombang - Lura Gantarang				105,107,650		115,618,415
-	Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan Biring Balang				65,000,000		71,500,000
-	Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan Kampung Beru				65,000,000		71,500,000
-	Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan Parappa				70,000,000		77,000,000
-	Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan Bontosale				80,000,000		88,000,000
-	Pembangunan Posyandu Lingkungan Biring Balang				45,000,000		49,500,000
-	Pembangunan Posyandu Lingkungan Kampung Beru				45,000,000		49,500,000
-	Pembangunan MCK Lingkungan Biring Balang				40,500,000		44,550,000
-	Pembangunan MCK Lingkungan Parappa				40,500,000		44,550,000
-	Pembangunan MCK Lingkungan Tangga-tangga				40,500,000		44,550,000
-	Pembangunan MCK Lingkungan Kampung Beru				40,500,000		44,550,000
-	Pembangunan MCK Lingkungan Bonto Saile				42,000,000		46,200,000
-	Pembangunan MCK Lingkungan Bitombang				43,500,000		47,850,000
-	Pembangunan MCK Lingkungan Lura Gantarang				45,000,000		49,500,000
-	Pengadaan Motor Sampah				40,000,000		44,000,000
-	Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya				55,000,000		60,500,000
-	Pengadaan Countainer Sampah				65,000,000		71,500,000
-	Pembangunan Bak Air Lingkungan Bitombang				40,000,000		44,000,000
3	Pengadaan Barang yang Diserahkan Ke Masyarakat				157,500,000		173,250,000
-	Pengadaan Pipa Air Lingkungan Bitombang				24,000,000		26,400,000
-	Pengadaan Tempat Sampah Lingkungan Biring Balang				41,100,000		45,210,000
-	Pengadaan Tempat Sampah Lingkungan Parappa				32,400,000		35,640,000
-	Pengadaan Alat Pertukangan Kayu				30,000,000		33,000,000
-	Pengadaan Alat Las				30,000,000		33,000,000
4	Pelatihan Pertukangan (Tukang Kayu)				25,000,000		27,500,000
5	Pelatihan Las				25,000,000		27,500,000
6	Pelatihan UKM (Pembuatan sirup buah mangrove)				20,000,000		22,000,000
7	Pelatihan UKM (Bakso Sehat)				20,000,000		22,000,000
8	Pelatihan Pembuatan Kompos				20,000,000		22,000,000
	21. KELURAHAN PUTABANGUN				1,609,163,805		1,770,080,186
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Kel. Putabangun		130,141,155	Kel. Putabangun	143,155,271

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Putabangun	12 Bulan	13,040,000	Kel. Putabangun	12 Bulan	14,344,000
2	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			-			-
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kel. Putabangun	12 Bulan	10,000,000	Kel. Putabangun	12 Bulan	11,000,000
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Kel. Putabangun	13 Org x 12 Bulan	107,101,155	Kel. Putabangun	13 Org x 12 Bulan	117,811,271
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas kerja aparatur yang mendukung kinerja	Kel. Putabangun		1,875,000	Kel. Putabangun		2,062,500
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor			-			-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor			-			-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor			-			-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kel. Putabangun	8 Unit	1,875,000	Kel. Putabangun	8 Unit	2,062,500
5	Pemeliharaan Meubiler	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Meubiler Kantor			-			-
6	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Operasional Roda Dua			-			-
7	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor						
8	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor						
9	Pengadaan Meubiler	Terpenuhinya Kebutuhan Meubiler Kantor			-			-
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase aparatur pemerintah Desa/Kelurahan yang telah mengikuti diklat	Kel. Putabangun		160,800,000	Kel. Putabangun		176,880,000
1	Penunjang Pelaksanaan Kelurahan	Terpenuhinya Penunjang Aparatur Pemerintah Kelurahan	Kel. Putabangun	23 Org x 12 Bulan	82,800,000	Kel. Putabangun	23 Org x 12 Bulan	91,080,000
2	Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan	Terpenuhinya Penunjang Petugas Pembina Keagamaan	Kel. Putabangun	37 Org x 12 Bulan	78,000,000	Kel. Putabangun	37 Org x 12 Bulan	85,800,000
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rasio Pelaksanaan Hari-hari Besar dan Pelestarian Budaya Tradisional	Kel. Putabangun		2,000,000	Kel. Putabangun		2,200,000
1	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Persentase lomba yang diikuti dalam rangka HUT Kemerdekaan RI	Kel. Putabangun	12 Bulan	1,000,000	Kel. Putabangun	12 Bulan	1,100,000
2	Peringatan Hari Jadi Selayar	Persentase lomba yang diikuti dalam rangka Hari Jadi Selayar	Kel. Putabangun	12 Bulan	1,000,000	Kel. Putabangun	12 Bulan	1,100,000
5	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditingkatkan	Kel. Putabangun		966,751,550	Kel. Putabangun		1,063,426,705
1	Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah usulan yang terealisasi dan usulan yang berdasarkan PUG			-			-
2	Pendataan Obyek dan Subyek Pajak	Jumlah obyek dan subyek pajak baru			-			-
3	Intensifikasi PBB	Persentase capaian target PBB Kelurahan sebesar 80%			-			-
4	Pelatihan bagi Pelaku UMKM	% pelaku UMKM yang ikut pelatihan			-			-
5	Pembangunan Tanggul Permukiman Lingkungan Palengu		Kel. Putabangun	1 Unit	81,060,000	Kel. Putabangun	1 Unit	89,166,000
6	Pembangunan Drainase Lingkungan Dongang-dongang		Kel. Putabangun	1 Unit	96,810,000	Kel. Putabangun	1 Unit	106,491,000
7	Rabat Beton ke Sumur Aju' Lingkungan Dongang-dongang		Kel. Putabangun	1 Unit	96,810,000	Kel. Putabangun	1 Unit	106,491,000
8	Rabat Beton Lr. V Lingkungan Balang Semb		Kel. Putabangun	1 Unit	56,647,500	Kel. Putabangun	1 Unit	62,312,250
9	Rabat Beton Lr. IV Lingkungan Balang Semb		Kel. Putabangun	1 Unit	56,647,500	Kel. Putabangun	1 Unit	62,312,250
10	Rabat Beton Jalan Setapak Lr. I Lingkungan Balang Sembo		Kel. Putabangun	1 Unit	56,647,500	Kel. Putabangun	1 Unit	62,312,250
11	Lampu Penerangan Jalan (LPJU)		Kel. Putabangun	6 unit	159,810,000	Kel. Putabangun	6 unit	175,791,000
12	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Bersih		Kel. Putabangun	1 Unit	199,139,050	Kel. Putabangun	1 Unit	219,052,955
13	Lanjutan Drainase Tabang Baru 2019		Kel. Putabangun	1 Unit	103,110,000	Kel. Putabangun	1 Unit	113,421,000
14	Lanjutan Pagar Posyandu Tabang 2019		Kel. Putabangun	1 Unit	26,360,000	Kel. Putabangun	1 Unit	28,996,000

15	Pagar TK.Anaprasa		Kel. Putabangun	1 Unit	33,710,000	Kel. Putabangun	1 Unit	37,081,000
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang ditingkatkan			347,596,100			382,355,710
1	Penunjang Pelaksanaan LPM	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas LPM	Kel. Putabangun	4 Org x 12 Bulan	5,040,000	Kel. Putabangun	4 Org x 12 Bulan	5,544,000
2	Penunjang Pelaksanaan PKK	Persentase capaian program PKK	Kel. Putabangun	4 Org x 12 Bulan	20,000,000	Kel. Putabangun	4 Org x 12 Bulan	22,000,000
3	Koordinasi dan Penanggulangan Gizi Buruk	% gizi buruk yang tertanggulangi	Kel. Putabangun	31 Org x 12 Bulan	49,200,000	Kel. Putabangun	31 Org x 12 Bulan	54,120,000
4	Pelaksanaan Kelurahan Sehat	Jumlah Lingkungan masuk kategori lingkungan sehat	Kel. Putabangun	12 Bulan	5,000,000	Kel. Putabangun	12 Bulan	5,500,000
5	Pelatihan Jahit Menjahit		Kel. Putabangun	1 OK	25,000,000	Kel. Putabangun	1 OK	27,500,000
6	Pelatihan Guide		Kel. Putabangun	1 OK	25,000,000	Kel. Putabangun	1 OK	27,500,000
7	Edukasi Manajemen Proteksi Kebakaran		Kel. Putabangun	1 OK	50,000,000	Kel. Putabangun	1 OK	55,000,000
8	Bantuan bagi UMKM Jahit		Kel. Putabangun	1 OK	75,000,000	Kel. Putabangun	1 OK	82,500,000
9	Pelatihan Kader Posyandu		Kel. Putabangun	1 OK	25,000,000	Kel. Putabangun	1 OK	27,500,000
10	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Trantib Kelurahan		Kel. Putabangun	1 OK	25,000,000	Kel. Putabangun	1 OK	27,500,000
11	Pengembangan wisata sejarah We Tenri Dio		Kel. Putabangun	1 OK	25,000,000	Kel. Putabangun	1 OK	27,500,000
12	Pelatihan Desain Grafis (Photoshop dan Corel)		Kel. Putabangun	1 OK	18,356,100	Kel. Putabangun	1 OK	20,191,710
	22. KECAMATAN BONTOSIKUYU				892,886,000			982,174,600
1	Program Pembinaan Keagamaan	Meningkatnya Pemahaman dan pengalaman Masyarakat Tentang Keagamaan		100%	8,300,000		100%	9,130,000
1	Pembinaan Karakter dan Akhlak Masyarakat	Peningkatan karakter dan ahlak masyarakat. Indikator keluaran: dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,400,000
2	Seleksi MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Hasil seleksi MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,300,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,730,000
3	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Tingkat Kecamatan	Peningkatan Pengetahuan dan pengalaman anak dibidang keagamaan			-			-
2	Program Perencanaan, Pelaporan, Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Kinerja dan Keuangan		100%	23,400,000		100%	25,740,000
1	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP tersedia	Kec. Bontosikuyu	100%	3,000,000	Kec. Bontosikuyu	100%	3,300,000
2	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Renstra	Kec. Bontosikuyu	100%	4,000,000	Kec. Bontosikuyu	100%	4,400,000
3	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersedianya SOP Kegiatan di Kecamatan	Kec. Bontosikuyu	100%	3,000,000	Kec. Bontosikuyu	100%	3,300,000
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan	Tersedianya Laporan Keuangan per-triwulan	Kec. Bontosikuyu	100%	5,000,000	Kec. Bontosikuyu	100%	5,500,000
5	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya Dokumen Profil Kecamatan	Kec. Bontosikuyu	100%	2,400,000	Kec. Bontosikuyu	100%	2,640,000
6	Penyusunan RKA/DPA/DPPA	Tersedianya Dokumen RKA/DPA/DPPA Kecamatan	Kec. Bontosikuyu	100%	6,000,000	Kec. Bontosikuyu	100%	6,600,000
7	Peningkatan Pengelolaan Barang	Terlaksananya Peningkatan dan tersedianya Laporan Pengelolaan Barang/aset kecamatan			-			-
8	Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Rekapitulasi Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun			-			-
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	4,000,000		100%	4,400,000
1	Koordinasi Pembangunan Sektor Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Sektor Pariwisata Di Kecamatan Bontosikuyu			-			-
2	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	terlaksananya kegiatan intensifikasi PBB			-			-
3	Konsultasi, Klarifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penagihan PBB	Terselenggaranya Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Penagihan PBB di Wilayah Kecamatan	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,400,000
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pe layanan administrasi perkantoran		100%	358,586,000		100%	394,444,600
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik fasilitas kantor dan rumah dinas/jabatan	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	25,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	27,500,000
2	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Dokumen Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan referensi	Kec. Bontosikuyu	5 Koran	5,000,000	Kec. Bontosikuyu	5 Koran	5,500,000
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kab./ Prov./ Nasional	12 Bulan	100,000,000	Kab./ Prov./ Nasional	12 Bulan	110,000,000

4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan penunjang administrasi perkantoran.	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	228,586,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	251,444,600
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	177,200,000		100%	194,920,000
1	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Operasional Roda Dua			-			-
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Bontosikuyu	4 Unit	40,000,000	Kec. Bontosikuyu	4 Unit	44,000,000
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor			-			-
4	Pengadaan Meubiler	Terpenuhinya Kebutuhan Meubiler Kantor			-			-
5	Pembangunan Tempat Parkir Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan parkir kendaraan di kantor Kecamatan	Kec. Bontosikuyu	1 Paket	30,000,000	Kec. Bontosikuyu	1 Paket	33,000,000
6	Pembangunan Batas Wilayah Kecamatan dan Pintu Gerbang Kantor Kecamatan	Terpenuhinya Kebutuhan Batas Wilayah Kecamatan dan Pintu Gerbang Kantor Kecamatan			-			-
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas /Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan Kecamatan	Kec. Bontosikuyu	1 Unit	2,200,000	Kec. Bontosikuyu	1 Unit	2,420,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	Kec. Bontosikuyu		17,000,000	Kec. Bontosikuyu		18,700,000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Bontosikuyu	1 Unit	5,000,000	Kec. Bontosikuyu	1 Unit	5,500,000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Bontosikuyu	1 Unit	3,000,000	Kec. Bontosikuyu	1 Unit	3,300,000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Bontosikuyu	1 Paket	80,000,000	Kec. Bontosikuyu	1 Paket	88,000,000
12	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	Tersedia dan Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Bontosikuyu dalam kondisi Layak			-			-
13	Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Jabatan	Tersedia dan Terpeliharanya Gedung Rumah Jabatan Kecamatan dalam kondisi Layak			-			-
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	35,000,000		100%	38,500,000
1	Workshop Pertanahan	Terlaksananya Kegiatan Workshop pertanahan	Kec. Bontosikuyu	1 Paket	15,000,000	Kec. Bontosikuyu	1 Paket	16,500,000
2	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan melalui kesertan pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			-			-
3	Bimbingan Teknis, Kursus dan Pelatihan	Kapasitas Aparat yang Ditingkatkan Kemampuannya melalui kesertan dalam kegiatan bimbingan teknis, kursus dan pelatihan	Makassar/ Jakarta	4 Kali	20,000,000	Makassar/ Jakarta	4 Kali	22,000,000
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Peningkatan Pendataan Administrasi Kependudukan		100%	7,400,000		100%	8,140,000
1	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Tersedianya Laporan Informasi Kependudukan	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	5,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	5,500,000
2	Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Administrasi, migrasi Kependudukan	Terpenuhinya Laporan Administrasi, migrasi Kependudukan			-			-
3	Penunjang Pelaksanaan KTP Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Pemotretan KTP Elektronik	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	2,400,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	2,640,000
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan BKDH	Terlaksananya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan BKDH		100%	8,000,000		100%	8,800,000
1	Penegakan Perda Dan Keputusan Kepala Daerah	Kapasitas Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang diimplementasikan			-			-
2	Koordinasi Penertiban Penanganan hewan dalam Wilayah Kec.Bontosikuyu	Terlaksananya koordinasi penertiban penanganan hewan dalam wilayah kecamatan	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,400,000
3	Koordinasi dan Monitoring Penegakan Perda dan Keputusan Kepala daerah		Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,400,000
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya koordinasi dan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100%	10,000,000		100%	11,000,000
1	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	5,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	5,500,000
2	Pengendalian Keamanan Lingkungan	peningkatan koordinasi pembinaan Keamanan lingkungan. Di wilayah kecamatan Bontosikuyu			-			-

3	Koordinasi Pemantauan, Pengawas dan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi Pemantauan, Pengawas dan pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup di wilayah Kecamatan			-			-
4	Pemantauan dan Pengawasan Illegal Logging dan Fishing	Laporan pemantauan dan koordinasi penanganan ilegal logging dan fising di kecamatan.			-			-
6	Pembinaan/Koordinasi Penanggulangan bencana	Terwujudnya pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan bahan Evaluasi penanggulangan Bencana dan Kebakaran di kecamatan	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	5,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	5,500,000
7	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Laporan Hasil Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana alam di Kecamatan			-			-
10	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Desa		100%	14,000,000		100%	15,400,000
1	Pembinaan APB Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan APBD Desa	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	10,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	11,000,000
2	Asistensi Penyusunan APB Desa	Terwujudnya Dokumen APBD Desa	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,400,000
3	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Terwujudnya peningkatan dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa						
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		100%	55,000,000		100%	60,500,000
1	Musrebang Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Musrebang Kecamatan	Kec. Bontosikuyu	1 Kali	15,000,000	Kec. Bontosikuyu	1 Kali	16,500,000
2	Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan	Terlaksananya Lomba desa/Kelurahan di tingkat kecamatan	Kec. Bontosikuyu	1 Kali	10,000,000	Kec. Bontosikuyu	1 Kali	11,000,000
3	Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	5,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	5,500,000
4	Pembinaan Lanjut Kecamatan Sehat	Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan lanjut kecamatan sehat	Kec. Bontosikuyu	2 Kali	20,000,000	Kec. Bontosikuyu	2 Kali	22,000,000
5	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terwujudnya Pembinaan kerjasama masyarakat Kecamatan melalui terlaksananya kegiatan Bulan bakti Gotong-royong	Kec. Bontosikuyu	1 Kali	5,000,000	Kec. Bontosikuyu	1 Kali	5,500,000
12	Program peningkatan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya peningkatan Usaha Kecil Menengah di wilayah kecamatan		100%	20,500,000		100%	22,550,000
1	Pembinaan Koperasi Desa	Rasio Pembinaan Koperasi Desa	Kec. Bontosikuyu	1 Paket	4,000,000	Kec. Bontosikuyu	1 Paket	4,400,000
2	Pembinaan/Pelatihan Kelompok UKM	Terlaksananya Pembinaan /pelatihan kelompok UKM	Kec. Bontosikuyu	1 Paket	16,500,000	Kec. Bontosikuyu	1 Paket	18,150,000
13	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan		100%	19,000,000		100%	20,900,000
1	Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Mutu Pendidikan	Rasio pelaksanaan Kegiatan pembinaan	Kec. Bontosikuyu		15,000,000	Kec. Bontosikuyu		16,500,000
2	Sosialisasi Muatan Lokal Pendidikan Pariwisata Tingkat Menengah	Terwujudnya Peningkatan pengetahuan dan etika budaya, sebagai dukungan terhadap pengembangan pariwisata di kecamatan Bontosikuyu	Kec. Bontosikuyu	1 Paket	4,000,000	Kec. Bontosikuyu	1 Paket	4,400,000
14	Program Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan Keluarga Berencana		100%	4,000,000		100%	4,400,000
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan			-			-
2	Pembinaan Keluarga Berencana	% Rasio peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,400,000
15	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Terwujudnya Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		100%	33,500,000		100%	36,850,000
1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan diKecamatan	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	4,400,000
2			Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	25,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	27,500,000
3	Pelaksanaan HUT Korpri Kabupaten	Laporan Kesertaan pada Peringatan HUT KORPRI di Kabupaten	Kec. Bontosikuyu	1 Kali	4,500,000	Kec. Bontosikuyu	1 Kali	4,950,000
16	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga		100%	30,000,000		100%	33,000,000
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	30,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	33,000,000
2	Penunjang Operasional PKK Kecamatan	Tersedianya Penunjang Operasional PKK Kecamatan						

17	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya Pengembangan Nilai dan Pelestarian Budaya Tradisional		100%	80,000,000		100%	88,000,000
1	Pelaksanaan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar	Terlaksananya Peringatan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar	Kec. Bontosikuyu	1 Tahun	65,000,000	Kec. Bontosikuyu	1 Tahun	71,500,000
2	Pelaksanaan Takabonerate Island Expedition (TIE)	kegiatan yang diikuti dalam rangka promosi wisata dan budaya kabupaten kepulauan selayar			-			-
3	Penyelenggaraan Event Festival Seni dan Budaya Daerah Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Event Festival Seni dan Budaya Daerah Tingkat Kecamatan			-			-
4	Pembinaan Organisasi Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi di kecamatan Bontosikuyu	Kec. Bontosikuyu	1 Kali	5,000,000	Kec. Bontosikuyu	1 Kali	5,500,000
5	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Laporan Kegiatan Koordinasi dan faasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kecamatan Bontosikuyu	Kec. Bontosikuyu	2 Kali	10,000,000	Kec. Bontosikuyu	2 Kali	11,000,000
18	Program pengembangan destinasi pariwisata	Terlaksananya Pembinaan tenaga pemandu wisata di Kecamatan Bontosikuyu		100%	5,000,000		100%	5,500,000
1	Pengembangan Kapasitas Pemandu Wisata	Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga pemandu wisata di Kecamatan Bontosikuyu			-			-
2	Fasilitasi Pengebangan Wisata	Peningkatan Kapasitas Pengebangan Wisata yang difasilitasi			-			-
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Wisata di Kecamatan Bontosikuyu	Dokumen Laporan Hasil Koordinasi, monitoring dan Evaluasi Kegiatan Wisata di Kecamatan Bontosikuyu	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	5,000,000	Kec. Bontosikuyu	12 Bulan	5,500,000
19	Program pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Pembinaan Kemitraan Pariwisata bagi pemandu wisata di Kecamatan Bontosikuyu			-			-
1		Rasio pelaksanaan /peserta pengembangan tenaga pemandu wisata Bahari (Diving) di Kecamatan Bontosikuyu			-			-
23. KECAMATAN BONTOMATENE					553,566,418			608,923,060
1	Program Perencanaan Pengembangan dan sistem Pelaporan, Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan		100%	15,000,000		100%	16,500,000
1	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan akhir Tahun		1 Dokumen	3,000,000		1 Dokumen	3,300,000
2	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP		1 Dokumen	3,000,000		1 Dokumen	3,300,000
3		Tersedianya Lap.Asset Barang daerah		4 Dokumen	3,000,000		4 Dokumen	3,300,000
4	Penyusunan Renstra Kecamatan	Tersedianya Dok Renstra			-			-
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan	Tersedianya Lap.Keuangan Bulanan			-			-
6	Penyusunan dan Evaluasi SOP Kecamatan	Tersedianya Dok SOP Kec		1 Laporan	3,000,000		1 Laporan	3,300,000
7	Penyusunan RKA/DPA. DPPA	Tersedianya Dok RKA/DPA/DPPA		1 Dokumen	3,000,000		1 Dokumen	3,300,000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Keterpenuhan administrasi Perkantoran		100%	282,736,418		100%	311,010,060
1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia		12 Bulan	15,000,000		12 Bulan	16,500,000
2		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		12 Bulan	2,500,000		12 Bulan	2,750,000
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		440 Kali	100,000,000		440 Kali	110,000,000
4	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik		1 Kegiatan	165,236,418		1 Kegiatan	181,760,060
3		Persentase Keterpenuhan sarana dan Prsarana Aparatur		100%	83,830,000		100%	92,213,000
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang direncanakan		8 Unit	10,000,000		8 Unit	11,000,000
2	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Meningkatnya usia pakai mobil jabatan		1 Unit	33,630,000		1 Unit	36,993,000
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya usia pakai kendaraan dinas/operasional		6 Unit	18,200,000		6 Unit	20,020,000
4	Pengadaan Mobilier	Jumlah meubelier kantor yang diperlukan		51 Unit	7,000,000		51 Unit	7,700,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya usia pakai gedung kantor		1 Unit	5,000,000		1 Unit	5,500,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Meningkatnya usia pakai peralatan kantor			-			-
7	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua			-			-

8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya usia pakai peralatan Gedung kantor	20 Unit	5,000,000	20 Unit	5,500,000
9	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Meningkatnya usia pakai rumah dinas	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,500,000
10	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor		-		-
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		-		-
12	Pengadaan absensi wajah	Jumlah Absensi wajah		-		-
13	Pengadaan tenda terowongan	Jumlah tenda terowongan		-		-
14	Penyusunan area parkir	Jumlah area parkir		-		-
15	Pemasangan jaringan internet (wifi)	Jumlah jaringan WIFI		-		-
16	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor		-		-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM Aparatur yg ditingkatkan Kapasitasnya	100%	10,000,000	100%	11,000,000
1	Bimbingan teknis Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah bimtek SDM Aparatur	3 Orang	10,000,000	3 Orang	11,000,000
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Diklat formal		-		-
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah administrasi kependudukan yg ditata	100%	10,000,000	100%	11,000,000
1	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan informasi kependudukan	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,500,000
2	Penunjang pelaksanaan program KTP Elektronik	Jumlah masyarakat yang sudah memiliki E-KTP		-		-
3	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya Profil Kecamatan	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,500,000
4	Pendataan monografi	Tersedianya data monografi		-		-
5	Penunjang pelaksanaan Registrasi Kependudukan	Terlaksananya pelaksanaan registrasi		-		-
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan yg ditingkatkan	100%	15,000,000	100%	16,500,000
1	Koordinasi pembinaan ketertiban dan ketertarikan masyarakat	Terkoordinasinya pembinaan ketertiban dan ketertarikan masyarakat	12 Desa/Kel.	5,000,000	12 Desa/Kel.	5,500,000
2	Pembinaan / Koordinasi penanggulangan bencana	Terbinanya masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana secara efektif	12 Desa/Kel.	10,000,000	12 Desa/Kel.	11,000,000
3	Sosialisasi ketertiban masyarakat	Terlaksananya sosialisasi ketertiban masyarakat		-		-
4	Pemantauan, pengawasan dan pengendalian SDA dan lingkungan hidup	Diperolehnya informasi dan kesepakatan upaya peningkatan sumber daya alam dan lingkungan hidup		-		-
7	Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi, Fasilitas dan penyelenggaraan layanan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum yg ditingkatkan	100%	5,000,000	100%	5,500,000
1	Pengawasan ilegal fishing dan ilegal logging	Terkoordinirnya ilegal logging dan ilegal fishing		-		-
2	Penanganan dan penertiban hewan ternak	Hewan ternak tertangani dengan baik	12 Desa/Kel.	5,000,000	12 Desa/Kel.	5,500,000
3	Koordinasi pembinaan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan		-		-
4	Pemantauan keamanan dan ketertiban lingkungan	terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan		-		-
8	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase partisipasi masyarakat dlm membangun desa yg ditingkatkan	100%	40,000,000	100%	44,000,000
1	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pembinaan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terkoordinirnya kegiatan pembinaan pembangunan desa/kel		-		-
2	Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	22,000,000
3	Musrenbang Kelurahan	Terlaksananya musrenbang kelurahan		-		-
4	Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan	Terlaksananya lomba desa/kel	1 Kali	10,000,000	1 Kali	11,000,000
5	Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat	Terlaksananya program kecamatan sehat	1 Kali	10,000,000	1 Kali	11,000,000
6	Pelaksanaan Kelurahan sehat	Terlaksananya kelurahan sehat		-		-
9	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelola Keuangan Desa	Jumlah Desa yg difasilitasi dan dibina dlm keuangan Desa	100%	5,000,000	100%	5,500,000
1	Pembinaan APBD Desa	Terbinanya APBDesa	10 Desa	5,000,000	10 Desa	5,500,000

10	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase pemberdayaan masyarakat perdesaan yg ditingkatkan		100%	5,000,000		100%	5,500,000
1	Koordinasi dan monitoring penanggulangan kemiskinan	Terdatanya jumlah masyarakat miskin		12 Desa/Kel.	5,000,000		12 Desa/Kel.	5,500,000
2	Koordinasi dan monitoring penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat perdesaan	Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat perdesaan			-			-
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengembangan pengelolaan keuangan daerah yg dikembangkan		100%	5,000,000		100%	5,500,000
1	Peningkatan Pengawasan Pemungutan pajak dan retribusi Daerah	Terkoordinirnya pengawasan, pemungutan pajak dan retribusi daerah			-			-
2	Monitoring dan Evaluasi APBD Desa	Jumlah laporan kegiatan APBDesa yang dievaluasi dan dimonitoring		10 Desa	5,000,000		10 Desa	5,500,000
3	Intensifikasi PBB dan Retribusi daerah	Terlaksananya intensifikasi PBB dan retribusi daerah			-			-
4	Validasi Objek Pajak /PBB	Tervalidasinya objek pajak/PBB			-			-
5	Penunjang pelaksanaan Kelurahan	Lancarnya tugas-tugas di kelurahan			-			-
6	Pembinaan pengelolaan keuangan Desa	Keuangan desa terkelola dengan baik			-			-
12	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yg diberdayakan		100%	10,000,000		100%	11,000,000
1	Penunjang operasional PKK Kecamatan	Lancarnya kegiatan -kegiatan PKK		1 Kegiatan	10,000,000		1 Kegiatan	11,000,000
2	Penunjang pelaksanaan PKK	Terlaksananya pelaksanaan PKK dengan baik			-			-
13	Peningkatan Koordinasi,Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase koordinasi,Fasilitasi dan penyelenggaraan layanan Bidang Kesejahteraan Sosial yg ditingkatkan		100%	5,000,000		100%	5,500,000
1	Koordinasi pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan	Terkoordinirnya pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan			-			-
2	Koordinasi Penanganan gizi buruk, penyakit menular dan pencemaran lingkungan	Berkurangnya jumlah penduduk yang menderita gizi buruk		1 Laporan	5,000,000		1 Laporan	5,500,000
3	Koordinasi penyelenggaraan layanan sosial	Fasilitasi penyelenggaraan layanan sosial			-			-
4	Koordinasi dan fasilitasi pelayanan kesejahteraan masyarakat	Fasilitasi pelayanan kesejahteraan masyarakat terkoordinir			-			-
5	Koordinasi penyelenggaraan layanan kesehatan	Layanan kesehatan dimasyarakat terfasilitasi dengan baik			-			-
14	Program Pembinaan Keagamaan	Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat		100%	10,000,000		100%	11,000,000
1	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya STQ dikecamatan		12 Desa/Kel.	10,000,000		12 Desa/Kel.	11,000,000
2	Seleksi Dai Cilik	Terlaksananya seleksi da'I cilik di kecamatan			-			-
3	Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya kegiatan hari-hari besar keagamaan			-			-
4	Penunjang pelaksanaan pembinaan keagamaan	Lancarnya pelaksanaan pembinaan keagamaan			-			-
5	Penyelenggaraan Penyuluhan Usaha Perikanan				-			-
6	Penyelenggaraan Penyuluhan Usaha Pertanian				-			-
15	Peningkatan Koordinasi,Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase koordinasi,Fasilitasi dan penyelenggaraan layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yg ditingkatkan		100%	7,000,000		100%	7,700,000
1	Koordinasi pelaporan penertiban IMB	Terkoordinirnya pelaporan penertiban IMB			-			-
2	Penunjang Operasional pelayanan distribusi IMB	Lancarnya pelayanan distribusi IMB			-			-
3	Koordinasi dan monitoring kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan desa/kel yang dimonitoring dan terkoordinasi		12 Desa/Kel.	7,000,000		12 Desa/Kel.	7,700,000
4	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Jumlah UMKM yang menggunakan dana pemerintah			-			-
5	Penunjang Operasional pelayanan izin UMKM	Lancarnya pelayanan izin UMKM			-			-
6	Koordinasi pembangunan sektor koperasi	Terkoordinirnya pembangunan sektor koperasi			-			-
7	Koordinasi pembangunan sektor pariwisata	Fasilitasi pembangunan sektor pariwisata			-			-
8	Pembuatan Sumur dalam				-			-
9	Pembuatan Bak Penampungan Air				-			-

16	<i>Program Pengembangan Nilai Budaya</i>	<i>Jumlah nilai budaya / nilai Sejarah yg dikembangkan</i>	100%	45,000,000	100%	49,500,000
1	Pelaksanaan HUT Proklamasi RI	Terciptanya rasa kebangsaan terhadap tanah air	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	33,000,000
2	Pelaksanaan Hari Jadi Selayar	Terwujudnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	16,500,000
3	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Terlaksananya safari ramadhan		-		-
4	Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	Terlaksananya pelaksanaan hari-hari besar nasional		-		-
5	Pelaksanaan pelatihan Dai Tk. Kecamatan	Terlaksananya pelatihan Da'I tingkat kecamatan		-		-
6	Penyelenggaraan Festipal seni dan budaya	Terselenggaranya festipal seni dan budaya		-		-
	23. KELURAHAN BATANGMATA			1,703,006,089		1,873,306,698
1	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan</i>		2,250,000		2,475,000
1	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan akhir Tahun				
2	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP		-		-
3	Peningkatan Pengelolaan Barang	Tersedianya Lap.Asset Barang daerah				
4	Penyusunan Renstra	Tersedianya Dok Renstra		-		-
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan	Tersedianya Lap.Keuangan Bulanan		-		-
6	Penyusunan SOP Kelurahan	Tersedianya Dok SOP Kec		-		-
7	Penyusunan RKA/DPA/DPPA	Tersedianya Dok RKA/DPA/DPPA		2,250,000		2,475,000
2	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Persentase Keterpenuhan administrasi Perkantoran</i>		217,548,439		239,303,283
1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia		8,100,000		8,910,000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		-		-
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		42,425,000		46,667,500
4	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik		167,023,439		183,725,783
3	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>Persentase Keterpenuhan sarana dan Prasarana Aparatur</i>		15,342,400		16,876,640
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang direncanakan		11,567,400		12,724,140
2	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Meningkatnya usia pakai mobil jabatan		-		-
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya usia pakai kendaraan dinas/operasional		2,000,000		2,200,000
4	Pengadaan Mobilier	Jumlah meubelir kantor yang diperlukan		-		-
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya usia pakai gedung kantor		1,775,000		1,952,500
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Meningkatnya usia pakai peralatan kantor		-		-
7	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua		-		-
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya usia pakai peralatan Gedung kantor		-		-
9	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Meningkatnya usia pakai rumah dinas		-		-
10	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor		-		-
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		-		-
12	Pengadaan absensi wajah	Jumlah Absensi wajah				
13	Pengadaan tenda terowongan	Jumlah tenda terowongan				
14	Penbuatan pintu pagar	Jumlah pintu pagar				
15	pembuatan area parkir	Jumlah area parkir				
16	Pemasangan jaringan internet (wifi)	Jumlah jaringan WIFI				
17	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor				
4	<i>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</i>	<i>Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan yg ditingkatkan</i>		10,500,000		11,550,000
1	Koordinasi pembinaan ketertiban dan ketentrman masyarakat	Terkoordinasinya pembinaan ketertiban dan ketentrman masyarakat				
2	Pembinaan / Koordinasi penanggulangan bencana	Terbinanya masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana secara efektif				

3	Sosialisasi ketertiban masyarakat	Terlaksananya sosialisasi ketertiban masyarakat				
4	Pemantauan, pengawasan dan pengendalian SDA dan lingkungan hidup	Diperolehnya informasi dan kesepakatan upaya peningkatan sumber daya alam dan lingkungan hidup				
5	Koordinasi pembinaan keamanan dan kenyamanan masyarakat			10,500,000		11,550,000
6	Pemantauan, pengawasan dan penanggulangan ilegal logging/fishing			-		-
7	Penertiban hewan ternak			-		-
5	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase partisipasi masyarakat dlm membangun desa yg ditingkatkan		1,139,507,600		1,253,458,360
1	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pembinaan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terkoordinirnya kegiatan pembinaan pembangunan desa/kel				
2	Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan				
3	Musrenbang Kelurahan	Terlaksananya musrenbang kelurahan		4,257,600		4,683,360
4	Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan	Terlaksananya lomba desa/kel				
5	Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat	Terlaksananya program kecamatan sehat				
6	Pelaksanaan Kelurahan sehat	Terlaksananya kelurahan sehat		-		-
7	Pelaksanaan Kebersihan lingkungan			-		-
8	Pengadaan/Pemasangan Lampu Penerangan Lingkungan			100,000,000		110,000,000
9	Pembangunan WC			213,000,000		234,300,000
10	Pengadaan Jaringan Pipa Air Bersih Kelurahan Batangmata			100,000,000		110,000,000
11	Pembangunan Pagar Lapangan Gelora Batangmata			150,000,000		165,000,000
12	Pembangunan Sampan Fiber Untuk Nelayan			120,000,000		132,000,000
13	Pengadaan Kawat Duri			26,250,000		28,875,000
14	Pengadaan Chainsaw Mini			17,000,000		18,700,000
15	Pengadaan Bibit Itik Petelur			50,000,000		55,000,000
16	Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Marodo			190,000,000		209,000,000
17	Pengadaan Mesin Jahit			34,000,000		37,400,000
18	Pengadaan Rang/Jaring Pagar			10,000,000		11,000,000
19	Pengadaan Alat Pembuat Kue			75,000,000		82,500,000
20	Pengadaan Alat Pertukangan			50,000,000		55,000,000
6	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase pemberdayaan masyarakat perdesaan yg ditingkatkan		113,657,650		125,023,415
1	Koordinasi dan monitoring penanggulangan kemiskinan	Terdatanya jumlah masyarakat miskin				
2	Koordinasi dan monitoring penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat perdesaan	Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat perdesaan				
3	Penunjang pelaksanaan KPMK			4,800,000		5,280,000
4	Penunjang pelaksanaan LPM			5,000,000		5,500,000
5	Penunjang pelaksanaan Karang Taruna			-		-
6	Penunjang pelaksanaan PKK			4,000,000		4,400,000
7	Pelatihan Pemandi Mayat			14,380,000		15,818,000
8	Pelatihan Tata Rias			17,780,000		19,558,000
9	Pelatihan Pembuatan Souvenir			17,780,000		19,558,000
10	Pelatihan Perbengkelan			17,680,000		19,448,000
11	Edukasi Manajemen Proteksi Kebakaran			7,500,000		8,250,000
12	Pelayanan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan			14,757,650		16,233,415
13	Pelatihan Mubaligh			9,980,000		10,978,000
7	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			26,400,000		29,040,000
1	Koordinasi pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan	Terkoordinirnya pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan				
2	Koordinasi dan penanggulangan gizi buruk	Berkurangnya jumlah penduduk yang menderita gizi buruk		26,400,000		29,040,000
3	Koordinasi penyelenggaraan layanan sosial	Fasilitasi penyelenggaraan layanan sosial				-
4	Koordinasi dan fasilitasi pelayanan kesejahteraan masyarakat	Fasilitasi pelayanan kesejahteraan masyarakat terkoordinir				

5	Koordinasi penyelenggaraan layanan kesehatan	Layanan kesehatan dimasyarakat terfasilitasi dengan baik					
6	Pembinaan keagamaan (MTQ dan STQ)	Terlaksananya STQ dikedamatan					
7	Seleksi Dai Cilik	Terlaksananya seleksi da'I cilik di kecamatan					
8	Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya kegiatan hari-hari besar keagamaan					
9	Penunjang pelaksanaan pembinaan keagamaan	Lancarnya pelaksanaan pembinaan keagamaan					
10	Penyelenggaraan Penyuluhan Usaha Perikanan						
11	Penyelenggaraan Penyuluhan Usaha Pertanian						
8	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah nilai budaya/nilai Sejarah yg dikembangkan		5,000,000			5,500,000
1	Pelaksanaan HUT Proklamasi Tk. Kecamatan	Terciptanya rasa kebangsaan terhadap tanah air					
2	Pelaksanaan Hari Jadi Selayar	Terwujudnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah					
3	Pelaksanaan Safari Ramdhan	Terlaksananya safari ramadhan					
4	Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	Terlaksananya pelaksanaan hari-hari besar nasional		5,000,000			5,500,000
5	Pelaksanaan pelatihan Dai Tk.Kecamatan	Terlaksananya pelatihan Da'I tingkat kecamatan					
6	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Terselenggaranya festival seni dan budaya					
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan			172,800,000			190,080,000
	Penunjang Pelaksanaan Kelurahan			85,200,000			93,720,000
	Penunjang pelaksanaan pembinaan keagamaan			87,600,000			96,360,000
	Pelaksanaan Dana Kelurahan						
	25. KELURAHAN BATANGMATA SAPO			1,750,070,911			1,925,078,002
1	Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan	100%	12,525,000		100%	13,777,500
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Lap.Keuangan Semesteran	1 Lap	5,100,000		1 Lap	5,610,000
2	Penyusunan RKA/DPA/RKAP/DPPA	Tersedianya Dok RKA/DPA/RKAP/DPPA	1 Dok	7,425,000		1 Dok	8,167,500
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Keterpenuhan administrasi Perkantoran	100%	262,867,400		100%	289,154,140
1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	100%	2,400,000		100%	2,640,000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	100%	-		100%	-
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		35,175,000			38,692,500
4	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100%	225,292,400		100%	247,821,640
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Keterpenuhan sarana dan Prasarana Aparatur	100%	43,250,411		100%	47,575,452
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya usia pakai kendaraan dinas/operasional		10,750,411			11,825,452
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya usia pakai gedung kantor		15,000,000			16,500,000
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya usia pakai peralatan Gedung kantor		2,500,000			2,750,000
4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	2 Unit	-		2 Unit	-
5	Pengadaan absensi wajah	Jumlah Absensi wajah	1 Unit	-		1 Unit	-
6	Pemasangan jaringan internet (wifi)	Jumlah jaringan WIFI		-			-
7	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor	1 unit	15,000,000		1 unit	16,500,000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan			-			-
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Keterpenuhan Disiplin Aparatur		-			-
1	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian Khusus hari-hari tertentu		-			-
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah administrasi kependudukan yg ditata		4,350,000			4,785,000

1	Penunjang pelaksanaan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pelaksanaan registrasi			4,350,000			4,785,000
6	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan			101,300,000			111,430,000
1	Pengawasan ilegal fishing dan ilegal logging	Terkoordinirnya ilegal logging dan ilegal fishing			7,700,000			8,470,000
2	Koordinasi pembinaan ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi pembinaan ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			93,600,000			102,960,000
7	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase partisipasi masyarakat dlm membangun desa yg ditingkatkan			31,974,000			35,171,400
1	Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan	Terlaksananya lomba desa/ kel			-			-
2	Pelaksanaan Kelurahan sehat	Terlaksananya kelurahan sehat			21,330,000			23,463,000
	Musrenbang Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan			10,644,000			11,708,400
8	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengembangan pengelolaan keuangan daerah yg dikembangkan			5,116,000			5,627,600
1	Intensifikasi PBB dan Retribusi daerah	Terlaksananya intensifikasi PBB dan retribusi daerah			5,116,000			5,627,600
9	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yg diberdayakan			31,070,000			34,177,000
	Penunjang pelaksanaan PKK	Terlaksananya pelaksanaan PKK dengan baik			31,070,000			34,177,000
10	Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase koordinasi, Fasilitasi dan penyelenggaraan layanan Bidang Kesejahteraan Sosial yg ditingkatkan			108,850,000			119,735,000
1	Koordinasi dan penanggulangan gizi buruk	Berkurangnya jumlah penduduk yang menderita gizi buruk			26,150,000			28,765,000
2	Penunjang pelaksanaan pembinaan keagamaan	Lancarnya pelaksanaan pembinaan keagamaan			82,700,000			90,970,000
11	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase koordinasi, Fasilitasi dan penyelenggaraan layanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kel yg ditingkatkan			1,145,023,100			1,259,525,410
1	Koordinasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina			-			-
2	Penunjang pelaksanaan KPMK	Lancarnya pelaksanaan KPMK			5,300,000			5,830,000
3	Penunjang pelaksanaan LPM	Lancarnya pelaksanaan LPM			4,400,000			4,840,000
4	Pembangunan MCK	Jumlah MCK yang dibangun	1 Kel		-		1 Kel	-
5	Pengadaan Alat Pertanian	Jumlah Alat Pertanian yang disediakan			184,750,000			203,225,000
6	Pengadaan Alat Dapur dan UMKM	Jumlah Alat dapur yang disediakan			16,500,000			18,150,000
7	Pengadaan Alat Konveksi	Jumlah Alat Konveksi yang disediakan			16,750,000			18,425,000
8	Pembangunan Jalan Pekuburan Lingk. Batangmata Sapu Utara	Terlaksananya Pembangunan Jalan Pekuburan Lingk. Batangmata Sapu Utara			90,750,000			99,825,000
9	Pembangunan Jalan Tani Ruas Marana-Parring	Terlaksananya Pembangunan Jalan Tani Ruas Marana-Parring			198,106,100			217,916,710
10	Pembangunan Jalan Tani Ruas Sukadin-Taholong	Pembangunan Jalan Tani Ruas Sukadin-Taholong			132,750,000			146,025,000
11	Pengadaan Penampungan Air	Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			92,875,000			102,162,500
12	Rehab Bak air lingk. Batangmata sapo utara				106,500,000			117,150,000
13	Rehab bak air lingk. Katowaang				54,000,000			59,400,000
14	Pembangunan tanggul batangmata sapo utara				64,500,000			70,950,000
15	Pembangunan drainase lingk. Batangmata sapo utara				43,500,000			47,850,000
16	Pembangunan pagar TK. Idhata Batangmata sapo				54,000,000			59,400,000
17	Pelatihan Menjahit				80,342,000			88,376,200
12	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah nilai budaya/nilai Sejarah yg dikembangkan			3,745,000			4,119,500
1	Pelaksanaan Hari Jadi Selayar	Terwujudnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah			-			-
2	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Terlaksananya safari ramadhan			-			-

3	Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	Terlaksananya pelaksanaan hari-hari besar nasional/Daerah			3,745,000			4,119,500
	26. KECAMATAN BONTOMANAI				820,135,726			902,149,299
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah anggaran yang tersedia			506,085,726			556,694,299
1	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kec. Bontomanai	1 Tahun	130,335,726	Kec. Bontomanai	1 Tahun	143,369,299
2	Kegiatan pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	Kec. Bontomanai	100%	364,350,000	Kec. Bontomanai	100%	400,785,000
3	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bontomanai	12 Bulan	10,400,000	Kec. Bontomanai	12 Bulan	11,440,000
4	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan (surat kabar/majalah)	Kec. Bontomanai	2 Agen	1,000,000	Kec. Bontomanai	2 Agen	1,100,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah anggaran yang tersedia			85,170,000			93,687,000
1	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terselenggaranya pemeliharaan mobil jabatan	Kec. Bontomanai	100%	35,000,000	Kec. Bontomanai	100%	38,500,000
2	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	Kec. Bontomanai	100%	15,000,000	Kec. Bontomanai	100%	16,500,000
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor			-			-
4	pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kec. Bontomanai	100%	15,000,000	Kec. Bontomanai	100%	16,500,000
5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan/dinas operasional	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kec. Bontomanai	100%	18,170,000	Kec. Bontomanai	100%	19,987,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			-			-
7	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kec. Bontomanai	100%	2,000,000	Kec. Bontomanai	100%	2,200,000
8	Kegiatan pengadaan mobiler	Tersedianya mobiler kantor dan rumah tangga			-			-
9	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terselenggaranya pemeliharaan rumah jabatan			-			-
10	Rehab sedang/berat Rujab Camat	Meningkatnya usia pakai Rujab Camat			-			-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah anggaran yang tersedia			40,000,000			44,000,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi	Kec. Bontomanai	8 Orang	40,000,000	Kec. Bontomanai	8 Orang	44,000,000
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah anggaran yang tersedia			-			-
1	Pemberian penghargaan bagi aparat berprestasi	Meningkatnya kinerja aparatur						
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah anggaran yang tersedia			20,000,000			22,000,000
1	Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/akhir tahun			-			-
2	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP			-			-
3	Penyusunan SOP Kecamatan	Tersusunnya Standar Operasional Pelayanan administrasi perkantoran			-			-
4	Pengelolaan barang dan asset daerah	Tersusunnya laporan pengelolaan barang			-			-
5	Koordinasi pelaporan, rekonsiliasi data dan penatausahaan OPD	Tersusunnya penatausahaan keuangan OPD	Kec. Bontomanai	90%	20,000,000	Kec. Bontomanai	90%	22,000,000
6	Kegiatan penyusunan Renja	Tersusunnya Renja			-			-
7	Penyusunan profil Kecamatan	Tersusunnya profil Kec.			-			-
8	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Renstra			-			-
6	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah anggaran yang tersedia			30,880,000			33,968,000
1	Pelaksanaan safari ramadhan	Terlaksananya safari ramadhan Tk. Kecamatan			-			-
2	Peringatan hari-hari besar islam Tk. Kecamatan	Terselenggaranya hari-hari besar Islam			-			-
3	Pelaksanaan STQ/MTQ Tk. Kecamatan	Terpilihnya kontingen yang ikut serta dalam pelaksanaan STQ/MTQ Tk. Kecamatan			-			-
5	Kegiatan koordinasi dan fasilitasi program unggulan Bupati terpilih	Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi program unggulan Bupati terpilih			-			-

6	Koordinasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kesejahteraan sosial	Meningkatnya layanan bidang kesejahteraan sosial	Kec. Bontomanai	80%	20,000,000	Kec. Bontomanai	80%	22,000,000
7	Pelaksanaan kecamatan sehat	Kunjungan kerja/sosialisasi pelaksanaan Kecamatan sehat			-			-
8	Kegiatan koordinasi penanganan gizi buruk, penyakit menular dan pencemaran lingkungan	Tersedianya data yang akurat kasus gizi buruk, penyakit menular dan pencemaran lingkungan di Kec. Bontomanai			-			-
9	Pembinaan KB	Meningkatnya jumlah akseptor KB			-			-
10	Penunjang operasional TP. PKK Kecamatan	Terpenuhinya penunjang operasional PKK Kec.	Kec. Bontomanai	100%	10,880,000	Kec. Bontomanai	100%	11,968,000
11	Koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga	Tersedianya data karang taruana dan olahraga			-			-
7	Program Peningkatan, Koordinaasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan	Jumlah anggaran yang tersedia			33,000,000			36,300,000
1	Pelaksanaan lomba desa	Terlaksananya lomba desa/kelurahan			-			-
2	Asistensi penyusunan APBDesa Pokok	Terlaksananya asistensi APBDesa di Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	100%	10,000,000	Kec. Bontomanai	100%	11,000,000
3	Asistensi penyusunan APBDesa perubahan	Terlaksananya asistensi APBDesa perubahan di Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	100%	10,000,000	Kec. Bontomanai	100%	11,000,000
4	Koordinasi pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta penyusunan laporan informasi kependudukan dan catatan sipil	Terelenggaranya pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan	Kec. Bontomanai	100%	13,000,000	Kec. Bontomanai	100%	14,300,000
8	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah anggaran yang tersedia			15,000,000			16,500,000
1	Kegiatan Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang Tk. Kec	Kec. Bontomanai	90%	15,000,000	Kec. Bontomanai	90%	16,500,000
2	Kegiatan koordinasi pelaksanaan lembaga perekonomian (UKM, BUMDES dan Koperasi)	Terlaksananya pembinaan koordinasi dan pengembangan UKM, BUMDES dan Koperasi			-			-
3	Monev penyelenggaraan pembangunan	Tersedianya lap. Monitoring realisasi pembangunan di Kec. Bontomanai			-			-
9	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah anggaran yang tersedia			90,000,000			99,000,000
1	Peringatan HUT proklamasi RI Tingkat Kecamatan	Meningkatnya rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan warga yang beradab dan berbudaya	Kec. Bontomanai	100%	60,000,000	Kec. Bontomanai	100%	66,000,000
2	Pelaksanaan hari jadi selayar	Masyarakat mengetahui sejarah lahir daerahnya	Kec. Bontomanai	100%	15,000,000	Kec. Bontomanai	100%	16,500,000
3	Hari-hari besar nasional	Meningkatnya rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan warga yang beradab dan berbudaya			-			-
4	Koordinasi penegakan Perda dan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya koordinasi perda dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kec. Bontomanai	100%	15,000,000	Kec. Bontomanai	100%	16,500,000
	27. KECAMATAN BUKI				475,095,642			522,605,206
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan dan aset daerah yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah (SAP)			20,000,000			22,000,000
1	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang representatif						
2	Peningkatan Pengelolaan Barang	Terkelolanya barang / aset daerah di Kecamatan Buki			5,000,000			5,500,000
3	Penyusunan Renstra Kecamatan.	Jumlah dokumen Renstra Kecamatan.						-
4	Penyusunan RKA/DPA/DPPA	Jumlah Dokumen RKA/DPA/DPPA			5,000,000			5,500,000
5	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP Kecamatan yang tersedia			5,000,000			5,500,000
6	Penyusunan dan evaluasi SOP Kecamatan	Jumlah Dokumen SOP Kecamatan yang direvisi			5,000,000			5,500,000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran			238,525,642			262,378,206
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia			4,800,642			5,280,706

2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan yang tersedia		3,600,000		3,960,000
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah yang dilakukan		75,000,000		82,500,000
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik.		155,125,000		170,637,500
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas kerja aparatur yang mendukung kinerja		41,570,000		45,727,000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang direncanakan				
2	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang direncanakan		6,000,000		6,600,000
3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang direncanakan				-
4	Pengadaan Meubelier	Jumlah meubelier kantor yang direncanakan				-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara				-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		4,000,000		4,400,000
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		31,570,000		34,727,000
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Masa usia pakai gedung kantor meningkat				
9	Penataan Halaman Kantor Camat	Tertatanya halaman kantor camat.				
10	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (Batik)	Tersedianya pakaian Dinas Harian				
4	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Pemerintahan	Proporsi pelaksanaan tugas-tugas kecamatan atas kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan ke Kecamatan		14,000,000		15,400,000
1	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Cakupan data / laporan bulanan informasi kependudukan yang tersedia		7,000,000		7,700,000
2	Penunjang Pelaksanaan Program KTP Elektronik.	Jumlah masyarakat yang sudah memiliki E-KTP				-
3	Rapat Koordinasi Terpadu Tingkat Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi terpadu Tk. Kecamatan				-
4	Konsultasi, Klarifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penagihan PBB	Fasilitas monitoring dan evaluasi penagihan PBB		7,000,000		7,700,000
5	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Jumlah dokumen profil dan monografi Kecamatan yang disusun				
6	Penyusunan Laporan Presensi Camat dan Kepala Desa	Tersedianya laporan presensi Camat dan Kepala Desa				
5	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditingkatkan.		14,000,000		15,400,000
1	Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kasus pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan		7,000,000		7,700,000
2	Pembinaan / Koordinasi Penanggulangan Bencana.	Fasilitas pencegahan & penanggulangan korban bencana secara berkualitas yang dikoordinasikan dan dibina.				-
3	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Wawasan kebangsaan masyarakat yang dibina				-
4	Pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya	Jumlah suku, adat, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dibina kerukunannya				-
5	Pengawasan Ilegal Logging dan Ilegal Fishing	Fasilitas kegiatan ilegal logging dan ilegal fishing di masyarakat yang diawasi		7,000,000		7,700,000
6	Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian SDA & Lingkungan Hidup	Fasilitas kegiatan pemantauan, pengawasan & pengendalian SDA & LH				
6	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan.		32,000,000		35,200,000
1	Kordinasi Pembangunan Sektor Keagamaan					
2	Pelaksanaan Safari Ramadan					
3	Pelaksanaan MTQ Tk. Kecamatan			5,000,000		5,500,000
4	Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tk. Kecamatan					-
5	Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Persentase Desa memiliki kegiatan Sosial / Kemasyarakatan.		7,000,000		7,700,000
6	Penunjang Operasional TP. PKK Kecamatan	Tersedianya dana operasional PKK Kecamatan		10,000,000		11,000,000

7	Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat	Lanjutan kegiatan Kecamatan sehat yang dibina			10,000,000			11,000,000
8	Koordinasi penyelenggaraan Layanan Sosial	Jumlah PMKS yang direkomendasikan mendapatkan penanganan						-
7	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				91,000,000			100,100,000
1	Pelaksanaan HUT RI Tingkat Kecamatan	Terciptanya rasa kebangsaan terhadap tanah air			50,000,000			55,000,000
2	Pelaksanaan Hari Jadi Selayar	Terwujudnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah			10,000,000			11,000,000
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan APB Desa.				7,000,000			7,700,000
4	Pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan				7,000,000			7,700,000
5	Pembinaan dan Pengawasan APB Desa				7,000,000			7,700,000
6	Penunjang Pembinaan Olahraga Tk. Kecamatan				10,000,000			11,000,000
8	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditingkatkan			24,000,000			26,400,000
1	Koordinasi Pembangunan Sektor Pertanian	Angka Kemiskinan Penduduk						-
2	Koordinasi Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan.	Pendapatan Rata – Rata Penduduk per Tahun						-
3	Koordinasi Pembangunan Sektor Penanaman Modal	Pertumbuhan ekonomi wilayah naik sebesar 5%						-
4	Koordinasi Pembangunan Sektor Pendidikan	Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 5%						-
5	Penunjang Operasional Pelayanan Retribusi IMB	Jumlah IMB yang diterbitkan						-
6	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Jumlah pelaku usaha UKM yang direkomendasikan.						-
7	Pembinaan Koperasi Desa	Cakupan Koperasi Desa yang dibina			7,000,000			7,700,000
8	Koordinasi Pembangunan Sektor Perhubungan dan Kominfo	Persentase Desa dapat mengakses jaringan telekomunikasi						-
9	Koordinasi Pembangunan Sektor Perikanan	Persentase Desa pesisir memiliki fasilitasi pelabuhan (tambatan perahu)						-
10	Koordinasi Pembangunan Sektor Air Bersih	Persentase KK dapat mengakses layanan air bersih						-
11	Koordinasi Pembangunan Sektor Pekerjaan Umum	Persentase Desa teraliri jaringan listrik						-
12	Koordinasi Pembangunan Sektor Transfortasi	Persentase Desa dapat mengakses layanan jasa transportasi						-
13	Koordinasi Pembangunan Sektor Tata Ruang, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup	Ruang Terbuka Hijau sebesar 35%						-
14	Musrenbang Kecamatan	Fasilitasi perencanaan pembangunan Kecamatan / Desa berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten.			10,000,000			11,000,000
15	Monitorig, Evaluasi dan Pelaporan	Fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan skala Kecamatan						-
16	Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Kelompok Usaha Kecil dan Menengah yang dibina.			7,000,000			7,700,000
	28. KECAMATAN PASIMARANNU				743,151,467			817,466,614
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				463,151,467			509,466,614
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam setiap bulannya			12,000,000			13,200,000
2	Rapat Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			240,450,000			264,495,000
3	Pelaksana Penunjang Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			205,701,467			226,271,614
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			5,000,000			5,500,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				70,000,000			77,000,000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional			-			-

2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan	-	-
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	10,000,000	11,000,000
4	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur Kantor	-	-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Camat	Terpeliharanya Rumah Jabatan Camat	-	-
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Kantor Camat	Terpeliharanya Kantor Camat	-	-
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	60,000,000	66,000,000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		30,000,000	33,000,000
1	Penyusunan RKA/DPA/DPPA	Tersedianya Dokumen RKA/DPA/DPPA	7,500,000	8,250,000
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	7,500,000	8,250,000
3	Peningkatan Pengelolaan Barang	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang	7,500,000	8,250,000
4	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Dokumen LAKIP	-	-
5	Penyusunan Renstra	Tersedianya Dokumen Renstra	-	-
6	Penyusunan SOP	Tersedianya Dokumen SOP	7,500,000	8,250,000
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		10,000,000	11,000,000
1	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	10,000,000	11,000,000
2	Pengawasan Illegal Logging dan Illegal Fishing	Terlaksananya Pengawasan Illegal Logging dan Illegal Fishing	-	-
3	Pembinaan/Koordinasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan/Koordinasi Penanggulangan Bencana	-	-
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		55,000,000	60,500,000
1	Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	20,000,000	22,000,000
2	Pelaksanaan Lomba Desa	Terlaksananya Lomba Desa	15,000,000	16,500,000
3	Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat	20,000,000	22,000,000
4	Koordinasi/Monitoring Pembangunan Desa	Terlaksananya Koordinasi/Monitoring Pembangunan Desa	-	-
6	Program Pengembangan Nilai Budaya		60,000,000	66,000,000
1	Pelaksanaan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar	Terselenggaranya HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar	60,000,000	66,000,000
2	Pelaksanaan Taka Bonerate Island Expedition (TIE)	Terlaksananya Keikutsertaan Dalam TIE	-	-
7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		25,000,000	27,500,000
1	Pembinaan Organisasi PKK Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan PKK	25,000,000	27,500,000
8	Program Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga		30,000,000	33,000,000
1	Pembinaan Prestasi Pemuda dan Olah Raga	Terlaksananya Pembinaan Prestasi Pemuda dan Olah Raga	30,000,000	33,000,000
	29. KECAMATAN PASIMASUNGGU		630,101,877	693,112,065
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	335,101,877	368,612,065
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi (telepon), air dan listrik	11,501,877	12,652,065
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan Bahan-bahan Bacaan (Surat Kabar/Majalah)	2,000,000	2,200,000
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah	123,000,000	135,300,000
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	198,600,000	218,460,000

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			95,000,000			104,500,000
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor			15,000,000			16,500,000
2	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur			5,000,000			5,500,000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara			10,000,000			11,000,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			60,000,000			66,000,000
5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional			-			-
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara			5,000,000			5,500,000
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,000,000			16,500,000
1	Bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM aparatur	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Aparatur Pemerintah			15,000,000			16,500,000
4	Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Peningkatan Pendataan Administrasi Kependudukan			5,000,000			5,500,000
1	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Teridentifikasinya Jumlah Mutasi, Kelahiran dan Kematian Penduduk			5,000,000			5,500,000
2	Penunjang Pelaksanaan KTP Elektronik	Pemotretan Wajib KTP			-			-
5	Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya Pelaksanaan Hari Jadi selayar dan Pelestarian Budaya Tradisional			60,000,000			66,000,000
1	Pelaksanaan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar	Terlaksananya HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar			60,000,000			66,000,000
2	Pelaksanaan Takabonerate Island Expedition (TIE)	Terlaksananya Takabonerate Island Expedition (TIE)			-			-
6	Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga	Terwujudnya Pembinaan Kepemudaan yang mandiri dan Prestasi yang baik dibidang olahraga ditingkat kecamatan			30,000,000			33,000,000
1	Pembinaan dan Pengembangan olahraga Kepemudaan di tingkat kecamatan	Terlaksananya Pembinaan olahraga ditingkat kecamatan			30,000,000			33,000,000
7	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			20,000,000			22,000,000
	Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			15,000,000			16,500,000
	Pembinaan/Koordinasi Penanggulangan Bencana	Tersebarluasnya Informasi Potensi Bencana Alam			5,000,000			5,500,000
	Pemantauan dan Pengawasan Illegal Logging dan Fishing	Pemantauan dan Pengawasan Lapangan			-			-
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			30,000,000			33,000,000
1	Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terselenggaranya Koordinasi dan Monitoring Pembangunan di Kecamatan Pasimasunggu			-			-
2	Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan			15,000,000			16,500,000
3	Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan	Semua Desa di Kec. Pasimasunggu ikut serta dalam lomba Desa/kelurahan			-			-
4	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terselenggaranya bulan bakti gotong royong			-			-
5	Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat	Kecamatan Pasimasunggu siap ikut serta dalam lomba Kecamatan Sehat Tingkat Kabupaten / Provinsi			15,000,000			16,500,000
9	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Terwujudnya Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga			20,000,000			22,000,000
1	Operasional PKK Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi PKK tingkat Desa			20,000,000			22,000,000
10	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Desa			20,000,000			22,000,000
1	Pembinaan APB Desa	Terlaksananya pembinaan APB Desa			20,000,000			22,000,000
2	Asistensi Penyusunan APB Desa	Terlaksananya Asistensi APB Desa			-			-

	30. KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR				908,994,526			999,893,979
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran			411,294,526			452,423,979
1	Pelaksana penunjang administrasi perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			233,100,000			256,410,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi dan Listrik			14,534,526			15,987,979
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhiya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2,160,000			2,376,000
4	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhiya penerangan bangunan kantor dan rumah dinas			8,000,000			8,800,000
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah			153,500,000			168,850,000
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparatur			332,700,000			365,970,000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas	Terpenuhiya Kendaraan Dinas Operasional			-			-
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhiya Peralatan Gedung Kantor			17,000,000			18,700,000
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhiya Perlengkapan Gedung Kantor			35,700,000			39,270,000
4	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	Terpenuhiya Perlengkapan Rumah Dinas			-			-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Memperlancar Mobilisasi Tugas-Tugas Kedinasan			30,000,000			33,000,000
6	Penataan dan Pemanfaatan Halaman Kantor Camat	Meningkatnya Aksesibilitas Administrasi Layanan Perkantoran			145,000,000			159,500,000
7	Pembuatan papan Nama Kantor	Meningkatnya Aksesibilitas Administrasi Layanan Perkantoran			-			-
8	Pengadaan Mebeuler	Terpenuhiya kelengkapan sarana prasarana meubiler kecamatan						-
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Meningkatnya usia pakai rumah jabatan Kecamatan Pasimasunggu Timur			30,000,000			33,000,000
10	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Aksesibilitas Administrasi Layanan Perkantoran			75,000,000			82,500,000
11	Rehab Ringan/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Laut	Memperlancar Mobilisasi Pelaksanaan Tugas Tugas Kedinasan			-			-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			15,000,000			16,500,000
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur			15,000,000			16,500,000
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan (Diklat Pim IV/III)	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur			-			-
3	Program Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja dan kualitas pelaporan Keuangan			15,000,000			16,500,000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtislar Realisasi Kinerja Keuangan SKPD	Penilaian Opini Kinerja Aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan Kegiatan			-			-
2	Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset	Tersusunnya Laporan Keuangan Triwulan dan Akhir Tahun						
3	Penyusunan RKA/DPA/DPPA	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020			15,000,000			16,500,000
4	Peningkatan Pengelolaan Barang	Tersusunnya Aset Kecamatan Pasimasunggu Timur			-			-
5	Penyusunan LAKIP							
6	Penyusunan SOP							
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan			10,000,000			11,000,000
1	Pengelolaan dalam penyusunan Laporan Informasi kependudukan	Terwujudnya Informasi Kependudukan yang Akurat			10,000,000			11,000,000
2	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Tersedianya Dokumen Kependudukan yang Akurat			-			-
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya			50,000,000			55,000,000
1	Pelaksanaan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar	Meningkatnya Nasionalisme dan Kecintaan			50,000,000			55,000,000

6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa		15,000,000		16,500,000
1	Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tingkat Desa		15,000,000		16,500,000
2	Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa	Efektifitas Pelaksanaan Pembangunan Desa Lebih Terarah		-		-
7	Program pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa		15,000,000		16,500,000
1	Pembinaan APB Desa	Terkendalinya Pemanfaatan APB Desa		15,000,000		16,500,000
2	Asistensi Penyusunan APB Desa	Terkendalinya Pemanfaatan APB Desa				
8	Pembinaan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			25,000,000		27,500,000
1	Penunjang Pelaksanaan Admistrasi Program (PPAP) KUR dan LPMUKP	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		-		-
2	Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas	Menekan Tingkat Kelangkaan BBM/Gas		-		-
3	Gerakan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan (Gerbang Taskin)	Mengurangi Angka Kemiskinan		-		-
4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kepemudaan di Tingkat Kecamatan	Terkoordinirnya Organisasi-Organisasi Kepemudaan		25,000,000		27,500,000
9	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat		20,000,000		22,000,000
1	Penunjang Operasional PKK Kecamatan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK Kecamatan		20,000,000		22,000,000
	31. KECAMATAN PASILAMBENA			693,789,187		763,168,106
1	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran			347,811,187		382,592,306
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik		14,400,000		15,840,000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan		1,800,000		1,980,000
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Sebagai Pendudukan Tugas Koordinasi dan Fasilitasi		150,400,000		165,440,000
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedinya Penunjang Administrasi Perkantoran		181,211,187		199,332,306
2	Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			54,800,000		60,280,000
1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan yang memadai				
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Secara Rutin/Berkala Dengan Baik		54,800,000		60,280,000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas Secara Rutin/Berkala Dengan Baik				
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor yang memadai guna menunjang kelancaran tugas				
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dengan baik				
6	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Tersedianya rumah jabatan yang memadai				
7	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan dinas yang memadai guna menunjang kelancaran tugas				
8	Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor				
9	Pengadaan Sarana Penerangan / Listrik Kecamatan	Tersedianya penerangan yang memadai di ibukota kecamatan				
3	Program:Peningkatan Disiplin Aparatur			100,000,000		110,000,000
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian untuk Hari-Hari Tertentu yang tersedia		100,000,000		110,000,000
4	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			32,370,000		35,607,000
1	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP Kecamatan		5,700,000		6,270,000
2	Penyusunan Renstra	Tersedianya Dokumen Renstra		2,880,000		3,168,000

3	Penyusunan dan Evaluasi SOP Kecamatan	Tersedianya SOP Kecamatan		5,700,000		6,270,000
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun				-
5	Peningkatan Pengelolaan Barang	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Barang		4,980,000		5,478,000
6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan	Tersedianya laporan Keuangan per Triwulan		8,680,000		9,548,000
7	Penyusunan RKA/DPA/DPPA	Tersedianya Dokumen DPA		4,430,000		4,873,000
5	Program : Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa			17,775,000		19,552,500
1	Pembinaan APBD Desa	Terlaksananya Pengelolaan APB Desa Dengan Baik				
2	Koordinasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa				
3	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan kualitas laporan keuangan yang tepat waktu				
4	Asistensi Penyusunan APB Desa	Tersusnya APB Desa yang sesuai dengan perundang-undangan		5,866,000		6,452,600
5	Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa / Kelurahan	SDM dan fasilitas pelayanan di pemerintah desa yang memadai				-
6	Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa / Kelurahan	Diperolehnya Informasi dan Kesepakatan Upaya Peningkatan Kualitas Program / Kegiatan Pembangunan		4,050,000		4,455,000
7	Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Di Tingkat Kecamatan		7,859,000		8,644,900
6	Program pembaangunan Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera			13,000,000		14,300,000
1	Koordinasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Layanan KB	Cakupan Peserta KB dan Ratio Akseptor KB baru				
2	Penunjang Operasional PKK Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PKK Di Kecamatan		13,000,000		14,300,000
7	Program Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan			15,000,000		16,500,000
1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas murotal dan Lahirnya penghafal Quran		15,000,000		16,500,000
2	Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan	Terjalinnnya hubungan toleransi vertikal dan horisonta yang baik				
8	Program Pembangunan Kebudayaan dan Cinta Tanah Air			100,033,000		110,036,300
1	Pelaksanaan HUT Proklamasi RI	Terlaksananya HUT Proklamasi		75,105,000		82,615,500
2	Pelaksanaan Hari Jadi Selayar	Dipentaskannya Budaya Melalui Pelaksanaan Hari Jadi		24,928,000		27,420,800
3	Koordinasi dan pembinaan Seni Budaya	Jumlah Grup Kesenian dan Jumlah Penyelenggaraan Festival seni Budaya				
4	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terjalinnnya hubungan kemasyarakatan yang kondusif				
9	Program Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan			13,000,000		14,300,000
1	Koordinasi Pembangunan Sektor Kesehatan	Persentase masyarakat yang dapat mengakses layanan kesehatan				
2	Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat	Terbinanya Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat Swadaya Masyarakat Dengan Baik		13,000,000		14,300,000
	32. KECAMATAN TAKABONERATE			790,570,941		869,628,035
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien		255,570,941		281,128,035
1	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Kelancaran Kegiatan Perkantoran		180,570,941		198,628,035
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelunasan Rekening/Tagihan Telepon/Listrik/ Air		10,000,000		11,000,000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan		5,000,000		5,500,000
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah dan Luar Daerah		60,000,000		66,000,000

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				180,000,000			198,000,000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Meningkatnya Pelayanan Tupoksi dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai			30,000,000			33,000,000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Pelayanan Tupoksi dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai			10,000,000			11,000,000
3	Penadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan			10,000,000			11,000,000
4	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair Kantor			40,000,000			44,000,000
4	Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Jabatan Dinas	Terpeliharanya Rumah Jabatan/ Dinas Secara Rutin/Berkala dengan Baik			50,000,000			55,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Kelancaran Tupoksi Organisasi yang Didukung Oleh Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur			30,000,000			33,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kinerja dengan Adanya Pemeliharaan			10,000,000			11,000,000
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya ketetapan			55,000,000			60,500,000
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja keuangan SKPD	Tersedianya laporan keuangan tersedia dan tersusun tetpat pada waktu			10,000,000			11,000,000
2	Penyusunan laporan keuangan triwulan	Tersedianya laporan keuangan tersedia dan tersusun			10,000,000			11,000,000
3	Penyusunan RKA/DPA/DPPA	Tersedianya RKA/DPA/DPPA yang tersusun			10,000,000			11,000,000
4	Penyusunan Renstra, Lakip dan SOP Kecamatan	Tersedianya Dokumen Renstra, Lakip dan SOP			10,000,000			11,000,000
5	Penyusunan data kepegawaian	Tersedianya data kepegawaian yang akurat			-			-
6	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya Profil Kecamatan			15,000,000			16,500,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10,000,000			11,000,000
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber SDM Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah			10,000,000			11,000,000
5	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan Aparatur Kecamatan			20,000,000			22,000,000
1	Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas beserta perlengkapannya						
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				20,000,000			22,000,000
6	Penataan Administrasi Kependudukan				10,000,000			11,000,000
1	Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Tersedianya Laporan Kependudukan			10,000,000			11,000,000
7	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan & Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah			5,000,000			5,500,000
1	Konsultasi klarifikasi monitoring dan evaluasi penagihan PBB	tercapainya capaian realisasi PBB dan kesadaran akan kewajiban membayar pajak			5,000,000			5,500,000
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				85,000,000			93,500,000
1	Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Skala Prioritas Tingkat Kecamatan sebagai Pedoman Perencanaan / Pelaksanaan Pembangunan			30,000,000			33,000,000
2	Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Meningkatnya Pemahaman Tupoksi Perangkat Desa dalam Melaksanakan Program, Kegiatan dan Pelayanan Administrasi			20,000,000			22,000,000
3	Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat	Tercapainya Kondisi Kabupaten, Kecamatan, Desa untuk Hidup dengan bersih, Nyaman, Aman dan Sehat untuk dihuni dan tempat untuk bekerja bagi Warganya			10,000,000			11,000,000
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Pembangunan di Desa			10,000,000			11,000,000
5	Pelaksanaan Lomba Desa	Lomba Desa Se - Kecamatan Takabonerate			10,000,000			11,000,000
6	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kepemudaan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Fungsi dan Nilai Kepemudaan dalam Membangun Desa			5,000,000			5,500,000

9	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan kondisi yang kondusif dimasyarakat			55,000,000			60,500,000
1	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Terwujudnya Ketertiban Umum dan Kesadaran Masyarakat dalam Mentaati Peraturan			15,000,000			16,500,000
2	Pengawasan ilegal logging dan ilegal fishing	adanya penyelesaian kasus			10,000,000			11,000,000
3	Pembinaan/Koordinasi Penanggulangan Bencana	terlaksananya penanganan kejadian bencana			10,000,000			11,000,000
4	Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kota Kecamatan	Terciptanya Suasana Bersih di Wilayah Kecamatan			10,000,000			11,000,000
5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terwujudnya Lingkungan Yang Aman Bagi Masyarakat			10,000,000			11,000,000
10	Pengembangan Nilai Sejarah/ Budaya				85,000,000			93,500,000
1	Pelaksanaan HUT Proklamasi	Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Semangat Kebangsaan Warga			30,000,000			33,000,000
2.	Pelaksanaan Hari Jadi Selayar	Terlaksananya Pelaksanaan Hari Jadi Selayar			30,000,000			33,000,000
3	Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya Hari Besar Kagamaan			25,000,000			27,500,000
11	Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				20,000,000			22,000,000
1	Pembinaan APB Desa	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan ADD			10,000,000			11,000,000
2	Asistensi Penyusunan APB Desa	Terlaksananya Asistensi APB Desa di Tingkat Kecamatan			10,000,000			11,000,000
12	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				10,000,000			11,000,000
1	Penunjang Pelaksanaan PKK	Peningkatan Kapasitas Bagi Perempuan dalam Bekerja dan Mengelola SDM dan SDA			10,000,000			11,000,000
18	PENGAWASAN				5,348,800,000			5,883,680,000
31	INSPEKTORAT				5,348,800,000			5,883,680,000
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran		100%	705,000,000		100%	775,500,000
1	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, SD air/Listrik	Benteng	12 Bulan	85,000,000	Benteng	12 Bulan	93,500,000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	1. Surat kabar harian 2. Buku Peraturan Perundangan	Benteng	12 Bulan	10,000,000	Benteng	12 Bulan	11,000,000
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan keluar Daerah	Benteng	12 Bulan	300,000,000	Benteng	12 Bulan	330,000,000
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan adm perkantoran	Benteng	12 Bulan	310,000,000	Benteng	12 Bulan	341,000,000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	825,000,000		100%	907,500,000
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Laptop	Benteng	25 unit	350,000,000	Benteng	25 unit	385,000,000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	kendaraan siap dioperasikan	Benteng	1 Tahun	120,000,000	Benteng	1 Tahun	132,000,000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor terpelihara	Benteng	1 Tahun	30,000,000	Benteng	1 Tahun	33,000,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi standar	Benteng	1 Tahun	20,000,000	Benteng	1 Tahun	22,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Persentase perlengkapan kantor dalam kondisi standar	Benteng	1 Tahun	5,000,000	Benteng	1 Tahun	5,500,000
6	Pengadaan Kendaraan Dinas	Mobil	Benteng	1 unit	300,000,000	Benteng	1 unit	330,000,000
3	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional (sesuai bidangnya)		100%	409,000,000		100%	449,900,000
1	Pengembangan Profesi Individual APIP	APIP tersertifikasi sesuai keahlian	Benteng	40 APIP	300,000,000	Benteng	40 APIP	330,000,000
2	In House Training Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya In House Training Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Benteng	3 Kali	96,000,000	Benteng	3 Kali	105,600,000
3	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Terpenuhinya Kebutuhan Keahlian Pangkat PFA	Benteng	20 PFA	13,000,000	Benteng	20 PFA	14,300,000

4	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan Inspektorat		100%	35,900,000		100%	39,490,000
1	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP	Benteng	1 Dokumen	5,000,000	Benteng	1 Dokumen	5,500,000
2	Penyusunan LK SKPD	Dokumen LK		1 Dokumen	5,900,000		1 Dokumen	6,490,000
3	Penyusunan RENSTRA	Dokumen RENSTRA	Benteng	1 Dokumen	15,000,000	Benteng	1 Dokumen	16,500,000
4	Penyusunan RKAP/DPPA	Dokumen RKAP/DPPA						-
5	Penyusunan RKA/DPA SKPD	Dokumen RKA/DPA						-
6	Penyusunan RKA/DPA SKPD Pokok	Dokumen RKA/DPA		1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	5,500,000
7	Penyusunan RKA/DPA SKPD Perubahan	Dokumen RKA/DPA Perubahan	Benteng	1 Dokumen	5,000,000	Benteng	1 Dokumen	5,500,000
5	Pendampingan, Reviu, dan Konsultasi Penyusunan LK OPD	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji sesuai SAP		100%	75,500,000		100%	83,050,000
1	Pendampingan Penyusunan LK OPD	Terlaksananya Pendampingan Laporan Keuanga	Benteng	1 Kali	20,000,000	Benteng	1 Kali	22,000,000
2	Reviu LK SKPD dan LKPD	Terlaksananya Reviu LKPD		1 Kali	55,500,000		1 Kali	61,050,000
6	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengawasan	Terlaksananya Koordinasi APIP dan Pengawasan Internal		100%	150,000,000		100%	165,000,000
1	Pengembangan Koordinasi APIP dan Koordinasi Pengawasan Internal	Terlaksananya Koordinasi APIP dan Koordinasi Pengawasan Interna	Luar Daerah	1 tahun	150,000,000	Luar Daerah	1 tahun	165,000,000
7	Perbaikan praktik profesional	Presentase ketersediaan aturan/SOP pengawasan		100%	5,200,000		100%	5,720,000
1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Dokumen PKPT		1 Dokumen	2,600,000		1 Dokumen	2,860,000
2	Penyempurnaan pedoman/manual dan SOP penyelenggaraan pengawasan APIP	Dokumen Pedoman /manual SOP	Benteng	1 Dokumen	2,600,000	Benteng	1 Dokumen	2,860,000
8	Pengembangan Indikator dan capaian kinerja individu, kegiatan dan program OPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan kategori "baik"		100%	104,150,000		100%	114,565,000
1	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD		27 Obrik	104,150,000		27 Obrik	114,565,000
2	Audit Kinerja	LHA						
9	Peningkatan Peran dan Layanan Inspektorat	Persentase peningkatan layanan inspektorat		100%	50,000,000		100%	55,000,000
1	Pembangunan dan Pengembangan Website Inspektorat	Pemeliharaan/Upgrading Smart Audit dan Siladus	Benteng	2 Website	50,000,000	Benteng	2 Website	55,000,000
10	Pencegahan Korupsi	Terlaksananya Program pencegahan korupsi			283,000,000			311,300,000
1	Penanganan Laporan Gratifikasi	Terlaksananya Penanganan Laporan Gratifikasi	Benteng	1 Tahun	3,000,000	Benteng	1 Tahun	3,300,000
2	Monitoring dan Evaluasi Aksi pencegahan korupsi	LHM		1 LHM	20,000,000		1 LHM	22,000,000
3	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	Benteng	4 Triwulan	35,000,000	Benteng	4 Triwulan	38,500,000
4	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		1 Tahun	5,000,000		1 Tahun	5,500,000
5	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik	Laporan Hasil Evaluasi	Benteng	1 LHE	15,000,000	Benteng	1 LHE	16,500,000
6	Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi	Jumlah OPD yang mencanangkan zona integritas		10 OPD	15,000,000		10 OPD	16,500,000
7	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Profil/nilai reformasi birokrasi Pemda	Benteng	Nilai BB	40,000,000	Benteng	Nilai BB	44,000,000
8	Survey Penilaian Integritas				150,000,000			165,000,000
11	Intensifikasi Penanganan permintaan pemeriksaan/pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat		100%	205,000,000		100%	225,500,000
1	Pemeriksaan Kasus/khusus	Terlaksananya Pemeriksaan Kasus/Khusus	Tersebar	15 Obrik	200,000,000	Tersebar	15 Obrik	220,000,000
2	Penanganan Whistle Blower System	Terlaksananya WBS			5,000,000			5,500,000
12	Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti		100%	100,000,000		100%	110,000,000

1	Gelar Pengawasan Daerah	Terlaksananya gelar wasda	Benteng	1 Kali	80,000,000	Benteng	1 Kali	88,000,000
2	Reviu Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Reviu Tindak Lanjut Temuan Pengawasan		1 Laporan	20,000,000		1 Laporan	22,000,000
								-
13	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa		100%	2,376,050,000		100%	2,613,655,000
1	Pemeriksaan Regular/PKPT	Terlaksananya Pemeriksaan Regular/PKPT	Tersebar	122 Obrik	1,253,700,000	Tersebar	122 Obrik	1,379,070,000
2	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Terlaksananya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu			398,150,000			437,965,000
3	Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Terlaksananya Pemeriksaan Penyelenggaraan Dana BOS	Tersebar	40 Obrik	189,000,000	Tersebar	40 Obrik	207,900,000
4	Reviu RKA	Terlaksananya Reviu RKA	Benteng	8 LHR	71,000,000	Benteng	8 LHR	78,100,000
5	Reviu RKAP	Terlaksananya Reviu RKA Perubahan	Benteng	8 LHR	71,000,000	Benteng	8 LHR	78,100,000
6	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kepulauan Selayar	Terlaksananya Tugas Saberpungli	Tersebar	1 Tahun	75,000,000	Tersebar	1 Tahun	82,500,000
7	Pemeriksaan Serentak Kas Opname	Terlaksananya Pemeriksaan Serentak Kas Opname	Benteng	44 Obrik	68,500,000	Benteng	44 Obrik	75,350,000
8	Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan	Benteng	4 Kali	128,500,000	Benteng	4 Kali	141,350,000
9	Reviu APB Desa	Terlaksananya Reviu APB Desa	Tersebar	16 LHR	96,200,000	Tersebar	16 LHR	105,820,000
10	Pemeriksaan Fisik Kepulauan	LHP						-
11	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	LHE		4 LHE	25,000,000		4 LHE	27,500,000
14	Implementasi SPIP di Lingkungan OPD	Persentase Implementasi SPIP di lingkungan OPD		100%	25,000,000		100%	27,500,000
1	Evaluasi SPIP	OPD yang menerapkan SPIP	Benteng	10 OPD	25,000,000	Benteng	10 OPD	27,500,000
18	PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5,200,014,988			5,713,297,479
29	12. BAPPELITBANGDA				5,200,014,988			5,713,297,479
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran		100%	1,098,300,350		100%	1,208,130,385
1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	a. Output : Jasa Komunikasi sumber Daya air dan listrik terbayarkan b. Outcome : Tersedianya Kebutuhan Telekomunikasi dan Sumber Daya air	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Bulan	173,893,702	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Bulan	191,283,072
								-
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	a. Output : Jumlah bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia b. Outcome : Terpenuhi Informasi melalui surat kabar dan majalah	Kabupaten Kepulauan Selayar	13 Koran/Majalah	23,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	13 Koran/Majalah	25,300,000
								-
3	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	a. Output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. b. Outcome : Terkoordinir dan terkonsultasinya Kegiatan Perencanaan	Kabupaten, Prov dan Nasional	1 Tahun	407,796,298	Kabupaten, Prov dan Nasional	1 Tahun	448,575,928
								-
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	a. Output : Tersedianya Penunjang Administrasi Perkantoran b. Outcome : Lancarnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Bulan	493,610,350	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Bulan	542,971,385
								-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Keterpenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	457,880,936		100%	503,669,030
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	a. Output : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan b. Outcome : Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Kepulauan Selayar	6 Unit	59,970,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	6 Unit	65,967,000
								-
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	a. Output : Jumlah Peralatan gedung Kantor yang diadakan b. Outcome : Tersedianya Peralatan Gedung kantor	Kabupaten Kepulauan Selayar	16 Unit	172,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	16 Unit	189,200,000
								-

3	Pengadaan Mobileur	a. Output : Jumlah mobilier Mobilier Kantor yang diadakan b. Outcome : Tersedianya Mobilier Kantor	Kabupaten Kepulauan Selayar	40 Unit	40,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	40 Unit	44,000,000 -
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	a. Output : Luas Gedung kantor yang di perbaiki b. Outcome : Meningkatnya usia pakai bangunan gedung kantor	Kabupaten Kepulauan Selayar	300 m2	28,500,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	300 m2	31,350,000 -
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	a. Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional b. Outcome : Meningkatnya usia pakai,Keamanan dan Kenyamanan Kendaraan Dinas	Kabupaten Kepulauan Selayar	29 Unit	124,910,936	Kabupaten Kepulauan Selayar	29 Unit	137,402,030 -
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	a. Output : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor b. Outcome : Menambah masa mamfaat Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Kepulauan Selayar	15 Unit	15,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	15 Unit	16,500,000 -
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	a. Output : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor b. Outcome : Meningkatnya usia pakai Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Unit	15,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Unit	16,500,000 -
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Membeliur	a. Output : Terpeliharanya Mobilier Kantor b. Outcome : Menambah masa mamfaat Mobilier Kantor	Kabupaten Kepulauan Selayar	5 Unit	2,500,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	5 Unit	2,750,000 -
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		100%	91,554,175		100%	98,990,585
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	a. Output : Laporan Keuangan b. Outcome : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	17,190,075	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	17,190,075 -
2	Penatausahaan Keuangan	a. Output : Laporan RPK dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan b. Outcome : Terlaksananya Penatausahaan Keuangan	Kabupaten Kepulauan Selayar	24 Laporan	28,864,100	Kabupaten Kepulauan Selayar	24 Laporan	31,750,510 -
3	Penyusunan SOP Bappelitbangda	a. Output : Tersusunnya Dokumen SOP Bappelitbangda b. Outcome : Dokumen SOP Bappelitbangda	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	5,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	5,500,000 -
4	Penyusunan RKA/DPA Bappelitbangda	a. Output : Tersusun RKA/ DPA pokok 2021 dan RKA/DPA Perubahan 2020 Bappelitbangda b. Outcome : Dokumen RKA/ DPA pokok dan perubahan	Kabupaten Kepulauan Selayar	4 Dokumen	17,500,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	4 Dokumen	19,250,000 -
5	Penatausahaan Asset	a. Output : Terkelolanya Aset-Aset dengan baik b. Outcome : Laporan Data Asset.	Kabupaten Kepulauan Selayar	2 Laporan	15,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	2 Laporan	16,500,000 -
6	Penyusunan LAKIP BAPPELITBANGDA	a. Output : Tersusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah b. Outcome : Dokumen LAKIP.	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	8,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	8,800,000 -
4	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan		100%	145,000,000		100%	159,500,000
1	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	a. Output : Jumlah Koordinasi/Pertemuan Kerjasama antar Daerah yang diikuti b. Outcome: Nota Kesepakatan (Mou) Bentuk dan obyek Kerjasama antar Daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar	9 Kali	50,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	9 Kali	55,000,000 -
2	Pembinaan Program Kabupaten Sehat	a. Output : Jumlah tatanan program Kabupaten Sehat yang dipenuhi sesuai kriteria yang ditetapkan b. Outcome: Selayar ikut dalam penilaian Kabupaten/kota Sehat	Kabupaten Kepulauan Selayar	Status Wistara	95,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	Status Wistara	104,500,000 -

5	Program Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan.		100%	315,016,167		100%	346,517,784
1	Pembinaan dan Pengembangan Teknologi	a. Output :Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Teknologi b.Outcome: Terwujudnya Pengembangan dan Pemamfaatan Teknologi Tepat Guna.		Masyarakat dan Aparatur dan Pengaplikasian Inovasi/Teknologi Tepat Guna	70,050,000		Masyarakat dan Aparatur dan Pengaplikasian Inovasi/Teknologi Tepat Guna	77,055,000
2	Penelitian dan pengembangan potensi air tanah	a.Output: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Potensi Air Tanah Berbasis Geolistrik di Kabupaten Kepulauan Selayar b.Outcome: Teridentifikasinya Potensi Air Tanah Berbasis Geolistrik.	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	106,760,570	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	117,436,627
3	Survey Kepuasan Masyarakat tentang penyelenggaraan Pemerintahan	a. Output : Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar b. Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar.	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	138,205,597	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	152,026,157
6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan		100%	120,000,000		100%	132,000,000
1	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	a. Output : Jumlah Aparat Perencana yang di tingkatkan kapasitasnya b. Outcome : Presentase Aparat Perencana yang memahami perencanaan	Kabupaten Kepulauan Selayar	11 Org	120,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	11 Org	132,000,000
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.		100%	2,166,063,360		100%	2,382,669,696
1	Penyusunan rancangan dan Penetapan RKPDP	a. Output : Jumlah Dokumen RKPDP Tahun 2021 yang tersusun dan ditetapkan b. Outcome : Dokumen RKPDP Tahun 2021 yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu		1 Dokumen	113,800,000		1 Dokumen	125,180,000
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	a. Output : Berta Acara Kesepakatan Hasil Musrebang RKPDP b. Outcome : Jumlah Komponen Keterlibatan Masyarakat dalam Forum Pelaksanaan Musrenbang	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	90,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	99,000,000
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBN, APBD Prov. APBD Kab. DAK	a. Output : Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DAK b. Outcome : Penyusunan Rencana Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang Tepat Sasaran		18 Kali/ 2 Laporan	175,000,000		18 Kali/ 2 Laporan	192,500,000
4	Musrenbang Provinsi, Regional dan Nasional	a. Output : Jumlah Pelaksanaan Musrenbang yang di ikuti b. Outcome : Presentase usulan dari Kabupaten Kepulauan Selayar yang diakomodir pada APBD Provinsi, dan APBN	Provinsi/Nasional	5 kali	125,000,000	Provinsi/Nasional	5 kali	137,500,000
5	Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Output : Jumlah Koordinasi /Pertemuan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah b. Outcome : Tersinkronisasinya program-program Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Selayar	15 Kali 0.112328055	236,570,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	15 Kali 0.112328055	260,227,000
6	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	a. Output : Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD tahun 2021 yang tersusun b. Outcome : Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 yang tersusun dan di tetapkan tetap waktu	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	60,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	66,000,000
7	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	a. Output : Jumlah Dokumen PPAS tahun 2021 yang tersusun	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	63,800,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	70,180,000

		b. Outcome : Penyusunan Dokumen PPATahun 2021 yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu.						-
8	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	a. Output : Jumlah Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2020 yang tersusun b. Outcome : Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 yang Tersusun dan ditetapkan tepat waktu	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	50,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	55,000,000
								-
9	Penyusunan Perubahan PPAS	a. Output : Jumlah Dokumen Perubahan PPAS APBD Tahun 2020 yang tersusun b. Outcome : Dokumen Perubahan PPAS APBD Tahun 2020 yang Tersusun dan ditetapkan Tepat Waktu	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	55,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	60,500,000
								-
10	Monitoring Pelaksanaan Musrebang Kecamatan	Teridentifikasinya berbagai masukan dan aspirasi masyarakat						-
								-
11	Persiapan Penyusunan RPJMD 2021-2024	a. Output : Jumlah Dokumen Persiapan Awal Penyusunan RPJMD 2021-2024 b. Outcome : Dokumen Persiapan Awal Penyusunan RPJMD 2021-2024.		1 Dokumen	107,000,000		1 Dokumen	117,700,000
								-
12	Penyusunan LAKIP Kabupaten	a. Output : Lakip Kabupaten Tersusun tepat waktu b. Outcome : Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	55,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	60,500,000
								-
13	Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) KKS	a. Output : Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar b. Outcome : % penduduk miskin tertangani	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	31,500,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	34,650,000
								-
14	Pemuktakhiran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	a. Output : Data dan informasi Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar b. Outcome : 3 (Tiga) Kelompok Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah.	Kabupaten Kepulauan Selayar	3 Kelompok data	92,700,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	3 Kelompok data	101,970,000
								-
15	Publikasi Perstatiskan	a. Output : Terpublikasinya data dan informasi Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 b. Outcome : Data Statistik untuk Kepentingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar	150 Buku	46,243,360	Kabupaten Kepulauan Selayar	150 Buku	50,867,696
								-
16	Evaluasi RKPD	a. Output : Laporan Hasil Evaluasi RKPD b. Outcome : Tersedia Bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan Daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	25,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	27,500,000
								-
17	Penyusunan LKJP Bupati	a. Output : Tersusun LKJP Bupati Tahun 2019 b. Outcome : Tersedia Bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan Daerah		1 Dokumen	16,850,000		1 Dokumen	18,535,000
								-
18	Penyusunan LPPD dan RLPPD KKS	a. Output : Dokumen LPPD dan RLPPD Kabupaten b. Outcome : Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	30,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	33,000,000
								-
19	Asistensi Dokumen LAKIP SKPD	a. Output : Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di Asistensi LAKIPnya b. Outcome : Indeks persepsi Korupsi	Kabupaten Kepulauan Selayar	37 OPD 1 dokumen	30,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	37 OPD 1 dokumen	33,000,000
								-
20	Penyusunan Perubahan RKPD	a. Output : Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 yang tersusun dan ditetapkan b. Outcome : Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu		1 Dokumen	50,000,000		1 Dokumen	55,000,000
								-
21	Koordinasi Percepatan Penyediaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kabupaten Kepulauan Selayar	a. Output : Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah yang dilaksanakan b. Outcome : Database penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Kepulauan Selayar	Kabupaten Kepulauan Selayar	43 Kali/1 Lap	26,600,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	43 Kali/1 Lap	29,260,000
								-

22	Koordinasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	a. Output : Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) b. Outcome : Laporan Pelaksanaan dan Perencanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Kabupaten Kepulauan Selayar	34 Kali/1 Lap	25,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	34 Kali/1 Lap	27,500,000 -
23	Koordinasi Pelaksanaan/Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	a. Output : Jumlah Koordinasi dan Monitoring Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dilaksanakan b. Outcome : Laporan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD)	Kabupaten Kepulauan Selayar	73 Kali / 1 Lap	85,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	73 Kali / 1 Lap	93,500,000 -
24	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Database penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Kepulauan Selayar	Kabupaten Kepulauan Selayar	50 Kali / 1 Lap	60,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	50 Kali / 1 Lap	66,000,000 -
25	Pemeran Pembangunan	a. Output : Pemerintah Daerah Ikut Serta Dalam Pameran Tingkat provinsi /Nasional b. Outcome : Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Provinsi/Nasional	1 Kali	125,000,000	Provinsi/Nasional	1 Kali	137,500,000 -
26	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan daerah	a. Output : Jumlah Koordinasi Pengendalian Pembangunan yang dilaksanakan. b. Outcome : Meningkatnya Kinerja Pengendalian Pembangunan.	Kabupaten Kepulauan Selayar	42 kali/1 Laporan	30,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	42 kali/1 Laporan	33,000,000 -
27	Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	a. Output : Terlaksananya koordinasi dan Pendataan Pemukiman dan Kawasan Kumuh Pedesaan b. Outcome : Laporan pendataan dan perencanaan kawasan kumuh Perdesaan	Kabupaten Kepulauan Selayar	32 Kali/1 Lap	35,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	32 Kali/1 Lap	38,500,000 -
28	Pengembangan dan penerapan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik	a. Output : Jumlah waktu penerapan perencanaan berbasis elektronik b. Outcome : Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Internet	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 bulan/ 2 Dokumen	326,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 bulan/ 2 Dokumen	358,600,000 -
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi		100%	111,600,000		100%	122,760,000
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	a. Output : Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi b. Outcome : Presentase Indikator Sasaran RPJMD bidang Ekonomi yang terealisasi	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Laporan	35,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Laporan	38,500,000 -
2	Penyusunan Basis Data Perencanaan Bidang Ekonomi	Tersedia bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan daerah			-			- -
3	Koordinasi Pemamfaatan Pajak Rokok (DBH Pajak Rokok)	a. Output : Terlaksananya Koordinasi Pemamfaatan Pajak rokok (DBH) Pajak Rokok. b. Outcome : Terlaksananya Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok Bagi OPD Pengguna DBH Pajak Rokok	Kabupaten Kepulauan Selayar	31 kali / 1 Laporan	26,600,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	31 kali / 1 Laporan	29,260,000 -
4	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Bidang Ekonomi	Tersedia bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Laporan	20,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Laporan	22,000,000 -
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi	a. Output : Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi b. Outcome : Tersedia Bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan Daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Laporan	30,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Laporan	33,000,000 -
9	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya yang berkualitas.		100%	223,200,000		100%	245,520,000
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	a. Output : Laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan Sosial Budaya	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Laporan	50,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Laporan	55,000,000

		b. Outcome : Tersedia Bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan Daerah							-
2	Fasilitas Perencanaan Anggaran Berbasis Gender								-
3	Koordinasi Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting	a. Output : 1) Tersedianya Dokumen Analisis Situasi Program Penurunan Stunting di Daerah, 2) Tersedianya Dokumen Strategi Pencegahan dan Penanganan Stunting di Daerah. 3) Tersedianya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan disertai Penganggaran dalam Pelaksanaan Intervensi Spesifik dan sensitif 4). Terlaksananya Rembuk Santing. b. Outcome : % OPD yang melaksanakan program/ Kegiatan terintegrasi dalam penangananan dan Pencegahan Stunting.	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	133,200,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen		146,520,000
4	Penyusunan Basis data Perencanaan Bidang Sosial budaya	Tersedia bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan daerah							-
5	Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Terpencil, Terdepan terluar dan Pulau-pulau Kecil	a. Output : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pulau-pulau kecil b. Outcome : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur pada Desa Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pulau-pulau kecil	Kabupaten Kepulauan Selayar	11 Kali/ 1 Laporan	40,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	11 Kali/ 1 Laporan		44,000,000
10	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya Perencanaan Prasarana Wilayah dan terkendalinya Pemamfaatan SDA		100%	331,600,000		100%		359,760,000
1	Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	a. Output : Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup b. Outcome : Tersedianya Data tentang potensi Sumber daya alam dan lingkungan hidup dan tersedianya konsep pengendalian SDA dan LH lebih terkendali	Kabupaten Kepulauan Selayar	51 Kali / 1 Lap.	50,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	51 Kali / 1 Lap.		50,000,000
2	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan/Gedung	a. Output : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan bangunan/gedung b. Outcome : Data Base dan perencanaan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan Gedung	Kabupaten Kepulauan Selayar	46 kali / 1 Lap	55,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	46 kali / 1 Lap		60,500,000
3	Koordinasi Program Sanitasi	a. Output : Terlaksananya Koordinasi Program Sanitasi b. Outcome : Terlaksananya Program Strategi Sanitasi di Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Kali / 1 Laporan	21,600,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	12 Kali / 1 Laporan		23,760,000
4	Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	a. Output : 1. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 2. Terlaksananya program Pamsimas III Tahun 2020 b. Outcome : Tersedianya Data tentang pelaksanaan program Pamsimas III Tahun 2020	Kabupaten Kepulauan Selayar	55 Kali/1 Lap.	60,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	55 Kali/1 Lap.		66,000,000
5	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	a. Output : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang b. Outcome : Fasilitasi Review Dokumen Tata ruang Wilayah Kabupaten	Kabupaten Kepulauan Selayar	25 Kali/1 Lap	40,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	25 Kali/1 Lap		44,000,000
6	Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW)	a. Output : Terlaksananya koordinasi dan monitoring Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah b. Outcome : Data Base dan perencanaan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	Kabupaten Kepulauan Selayar	30 kali/1 Lap	30,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	30 kali/1 Lap		33,000,000
7	Koordinasi Forum Pengelolaan Cagar Biosfer Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar	a. Output : Jumlah koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer Takabonerate Kab. Kepulauan Selayar b. Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Cagar Biosfer Takabonerate Kab. Kepulauan Selayar	Kabupaten Kepulauan Selayar	13 Kali / 1 Laporan	75,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	13 Kali / 1 Laporan		82,500,000
11	Program Penguatan Kapasitas Pranata LITBANG	Meningkatnya Kapasitas Pranata LITBANG		100%	94,800,000		100%		104,280,000
1	Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Inovasi Daerah	a. Output : Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi Penguatan Inovasi Daerah,	Jakarta, Makassar, Selayar	16 kali	39,800,000	Jakarta, Makassar, Selayar	16 kali		43,780,000

		b. Outcome : Terwujudnya Inovasi daerah yang berkelanjutan dan bersinergi dengan rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar						-
2	Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Output : Ikut serta dalam RAKORDA LITBANG Tk. Nasional dan Provinsi, Terlaksananya koordinasi perencanaan kelitbang daerah, - Terlaksananya pelayanan izin/keterangan penelitian b. Outcome : Persen Jumlah Program / Kegiatan yang telah disinkronkan dan Bersinergi dengan Program / Kegiatan Provinsi dan Nasional	Jakarta, Makassar, Selayar	4 OK 10 OK 1 PAKET	55,000,000	Jakarta, Makassar, Selayar	4 OK 10 OK 1 PAKET	60,500,000
								-
12	Program Informasi Ristek Daerah	Meningkatnya Data dan Informasi Teknologi		100%	45,000,000		100%	49,500,000
1	Penunjang Operasional Website Bappelitbangda.	a. Output : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah b. Outcome : Tersedianya Data dan informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Website	30,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Website	33,000,000
								-
2	Diskusi Isu-isu Aktual Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	a. Output : Terlaksananya Dialog/Diskusi Terkait Isu-Isu Aktual Pembangunan Daerah di Kab. Kepulauan Selayar b. Outcome : Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Mengenai Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 kali/1 Laporan	15,000,000	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 kali/1 Laporan	16,500,000
18	KEUANGAN				11,993,352,914			13,192,688,205
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				11,993,352,914			13,192,688,205
1	Program Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	6,750,000,000		100%	7,425,000,000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya air bersih, lancarnya komunikasi dan listrik	BPKPAD	100%	4,630,000,000	BPKPAD	100%	5,093,000,000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKPAD	100%	10,000,000	BPKPAD	100%	11,000,000
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	jumlah kunjungan rapat/koordinasi dalam dan luar daerah	BPKPAD	100%	350,000,000	BPKPAD	100%	385,000,000
4	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	BPKPAD	100%	1,760,000,000	BPKPAD	100%	1,936,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur			393,196,947			432,516,642
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	BPKPAD	100%	22,000,000	BPKPAD	100%	24,200,000
2	Pengadaan Meublier	jumlah Meubeler yang diadakan	BPKPAD	100%	23,196,947	BPKPAD	100%	25,516,642
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	BPKPAD	100%	168,000,000	BPKPAD	100%	184,800,000
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	BPKPAD		-	BPKPAD		-
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	BPKPAD	100%	20,000,000	BPKPAD	100%	22,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	BPKPAD	12 Bulan	135,000,000	BPKPAD	12 Bulan	148,500,000
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	BPKPAD	12 Bulan	25,000,000	BPKPAD	12 Bulan	27,500,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kmpensi sesuai Bidangny		100%	320,000,000		100%	352,000,000
1	Pendidikan & Pelatihan Formal & Non Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan	BPKPAD	100%	20,000,000	BPKPAD	100%	22,000,000
2	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Acrual	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan bebrbasis acrual	BPKPAD	1 Kegiatan	100,000,000	BPKPAD	1 Kegiatan	110,000,000
3	Pengembangan SDM Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah pelaksanaan pengembangan SDM Pengelolaan Aset Daerah	BPKPAD	1 Kegiatan	200,000,000	BPKPAD	1 Kegiatan	220,000,000
4	Sosialisasi Hibah dan Bantuan Sosial		BPKPAD		-	BPKPAD		-
5	Pengembangan SDM Aparatur Pendapatan	Persentase peningkatan kapasitas Aparatur Pendapatan	BPKPAD			BPKPAD		

4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-			-
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakain khusus hari-hari tertentu pegawai yang disediakan	BPKPAD		-	BPKPAD		-
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai			12 Bulan	125,000,000		12 Bulan	137,500,000
1	Peningkatan Penatausahaan Gaji OPD	Jumlah gaji OPD yang dikelola	BPKPAD	12 Bulan	125,000,000	BPKPAD	12 Bulan	137,500,000
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1 Laporan	89,135,967		1 Laporan	98,049,564
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	BPKPAD	1 Laporan	45,000,000	BPKPAD	1 Laporan	49,500,000
2	Penyusunan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan	BPKPAD	12 Laporan	26,135,967	BPKPAD	12 Laporan	28,749,564
3	Penyusunan Lakip	Jumlah Lakip yang tersusun	BPKPAD	1 Laporan	10,000,000	BPKPAD	1 Laporan	11,000,000
4	Penyusunan RKA DPA BPKPAD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	BPKPAD	100%	8,000,000	BPKPAD	100%	8,800,000
5	Penyusunan Renstra / Reviu Renstra	Jumlah Laporan Renstra yang tersusun	BPKPAD		-	BPKPAD		-
6	Penyusunan Renja / RKT	Jumlah Renja yang tersusun	BPKPAD		-	BPKPAD		-
7	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	Jumlah Laporan SPI yang tersusun	BPKPAD		-	BPKPAD		-
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100%	4,191,020,000		100%	4,610,122,000
1	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2020	Waktu Penyusunan APBD dan Jumlah Buku yang dicetak	BPKPAD	5 Bulan	100,000,000	BPKPAD	5 Bulan	110,000,000
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2020	Jumlah dokumen PERDA	BPKPAD	1 Perda	200,000,000	BPKPAD	1 Perda	220,000,000
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019	Waktu penyusunan rancangan Perda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2019	BPKPAD	1 Perda	265,000,000	BPKPAD	1 Perda	291,500,000
4	Pendampingan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan pendampingan	BPKPAD	1 Kegiatan	25,000,000	BPKPAD	1 Kegiatan	27,500,000
5	Asistensi Penyusunan RKA-SKPD 2021	Jumlah asistensi dalam penyusunan RKA-SKPD	BPKPAD	59 SKPD	20,000,000	BPKPAD	59 SKPD	22,000,000
6	Asistensi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD 2020	Jumlah asistensi dalam penyusunan perubahan RKA-SKPD	BPKPAD	59 SKPD	20,000,000	BPKPAD	59 SKPD	22,000,000
7	Verifikasi DPA-SKPD 2021	Jumlah DPA-SKPD TA. 2021 yang diverifikasi	BPKPAD	59 SKPD	20,000,000	BPKPAD	59 SKPD	22,000,000
8	Verifikasi DPPA-SKPD TA. 2020	Jumlah DPPA-SKPD TA. 2020 yang diverifikasi	BPKPAD	59 SKPD	20,000,000	BPKPAD	59 SKPD	22,000,000
9	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi Keuangan Daerah			-			-
10	Koordinasi, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian APBD	Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian APBD	BPKPAD	100%	200,000,000	BPKPAD	100%	220,000,000
11	Penyelenggaraan MP-TGR	Terselenggaranya sidang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	BPKPAD	24 Kali	83,500,000	BPKPAD	24 Kali	91,850,000
12	Pengelolaan Kas Umum Daerah	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	BPKPAD	12 Bulan	20,000,000	BPKPAD	12 Bulan	22,000,000
13	Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA. 2021	Dokumen Perda tentang APBD TA. 2021	BPKPAD	1 Dokumen	200,000,000	BPKPAD	1 Dokumen	220,000,000
14	Koordinasi Pengelolaan dan Pengawasan Dana Transfer	Terlaksananya pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	BPKPAD	100%	46,000,000	BPKPAD	100%	50,600,000
15	Koordinasi Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Sosial	Terlaksananya Pengelolaan & Pengawasan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	BPKPAD	100%	70,000,000	BPKPAD	100%	77,000,000
16	Pengelolaan Dana JKK dan JKM	Terlaksananya Pengelolaan dan JKK & JKM	BPKPAD	12 Kali	40,000,000	BPKPAD	12 Kali	44,000,000
17	Penyusunan Laporan Keuangan Periodik Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan keuangan periodik pemerintah daerah	BPKPAD	1 Laporan	30,000,000	BPKPAD	1 Laporan	33,000,000
18	Verifikasi Pengajuan SPP/SPM SKPD	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Pengajuan SPP/SPM SKPD	BPKPAD	100%	83,000,000	BPKPAD	100%	91,300,000
19	Evaluasi dan Pelaporan (Rekonsiliasi) Realisasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan (rekonsiliasi) realisasi keuangan SKPD	BPKPAD	1 Kali	60,000,000	BPKPAD	1 Kali	66,000,000
20	Peningkatan Penatausahaan Penerbitan SPD dan SP2D	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan SPD & SP2D	BPKPAD	100%	70,000,000	BPKPAD	100%	77,000,000
21	Penyusunan Saldo Neraca Tahun Berjalan	Jumlah kegiatan penyusunan Sald Neraca	BPKPAD	100%	40,000,000	BPKPAD	100%	44,000,000
22	Kompilasi Data Aplikasi Neraca Daerah	Jumlah pertemuan pengumpulan data aplikasi Penerimaan dan pengeluaran	BPKPAD	100%	45,000,000	BPKPAD	100%	49,500,000
23	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Penerbitan SP2D	Terlaksananya kegiatan pengelolaan aplikasi penerbitan SP2D	BPKPAD	100%	45,000,000	BPKPAD	100%	49,500,000

24	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Akuntansi Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan aplikasi akuntansi daerah	BPKPAD	100%	20,000,000	BPKPAD	100%	22,000,000
25	Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)/ Aset Milik Daerah Pemerintah Kab. Kep. Selayar	Jumlah barang milik daerah yang telah direkonsiliasi	BPKPAD	70%	180,000,000	BPKPAD	70%	198,000,000
26	Penyusunan RKBU dan RKPBU	Jumlah buku yang disusun	BPKPAD	47 Buku	20,000,000	BPKPAD	47 Buku	22,000,000
27	Penyusunan RKPBU	Jumlah buku yang disusun			-			-
28	Pelaksanaan Penghapusan/ Penjualan BMD/ Aset	Jumlah Barang Daerah yang dihapus/ dijual	BPKPAD	100 Unit	47,500,000	BPKPAD	100 Unit	52,250,000
29	Rekonsiliasi Data Aset Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan rekonsiliasi data aset daerah	BPKPAD	2 Kali	20,000,000	BPKPAD	2 Kali	22,000,000
30	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang ditatausahakan	BPKPAD	80%	75,000,000	BPKPAD	80%	82,500,000
31	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (DKMD)	Jumlah barang yang dibutuhkan dalam 1 tahun anggaran	BPKPAD	100%	25,000,000	BPKPAD	100%	27,500,000
32	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Terlaksananya pengelolaan melalui aplikasi	BPKPAD	100%	30,000,000	BPKPAD	100%	33,000,000
33	Verifikasi Data Aset Tetap Tahun Anggaran Berjalan	Jumlah aset tetap yang diverifikasi setiap tahun	BPKPAD	100%	15,000,000	BPKPAD	100%	16,500,000
34	Inventarisasi Aset Pemerintah Kab. Kep. Selayar	Terlaksananya sensus barang milik daerah	BPKPAD	70%	69,500,000	BPKPAD	70%	76,450,000
35	Monitoring dan Evaluasi Aset Tetap dan KIR SKPD	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	BPKPAD	100%	10,000,000	BPKPAD	100%	11,000,000
36	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Persediaan Barang	Terlaksananya pengelaaan aplikasi persediaan	BPKPAD	100%	20,000,000	BPKPAD	100%	22,000,000
37	Validasi Data Aset Tetap Milik Pemerintah Kab. Kep. Selayar (sub kelompok jalan, irigasi dan jaringan)	Jumlah jalan , irigasi dan jaringan yang tervalidasi	BPKPAD	30%	40,000,000	BPKPAD	30%	44,000,000
38	Kompilasi Data Neraca Aset Tetap SKPD	Terlaksananya kompilasi neraca aset tetap semua OPD	BPKPAD	100%	20,000,000	BPKPAD	100%	22,000,000
39	Pengawasan dan Penertiban Pajak Daerah	persentase tingkat kepatuhan wajib pajak	BPKPAD	100%	30,000,000	BPKPAD	100%	33,000,000
40	Peningkatan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah	Persentase tingkat kepatuhan pemungutan pajak dan retribusi	BPKPAD	100%	37,280,000	BPKPAD	100%	41,008,000
41	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem MAPATDA	Jumlah waktu pemeliharaan sistem MAPATDA	BPKPAD	100%	40,000,000	BPKPAD	100%	44,000,000
42	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD	100%	140,000,000	BPKPAD	100%	154,000,000
43	Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah lokasi intensifikasi pajak dan retribusi daerah			-			-
44	Pengelolaan Mess Pemda dan Gedung Juang 45	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan	BPKPAD	100%	40,000,000	BPKPAD	100%	44,000,000
45	Biaya Cetak Kertas Berharga/ Karcis Retribusi	Persentase peningkatan pelayanan retribusi			-			-
46	Evaluasi dan Rekonsiliasi Kertas Berharga	Persentase peningkatan pelayanan retribusi	BPKPAD	100%	30,000,000	BPKPAD	100%	33,000,000
47	Penyediaan Kertas Berharga/ Karcis Retribusi	Persentase peningkatan pelayanan retribusi	BPKPAD	100%	80,000,000	BPKPAD	100%	88,000,000
48	Peningkatan Koordinasi, Klarifikasi, dan Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah koordinasi, klarifikasi, monitoring, evaluasi dan penagihan PBB-P2 & BPHTB	BPKPAD	100%	62,240,000	BPKPAD	100%	68,464,000
49	Pemeliharaan Aplikasi PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah waktu pemeliharaan aplikasi PBB-P2 dan BPHTB	BPKPAD	100%	30,000,000	BPKPAD	100%	33,000,000
50	Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah pendaftar dan lokasi pendataan PBB-P2 dan BPHTB	BPKPAD	100%	40,000,000	BPKPAD	100%	44,000,000
51	Pembuatan Peta Blok PBB-P2	Jumlah peta blok PBB-P2	BPKPAD	100%	170,000,000	BPKPAD	100%	187,000,000
52	Penunjang Operasional Unit Pelayanan PBB dan BPHTB	Terlaksananya kegiatan penunjang operasional unit pelayanan PBB & BPHTB	BPKPAD	100%	60,000,000	BPKPAD	100%	66,000,000
53	Peningkatan Pengawasan & Penertiban Penyaluran SPPT PBB-P2	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan & penertiban penyaluran SPPT PBB-P2	BPKPAD	1 Kali	30,000,000	BPKPAD	1 Kali	33,000,000
54	Pengadaan Kertas SPPT PBB-P2	Jumlah kertas SPPT, STTS dan TTS PBB-P2	BPKPAD	100%	30,000,000	BPKPAD	100%	33,000,000
55	Fasilitasi Penyusunan Laporan Aset Tetap	Tersusunnya laporan aset tetap tahun anggaran berjalan	BPKPAD	100%	95,000,000	BPKPAD	100%	104,500,000
56	Verifikasi Penghapusan Utang Pihak Ketiga	Tervalidasinya Utang Pihak Ketiga	BPKPAD	100%	20,000,000	BPKPAD	100%	22,000,000
57	Peningkatan Pencairan SKPD dengan Kartu Kontrol	Tersedianya kartu kontrol pencairan SP2D	BPKPAD	100%	27,000,000	BPKPAD	100%	29,700,000
58	Identifikasi Piutang Yang Kadaluarsa	Kepastian piutang tidak dapat ditagih, kadaluarsa dandihapus			-			-
59	Pengelolaan Sistem Aplikasi PAD	Persentase peningkatan Aplikasi PAD			-			-
60	Verifikasi Dokumen Hibah dan Bansos	Jumlah prpsal hibah dan bansos yang diverifikasi	BPKPAD	1 Bulan	30,000,000	BPKPAD	1 Bulan	33,000,000
61	Verifikasi DPA-SKPD Tahun 2020	Jumlah DPA-SKPD TA. 2020 yang diverifikasi	BPKPAD	1 Bulan	10,000,000	BPKPAD	1 Bulan	11,000,000
62	Inentifikasi Subjek/Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Penambahan data wajib pajak/subjek pajak	BPKPAD	100%	50,000,000	BPKPAD	100%	55,000,000
63	Penyusunan Peraturan Pelaksanaan PERDA BMD	Jumlah peraturan perda yang disusun	BPKPAD	100%	10,000,000	BPKPAD	100%	11,000,000
64	Penyusunan Standar Biaya Masukan	Dokumen standar biaya masukan			20,000,000			22,000,000
65	Identifikasi Piutang Kadaluarsa PBB-P2	Penghapusan piutang PBB-P2			10,000,000			11,000,000
66	Permutakhiran Data Objek PBB Kecamatan Daratan	Akuasi data PBB-P2	BPKPAD	100%	30,000,000	BPKPAD	100%	33,000,000
67	Fasilitasi dan Penyelesaian Aset Tetap Bermasalah Berdasarkan LHP	Jumlah aset tetap bermasalah yang diselesaikan	BPKPAD	100%	30,000,000	BPKPAD	100%	33,000,000

68	Sensus Barang	Terlaksananya inventarisasi keseluruhan (Sensus) atas barang milik Pemerintah	BPKPAD	100%	30,000,000	BPKPAD	100%	33,000,000
69	Inentifikasi Retribusi untuk Peningkatan PAD	Peningkatan Pendapatan Daerah			20,000,000			22,000,000
70	Penyediaan Jasa Layanan Cloud Web Simda Online				15,000,000			16,500,000
71	Evaluasi Perbup tentang Analisis Standar Biaya Non Fisik	Revisi ASB			20,000,000			22,000,000
72	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		BPKPAD	100%	70,000,000	BPKPAD	100%	77,000,000
73	Pengelolaan PAD				50,000,000			55,000,000
74	Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak				20,000,000			22,000,000
75	Pengelolaan, Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen SPTPD				20,000,000			22,000,000
76	Pengembangan Aplikasi Perekaman dan Pembayaran PBB P2 dan BPHTB		BPKPAD	100%	200,000,000	BPKPAD	100%	220,000,000
77	Pengelolaan, Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD)				40,000,000			44,000,000
78	Monitoring dan Evaluasi PAD	Jumlah Evaluasi yang dilaksanakan	BPKPAD	100%	90,000,000	BPKPAD	100%	99,000,000
79	Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah lokasi intensifikasi pajak dan retribusi daerah	BPKPAD	100%	20,000,000	BPKPAD	100%	22,000,000
80	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendapatan		BPKPAD	100%	150,000,000	BPKPAD	100%	165,000,000
8	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	81 Desa			125,000,000		81 Desa	137,500,000
1	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Desa	Persentase pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	BPKPAD	1 Bulan	25,000,000	BPKPAD	1 Bulan	27,500,000
2	Verifikasi SPP APBDesa	Persentase pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	BPKPAD	1 Bulan	30,000,000	BPKPAD	1 Bulan	33,000,000
3	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi SIMDA Desa	Terlaksananya pengelolaan aplikasi SIMDA Desa			-			-
4	Koordinasi, Pengelolaan dan Pelaporan APB Desa	Jumlah koordinasi dan pelaporan APB Desa	BPKPAD	1 Bulan	70,000,000	BPKPAD	1 Bulan	77,000,000
18	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5,014,355,055			5,482,790,561
43	33. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH				5,014,355,055			5,482,790,561
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran			734,904,055			808,394,461
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang dikeluarkan			20,000,000			22,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik			67,000,000			73,700,000
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan kepegawaian			15,000,000			16,500,000
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Dinas Luar Daerah			300,000,000			330,000,000
5	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Penunjang Administrasi Perkantoran			332,904,055			366,194,461
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			125,000,000			137,500,000
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kondisi gedung kantor dalam keadaan baik			25,000,000			27,500,000
2	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jenis pemeliharaan rutin mobil jabatan			-			-
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam pemeliharaan rutin/berkala			60,000,000			66,000,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam pemeliharaan rutin/berkala			10,000,000			11,000,000
5	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan kantor			20,000,000			22,000,000
6	Pengadaan Mebeleur Kantor	Jumlah Mebeleur kantor			10,000,000			11,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya			138,058,000			151,863,800
1	Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur				23,842,000			26,226,200

2	Diklat Kehumasan dan Keprotokolatan	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat Kehumasan dan Keprotokolatan							-
3	Diklat Manajemen Pelayanan	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat							-
4	Diklat Tata Naskah dan Kearsipan	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat Tata Naskah dan Kearsipan							-
5	Bimtek Administrasi Kepegawaian	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Bimtek Administrasi Kepegawaian							-
6	Pengiriman Peserta Diklat Teknis Fungsional dan Bimtek Khusus	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat				114,216,000			125,637,600
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Keterpenuhan Disiplin Aparatur				130,990,450			144,089,495
1	Penegakan Disiplin Bagi PNS/PTT	Jumlah PNS dan PTT yang mendapat sanksi pelanggaran disiplin				80,990,450			89,089,495
2	Pemberian penghargaan bagi Aparat berprestasi	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan prestasi				50,000,000			55,000,000
3	Penegakan Kode Etik PNS	Jumlah PNS yang mendapat sanksi pelanggaran kode etik PNS							
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan				70,453,000			77,498,300
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RKA/DPA				15,000,000			16,500,000
2	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	RFK				12,413,000			13,654,300
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan Keuangan				18,040,000			19,844,000
4	Penatausahaan Keuangan	SPJ				-			-
5	Peningkatan Pengelolaan Barang	Data Aset				10,000,000			11,000,000
6	Penyusunan Renja SKPD	Renja SKPD				10,000,000			11,000,000
7	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur (SOP)				5,000,000			5,500,000
8	Penyusunan LAKIP	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)				-			-
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan				3,814,949,550			4,163,444,505
1	Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah CPNS				200,000,000			220,000,000
2	Pengiriman Peserta Diklat Struktural					-			-
	Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk. II	Jumlah Peserta Diklat PIM Tk. II				100,000,000			110,000,000
	Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk. III	Jumlah Peserta Diklat PIM Tk. III				132,750,000			146,025,000
3	Pelaksanaan Diklat Struktural					-			-
	Pelaksanaan Diklat PIM Tk. IV	Jumlah Peserta Diklat PIM Tk. IV				505,750,000			556,325,000
	Pelaksanaan Diklat Prajabatan Kategori Umum	Jumlah Peserta Diklat Prajabatan Kategori Umum				400,000,000			440,000,000
4	Pengambilan Sumpah/ Janji PNSD	Jumlah PNS yang mengambil sumpah/janjiPNSD				12,362,550			13,598,805
5	Proses administrasi penerbitan SK Tugas Belajar, penebitan SK Izin belajar dan Surat Keterangan peningkatan pendidikan	SK Tugas Belajar, SK Izin Belajar dan surat keterangan peningkatan pendidikan				15,000,000			16,500,000
6	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan penyelesaian pendidikan	Jumlah ASN Pemkab Kepulauan Selayar yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan penyelesaian pendidikan				88,869,000			97,755,900
7	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mahasiswa Tugas Belajar yang Menerima Bantuan	Pelaporan hasil monitoring, dan evaluasi kegiatan mahasiswa tugas belajar				25,000,000			27,500,000
8	Pengurusan dan Penerbitan KARIS KARSU PNS	KARIS-KARSU PNS				20,000,000			22,000,000
9	Pengurusan dan Penerbitan Kartu Pegawai bagi PNS	Kartu Pegawai				20,000,000			22,000,000
10	Penataan Administrasi Angka Kredit Tenaga Fungsional	Jumlah SK Pejabat Fungsional dan tertatanya AK Tenaga Fungsional				20,500,000			22,550,000
11	Pelaksanaan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah PNS yang mendapatkan Kenaikan Pangkat				80,000,000			88,000,000
12	Pemetaan Potensi Pegawai negeri Sipil	Peta potensi jabatan dan kepegangatan PNS				60,000,000			66,000,000
13	Pelaksanaan Proses Administrasi Pemberhentian/ Pensiun PNS	Jumlah PNS yang Pensiun				50,000,000			55,000,000
14	Pengurusan dan Penerbitan Kartu Peserta Taspen (KPT)	Jumlah PNS yang Kartu Taspennya telah diterbitkan				25,000,000			27,500,000
15	Pembuatan Daftar Urut Kepegangatan (DUK) PNSD	DUK Pegawai PNS Pemkab Kep.Selayar				25,000,000			27,500,000
16	Penyusunan Formasi	Susunan formasi PNS				25,000,000			27,500,000
17	Pemberian Tanda Kehormatan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Pengabdian bagi PNS	Jumlah PNSD Penerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya				80,000,000			88,000,000

